

Tumbuh Kuat dan Berkelanjutan



Pendahuluan

Laporan Tahunan PT Mandiri Tunas Finance Tahun 2023 ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Mandiri Tunas Finance yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan. Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis di mana Mandiri Tunas Finance menjalankan kegiatan usaha. Mandiri Tunas Finance tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan. Laporan Tahunan ini memuat kata “Perseroan”, “MTF”, “Mandiri Tunas Finance” yang didefinisikan sebagai PT Mandiri Tunas Finance yang menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang penyedia jasa pembiayaan kendaraan roda empat, pembiayaan alat berat, dan pembiayaan lainnya. Adakalanya kata “kami” digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Mandiri Tunas Finance secara umum.

Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh dalam situs web resmi Mandiri Tunas Finance dengan alamat www.mtf.co.id

Tentang Laporan Tahunan 2023 PT Mandiri Tunas Finance

Tujuan utama penyusunan Laporan Tahunan 2023 PT Mandiri Tunas Finance ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi Perseroan kepada otoritas terkait dengan menjadi sumber dokumentasi komprehensif yang berisikan informasi kinerja Perseroan dalam setahun. Informasi tersebut memuat dokumentasi lengkap yang menggambarkan profil Perseroan, kinerja operasional, pemasaran, dan keuangan. Informasi tentang tugas, peran, serta fungsi struktural organisasi Perusahaan yang menerapkan konsep *best practices* dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Selain itu, Laporan Tahunan ini juga bertujuan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan tentang Mandiri Tunas Finance dengan menyediakan informasi yang tepat, seimbang, dan relevan. Para pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh informasi yang memadai terkait kebijakan yang telah dan akan dilakukan serta kesuksesan pencapaian Perseroan pada tahun 2023. Laporan Tahunan Mandiri Tunas Finance 2023 disajikan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam buku yang berbeda dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas baik.

Penjelasan Tema



Tumbuh Kuat dan Berkelanjutan

Perekonomian Indonesia berangsur membaik melalui penghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah pada awal tahun 2023 yang berdampak pada peningkatan konsumsi masyarakat. Industri Multifinance Indonesia pun bertumbuh cepat yang didominasi oleh pembiayaan investasi, modal kerja dan pembiayaan multiguna. Sebagai salah satu pemain utama dalam industri *financing*, Mandiri Tunas Finance (MTF) mempersiapkan diri untuk memikat pasar dan menjadi yang terbaik.

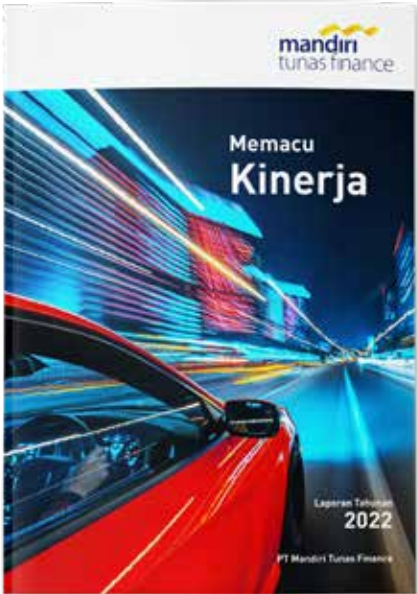
Melalui tema strategi “*Building New Foundation to Win the Market*” yang memiliki arti membangun fondasi baru dalam meningkatkan kinerja Perseroan agar dapat memenangkan pasar. Sebagai fondasi utama dari tema strategi tersebut yaitu pengembangan kondisi internal sebagai fondasi untuk tumbuh.

Terdapat 3 inisiatif strategi yang telah dijalankan hingga mencapai kinerja yang sangat baik, yaitu Menumbuhkan segmen bisnis *captive* yang berasal dari Bank Mandiri; Menjaga segmen bisnis yang berasal dari *dealer* dan *partner*; serta Mengoptimalkan *database* untuk memberikan nilai tambah pada pelanggan. Selain inisiatif strategi tersebut, tentunya pengembangan operasional Perseroan juga dilakukan dari beberapa aspek.

Salah satunya yaitu transformasi digital yang membawa perubahan pada perilaku pelanggan. Fasilitas MTF Mobile merupakan program digitalisasi Perseroan untuk melayani nasabah *existing* seperti pembayaran, pelunasan, klaim asuransi, kebutuhan lainnya terkait pembiayaan sehingga dapat meningkatkan bisnis pembiayaan kendaraan bermotor dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan yang baik.

Keseluruhan strategi tersebut dilakukan secara optimal untuk mewujudkan visi dan misi MTF menjadi Mitra Pembiayaan Terpercaya Anda, yang dapat memberikan pelayanan cepat dan mudah yang dapat diandalkan kepada pelanggan.

Kesinambungan Tema



Memacu Kinerja

Pada tahun 2022, PT Mandiri Tunas Finance berupaya mempercepat peningkatan kinerja yang telah direalisasikan melalui sejumlah inisiatif strategis, yang ditetapkan dengan tema “*Elevate Business to The Next Level*”. Prinsip dari inisiatif tersebut adalah upaya mencapai kinerja bisnis yang lebih dari yang telah diraih selama ini.

Setidaknya ada tiga inisiatif yang dijalankan. Pertama, optimalisasi bisnis *captive market* dengan perbaikan model kolaborasi dan bersinergi bersama Bank Mandiri melalui *referral* Mandiri Group, baik untuk nasabah perorangan maupun korporasi.

Kedua, mendorong akselerasi bisnis berbasis *dealership* yang merupakan kegiatan bisnis utama Perseroan. Hingga saat ini, *dealer* merupakan mitra utama untuk menyalurkan pembiayaan kepada pelanggan.

Ketiga, diversifikasi bisnis dan optimalisasi *database* melalui pembiayaan multiguna dan *chanelling fintech*. Strategi difokuskan dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang positif. Untuk mendukung strategi tersebut, Perseroan melakukan perluasan jaringan pemasaran melalui pengembangan tim *telemarketing* dan agen.

Inisiatif strategis yang telah direalisasikan terbukti memberikan dampak positif terhadap kinerja Perseroan, dengan tumbuh lebih baik. Perseroan meyakini hasil tersebut akan terus berkembang ke depan.



Bangkit Mengembalikan Performa

Setelah di tahun 2020 MTF mencatat kerugian yang cukup dalam, di tahun 2021 MTF kembali pada jalurnya semula dengan membukukan laba bersih mencapai Rp245,88 miliar, seiring kondisi industri otomotif dan penjualan mobil yang mulai bergairah serta kemampuan Perseroan dalam pengelolaan pembiayaan yang ekspansif dan efektif. Mengoptimalkan aktivitas *collection* penerimaan angsuran pelanggan untuk terus memperkuat *cashflow*, selektif dalam penyaluran pembiayaan serta pembiayaan yang bersumber dari *referral* entitas induk yang dapat memitigasi risiko dan tetap menjaga kualitas kredit. Langkah-langkah ini membawa MTF bangkit untuk mengembalikan performanya.

Makna Logo Perusahaan



Identitas brand Mandiri Tunas Finance terdiri dari simbol, huruf logo, warna, dan *tagline*. Secara sederhana, masing-masing *item* dapat dijelaskan sebagai berikut:



Bentuk Logo dengan Huruf Kecil

Penggunaan huruf kecil menandakan sikap ramah terhadap semua segmen bisnis yang dimasuki oleh Mandiri Tunas Finance dan menunjukkan keinginan yang besar untuk melayani seluruh nasabah dengan rendah hati (*customer centric*).

Huruf Biru Tua

Melambangkan rasa nyaman, tenang, menyejukkan, warisan luhur, stabilitas, serius (*respect*), dan tahan uji (*reliable*). Menyimbolkan profesionalisme, fondasi yang kuat, setia, dapat dipercaya, dan memiliki kehormatan yang tinggi.



Kuning Emas (Kuning ke Arah Oranye)

Warna logam mulia yang menandakan keagungan, kemuliaan, kemakmuran, dan kekayaan. Melambangkan keaktifan, kreatif, meriah, ramah, menyenangkan, dan nyaman.

Bentuk Gelombang Emas Cair

Sebagai simbol dari kekayaan finansial di Asia yang mengedepankan sifat *agile*, progresif, berpandangan ke depan, *excellence*, *flexible*, serta tangguh menghadapi segala tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang.

Pencapaian Terbaik 2023



Pendapatan

(dalam juta rupiah)

2023

Rp **4.752.900**

▲ 20,89% YoY

Pertumbuhan pendapatan bersumber dari kenaikan pendapatan pembiayaan konsumen sebesar 23,12%

2022 Rp **3.931.508**



Total Aset

(dalam juta rupiah)

2023

Rp **29.727.392**

▲ 25,28% YoY

Pertumbuhan total aset bersumber dari kenaikan piutang pembiayaan konsumen sebesar 36,85%

2022 Rp **23.728.966**



Laba Tahunan Berjalan

(dalam juta rupiah)

2023

Rp **1.161.101**

▲ 54,77% YoY

Pertumbuhan Laba bersumber dari kenaikan pendapatan sebesar 20,89% & efisiensi biaya sebesar 34,34%

2022 Rp **750.213**



Nilai Kontrak Pembiayaan Baru

(dalam juta rupiah)

2023

Rp **32.697.903**

▲ 17,75% YoY

Pertumbuhan nilai kontrak pembiayaan baru bersumber dari kenaikan pada pembiayaan mobil bekas sebesar 45,16% YoY (Nominal Pembiayaan)

2022 Rp **27.769.264**



Unit Kontrak Baru Pembiayaan Mobil

(miliar)

2023

116.255

▲ 11,54% YoY

Pertumbuhan unit kontrak baru untuk pembiayaan mobil bersumber dari kenaikan pembiayaan mobil bekas sebesar 30,11% YoY (Unit)

2022 **104.229**



NPL

(dalam persentase %)

2023

0,70

Perseroan selalu menjaga kualitas pembiayaan untuk menciptakan usaha keberlanjutan

2022 0,72



BOPO

(dalam persentase %)

2023

57,99

Perseroan terus menjaga efisiensi untuk pertumbuhan usaha

2022 61,56



Dividen

(dalam juta rupiah)

2023

Rp225.064

Perseroan membagikan dividen kepada pemegang saham atas hasil usaha tahun 2023

2022 Rp49.175



Nilai GCG oleh Pihak Corporate Governance Perception Index

(skor)

2023

83,1

Perseroan terus melakukan perbaikan untuk menciptakan GCG yang semakin baik

2022 82,3



Pembiayaan Kendaraan Listrik

(unit)

2023

Rp591.092

▲ 198,15% YoY

Perseroan terus mendukung keuangan berkelanjutan melalui pembiayaan kendaraan ramah lingkungan

2022 Rp198.254

Daftar Isi

2	Pendahuluan		
2	Tentang Laporan Tahunan 2023 PT Mandiri Tunas Finance		
3	Penjelasan Tema		
4	Kesinambungan Tema		
5	Makna Logo Perusahaan		
6	Pencapaian Terbaik 2023		
8	Daftar Isi		
01	Performa 2023		
12	Ikhtisar Data Keuangan Penting		
18	Ikhtisar Operasi		
18	Ikhtisar Saham		
19	Ikhtisar Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi		
20	Penghargaan dan Sertifikasi		
22	Peristiwa Penting		
02	Laporan Manajemen		
32	Laporan Komisaris		
36	Laporan Direksi		
44	Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 PT Mandiri Tunas Finance		
45	Surat Pernyataan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 PT Mandiri Tunas Finance		
03	Profil Perusahaan		
50	Informasi Umum dan Identitas Perusahaan		
51	Riwayat Singkat Perusahaan		
54	Jejak Langkah		
56	Visi, Misi, Nilai dan Budaya Perusahaan		
58	Bidang Usaha Serta Produk dan Jasa		
59	Keanggotaan dalam Asosiasi		
60	Struktur Organisasi		
62	Profil Dewan Komisaris		
66	Profil Direksi		
70	Profil Pejabat Eksekutif (Chief)		
73	Kepala Divisi dan/atau Jabatan Setingkat		
74	Demografi Karyawan		
77	Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal dan Manajemen Risiko		
81	Struktur dan Komposisi Pemegang Saham		
81	Informasi tentang Kepemilikan Saham Mandiri Tunas Finance oleh Manajemen Kunci		
85	Kronologis Penerbitan Saham		
85	Kronologis Penerbitan Efek Lainnya		
87	Informasi tentang Struktur Grup dan Kelompok Usaha, Entitas Anak, Entitas Asosiasi Serta <i>Joint Venture (JV)</i> dan <i>Special Purpose Vehicle (SPV)</i>		
87	Akuntan Publik		
88	Lembaga dan Profesi Penunjang		
90	Website Perusahaan		
92	Wilayah Operasional		
04	Analisis & Pembahasan Manajemen atas Kinerja Usaha		
116	Tinjauan Keuangan		
122	Kemampuan Perusahaan dalam Efisiensi dan Menghasilkan Keuntungan		
123	Kemampuan Membayar Utang		
125	Fasilitas Pembiayaan dan Tingkat Kolektibilitas Piutang		
128	Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal		
129	Ikatan yang Material Untuk Investasi Barang Modal		
129	Realisasi Investasi Barang Modal		
130	Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan		
130	Perbandingan Antara Target dan Realisasi, serta Proyeksi Satu Tahun ke Depan		
131	Prospek Usaha dan Proyeksi Kinerja Tahun 2024		
132	Kepatuhan Pembayaran Pajak		
133	Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal		
133	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum		
133	Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen		
134	Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi		

138	Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi	193	Organ Pendukung Dewan Komisaris
138	Transaksi Spot dan Derivatif	210	Organ Pendukung Direksi
138	Perubahan Peraturan Perundang-undangan terhadap Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir	237	Sistem Manajemen Risiko
139	Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir	243	Auditor Eksternal/Akuntan Publik
139	Informasi Kelangsungan Usaha	245	Sistem Pengendalian Internal
140	Tingkat Kesehatan Perusahaan	247	Perkara Penting
05	Tata Kelola Perusahaan	252	Tata Kelola Teknologi Informasi
144	Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	256	Kode Etik
144	Dasar dan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan	258	Pengendalian Gratifikasi
147	Struktur dan Mekanisme Corporate Governance	258	Kebijakan Antikorupsi
150	Sosialisasi dan Internalisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik	260	Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>)
150	Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Apresiasi di Tahun 2023	262	Informasi Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik
150	Penilaian: Evaluasi, Pemantauan, dan Peningkatan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	262	Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
153	Penilaian Pihak Eksternal oleh Corporate Governance Perception Index (CGPI)	268	Kepatuhan terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan: Kesesuaian terhadap Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan)
155	Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan yang Baik	06	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
164	Dewan Komisaris	286	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
171	Direksi	07	Laporan Keuangan
175	Transparansi Informasi Tentang Dewan Komisaris dan Direksi	290	Referensi POJK No. 29/POJK.04/2016 dan SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021
176	Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi		
178	Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi		
180	Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi		
183	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi		
189	Pengungkapan Hubungan Afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali		
190	Pengungkapan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi		
192	Pengungkapan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi		

01

Performa 2023





Ikhtisar Data Keuangan Penting

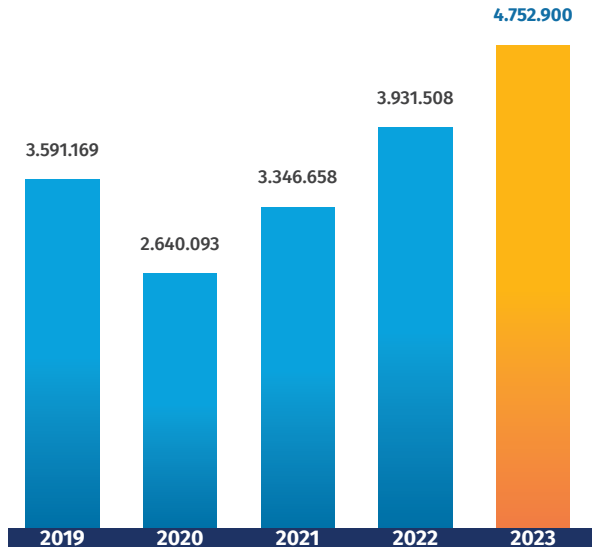
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

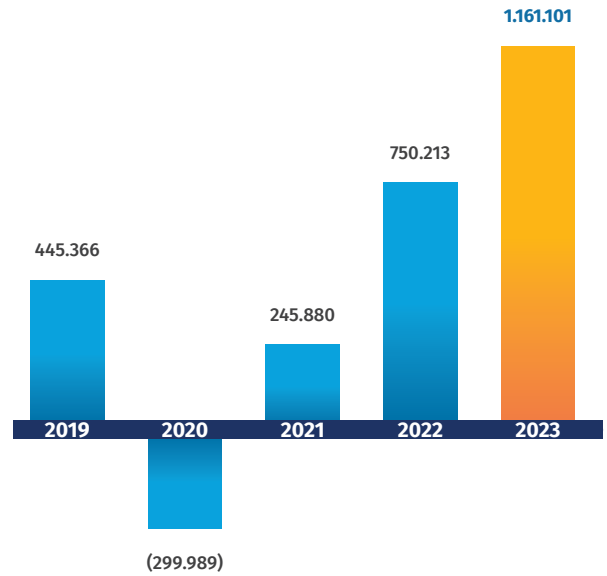
Keterangan	2023	2022	2021	2020	2019
Pendapatan					
Pembiayaan Konsumen	3.000.350	2.437.004	2.081.742	1.638.507	2.209.648
Sewa Pembiayaan	652.751	565.529	461.973	339.446	427.484
Anjak Piutang	909	9.715	16.637	20.471	8.567
Simpanan Bank	17.134	15.163	11.597	23.054	15.000
Lain-lain Neto	1.081.756	904.097	774.709	618.615	930.470
Total Pendapatan	4.752.900	3.931.508	3.346.658	2.640.093	3.591.169
Beban					
Beban Keuangan	(1.510.165)	(1.249.572)	(1.220.816)	(1.290.857)	(1.452.429)
Gaji dan Tunjangan	(802.194)	(823.406)	(567.134)	(490.707)	(537.854)
Umum dan Administrasi	(349.836)	(327.436)	(357.084)	(369.882)	(400.713)
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai					
Pembiayaan Konsumen	(697.613)	(487.604)	(750.111)	(779.850)	(561.340)
Sewa Pembiayaan	(7.050)	(49.556)	(71.189)	(45.610)	(22.871)
Anjak Piutang	9.057	(11.063)	(430)	(278)	(1.058)
Piutang Lain-lain	96.127	(18.877)	(70.543)	(33.119)	(17.745)
Total Beban	(3.261.674)	(2.967.514)	(3.037.307)	(3.010.303)	(2.994.010)
Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan	1.491.226	963.994	309.351	(370.210)	597.159
Pajak Penghasilan					
Beban Pajak Final	(3.427)	(3.033)	(2.319)	(4.611)	(3.000)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	1.487.799	960.961	307.032	(374.821)	594.159
Beban Pajak Penghasilan	(326.698)	(210.748)	(61.152)	(74.832)	(148.793)
Laba Tahun Berjalan	1.161.101	750.213	245.880	(299.989)	445.366
Distribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	1.161.101	750.213	245.880	(299.989)	445.366
Distribusikan Kepada Kepentingan non Pengendali	-	-	-	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak	798	(3.067)	37.435	20.094	(37.938)
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	1.161.899	747.146	283.315	(279.895)	407.428
Distribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	1.161.899	747.146	283.315	(279.895)	407.428
Distribusikan Kepada Kepentingan non Pengendali	-	-	-	-	-
Laba Per Saham Dasar (Nilai Rupiah Penuh)	464	300	98	(120)	178

Pendapatan

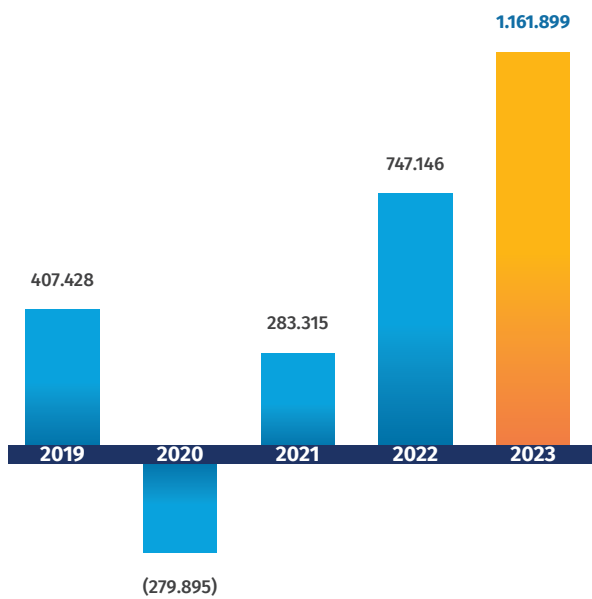
(Rp Juta)

**Laba Tahun Berjalan**

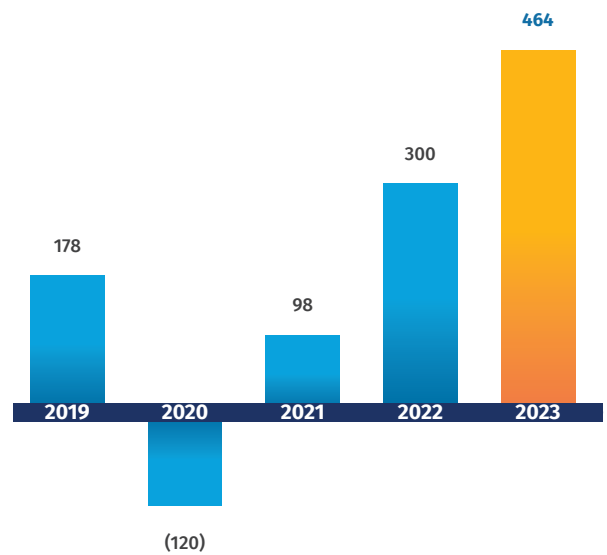
(Rp Juta)

**Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan**

(Rp Juta)

**Laba per Saham Dasar**

(Rp Penuh)



Neraca

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

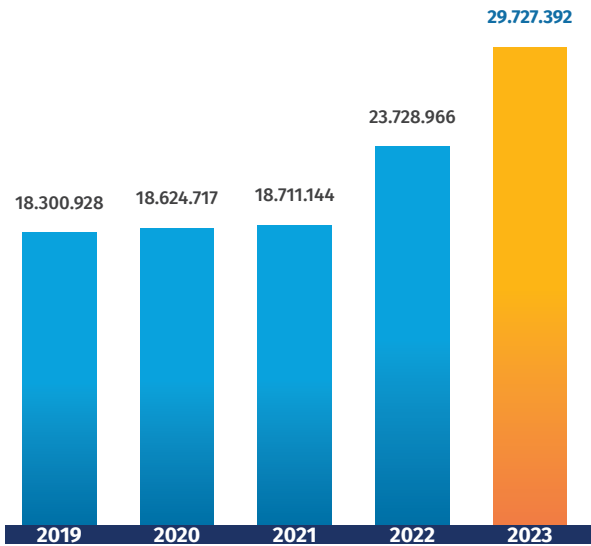
Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
ASET					
Kas dan Setara Kas					
Kas	18.194	13.602	7.748	11.182	6.869
Kas Pada Bank					
Pihak Ketiga	1.495	15.553	28.989	167.672	123.260
Pihak Berelasi	832.451	811.281	203.645	170.949	291.406
	852.140	840.436	240.382	349.803	421.535
Piutang Pembiayaan Konsumen					
Pihak Ketiga	22.698.175	16.666.569	13.209.267	14.106.400	13.849.802
Pihak Berelasi	11.542	7.846	7.287	6.831	6.663
	22.709.717	16.674.415	13.216.554	14.113.231	13.856.465
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(347.894)	(333.578)	(327.003)	(301.708)	(307.380)
	22.361.823	16.340.837	12.889.551	13.811.523	13.549.085
Piutang Sewa Pembiayaan					
Pihak Ketiga	5.416.865	5.782.025	4.784.845	3.580.405	3.055.071
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(69.293)	(138.679)	(129.789)	(92.737)	(7.982)
	5.347.572	5.643.346	4.655.056	3.487.668	3.047.089
Anjak Piutang					
Pihak Ketiga	35.758	42.469	153.232	165.847	116.650
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(436)	(9.493)	(930)	(500)	(1.171)
	35.322	32.976	152.302	165.347	115.479
Piutang Lain-lain					
Pihak Ketiga	119.669	89.923	75.047	93.773	82.396
Pihak Berelasi	547.483	499.942	463.294	335.454	723.381
	667.152	589.865	538.341	429.227	805.777
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(44.298)	(140.425)	(121.548)	(51.005)	(17.886)
	622.854	449.440	416.793	378.222	787.891
Aset Pajak Tangguhan	100.789	116.452	77.750	136.099	73.072
Piutang Derivatif	28.933	24.534	273	1.072	20.095
Aset Tetap	283.625	219.763	197.081	191.273	181.885
Aset Lain-lain					
Pihak Ketiga	93.432	60.931	81.856	103.710	103.025
Pihak Berelasi	902	251	100	-	1.772
TOTAL ASET	29.727.392	23.728.966	18.711.144	18.624.717	18.300.928

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
LIABILITAS					
Utang Usaha	1.017.137	702.291	601.051	499.376	516.540
Utang Lain-lain					
Pihak Ketiga	190.916	199.930	183.547	221.763	158.702
Pihak Berelasi	56.805	100.736	125.026	98.648	64.110
Utang Pajak Kini	112.000	125.498	7.506	-	23.336
Beban yang Masih Harus Dibayar					
Pihak Ketiga	257.626	308.087	189.374	179.965	247.713
Pihak Berelasi	4.472	3.535	3.333	3.186	2.183
Pinjaman Bank					
Pihak Ketiga	15.242.400	12.748.612	7.794.675	9.267.985	8.760.648
Pihak Berelasi	2.891.252	1.944.839	1.795.735	1.207.074	1.064.082
	18.133.652	14.693.451	9.590.410	10.475.059	9.824.730
Biaya Provisi yang Belum Diamortasi	(36.937)	(31.564)	(25.056)	(31.584)	(23.404)
	18.096.715	14.661.887	9.565.354	10.443.475	9.801.326
Surat Berharga yang Diterbitkan					
Pihak Ketiga	5.002.750	3.876.405	4.877.850	3.992.000	3.592.300
Pihak Berelasi	693.000	468.500	621.000	886.000	1.137.700
	5.695.750	4.344.905	5.498.850	4.878.000	4.730.000
Beban Emisi yang Belum Diamortisasi	(8.235)	(5.668)	(6.164)	(7.445)	(9.846)
	5.687.515	4.339.237	5.492.686	4.870.555	4.720.154
Utang Derivatif	-	-	-	64.738	169.989
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan	274.546	194.940	148.413	131.472	108.864
TOTAL LIABILITAS	25.697.732	20.636.141	16.316.290	16.513.178	15.812.917
EKUITAS					
Modal Saham					
Modal Disetor	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Penghasilan Komprehensif Lain:					
Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - Neto	(38.390)	(30.198)	(32.593)	(37.623)	(31.936)
Keuntungan/(Kerugian) Kumulatif atas Instrument Derivatif untuk Lindung Nilai Arus Kas - Neto	2.802	(6.188)	(726)	(33.131)	(58.912)
Saldo Laba					
Sudah Ditentukan Pengunaannya	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Belum Ditentukan Pengunaannya	3.765.248	2.829.211	2.128.173	1.882.293	2.278.859
TOTAL EKUITAS	4.029.660	3.092.825	2.394.854	2.111.539	2.488.011
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	29.727.392	23.728.966	18.711.144	18.624.717	18.300.928

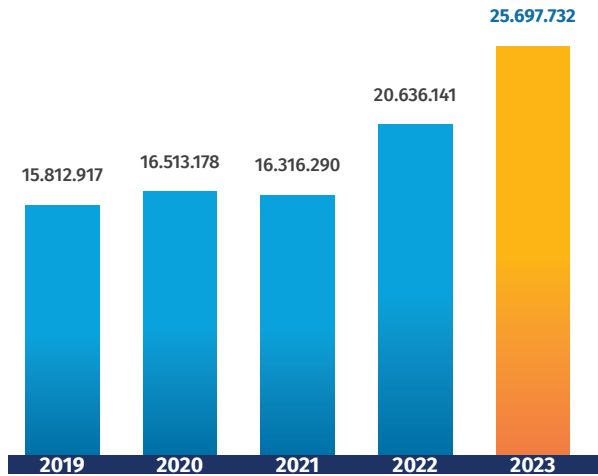
Total Aset

(Rp Juta)



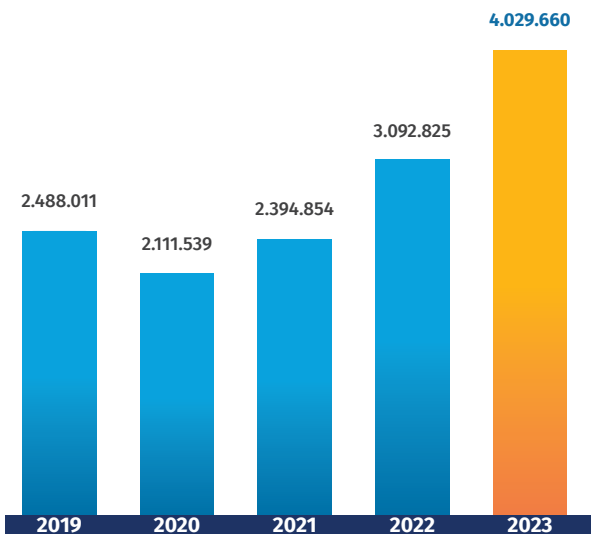
Total Liabilitas

(Rp Juta)



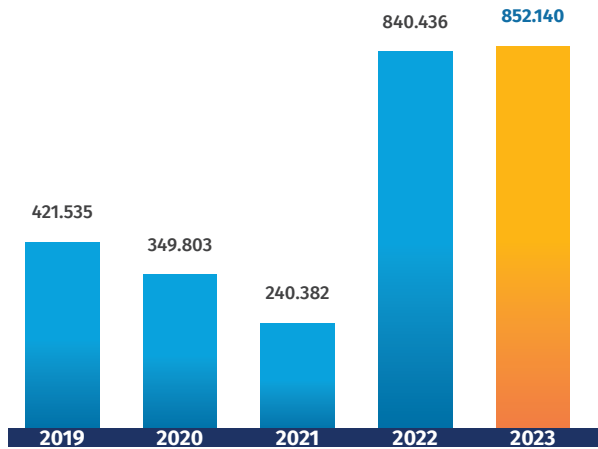
Total Ekuitas

(Rp Juta)



Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun

(Rp Juta)



Arus Kas

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(4.420.498)	(3.190.177)	225.754	(810.228)	(191.284)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(118.954)	(65.272)	(28.439)	(49.726)	(39.968)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	4.551.156	3.855.503	(306.736)	788.222	397.847
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	11.704	600.054	(109.421)	(71.732)	166.595
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	840.436	240.382	349.803	421.535	254.940
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	852.140	840.436	240.382	349.803	421.535

Rasio-rasio Keuangan

Dalam persen, kecuali dinyatakan lain

Uraian	Satuan	2023	2022	2021	2020	2019
Profitabilitas						
Imbal Hasil Aset	%	4,34	3,54	1,33	(1,66)	2,49
Imbal Hasil Aset*	%	5,00	4,05	1,65	(1,99)	3,26
Imbal Hasil Rata-rata Aset*	%	5,58	4,54	1,67	(2,05)	3,34
Imbal Hasil Ekuitas	%	28,81	24,26	10,27	(14,21)	17,90
Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas	%	32,60	27,34	10,67	(12,45)	19,48
Jumlah Pendapatan/Jumlah Aset	%	15,99	16,57	17,89	14,18	19,62
Laba Sebelum Pajak Penghasilan/ Pendapatan	%	31,38	24,52	9,24	(14,02)	16,63
Laba Bersih Setelah Pajak Tahun Berjalan/Pendapatan	%	24,43	19,08	7,35	(11,36)	12,40
Rasio Efisiensi Biaya	%	34,34	43,08	48,99	72,26	47,68
Rasio Lancar	(kali)	1,10	1,32	1,04	1,03	1,12
Aset Produktif						
Piutang Pembiayaan Bersih Kelolaan	(Rp-juta)	53.061.308	45.122.742	39.733.077	41.622.865	46.842.459
Piutang Pembiayaan-pembiayaan Bersama	(Rp-juta)	24.898.967	22.623.833	21.578.445	23.763.382	29.814.273
Piutang Bermasalah Kelolaan	%	0,70	0,72	0,97	0,78	0,75
Likuiditas						
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	(kali)	0,86	0,87	0,87	0,89	0,86
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	(kali)	6,38	6,67	6,81	7,82	6,36
Utang yang Berbunga/Jumlah Ekuitas**	(kali)	5,90	6,14	6,29	7,25	5,84

Keterangan:

*) Menggunakan perhitungan laba sebelum pajak

**) Gearing Ratio

Ikhtisar Operasi

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
Unit Kontrak Baru Berdasarkan Jenis Pembiayaan (Unit)					
Mobil Baru	88.002	82.515	70.628	59.705	101.939
Mobil Bekas	28.253	21.714	15.310	9.459	12.761
Motor	378	322	390	550	406
Lainnya	5.238	34.539	7.796	63	50.943
Jumlah	121.871	139.090	94.124	69.777	166.049
Nilai Kontrak Pembiayaan Berdasarkan Jenis Pembiayaan (Rp-Juta)					
Mobil Baru	27.253.703	23.817.707	17.616.230	15.096.279	26.310.927
Mobil Bekas	5.371.351	3.700.357	2.882.289	1.585.676	2.219.196
Motor	47.561	33.470	34.330	33.920	52.373
Lainnya	25.288	217.730	87.715	23.681	197.146
Jumlah	32.697.903	27.769.264	20.620.564	16.739.556	28.779.642
Ikhtisar Organisasi					
Jumlah Nasabah	338.579	256.192	259.463	277.981	302.229
Jumlah Cabang	124	99	100	101	102
Jumlah Sumber Daya Manusia	3.328	3.306	3.236	3.395	3.581

Ikhtisar Saham

Hingga akhir tahun 2023, MTF tidak menerbitkan sahamnya untuk dimiliki oleh publik maupun oleh manajemen atau karyawan. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait perdagangan saham yang memuat:

1. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;
2. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;
3. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;
4. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan dan volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir; dan
5. Informasi penghentian sementara perdagangan saham dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Jumlah saham Perseroan sebanyak 2.500.000.000 lembar saham, dengan kepemilikan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 1.275.000.000 lembar saham atau 51,00% dan PT Tunas Ridean sebanyak 1.225.000.000 lembar saham atau 49,00%.

Informasi Tentang Aksi Korporasi

Di sepanjang tahun 2023, MTF tidak melakukan aksi korporasi seperti aksi pemecahan saham (*stock split*),

penggabungan saham (*reverse stock*), saham bonus, maupun penurunan nilai nominal saham.

Dividen Saham

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandiri Tunas Finance Tahun Buku 2022 (Keputusan Sirkuler) yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juni 2023, Pemegang Saham memutuskan sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 sebesar Rp750.213.273.330 (tujuh ratus lima puluh miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sejumlah 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan ditetapkan sebagai dividen atau sejumlah Rp225.063.981.999 (dua ratus dua puluh lima miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - b. Sejumlah 70% (tujuh puluh persen) dari laba bersih Perseroan ditetapkan sebagai laba ditahan sebesar Rp525.149.291.331 (lima ratus dua puluh lima miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara alokasi laba bersih Perseroan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perihal	Pembayaran Dividen di Tahun 2023 (Dividen Saham Tahun Buku 2022)	Pembayaran Dividen di Tahun 2022 (Dividen Saham Tahun Buku 2021)
Jumlah Dividen yang Dibagikan (Rp)	225.063.981.999	49.175.974.827
Dividen Kas per Saham (Rp)	90,03	19,67
Rasio Pembagian Dividen (%)	30%	20%
Tanggal Pengumuman	28 Juni 2023	17 Juni 2022
Tanggal Pembayaran	6 Juli 2023	24 Juni dan 12 Juli 2022

Ikhtisar Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi

Obligasi

Pada tahun 2023, Perseroan mengeluarkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2023 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2023. Berikut tabel obligasi yang masih beredar serta masih dalam status belum lunas per 31 Desember 2023. Seluruh obligasi yang diterbitkan Perseroan dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain obligasi di bawah, Perseroan tidak menerbitkan efek apa pun dalam bentuk lain.

Tahun	Nama Obligasi	Peringkat Penerbitan	Jumlah (Rp)	Tingkat Bunga	Frekuensi Pembayaran Bunga	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Status
2019	Obligasi Berkelanjutan IV MTF Tahap I Seri B	idAA+	200.000.000.000	9,75% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	8 Januari 2019	8 Januari 2024	Aktif/Belum Lunas
	Obligasi Berkelanjutan IV MTF Tahap II Seri B	idAA+	658.000.000.000	9,50% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	26 Juli 2019	26 Juli 2024	Aktif/Belum Lunas
2020	Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I Seri B	idAA+	386.000.000.000	8,60% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	13 Agustus 2020	13 Agustus 2025	Aktif/Belum Lunas
2021	Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap II Seri A	idAA+	915.150.000.000	7,00% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	20 Mei 2021	20 Mei 2024	Aktif/Belum Lunas
	Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap II Seri B	idAA+	485.700.000.000	7,65% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	20 Mei 2021	20 Mei 2026	Aktif/Belum Lunas
2022	Obligasi Berkelanjutan V Tahap III MTF Seri A	idAA+	851.440.000.000	5,90% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	23 Februari 2022	23 Februari 2025	Aktif/Belum Lunas
	Obligasi Berkelanjutan V Tahap III MTF Seri B	idAA+	376.615.000.000	6,75% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	23 Februari 2022	23 Februari 2027	Aktif/Belum Lunas
2023	Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I MTF Seri A	idAAA	439.660.000.000	6,00% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	11 Juli 2023	11 Juli 2026	Aktif/Belum Lunas
	Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I MTF Seri B	idAAA	252.075.000.000	6,25% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	11 Juli 2023	11 Juli 2028	Aktif/Belum Lunas
	Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II MTF Seri A	idAAA	804.175.000.000	6,50% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	27 September 2023	27 September 2026	Aktif/Belum Lunas
	Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II MTF Seri B	idAAA	326.935.000.000	6,75% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	27 September 2023	27 September 2028	Aktif/Belum Lunas

Keterangan: Hasil peringkat tersebut merupakan peringkat yang ditetapkan terhadap obligasi pada saat awal pendaftaran obligasi yang dilakukan oleh PEFINDO.

Penghargaan dan Sertifikasi

Penghargaan



Mandiri Subsidiaries Award 2022

The Most Profitable Subsidiaries of The Year 2022



The Best CEO 2022

Pinohadi G. Sumardi as Best CEO with Distinction Category Company with > 1000 Employees



Marketeers Youth Choice Award 2023

Leasing Company Pilihan Gen Z



TOP CSR Awards 2023

PT Mandiri Tunas Finance sebagai Top CSR Awards 2023 #Star 4



TOP CSR Awards 2023

Pinohadi G. Sumardi sebagai Top Leader on CSR Commitment 2023



Marketeers Omni Brands of The Year 2023

Brand Of The Year 2023 Online - Offline Activation



BUMN Entrepreneurial Marketing Awards 2023

Bronze Winner
The Most Promising Company in Tactical Marketing (Kategori Subholding & Anak Perusahaan)



BUMN Entrepreneurial Marketing Awards 2023

Bronze Winner
The Most Promising Company in Branding Campaign (Kategori Subholding & Anak Perusahaan)



Infobank 12th Digital Brand Awards 2023

The 3rd Best Multifinance Company



The 8th Annual SPEX2 DX Awards 2023
The Best Company in Performance Growth in Financing Industry



Sustainable Marketing Excellence 2023
Automotive Financing of The Year 2023



Indonesia Best BUMN Awards 2023
Best SOE 2023 with Top Financial Performance and Financing Business Diversification Category Subsidiary



Top Digital Awards 2023
PT Mandiri Tunas Finance sebagai Top Digital Implementation 2023 #Star 5



Top Digital Awards 2023
Pinohadi G. Sumardi sebagai Top Leader on Digital Implementation 2023



Infobank Top 100 CEO & The Next 200 Leaders Forum 2023
Pinohadi G. Sumardi sebagai Top 100 CEO 2023



Infobank Top 100 CEO & The Next 200 Leaders Forum 2023
William Francis Indra sebagai The Next 200 Leaders 2023



Indonesia Good Corporate Governance Award 2023
Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)



Indonesia Customer Service Champions 2023
Excellent in Indonesia Customer Service Champions 2023



Indonesia Information Technology Award 2023
The Best IT for Multifinance Company 2023 - Platinum Award (A) Very Excellent

Sertifikasi



ISO 27001
Information Security Management System, PT TUV Nord Indonesia 22 Mei 2023 - 25 Oktober 2025

Peristiwa Penting



20 Januari 2023
Executive Lounge, Graha Mandiri, Jakarta

Executive Interview Bapak Pinohadi G. Sumardi dengan Majalah SWA Media

Interview eksklusif dari SWA Media bersama Mandiri Tunas Finance membahas terkait pencapaian kinerja MTF tahun 2022 dan kiat dalam bekerja menurut Direktur Utama Mandiri Tunas Finance, Pinohadi G. Sumardi. *Interview* dilakukan di Executive Lounge, Graha Mandiri, Jakarta pada 20 Januari 2023.



6 Februari 2023
Hall Lantai 3A, Graha Mandiri, Jakarta

Syukuran HUT ke-14 MTF dan Peresmian Ruang Kerja Baru MTF

Mandiri Tunas Finance merayakan Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) MTF ke-14 Tahun dengan melakukan potong tumpeng dan doa bersama di Hall Lantai 3A, Graha Mandiri, Jakarta pada 6 Februari 2023. Dalam Syukuran HUT MTF ke 14 terdapat agenda Peresmian Ruang Kerja Baru MTF yang dilakukan di Head Office MTF.



14 Februari 2023
Customer Experience Lounge MTF, Jakarta

Press Conference Launching MTF Digital Service

Mandiri Tunas Finance melakukan terobosan inovasi dengan menghadirkan layanan MTF Digital Service. Layanan ini dapat diakses pelanggan melalui Digital Service Point dan aplikasi *mobile*. Digital service ini dilengkapi dengan *vending machine document* yang dapat digunakan oleh pelanggan untuk melakukan pengambilan BPKB guna mewujudkan layanan MTF yang *fast* dan *easy*. Pelaksanaan Press Conference Launching MTF Digital Service diselenggarakan di Customer Experience Lounge MTF, Jakarta pada 14 Februari 2023.



20 Februari 2023
Jakarta Theater Thamrin, Jakarta

Rakernas MTF 2023 dan Perayaan HUT ke-14 Tahun MTF

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MTF 2023 dihadiri oleh jajaran Komisaris, jajaran Direksi, Kepala Divisi, Kepala Wilayah, Deputi Kepala Wilayah, Deputi Kepala Divisi, Kepala Departemen, serta Kepala Cabang MTF seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta Theater Thamrin, Jakarta pada 20 Februari 2023. Pelaksanaan Rakernas ditutup dengan Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 MTF yang dihadiri seluruh karyawan Head Office.



22 Februari 2023
Auditorium Plaza Mandiri Lantai 3, Plaza Mandiri, Jakarta

Penerimaan Penghargaan Mandiri Subsidiaries Award 2022

Mandiri Tunas Finance meraih penghargaan pada ajang Mandiri Subsidiaries Award 2022 yang diselenggarakan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai The Most Profitable Subsidiaries Of The Year 2022. Penghargaan diterima secara langsung oleh Pinohadi G. Sumardi selaku Direktur Utama Mandiri Tunas Finance di Plaza Mandiri, Jakarta pada 22 Februari 2023.



23 Februari 2023
Masjid Endah Andansih, Purwakarta

CSR Sumbangan Karpet Masjid Endah Andansih di Purwakarta

Kegiatan CSR Mandiri Tunas Finance dalam bidang keagamaan dengan melakukan pemberian peralatan ibadah berupa karpet panjang masjid di Masjid Endah Andansih, Purwakarta pada 23 Februari 2023.



4 Maret 2023
Manson Pine, Kota Baru Parahyangan, Bandung

5th Indonesia International Merceday-Benz

Mandiri Tunas Finance menjadi sponsor utama dalam kegiatan khusus pencinta Mercedes-Benz dengan menghelat 5th Indonesia International Merceday-Benz yang diselenggarakan di Manson Pine, Kota Baru Parahyangan, Bandung pada 4 Maret 2023. Dalam event tersebut, Mandiri Tunas Finance juga mengeluarkan Promo Special Event 5th Merceday-Benz Khusus Nasabah Reguler Customer Perorangan MTF Premium.



11 Maret 2023
Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta

Penerimaan Penghargaan Marketeers Youth Choice Award 2023

Melalui berbagai kampanye pemasaran dan penjualan di kanal digital, serta pelaksanaan MTF VirtuFest, Mandiri Tunas Finance berhasil meningkatkan jumlah nasabah baru dari generasi muda dan terbukti dengan meraih penghargaan pada ajang Marketeers Youth Choice Award 2023 yang diselenggarakan oleh Marketeers Media sebagai Leasing Company Pilihan Gen Z.



29 Maret & 3 April 2023
Jalan Imam Bonjol, Depan Gedung Graha Mandiri, Jakarta

MTF Berbagi Takjil Ramadhan 2023

Kegiatan CSR Mandiri Tunas Finance dalam rangka Bulan Ramadhan 1444 H bertepatan "Mari sebarkan kebaikan di bulan yang penuh berkah ini" dengan melakukan pembagian takjil untuk para pengendara dan pejalan kaki di sepanjang Jalan Imam Bonjol Depan Gedung Graha Mandiri, Jakarta selama 2 hari pemberian pada 29 Maret dan 3 April 2023.



6 April 2023
Hall Lantai 3A, Graha Mandiri, Jakarta

Executive Interview Bapak William Francis Indra dengan Marketeers

Interview eksklusif dari Marketeers Media bersama Mandiri Tunas Finance membahas terkait strategi bisnis MTF sebelum pandemi COVID-19 dan pascapandemi hingga mencetak rekor laba tertinggi sepanjang sejarah berdirinya Perusahaan. Interview dilakukan bersama William Francis Indra selaku Direktur Mandiri Tunas Finance di Hall Lantai 3A, Graha Mandiri, Jakarta pada 6 April 2023.



6 April 2023
Hall Lantai 3A, Graha Mandiri, Jakarta

Kajian Ramadhan, Buka Puasa Bersama dan Santunan Yatim Piatu MTF 2023

Kegiatan Bulan Ramadhan 1444 H di Mandiri Tunas Finance dihiasi dengan penyelenggaraan Kajian Ramadhan, Buka Puasa Bersama, dan Santunan Yatim Piatu MTF 2023. Agenda kegiatan berisikan Talkshow Ramadhan bertemakan "Meneladani Akhlak Rasulullah SAW" bersama Syekh Ahmad Al Misry dilakukan via Zoom Meeting. Pelaksanaan kajian ditutup dengan Buka Bersama MTF secara *hybrid* melalui pembagian Bingkisan Berbuka dan Ramadhan Kit ke seluruh karyawan MTF di Head Office dan Fleet.



6 April 2023
CGV FX Sudirman, Jakarta

Penerimaan Penghargaan Marketeers Omni Brands of The Year 2023

Mandiri Tunas Finance kembali meraih penghargaan pada ajang Marketeers Omni Brands of The Year 2023 yang diselenggarakan oleh Marketeers Media sebagai Brand Of The Year 2023.



12 April 2023
Shangri-La, Jakarta

Penerimaan Penghargaan Infobank 12th Digital Brand Awards 2023

Mandiri Tunas Finance kembali meraih penghargaan pada ajang Infobank 12th Digital Brand Awards 2023 yang diselenggarakan oleh Infobank sebagai The 3rd Best Multifinance Company dengan Kategori Perusahaan Pembiayaan dengan Aset >10 Triliun.



17 Mei 2023
Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta

Press Conference PEVS 2023

Sebagai bentuk dukungan kepada program Pemerintah dalam mengembangkan industri kendaraan listrik di Indonesia, Mandiri Tunas Finance hadir secara *offline* pada ajang pameran otomotif mobil listrik Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2023 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta pada 17 Mei 2023. Pada ajang pameran ini, MTF menjadi Official Leasing Partner memberikan berbagai penawaran khusus untuk pembelian mobil listrik baru, serta penawaran menarik lainnya dari multiguna atau CashAja.



6 Juni 2023
Assembly Hall Lantai 10, Menara Mandiri 2, Jakarta

Investor Gathering 2023 PT Mandiri Tunas Finance

Mandiri Tunas Finance menyelenggarakan Investor Gathering Tahun 2023 sebagai momen paparan kinerja Perusahaan serta menjalin relasi dengan investor untuk dapat bersinergi dalam kerjasama positif ke depan.



7 Juni 2023
Raffles Hotel, Jakarta

Penerimaan Penghargaan Top CSR Awards 2023

Mandiri Tunas Finance mendapatkan 2 penghargaan sekaligus pada ajang Top CSR Awards 2023 yang diselenggarakan oleh Top Business sebagai Top CSR Awards 2023 #STAR 4 dan Direktur Utama Mandiri Tunas Finance, Pinohadi G. Sumardi menerima penghargaan sebagai Top Leader on CSR Commitment 2023.



14 Juni 2023
Grand Atrium Kota Kasablanka, Jakarta

Penerimaan Penghargaan BUMN Entrepreneurial Marketing Awards 2023

Mandiri Tunas Finance mendapatkan 2 penghargaan sekaligus pada ajang BUMN Entrepreneurial Marketing Awards 2023 yang diselenggarakan oleh Marketeers sebagai Bronze Winner The Most Promising Company in Tactical Marketing dan Branding Campaign untuk Kategori Subholding & Anak Perusahaan.



18 Juni 2023
Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta

Mandiri Jogja Marathon 2023

Mandiri Tunas Finance sebagai salah satu perusahaan anak Bank Mandiri turut mendukung acara Mandiri Jogja Marathon 2023 sebagai bentuk kolaborasi apik Mandiri Group. Peserta marathon dan masyarakat umum juga dapat mengunjungi booth Mandiri Tunas Finance untuk berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik dengan mengikuti *games* yang telah disediakan. *Fun spinwheel* dan ikon *superheroes* lokal kebanggaan masyarakat Jawa, Gatotkaca, turut dihadirkan MTF khusus untuk Mandiri Jogja Marathon 2023.



29 Juni 2023
Griya Mandiri Cilandak, Jakarta

MTF Berqurban Hari Raya Idul Adha

Perayaan Idul Adha 1444 H melalui Program Meraih Taqwa dengan Berbagi Kurban Tahun 2023. Mandiri Tunas Finance berqurban hewan sapi seberat 900 kg untuk dapat didistribusikan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan daging kurban di wilayah Jabodetabek.



6 Juli 2023
JS Luwansa Hotel, Jakarta

Penerimaan Penghargaan The 8th Annual SPEX2 DX Awards 2023

Mandiri Tunas Finance meraih penghargaan pada ajang The 8th Annual SPEX2 DX Awards 2023 yang diselenggarakan oleh Majalah Kontan sebagai The Best Company in Performance Growth in Financing Industry. Penghargaan diterima secara langsung oleh B. Perana Citra Ketaren selaku Chief AR Management & Digital Mandiri Tunas Finance.



12 Juli 2023
CGV FX Sudirman, Jakarta

Penerimaan Penghargaan Sustainable Marketing Excellence 2023

Berkat keberhasilan menjadi Official Leasing Partner Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2023 dan memberikan dampak pada *economy enhancement*, *people empowerment*, dan *planet reservation*, Mandiri Tunas Finance meraih penghargaan pada ajang Marketeers Sustainable Marketing Excellence (SME) Award 2023 yang diselenggarakan oleh Marketeers Media sebagai Green Automotive Financing of the Year. Penghargaan diterima secara langsung oleh Afri Feder Fauzi selaku Chief Marketing Mandiri Tunas Finance.



12 Juli 2023
Menara Mandiri, Jakarta

Penerimaan Penghargaan dalam acara Mandiri ESG Festival

Mandiri Tunas Finance meraih penghargaan pada ajang Mandiri ESG Festival yang diselenggarakan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penghargaan diterima secara langsung oleh Pinohadi G. Sumardi selaku Direktur Utama Mandiri Tunas Finance.



10-11 Agustus 2023
Best Western Premier Panbil dan Palm Springs Golf & Country Club, Batam

Board Forum Q2 2023 Mandiri Group

Mandiri Tunas Finance dengan bangga menjadi tuan rumah pelaksanaan Board Forum Mandiri Group Kuartal Kedua Tahun 2023 yang dilaksanakan pada 10-11 Agustus 2023 berlokasi di Best Western Premier Panbil, Batam. Board Forum Q2 2023 bertemakan "Empowering Indonesia's Ascent: Mandiri Group's Role in the Emergence of a Global Economic Leader". Kegiatan yang diikuti oleh seluruh perusahaan anak Bank Mandiri ini ditutup dengan kegiatan Mandiri Group Fun Golf Tournament.



11 Agustus 2023
Panbil Nature Reserve, Batam

ESG Kepedulian Lingkungan melalui Penanaman Pohon MTF

Sebagai langkah lanjutan Program Kepedulian Lingkungan pada kegiatan Board Forum Q2 Tahun 2023 Mandiri Group pada Agustus 2023, Mandiri Tunas Finance berkomitmen pada program Environmental, Social, and Governance (ESG) dengan menanam total 1.200 bibit pohon.



25 Agustus 2023
Menara Mandiri, Jakarta

Porseni Bank Mandiri 2023

Mandiri Tunas Finance turut berpartisipasi dalam rangkaian acara Mandiri Porseni 2023. Opening ceremony Porseni, dibuka dengan Parade Defille seluruh atlet dan kontingen di Menara Mandiri pada 25 Agustus 2023. Salah satu kategori penghargaan yang diterima Mandiri Tunas Finance dalam ajang Porseni Bank Mandiri 2023 adalah Juara 1 Lomba Basket Putra.



4 September 2023
Graha Mandiri, Jakarta, dan seluruh cabang MTF

Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2023

Mandiri Tunas Finance kembali mengadakan Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2023 pada 4 September 2023. MTF memberikan pelayanan istimewa kepada seluruh pelanggan MTF bertepatan "Senyum Pelanggan, Senyum Kami Juga" dengan harapan seluruh pelanggan tersenyum melalui kepuasan layanan yang diberikan MTF. Untuk mendukung percepatan penggunaan mobil listrik sesuai dengan strategi pemerintah dalam penerapan ESG, MTF juga turut menyediakan display unit serta test drive mobil listrik di Graha Mandiri beserta dengan promo dan penawaran spesial Harpelnas 2023 untuk mobil konvensional dan listrik.



27 September 2023
Le-Meridien Hotel, Jakarta

Penerimaan Penghargaan Indonesia Best BUMN Awards 2023

Mandiri Tunas Finance meraih penghargaan pada ajang Indonesia Best BUMN Awards 2023 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi sebagai Best SOE 2023 with Top Financial Performance and Financing Business Diversification dengan Kategori Subsidiary.



7-8 Oktober 2023
Lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta

Mandiri Karnaval 2023

Dalam rangka Hari Ulang Tahun Bank Mandiri ke 25, Mandiri Tunas Finance turut serta dalam kegiatan Mandiri Karnaval 2023 dengan *open booth vehicle show* dan turut menerbitkan promo spesial Ulang Tahun Bank Mandiri. Pelaksanaan *vehicle show* berlangsung selama 2 hari pada 7-8 Oktober 2023.



7-8 Oktober 2023
Lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta

ESG Pemberian Pohon Bersama Mandiri Group

Dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk mengurangi polusi udara di Indonesia khususnya Provinsi DKI Jakarta, Mandiri Tunas Finance berkomitmen pada program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan memberikan 2.500 bibit pohon kepada masyarakat sekitar bersama Mandiri Group. Pemberian bibit pohon berlangsung selama 2 hari pada 7-8 Oktober 2023.



13 Oktober 2023
Palembang Indah Mall, Palembang

Literasi dan Edukasi APPI Multifinance Day 2023

Mandiri Tunas Finance berpartisipasi dalam kegiatan Multifinance Day 2023 sebagai wujud peran aktif Perusahaan dalam penerapan literasi dan edukasi pembiayaan. Hal ini sejalan dengan pemenuhan kewajiban kegiatan edukasi dan inklusi keuangan sesuai dengan POJK No. 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi & Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat.



18 Oktober 2023
Marina Convention Center, Semarang

Press Conference GIIAS Semarang 2023

Mandiri Tunas Finance kembali hadir dan menjadi Official Leasing Partner pada ajang pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) tahun 2023. Berlokasi di Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah yang berlangsung pada tanggal 18-22 Oktober 2023. Pameran ini merupakan seri penutup rangkaian GIIAS tahun 2023 dan kali kedua diselenggarakan di Kota Semarang. MTF yang turut mendukung pameran tersebut, memberikan berbagai penawaran spesial serta program dan promo menarik untuk pembelian mobil baru dan pembiayaan multiguna atau CashAja.



23 November 2023
Amptheater Customer Experience Lounge, Graha Mandiri, Jakarta

Donor Darah MTF 2023

Guna membantu sesama dan menurunkan risiko penyakit, Mandiri Tunas Finance menyelenggarakan kegiatan CSR Donor Darah yang bertempat di Head Officer MTF, Graha Mandiri, Jakarta dan pendonor terbuka untuk umum maupun karyawan MTF.



4 Desember 2023
Raffles Hotel, Jakarta

Penerimaan Penghargaan Top Digital Awards 2023

Mandiri Tunas Finance kembali mendapatkan 2 penghargaan sekaligus pada ajang Top Digital Awards 2023 yang diselenggarakan oleh IT Works sebagai Top Digital Impementations 2023 #STARS 5 dan Direktur Utama Mandiri Tunas Finance, Pinohadi G. Sumardi menerima penghargaan sebagai Top Leader on Digital Implementation 2023. Penghargaan diterima secara langsung oleh Pinohadi G. Sumardi selaku Direktur Utama Mandiri Tunas Finance dan B. Perana Citra Ketaren selaku Chief AR Management & Digital di Raffles Hotel, Jakarta pada 4 Desember 2023.



5 Desember 2023
Four Seasons Hotel, Jakarta

Penerimaan Penghargaan Infobank Top 100 CEO & The Next 200 Leaders Forum 2023

Mandiri Tunas Finance kembali mendapatkan 2 penghargaan sekaligus pada ajang Infobank Top 100 CEO & The Next 200 Leaders Forum 2023 yang diselenggarakan oleh Infobank. Direktur Utama Mandiri Tunas Finance, Pinohadi G. Sumardi berhasil menerima penghargaan sebagai Top 100 CEO 2023. Selain itu, Direktur Mandiri Tunas Finance, William Francis Indra mendapatkan pula penghargaan The Next 200 Leaders Forum 2023.



18 Desember 2023
Paul Bakery, Pondok Indah Mall 3, Jakarta

Press Conference MTF Autofiesta Jakarta 2023

Mandiri Tunas Finance kembali menyelenggarakan pameran otomotif tahunan bertajuk MTF Autofiesta. Berlokasi di Pondok Indah Mall (PIM) 3 - Atrium Barat, MTF mengadakan event Autofiesta Jakarta 2023 dari tanggal 18-24 Desember 2023. MTF bekerja sama dengan beberapa dealer rekanan untuk menampilkan *display* unit mobil di area pameran, sehingga nasabah dapat memilih kendaraan sesuai kebutuhan. Melalui MTF Autofiesta, MTF dapat membantu mendorong pertumbuhan penjualan otomotif dan berkontribusi untuk masa depan industri otomotif Indonesia.



20 Desember 2023
Executive Lounge, Graha Mandiri - Zoom Meeting

Direksi Mengajar Bapak William Francis Indra Direktur MTF Universitas Sebelas Maret

Direksi Mengajar kembali diselenggarakan Mandiri Tunas Finance pada tahun 2023 kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Solo. Pembahasan terkait industri multifinance menjadi fokus pada Direksi Mengajar yang disampaikan oleh William Francis Indra selaku Direktur Mandiri Tunas Finance via Zoom Meeting.



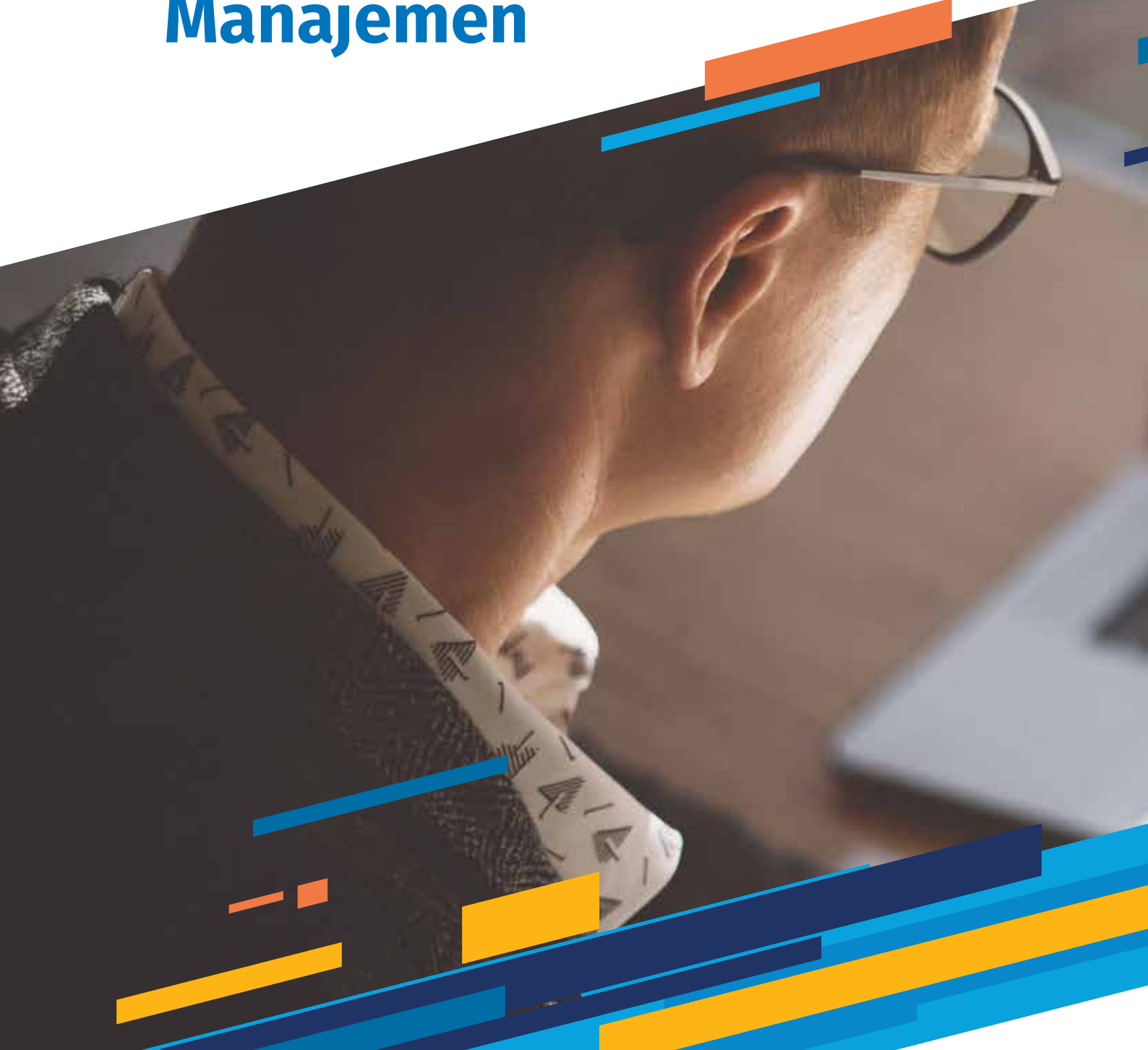
20 Desember 2023
Shangri-La Hotel, Jakarta

Penerimaan Penghargaan Indonesia Good Corporate Governance Award 2023

Mandiri Tunas Finance kembali mendapat penganugerahan CGPI 2022 pada ajang Indonesia Good Corporate Governance Award 2023 yang diselenggarakan SWA Media bersama IICG dengan kategori Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI). Penghargaan diterima secara langsung oleh Pinohadi G. Sumardi selaku Direktur Utama Mandiri Tunas Finance di Shangri-La Hotel, Jakarta pada 20 Desember 2023.

02

Laporan Manajemen





Laporan Komisaris



Rico Adisurja Setiawan
Komisaris Utama

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Kami mewakili Dewan Komisaris PT Mandiri Tunas Finance mengawali laporan ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas capaian kinerja perusahaan yang sangat baik. Hal tersebut merupakan buah dari kerja keras dan sinergi seluruh insan perusahaan dalam menjalankan strategi bisnis yang telah dirancang oleh Manajemen. Kami akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat posisi perusahaan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dalam laporan ini, kami akan memaparkan pandangan secara ringkas mengenai kinerja Direksi dan implementasi strategi yang telah dilakukan, pandangan atas prospek usaha dan pandangan kami atas penerapan tata kelola perusahaan sepanjang tahun 2023.

Penilaian Dewan Komisaris terhadap Kinerja Direksi

Dalam menilai kinerja Direksi, Dewan Komisaris menggunakan beberapa dasar penilaian, antara lain, kemampuan dalam memecahkan masalah (*problem solving*), kemampuan dalam meningkatkan penjualan, dan kemampuan dalam menambah keuntungan perusahaan. Penilaian Dewan Komisaris terhadap Direksi dituangkan dalam *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi yang ditetapkan oleh Pemegang Saham. KPI tersebut menjadi panduan Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Adapun KPI Direksi terbagi menjadi 4 perspektif yaitu:

1. Keuangan, terdiri dari *net income*, *pre provision operating profit*, *return on equity* dan *gearing ratio*;
2. Pelanggan, terdiri dari baki debit *joint financing*, *marketshare* baki debit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pembiayaan porsi *captive*;
3. Internal proses bisnis, terdiri dari *finance at risk*, *far coverage*, *cost of credit*, *cost efficiency ratio*, pemenuhan IT *requirement* dan pemenuhan Mandiri *Subsidiary Management Principles Guideline* (MSMPG); dan
4. Pengembangan, terdiri dari implementasi project sydney dan kajian *ecosystem bisnis automotif Business to Business (B2B) & Business to Business to Customer (B2B2C)*.

Secara khusus, Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas kemampuan Direksi dalam mengelola Perseroan yang telah sejalan dengan visi dan misi yang diemban, dan telah sesuai dengan arah strategis dan program kerja yang telah direncanakan. Dewan Komisaris berpendapat bahwa kinerja Direksi cukup baik karena berhasil mempertahankan dan meningkatkan kinerja operasional serta mampu mengatasi tantangan yang ada. Kepercayaan dan kepuasan pelanggan pada Perseroan menjadi faktor utama dari eksternal yang mendukung tercapainya pertumbuhan pasar di atas rata-rata perusahaan sejenis lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Direksi mampu mengambil

keputusan yang tepat dan menjalankan inisiatif strategi dengan efektif dan efisien.

Pandangan Dewan Komisaris terhadap Target

Perusahaan tentunya telah menetapkan target tahun 2023 dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal. Penetapan target dan strategi tersebut sudah sejalan dengan arahan dan hasil *monitoring* yang telah dilakukan Dewan Komisaris pada rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi. Pada tahun 2023, tercatat banyak pencapaian usaha telah melampaui target yang ditentukan antara lain pendapatan dan laba tahun berjalan perusahaan yang masing-masing sebesar Rp4,75 triliun dan Rp1,16 triliun. Pendapatan usaha meningkat 20,89% dibandingkan tahun sebelumnya, demikian juga laba bersih perusahaan berhasil tumbuh sebesar 54,77% pada akhir tahun 2023.

Selain itu, total penyaluran pembiayaan baru juga tercatat sebesar Rp32,69 triliun atau bertumbuh 17,75% dibandingkan tahun 2022 dengan nilai Rp27,76 triliun. Dari sisi *market* otomotif, jumlah unit mobil baru yang dibiayai Perseroan juga bertumbuh sebesar 6,65% dengan nilai 88.002 unit dibandingkan tahun 2022 dengan jumlah 82.515 unit. Perusahaan juga berhasil meningkatkan nilai pembiayaan kendaraan listrik sebesar 198,15% atau Rp591,09 miliar. Semua hal tersebut merupakan pencapaian luar biasa yang akan menjadi fondasi dalam perwujudan visi Perseroan untuk “Menjadi Mitra Pembiayaan Yang Terpercaya”.

Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris dan Hubungan Kerja dengan Direksi, serta Pengawasan terhadap Perumusan dan Implementasi Strategi Perseroan

Peran pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui keterlibatan intensif Dewan Komisaris secara rutin dalam memberi arahan terhadap penyusunan rencana kerja Perseroan serta inisiatif strategis kepada Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi melangsungkan rapat gabungan yang membahas berbagai agenda menyangkut

rencana kerja, operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Rapat ini merupakan bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan memberikan tanggapan, catatan, dan nasihat yang dituangkan dalam risalah rapat. Selain itu, pengawasan dan peninjauan strategi juga dilakukan melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh komite-komite di bawah Dewan Komisaris atau melalui sarana komunikasi tertulis lainnya.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah mengadakan sebanyak 6 rapat internal dan 5 rapat gabungan dengan Direksi. Dewan Komisaris senantiasa mengawasi penyusunan dan implementasi strategi serta kebijakan perusahaan. Dewan Komisaris juga mengawasi keberlanjutan dari implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) termasuk manajemen risiko, dan perkembangan dari strategi keberlanjutan perusahaan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), di mana semuanya dianggap penting dalam perkembangan perusahaan.

Secara keseluruhan, kami meyakini bahwa Direksi telah secara efektif menerjemahkan strategi perusahaan menjadi kebijakan dan tindakan yang berhasil meningkatkan pangsa pasar dan memposisikan perusahaan menuju pertumbuhan di masa mendatang. Ke depannya, Dewan Komisaris akan melanjutkan pengawasannya atas kebijakan dan strategi yang diimplementasikan oleh Direksi, guna memastikan bahwa manajemen secara konsisten menerapkan praktik-praktik manajemen risiko dalam upayanya mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pandangan terhadap Prospek Usaha Perseroan

Dewan Komisaris menyambut baik optimisme Manajemen terkait prospek usaha Perseroan di tahun 2024, di tengah proyeksi dari beberapa lembaga, yang sebagian besar memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 masih tetap stabil di kisaran 5,0% (YoY). Beberapa lembaga yang telah memproyeksikan besaran pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2024, antara lain, World Bank sebesar 4,9%, Asian Development Bank (ADB) dan International Monetary Fund (IMF) sebesar 5,0% serta Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) sebesar 5,2%. Adapun Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 sebesar 5,2%.

Dewan Komisaris menilai bahwa kondisi di tahun 2023 cukup menantang dengan adanya geopolitik yang terjadi di Indonesia, akan tetapi peluang pertumbuhan masih tetap ada, terutama setelah masa Pemilihan Umum presiden dan legislatif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan laju pertumbuhan industri pembiayaan

dapat mencapai rata-rata 8% di periode 2024-2027 dengan catatan bahwa *real Gross Domestic Product (GDP) growth* Indonesia sebesar 5,5% dan laju inflasi 1,5-3,5%, pengaruh COVID-19 tidak ada, serta pembiayaan otomotif dan alat berat bertumbuh pada kisaran 5% per tahun dan laju pertumbuhan jenis usaha lainnya akan mencapai rata-rata 17% per tahun di 5 tahun mendatang. Sehingga, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) memproyeksikan pertumbuhan penjualan mobil baru relatif stabil sebesar 1,1 juta unit dan APPI memproyeksikan pertumbuhan pada piutang pembiayaan dari perusahaan-perusahaan *multifinance* sebesar 12-13% di tahun 2024.

Melihat rencana kerja dan rencana strategis yang disusun oleh Direksi untuk periode tahun 2024, serta pencapaian kinerja MTF yang solid di tahun 2023, Dewan Komisaris meyakini bahwa masih terdapat potensi bisnis yang cukup besar bagi perusahaan untuk terus menguatkan pertumbuhan. Selain tetap berfokus pada penyaluran pembiayaan baru untuk mobil, alat berat, dan multiguna, Perseroan juga mendukung inisiatif OJK terkait *Green Financing* dengan cara menyalurkan pembiayaan baru untuk mobil listrik, UMKM, dan pembiayaan lain berbasis *Green Financing*. Seluruh rencana menghadapi tahun 2024 harus tetap memperhitungkan risiko-risiko yang mungkin timbul dan mengedepankan GCG di tiap fase operasional, serta lebih mengoptimalkan transformasi digital.

Pandangan terhadap Tata Kelola Perseroan

Pandangan Dewan Komisaris atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) yang dilakukan oleh Direksi pada Perseroan, secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas operasional dan bisnis sehari-hari. Kami menilai semua organ Perseroan telah menunjukkan komitmen tingginya dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, kesetaraan, dan independensi secara konsisten untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Perseroan juga senantiasa berupaya menerapkan *Corporate Governance Best Practice* sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Penerapan GCG di perusahaan senantiasa memperlihatkan peningkatan setiap tahunnya, tercermin dari skor yang dicapai dari penilaian kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang dilakukan oleh The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) untuk tahun 2023 adalah sebesar 83,1 lebih baik daripada tahun sebelumnya yaitu 82,1.

Dewan Komisaris senantiasa berkomitmen untuk memperhatikan dan mengevaluasi kualitas penerapan GCG perusahaan dan akan terus memberikan dukungan kepada Direksi dalam menjalankan bisnis secara berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG.

Penilaian Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh beberapa Komite, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Pemantauan Risiko. Di tahun 2023, seluruh Komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan baik dan memainkan peranan penting dalam mendukung Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasannya. Penilaian ini didasarkan pada berbagai kriteria, yang mencakup frekuensi dan pelaksanaan rapat, tingkat kehadiran dalam rapat, kompetensi dari para anggota, pencapaian kinerja, dan kualitas dari rekomendasi.

Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal perusahaan, serta menindaklanjuti laporan audit sebagai langkah perbaikan. Komite Audit juga mengkaji dan menilai laporan keuangan perusahaan, di mana setiap temuan penting akan diteruskan kepada Dewan Komisaris untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Perseroan yang meliputi gaji, honorarium, *benefit* (*medical, health, loan facility*, dan lainnya), tantiem (untuk Dewan Komisaris dan Direksi) dan remunerasi terbaru Direksi, Dewan Komisaris, asuransi kesehatan karyawan, dan *benefit* lainnya.

Komite Pemantau Risiko menganalisis risiko-risiko potensial terkait dengan aktivitas pembiayaan, operasional, kredit, serta perkembangan pasar. Selain itu, komite ini ditugaskan melakukan evaluasi atas setiap kebijakan dan perkembangan peraturan baru yang dapat berdampak pada kegiatan bisnis perusahaan.

Untuk mengukur kinerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi & Remunerasi, Dewan Komisaris yang menjabat sebagai ketua komite wajib melakukan rapat komite sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, tindak lanjut atas hasil rapat komite dibahas kembali pada Rapat Dewan Komisaris untuk dapat dilakukan pemberian arahan dan pengawasan kepada Direksi.

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Pada tahun 2023, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 137 tanggal 28 Juni 2023, Fendy Eventius Mugni diangkat sebagai Komisaris Independen menggantikan Ravik Karsidi, sehingga susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2023 menjadi sebagai berikut:

- Rico Adisurja Setiawan : Komisaris Utama
- Totok Priyambodo : Komisaris
- Fendy Eventius Mugni : Komisaris Independen

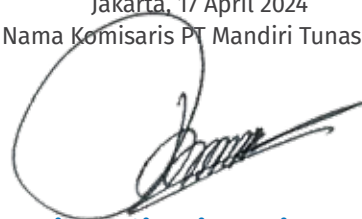
Apresiasi

Akhir kata, izinkan saya atas nama Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan seluruh jajaran Direksi dan karyawan perusahaan yang telah berdedikasi dan bekerja keras sehingga MTF dapat menghasilkan kinerja yang sangat baik di tahun 2023. Kami juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan, loyalitas, dan dukungan tanpa henti sehingga perusahaan dapat terus bertumbuh walau dihadapkan dengan berbagai tantangan.

Kami berharap dapat terus membina hubungan dan kerja sama yang baik dengan Direksi, Manajemen, dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga diharapkan perusahaan dapat senantiasa optimis meraih pertumbuhan yang lebih baik di masa mendatang dan memberikan dampak positif kepada seluruh pemangku kepentingan.

Jakarta, 17 April 2024

Atas Nama Komisaris PT Mandiri Tunas Finance



Rico Adisurja Setiawan

Komisaris Utama

Laporan Direksi

Pinohadi G. Sumardi
Direktur Utama



Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya yang tak terhingga kepada kita semua sehingga PT Mandiri Tunas Finance mampu menghadapi tantangan kondisi perekonomian pada tahun 2023. Perusahaan tetap berkomitmen untuk terus mendorong kinerja positif bagi pertumbuhan bisnis usaha secara khusus dan ekonomi Indonesia secara umum. Dengan dukungan Dewan Komisaris serta seluruh pemangku kepentingan, Direksi terus memperkuat pengelolaan usaha dengan mengedepankan produk dan jasa layanan yang unggul serta kompetitif.

Selanjutnya, kami menyampaikan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023, yang menggambarkan secara komprehensif tentang situasi dan kondisi yang melingkupi perusahaan, prospek usaha, serta inisiatif strategis yang diambil oleh Direksi.

Tinjauan Ekonomi dan Industri

Tahun 2023 masih merupakan tahun geopolitik yang memberikan dampak risiko terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi. Konflik Rusia-Ukraina, Israel-Hamas, lonjakan inflasi dan kenaikan suku bunga, memberikan sinyal bahwa kondisi ekonomi global masih diliputi ketidakpastian hingga akhir tahun 2023.

Meskipun demikian, perekonomian Indonesia pada tahun 2023 berhasil tumbuh positif sebesar 5,05% dan melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia, yaitu 3,00% menurut International Monetary Fund (IMF). Kesuksesan pemerintah dalam mengelola pandemi COVID-19 di tahun lalu telah mendorong kembali normalnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang mendorong peningkatan daya beli dan permintaan domestik sehingga mempercepat peningkatan konsumsi masyarakat. Hasil dari jasa transportasi, komunikasi, perdagangan, perhotelan, serta pengolahan makanan, tekstil, dan logam dasar menjadi yang tumbuh paling cepat pada tahun 2023.

Bank Indonesia pada tahun 2023 telah beberapa kali menaikkan tingkat suku bunga acuan di 6,00% dari yang sebelumnya 5,50% pada tahun 2022. Hal ini terjadi seiring dengan peningkatan suku bunga kebijakan moneter negara maju sebagai respon ketidakpastian ekonomi global. Namun, disisi lain Indonesia berhasil menjaga surplus neraca perdagangan dengan penguatan nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi yang rendah. Per 31 Desember 2023, nilai rupiah ditutup sebesar Rp15.416 terhadap Dolar AS, menguat dibandingkan dengan penutupan pada akhir tahun sebelumnya di Rp15.731. Tingkat inflasi di Indonesia juga tetap terjaga di angka 2,61% lebih rendah dari tahun sebelumnya 5,51% (YoY) di tahun 2022 (berdasarkan Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2023).

Kinerja Perusahaan 2023

Di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian global maupun nasional yang sedang memasuki tahun politik, Mandiri Tunas Finance berhasil membukukan kinerja yang baik. Hal ini tercermin dari pencapaian penyaluran pembiayaan baru di 2023 yang mencapai Rp32,69 triliun, tumbuh 17,75% (YoY) dari Rp27,76 triliun di tahun 2022. Peningkatan atas penyaluran pembiayaan berdampak positif terhadap pendapatan usaha perusahaan, tercatat bahwa pendapatan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 20,89% atau sebesar Rp4,75 triliun dari Rp3,93 triliun di tahun 2022.

Keberhasilan tersebut membawa laba bersih Mandiri Tunas Finance juga meningkat mencapai Rp1,16 triliun, tumbuh 54,74% (YoY) dari Rp750 miliar di tahun 2022. Jumlah aset perusahaan juga bertumbuh Rp5,99 triliun atau 25,28% menjadi sebesar Rp29,72 triliun, pertumbuhan ini seiring dengan adanya kenaikan atas portofolio piutang pembiayaan konsumen.

Dari aspek operasional, pencapaian penjualan mobil baru pada tahun 2023 mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 1,53%, di mana total penjualannya sebanyak 998 ribu unit atau lebih rendah dibandingkan pencapaian tahun 2022 sebanyak 1.014 ribu unit. Meskipun demikian, MTF mampu mempertahankan kinerja operasional yang baik, terlihat dari total penyaluran pembiayaan baru mencapai Rp32,69 triliun atau bertumbuh 17,75% dibandingkan tahun 2022 dengan nilai Rp27,76 triliun. Dari sisi *market* otomotif, jumlah unit mobil baru yang dibiayai Perseroan juga bertumbuh sebesar 6,65% dengan nilai 88.002 unit dibandingkan tahun 2022 dengan jumlah 82.515 unit. Selain itu, perusahaan mencatat adanya peningkatan nilai pembiayaan kendaraan listrik yang sangat signifikan sebesar 198,15% atau Rp591,09 miliar.

Strategi dan Kebijakan Strategis

Pada tahun 2023, MTF telah menjalankan berbagai strategi untuk dapat terus memperkuat bisnisnya dengan menerapkan 3 strategi utama sebagai fondasi untuk tumbuh dan memenangkan pasar yaitu:

1. Menumbuhkan segmen bisnis *captive* yang berasal dari Bank Mandiri dengan menciptakan ekosistem bisnis *captive* yang baik melalui perluasan bisnis untuk dapat tumbuh melalui *referral* Bank Mandiri dan penetrasi cabang *retail* dengan menjaga pertumbuhan bisnis *captive* di angka 30% dari total pembiayaan baru.
2. Menjaga segmen bisnis yang berasal dari *dealer* dan *partner* melalui perluasan komersial dan alat berat dengan target sektor tertentu dan menjaga pertumbuhan pendapatan sesuai profil risiko, serta meningkatkan bisnis *retail* di atas 13% untuk menjadi perusahaan pembiayaan mobil nomor 1.
3. Mengoptimalkan *database* untuk memberikan nilai tambah pada pelanggan melalui peningkatan *repeat order* di atas 30%, pengembangan bisnis baru melalui *database*, dan pengembangan teknologi data untuk menciptakan dukungan bisnis.

Sepanjang tahun 2023, terdapat beberapa hal yang berpotensi signifikan terhadap kelangsungan usaha industri *multifinance* di Indonesia, antara lain, kenaikan BI *rate* dan penurunan pertumbuhan penjualan mobil baru. Pada kuartal 4 tahun 2023, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan (BI *rate*) menjadi 6,00% sebagai langkah Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi. Namun, kenaikan BI *rate* memiliki dampak signifikan terhadap kenaikan suku bunga pasar yang searah dengan peningkatan biaya pinjaman bagi industri pembiayaan, hal tersebut berdampak pada penyesuaian suku bunga yang dibebankan kepada pelanggan.

Peran Direksi dalam Penyusunan Strategi dan Kebijakan

Direksi perusahaan mempunyai peran yang sangat penting dalam perumusan strategi dan kebijakan yang diambil pada tahun 2023 guna mencapai tujuan usaha, serta memberikan imbal balik yang maksimal kepada seluruh pemangku kepentingan. Perumusan strategi perusahaan dilakukan melalui diskusi dengan Jajaran Manajemen untuk menganalisis segala kemungkinan munculnya risiko, baik di bidang keuangan, nonkeuangan serta peninjauan terhadap prospek usaha.

Proses Direksi Memastikan Implementasi Strategi Perseroan

Tahun 2023 merupakan tahun geopolitik yang penuh tantangan. Kami terus melihat atas perubahan-

perubahan yang mungkin terjadi dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah dan berdampak pada lingkungan bisnis, baik secara internal maupun eksternal. Untuk dapat berkomitmen sesuai dengan rencana bisnis Perseroan, kami melakukan evaluasi secara berkala terhadap strategi dan kebijakan serta implementasinya. Selain itu, Direksi berkoordinasi dengan Dewan Komisaris untuk dapat menerima arahan dan pengawasan yang diberikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa strategi dan kebijakan yang diimplementasikan tetap relevan sesuai dengan perkembangan bisnis dan penerapannya berjalan sesuai tujuan yang ditentukan.

Perbandingan Realisasi dan Target yang Dicapai

Perusahaan mengawali tahun 2023 dengan semangat bahwa Perseroan akan mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Tahunan (RBT). Dari hasil kinerja per 31 Desember 2023, perusahaan mencatatkan kinerja yang sangat baik, sebagian besar target berhasil dicapai, antara lain, pendapatan usaha melampaui target dengan pencapaian 107,59% atau sebesar Rp4,75 triliun seiring dengan meningkatnya penyaluran pembiayaan baru sebanyak Rp32,69 triliun yang tumbuh 17,75% dari tahun sebelumnya. Perusahaan terbukti mampu menjaga efisiensi operasional dengan menjaga jumlah beban tidak melebihi dari target, yaitu sebesar Rp3,26 triliun sehingga perusahaan berhasil meningkatkan laba bersih melebihi target dengan pencapaian 115,95% atau sebesar Rp1,16 triliun.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil mengatasi tantangan dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di pasar. Pencapaian target usaha kami jadikan dasar untuk dapat membangun fondasi yang lebih kuat dan menjaga keunggulan kompetitif agar dapat bersaing di pasar yang semakin kompleks saat ini.

Kendala dan Langkah Penyelesaian

Perusahaan senantiasa memfokuskan diri untuk terus memperkuat posisi di pasar dengan menguatkan fondasi bisnis sehingga dapat meningkatkan daya saing dan terus menyesuaikan diri terhadap perkembangan pasar yang dinamis. Beberapa kendala atau tantangan yang dihadapi pada tahun 2023, antara lain, berkaitan dengan teknologi informasi dan sumber daya manusia yang dimiliki.

Saat ini, perkembangan teknologi sangat pesat dan perusahaan dituntut untuk dapat merespon dengan cepat dalam menerapkan teknologi digital, diyakini bahwa teknologi dapat membantu pelanggan mendapat layanan dengan biaya lebih rendah dan meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Setelah melalui penerapan strategi transformasi digital melalui MTF 1Access dan MTF Mobile, tentunya program sosialisasi baik untuk internal dan eksternal, terutama untuk rekanan bisnis dalam implementasi MTF 1Access dan MTF Mobile menjadi proses yang kami lakukan agar dapat terus berkelanjutan memberikan layanan yang *fast and easy*.

Secara mutualis, teknologi informasi dan sumber daya manusia memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja serta memungkinkan semua kegiatan dapat terselesaikan dengan cepat, tepat, akurat, dan meningkatkan produktivitas kerja karena teknologi informasi menghasilkan informasi yang berkualitas. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam layanan jasa keuangan, kompetensi SDM merupakan hal yang penting. Untuk itu, Perseroan terus meningkatkan kompetensi karyawan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan. Hal ini kami implementasikan untuk seluruh karyawan diwajibkan dapat meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang terukur dalam KPI setiap karyawan.

Prospek Usaha

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan laju pertumbuhan industri pembiayaan dapat mencapai rata-rata 8% pada periode 2024-2027 dengan catatan bahwa *real Gross Domestic Product (GDP) growth* Indonesia sebesar 5,5% dan laju inflasi 1,5-3,5%, pengaruh COVID-19 tidak ada, serta pembiayaan otomotif dan alat berat bertumbuh pada kisaran 5% per tahun. Pada tahun 2024, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) kembali menargetkan total penjualan mobil di pasar domestik sebanyak 1.100.000 unit, di mana segmen kendaraan kelompok *Multipurpose Vehicle (MPV)*, khususnya *low MPV* dan *Low Cost Green Car (LCGC)* masih mendominasi penjualan di Indonesia. Target dari GAIKINDO pada tahun 2024 membuka peluang bagi perusahaan pembiayaan, khususnya segmen utamanya adalah kendaraan roda 4 untuk menyalurkan pembiayaan mobil baru serta meningkatkan *market share* pada tahun 2024.

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) juga memproyeksikan pertumbuhan piutang pembiayaan industri *multifinance* sebesar 12-13% pada tahun 2024. Ada dua faktor yang menjadi katalis industri *multifinance* masih dapat tumbuh besar, yaitu perekonomian Indonesia yang masih bertumbuh sebesar 5% serta daya konsumsi masyarakat yang ikut bertumbuh.

Dalam memanfaatkan peluang dan prospek usaha di tahun mendatang, perusahaan telah menyusun rencana untuk menjadi *'Market Leader'* pada tahun 2024 dengan

menargetkan pembiayaan baru di atas Rp36 triliun dan pertumbuhan profit sebesar 33% dibandingkan tahun 2023.

Upaya yang dilakukan adalah dengan memperkuat posisi perusahaan melalui optimalisasi penetrasi pasar dari semua segmen dan sumber bisnis yang dimiliki, baik segmen *Retail*, *Wholesales*, maupun *Multiguna*. Perusahaan akan mengoptimalkan fondasi baru yang telah dibangun pada tahun sebelumnya dengan lebih berenergi dan penuh antusias, sehingga MTF dapat menjadi pemimpin di industri pembiayaan.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Mandiri Tunas Finance terus menunjukkan konsistensinya dalam mewujudkan komitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) sebagai fondasi untuk menjalankan kegiatan usaha perusahaan. Pengelolaan dan landasan tata kelola yang baik diyakini akan memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang terkait dalam bisnis usaha sekaligus meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata *stakeholder* serta pelanggan.

Perusahaan terus meningkatkan kualitas penerapan tata kelola, selain melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara individu maupun terintegrasi yang ditinjau dari aspek *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* yang dilakukan secara rutin. Perseroan secara aktif mengikuti pemeringkatan kualitas penerapan tata kelola yang dilaksanakan oleh pihak eksternal untuk mendapatkan *feedback* dalam meningkatkan kualitas tata kelola Perseroan. Pihak eksternal yang menilai kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) dengan mengacu pada kriteria penilaian Corporate Governance Perception Index (CGPI). Pada tahun 2023, skor yang dicapai dari penilaian tersebut adalah 83,1, lebih baik daripada tahun sebelumnya yaitu 82,1.

Penerapan GCG Perseroan tahun 2023 yang telah dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Perseroan dalam pemeringkatan program Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesia Institute for Corporate Governance (CGPI), berhasil mempertahankan predikat *"Trusted Companies"*.
2. Perseroan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola secara individu berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan SEOJK

No. 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan yang dilakukan dua kali dalam setahun.

3. Perseroan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola secara Mandiri Grup berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 dan SEOJK No.15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan yang dilakukan dua kali dalam setahun.

Penerapan GCG tentunya memiliki peran yang penting dalam menciptakan pertumbuhan perusahaan yang baik. Sebagai langkah untuk mencapai visi misi perusahaan, pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa hal untuk mendukung terciptanya kualitas GCG yang baik, yaitu:

1. Penyempurnaan dan pembaharuan kebijakan serta prosedur agar selaras dengan perkembangan tugas, tanggung jawab dalam kondisi yang dinamis;
2. Untuk mendukung proses bisnis serta meningkatkan integritas perusahaan, pada tahun 2023 telah dilakukan SNI ISO 27001 IT Security Management untuk MTF 1Access. Selain itu, telah dilakukan perencanaan untuk implementasi anti penyuapan melalui sertifikasi SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
3. Perusahaan juga melakukan pemenuhan sistem anti pencucian uang untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis transaksi, serta profil debitur sebagai pemenuhan pelaporan kepada regulator dan sebagai bentuk implementasi atas POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang,

Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Perubahan Komposisi Direksi

Pada tahun 2023 Perseroan tidak melakukan perubahan komposisi Direksi, sehingga susunan dan komposisi Direksi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- Pinohadi G. Sumardi : Direktur Utama
- R. Eryawan Nurhariadi : Direktur
- William Francis Indra : Direktur

Apresiasi

Direksi menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemegang Saham dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Arahan dan masukan Dewan Komisaris yang diberikan merupakan dukungan bagi Direksi dalam mencapai target usaha yang telah ditetapkan.

Direksi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja sama seluruh tim Manajemen dan Perwira MTF sepanjang tahun buku 2023. Direksi juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para pemangku kepentingan lain, baik regulator, pelanggan, mitra bisnis dan pihak lainnya. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan, terutama untuk mengoptimalkan kinerja Perseroan serta mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Jakarta, 17 April 2024

Atas Nama Direksi PT Mandiri Tunas Finance

Pinohadi G. Sumardi

Direktur Utama

Halaman ini sengaja dikosongkan

Dewan Komisaris

Fendy Eventius Mugni

Komisaris Independen

Rico Adisurja Setiawan

Komisaris Utama

Totok Priyambodo

Komisaris



Direksi

R. Eryawan Nurhariadi
Direktur

Pinohadi G. Sumardi
Direktur Utama

William Francis Indra
Direktur



Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 PT Mandiri Tunas Finance

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Mandiri Tunas Finance tahun buku 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 17 April 2024

Dewan Komisaris



Rico Adisurja Setiawan
Komisaris Utama



Fendy Eventius Mugni
Komisaris Independen

Surat Pernyataan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 PT Mandiri Tunas Finance

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Mandiri Tunas Finance tahun buku 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 17 April 2024

Direksi



Pinohadi G. Sumardi
Direktur Utama



R. Eryawan Nurhariadi
Direktur



William Francis Indra
Direktur

Pejabat Eksekutif (Chief)

Afri Feder Fauzi

Chief

B. Perana Citra Ketaren

Chief

Johanes Barus

Chief



Halaman ini sengaja dikosongkan

03

Profil Perusahaan





Informasi Umum dan Identitas Perusahaan

Nama	PT Mandiri Tunas Finance
Tanggal Pendirian	17 Mei 1989 (dengan nama PT Tunas Financindo Corporation)
Status Hukum	Perseroan Terbatas (PT), Emiten
Cikal Bakal	PT Tunas Financindo Corporation (1989) PT Tunas Financindo Sarana (2000)
Produk dan Jasa	Pembiayaan kendaraan bermotor untuk <i>retail</i> dan perusahaan meliputi mobil baru, motor besar, kendaraan niaga dan alat-alat berat, serta pembiayaan multiguna.
Bidang Usaha	Pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna, dan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kepemilikan	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (51,00%) PT Tunas Ridean (49,00%)
Dasar Hukum Pendirian	Akta No. 262 tanggal 17 Mei 1989 dari Notaris Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-4868.HT.01.01.TH.89 tanggal 1 Juni 1989 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 57, Tambahan No. 1369 tanggal 18 Juli 1989
Modal Dasar	Rp1.000.000.000.000 (Satu Triliun Rupiah)
Modal Ditempatkan	Rp250.000.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah)
Bursa Pencatatan Obligasi	Bursa Efek Indonesia
Kode Efek	TUFI
Kantor Pusat	Graha Mandiri Lt. 3A Jl. Imam Bonjol No.61 Menteng, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10310, Indonesia Telepon : +61 21 230 5608 Faksimili : +61 21 230 5618
Sekretaris Perusahaan	Arif Reza Fahlepi Surel : corporate.secretary@mtf.co.id Situs Web : www.mtf.co.id
Media Sosial	Facebook : Mandiri Tunas Finance Instagram : @mandiritunasfinance Linkedin : Mandiri Tunas Finance Whatsap : 08111455740 Youtube : Mandiri Tunas Finance Tiktok : @mandiritunasfinance
Layanan Pelanggan	Surel : customer.service@mtf.co.id (Senin-Jumat Pk.08.30-17.30 WIB) Care Center : 1500059 (Senin-Jumat Pk. 08.00-17.00 WIB)
Jumlah Karyawan	3.328 orang (2023)
Jaringan Usaha	124 Kantor cabang 9 Kantor Selain Kantor Cabang (KSKC)
Mobile Application	1. MTF Mobile 2. MTF 1 Access 3. MTF Mobile Apps; a. Mobile Survey b. Mobile Collection c. Mobile License Plate d. MTF Report e. MTF OSR 4. HC EAZY

Riwayat Singkat Perusahaan



Sejarah Pendirian dan Perkembangan MTF

Pada awal mula didirikan, Perseroan bergerak di bidang usaha pemberian fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor yang awalnya dikhususkan bagi konsumen dari jaringan *Dealer* yang dimiliki oleh Grup Tunas Ridean. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan portofolio bisnis, PT Tunas Financindo Corporation melakukan pergantian nama di tahun 2000 menjadi PT Tunas Financindo Sarana. Sejak pendirian awal hingga tahun 2009, kepemilikan saham Perseroan dimiliki oleh PT Tunas Ridean yang saat ini merupakan grup otomotif independen terbesar dengan lebih dari 100 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Di tahun 2009, Perseroan mengambil langkah strategis dalam rangka pengembangan usaha memperluas jangkauan pasar serta memperkuat struktur permodalan agar mampu mengoptimalkan potensi untuk bersaing di industri pembiayaan otomotif Indonesia. Langkah yang dilakukan adalah dengan diakuisisinya Perseroan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang perbankan dengan jaringan usaha yang luas dan nasabah yang besar. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan akuisisi

sebesar 51,00% saham dari Grup Tunas Ridean serta mengubah nama Perseroan menjadi PT Mandiri Tunas Finance. Dengan akuisisi tersebut, persentase saham PT Tunas Ridean menjadi sebesar 49,00%. Dengan perubahan tersebut serta hadirnya 2 (dua) entitas bisnis besar di industri otomotif serta perbankan dan jasa keuangan, Perseroan dituntut untuk selalu tumbuh secara progresif dan berkelanjutan serta menjadi perusahaan pembiayaan yang tepercaya di Indonesia dan mampu menjadi pemimpin pasar di segmennya.

Dengan perubahan tersebut, Perseroan melakukan akselerasi bisnis dengan melakukan pengembangan-pengembangan yang dibutuhkan. Pengembangan ini tidak lepas dari konsistensi kinerja yang tetap fokus pada industri pembiayaan di sektor otomotif, alat berat dan multiguna. Di segmen pembiayaan otomotif, Perseroan menghadirkan pembiayaan untuk mobil baru, motor besar, kendaraan niaga serta alat-alat berat. Dalam menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.05/2022 guna menciptakan industri pembiayaan yang tangguh, kontributif, inklusif serta berperan dalam menjaga

sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, Perseroan menghadirkan ragam pembiayaan lainnya yaitu pembiayaan multiguna untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat.

Selain memanfaatkan sumber pendanaan dari perbankan dalam rangka pengembangan usaha, Perseroan melakukan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia hingga Obligasi VI. Kemudian Perseroan juga melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tahap III tahun 2015, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016, Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II tahun 2017, Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap I tahun 2019, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II tahun 2019, Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I tahun 2020, Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap II tahun 2021, Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap III tahun 2022, Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap I tahun 2023, dan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap II tahun 2023.

Dengan upaya serta kerja keras yang dilakukan Perseroan selama ini, pada akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan. Hal tersebut tercermin dari hasil pemeringkatan Perseroan, di mana pada tahun 2003 PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat idBBB+ (triple B plus) hingga menjadi idAA (double A) di tahun 2012. Kemudian Pefindo menetapkan kembali rating idAA (double A) pada tahun 2013, 2014, 2015. Pada akhir tahun 2016 Perseroan mampu meningkatkan rating menjadi idAA+ (double A Plus) dan Pada tahun 2022 Pefindo meningkatkan rating menjadi idAAA (triple A). Rating efek yang baik ini Perseroan harapkan dapat menekan biaya bunga yang berdampak pada strategi pengelolaan keuangan Perseroan yang menjadi lebih efisien sehingga dapat memacu kinerja usaha secara optimal.

Dengan memberikan fasilitas serta solusi pembiayaan mudah, inovatif dan kompetitif bagi para konsumen dalam membantu mewujudkan impian memiliki mobil baru, motor besar, pemenuhan kendaraan niaga maupun alat berat dalam mendukung kegiatan bisnis, pembiayaan dan sewa guna usaha serta multiguna pendidikan, Perseroan tetap mengutamakan pelayanan terhadap pelanggan dalam hal memberi kemudahan apalagi didukung oleh kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan sumber daya manusia yang berkualitas serta fasilitas infrastruktur yang memadai.

Perusahaan Pembiayaan Otomotif Berorientasi kepada Pemenuhan Kredit Masyarakat

Mengusung visi *"To be your Trusted Financing Partner"*, Perseroan berupaya untuk memahami kebutuhan masyarakat terkait aspek pembiayaan dengan tidak hanya menghadirkan ragam produk pembiayaan namun juga dapat memberikan nilai tambah agar proses-proses yang ada dapat berjalan efektif dan efisien. Selain itu, aspek keterjangkauan juga terus kami perhatikan dengan melakukan perluasan area bisnis di seluruh Indonesia. Dengan demografis masyarakat Indonesia yang masih mengedepankan sektor komoditas dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perseroan dapat masuk dalam rangka memenuhi kebutuhan terkait modernisasi kendaraan maupun alat berat produksi dalam menunjang aktivitas niaga, sewa guna usaha dan kebutuhan lainnya. Hal tersebut menjadi potensi yang harus dimaksimalkan secara baik oleh Perseroan agar dapat menciptakan sinergi yang baik bagi aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia.

Kinerja Terbaik

Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia menjadi kunci dalam mencapai target kinerja terbaik. Untuk itu Perseroan memiliki program kaderisasi yang mumpuni demi menciptakan sumber daya manusia terbaik untuk menduduki strategis di organisasi. Langkah yang dilakukan diantaranya adalah dengan menyelenggarakan program *Supervisor Development Program (SDP)*, *Management Development Program (MDP)* dan *Senior Manager Development Program (SMDP)* sebagai program pengembangan karir yang mana di dalamnya terdapat program pendidikan dan pelatihan untuk menjangkau kandidat terbaik di internal Perseroan. Perseroan juga menyelenggarakan program *Management Trainee (MT)*, yang merupakan

program seleksi karyawan baru dengan pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk menjadi *Future Leaders* Perseroan yang memiliki kapabilitas baik dan memiliki loyalitas tinggi. Selain itu, Perseroan juga melakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan sistem serta prosedur operasional, menjunjung tinggi budaya Perwira MTF, memaksimalkan kinerja pegawai serta melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir *fraud* dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi Perseroan.

Kinerja Terbesar dan Tepercaya

Perseroan mendapatkan dukungan kuat dari induk usaha Bank Mandiri dan Tunas Ridean, baik dukungan pendanaan maupun dukungan dalam meningkatkan penetrasi pemasaran produk-produk pembiayaan melalui penggarapan segmen-segmen potensial. Sebagai Induk usaha, Bank Mandiri mendorong Perseroan tumbuh sehat dan berkesinambungan dengan mendorong peningkatan penetrasi pemasaran melalui jaringan Bank Mandiri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 139 kantor cabang dan 2.104 cabang pembantu. Disamping dukungan yang kuat dari induk usaha, Perseroan secara berkelanjutan terus meningkatkan dan memperluas kerja sama dengan seluruh Agen Pemegang Merek (APM) kendaraan bermotor dan jaringan *dealer* serta *partner* bisnis di seluruh wilayah kantor pemasaran Perseroan untuk meningkatkan *market share* pembiayaan. Saat ini, Perseroan telah bekerja sama dengan hampir seluruh APM sehingga Perseroan dapat membiayai seluruh merek kendaraan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Hal ini membuktikan tingkat kepercayaan APM, *dealer* serta *partner* bisnis yang sangat tinggi kepada Perseroan. Dengan adanya

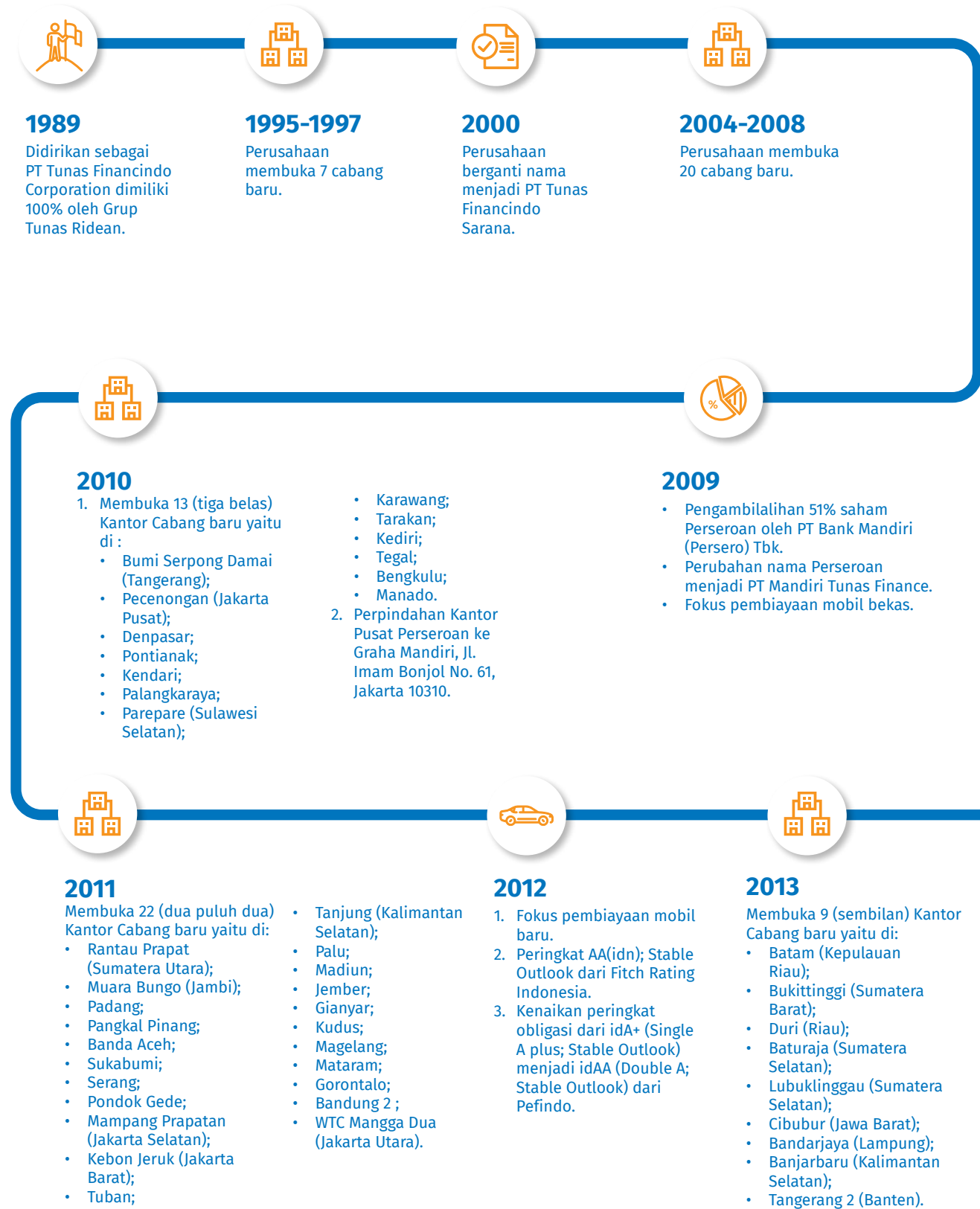
kerja sama tersebut, Perseroan dapat lebih banyak memberikan berbagai pilihan jenis kendaraan bermotor kepada konsumen serta mempermudah penetrasi pasar di berbagai wilayah kantor pemasaran Perseroan. Melalui dukungan, kolaborasi serta kerja sama yang kuat dengan induk usaha dan seluruh partner bisnis, Perseroan berhasil mencatatkan diri sebagai Top 3 Pembiayaan Mobil terbesar di Indonesia serta memperoleh *credit rating* idAAA.

Informasi Perubahan Nama

Seperti yang telah diuraikan di atas, Perseroan resmi berdiri pada tanggal 17 Mei 1989 dengan nama PT Tunas Financindo Corporation. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan portofolio bisnis, pada tanggal 18 Agustus 2000 PT Tunas Financindo Corporation melakukan pergantian nama di tahun 2000 menjadi PT Tunas Financindo Sarana berdasarkan Akta No. 49 yang dibuat di hadapan Adam Kasdarmadji S.H., M.H., Notaris, di Jakarta. Akta perubahan ini disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan melalui Surat Keputusan No. C-21195HT.01.04.TH2000 tanggal 22 September 2000. Di tahun 2009, Grup Tunas Ridean sebagai pendiri memutuskan untuk memperluas jangkauan pasar serta memperkuat struktur permodalan dengan diakuisisinya Perseroan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan akuisisi saham Perseroan sebesar 51,00% dan sisanya sebesar 49,00% tetap dimiliki oleh PT Tunas Ridean. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 26 Juni 2009, Perseroan mengubah nama menjadi PT Mandiri Tunas Finance berdasarkan perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Akta No. 181 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi., Notaris, di Jakarta.



Jejak Langkah





2021

MTF *back on track* dengan berhasil memberikan nilai positif kepada pemangku kepentingan yaitu pencapaian laba bersih Rp 245,88 miliar.



2022

- MTF meluncurkan MTF 1 Access sebagai bentuk memberikan layanan Fast & Easy.
- Kenaikan Rating Pefindo menjadi: idAAA (Triple A)
- Pencapaian performance terbaik MTF yaitu pencapaian laba Rp750 miliar.



2023

- MTF menghadirkan solusi terbaru dalam hal pemberian layanan pada pelanggan berbasis digital yaitu MTF Digital Service & MTF Mobile
- Mencetak rekor profit Rp1,16 triliun dan penyaluran pembiayaan Rp32,69 triliun
- MTF dapat mempertahankan peringkat rating Perseroan dari Pefindo di idAAA



2020

MTF mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19, melalui restrukturisasi pembayaran kredit kepada pelanggan, dengan total nilai restrukturisasi mencapai Rp13,15 triliun.



2019

- Kerja sama dengan Mandiri Taspen.
- Peluncuran branding baru pembiayaan multiguna "Cash Aja".
- Peluncuran Customer Experience Lounge.
- Peresmian MTF Cabang Pluit dan Kantor Regional IX & Cabang Balikpapan.



2018

- Channeling Fintech.
- Pembiayaan modal kerja.
- Pembiayaan melalui dealer online.
- Pembiayaan anjak piutang.
- Peresmian Kantor Cabang Ungaran Implementasi Sentralisasi Proses Input (SPRINT).
- Minimalisasi cost of fund melalui pendanaan offshore, asset purchase.
- Pembukaan 3 cabang: Medan 2, Pekanbaru 2, dan Ungaran.



2014

1. Peluncuran Mandiri KKB
2. Pemekaran Kantor Wilayah dari 6 Kantor Wilayah menjadi 9 Kantor Wilayah.
3. Membuka 11 (sebelas) Kantor Cabang baru yaitu di:
 - Ujung Batu (Riau);
 - Tanjung Pinang (Kep. Riau);
 - Bontang (Kalimantan Timur);
 - Cibinong (Jawa Barat);
 - Rangkasbitung (Banten);
 - Cikarang (Jawa Barat);
 - Garut (Jawa Barat);
 - Pekalongan (Jawa Tengah);
 - Subang (Jawa Barat);
 - Gresik (Jawa Timur);
 - Mojokerto (Jawa Timur).



2015

1. Pembukaan 5 kantor cabang baru yaitu di:
 - Sintang (Kalimantan Barat);
 - Sampit (Kalimantan Tengah);
 - Mamuju (Sulawesi Barat);
 - Kotamobagu (Sulawesi Utara);
 - Kupang (NTT).
2. 20 kantor Satelit yang berlokasi di kantor-kantor Cabang Bank Mandiri.



2016

1. Peluncuran produk multiguna.
2. Layanan penambahan payment channel melalui retailer.
3. Pembukaan 3 Kantor cabang di:
 - Bandung (Jawa Barat);
 - Lebak Bulus (Jakarta);
 - Luwuk (Sulawesi Tengah) dan
 - 1 kantor satelit di Bandar Lampung.
4. Kenaikan Rating Pefindo menjadi : idAA+



2017

- Pelaksanaan sindikasi offshore ke Singapore, Taiwan & Jepang.
- Sinergi servicing BSM OTO.
- Pembukaan kantor Cabang Banyuwangi, Ketapang, Sorong, Jayapura, dan Ambon

Visi, Misi, Nilai dan Budaya Perusahaan



VISI



To Be Your Trusted Financing Partner

atau

Menjadi Mitra Pembiayaan Terpercaya Anda



Kepercayaan merupakan DNA yang harus dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan, oleh karena itu Perseroan berkomitmen untuk terus menumbuhkan kepercayaan dari seluruh pelanggan Perseroan. Perseroan memandang bahwa pertumbuhan usaha yang berkelanjutan adalah pertumbuhan usaha yang memerhatikan kebutuhan serta sudut pandang dari seluruh pelanggan, sehingga dalam hal ini, Perseroan menempatkan diri sebagai mitra dan teman sejati dalam setiap langkah perjalanan *financial* pelanggan.



**Provide Reliable Fast & Easy Services
to Customer**

atau

Memberikan Pelayanan yang Cepat dan Mudah
yang dapat Diandalkan kepada Pelanggan

Perseroan berkeyakinan bahwa kepercayaan terbentuk melalui layanan yang responsif dan dapat diandalkan. Melalui misi ini, Perseroan terus berupaya meningkatkan kualitas serta kecepatan pelayanan, serta memastikan setiap interaksi memberikan pengalaman memuaskan bagi pelanggan.



MISI

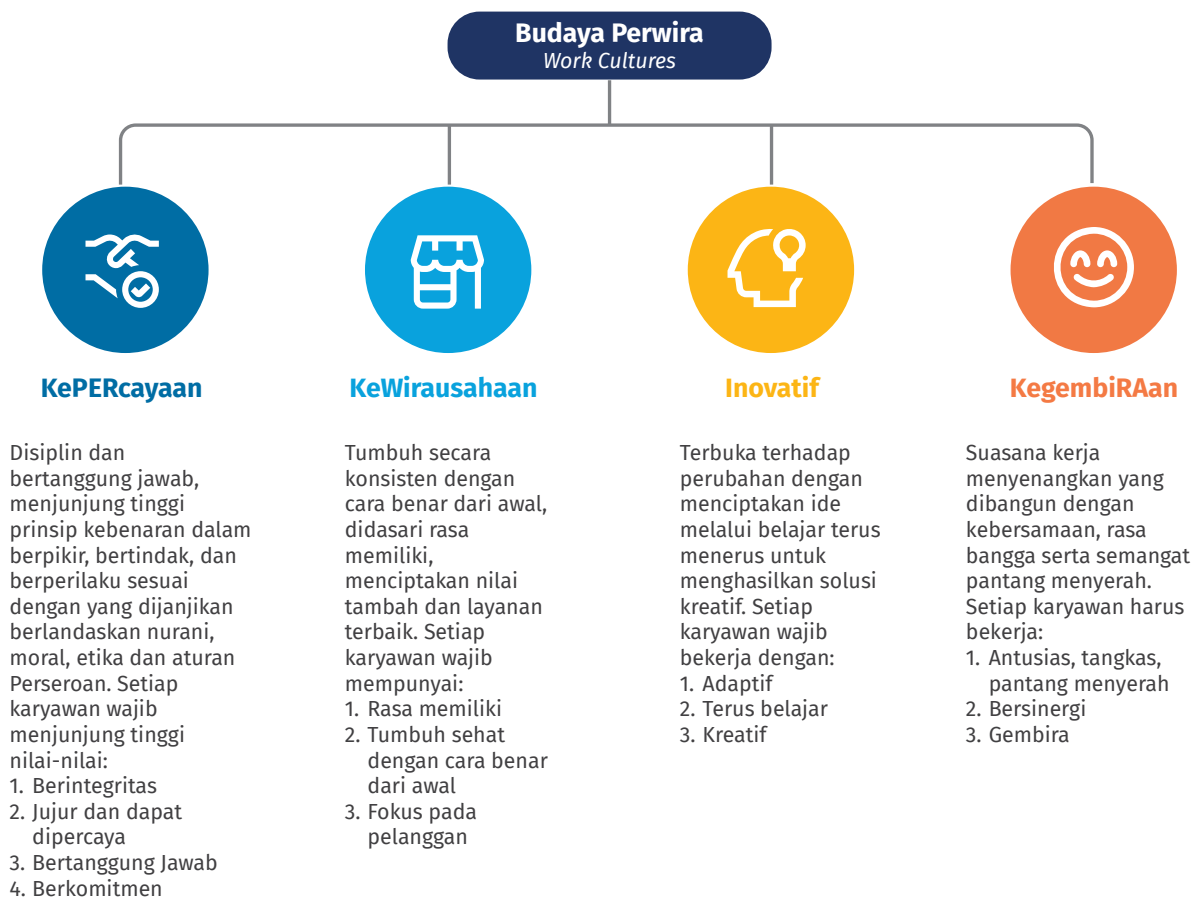


REVIEW

Pada Tahun 2022, Perseroan memiliki Visi "*To be the Most Progressive and Reliable Multifinance in Indonesia*" dan Misi "Berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan kredit masyarakat untuk mensejahterakan bangsa dan peduli terhadap lingkungan; memberi keuntungan dan manfaat optimal bagi pemangku kepentingan; membangun sumber daya manusia yang profesional dan pantang menyerah melalui budaya kerja PERWIRA; dan menjadi institusi yang menyenangkan dan membanggakan dalam berkarya meraih prestasi terbaik". Sejalan dengan perumusan rencana kerja jangka panjang Perseroan, diperlukan penyesuaian Visi dan Misi Perseroan agar sejalan dengan rencana kerja Perseroan.

Budaya Perusahaan

Budaya Perusahaan adalah hasil implementasi *Core Values* AKHLAK dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan I-CARE dari PT Tunas Ridean, yang dikenal sebagai “Budaya PERWIRA”. Budaya PERWIRA dirumuskan pertama kali pada tanggal 11 Desember 2009 dan mengalami peremajaan pada tanggal 18 Juni 2019. Nilai Budaya Perusahaan adalah PERWIRA yang merupakan singkatan dari Kepercayaan, Kewirausahaan, Inovatif, dan Kegembiraan yang merupakan 4 (empat) nilai-nilai dasar yang di dalamnya mengandung 13 (tiga belas) perilaku utama yang harus diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan oleh setiap karyawan.



Bidang Usaha Serta Produk dan Jasa

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha	Keterangan
Pembiayaan Investasi	Telah dijalankan
Pembiayaan Modal Kerja	Telah dijalankan
Pembiayaan Multiguna	Telah dijalankan
Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah dijalankan

Kegiatan Usaha Penunjang

Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan sewa operasi (*Operating Lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan serta Produk dan Jasa

Saat ini, Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna, anjak piutang, dan kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 5 (Revisi 2009) tentang "Segmen Operasi", segmen usaha Perseroan dikelompokkan berdasarkan kelompok nasabah utama dan produk, yaitu *Fleet* dan *Retail*, serta segmen lainnya sebagai perhitungan yang tidak dapat dialokasikan ke dalam kedua segmen tersebut.

Pembiayaan Investasi

adalah pembiayaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada Debitur.

Pembiayaan Modal Kerja

adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha *Customer*, dengan cara menyediakan batas pembiayaan kepada *Customer* yang bersifat *committed* dan *advised*.

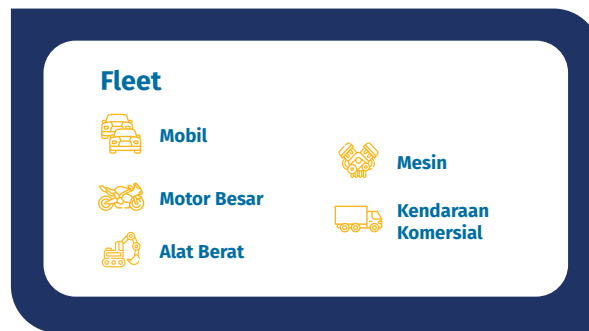
Pembiayaan Retail



Pembiayaan Retail adalah pembiayaan kepada Pelanggan yang mengajukan pembiayaan melalui kantor Cabang MTF dengan menu *Credit Scoring*. Pembiayaan retail diberikan kepada *target market* untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor berupa mobil penumpang baru, mobil penumpang bekas, hingga pembiayaan karoseri. Dalam pembiayaan retail ketentuan biaya administrasi dan asuransi dibebankan kepada pelanggan, besar bebannya tergantung dari jangka waktu pembiayaan dan ditetapkan terpisah dalam produk/paket pembiayaan yang disediakan selama masa pembiayaan, objek pembiayaan wajib dilakukan mitigasi risiko dengan penyertaan asuransi.

Adanya pembiayaan retail bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada Pelanggan untuk memiliki Kendaraan dengan biaya yang kompetitif serta pilihan beragam jenis produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pelanggan dengan pembayaran secara angsuran.

Pembiayaan Fleet



Pembiayaan Fleet adalah pembiayaan kepada Pelanggan yang dikelola oleh Divisi Corporate Fleet, dengan ketentuan Batas Pemberian Pembiayaan (BPP) kepada 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) kelompok Obligor baik badan usaha maupun perseorangan. Pembiayaan Fleet terbagi menjadi 2 (dua) buku, yaitu Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja.

Pembiayaan *fleet* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan atau badan hukum dalam membantu kegiatan usaha, mendukung perkembangan sektor industri dan infrastruktur, Mandiri Tunas Finance hadir melalui Divisi Corporate Fleet menyediakan berbagai macam fasilitas pembiayaan seperti:

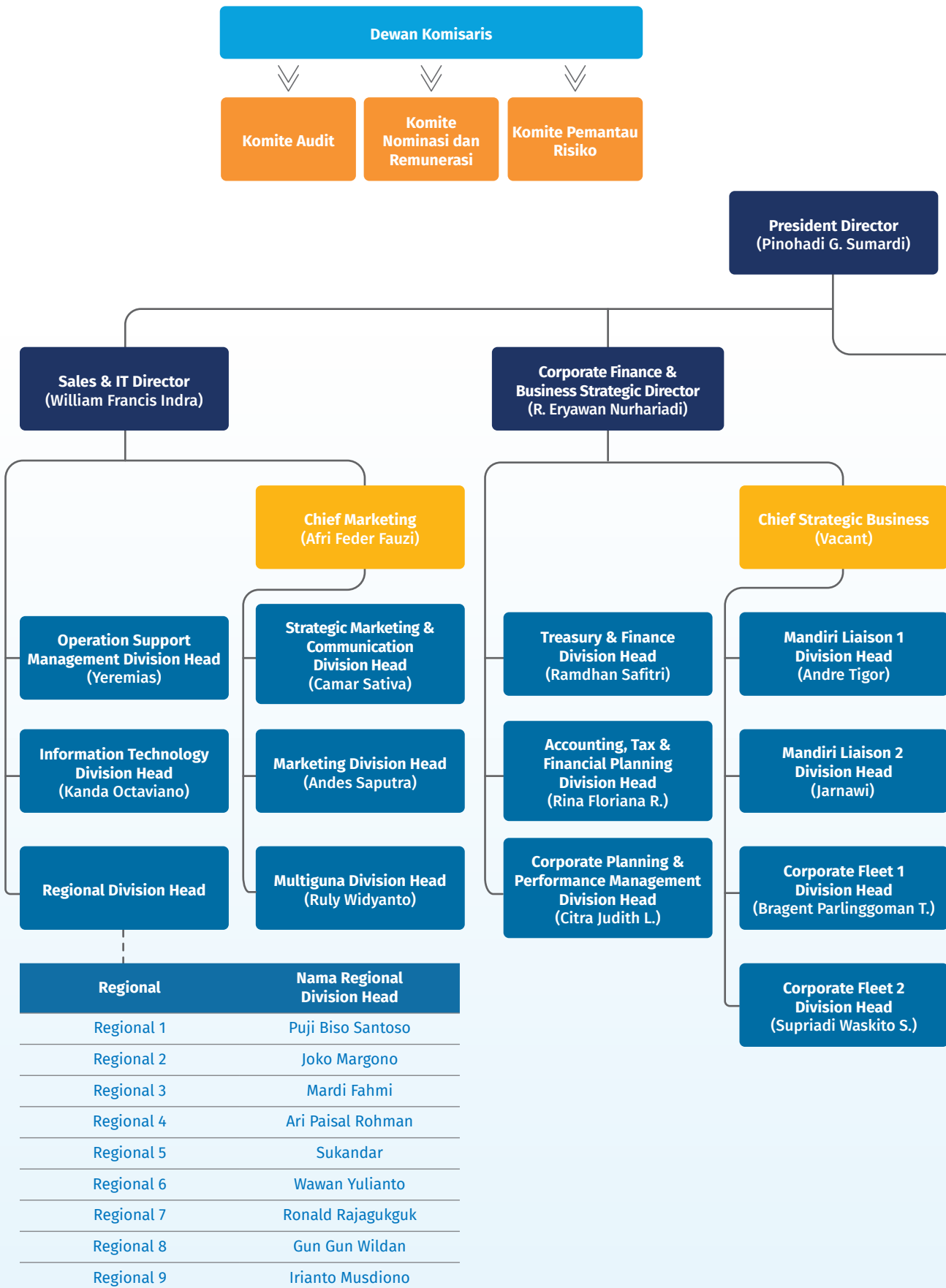
1. Pembiayaan dalam skala besar
2. Pembiayaan *Cars Ownership Program (COP)*
3. Perusahaan Pembiayaan *Motorcycles Ownership Program (MOP)*
4. Perusahaan Pembiayaan kendaraan operasional
5. Perusahaan Pembiayaan alat-alat berat (*heavy equipments*) dan Mesin

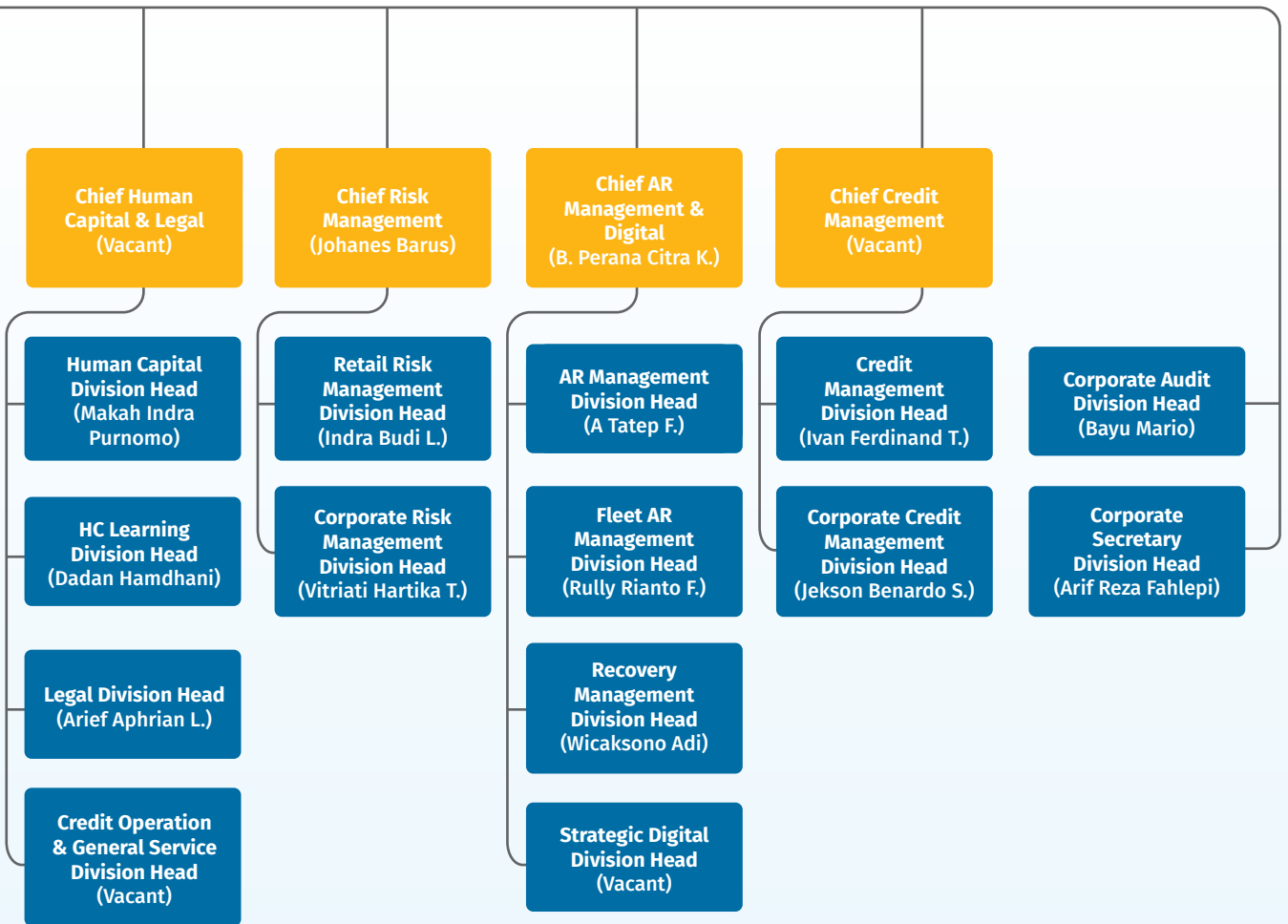
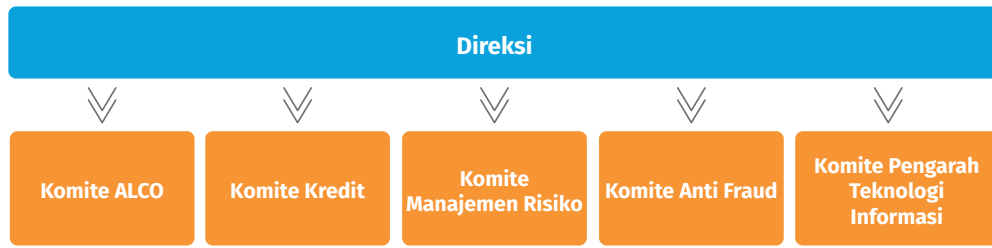
Keanggotaan dalam Asosiasi

Untuk memperkuat bisnisnya, MTF telah tergabung dalam keanggotaan organisasi, di antaranya adalah:

Nama Organisasi	Lingkup	Posisi MTF	Peran dan Kontribusi MTF
Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)	Nasional	Anggota	Meningkatkan perekonomian Indonesia dari sektor otomotif.
PT Rapi Utama Indonesia (RAPINDO)	Nasional	Anggota	Mendorong praktik bisnis di sektor jasa keuangan yang lebih sehat, transparan dan akuntabel.
Kamar Dagang dan Industri (KADIN)	Nasional	Anggota	Sebagai mitra yang sangat menarik dan strategis untuk kegiatan bisnis, perdagangan dan investasi.

Struktur Organisasi





Profil Dewan Komisaris

Tahun 2023 terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris. Sesuai hasil Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS untuk Menyelenggarakan RUPS Tahunan (Keputusan Sirkuler) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 137 tanggal 28 Juni 2023, Fendy Eventius Mugni diangkat sebagai Komisaris Independen menggantikan Ravik Karsidi, sehingga susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2023 menjadi sebagai berikut:

1. Komisaris Utama: Rico Adisurja Setiawan
2. Komisaris: Totok Priyambodo
3. Komisaris Independen: Fendy Eventius Mugni



RICO ADISURJA SETIAWAN
Komisaris Utama

Tempat dan Tahun Lahir/Usia
Lahir di Jakarta pada tahun 1971
Usia 52 tahun per Desember 2023

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta Pusat

Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Master of Business Administration dari Woodbury University (1994) • Bachelor of Science dari University of Southern California (1992)
Sertifikasi yang dimiliki	Sertifikasi Dasar Pembiayaan untuk Komisaris
Pelatihan pada tahun 2023	Seminar Nasional “Era Baru Industri Pembiayaan”
Dasar Hukum Pengangkatan	<p>Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Utama pada RUPS Tahunan tanggal 26 April 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 23 tanggal 26 April 2017. Jabatannya sebagai Komisaris Utama berlaku efektif melalui Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-471/NB.11/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Rico Adisurja Setiawan selaku Komisaris Utama.</p> <p>Pengangkatan kedua sebagai Komisaris Utama pada RUPS Tahunan tanggal 17 Februari 2020 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 28 tanggal 25 Februari 2020.</p> <p>Diangkat kembali untuk periode ketiga sebagai Komisaris Utama Mandiri Tunas Finance pada Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS untuk Menyelenggarakan RUPS Tahunan (Keputusan Sirkuler) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 137 tanggal 28 Juni 2023.</p>
Periode Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • 26 April 2017 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 (Periode Pertama) • 17 Februari 2020 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 (Periode Kedua) • 28 Juni 2023 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 (Periode Ketiga)
Rangkap Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama PT Tunas Mobilindo Perkasa (2017-sekarang) • Komisaris Utama PT Asia Surya Perkasa (2015-sekarang) • Komisaris Utama PT Tunas Dwipa Matra (2013-sekarang) • Komisaris PT Rahardja Ekalancar (2010-sekarang) • Direktur Utama PT Tunas Ridean (2010-sekarang) • Direktur Utama PT Tunas Asset Sarana (2005-sekarang) • Direktur Utama PT Surya Mobil Megahtama (2005-sekarang) • Direktur PT Surya Sudeco (2005-sekarang) • Direktur Utama PT Tunas Mobilindo Parama (1997-sekarang)
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PT Tunas Financindo Sarana (sekarang PT Mandiri Tunas Finance) (2005-2009) • Direktur PT Tunas Financindo Sarana (sekarang PT Mandiri Tunas Finance) (2000-2005) • Direktur Utama PT Tunas Andalan Pratama (1998-2010) • Direktur Provisions (Asia) Trading Singapore (1998-2001) • Komisaris PT Tunas Dwipa Matra (1997-2010) • Direktur PT Tunas Ridean (1996-1998, 2001-2010) • Direktur PT Tunas Financindo Corporation (sekarang PT Mandiri Tunas Finance) (1995-1999) • Management Consultant Prasetio Utomo Arthur Andersen (1995-1996).
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, namun menjabat sebagai Direktur Utama di PT Tunas Ridean yang merupakan pemegang saham Perseroan.
Kepemilikan Saham	Tidak memiliki saham Perseroan posisi 31 Desember 2023



TOTOK PRIYAMBODO
Komisaris

Tempat dan Tahun Lahir/Usia
Lahir di Surabaya pada tahun 1974
Usia 49 tahun per Desember 2023

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta Selatan

Riwayat Pendidikan	Sarjana di bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1997)
Sertifikasi yang dimiliki	Sertifikasi Dasar Pembiayaan untuk Komisaris (SPPI)
Pelatihan pada tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> Webinar “Leadership in Changing Atmosphere” (APPI) International Seminar “Multifinance Indonesia: Welcoming The Great Opportunities After Pandemic” (APPI)
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Komisaris Mandiri Tunas Finance untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS untuk Menyelenggarakan RUPS Tahunan (Keputusan Sirkuler) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 22 tanggal 17 Juni 2022. Jabatannya sebagai Komisaris berlaku efektif melalui Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-60/KDK.05/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Totok Priyambodo sebagai Komisaris.
Periode Jabatan	17 Juni 2022 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 (Periode Pertama)
Rangkap Jabatan	SEVP Commercial Banking Bank Mandiri (November 2020-Maret 2024)
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> SEVP Commercial Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (November 2020-Sekarang) Komisaris PT Mandiri AXA General Insurance (Mei 2020-Januari 2023) Group Head Commercial Banking 6 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Januari 2019-November 2020) Group Head Middle Corporate 6 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (April 2018-Januari 2019) Executive Bussiness Officer Commercial Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (April 2017-Maret 2018) Memulai karier di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tahun 2004
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, namun menjabat sebagai SEVP Commercial Banking di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang merupakan pemegang saham Perseroan.
Kepemilikan Saham	Tidak memiliki saham Perseroan posisi 31 Desember 2023



FENDY EVENTIUS MUGNI
Komisaris Independen

Tempat dan Tahun Lahir/Usia
Lahir di Pulau Tello pada tahun 1972
Usia 51 tahun per Desember 2023

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Bogor

Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Magister di bidang Teknik Elektro dari Universitas Kristen Indonesia (2020) • Sarjana di bidang Teknik Telekomunikasi dari Universitas Kristen Indonesia (2001)
Sertifikasi yang dimiliki	Sertifikasi Dasar Pembiayaan untuk Komisaris (SPPI)
Pelatihan pada tahun 2023	Tidak ada
Dasar Hukum Pengangkatan	<p>Diangkat sebagai Komisaris Independen Mandiri Tunas Finance untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS untuk Menyelenggarakan RUPS Tahunan (Keputusan Sirkuler) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 137 tanggal 28 Juni 2023.</p> <p>Jabatannya sebagai Komisaris Independen berlaku efektif melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 13/KDK.06/2023 tanggal 08 Desember 2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Fendy Eventius Mugni sebagai Komisaris Independen.</p>
Periode Jabatan	28 Juni 2023 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 (Periode Pertama)
Rangkap Jabatan	Komisaris Independen PT Hotel Indonesia Natour (Persero) (2015-Sekarang)
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Independen PT Hotel Indonesia Natour (Persero) (2015-Sekarang) • Country Manager PT Eflag Solutions Indonesia (2012-2014) • Project Engineer di Nokia Siemens Network Indonesia (2006-2012)
Pernyataan Independensi	Beliau telah menyatakan pernyataan independensi pada tanggal 20 September 2023
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Kepemilikan Saham	Tidak memiliki saham Perseroan posisi 31 Desember 2023

Profil Direksi

Tahun 2023 tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi keanggotaan Direksi. Sesuai hasil Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS untuk Menyelenggarakan RUPS Tahunan (Keputusan Sirkuler) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 137 tanggal 28 Juni 2023, Pinohadi G. Sumardi diangkat kembali untuk periode kedua sebagai Direktur Utama, sehingga susunan Direksi per 31 Desember 2023 menjadi sebagai berikut :

1. Direktur Utama: Pinohadi G. Sumardi
2. Direktur: R. Eryawan Nurhariadi
3. Direktur: William Francis Indra



PINOHADI G. SUMARDI
Direktur Utama

Tempat dan Tahun Lahir/Usia
Lahir di Bandung pada tahun 1970
Usia 53 tahun per Desember 2023

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta Selatan

Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Magister di bidang Bisnis International Finance dari IPMI International Business School (2003) • Sarjana di bidang Finance Management dari Universitas Padjadjaran (1993)
Sertifikasi yang dimiliki	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Ahli Pembiayaan untuk Direksi (SPPI) • Sertifikasi Risk Management Perbankan (LSPP) • Sertifikasi Treasury Dealer (ACI Forexindo)
Pelatihan pada tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Seminar Economic Outlook 2023 tentang “Menjaga Momentum Ekonomi di Tengah Ketidakpastian” (CNBC Indonesia) • Seminar Nasional “Pembiayaan Mikro dan SDM di Era Society 5.0” (APPI) • International Seminar “The Future of Digitalization in Multifinance Industry” (APPI)
Dasar Hukum Pengangkatan	<p>Pengangkatan pertama kali sebagai Direktur Utama Mandiri Tunas Finance pada RUPS Luar Biasa (Keputusan Sirkuler) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 6 tanggal 9 Oktober 2020.</p> <p>Jabatannya sebagai Direktur Utama berlaku efektif melalui Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-368/ NB.11/2020 tanggal 10 November 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pinohadi G. Sumardi selaku Direktur Utama.</p> <p>Diangkat kembali untuk periode kedua sebagai Direktur Utama Mandiri Tunas Finance pada Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS untuk Menyelenggarakan RUPS Tahunan (Keputusan Sirkuler) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 137 tanggal 28 Juni 2023.</p>
Periode Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • 9 Oktober 2020 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 (Periode Pertama) • 28 Juni 2023 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 (Periode Kedua)
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • International Network & Development Department Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-2020) • General Manager Kantor Cabang Luar Negeri Cayman Islands PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012-2019) • Banking Book Management Department Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2010-2012) • Foreign Exchange Chief Dealer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2004-2010).
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham.
Kepemilikan Saham	Tidak memiliki saham Perseroan posisi 31 Desember 2023



R. ERYAWAN NURHARIADI
Direktur

Tempat dan Tahun Lahir/Usia
Lahir di Semarang pada tahun 1971
Usia 52 tahun per Desember 2023

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta Selatan

Riwayat Pendidikan & Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Magister di bidang Manajemen dari Universitas Atma Jaya Jakarta (2001). • Sarjana di bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (1994)
Sertifikasi yang dimiliki	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Ahli Pembiayaan untuk Direksi (SPPI) • Sertifikasi Risk Management Perbankan (LSPP)
Pelatihan pada tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Seminar Nasional “Pembiayaan Mikro dan SDM di Era Society 5.0” (APPI) • International Seminar “The Future of Digitalization in Multifinance Industry” (APPI) • International Seminar “Multifinance Indonesia: Welcoming The Great Opportunities After Pandemic” (APPI)
Dasar Hukum Pengangkatan	<p>Diangkat sebagai Direktur Mandiri Tunas Finance untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS untuk Menyelenggarakan RUPS Tahunan (Keputusan Sirkuler) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 15 tanggal 29 Maret 2021.</p> <p>Jabatannya sebagai Direktur berlaku efektif melalui Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-44/ KDK.05/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan R. Eryawan Nurhariadi selaku Direktur.</p>
Periode Jabatan	29 Maret 2021 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 (Periode Pertama)
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Executive Business Officer SME Banking Grup PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018-2021) • Dewan Pengawas Mandiri Cooperation PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020-2021) • Portfolio & Capability Management, SME Banking Grup Banking Departement Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2018) • Sales & Monitoring Business Banking I Grup Department Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2008-2015).
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham.
Kepemilikan Saham	Tidak memiliki saham Perseroan posisi 31 Desember 2023



WILLIAM FRANCIS INDRA
Direktur

Tempat dan Tahun Lahir/Usia
Lahir di Karawang pada tahun 1982
Usia 41 tahun per Desember 2023

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Tangerang

Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Magister di bidang Manajemen dari Universitas Mercu Buana (2007). • Sarjana di bidang Matematika dari Universitas Padjadjaran (2004)
Sertifikasi yang dimiliki	Sertifikasi Ahli Pembiayaan untuk Direksi (SPPI)
Pelatihan pada tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Seminar Nasional “Tantangan Pembiayaan di Tengah Tahun Politik” (APPI) • Seminar Nasional “Pembiayaan Mikro dan SDM di Era Society 5.0” (APPI) • Seminar Nasional “Economic Outlook 2024” (APPI)
Dasar Hukum Pengangkatan	<p>Diangkat sebagai Direktur Mandiri Tunas Finance untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS untuk Menyelenggarakan RUPS Tahunan (Keputusan Sirkuler) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 15 tanggal 29 Maret 2021.</p> <p>Jabatannya sebagai Direktur berlaku efektif melalui Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-26/ KDK.05/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan William Francis Indra selaku Direktur.</p>
Periode Jabatan	29 Maret 2021 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 (Periode Pertama)
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Chief PT Mandiri Tunas Finance (2016-2021) • IT & Business Excellence Management Division Head PT Mandiri Tunas Finance (2013-2016) • IT Operational & Planning Dept Head PT Mandiri Tunas Finance (2010-2013).
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham.
Kepemilikan Saham	Tidak memiliki saham Perseroan posisi 31 Desember 2023

Profil Pejabat Eksekutif (Chief)



B. PERANA CITRA KETAREN
Chief

Tempat dan Tahun Lahir/Usia
Lahir di Bogor pada tahun 1977
Usia 46 tahun per Desember 2023

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Bogor

Riwayat Pendidikan	Sarjana di bidang Ekonomi Akuntansi dari Universitas Parahyangan Bandung (2001)
Sertifikasi yang dimiliki	Sertifikasi Ahli Pembiayaan untuk Direksi (SPPI)
Pelatihan pada tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> International Seminar “The Future of Digitalization in Multifinance Industry” (APPI) Seminar Nasional “Economic Outlook 2024” (APPI)
Mulai menjabat sejak	Menjabat sebagai Chief berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 00099/SK-HCP.SVC/HC/VI/2023 Tanggal 30 Juni 2023.
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> Finance & Accounting Division Head PT Mandiri Tunas Finance (2015-2016) AR Management Division Head PT Mandiri Tunas Finance (2013-2014) AR Performance & Development Dept. Head PT Mandiri Tunas Finance (2010-2012) Project Manager Bidang Operasional PT Mandiri Tunas Finance (2009-2010)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Chief lainnya, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham.
Kepemilikan Saham	Tidak memiliki saham Perseroan posisi 31 Desember 2023



JOHANES BARUS
Chief

Tempat dan Tahun Lahir/Usia
Lahir di Bukittinggi pada tahun 1972
Usia 51 tahun per Desember 2023

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta Timur

Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Magister di bidang Manajemen dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2008) • Sarjana di bidang Ekonomi Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara (1996)
Sertifikasi yang dimiliki	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Ahli Pembiayaan untuk Direksi (SPPI) • Sertifikasi Risk Management Perbankan (LSPP)
Pelatihan pada tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Seminar Economic Outlook 2023 “Menjaga Momentum Ekonomi di Tengah Ketidakpastian” (CNBC Indonesia) • BARA Risk Forum “ERM and Cyber Security – How to Mitigate and Protect” (BARA) • International Seminar “The Future of Digitalization in Multifinance Industry” (APPI) • Webinar “Leadership in Changing Atmosphere” (OJK Institute)
Mulai menjabat sejak	Menjabat sebagai Chief berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 00100/SK-HCP.SVC/HC/VI/2023 Tanggal 30 Juni 2023.
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • SEVP Risk & Operation PT Bank Mandiri Taspen (2020-2020) • Executive Credit Officer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018-2020) • Chief Risk Officer PT AXA Mandiri Financial Services (2015-2018) • Audit Manager Wholesale Banking Audit II PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013-2015) • Head of Risk Management Bank Mandiri Singapore (2011-2013)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Chief lainnya, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham.
Kepemilikan Saham	Tidak memiliki saham Perseroan posisi 31 Desember 2023

AFRI FEDER FAUZI
Chief

Tempat dan Tahun Lahir/Usia
Lahir di Jakarta pada tahun 1981
Usia 42 tahun per Desember 2023

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Tangerang Selatan

Riwayat Pendidikan	Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Bisnis dari Universitas Brawijaya Malang (2004)
Sertifikasi yang dimiliki	Sertifikasi Ahli Pembiayaan untuk Direksi (SPPI)
Pelatihan pada tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Seminar Economic Outlook 2023 “Menjaga Momentum Ekonomi di Tengah Ketidakpastian” (CNBC Indonesia) • BARA Risk Forum “ERM and Cyber Security – How to Mitigate and Protect” (BARA) • International Seminar “The Future of Digitalization in Multifinance Industry” (APPI) • Webinar “Leadership in Changing Atmosphere” (OJK Institute)
Mulai menjabat sejak	Menjabat sebagai Chief berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 00101/SK-HCP.SVC/HC/VI/2023 Tanggal 30 Juni 2023.
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Strategic Marketing & Product Division Head PT Mandiri Tunas Finance (2018-2022) • Marketing & Product Development Division Head PT Mandiri Tunas Finance (2015-2018) • Marketing & Product Development Deputy Division Head PT Mandiri Tunas Finance (2014-2015) • Dealer Relation Management Department Head PT Mandiri Tunas Finance (2013-2014) • Branch Manager PT Mandiri Tunas Finance (2012-2013)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Chief lainnya, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham.
Kepemilikan Saham	Tidak memiliki saham Perseroan posisi 31 Desember 2023

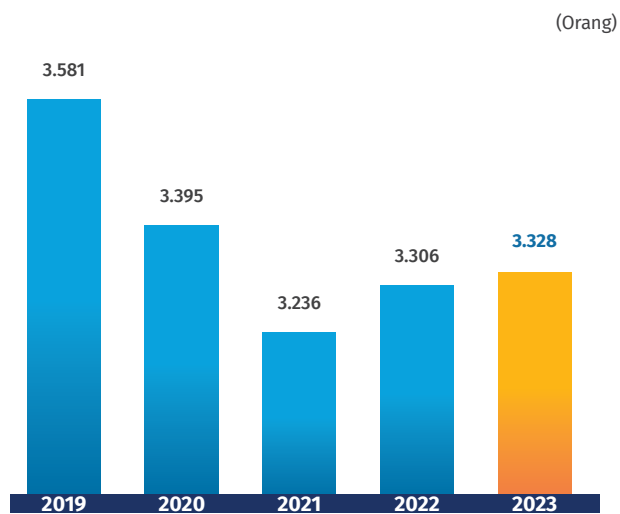
Kepala Divisi dan/atau Jabatan Setingkat

Direktorat	Jabatan (Satu Level di Bawah Direksi)	Nama
Di Bawah Supervisi Direktur Utama	Corporate Audit Division Head	Bayu Mario
	Corporate Secretary Division Head	Arif Reza Fahlepi
Chief Human Capital & Legal	Human Capital Division Head	Makah Indra Purnomo
	HC Learning Division Head	Dadan Hamdhani
	Legal Division Head	Arief Aphrian Lambri
	Credit Operation & General Service Division Head	-
Chief Risk Management	Retail Risk Management Division Head	Indra Budi Laksana
	Corporate Risk Division Head	Vitriati Hartika T
Chief AR Management & Digital	AR Management Division Head	A Tatep Fathurohman
	Fleet AR Management Division Head	Rully Rianto F
	Recovery Management Division Head	Wicaksono Adi
	Strategic Digital Division Head	-
Chief Credit Management	Credit Management Division Head	Ivan Ferdinand Thanta
	Corporate Credit Management Division Head	Jekson Benardo Simanjuntak
Di Bawah Supervisi Direktur Sales & IT	Regional Division Head Regional 1	Puji Bisno Santoso
	Regional Division Head Regional 2	Joko Margono
	Regional Division Head Regional 3	Mardi Fahmi
	Regional Division Head Regional 4	Ari Paisal Rohman
	Regional Division Head Regional 5	Wawan Yuliyanto
	Regional Division Head Regional 6	Sukandar
	Regional Division Head Regional 7	Ronald Rajagukguk
	Regional Division Head Regional 8	Gun Gun Wildan
	Regional Division Head Regional 9	Irianto Musdiono
	Operation Support Management Division Head	Yeremias
Information Technology Division Head	Kanda Octaviano	
Chief Marketing	Strategic Marketing & Communication Division Head	Camar Sativa
	Marketing Division Head	Andes Saputra
	Multiguna Division Head	Ruly Widyanto
	Multiguna Advisor Division Head	I Ketut Suwitra
Di Bawah Supervisi Direktur Corporate Finance & Business Strategic	Treasury & Finance Division Head	Ramadhan Safitri
	Accounting, Tax & Financial Planning Division Head	Rina Floriana Rustik
	Corporate Planning & Performance Management Division Head	Citra Judith Lupitadevi
Chief Strategic Business	Mandiri Liaison 1 Division Head	Andre Tigor
	Mandiri Liaison 2 Division Head	Jarnawi
	Corporate Fleet 1 Division Head	Bragent Parlinggoman Tambunan
	Corporate Fleet 2 Division Head	Supriadi Waskito Susilo

Demografi Karyawan



Jumlah Karyawan dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir



Jumlah Karyawan Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan

Level Organisasi/ Jabatan	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) (%)
	L	P	Jumlah	%	L	P	Jumlah	%	
Executive									
Komisaris	3	0	3	0,09	3	0	3	0,09	0%
Direksi	3	0	3	0,09	3	0	3	0,09	0%
Chief	3	0	3	0,09	3	0	3	0,09	0%
Sub Jumlah	9	0	9	0,27	9	0	9	0,27	0%
Komite/Organ Pendukung	4	0	4	0,12	4	0	4	0,12	0%
Division Head	31	3	34	1,02	27	3	30	0,91	13%
Deputy Division Head	3	1	4	0,12	0	0	0	0	0%
Manager	226	69	295	8,86	209	55	264	7,99	12%
Supervisor	824	372	1.196	35,94	772	327	1.099	33,24	9%
Staf	1.218	568	1.786	53,67	1.310	590	1.900	57,47	-6%
Jumlah	2.315	1.013	3.328		2.331	975	3.306		

Keterangan:

*) L= Laki-laki/P= Perempuan

Jumlah Karyawan Berdasarkan Regional dan Divisi

Lokasi Kerja/ Penempatan	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) (%)
	L	P	Jumlah	%	L	P	Jumlah	%	
Corporate Fleet	37	23	60	1,8	35	17	52	1,57	15,38%
Head Office	370	260	630	18,93	317	227	544	16,45	15,81%
Regional 1	159	52	211	6,34	177	52	229	6,92	-7,86%
Regional 2	288	82	370	11,12	314	87	401	12,12	-7,73%
Regional 3	234	89	323	9,71	236	90	326	9,86	-0,92%
Regional 4	203	100	303	9,1	204	102	306	9,25	-0,98%
Regional 5	181	78	259	7,78	188	72	260	7,86	-0,38%
Regional 6	203	65	268	8,05	206	68	274	8,28	-2,19%
Regional 7	269	104	373	11,21	266	105	371	11,22	0,54%
Regional 8	167	77	244	7,33	176	74	250	7,56	-2,40%
Regional 9	204	83	287	8,62	212	81	293	8,86	-2,05%
Jumlah	2.315	1.013	3.328		2.331	975	3.306		

Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) (%)
	L	P	Jumlah	%	L	P	Jumlah	%	
S3	0	0	0	0	1	0	1	0,03	(100,00)
S2	35	15	50	1,50	31	12	43	1,30	16,00
S1, D4	1.654	792	2.446	73,50	1.626	761	2.387	72,20	2,00
Diploma (D3, D2, D1)	349	188	537	16,14	370	185	555	16,79	(3,00)
SLTA dan Sederajat	277	18	295	8,86	303	17	320	9,68	(8,00)
Jumlah	2.315	1.013	3.328		2.331	975	3.306		

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) (%)
	L	P	Jumlah	%	L	P	Jumlah	%	
Kontrak	339	178	517	15,53	280	149	429	12,98	20,51
Permanen	1.973	835	2.808	84,38	2.047	824	2.871	86,84	(2,19)
Probation	3	0	3	0,09	4	2	6	0,18	(50,00)
Jumlah	2.315	1.013	3.328		2.331	975	3.306		

Jumlah Karyawan Berdasarkan Rentang Usia

Rentang Usia	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) (%)
	L	P	Jumlah	%	L	P	Jumlah	%	
> 50 tahun	90	17	107	3,22	77	13	90	2,72	18,89
40-49 tahun	701	146	847	25,45	652	124	776	23,47	9,57
30-39 tahun	1.177	524	1.701	51,11	1.233	523	1.756	53,12	(2,97)
20-29 tahun	347	326	673	20,22	369	315	684	20,69	(1,61)
< 20 tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	2.315	1.013	3.328		2.331	975	3.306		

Jumlah Karyawan Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) (%)
	L	P	Jumlah	%	L	P	Jumlah	%	
> 9 tahun	1.018	459	1.477	44,38	878	404	1.282	38,78	15,21
5 - 9 tahun	599	201	800	24,04	769	243	1.012	30,61	(20,95)
3 - 5 tahun	282	108	390	11,72	353	132	485	14,67	(19,59)
1 - 3 tahun	233	174	407	12,23	167	106	273	8,26	49,08
< 1 tahun	183	71	254	7,63	164	90	254	7,68	0,00
Jumlah	2.315	1.013	3.328		2.331	975	3.306		

Jumlah Karyawan Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin

Gender	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) (%)
	Jumlah	%	Jumlah	%	
Laki-laki	2.315	69,56	2.331	70,51	(0,69)
Perempuan	1.013	30,44	975	29,49	3,90
Jumlah	3.328		3.306		

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal dan Manajemen Risiko

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat dan Waktu	Penyelenggara
Dewan Komisaris				
Rico Adisurja Setiawan (Komisaris Utama)	Pelatihan Publik	Seminar Nasional "Era Baru Industri Pembiayaan"	Jakarta, 06/06/2023	APPI
Totok Priyambodo (Komisaris)	Pelatihan Publik	Webinar "Leadership In Changing Atmosphere"	Online, 24/08/2023	OJK Institute
	Pelatihan Publik	International Seminar: Multifinance Indonesia: Welcoming The Great Opportunities After Pandemic	Tokyo, Jepang, 15/12/2023	APPI
Ravik Karsidi (Komisaris Independen)*	-	-	-	-
Fendy Eventius Mugni (Komisaris Independen)**	Pelatihan Inhouse	Pembekalan Internal Komisaris	Jakarta, 24/08/2023	MTF
	Pelatihan Publik	Sertifikasi Dasar Pembiayaan Komisaris	Jakarta, 30/08/2023	SPPI
Direksi				
Pinohadi G Sumardi (Direktur Utama)	Pelatihan Publik	Seminar Economic Outlook 2023 "Menjaga Momentum Ekonomi Di Tengah Ketidakpastian"	Jakarta, 28/02/2023	CNBC Indonesia
	Pelatihan Publik	Seminar Nasional "Pembiayaan Mikro Dan Sdm Di Era Society 5.0"	Jakarta, 03/03/2023	APPI
	Pelatihan Publik	International Seminar "The Future Of Digitalization In Multifinance Industry"	Jakarta, 01/08/2023	APPI

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat dan Waktu	Penyelenggara
William Francis Indra (Direktur)	Pelatihan Publik	Seminar Nasional "Tantangan Pembiayaan Di Tengah Tahun Politik"	Jakarta, 31/01/2023	APPI
	Pelatihan Publik	Seminar Nasional "Pembiayaan Mikro Dan Sdm Di Era Society 5.0"	Jakarta, 03/03/2023	APPI
	Pelatihan Publik	Seminar Nasional "Economic Outlook 2024"	Jakarta, 03/10/2023	APPI
R. Eryawan Nurhariadi (Direktur)	Pelatihan Publik	Seminar Nasional "Pembiayaan Mikro Dan Sdm Di Era Society 5.0"	Jakarta, 03/03/2023	APPI
	Pelatihan Publik	International Seminar "The Future Of Digitalization In Multifinance Industry"	Jakarta, 01/08/2023	APPI
	Pelatihan Publik	International Seminar: Multifinance Indonesia: Welcoming The Great Opportunities After Pandemic	Tokyo, Jepang, 15/12/2023	APPI
Chief				
Bonifatius Perana Citra Ketaren (Chief)	Pelatihan Publik	International Seminar "The Future Of Digitalization In Multifinance Industry"	Jakarta, 01/08/2023	APPI
	Pelatihan Publik	Seminar Nasional "Economic Outlook 2024"	Jakarta, 03/10/2023	APPI
Johanes Barus (Chief)	Pelatihan Publik	Seminar Economic Outlook 2023 "Menjaga Momentum Ekonomi di tengah Ketidakpastian"	Jakarta, 28/02/2023	CNBC Indonesia
	Pelatihan Publik	Bara Risk Forum "Erm And Cyber Security - How To Mitigate And Protect"	Online, 26/07/2023	BARA
	Pelatihan Publik	International Seminar "The Future Of Digitalization In Multifinance Industry"	Jakarta, 01/08/2023	APPI
	Pelatihan Publik	Webinar "Leadership In Changing Atmosphere"	Online, 24/08/2023	OJK Institute
Afri Feder Fauzi (Chief)	Pelatihan Publik	International Seminar "The Future Of Digitalization In Multifinance Industry"	Jakarta, 01/08/2023	APPI
	Pelatihan Publik	Seminar Nasional "Economic Outlook 2024"	Jakarta, 03/10/2023	APPI

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat dan Waktu	Penyelenggara
Komite Audit				
Marlan Marthias Achmad	Pelatihan Publik	KONFERENSI NASIONAL KOMITE AUDIT 2023 "Mengawal Keberlanjutan Dan Pertumbuhan Perseroan Melalui Pengawasan Dan Pengendalian Risiko"	Jakarta, 10/10/2023	IKAI
Komite Nominasi & Remunerasi				
Fendy Eventius Mugni (Komisaris Independen)**	Pelatihan Inhouse	Pembekalan Internal Komisaris	Jakarta, 24/08/2023	MTF
	Pelatihan Publik	Sertifikasi Dasar Pembiayaan Komisaris	Jakarta, 30/08/2023	SPPI
Totok Priyambodo (Komisaris)	Pelatihan Publik	Webinar "Leadership In Changing Atmosphere"	Online, 24/08/2023	OJK Institute
	Pelatihan Publik	International Seminar: Multifinance Indonesia: Welcoming The Great Opportunities After Pandemic	Tokyo, Jepang, 15/12/2023	APPI
Komite Pemantau Risiko				
Irwan Trinugroho	-	-	-	-
Sekretaris Perusahaan				
Arif Reza Fahlepi (Corporate Secretary Division Head)	Pelatihan Publik	Webinar "Leadership In Changing Atmosphere"	Online, 08/08/2023	OJK Institute
	Pelatihan Inhouse	Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	Jakarta, 11/11/2023	MTF & OJK
	Pelatihan Publik	Anti Fraud & Gratifikasi	Jakarta, 12/12/2023	Hari Iman Wahyudi, S.psi, Psikolog, Cht
	Pelatihan Inhouse	Leadership For General Manager	Jakarta, 12/12/2023	Jakarta
Audit Internal				
Bayu Mario (Corporate Audit Division Head)	Pelatihan Publik	Sertifikasi Dasar Pembiayaan - Managerial	Jakarta, 17/03/2023	SPPI
	Pelatihan Publik	2023 IIA Indonesia National Conference	Jakarta, 10/08/2023	IIA
	Pelatihan Publik	Forum Penguatan Governansi dan Integritas Pelaporan Keuangan & Practical Implementation of Risk Management and Internal Audit in State Owned Enterprises	Jakarta, 12/09/2023	BUMN & FKSPI
	Pelatihan Inhouse	Metodologi Penulisan Laporan Audit	Jakarta, 11/11/2023	PT Asanka Kreasi Mandiri
	Pelatihan Inhouse	Leadership for General Manager	Jakarta, 12/12/2023	MTF

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat dan Waktu	Penyelenggara
Retail Risk Management				
Indra Budi Laksana (Retail Risk Management Division Head)	Pelatihan Publik	Sertifikasi Risk Management Satu Tingkat Dibawah Direksi	Jakarta, 11/07/2023	SPPI
	Pelatihan Publik	<i>Credit Skills Accreditation Training Program Batch 3</i>	Jakarta, 11/08/2023	Moody's
	Pelatihan Inhouse	Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	Jakarta, 11/11/2023	MTF & OJK
	Pelatihan Inhouse	<i>Leadership for General Manager</i>	Jakarta, 12/12/2023	MTF
Corporate Risk Management				
Vitriati Hartika (Corporate Risk Management Division Head)	Pelatihan Inhouse	<i>Awareness Training of Information Security Management System based on ISO 27001:2022</i>	11/01/2023	MTF
	Pelatihan Inhouse	<i>Training of Internal Audit ISO 27001:2022 based on ISO 19011:2018</i>	12/02/2023	MTF
	Pelatihan Publik	Sertifikasi Risk Management Satu Tingkat di bawah Direksi	Jakarta, 11/07/2023	SPPI
	Pelatihan Publik	<i>ERM And Cyber Security - How to Mitigate and Protect</i>	Jakarta, 18/07/2023	BARA
	Pelatihan Inhouse	<i>General Manager Development Program</i>	Jakarta, 12/12/2023	MTF
	Pelatihan Inhouse	<i>Leadership for General Manager</i>	Jakarta, 12/12/2023	MTF

* Sdr. Ravik Karsidi diberhentikan melalui RUPS Tahunan pada tanggal 27 Juni 2023

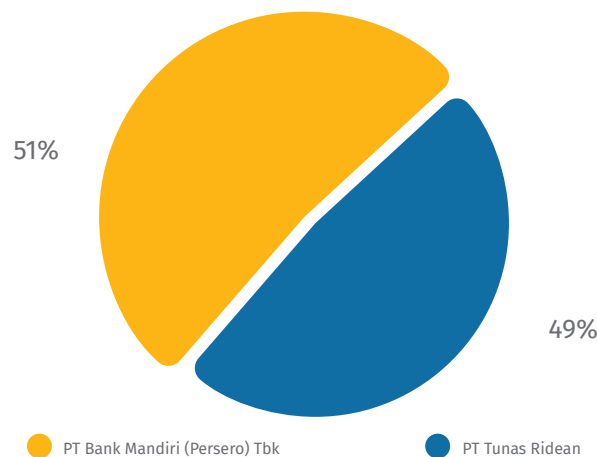
** Aktif pada tanggal 8 Desember 2023 setelah memperoleh uji kemampuan dan kepatutan dari OJK

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham

Komposisi Kepemilikan Saham Mandiri Tunas Finance

No	Pemegang Saham	1 Januari 2023			31 Desember 2023		
		Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan Saham (%)	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan Saham (%)
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.275.000.000	127.500.000.000	51,00	1.275.000.000	127.500.000.000	51,00
2	PT Tunas Ridean	1.225.000.000	122.500.000.000	49,00	1.225.000.000	122.500.000.000	49,00
Jumlah		2.500.000.000	250.000.000.000	100,00	2.500.000.000	250.000.000.000	100,00

Komposisi Kepemilikan Saham Mandiri Tunas Finance



Informasi tentang Kepemilikan Saham Mandiri Tunas Finance oleh Manajemen Kunci

Kepemilikan Saham Mandiri Tunas Finance oleh Dewan Komisaris dan Direksi, Baik Langsung atau Tidak Langsung

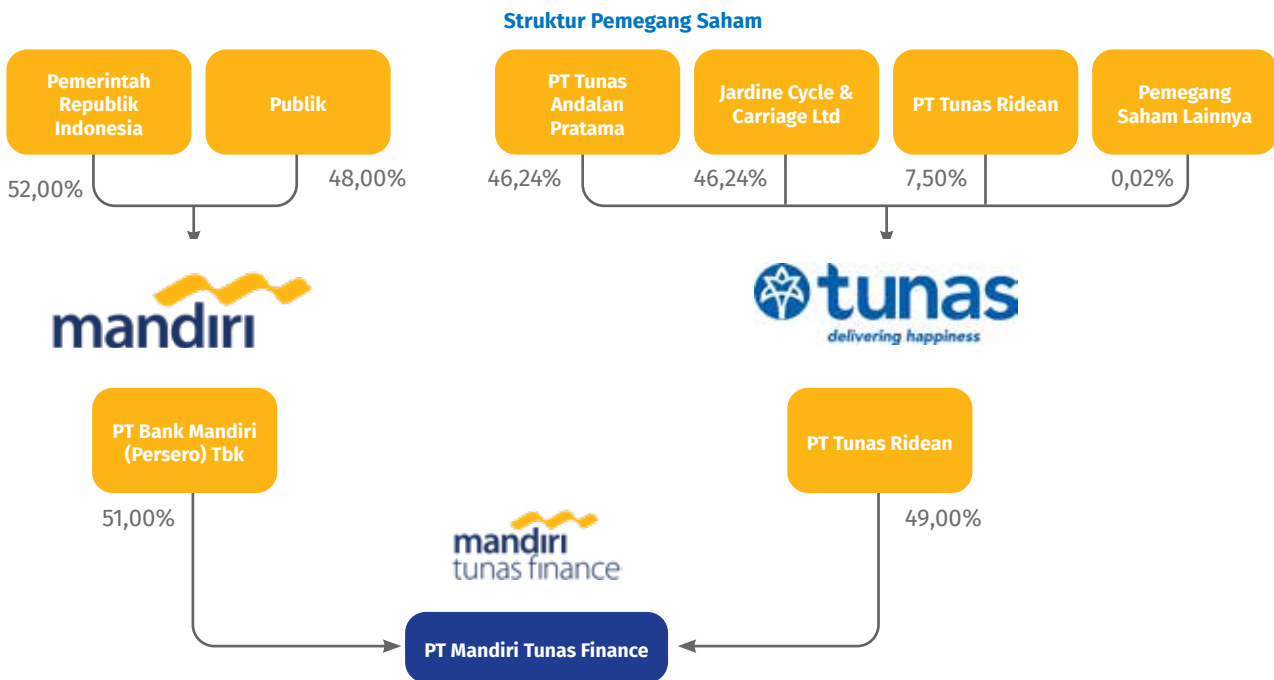
Dewan Komisaris dan Direksi	Jabatan	Kepemilikan Saham MTF Secara Langsung		Kepemilikan Saham MTF Secara Tidak Langsung	
Dewan Komisaris					
Rico Adisurja Setiawan	Komisaris Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Totok Priyambodo	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Fendy Eventius Mugni	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Direksi					
Pinohadi G. Sumardi	Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
William Francis Indra	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
R. Eryawan Nurhariadi	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan:

*) Nihil = tidak memiliki saham MTF

Informasi Tentang Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Hingga Nama Pemilik Akhir

Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang memiliki saham Perseroan sebanyak 51,00%. Sementara PT Tunas Ridean memiliki saham Perseroan sebanyak 49,00%. Berikut disampaikan struktur kepemilikan saham hingga nama pemilik akhir.



PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya disebut “Bank Mandiri”, didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 di Negara Republik Indonesia dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H., No. 10, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1998 tanggal 1 Oktober 1998. Bank Mandiri didirikan melalui merger atau penggabungan usaha dari 4 (empat) bank BUMN, yaitu PT Bank Bumi Daya (Persero), PT Bank Dagang Negara (Persero), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero), dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). Pada 14 Juli 2003, Bank Mandiri melakukan Penawaran Umum Saham perdana dengan kode saham “BMRI” sebesar 20% atau ekuivalen dengan 4 miliar lembar saham.

Seiring berjalannya waktu dan didukung dengan pengalaman serta kemampuan yang matang dalam memberikan layanan perbankan, terutama pada segmen kredit korporasi, hingga kini Bank Mandiri masih dipercaya sebagai salah satu Bank BUMN yang terbesar di Indonesia dari sisi total aset, pinjaman, dan deposit.

Sebagai bank BUMN yang beroperasi di tengah populasi masyarakat terbesar di dunia, serta dalam rangka mewujudkan aspirasi jangka panjangnya di tahun 2020 - 2024 yaitu “*To be your preferred financial partner*” atau Menjadi *Partner Financial* Pilihan Utama Anda, maka Bank Mandiri secara konsisten memfokuskan pada 2 (dua) hal, yaitu

- Komitmen membangun hubungan jangka panjang yang didasari atas kepercayaan baik dengan nasabah bisnis maupun perseorangan. Bank Mandiri melayani seluruh nasabah dengan standar layanan internasional melalui penyediaan solusi keuangan yang inovatif. Bank Mandiri ingin dikenal karena kinerja, sumber daya manusia dan kerja sama tim yang terbaik.
- Mengambil peran aktif dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang Indonesia dan selalu menghasilkan imbal balik yang tinggi secara konsisten bagi pemegang saham.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Mandiri secara berkesinambungan meningkatkan posisi dan kemampuannya pada sektor industri perbankan Nasional dengan memerhatikan perkembangan teknologi yang cepat, kebutuhan nasabah yang semakin dinamis, dan demografis masyarakat Indonesia.

Informasi Umum PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Nama Perusahaan	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Tanggal Pendirian	2 Oktober 1998
Bidang Usaha	Perbankan
Pencatatan Saham	Bursa Efek Indonesia, 14 Juli 2003, kode saham "BMRI"
Jaringan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Kantor Pusat • 139 Kantor Cabang • 10 Entitas Anak dan 5 Entitas Cucu (termasuk 1 Entitas Cicit) • 2.104 Cabang Pembantu • 12.906 ATM • 7 Kantor Luar Negeri (5 Cabang Luar Negeri dan 2 Entitas Anak)
Jumlah Karyawan	38.940 orang (2023)
Kinerja Keuangan per 31 Desember 2023 (dalam jutaan rupiah)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Aset 2.174.219.449 • Jumlah Simpanan Nasabah 225.501.470 • Jumlah Ekuitas 287.494.962 • Jumlah Pendapatan Bunga dan Syariah - Neto 98.009.620 • Jumlah Laba Bersih Tahun Berjalan 60.051.870
Alamat Kantor Pusat	Plaza Mandiri Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 Indonesia Telp: +6221 5265045 Fax: +6221 5274477, 527557 Email: corporate.communication@bankmandiri.co.id
Situs Web	www.bankmandiri.co.id

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Per 31 Desember 2023

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama/Komisaris Independen	Muhamad Chatib Basri
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Andrinof A. Chaniago
Komisaris Independen	Loeke Larasati Agoestina
Komisaris Independen	Muliadi Rahardja
Komisaris Independen	Heru Kristiyana
Komisaris Independen	Zainudin Amali
Komisaris	Rionald Silaban
Komisaris	Arif Budimanta
Komisaris	Faried Utomo
Komisaris	Nawal Nely
Komisaris	Muhammad Yusuf Ateh
Direksi	
Direktur Utama	Darmawan Junaidi
Wakil Direktur Utama	Alexandra Askandar
Direktur Manajemen Risiko	Ahmad Siddik Badruddin

Direksi	
Direktur Kepatuhan dan SDM	Agus Dwi Handaya
Direktur Commercial Banking	Riduan
Direktur Jaringan & Retail Banking	Aquarius Rudianto
Direktur Operation	Toni E. B. Subari
Direktur Corporate Banking	Susana Indah Kris Indriati
Direktur Hubungan Kelembagaan	Rohan Hafas
Direktur Keuangan & Strategi	Sigit Prastowo
Direktur Information Technology	Timothy Utama
Direktur Treasury & International Banking	Eka Fitria

PT Tunas Ridean

PT Tunas Ridean, selanjutnya disebut “Tunas Grup”, merupakan pemegang saham pendiri Perseroan. Tunas Grup adalah perusahaan keluarga bernama Tunas Indonesia Motor yang beroperasi sejak tahun 1967. Pada tahun 1980, Tunas Grup mengintegrasikan seluruh bisnis unit ke dalam satu perusahaan induk PT Tunas Ridean. Perusahaan ini kemudian mendaftarkan diri di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1995 melalui aksi korporasi Penawaran Umum Saham perdana dengan kode saham “TURI”.

Di tahun 2012, Tunas Grup memperluas jaringan outlet penjualan dan layanan purna jual merk otomotif melalui akuisisi *dealer* resmi merk Isuzu PT Rahardja Ekalancar dan sekarang bernama Tunas Isuzu. Pada November 2014, PT Tunas Dwipa Matra bersama-sama dengan pihak ketiga mendirikan PT Asia Surya Perkasa, dealer utama sepeda motor Honda untuk wilayah Bangka Belitung.

Saat ini Tunas Grup telah menjadi grup otomotif independen terbesar yang memiliki 161 *outlet* yang tersebar di seluruh Indonesia. Tunas Grup mengoperasikan jaringan *outlet* penjualan dan layanan purnajual merk otomotif ternama melalui PT Tunas Ridean (Tunas Toyota), PT Tunas Mobilindo Perkasa (Tunas Daihatsu dan Tunas Peugeot), PT Tunas Mobilindo Parama (Tunas BMW), dan PT Tunas Dwipa Matra diler utama sepeda motor Honda untuk wilayah Lampung. Perseroan melalui PT Tunas Aset Sarana (Tunas Used Car) juga mengoperasikan layanan penjualan mobil bekas BMW *Premium Selection*.

Selain itu Tunas Grup mengoperasikan layanan penyewaan kendaraan dan pengelolaan armada jangka pendek dan jangka panjang melalui PT Surya Sudeco (Tunas Rent). PT Surya Sudeco mendirikan perusahaan *manpower services* bernama PT Mitra Asri Pratama dan balai lelang bernama PT Mega Armada Sudeco.

Pertengahan tahun 2022 Tunas Grup mengambil keputusan untuk Go Private dan melakukan penghapusan pencatatan (*delisting*) di Bursa Efek Indonesia secara sukarela. PT Tunas Ridean resmi menjadi perusahaan tertutup di 6 April 2023.

Informasi Umum PT Tunas Ridean

Nama Perusahaan	PT Tunas Ridean
Tanggal Pendirian	24 Juli 1980
Bidang Usaha	Keagenan, Penyaluran, Industri, Perdagangan, dan Pengangkutan.
Pencatatan Saham	Bursa Efek Indonesia, 16 Mei 1995, kode saham “TURI”
Jaringan Usaha	161 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia.
Jumlah Karyawan	4.249 orang
Kinerja Keuangan Per 31 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Aset Rp9.463.450.744.732 Jumlah Ekuitas Rp5.437.228.383.067 Jumlah Pendapatan Bersih Rp18.888.289.266.250 Jumlah Laba Bersih Tahun Berjalan Rp1.202.336.990.112

Alamat Kantor Pusat	Jl. Raya Pasar Minggu No.7 Jakarta 12740, Indonesia Telp: +6221 794 4788, 799 5621 Fax: +6221 150 0798 Email: info@tunasgroup.com
Situs Web	www.tunasgroup.com

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Tunas Ridean Per 31 Desember 2023

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	Anton Setiawan
Komisaris	Hong Anton Leoman
Komisaris	Wilfrid Foo Tsu-Jin
Komisaris	Alfredo Chandra
Direksi	
Direktur Utama	Rico Adisurja Setiawan
Direktur	Nugraha Indra Permadi
Direktur	Andrew Ling
Direktur	Tenny Febyana Halim
Direktur	Ester Tanudjaja

Kronologis Penerbitan Saham

Hingga akhir tahun 2023, Perseroan tidak mencatatkan sahamnya di bursa saham. Perseroan menjadi perusahaan tercatat sebagai emiten karena menerbitkan obligasi. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi tentang kronologis penerbitan dan pencatatan saham.

Kronologis Penerbitan Efek Lainnya

Sejak tahun 2003, MTF telah beberapa kali menerbitkan Obligasi yang dananya digunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur pendanaan dalam mendukung kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor. Walaupun Perseroan mendapatkan dukungan penuh atas fasilitas pendanaan terutama *Joint Financing* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, namun Perseroan tetap melakukan diversifikasi pendanaan untuk menunjang kinerja usaha Perseroan. Selain itu, penerbitan Obligasi juga bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan investor serta mempertahankan eksistensi Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia.

Pada tahun 2023, Perseroan mengeluarkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2023 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2023. Berikut tabel obligasi yang masih beredar serta masih dalam status belum lunas per 31 Desember 2023. Seluruh obligasi yang diterbitkan Perseroan dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain obligasi di bawah, Perseroan tidak menerbitkan efek apa pun dalam bentuk lain.

Daftar Obligasi yang Diterbitkan Mandiri Tunas Finance dan Masih Beredar di Tahun 2023

Tahun	Nama Obligasi	Peringkat Penerbitan	Jumlah (Rp Juta)	Tingkat Bunga	Frekuensi Pembayaran Bunga	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Status
2019	Obligasi Berkelanjutan IV MTF Tahap I Seri B	idAA+	200.000	9,75% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	8 Januari 2019	8 Januari 2024	Aktif/ Belum Lunas
	Obligasi Berkelanjutan IV MTF Tahap II Seri B	idAA+	658.000	9,50% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	26 Juli 2019	26 Juli 2024	Aktif/ Belum Lunas
2020	Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I Seri A	idAA+	472.000	8,00% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	13 Agustus 2020	13 Agustus 2023	Lunas per 10 Agustus 2023
	Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I Seri B	idAA+	386.000	8,60% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	13 Agustus 2020	13 Agustus 2025	Aktif/ Belum Lunas
2021	Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap II Seri A	idAA+	915.150	7,00% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	20 Mei 2021	20 Mei 2024	Aktif/ Belum Lunas
	Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap II Seri B	idAA+	485.700	7,65% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	20 Mei 2021	20 Mei 2026	Aktif/ Belum Lunas
2022	Obligasi Berkelanjutan V Tahap III MTF Seri A	idAA+	851.440	5,90% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	23 Februari 2022	23 Februari 2025	Aktif/ Belum Lunas
	Obligasi Berkelanjutan V Tahap III MTF Seri B	idAA+	376.615	6,75% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	23 Februari 2022	23 Februari 2027	Aktif/ Belum Lunas
2023	Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I MTF Seri A	idAAA	439.660	6,00% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	11 Juli 2023	11 Juli 2026	Aktif/ Belum Lunas
	Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I MTF Seri B	idAAA	252.075	6,25% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	11 Juli 2023	11 Juli 2028	Aktif/ Belum Lunas
	Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II MTF Seri A	idAAA	804.175	6,50% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	27 September 2023	27 September 2026	Aktif/ Belum Lunas
	Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II MTF Seri B	idAAA	326.935	6,75% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	27 September 2023	27 September 2028	Aktif/ Belum Lunas

Keterangan: Hasil pemeringkat tersebut merupakan peringkat yang ditetapkan terhadap obligasi pada saat awal pendaftaran obligasi yang dilakukan oleh PEFINDO

Informasi tentang Struktur Grup dan Kelompok Usaha, Entitas Anak, Entitas Asosiasi, serta *Joint Venture (JV)* dan *Special Purpose Vehicle (SPV)*

Hingga akhir tahun 2023, Mandiri Tunas Finance tidak memiliki struktur grup dan kelompok usaha, Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Penyertaan Saham, *Joint Venture (JV)*, *Special Purpose Vehicle (SPV)*, maupun Kerja Sama Operasi (KSO). Dengan demikian, tidak terdapat informasi tentang nama entitas anak dan/atau asosiasi, persentase kepemilikan saham, keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi, dan keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi. Selain itu, Perseroan juga tidak memiliki struktur grup dan kelompok usaha.

Akuntan Publik

Dewan Komisaris diberikan wewenang untuk melakukan proses penunjukan calon Auditor Eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa perusahaan dan mendapat persetujuan dalam RUPS Tahunan tanggal 28 Juni 2023, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) sebagai pihak eksternal yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan menetapkan besaran honorarium, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan akuntan publik yang ditunjuk dan terdaftar di OJK.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik 5 Tahun Terakhir

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan	Jasa yang Diberikan	Biaya (Rp)	Opini
2023	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) STTD.KAP-03/PM.22/2018	Danil Setiadi Handaja, CPA No Izin AP.1008	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2023	1.132.200.000	Wajar dalam semua hal yang material
2022	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) No. Izin KMK No. 603/KM.1/2015	Yovita No. Izin AP.0242	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2022	1.048.950.000	Wajar dalam semua hal yang material
2021	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) No. Izin KMK No. 603/KM.1/2015	Yovita No. Izin AP.0242	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2021	998.000.000	Wajar dalam semua hal yang material
2020	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) No. Izin KMK No. 603/KM.1/2015	Yovita No. Izin AP.0242	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2020	950.000.000	Wajar dalam semua hal yang material
2019	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) No. Izin KMK No. 603/KM.1/2015	Danil Setiadi Handaja, CPA No. Izin AP.1008	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2019	930.000.000	Wajar dalam semua hal yang material

Jasa Lain dan Biaya KAP/ Akuntan Publik Pada Tahun 2023

Pada tahun 2023 perseroan menunjuk KAP Purwantono, Sungkoro & Surja untuk penerbitan Surat Pernyataan Akuntan (*Comfort Letter*) Penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI. Jasa ini disepakati dengan biaya sebesar Rp965.700.000 (setelah pajak) dengan Nomor SPK 083/SPK-PROC/MTF/III/2023.

Lembaga dan Profesi Penunjang

Perdagangan dan Pencatatan Saham

Nama	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
Alamat	Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53. Jakarta 12190, Indonesia Tel: +62 21 515 0515 Surel: callcenter@idx.co.id Website: www.idx.co.id
Jasa yang diberikan	Informasi Perdagangan Biaya Pencatatan Saham Tahunan/Annual Listing Fee
Periode Penugasan	Tahun 2023

Kustodian

Nama	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Alamat	Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 1 Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53. Jakarta 12190 Telp. +62 21 5299 1099 Faks. +62 21 5299 1199 Surel: helpdesk@ksei.co.id Situs Web: www.ksei.co.id
Jasa yang diberikan	Menyediakan jasa untuk mengadministrasikan efek yang telah dikeluarkan penyedia layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek serta distribusi hasil aksi korporasi
Periode Penugasan	Tahun 2023

Pemeringkat Perusahaan

Nama	PT Fitch Rating
Alamat	DBS Bank Tower Lantai 24 Suite 2403 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940
Jasa yang diberikan	Memberikan penilaian atau pemeringkatan terhadap Perusahaan
Periode Penugasan	Tahun 2023

Wali Amanat

Nama	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Divisi Investment Services Bagian Trust & Corporate Services
Alamat	Gedung BRI II Lantai 6 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210
Jasa yang diberikan	Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi
Periode Penugasan	Tahun 2023

Pemeringkat Efek

Nama	PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Alamat	Panin Tower Senayan City Lantai 17 Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta 10270
Jasa yang diberikan	Memberikan penilaian atau pemeringkat terhadap Obligasi yang diterbitkan Perseroan
Periode Penugasan	Tahun 2023

Penjamin Pelaksana Emisi Efek	
Nama	PT Mandiri Sekuritas
Alamat	Menara Mandiri Tower I Lantai 25 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190
Jasa yang diberikan	Bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum
Periode Penugasan	Tahun 2023

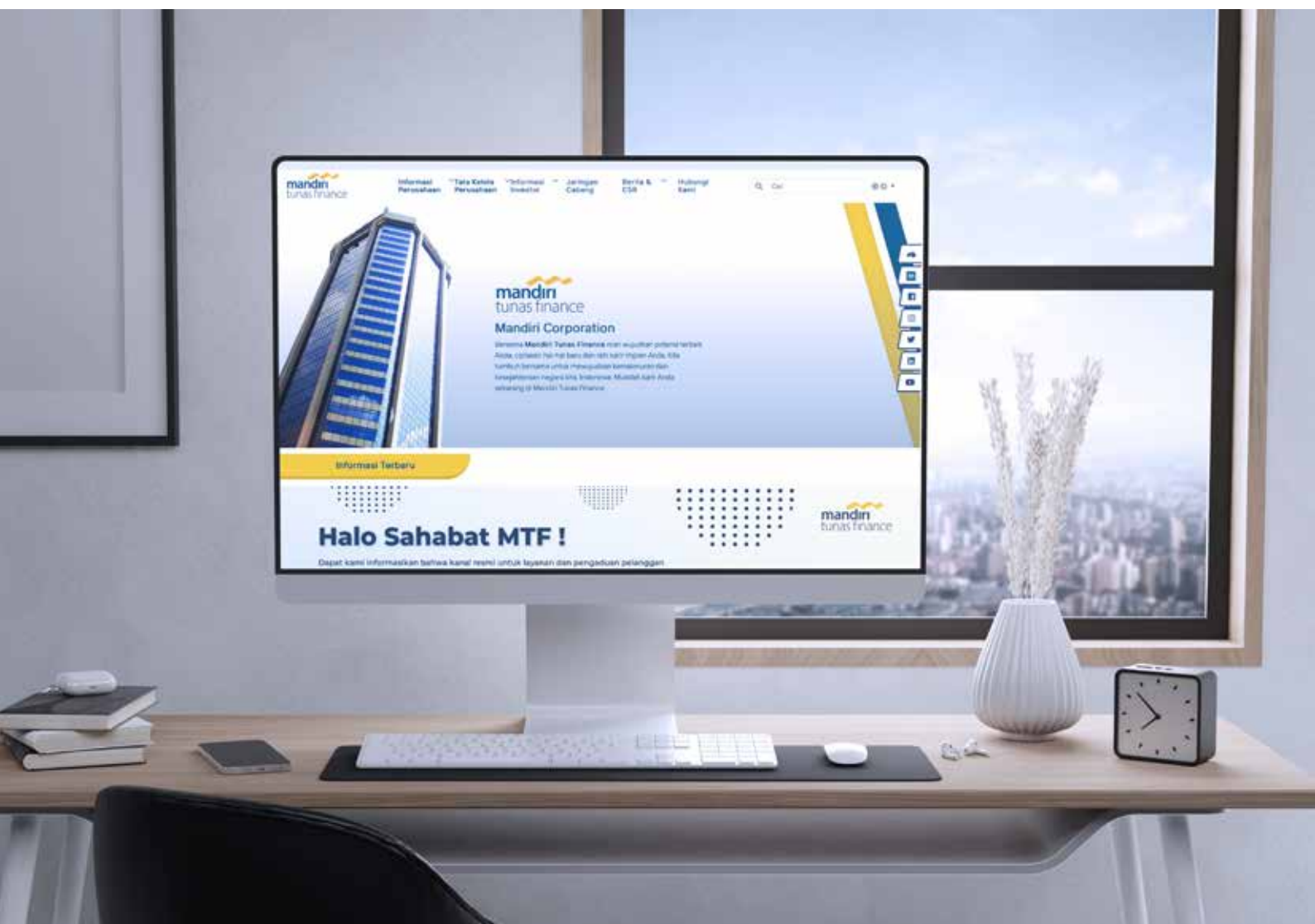
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	
Nama	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Alamat	Gedung Artha Graha Lantai 18 dan 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Jasa yang diberikan	Bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum
Periode Penugasan	Tahun 2023

Penjamin Pelaksana Emisi Efek	
Nama	PT BRI Danareksa Sekuritas
Alamat	Gedung BRI II Lantai 23 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210
Jasa yang diberikan	Bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum
Periode Penugasan	Tahun 2023

Notaris	
Nama	Notaris & PPAT Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
Alamat	Jl. Panglima Polim V No. 11 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160
Jasa yang diberikan	Pembuatan akta perjanjian yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
Periode Penugasan	Tahun 2023

Konsultan Hukum	
Nama	BM & Partners - Poernomo Idna Yashinta, S.H.
Alamat	Wisma Haroen, Jalan Raya Pasar Minggu No. 2A, Jakarta Selatan
Jasa yang diberikan	Melakukan Legal due diligence terhadap dokumen Perusahaan, Penyusunan Laporan Uji Tuntas dan pembuatan Legal Opini dalam rangka Penyelenggaraan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
Periode Penugasan	Tahun 2023

Website Perusahaan



Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menyediakan situs web berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan memiliki situs web resmi dengan alamat www.mtf.co.id yang terbagi ke dalam 2 (dua) platform, yaitu situs web produk dan jasa dengan alamat www.mtf.co.id yang dikelola oleh marketing, dan situs web korporasi dengan alamat www.mtf.co.id/korporat yang dikelola oleh Sekretaris Perusahaan.

Keberadaan situs web MTF juga merupakan salah bentuk keterbukaan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG agar seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh berbagai informasi terkait dengan Perusahaan. Selain itu, situs web Perseroan juga memuat informasi produk dan layanan yang diberikan Perseroan. Informasi-informasi yang disajikan dalam website senantiasa diperbarui secara berkala.

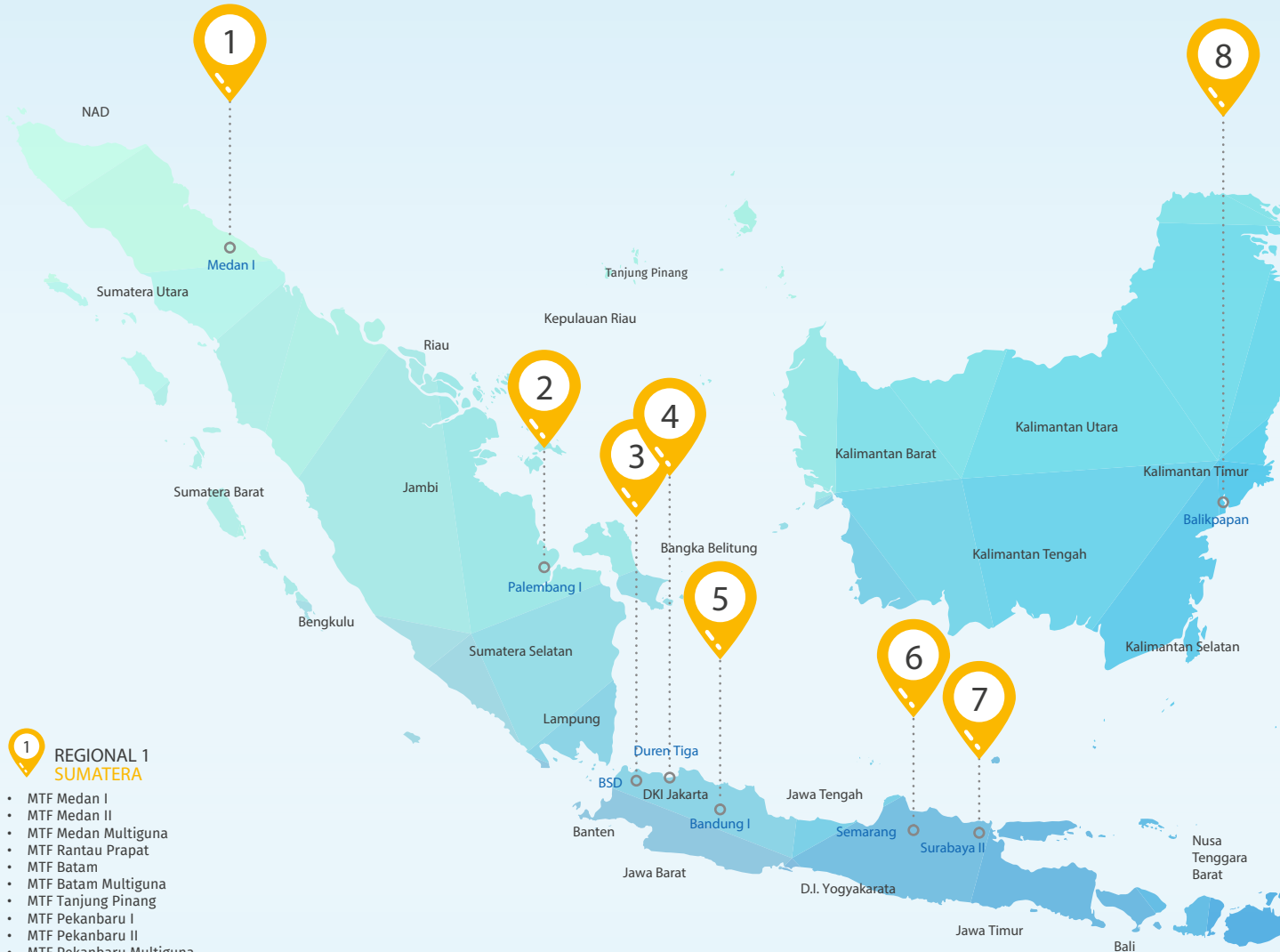
Navigasi Situs Web Korporat Mandiri Tunas Finance www.mtf.co.id/korporat

Menu	Cakupan Konten
Informasi Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Sejarah MTF • Struktur Organisasi Perusahaan • Struktur Kepemilikan Saham • Struktur Group Perusahaan • Management • Profesi Penunjang • Anggaran Dasar • Produk Pembiayaan • Penghargaan
Tata Kelola Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Praktik Tata Kelola • GCG Charter • Corporate Code of Conduct • Piagam Komite Audit • Kode Etik Pegawai • Pedoman Kerja Komite-komite • Anggota Komite Audit • Prosedur Nominasi dan Remunerasi • Kebijakan Manajemen Risiko • Kebijakan Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran
Informasi Investor	<ul style="list-style-type: none"> • Prospektus • Laporan Tahunan • Laporan Keberlanjutan • Laporan Keuangan • Peningkatan • RUPS • Informasi Obligasi • Informasi Dividen • Keterbukaan Informasi
Jaringan Cabang	Kanal untuk melihat cakupan jaringan usaha MTF yang tersebar di Indonesia
Berita & CSR	<ul style="list-style-type: none"> • Berita Kegiatan Korporat • Berita CSR • Galeri Video • Liputan Media
Karir	Microsite dengan alamat www.karir.mtf.co.id tentang informasi lowongan pekerjaan di Perseroan
Hubungi Kami	Kanal untuk dapat mengirimkan pesan berbasis situs web kepada Perseroan

Tabel Pemenuhan Informasi Pada Situs Perusahaan Sesuai dengan Pojk No. 8/POJK.04/2015

No	Cakupan Informasi	Ketersediaan di Situs Web MTF
1	Informasi Pemegang Saham sampai dengan Pemilik Akhir Individu	√
2	Pedoman Kode Etik	√
3	Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan	√
4	Laporan Keuangan Tahunan Terpisah (5 tahun terakhir)	√
5	Laporan Tahunan Lebih Dari 5 Tahun Terakhir	√
6	Profil Dewan Komisaris dan Direksi	√
7	Piagam/ Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Pedoman Kode Etik, Alamat Kantor, Informasi WBS	√
8	Informasi Investor	√
9	Berita & CSR	√

Wilayah Operasional



1 REGIONAL 1 SUMATERA

- MTF Medan I
- MTF Medan II
- MTF Medan Multiguna
- MTF Rantau Prapat
- MTF Batam
- MTF Batam Multiguna
- MTF Tanjung Pinang
- MTF Pekanbaru I
- MTF Pekanbaru II
- MTF Pekanbaru Multiguna
- MTF Duri

2 REGIONAL 2 SUMATERA

- MTF Padang
- MTF Padang Multiguna
- MTF Bukittinggi
- MTF Jambi
- MTF Jambi Multiguna
- MTF Muara Bungo
- MTF Bengkulu
- MTF Palembang I
- MTF Palembang II
- MTF Palembang Multiguna
- MTF Baturaja
- MTF Lubuklinggau
- MTF Bandar Lampung
- MTF Lampung Multiguna
- MTF Bandarjaya
- MTF Pangkal Pinang

3 REGIONAL 3 JAWA

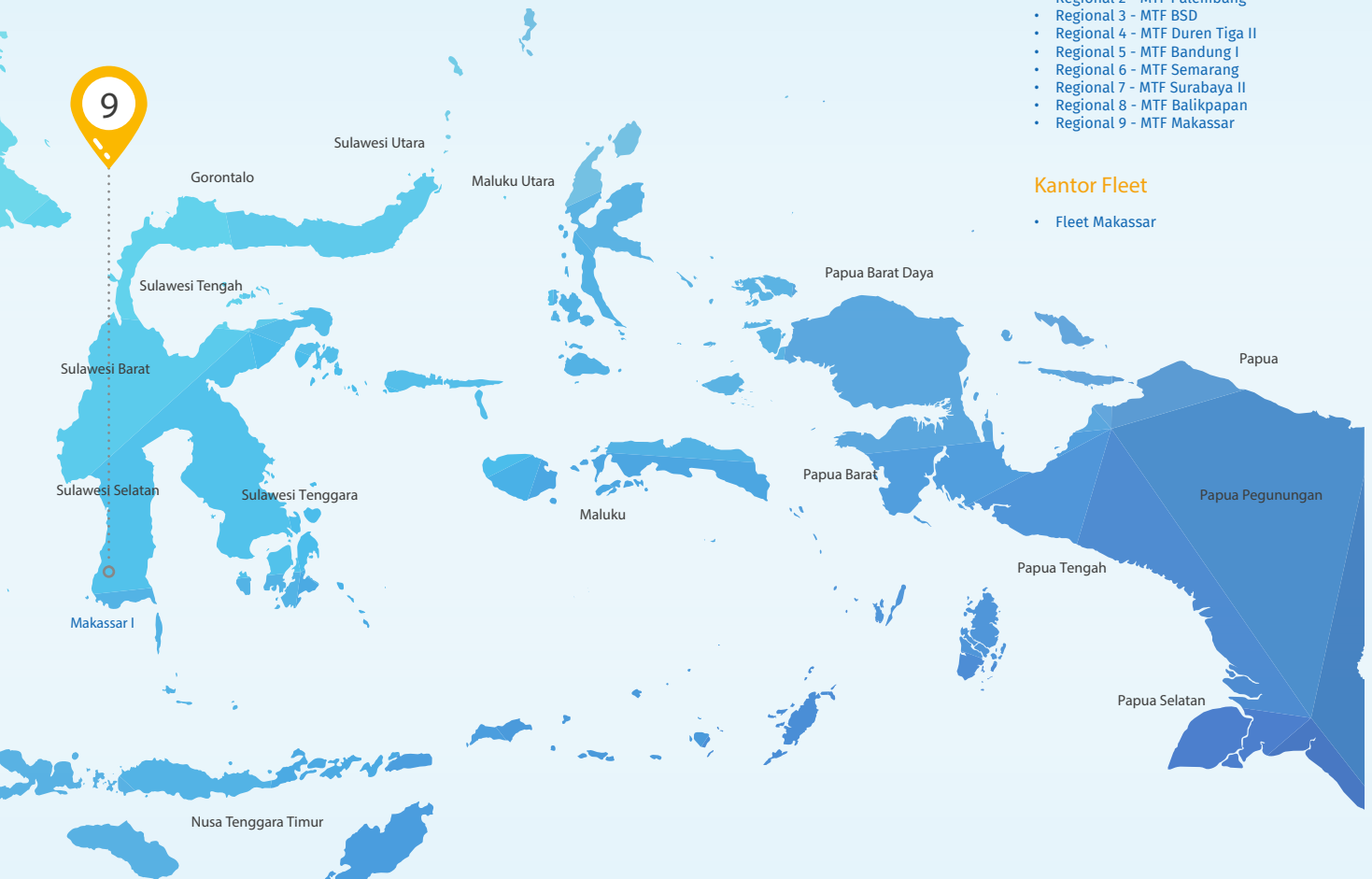
- MTF Pecenongan
- MTF Kelapa Gading
- MTF Tanjung Duren
- MTF Kebon Jeruk
- MTF Kebon Jeruk Multiguna
- MTF Kemayoran
- MTF Pluit
- MTF Cilegon
- MTF Serang
- MTF Tangerang
- MTF BSD
- MTF Bintaro
- MTF Lebak (Rangkasbitung)
- MTF BSD Multiguna
- MTF Serang Multiguna

4 REGIONAL 4 JAWA

- MTF Matraman
- MTF Fatmawati
- MTF Lebak Bulus
- MTF Durentiga II
- MTF Durentiga Captive
- MTF Bekasi
- MTF Bekasi Multiguna
- MTF Depok
- MTF Cibinong
- MTF Bogor
- MTF Cibubur
- MTF Cikarang
- MTF Pondok Gede

5 REGIONAL 5 JAWA

- MTF Karawang
- MTF Sukabumi
- MTF Bandung I
- MTF Bandung II
- MTF Bandung III
- MTF Tasikmalaya
- MTF Cirebon
- MTF Garut
- MTF Karawang Multiguna
- MTF Bandung Multiguna
- MTF Subang



Kantor Wilayah

- Regional 1 - MTF Medan
- Regional 2 - MTF Palembang
- Regional 3 - MTF BSD
- Regional 4 - MTF Duren Tiga II
- Regional 5 - MTF Bandung I
- Regional 6 - MTF Semarang
- Regional 7 - MTF Surabaya II
- Regional 8 - MTF Balikpapan
- Regional 9 - MTF Makassar

Kantor Fleet

- Fleet Makassar

**6 REGIONAL 6
JAWA**

- MTF Tegal
- MTF Purwokerto
- MTF Semarang
- MTF Ungaran
- MTF Semarang Multiguna
- MTF Solo
- MTF Solo Multiguna
- MTF Kudus
- MTF Magelang
- MTF Pekalongan
- MTF Yogyakarta
- MTF Yogyakarta Multiguna

**7 REGIONAL 7
JAWA, BALI, &
NUSA TENGGARA**

- MTF Surabaya I
- MTF Surabaya II
- MTF Malang
- MTF Kediri
- MTF Jember
- MTF Madiun
- MTF Tuban
- MTF Mojokerto
- MTF Gresik
- MTF Banyuwangi
- MTF Denpasar
- MTF Gianyar
- MTF Surabaya Multiguna
- MTF Malang Multiguna
- MTF Denpasar Multiguna
- MTF Mataram
- MTF Kupang

**8 REGIONAL 8
KALIMANTAN**

- MTF Pontianak
- MTF Sintang
- MTF Banjarmasin
- MTF Banjarbaru
- MTF Palangkaraya
- MTF Kotawaringin (Sampit)
- MTF Samarinda
- MTF Balikpapan
- MTF Tarakan
- MTF Samarinda Multiguna
- MTF Banjarmasin Multiguna
- MTF Bontang
- MTF Ketapang

**9 REGIONAL 9
SULAWESI, PAPUA, &
MALUKU**

- MTF Makassar I
- MTF Makassar II
- MTF Parepare
- MTF Kendari
- MTF Manado
- MTF Kotamobagu
- MTF Palu
- MTF Luwuk
- MTF Mamuju
- MTF Gorontalo
- MTF Sorong
- MTF Jayapura
- MTF Ambon
- MTF Makassar Multiguna
- MTF Manado Multiguna

Alamat Kantor Cabang

Provinsi	Nama Cabang	Alamat Terkini	Telepon
Sumatera Utara	Medan	Jalan Ring Road, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kab. Medan, Provinsi Sumatera Utara Selayang Kota Medan Kodepos 20132 (samping Hotel Sahara Viesta), 20232	(061) 8220915
	Medan II	Jalan H. Adam Malik, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	(061) 4151818
	Medan Multiguna	Jl. H. Adam Malik No. 19, Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236	
	Rantau Prapat	Jalan Ahmad Yani, Komplek Pertokoan dan Perkantoran Suzuya Mall, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, Rantauprapat, Propinsi Sumatera Utara	(0624) 7671497
Sumatera Barat	Padang	Jl. S Parman No 236 A, Kel. Ulak Karang Barat, Kec. Padang Utara, Padang, Propinsi Sumatera Barat	(0751) 4488972
	Bukittinggi	Jl. By Pass, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat	(0752) 7839132
	Padang Multiguna	Jl. S. Parman No. 236A, Ulak Karang, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumater Barat	
Riau	Pekanbaru	Jl. Arifin Ahmad, Komplek Platinum Bisnis Center No 25-26, RT 003/RW 011, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Provinsi Riau 28294	(0761) 63442
	Pekanbaru II	Jl. Komplek Ruko Royal Platinum Arengka II Nomor 89, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau	(0761) 7415380
	Duri	Jl. Hang Tuah, RT 001/ RW 018, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Riau	(0765) 595155
	Pekanbaru Multiguna	Jl. Arifin Ahmad No. 25-26, Kompleks Platinum Bisnis Center, Kelurahan Marpoyan Damai, Kecamatan Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	
Jambi	Jambi	Jl. Gajah Mada No.85, RT 022/RW 006, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi	(0741) 7550022
	Muaro Bungo	Jl Lintas Sumatera Kilo Meter 0, Kel Batang Bungo, Kec Pasar Muara Bungo, Kab Bungo, Provinsi Jambi	(0747) 323782
	Jambi Multiguna	Jl. Gajah Mada No. 85, RT 022 RW 006, Kel. Jelutung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi	
Kepulauan Riau	Batam	Komplek Ruko Centre Park, Blok A No : 13, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota, Provinsi Kepulauan Riau	(0778) 464354
	Tanjung Pinang	Ruko Grand Bintan Center Jl. DI Panjaitan KM 9, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.	(0771) 7335756
	Batam Multiguna	Ruko Centre Park Blok A Nomor 13, RT 001 RW 011, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	
Bengkulu	Bengkulu	Jl. Pangeran Natadirja KM. 6,5 No. 29 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu	(0736) 347710
Sumatera Selatan	Palembang	Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	(0711) 379724
	Palembang II	Jl. Radial Komplek Ruko Transmart RT.21 RW.05, Kelurahan Dua Puluh Empat Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	(071 1) 1772-976
	Baturaja	Jl. Dr. M. Hatta No. 1067 RT 18/05, Kel. Kemalaraja, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu, Prov. Sumatera Selatan	(0735) 322026
	Lubuk Linggau	Jl. Yos Sudarso No. 90, Kelurahan Majapahit, Kecamatan Lubuklinggau Timur/ I, Lubuklinggau, Sumatera Selatan	(0733) 732 9631
	Palembang Multiguna	Jl. R. Sukamto Kompleks Ruko PTC Mall Blok G No. 31, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	

Alamat Kantor Cabang

Provinsi	Nama Cabang	Alamat Terkini	Telepon
Lampung	Bandar Lampung	Jl. Pangeran Antasari RT 009/RW 02, Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung	(0721) 773557
	Bandarjaya	Jl. raya Protokol- Bandar Jaya, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi DKI Jakarta Lampung	(0725) 529691
	Lampung Multiguna	Jalan Pangeran Antasari Nomor 110, Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung, Provinsi Lampung	
Kep. Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Jl. Pulau Bangka Ruko City Hall Blok 7 RT 009/RW 003, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	(0717) 4256832
DKI Jakarta	Pecenongan	Jl. Sukardjo Wirjo Pranoto No.2/6, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta	(021) 3847288
	Kemayoran	Jl. Gunung Sahari Raya Blok C No. 35, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara	(021) 22620253
	Kelapa Gading	Jl. Boulevard Barat Blok C No.63A, Plaza Kelapa Gading Inkopal, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta	(021) 45851153
	Matraman	Jl. Jatinegara Timur No. 37 RT 008/RW 04, Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta	(021) 85917920
	Tanjung Duren	Jl. Prof Dr Latumenten, Komplek Ruko Seasons City Blok A No. 28, Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	(021) 29618062
	Fatmawati	Rukan Plaza 5 Pondok Indah Blok D Nomor 5 Jl. Marga Guna, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	(021) 27933248
	Kebon Jeruk	Jl. Meruya Ilir Raya, Komplek Perumahan Rich Palace Nomor 36-40 Blok A-11, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	(021) 58910034
	Duren Tiga 2	Jl. Duren Tiga, Nomor 29 A-B, RT 005/RW 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12760	(021) 79195795
	Lebak Bulus	Ruko Bona Indah Bisnis Center Blok B1 Nomor 9X Jl. Karang Tengah, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12440	(021) 27819838
	Pluit	Galeri Niaga Mediterania I Jl. Pantai Indah Utara 2, RT.1/RW.16 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, 14460	(021) 5882175
Banten	Duren Tiga Captive	Ruko Mampang Business Park Blok A No. 18, Jalan Hj. Tutty Alawiyah Nomor 301, RT 010 RW 003, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	
	Kebon Jeruk Multiguna	Ruko Rich Palace Shop House and Sweet Regency Blok A.11, Jl. Meruya Ilir Raya No. 36-40, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	
	Cilegon	Ruko Cilegon Business Square Blok A No. 6 - 7 RT.05/RW.06, Kel. Kedaleman, Kec Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, 42422	(0254) 374909
	Serang	Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Propinsi Banten	(0254)8496152
	Serpong (BSD)	Ruko BSD Junctions Blok A39, JL. Pahlawan Seribu Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Utara BSD CITY, Tangerang Selatan, 15310	(021) 5382090
	Tangerang	Rukan Business Park Tangeang City, Cikokol Jl. Jendral Sudirman No.1, Kel. Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, 15117	(021) 29676323
	Bintaro	Bintaro Jaya Kavling Blok EB/B-09, Kelurahan Perigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Provinsi Banten	(021) 22215659
	Lebak (Rangkasbitung)	Jl. Soekarno Hatta/ ByPass Perempatan Sumur Buang. Cibadak-Lebak RT. 005 RW. 001, Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, 42317	(0252) 209765

Alamat Kantor Cabang

Provinsi	Nama Cabang	Alamat Terkini	Telepon
	Serang Multiguna	Ruko Ranca Utama, Jalan Raya Serang - Cilegon KM 4, Kp. Ranca Tales, RT 003 RW 004, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten	
	BSD Multiguna	Ruko BSD Junction Blok A Nomor 39-40, Jalan Pahlawan Seribu, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	
	Pondok Gede	Ruko Pondok Gede Plaza Blok B No.1 & 2 Jl. Raya Pondok Gede RT.001/RW.001 Kel. Jatiwaringin, Kec.Pondok Gede, Kota Bekasi 17411	(021)85508709
	Bekasi	Ruko Emerald Summarecon Bekasi No UA 39, Type 450 , Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Jawa Barat, 17144	(021) 89454997
	Karawang	Ruko Dharmawangsa 2 Blok A No.33, Grand Taruma, Kel. Sukamakmur, Kec.Teluk Jambe Timur, Karawang Barat, 41361	(021) 58910034
	Depok	Rukan Depok Mall Jl. Raya Margonda Blok B-1 No. 50, Kemirimuka, Beji, Depok, Jawa Barat	(021) 7756733
	Bogor	Jl. Siliwangi No. 60 B & B-1, RT 005/RW 004, Kel. Lawanggintung, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16134	(0251) 8371118
	Cibubur	Ruko Cibubur Time Square Blok B4 No 22, Jl. Transyogi KM 3, Kel. Jati Karya, Kec. Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17435	(021)84300687
	Cikarang	Komplek Cikarang Central City blok E no 15 Jl. Raya Cikarang - Cibarusah, Ciantra, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17550	(021)22180581
	Cibinong	Cibinong City Center Jl. Tegar Beriman Blok D No. 3B, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16915	(021) 29577430
Jawa Barat	Sukabumi	Jl. Jendral Sudirman No.57, Sriwidari, Gunung Puyuh, (seberang Bolu Amor café) Benteng, Warudoyong, Sukabumi City, Jawa Barat, 43131	(0266) 6223723
	Bandung 1	Kopo Plaza Kav. C10 – 11 Jl. Peta Lingkar Selatan, Bandung, Jawa Barat, 40233	(022) 60401 19
	Bandung 2	Jl. BKR No. 141, RT. 004/RW. 003, Kel. Cigereleng, Kec. Regol, Bandung, 40253	(022) 42833444
	Bandung 3	Jl. Batununggal Indah IV Nomor 73, Kel Mengger, Kec Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat	(022) 87306880
	Tasikmalaya	Jl. Yudanegara No. 24, 003/001, Yudanagara, Cihideung, Tasikmalaya, 46121	(0265) 344905
	Cirebon	Ruko Kesambi Regency Blok A No. 4 Jl. Raya Kesambi, Kel. Kesambi, Kec. Kesambi, Cirebon, Jawa Barat	(0231) 8308522
	Garut	Pertokoan Intan Bisnis Center (IBC) Blok I No. 27, Kel. Pakuwon, Kec. Garut Kota, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat	(0262) 544605
	Subang	Jl. Otto Iskandar Dinata Nomor 262, RT 095/RW 026, Kel. Karanganyar, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.	(0260) 415869
	Bekasi Multiguna	Ruko Grand Kota Bintang C6 RT 04 RW 07, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	
	Karawang Multiguna	Ruko Dharmawangsa II Blok A No. 35, Grand Taruma, Kel. Sukamakmur, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat 41361	
	Bandung Multiguna	Jalan BKR Nomor 94 RT 003 RW 005, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung	(0260) 415869

Alamat Kantor Cabang

Provinsi	Nama Cabang	Alamat Terkini	Telepon
Jawa Tengah	Tegal	Jl. Yos Sudarso RT.005 RW.009 Blok H 4 & 5 Nirmala Square Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah.	(0283) 324066
	Purwokerto	Jl. DI Panjaitan RT 005/002 Karangklesem, Purwokerto Kulon, Purwokerto Selatan, Banyumas.	(0281) 642645
	Semarang	Jl. Indraprasta No. 30 A - B, Kel. Pendrikan Kidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, 50241	(024) 3589008
	Ungaran	Mutiara Ungaran Square, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah	(024) 76902099
	Solo	Ruko Adi Sucipto Jl. Adi Sucipto 167 RT 003/RW 011 Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah 57143	(0271) 738989
	Kudus	Jl. Raden Agil Kusumadya No. 8, Desa Jati Kulon, Kec. Jati, Kudus, Jawa Tengah	(0291) 4252070
	Magelang	Metro Square Jl. Mayjend. Bambang Soegeng, Desa Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	(0293) 312406
	Pekalongan	Komplek Ruko Dupan Square Jl. Dr. Sutomo Blok B2 No. 10, Kelurahan Baros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	(0285) 4420100
	Semarang Multiguna	Jalan Indraprasta Nomor 32, Kel. Pendrikan Kidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang	
Solo Multiguna	Jalan Adi Sucipto RT 001 RW 013, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah		
Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta	Ruko Sumber Baru Square Kavling W Jl. Ring Road Utara, Kelurahan Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55284	(0274) 860 9901
	Yogyakarta Multiguna	Ruko Sumber Baru Square Kav. W, Jalan Ringroad Utara, Kelurahan Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta	
Jawa Timur	Surabaya 1	Jl. Mayjend Sungkono No. 149-151 Blok 1-5, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	(031) 99533640
	Surabaya 2	Jl. Raya Tenggilis No 23 Kav 5-6, RT 005/RW 002, Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	(031) 8420450
	Malang	Jl. Tumenggung Suryo No 98 Kav 1, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur	(0341) 497927
	Kediri	Desa/Kelurahan Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur	(0354) 775192
	Jember	Ruko Gajah Mada Square A9 Jl. Gajah Mada No.187, Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Jember, Jawa Timur, 68133	(0331) 425959
	Madiun	Jl. Mayjen Sungkono RT 037/RW 012, Kel. Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur	(0351) 473176
	Tuban	Jl. Diponegoro No.34 C, Kel. Latsari, Kec. Tuban, Tuban, Jawa Timur, 62314	(0356) 326381
	Mojokerto	Jl. Bhayangkara No.110, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, 61313	(0321) 329688
	Gresik	Ruko Kartini Megah Kav. A10, Jl. RA Kartini No. 150-152 RT 003/RW 007, Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.	(031) 3985189

Alamat Kantor Cabang

Provinsi	Nama Cabang	Alamat Terkini	Telepon
	Banyuwangi	Ruko Golden City Jl. S. Parman, Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	(0333) 3382601
	Malang Multiguna	Jalan Tumenggung Suryo Nomor 98, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur	
	Surabaya Multiguna	Ruko Mangga Dua Blok B1-05, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	
Bali	Denpasar	Jl. Buluh Indah No. 53 kav. 1, Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Bali, 80118	(0361) 8469896
	Gianyar	Jl. Erlangga No.15 C, Kel. Gianyar, Kec. Gianyar, Gianyar, Bali, 80511	(0361) 944478
	Denpasar Multiguna	Jl. Raya Cargo No. 16, Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	
Nusa Tenggara Barat	Mataram	Jl. Selaparang No. 47 A-B, Kec. Cakranegara Timur, Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83236	(0370) 638277
Nusa Tenggara Timur	Kupang	Jl. Timor Raya KM 6, RT011/RW004 Kel. Oesapa Barat, Kelapa Lima, Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85288	(0380) 8586290
Kalimantan Barat	Pontianak	Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Bara	(0561) 66555718
	Sintang	Jl. Lintas Melawi, Kel. Ladang, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Kalimantan Barat	(0565) 2022080
	Ketapang	Jl. Gatot Subroto, RT 002 RW 001, Komplek Ruko Grand Rivera No. A1-2, Desa Paya Kumang, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat 78813	(0534) 3032761
Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Jl. Veteran, Kel. Pengambangan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan	(0511) 3277145
	Banjarbaru	Jl. Mistar Cokrokusumo No. 9, Sungai Besar, Banjarbaru Selatan, Banjarbaru	(0511) 4772067
	Banjarmasin Multiguna	Jl. Veteran RT 14 RW 02 No. 86, Kelurahan Pengambangan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan 70237	
Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Jl. G. Obos, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	(0536) 3224277
	Kotawaringin Timur (Sampit)	Jl. Mas Tirto Haryono, RT 22 RW 09, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	(0531) 23216
Kalimantan Timur	Samarinda	Jl. Dr. Sutomo Gang 6, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Provinsi Kalimantan Timur	(0541) 7273930
	Balikpapan	Jl. MT. Haryono Komp. Daun Village RT 41, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.	(0542) 8860744
	Tarakan	Jl. Yos Soedarso No. 5 RT 14, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Timur	(0551) 3805972
	Bontang	Jl. Bhayangkara, Kel. Gunung Elai, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur	(0548) 24488
	Samarinda Multiguna	Jl. Dr. Sutomo No. 48, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	
Sulawesi Selatan	Makassar	Jalan citraland Boulevard, Kompleks Citraland Bussinesess Park Blok A1/02 dan A1/03 Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	
	Makassar II	Jalan AP Pettarani, Kel. Tidung, Kec. Rappocini, kota makassar, sulawesi selatan	(0411) 467566

Alamat Kantor Cabang

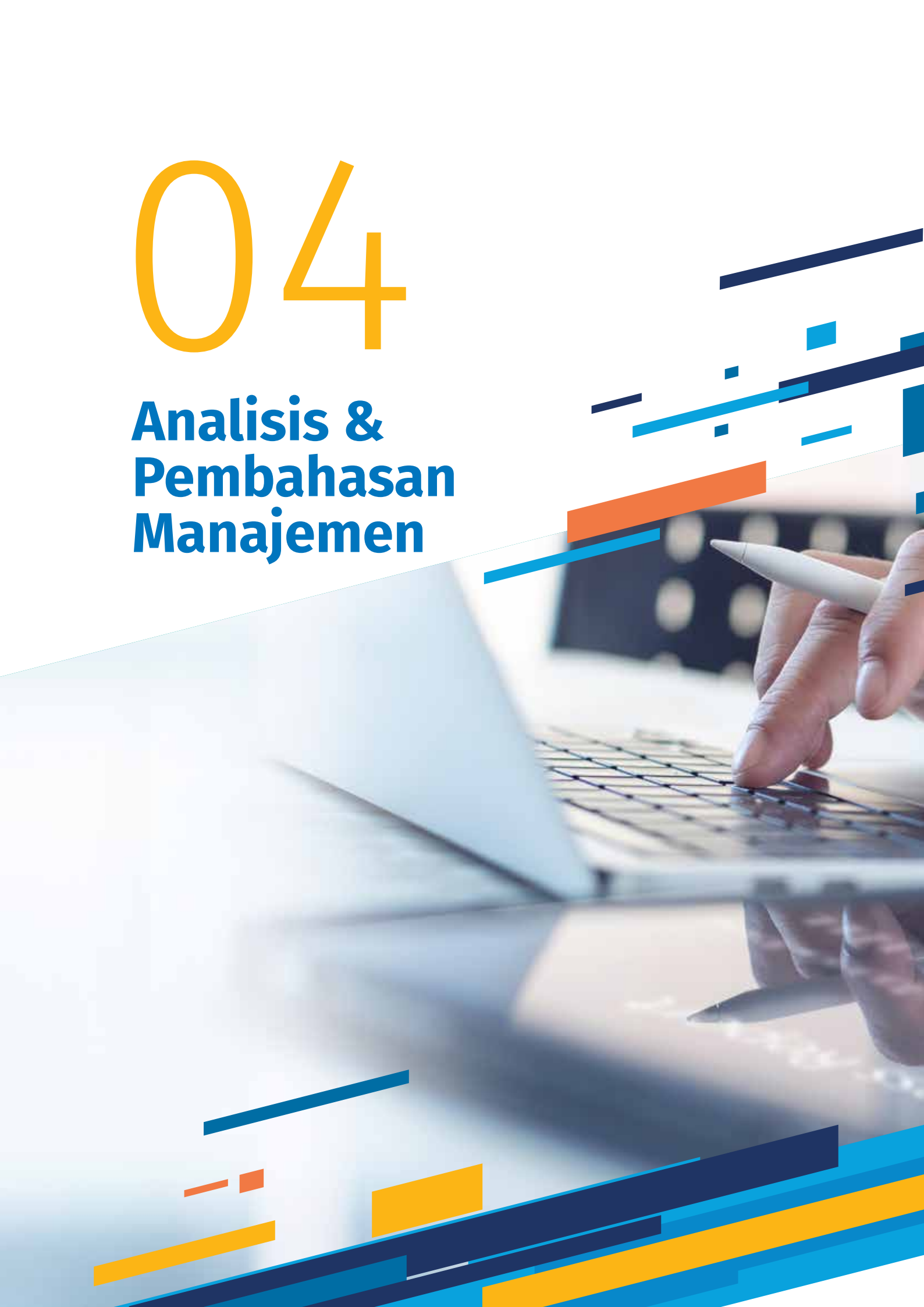
Provinsi	Nama Cabang	Alamat Terkini	Telepon
	Parepare	Jl. Sultan Hasanuddin No. 16 A, Kelurahan Ujung Sabang, Kecamatan Ujung, Pare-Pare, Sulawesi Selatan, 91114	(0421) 28622
	Makassar Multiguna	Jalan Citraland Boulevard Ruko Business Commercial Park CPI Blok A1 No. 2-3, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	
Sulawesi Tenggara	Kendari	Jl. Brigjen M. Joenoes By Pass Square Blok A Nomor 5, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari	(0401) 3135093
Sulawesi Utara	Manado	Jl. Yos Sudarso Nomor 37, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.	(0431) 8819809
	Kotamobagu	Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara.	(0434) 2621540
	Manado Multiguna	Jl. Piere Tendean Komplek Marina Plaza Blok C No. 03 & 17, Kel. Wenang Utara, Kec. Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara 95111	
Sulawesi Tengah	Palu	Jl. Monginsidi Nomor 24-25, RT 002, RW 006, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah	(0451) 454139
	Luwuk	Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kota Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah	(0461) 23128
Gorontalo	Gorontalo	Jl. Nani Wartabone, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo	(0435) 822315
Sulawesi Barat	Mamuju	Jl. Yos Sudarso Nomor 37, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.	(0426) 2324777
Maluku	Ambon	Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku	(0911) 3829445
Papua	Jayapura	Jl. Raya Abepura Kotaraja, Kelurahan Vim, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua	(0967) 5187813
Papua Barat	Sorong	Kelurahan Klawuyuk, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat	(0951) 3177597

Alamat Kantor Satelit

No.	Cabang Utama	KSKC	Alamat
1	Padang	Dharmasraya	Jl. Lintas Sumatera Kel. Sungai Gambut, Kec. Pulau Punjung, Dharmasraya 27573
2	Palembang	Prabumulih	Jl. Jendral Sudirman Desa Cambai (Sebelah Indomaret) Kecamatan Pembantu Lembak Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan 31146
3	Pangkal Pinang	Belitung & Belitung Timur	Jl. Sudirman, Jend. RT 028 RW 10, Tanjungpandan. Belitung 33411
4	Sampit	Pangkalanbun	Jl. Kawitan 1 RT 16 RW 00 Kel Sidorejo Kec Arut Selatan Kab. Kotawatingan Barat 74111 (Depan Gudang Djarum)
5	Pontianak	Singkawang	Jl. Yohana Godang Depan Gedung Bantilan Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat 79123
6	Kendari	Kolaka	Jl. Khairil Anwar No. 1 (Tenant Mall Hotel Sunan Kolaka)
7	Kendari	Bau-bau	Jl. Lakarambau, Lipu, Kec. Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara 93724
8	Parepare	Palopo	Jl. Andi Djemma No. 123 Kota Palopo, Sulawesi Selatan - 91921
9	Jakarta Pusat	Graha Sultan	Jalan Cideng Timur Nomor 23-A, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat

04

**Analisis &
Pembahasan
Manajemen**

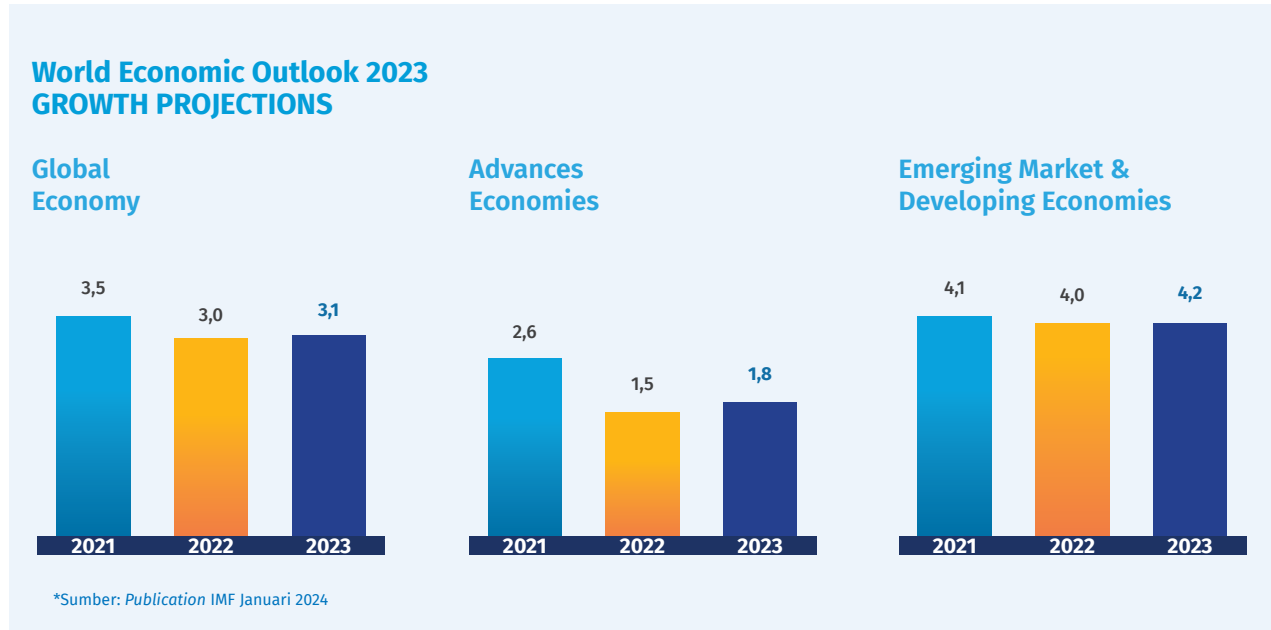




Tinjauan Ekonomi dan Industri

Analisis Ekonomi Global

Hingga akhir tahun 2023, perekonomian dunia masih terus dibayangi berbagai kondisi ketidakpastian global mulai dari risiko pertumbuhan ekonomi China dan Amerika yang melemah, geopolitik perang Ukraina-Rusia dan konflik Palestina-Israel, ancaman perubahan iklim serta meningkatnya harga minyak dunia. Berdasarkan laporan World Economic Outlook (WEO) yang diterbitkan International Monetary Funds (IMF) pada 10 Oktober 2023, pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023 sebesar 3%, turun 0,5 poin dari tahun 2022.



Kondisi perekonomian dunia dipengaruhi oleh *volatilitas* dan gejolak harga komoditas. *Volatilitas* harga komoditas merupakan faktor penting yang mempengaruhi laju inflasi serta kebijakan moneter dan kinerja ekonomi semua negara yang mana pada tahun ini, semua negara dihadapkan pada guncangan dan gejolak harga komoditas yang masih berlangsung meskipun trennya mengalami penurunan.

Di tengah inflasi global yang mulai melandai, suku bunga acuan beberapa negara masih tetap pada level yang relatif tinggi seiring dengan tingkat inflasi yang masih belum mencapai target. Meski mulai melandai, tekanan inflasi ke depan diperkirakan masih berpotensi tinggi karena kenaikan harga energi dan pangan akibat eskalasi geopolitik di berbagai wilayah yang masih berlanjut serta adanya fenomena El Nino yang mengganggu proses dan tingkat produksi pangan. Perlambatan ekonomi Tiongkok juga perlu diwaspadai karena dapat memengaruhi arus perdagangan dan pertumbuhan ekonomi global ke depan.

Analisis Ekonomi Indonesia

Di tengah kondisi ketidakpastian dan perlambatan perekonomian global, perekonomian Indonesia tercatat tetap kuat dan stabil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV 2023 tetap tumbuh sebesar 5,04% (YoY), meskipun sedikit melambat dari pertumbuhan pada tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 5,31% (YoY). Pertumbuhan ekonomi domestik yang relatif stabil, didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi.

Pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya didukung oleh kondisi sektor keuangan tahun 2023 yang dinilai stabil tercermin dari pertumbuhan sektor pasar modal, perbankan dan industri keuangan non bank. Sektor keuangan non bank, terutama industri perusahaan pembiayaan mencapai nilai piutang pembiayaan sebesar Rp463,12 triliun (tumbuh sebesar 15,02% secara yoy).

Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, berada di level Rp15.255 per dolar AS hingga akhir Desember 2023. Level ini lebih lemah dari asumsi makro sebesar Rp14.800 per dolar AS. Kemudian, realisasi suku bunga SBN 10 tahun tercatat lebih rendah dari asumsi, yaitu 6,68%.

Sektor manufaktur dan perdagangan tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi. Sektor manufaktur tumbuh 5,2%, didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan tingginya permintaan atas komoditas hilirisasi khususnya mineral. Sementara, sisi perdagangan juga mampu tumbuh kuat sebesar 5,1% didorong oleh peningkatan penjualan kendaraan bermotor dan suku cadang.

Konsumsi rumah tangga juga tumbuh sebesar 5,06% (YoY), seiring dengan kenaikan mobilitas yang terus berlanjut, daya beli masyarakat yang stabil, serta keyakinan konsumen yang masih tinggi. Sementara itu, konsumsi Pemerintah tumbuh negatif 3,76% (YoY) disebabkan terutama oleh belanja pegawai yang mengalami pergeseran sehubungan penyaluran gaji ke-13 ke triwulan II.

Kendati *outlook* global melambat, Indonesia termasuk salah satu negara mampu tumbuh kuat di tahun 2023 ditengah tantangan struktural dan risiko eksternal, seperti ketidakpastian global, tekanan inflasi, dan ketegangan geopolitik.

Kondisi Industri Perusahaan Pembiayaan

Berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), penjualan mobil di tahun 2023 tercatat sebesar 1 juta unit, atau lebih rendah 4,1% dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan penjualan mobil tersebut disebabkan oleh perlambatan pasar otomotif pada paruh kedua 2023 akibat dari kenaikan suku bunga dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, upaya Pemerintah untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik di Indonesia juga telah menunjukkan hasilnya, seperti tercermin pada meningkatnya penjualan EV, *hybrid* EV dan kendaraan listrik roda dua. Ke depannya, tren peningkatan penggunaan kendaraan listrik diperkirakan akan berlanjut, seiring dengan semakin tersedianya infrastruktur publik untuk pengisian daya, menurunnya biaya produksi kendaraan listrik seiring dengan meningkatnya teknologi produksi, dan keberlanjutan dukungan dari Pemerintah dalam bentuk insentif pajak penjualan.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah piutang pembiayaan bersih dari perusahaan pembiayaan kembali mencatatkan peningkatannya dari Rp415,9 triliun pada 2022 menjadi Rp470,9 triliun pada 2023. Tidak hanya itu, total piutang pembiayaan yang mencakup pembiayaan bersama berjumlah Rp659,9 triliun pada Desember 2023, meningkat 15% (YoY) dibandingkan Desember 2022. Pertumbuhan bisnis pembiayaan 2023 tidak lepas dari berakhirnya pandemi COVID-19 yang mampu mendorong penyaluran pembiayaan. Selain itu kondisi makro ekonomi yang terus positif di 2023 serta terjaganya inflasi menjadi penopang melajunya bisnis *multifinance*. Saat ini otomotif dan pembiayaan alat berat menjadi sektor penopang pertumbuhan. Permintaan yang terus melambung mampu mendorong pelaku industri khususnya sektor pertambangan.

PT Mandiri Tunas Finance (MTF) melaporkan pembiayaan alat berat mencapai Rp1,9 triliun di sepanjang 2023 mengalami penurunan sebesar 13,2% (YoY) dari tahun 2022 sebesar Rp2,2 triliun. Penurunan pembiayaan alat berat diimbangi dengan adanya peningkatan pembiayaan mobil baik *passenger* maupun *commercial* sebesar 23,6% (YoY) atau mencapai Rp29,1 triliun. Porsi pembiayaan alat berat perseroan sepanjang 2023 berkontribusi 6% dari total portofolio.

Aspek Pemasaran

Pada tahun 2023, cakupan wilayah pemasaran Perseroan, mulai dari Sumatera hingga Jayapura. Perseroan memberikan layanan pembiayaan sesuai dengan segmen usaha yang dijalankan Perseroan kepada masyarakat di wilayah-wilayah yang terbagi menjadi Regional I-IX.

Strategi pemasaran yang diterapkan MTF pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan segmen bisnis *captive* yang berasal dari Bank Mandiri dengan menciptakan ekosistem bisnis *captive* yang baik melalui perluasan bisnis untuk dapat tumbuh melalui *referral* Bank Mandiri dan penetrasi cabang *retail* dengan menjaga pertumbuhan bisnis *captive* di angka 30% dari total pembiayaan baru.
2. Menjaga segmen bisnis yang berasal dari *dealer* dan *partner* melalui perluasan komersial dan alat berat dengan target sektor tertentu dan menjaga pertumbuhan pendapatan sesuai profil risiko serta meningkatkan bisnis *retail* di atas 13% untuk menjadi perusahaan pembiayaan mobil nomor 1.

- Mengoptimalkan *database* untuk memberikan nilai tambah pada pelanggan melalui peningkatan *repeat order* di atas 30%, pengembangan bisnis baru melalui *database* dan pengembangan teknologi data untuk menciptakan dukungan bisnis.

Kebijakan Strategis

Dengan semakin tingginya tingkat persaingan, maka perusahaan pembiayaan dituntut lebih kreatif dalam menyalurkan kredit kepada pelanggannya. Dalam menjawab tantangan tersebut, Perseroan telah menetapkan strategi bisnis yang berfokus pada peningkatan penetrasi market melalui sumber-sumber bisnis yang dimiliki Perseroan, serta terus meningkatkan pelayanan yang handal melalui digitalisasi proses baik bagi pelanggan maupun bagi mitra bisnis.

MTF mencatatkan kinerja yang positif di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, baik dari sisi pertumbuhan pembiayaan baru yang meningkat sebesar 17,75% maupun dari sisi laba yang mengalami pertumbuhan sebesar 54,77%. Pada tahun buku ini, Perseroan mengusung tema strategi “*Building New Foundation to Win The Market*”. Tema ini menunjukkan komitmen Perseroan untuk membangun fondasi baru dalam meningkatkan kinerja Perseroan agar dapat memenangkan pasar. Untuk mendukung tema tersebut, Perseroan menetapkan pengembangan kondisi internal sebagai fondasi untuk tumbuh mencapai tujuan perusahaan.

Pangsa Pasar

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki beberapa kompetitor yang memiliki produk yang sama dengan perusahaan. Banyaknya perusahaan pembiayaan sejenis dan perbankan yang masuk dalam industri pembiayaan kendaraan bermotor, menimbulkan tingkat persaingan yang semakin ketat di sektor ini. Dengan semakin tingginya tingkat persaingan,

perusahaan pembiayaan dituntut lebih kreatif dalam menyalurkan kredit kepada pelanggannya, dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada para Pelanggan. Di antara layanan terbaik itu, kemudahan dalam mendapatkan kredit kendaraan bermotor, kemudahan melakukan pembayaran cicilan. Selain itu, kecepatan dalam survei dan paket kredit yang menarik serta bersaing, baik dalam segi rate pembiayaan, masa tenor dan uang muka.

Dalam menghadapi persaingan usaha yang tinggi tersebut Perseroan telah mempersiapkan strategi yang secara konsisten memberikan pelayanan yang terbaik bagi Pelanggan dan juga dealer melalui:

- Meningkatkan kompetensi orang untuk menggarap segmen bisnis baru.
- Melakukan *Business Process Re-engineering* (BPR) untuk setiap segmen *business*.
- Membangun kapabilitas sistem dan digital.
- Membangun kemampuan data management & data *analytic* untuk mensupport bisnis.

Solusi yang dilakukan sebagai strategi mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar, antara lain:

- Perseroan menawarkan layanan yang cepat dan mudah bagi Pelanggan.
- Memberikan Bunga dan nilai uang muka yang kompetitif.
- Perseroan mengadakan dan terlibat pada event-event besar yang menarik bagi seluruh masyarakat.
- Layanan cabang yang tersebar di seluruh negeri.
- Pengembangan digitalisasi yang mampu menjangkau dan memberikan layanan kemudahan bagi partner dan pelanggan.

Pangsa pasar Perseroan berdasarkan total aset industri pembiayaan nasional digambarkan pada tabel dan grafik di bawah ini.

	2023	2022
Jumlah perusahaan/lembaga pembiayaan *	147	153
Jumlah aset industri (Rp-miliar)*	552.887	487.919
Jumlah aset MTF (Rp-miliar)	29.727	23.728
Pangsa pasar berdasarkan aset (%)	5,38	4,86

*) Data berdasarkan Statistik Lembaga Pembiayaan yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Kegiatan Usaha Pembiayaan dan Proses Bisnis MTF

Perseroan menjalankan usahanya di bidang pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan multiguna. Saat ini, Perseroan memfokuskan kegiatan usaha di bidang pembiayaan konsumen dalam bentuk penyediaan dana bagi para pelanggan yang ingin membeli dengan pembayaran secara angsuran, baik dari entitas induk, PT Tunas Ridean ("TURI"), maupun dari luar kelompok usaha TURI. Perseroan memfokuskan usahanya pada kegiatan pembiayaan mobil baru yang dapat memberikan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang aman. Pembiayaan itu terdiri dari merek Toyota, Daihatsu, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi dan Suzuki maupun merek yang dijual dari APM.

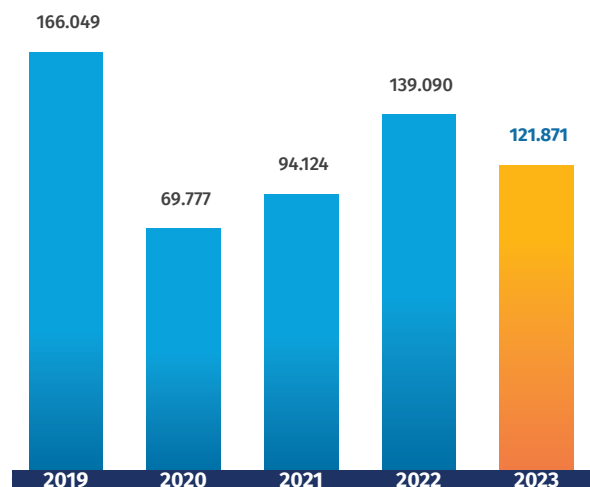
Kegiatan pembiayaan diberikan dalam bentuk kredit kepemilikan kendaraan bermotor dengan ketentuan pembayaran kembali secara angsuran tetap setiap bulannya. Perseroan mengklasifikasikan fasilitas pembiayaannya ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu mobil baru, mobil bekas dan sepeda motor. Karena itu Perseroan juga menerapkan persyaratan yang berbeda untuk ketiga jenis usaha ini.

Secara umum, jangka waktu pembiayaan ditetapkan 1 (satu) sampai 7 (tujuh) tahun dengan jangka waktu pembiayaan terbanyak adalah 4 (empat) tahun. Sebagai agunan untuk kredit tersebut adalah berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli yang ditahan dan disimpan oleh Perseroan. Dokumen tersebut akan diserahkan kepada pelanggan apabila seluruh kewajibannya kepada Perseroan telah dilunasi.

Perkembangan Jumlah Unit Kontrak Baru Berdasarkan Jenis Pembiayaan

Jenis Pembiayaan	Kontrak Baru (Unit)		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Unit	%
Mobil Baru	88.002	82.515	5.487	6,65
Mobil Bekas	28.253	21.714	6.539	30,11
Motor	378	322	56	17,39
Lainnya	5.238	34.539	(29.301)	(84,83)
Jumlah	121.871	139.090	(17.219)	(12,38)

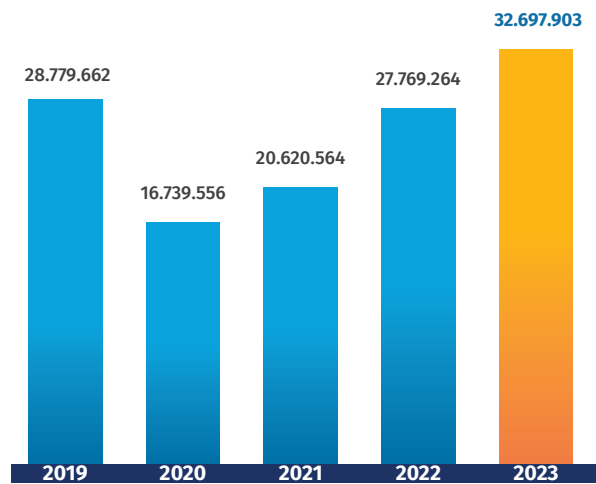
Jumlah Unit Kontrak Baru 2019-2023 (Unit)



Perkembangan Nilai Kontrak Pembiayaan Berdasarkan Jenis Pembiayaan

Jenis Pembiayaan	Kontrak Baru (Rp Juta)		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Rp Juta	%
Mobil Baru	27.253.703	23.817.707	3.435.996	14,43
Mobil Bekas	5.371.351	3.700.357	1.670.994	45,16
Motor	47.561	33.470	14.091	42,10
Lainnya	25.288	217.730	(192.442)	(88,39)
Jumlah	32.697.903	27.769.264	4.928.639	17,75%

Nilai Kontrak Pembiayaan 2019-2023 (Rp Juta)



Rekapitulasi Jumlah Unit Kontrak Baru dan Nilai Kontrak Pembiayaan

Jenis Pembiayaan	Kontrak Baru		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Rp Juta	%
Jumlah Nilai Pembiayaan (Rp Juta)	32.697.903	27.769.264	4.928.639	17,75
Jumlah Kontrak Baru (Unit)	121.871	139.090	(17.219)	(12,38)

Pencapaian Perseroan, dari sisi nilai pembiayaan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan kondisi ekonomi Indonesia yang tinggi sebesar 5,31% serta peningkatan daya beli masyarakat di tahun 2023.

Jumlah Nilai Kontrak Baru Berdasarkan Asal Kontrak dari grup Atau Non grup

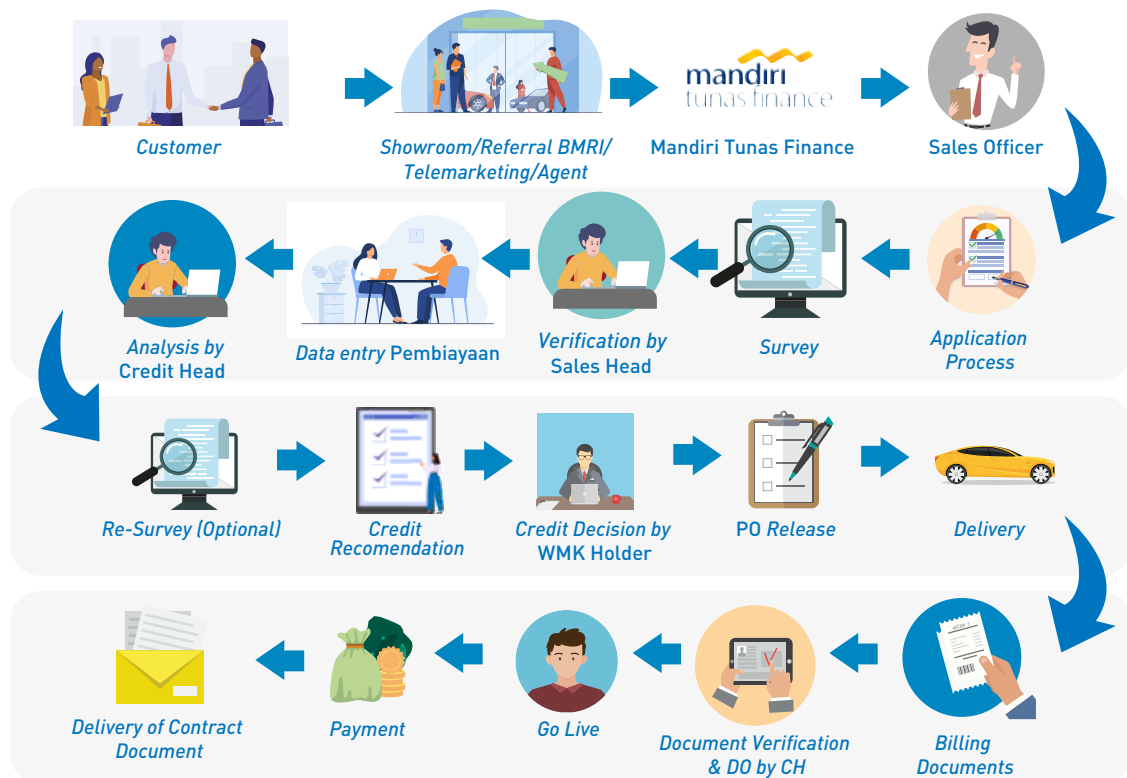
Jenis Pembiayaan	Kontrak Baru (Unit)		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Unit	%
Grup	9.301	6.924	2.377	34,33
Non Grup	112.570	132.166	(19.596)	(14,83)
Jumlah	121.871	139.090	(17.219)	(12,38)

Jumlah Nilai Pembiayaan Berdasarkan Asal Kontrak dari grup atau Non grup

Asal Kontrak	Kontrak Baru (Rp Juta)		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Rp Juta	%
Grup	2.473.403	1.502.796	970.607	64,59
Non Grup	30.224.500	26.266.468	3.958.032	15,07
Jumlah	32.697.903	27.769.264	4.928.639	17,75

Dalam mencari calon pelanggan, Perseroan mengandalkan petugas Sales Officer (SO). SO bertugas untuk memperoleh aplikasi kredit dari *dealer* dan *showroom* rekanan Perseroan, sekaligus melakukan analisis kredit, memproses kredit dan membantu memonitor kelancaran pembayaran kredit para pelanggan tersebut. Dengan demikian, SO merupakan ujung tombak Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk tetap menjaga kualitas kredit yang dihasilkan, Perseroan menempatkan minimal 1 (satu) orang Credit Head pada setiap kantor cabang Perseroan. Fungsi yang dijalankan sebagai penyeleksi atas usulan kredit yang diajukan oleh SO.

Pelayanan prima diberikan tidak terbatas hanya oleh setiap SO yang akan memproses aplikasi kredit di awal transaksi, tetapi juga oleh seluruh bagian selama masa kredit dan hingga selesainya kredit di akhir periode pembayaran. Berikut disampaikan skema proses pembiayaan konsumen yang berlaku di lingkup Perseroan.



Alur Proses Pembiayaan

Untuk terus dapat meningkatkan layanan kepada pelanggan, Perseroan terus melakukan pengembangan atau penyempurnaan proses pembiayaan, antara lain dengan memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi terutama dilakukan untuk terus mempercepat waktu proses pembiayaan namun dengan tetap mengutamakan kehati-hatian untuk menghasilkan portofolio yang sehat. Prinsip kehati-hatian juga tercermin dari penyusunan *risk acceptance criteria* (RAC) yang menjadi acuan dalam melakukan akuisisi pelanggan, antara lain namun tidak terbatas pada:

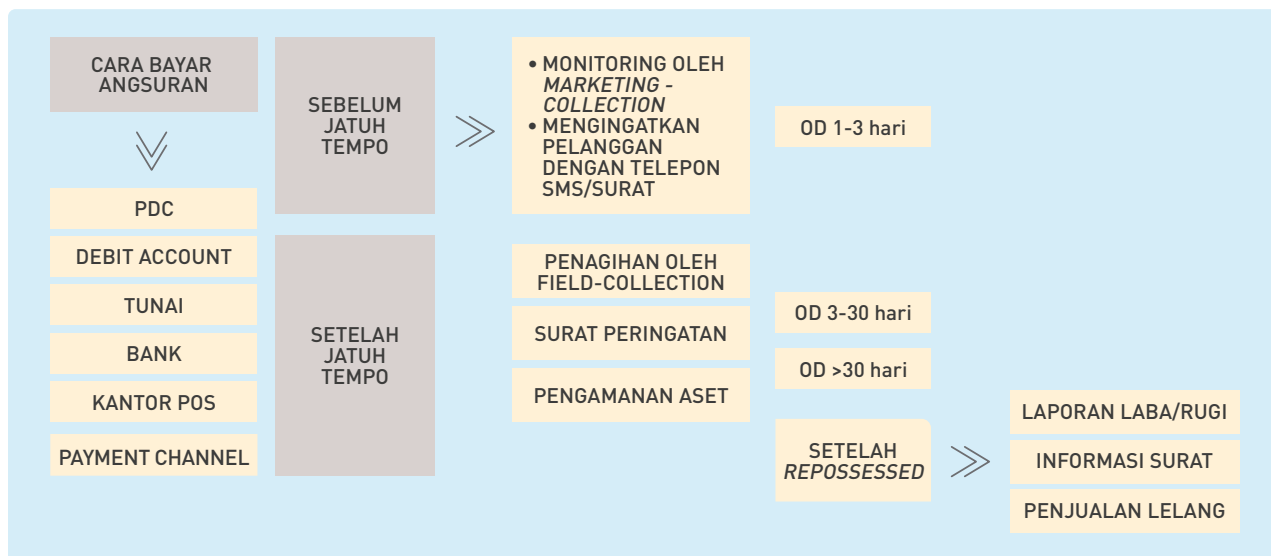
1. Pembayaran uang muka sejumlah persentase tertentu dari harga mobil.
2. Untuk pembiayaan mobil bekas, maksimum berumur 15 tahun.
3. Jangka waktu kredit adalah minimum 6 (enam) bulan dan maksimum 7 (tujuh) tahun.
4. Selama masa kredit, mobil tersebut harus dilindungi asuransi dari Perseroan asuransi yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Proses pembiayaan yang berorientasi pada prinsip kehati-hatian serta didukung oleh penggunaan teknologi menjadi fundamental yang kuat bagi Perseroan untuk terus bertumbuh dengan cepat dan sehat.

Skema Penagihan

Dengan adanya kebijakan pembiayaan sebagaimana diuraikan di atas, Perseroan diharapkan mampu menekan tingkat piutang yang bermasalah seminimal mungkin dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk mengelola kegiatan usaha pembiayaan serta untuk selalu menjaga tingkat kolektibilitas yang baik maka kegiatan penagihan merupakan salah satu kunci keberhasilan Perseroan.

Skema Penagihan



Pembagian Segmen Usaha Berdasarkan Segmen Operasi

Segmen operasi Perseroan dibagi berdasarkan kelompok nasabah utama dan produk, yaitu Fleet dan Retail, serta segmen lainnya sebagai perhitungan yang tidak dapat dialokasikan ke dalam kedua segmen tersebut. Dalam menentukan hasil segmen, beberapa akun aset dan liabilitas serta pendapatan dan biaya yang terkait didistribusikan ke masing-masing segmen berdasarkan kebijakan pelaporan internal manajemen.

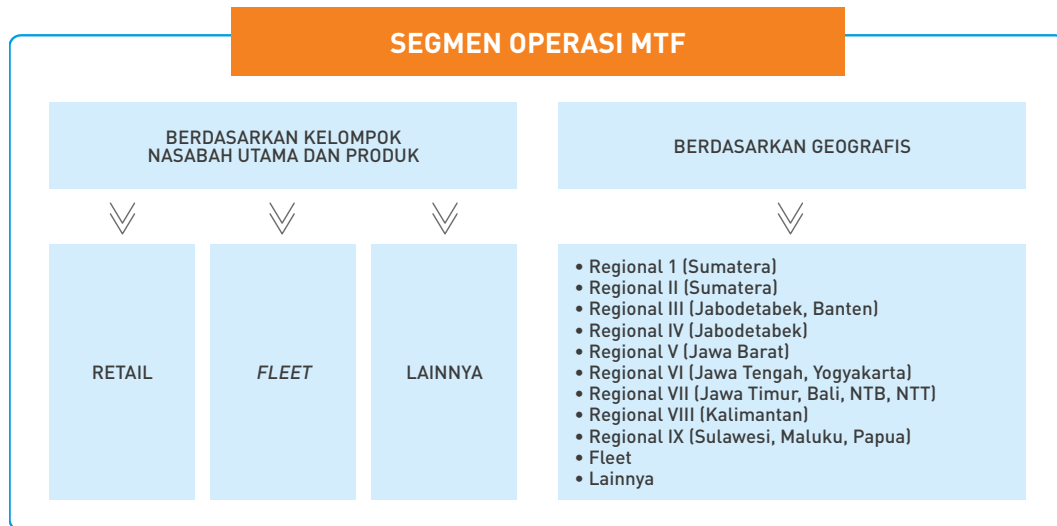
Penjelasan operasi masing-masing segmen dalam pelaporan segmen Perseroan adalah sebagai berikut:

- **Retail**
Termasuk dalam pelaporan segmen retail adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan konsumen untuk nasabah individu.
- **Fleet**
Termasuk dalam pelaporan segmen fleet adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan untuk nasabah korporasi.

- **Lainnya**

Termasuk dalam pelaporan segmen lain-lain adalah informasi pelaporan segmen operasi terkait dengan aktivitas treasuri dan kantor pusat seperti pendapatan bunga bank, beban umum dan administrasi yang tidak dapat dialokasikan ke dalam kedua segmen di atas.

Selain itu, Perseroan memperhitungkan segmen operasi berdasarkan informasi geografis.



Segmen Pembiayaan Retail

Pembiayaan Retail adalah pembiayaan kepada pelanggan yang mengajukan pembiayaan lewat kantor cabang Perseroan melalui menu *credit scoring*. Pembiayaan ritel ini diberikan kepada sasaran pasar untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor dalam kondisi baru atau bekas. Dalam pembiayaan ritel, ketentuan biaya administrasi dan asuransi dibebankan kepada pelanggan, dengan besaran beban bergantung pada jangka waktu pembiayaan dan ditetapkan terpisah dalam produk/ paket pembiayaan yang disediakan. Selama masa kredit, pembiayaan tersebut diasuransikan ke perusahaan asuransi rekanan Perseroan sebagai bentuk mitigasi risiko.

Pada tahun 2023, pendapatan dari pembiayaan ritel mengalami kenaikan sebesar Rp801,56 miliar dari Rp3,14 triliun Pada tahun 2022 menjadi Rp3,94 triliun pada tahun 2023.

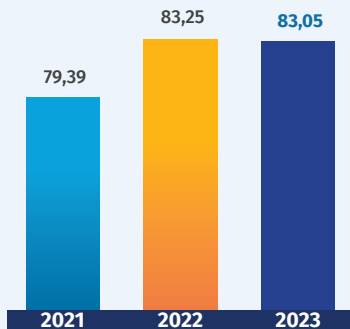
Jumlah dan Kontribusi Segmen Retail terhadap Pendapatan MTF

Asal Kontrak	2023		2022		Kenaikan/Penurunan	
	Jumlah (Rp Juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp Juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp Juta)	Kontribusi (%)
Retail						
Mobil	3.946.930	83,04	3.145.369	83,24	801.561	25,48
Motor	484	0,01	506	0,01	(22)	(4,35)
Jumlah Retail	3.947.414	83,05	3.145.875	83,25	801.539	25,48
Jumlah Pendapatan	4.752.900		3.778.841		974.059	

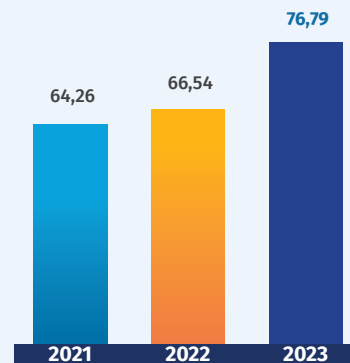
Jumlah dan Kontribusi Segmen Retail terhadap Aset MTF

Asal Kontrak	2023		2022		Kenaikan/Penurunan	
	Jumlah (Rp Juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp Juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp Juta)	Kontribusi (%)
Retail						
Mobil	22.827.261	76,79	15.789.086	66,54	7.038.175	30,83
Motor	95	0,00	157	0,00	(62)	(65,26)
Jumlah Retail	22.827.356	76,79%	15.789.243	66,54%	7.038.113	30,83
Jumlah Pendapatan	29.727.392		23.728.966		5.998.426	20,18

Kontribusi Segmen Retail Terhadap Pendapatan MTF (%)



Kontribusi Segmen Retail Terhadap Aset MTF (%)



Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Segmen Retail MTF

Akun	2023			2022			Kenaikan (Penurunan)					
	Mobil	Motor	Jumlah	Mobil	Motor	Jumlah	Nominal (Rp-juta)			Persentase (%)		
							Mobil	Motor	Jumlah	Mobil	Motor	Jumlah
PENDAPATAN												
Pembiayaan konsumen	2.715.052	106	2.715.158	2.179.554	3	2.179.557	535.495	103	535.598	24,57	3.433,33	24,57
Sewa pembiayaan	206.950	0	206.950	97.361	0	97.361	109.589	0	109.589	112,56	0,00	112,56
Bunga Simpanan Bank	13.211	0	13.211	10.369	0	10.369	2.842	0	2.842	27,41	0,00	27,41
Lain-lain - neto	1.011.717	378	1.012.095	858.085	503	858.588	153.632	(125)	153.507	17,90	(24,85)	17,88
Jumlah pendapatan	3.946.930	484	3.947.414	3.145.369	506	3.145.875	801.561	(22)	801.539	25,48	(4,35)	25,48
BEBAN												
Beban keuangan	(1.167.286)	(2)	(1.167.288)	(856.537)	(4)	(856.541)	(310.749)	2	(310.747)	36,28	(50,00)	36,28
Beban gaji dan tunjangan	(747.809)	(1.017)	(748.826)	(759.613)	(1.949)	(761.562)	11.804	932	12.736	(1,55)	(47,82)	(1,67)

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Segmen Retail MTF

Akun	2023			2022			Kenaikan (Penurunan)					
	Mobil	Motor	Jumlah	Mobil	Motor	Jumlah	Nominal (Rp-juta)			Persentase (%)		
							Mobil	Motor	Jumlah	Mobil	Motor	Jumlah
Beban umum dan administrasi	(328.573)	273	(328.300)	(303.271)	(524)	(303.795)	(25.302)	797	(24.505)	8,34	(152,10)	8,07
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(574.622)	3	(574.619)	(443.390)	0	(443.390)	(131.232)	3	(131.229)	29,60	0,00	29,60
Jumlah beban	(2.818.290)	(743)	(2.819.033)	(2.362.811)	(2.477)	(2.365.288)	(455.479)	1.734	(453.745)	19,28	(70,00)	19,18
Laba (rugi) sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan	1.128.640	(259)	1.128.381	782.558	(1.971)	780.587	346.082	1.712	347.794	44,22	(86,86)	44,56
Jumlah aset	22.827.261	95	22.827.356	15.789.086	157	15.789.243	7.038.175	(62)	7.038.113	44,58	(39,49)	44,58
Jumlah liabilitas	1.358.244	1.866	1.360.110	988.344	2.480	990.824	369.900	(614)	369.286	37,43	(24,76)	37,27

Segmen Pembiayaan Fleet

Pembiayaan Fleet adalah pembiayaan kepada pelanggan yang dikelola oleh Divisi Corporate Fleet yang merupakan pemberian Batas Pemberian Pembiayaan (BPP) kepada 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) kelompok obligor baik badan usaha maupun perseorangan. Terkait badan usaha, ketentuan nilai pembiayaan sama dengan atau di atas Rp5 miliar.

Pembiayaan Fleet terbagi menjadi 2 (dua) buku yaitu:

1. **Pembiayaan Investasi**

Pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/ investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada Debitur.

2. **Pembiayaan Modal Kerja**

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam 1 (satu) siklus aktivitas usaha Pelanggan, dengan cara menyediakan batas pembiayaan kepada Pelanggan yang bersifat *committed* dan *advised*.

Kinerja keuangan segmen Fleet khususnya Fleet Mobil tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp19,85 miliar atau sebesar 2,53% dibandingkan tahun 2022.

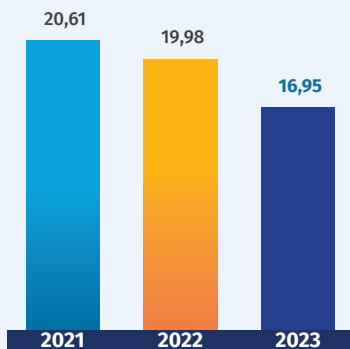
Jumlah dan Kontribusi Segmen Fleet terhadap Pendapatan MTF

Asal Kontrak	2023		2022		Kenaikan/Penurunan	
	Jumlah (Rp Juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp Juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp Juta)	Kontribusi (%)
Fleet						
Mobil	805.419	16,95	785.448	19,98	19.971	2,54
Motor	67	0,00	185	0,00	(118)	(63,78)
Jumlah Fleet	805.486	16,95	785.633	19,98	19.853	2,53
Jumlah Pendapatan	4.752.900		3.931.508		821.392	

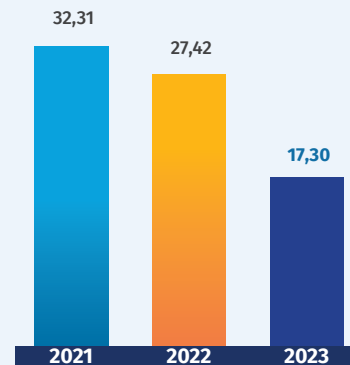
Jumlah dan Kontribusi Segmen Fleet terhadap Aset MTF

Asal Kontrak	2023		2022		Kenaikan/Penurunan	
	Jumlah (Rp juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp juta)	Kontribusi (%)
Fleet						
Mobil	5.142.242	17,30	6.505.706	27,42	(1.363.464)	(26,51)
Motor	171	0,00	859	0,00	(688)	(402,34)
Jumlah Fleet	5.142.413	17,30	6.506.565	27,42	(1.364.152)	(26,53)
Jumlah Pendapatan	29.727.392		23.728.966		5.998.426	

Kontribusi Segmen Fleet Terhadap Pendapatan MTF (%)



Kontribusi Segmen Fleet Terhadap Aset MTF (%)



Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Segmen Fleet MTF

Akun	2023			2022			Kenaikan (Penurunan)					
	Mobil	Motor	Jumlah	Mobil	Motor	Jumlah	Nominal (Rp-juta)			Persentase (%)		
							Mobil	Motor	Jumlah	Mobil	Motor	Jumlah
PENDAPATAN												
Pembiayaan konsumen	285.142	50	285.192	257.289	158	257.447	27.853	(108)	27.745	10,83	(68,35)	10,78
Sewa pembiayaan	445.801	0	445.801	468.168	0	468.168	(22.367)	0	(22.367)	(4,78)	0	(4,78)
Anjak piutang	909	0	909	9.715	0	9.715	(8.806)	0	(8.806)	(90,64)	0	(90,64)
Bunga Simpanan Bank	3.923	0	3.923	4.793	1	4.793	(870)	(1)	(871)	(18,15)	(100)	(18,17)
Lain-lain - neto	69.644	17	69.661	45.483	26	45.512	24.158	(9)	24.149	53,11	(34,62)	53,06
Jumlah pendapatan	805.419	67	805.486	785.448	185	785.633	19.971	(118)	19.853	2,54	(63,78)	2,53

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Segmen Fleet MTF

Akun	2023			2022			Kenaikan (Penurunan)					
	Mobil	Motor	Jumlah	Mobil	Motor	Jumlah	Nominal (Rp-juta)			Persentase (%)		
							Mobil	Motor	Jumlah	Mobil	Motor	Jumlah
BEBAN												
Beban keuangan	(342.866)	(11)	(342.877)	(392.938)	(93)	(393.031)	50.072	82	50.154	(12,74)	(88,17)	(12,76)
Beban gaji dan tunjangan	(53.368)	0	(53.368)	(61.844)	0	(61.844)	8.476	0	8.476	(13,71)	0	(13,71)
Beban umum dan administrasi	(21.536)	0	(21.536)	(23.639)	(2)	(23.641)	2.103	2	2.105	(8,90)	(100)	(8,90)
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(24.851)	(9)	(24.860)	(123.716)	6	(123.710)	98.865	(15)	98.850	(79,91)	(250)	(79,90)
Jumlah beban	(442.621)	(20)	(442.641)	(602.137)	(89)	(602.226)	159.516	69	159.585	(26,49)	(77,53)	(26,50)
Laba (rugi) sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan	362.798	47	362.845	183.311	96	183.407	179.487	(49)	179.438	97,91	(51,04)	97,84
Jumlah aset	5.142.242	171	5.142.413	6.505.706	859	6.506.565	(1.363.464)	(688)	(1.364.152)	(20,96)	(80,09)	(20,97)
Jumlah liabilitas	299.780	247	300.027	328.548	311	328.859	(28.768)	(64)	(28.832)	(8,76)	(20,58)	(8,77)

Segmen Lainnya

Segmen lainnya adalah informasi pelaporan segmen operasi terkait dengan aktivitas *treasury* dan kantor pusat seperti pendapatan bunga bank, beban umum dan administrasi yang tidak dapat dialokasikan ke dalam kedua segmen di atas. Dalam segmen ini, hanya tercakupkan aset dan liabilitas sebagai bagian dari aktivitas *treasury* dan kantor pusat.

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Segmen Lainnya

Uraian	2023 (Rp-juta)	2022 (Rp-juta)	Kenaikan/Penurunan	
			Jumlah (Rp Juta)	Kontribusi (%)
Jumlah Aset	1.757.623	1.433.158	324.465	18,46%
Jumlah Liabilitas	24.037.595	19.316.458	4.721.137	19,64%

Analisis Kinerja Segmen Usaha Berdasarkan Informasi Geografis

Segmen Usaha Berdasarkan Geografi

Selain berdasarkan kelompok nasabah utama dan produk, Perseroan juga menyajikan informasi segmen berdasarkan geografis, yaitu persebaran jasa pembiayaan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Perseroan mengelompokkan sebaran pasar nasabah dengan pembiayaan ritel yang dilayani ke dalam 9 (sembilan) regional dengan cakupan wilayah sebagai berikut.

Geografis	Rincian Wilayah
Regional I	Mencakup wilayah Kepulauan Riau, Riau dan Sumatera Utara
Regional II	Mencakup wilayah Bengkulu, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan
Regional III	Mencakup wilayah Banten (meliputi Tangerang (BSD dan Bintaro), Cilegon, Serang, dan Lebak (Rangkasbitung)), dan DKI Jakarta (meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat)
Regional IV	Mencakup wilayah DKI Jakarta (meliputi Jakarta Timur dan Jakarta Selatan), serta Jawa Barat (meliputi Bekasi, Depok, dan Bogor)
Regional V	Mencakup wilayah Jawa Barat (meliputi Karawang, Sukabumi, Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, Garut, dan Subang)
Regional VI	Mencakup wilayah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta
Regional VII	Mencakup wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
Regional VIII	Mencakup wilayah Kalimantan
Regional IX	Mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua

Jumlah dan Kontribusi Segmen Operasi Berdasarkan Geografis terhadap Pendapatan MTF

Jumlah Pendapatan Berdasarkan Geografis	2023		2022		Kenaikan/Penurunan	
	Jumlah (Rp Juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp Juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp Juta)	Kontribusi (%)
Regional I (Sumatera)	313.900	6,60	248.816	6,33	65.084	26,16
Regional II (Sumatera)	409.839	8,62	388.458	9,88	21.381	5,50
Regional III (Jabodetabek, Banten)	454.742	9,57	366.113	9,31	88.629	24,21
Regional IV (Jabodetabek)	467.826	9,84	344.485	8,76	123.341	35,80
Regional V (Jawa Barat)	312.041	6,57	255.174	6,49	56.867	22,29
Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)	320.989	6,75	275.078	7,00	45.911	16,69
Regional VII (Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT)	487.843	10,26	380.880	9,69	106.963	28,08
Regional VIII (Kalimantan)	683.728	14,39	502.048	12,77	181.680	36,19
Regional IX (Sulawesi, Maluku, dan Papua)	496.506	10,45	384.823	9,79	111.683	29,02
Fleet	805.486	16,95	785.633	19,98	19.853	2,53
Jumlah Pendapatan	4.752.900		3.931.508		821.392	20,89

Jumlah dan Kontribusi Segmen Operasi Berdasarkan Geografis terhadap Jumlah Aset MTF

Jumlah Aset Berdasarkan Geografis	2023		2022		Kenaikan/Penurunan	
	Jumlah (Rp Juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp Juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp Juta)	Kontribusi (%)
Regional I (Sumatera)	1.745.446	5,9	1.200.186	5,06	545.260	45,43
Regional II (Sumatera)	1.907.732	6,42	1.749.192	7,37	158.540	9,06
Regional III (Jabodetabek, Banten)	3.118.550	10,49	2.029.203	8,55	1.089.347	53,68
Regional IV (Jabodetabek)	3.345.820	11,23	2.178.293	9,18	1.167.527	53,60
Regional V (Jawa Barat)	1.706.071	5,74	1.244.413	5,24	461.658	37,10
Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)	1.743.026	5,86	1.369.361	5,77	373.665	27,29
Regional VII (Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT)	2.841.407	9,56	1.968.517	8,30	872.890	44,34
Regional VIII (Kalimantan)	3.650.156	12,28	2.291.273	9,66	1.358.883	59,31
Regional IX (Sulawesi, Maluku, dan Papua)	2.769.148	9,32	1.758.805	7,41	1.010.343	57,44
Fleet	5.142.413	17,30	6.506.565	27,42	(1.364.152)	(20,97)
Lain-lain	1.757.623	5,91	1.433.158	6,04	324.465	22,64
Jumlah Aset	29.727.392		23.728.966		5.998.426	25,28

Tinjauan Keuangan



Analisis dan pembahasan kinerja keuangan pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Perusahaan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Posisi Keuangan

dalam jutaan Rupiah

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan (Penurunan)	
			Rp	%
Aset				
Kas dan Setara Kas	852.140	840.436	11.704	1,39
Piutang Pembiayaan Konsumen	22.361.823	16.340.837	6.020.986	36,85
Piutang Sewa Pembiayaan	5.347.572	5.643.346	(295.774)	(5,24)
Anjak Piutang	35.322	32.976	2.346	7,11
Piutang Lain-lain	622.854	449.440	173.414	38,58
Aset Pajak Tangguhan	100.789	116.452	(15.663)	(13,45)
Piutang Derivatif	28.933	24.534	4.399	17,93
Aset Tetap	283.625	219.763	63.862	29,06
Aset Lain-lain	94.334	61.182	33.152	54,19
Jumlah Aset	29.727.392	23.728.966	5.998.426	25,28

dalam jutaan Rupiah

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan (Penurunan)	
			Rp	%
Liabilitas				
Utang Usaha	1.017.137	702.291	314.846	44,83
Utang Lain-lain	247.721	300.666	(52.945)	(17,61)
Utang Pajak Kini	112.000	125.498	(13.498)	(10,76)
Beban yang Masih Harus Dibayar	262.098	311.622	(49.524)	(15,89)
Pinjaman Bank	18.096.715	14.661.887	3.434.828	23,43
Surat Berharga yang Diterbitkan	5.687.515	4.339.237	1.348.278	31,07
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan	274.546	194.940	79.606	40,84
Jumlah Liabilitas	25.697.732	20.636.141	5.061.591	24,53
Ekuitas				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000	-	-
Penghasilan Komprehensif lain:				
Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - Neto	(38.390)	(30.198)	(8.192)	27,13
Keuntungan/(Kerugian) Kumulatif atas Instrumen Derivatif Untuk Lindung Nilai Arus Kas - Neto	2.802	(6.188)	8.990	145,28
Saldo Laba				
Sudah Ditentukan Penggunaannya	50.000	50.000	-	-
Belum Ditentukan Penggunaannya	3.765.248	2.829.211	936.037	33,08
Jumlah Ekuitas	4.029.660	3.092.825	936.835	30,29

Aset

Jumlah Aset Perseroan pada tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp29,72 triliun dan Rp23,72 triliun, meningkat sebesar Rp5,99 triliun atau 25,28% Penambahan atas jumlah aset tersebut sebagian besar dikarenakan kenaikan atas portofolio Piutang Pembiayaan Konsumen.

Liabilitas

Jumlah liabilitas pada tahun ini meningkat sebesar 24,53% atau Rp5,06 triliun dari Rp20,63 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp25,69 triliun pada tahun 2023. Kenaikan terdapat pada Utang usaha yang mengalami peningkatan sebesar Rp314,84 miliar atau 44,83% dari sebesar Rp702,29 miliar pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp1,01 triliun pada tahun 2023 serta peningkatan pinjaman bank dan penerbitan surat berharga yang terjadi di tahun 2023.

Ekuitas

Pada tahun 2023, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp4,02 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp936,83 miliar atau 30,29% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tahun 2022 sebesar Rp3,09 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya laba bersih perusahaan.

Labarugi dan Penghasilan Pendapatan Bunga

dalam jutaan Rupiah

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan (Penurunan)	
			Rp	%
Pendapatan	4.752.900	3.931.508	821.392	20,89
Beban-beban	(3.261.674)	(2.967.514)	294.160	9,91
Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan	1.491.226	963.994	527.232	54,69
Beban Pajak Final	(3.427)	(3.033)	394	12,99
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	1.487.799	960.961	526.838	54,82
Beban Pajak Penghasilan	(326.698)	(210.748)	115.950	55,02
Laba Tahun Berjalan	1.161.101	750.213	410.888	54,77
Penghasilan Komprehensif	798	(3.067)	3.865	126,02
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	1.161.899	747.146	414.753	55,51
Laba per Saham Dasar (Rupiah Penuh)	464	300	164	54,67

Pendapatan

Pendapatan Perseroan di tahun 2023 naik sebesar Rp821,39 miliar atau 20,89% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp3,93 triliun menjadi Rp4,75 triliun. Rincian dari pendapatan tersebut adalah Pendapatan dari Pendapatan Pembiayaan Konsumen, Pendapatan Sewa Pembiayaan, Pendapatan Anjak Piutang, Pendapatan Bunga, dan Pendapatan Lain-lain-neto yang masing-masing sebesar Rp3,0 triliun, Rp652,75 miliar, Rp909 juta Rp17,13 miliar dan Rp1,08 triliun Peningkatan terjadi pada pendapatan pembiayaan konsumen sebesar Rp563,34 miliar, sedangkan penurunan pendapatan terjadi pada anjak piutang sebesar Rp8,80 miliar.

dalam jutaan Rupiah

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan (Penurunan)	
			Rp	%
Pendapatan dari Pembiayaan Konsumen	3.000.350	2.437.004	563.346	23,12
Pendapatan dari Sewa Pembiayaan	652.751	565.529	87.222	15,42
Pendapatan Anjak Piutang	909	9.715	(8.806)	(90,64)
Pendapatan Bunga	17.134	15.163	1.971	13,00
Pendapatan Lain-lain Neto	1.081.756	904.097	177.659	19,65
Jumlah Pendapatan	4.752.900	3.931.508	821.392	20,89

Beban-beban

Beban Perseroan pada tahun 2023 meningkat 9,91% menjadi Rp3,26 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Rp2,97 triliun. Adanya peningkatan pada beban keuangan Perseroan di tahun 2023 mencapai Rp1,51 triliun naik 20,85% atau senilai Rp260,59 miliar dibandingkan beban keuangan tahun 2022 yang sebesar Rp1,24 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya pinjaman bank.

dalam jutaan Rupiah

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan (Penurunan)	
			Rp	%
Beban-beban				
Beban Keuangan	1.510.165	1.249.572	260.593	20,85
Gaji dan Tunjangan	802.194	823.406	(21.212)	(2,58)
Umum dan Administrasi	349.836	327.436	22.400	6,84

dalam jutaan Rupiah

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan (Penurunan)	
			Rp	%
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai:				
Pembiayaan Konsumen	697.613	487.604	210.009	43,07
Sewa Pembiayaan	7.050	49.556	(42.506)	(85,77)
Anjak Piutang	(9.057)	11.063	(20.120)	(181,87)
Piutang Lain-lain	(96.127)	18.877	(115.004)	(609,23)
Jumlah Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	599.479	567.100	32.379	5,71
Jumlah Beban	3.261.674	2.967.514	294.160	9,91

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Penyisihan kerugian penurunan nilai tahun 2023 sebesar Rp599,48 miliar, meningkat 5,71% atau senilai Rp32,38 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp567,10 miliar. Kenaikan disebabkan adanya peningkatan portofolio yang menyebabkan kenaikan penyisihan kerugian penurunan nilai pada pembiayaan konsumen.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Laba (rugi) sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan didapatkan dari akumulasi antara pendapatan dan beban-beban. Dengan pendapatan dan beban-beban seperti yang telah dijelaskan di atas, di tahun 2023 Perseroan membukukan laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan sebesar Rp1,49 triliun meningkat 54,69% atau senilai Rp527,23 miliar dari pembukuan laba (rugi) sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan. Hal ini disebabkan meningkatnya pendapatan pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan MTF di tahun 2023 masing-masing sebesar 23,12% dan 15,42% atau sebesar Rp563,34 miliar dan Rp87,22 miliar.

dalam jutaan Rupiah

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan (Penurunan)	
			Rp	%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan				
Pendapatan	4.752.900	3.931.508	821.392	20,89
Beban-beban	(3.261.674)	(2.967.514)	294.160	9,91
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan	1.491.226	963.994	527.232	54,69
Beban Pajak Final	(3.427)	(3.033)	394	12,99
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan	1.487.799	960.961	526.838	54,82
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(326.698)	(210.748)	115.950	55,02
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.161.101	750.213	410.888	54,77

Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan didapatkan dari akumulasi antara laba (rugi) tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain setelah pajak tahun 2023 sebesar Rp1,16 triliun, mengalami peningkatan sebesar 55,51% atau senilai Rp414,75 miliar dari tahun 2022 sebesar Rp747,15 miliar. Adanya peningkatan pada penghasilan komprehensif lain disebabkan karena meningkatnya bagian efektif dari keuntungan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas.

dalam jutaan Rupiah

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan (Penurunan)	
			Rp	%
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan				
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.161.101	750.213	410.888	54,77
Penghasilan Komprehensif Lain	798	(3.067)	3.865	126,01
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi				
Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan	(10.502)	3.070	(13.572)	(442,08)
Pajak Penghasilan Terkait	2.310	(675)	2.985	442,22
	(8.192)	2.395	(10.587)	(442,05)
Pos yang Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi:				
Bagian Efektif dari Kerugian Instrumen Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas	11.525	(7.002)	18.527	264,60
Pajak Penghasilan Terkait	(2.535)	1.540	(4.075)	(264,61)
	8.990	(5.462)	14.452	264,59
Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak	798	(3.067)	3.865	126,02
Total Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Tahun Berjalan	1.161.899	747.146	414.753	55,51

Laporan Arus Kas

Arus kas memberikan gambaran tentang penerimaan dan pengeluaran kas Perseroan. Seperti yang terlihat pada tabel di atas, baik kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi, serta kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan, mengalami penurunan yang kemudian menyebabkan kas dan setara kas Perseroan di akhir tahun mengalami penurunan seperti yang akan diuraikan berikut ini.

dalam jutaan Rupiah

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan (Penurunan)	
			Rp	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(4.420.498)	(3.190.177)	1.230.321	38,57
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(118.954)	(65.272)	53.682	82,24
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	4.551.156	3.855.503	695.653	18,04
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	11.704	600.054	(588.350)	(98,05)
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	840.436	240.382	600.054	249,63
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	852.140	840.436	11.704	1,39

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di tahun 2023 berjumlah defisit Rp4,42 triliun, mengalami peningkatan 38,57% dari tahun 2022 yang diperoleh berjumlah defisit Rp3,19 triliun. Seperti yang terlihat pada tabel di atas, kenaikan jumlah defisit dikarenakan pembayaran kepada penyalur kendaraan (*supplier*) meningkat 17,44% dari Tahun 2022 sejalan dengan peningkatan lending perusahaan di tahun 2023.

dalam jutaan Rupiah

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan (Penurunan)	
			Rp	%
Penerimaan Kas dari Konsumen:				
Pembiayaan Konsumen	24.720.154	21.507.345	3.212.809	14,94
Sewa Pembiayaan	4.099.252	3.845.288	253.964	6,60
Anjak Piutang	7.000	401.193	(394.193)	(98,26)
Pembiayaan Bersama	12.782.010	11.436.484	1.345.526	11,77
Pendapatan Bunga Simpanan Bank	13.688	15.144	(1.456)	(9,61)
Pendapatan Penalti	148.794	134.027	14.767	11,02
Penerimaan dari Piutang yang Telah Dihapusbukukan	179.645	152.667	26.978	17,67
Penerimaan Tagihan Kelebihan Pajak	-	20.697	(20.697)	(100,00)
Premi Asuransi	1.651.382	1.408.879	242.503	17,21
Pengeluaran Kas Untuk:				
Pembayaran Fasilitas Pembiayaan Bersama	(10.632.638)	(10.458.484)	174.154	1,67
Pembayaran Kepada Penyalur Kendaraan	(33.458.424)	(28.489.839)	4.968.585	17,44
Pembayaran Beban Keuangan	(1.492.506)	(1.268.963)	223.543	17,62
Pembayaran Pajak Penghasilan	(324.758)	(133.626)	191.132	143,04
Pembayaran Gaji dan Tunjangan	(772.663)	(649.104)	123.559	19,04
Pembayaran Beban Umum dan Administrasi	(340.005)	(264.328)	75.677	28,63
Pembayaran Kepada Perusahaan Asuransi	(1.001.429)	(847.557)	153.872	18,15
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(4.420.498)	(3.190.177)	1.230.321	38,57

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Di tahun 2023 penggunaan kas bersih untuk aktivitas investasi tercatat sebesar Rp118,95 miliar, naik 82,24% dibandingkan tahun 2022 yang berjumlah Rp65,27 miliar. Kenaikan kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi terutama untuk perolehan aset tetap sehubungan dengan penambahan infrastruktur, furnitur, peralatan kantor dan bangunan.

dalam jutaan Rupiah

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan (Penurunan)	
			Rp	%
Pembelian Aset Tetap	(86.892)	(49.896)	36.996	74,15
Perolehan Aset Hak Guna	(32.191)	(15.731)	16.460	104,63
Penjualan Aset Tetap	129	355	(226)	(63,66)
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(118.954)	(65.272)	53.682	82,24

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tahun 2023 tercatat sebesar Rp4,55 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2022 dimana Perseroan memperoleh kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp3,85 triliun. Peningkatan ini disebabkan karena peningkatan penerimaan surat berharga yang diterbitkan serta menurunnya pembayaran surat berharga yang diterbitkan.

dalam jutaan Rupiah

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan (Penurunan)	
			Rp	%
Penerimaan Pinjaman	17.276.376	20.402.395	(3.126.019)	(15,32)
Penerimaan Surat Berharga yang Diterbitkan	1.822.845	1.228.055	594.790	48,43
Pembayaran Pinjaman	(13.829.050)	(15.330.618)	(1.501.568)	(9,79)
Pembayaran Surat Berharga yang Diterbitkan	(472.000)	(2.382.000)	(1.910.000)	(80,18)
Pembayaran Beban Emisi Surat Berharga	(6.283)	(3.118)	3.165	101,51
Pembayaran Dividen Kas	(225.064)	(49.175)	175.889	357,68
Pembayaran Utang Sewa	(15.668)	(10.036)	5.632	56,12
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	4.551.156	3.855.503	695.653	18,04

Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih serta Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

Dengan pembukuan pada kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi, serta kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan seperti yang telah dijelaskan di atas, kas dan setara kas di akhir tahun 2023 tercatat sebesar Rp852,14 miliar mengalami kenaikan 1,39% dari posisi awal tahun sebesar Rp840,44 miliar. Hal ini di dominasi oleh penerimaan pendanaan dan peningkatan pembiayaan selama 2023.

Kemampuan Perusahaan dalam Efisiensi dan Menghasilkan Keuntungan

Rasio Keuangan Penting

Uraian	Satuan	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)
Profitabilitas				
Imbal Hasil Aset	%	4,34	3,54	0,80
Imbal Hasil Aset*	%	5,00	4,05	0,95
Imbal Hasil Rata-rata Aset*	%	5,58	4,54	1,04
Imbal Hasil Ekuitas	%	28,81	24,26	4,55
Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas	%	32,60	27,34	5,26
Jumlah Pendapatan/Jumlah Aset	%	15,99	16,57	(0,58)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan/Pendapatan	%	31,38	24,52	(25,11)
Laba Bersih Setelah Pajak Tahun Berjalan/Pendapatan	%	24,43	19,08	5,35
Rasio Efisiensi Biaya	%	34,34	43,08	(11,37)
Rasio Lancar	(kali)	1,10	1,32	(0,22)
Aset Produktif				
Piutang Pembiayaan Bersih Kelolaan	(Rp-juta)	53.061.308	45.122.742	7.938.566
Piutang Pembiayaan-pembiayaan Bersama	(Rp-juta)	24.898.967	22.623.833	2.275.134
Piutang Bermasalah Kelolaan	%	0,70	0,72	(0,02)
Likuiditas				
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	(kali)	0,86	0,87	(0,01)

Uraian	Satuan	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	(kali)	6,38	6,67	(0,29)
Utang yang Berbunga/Jumlah Ekuitas**	(kali)	5,90	6,14	(0,24)

*) Menggunakan perhitungan laba sebelum pajak

***) Gearing Ratio

Rasio Profitabilitas

Rasio imbal hasil rata-rata aset dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam meraih laba dari seluruh aset yang diinvestasikan. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rasio imbal hasil rata-rata aset adalah sebesar 5,58% dan 4,54%.

Rasio Efisiensi

Cost Efficiency Ratio (CER) tahun 2023 tercatat sebesar 34,34% atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar 43,08%. Penurunan CER ini disebabkan adanya efisiensi pada biaya-biaya dengan peningkatan pada pendapatan Perseroan. Hal ini menunjukkan keberhasilan Perseroan dalam menumbuhkembangkan bisnisnya yang tercermin dari pertumbuhan pendapatan, yang disertai dengan strategi efisiensi pada beban-beban.

Komposisi Beban Pembiayaan

Beban pembiayaan Perseroan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1,51 triliun, naik 20,85% atau sebesar Rp260,59 miliar.

dalam jutaan Rupiah

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan (Penurunan)	
			Rp	%
Pinjaman Bank	1.078.119	782.314	295.805	37,81
Surat Berharga	354.777	397.921	(43.144)	(10,84)
Administrasi dan Provisi Bank	67.902	59.561	8.341	14,00
Rugi/Laba Selisih Kurs	591	(166)	757	456,02
Amortisasi Biaya Emisi Surat Berharga	3.716	3.614	102	2,82
Bunga Liabilitas Sewa	2.476	2.392	84	3,51
Lain-lain	2.584	3.936	(1.352)	(34,35)
Jumlah Beban Pembiayaan	1.510.165	1.249.572	260.593	20,85

Kemampuan Membayar Utang

Perseroan memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan kewajiban utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Hal ini dapat dilihat dari rasio solvabilitas. Sedangkan rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam membayar utang jangka pendek.

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)
Rasio Likuiditas			
Rasio Lancar (kali)	1,10	1,32	(0,22)
Rasio Kas (%)	6,75	9,63	(2,88)
Rasio Solvabilitas			
Rasio Utang yang Berbunga terhadap Ekuitas	5,90	6,14	(0,24)
Rasio Utang terhadap Ekuitas, atau <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) (kali)	6,38	6,67	(0,29)
Rasio Utang terhadap Aset, atau <i>Debt to Asset Ratio</i> (DAR) (kali)	0,86	0,87	(0,01)

Rasio Likuiditas

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Likuiditas diukur dengan menggunakan rasio lancar (*current ratio*), yaitu perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas lancar dan rasio kas yang dihitung dengan perbandingan antara kas dan setara kas dengan utang atau liabilitas lancar. Aset lancar terdiri dari aset yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Di tahun 2023, rasio lancar Perseroan tercatat sebesar 1,10 kali mengalami penurunan dibandingkan rasio lancar tahun 2022 yang tercatat sebesar 1,32 kali. Demikian pula dengan rasio kas juga mengalami penurunan dari 9,63% di tahun 2022 menjadi 6,75% di tahun 2023.

Rasio Solvabilitas

Kenaikan di tahun 2023 pada Rasio Utang terhadap ekuitas sebesar 6,38 kali menurun 0,29% dibandingkan tahun 2022 sebesar 6,67 kali dan rasio utang terhadap aset sebesar 0,86 kali juga menurun 0,01% di tahun 2023.

dalam jutaan Rupiah

Uraian	Kurang dari Satu Bulan	1-6 bulan	Lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo	Nilai Tercatat
Aset						
Kas dan Setara Kas	833.946	-	-	-	-	833.946
Piutang Pembiayaan Konsumen	887.083	4.015.096	4.313.239	13.494.299	-	22.709.717
Piutang Sewa Pembiayaan	298.722	1.388.490	1.346.157	2.383.496	-	5.416.865
Anjak Piutang	650	3.250	3.901	27.957	-	35.758
Piutang Lain-lain	596.485	70.667	-	-	-	667.152
Piutang Derivatif	-	28.933	-	-	-	28.933
Aset Lain-lain	49.049	-	-	-	-	49.049
Total Aset	2.665.935	5.506.436	5.663.297	15.905.752	-	29.741.420
Liabilitas						
Utang Usaha	1.017.137	-	-	-	-	1.017.137
Utang Lain-lain	166.897	5.925	6.872	25.379	-	205.073
Beban yang Masih Harus Dibayar	2.113	259.985	-	-	-	262.098
Pinjaman Yang Diterima	1.206.954	3.878.098	4.312.389	8.699.274	-	18.096.715
Surat Berharga yang Diterbitkan	-	1.114.812	657.799	3.914.904	-	5.687.515
Total Liabilitas	2.393.101	5.258.820	4.977.060	12.639.557	-	25.268.538
Total Perbedaan Jatuh Tempo	272.834	247.616	686.237	3.266.195	-	4.472.882

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada *undiscounted cash flows* pada tanggal 31 Desember 2023.

dalam jutaan Rupiah

Uraian	Kurang dari Satu Bulan	1-6 bulan	Lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Nilai Tercatat
Liabilitas					
Utang Usaha	1.017.137	-	-	-	1.017.137
Utang Lain-lain	166.897	5.925	6.872	25.379	205.073
Beban yang Masih Harus Dibayar	2.113	259.985	-	-	262.098

dalam jutaan Rupiah

Uraian	Kurang dari Satu Bulan	1-6 bulan	Lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Nilai Tercatat
Pinjaman Bank	1.299.278	4.274.763	4.658.637	9.149.680	19.382.358
Surat Berharga yang Diterbitkan	31.036	1.288.053	804.667	4.344.767	6.468.523
Total Liabilitas	2.516.461	5.828.726	5.470.176	13.519.826	27.335.189

Fasilitas Pembiayaan dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Dalam menjalankan usahanya Perseroan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*). Setiap pemohonan kredit harus melalui proses analisis kredit secara cermat dan berbagai tahapan persetujuan. Pengelolaan *portfolio* secara konservatif dilakukan dengan menerapkan penyisihan secara progresif atas semua piutang yang telah masuk kategori ragu-ragu. Saat ini Perseroan menerapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan *review* terhadap status saldo pada akhir periode.

Perseroan konsisten melakukan penanganan dalam pembiayaan yang bermasalah dengan lebih menitikberatkan prinsip kehati-hatian atau (*prudent*) dan menjaga ketaatan konsumennya untuk melakukan pembayaran tepat waktu dengan cara *reminding* (mengingatkan), *collecting* (menagih), dan *repossess* (pengamanan aset). Perseroan juga memiliki divisi penyelamatan kredit yang dinamakan *Account Receivable Management Division* yang dipimpin oleh dua orang *Account Receivable Division Head* yang membawahi beberapa orang *Account Receivable Departemen Head* dan setiap *Account Receivable Department Head* akan membawahi beberapa orang *Remedial Head* dan *Collection Head*.

Tunggakan Piutang Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Tunggakan Angsuran

dalam jutaan Rupiah

Uraian	2023		2022		Pertumbuhan (Penurunan)	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Jumlah Piutang	56.405.366	100,00	46.507.804	100,00	9.897.562	21,28
Lancar	53.888.430	95,54	44.534.718	95,75	9.353.712	21,00
Tunggakan 1 - 90 hari	2.030.050	3,60	1.626.085	3,50	403.965	24,84
Tunggakan 91 - 120 hari	227.964	0,40	158.343	0,34	69.621	43,97
Tunggakan 121 - 180 hari	250.250	0,44	167.501	0,36	82.749	49,40
Tunggakan >180 hari (Piutang Non Performing)	8.672	0,02	21.157	0,05	(12.485)	(59,01)

Piutang Pembiayaan Konsumen

dalam jutaan Rupiah

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan (Penurunan)	
			Rp	%
Jumlah Piutang	27.898.155	20.787.497	7.110.658	34,21
Pendapatan Pembiayaan Konsumen yang Belum Diakui	(5.188.438)	(4.113.082)	1.075.356	26,14
Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih	22.709.717	16.674.415	6.035.302	36,19

Tunggakan Piutang Sewa Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Tunggakan Angsuran

dalam jutaan Rupiah

Uraian	2023		2022		Pertumbuhan (Penurunan)	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Jumlah Piutang	6.265.251	100,00	6.657.743	100,00	(392.492)	(5,90)
Lancar	5.998.708	95,75	6.438.020	96,70	(439.312)	(6,82)
Tunggakan 1 - 90 hari	244.470	3,90	189.920	2,85	54.550	28,72
Tunggakan 91 - 120 hari	6.605	0,10	9.150	0,14	(2.545)	(27,81)
Tunggakan 121 - 180 hari	15.468	0,25	20.653	0,31	(5.185)	(25,11)
Tunggakan >180 hari (Piutang <i>Non Performing</i>)	-	-	-	-	-	-

Piutang Sewa Pembiayaan Konsumen

dalam jutaan Rupiah

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan (Penurunan)	
			Rp	%
Jumlah Piutang	6.236.631	6.554.932	(318.301)	(4,86)
Pendapatan Pembiayaan Konsumen yang Belum Diakui	(819.766)	(772.907)	(46.859)	6,06
Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih	5.416.865	5.782.025	(365.160)	(6,32)

Tunggakan Piutang Anjak Berdasarkan Tunggakan Angsuran

dalam jutaan Rupiah

Uraian	2023		2022		Pertumbuhan (Penurunan)	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Jumlah Piutang	50.954	100,00	42.561	100,00	8.393	19,72
Lancar	50.954	100,00	42.561	100,00	8.393	19,72
Tunggakan 1 - 90 hari	-	-	-	-	-	-
Tunggakan 91 - 120 hari	-	-	-	-	-	-
Tunggakan 121 - 180 hari	-	-	-	-	-	-
Tunggakan >180 hari (Piutang <i>Non Performing</i>)	-	-	-	-	-	-

Piutang Anjak

dalam jutaan Rupiah

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan (Penurunan)	
			Rp	%
Jumlah Piutang	50.954	42.561	8.393	19,72
Pendapatan Pembiayaan Konsumen yang Belum Diakui	(15.196)	(92)	(15.104)	16417,39
Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih	35.758	42.469	(6.711)	(15,80)

Rasio Kualitas Kredit dari Aset

Rasio kualitas kredit dari aset keuangan yang dapat menggambarkan risiko kredit. Pada tanggal 31 Desember 2023, eksposur risiko kredit atas aset keuangan terbagi atas:

dalam jutaan Rupiah

Uraian	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai		Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	Cadangan Kerugian penurunan nilai	Jumlah
	High grade	Standard grade				
Kas dan Setara Kas	833.946	-	-	-	-	833.946
Piutang Pembiayaan Konsumen						
Perorangan	11.292.015	10.399.885	840.361	177.456	(347.894)	22.361.823
Piutang Sewa Pembiayaan Konsumen						
Korporasi	3.048.322	2.137.678	211.784	19.081	(69.293)	5.347.572
Anjak Piutang	-	35.758	-	-	(436)	35.322
Piutang Lain-lain	667.152	-	-	-	(44.298)	622.854
Piutang Derivatif	28.933	-	-	-	-	28.933
Aset Lain-lain	49.049	-	-	-	-	49.049
Total Aset	15.919.417	12.573.321	1.052.145	196.537	(461.921)	29.279.499

Penjelasan pembagian kualitas kredit yang diberikan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai:

1. *High grade*, yaitu tidak pernah mengalami tunggakan sebelumnya.
2. *Standard grade*, yaitu pernah mengalami tunggakan sebelumnya namun sampai saat ini belum terdapat keterlambatan dalam pembayaran cicilan pokok dan bunga.

Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan yang pembayaran angsurannya menunggak lebih dari 90 hari diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang mengalami penurunan nilai. Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan konsumen yang diberikan, Perseroan menerima jaminan dari konsumen berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan bermotor yang dibiayai Perseroan.

Tabel berikut menunjukkan *aging analysis* terhadap piutang pembiayaan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai:

Uraian	1-30 hari (Rp-juta)	31-60 hari (Rp-juta)	61-90 hari (Rp-juta)	Jumlah (Rp-juta)
Piutang Pembiayaan Konsumen				
Perorangan	486.720	189.653	163.988	840.361
Piutang Sewa Pembiayaan Konsumen				
Korporasi	106.102	42.875	62.807	211.784
Jumlah Aset	592.822	232.528	226.795	1.052.145

Aset Produktif

Aset produktif Perseroan terdiri dari Piutang Pembiayaan Konsumen Kelolaan, Piutang Bermasalah (*Non Performing Loan*), Likuiditas dan Solvabilitas, serta informasi keuangan lainnya. Secara rinci, perolehan aset produktif adalah sebagai berikut:

dalam jutaan Rupiah

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan (Penurunan)	
			Rp	%
Piutang Pembiayaan Bersih Kelolaan (Rp-juta)	53.061.308	45.122.742	7.938.566	17,60
Piutang Pembiayaan-pembiayaan Bersama (Rp-juta)	24.898.967	22.623.833	2.275.134	10,06
Piutang Bermasalah (%)	0,70	0,72	(0,02)	(2,78)

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Kebijakan Struktur Modal

Tujuan Perseroan dalam mengelola permodalannya adalah menjaga kelangsungan usaha Perseroan untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya modal. Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbalan hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi pinjaman. Konsisten dengan pelaku industri lainnya, Perseroan memonitor permodalan berdasarkan *gearing ratio*. Rasio ini dihitung dari nilai bersih pinjaman (termasuk Obligasi dan *Medium-Term Notes*) dibagi dengan jumlah modal. Jumlah modal diambil dari ekuitas yang tercantum dalam laporan posisi keuangan.

Dalam mengelola permodalan, Perseroan melakukan analisa secara bulanan untuk memastikan bahwa Perseroan tetap mengikuti POJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang di antaranya mengatur ketentuan sebagai berikut:

1. Modal disetor Perseroan minimum sebesar Rp100.000.000.000;
2. Ekuitas perseroan minimum sebesar 50,00% dari modal disetor; dan
3. Jumlah pinjaman yang dimiliki perseroan dibandingkan modal sendiri dan utang subordinasi dikurangi penyertaan (*gearing ratio*) ditetapkan setinggi-tingginya 10 kali, baik untuk pinjaman luar negeri maupun dalam negeri.

dalam jutaan Rupiah

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan (Penurunan)	
			Rp	%
Pinjaman	18.096.715	14.661.887	3.434.828	23,43
Surat Berharga yang Diterbitkan	5.687.515	4.339.237	1.348.278	31,07
Jumlah Pinjaman	23.784.230	19.001.124	4.783.106	25,17
Ekuitas	4.029.660	3.092.825	936.835	30,29
<i>Gearing Ratio</i> (kali)	5,90	6,14	(0,24)	(3,91)

Perseroan senantiasa menjaga jumlah maksimum *gearing ratio* lebih kecil dari ketentuan yang ditetapkan melalui analisa alternatif pembiayaan baik melalui pinjaman bank, penerbitan obligasi ataupun optimalisasi dana *joint financing*. Perseroan juga menghitung biaya dana dari alternatif pembiayaan yang dipilih untuk memastikan biaya dana tersebut dapat menghasilkan pendapatan maksimum bagi Perseroan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas jasa keuangan No. 35/POJK. 05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang "Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan". Perseroan telah memenuhi jumlah minimal ekuitas dan Batas Maksimum Pemberian pembiayaan. Perseroan telah menghitung beberapa rasio antara lain:

dalam jutaan Rupiah

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan (Penurunan)	
			Rp	%
Rasio Permodalan (%)	16,21	21,77	(5,56)	(25,54)
Rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor (%)	1.611,86	1.237,13	424,73	34,33
Rasio Non-Performing Finance - Neto (%)	0,48	0,46	0,02	4,35
Rasio Non-Performing Finance - Gross (%)	0,70	0,72	(0,02)	(2,78)
Rasio Saldo Piutang Pembiayaan Neto terhadap Total Aset (%)	93,33	92,79	0,54	0,58
Rasio Saldo Piutang Pembiayaan Neto terhadap Total Pendanaan (%)	116,65	115,87	0,78	0,67

dalam jutaan Rupiah

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan (Penurunan)	
			Rp	%
Rasio Saldo Piutang Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Total Saldo Piutang Pembiayaan (%)	19,77	26,56	(6,79)	(25,56)
Gearing Ratio (kali)	5,90	6,14	(0,24)	(3,91)
Jumlah Ekuitas (Rp-juta)	4.029.660	3.092.825	936.835	30,29
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (Rp-juta)	29.727.392	23.728.966	5.998.426	25,28

Rincian Struktur Modal

Komposisi pendanaan antara pinjaman dan permodalan Perseroan dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

dalam jutaan Rupiah

Uraian	2023		2022		Pertumbuhan (Penurunan)	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pinjaman Bank	18.096.715	65,06	14.661.887	66,36	3.434.828	23,43
Surat Berharga yang Diterbitkan	5.687.515	20,45	4.339.237	19,64	1.348.278	31,07
Jumlah Pinjaman	23.784.230	85,51	19.001.124	86,00	4.783.106	25,17
Ekuitas	4.029.660	14,49	3.092.825	14,00	936.835	30,29
Jumlah	27.813.890	100,00	22.093.949	100,00	5.719.941	25,89
Gearing ratio (kali)	5,90	-	6,14	-	(0,24)	(3,91)

Ikatan yang Material Untuk Investasi Barang Modal

Perseroan tidak memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal.

Realisasi Investasi Barang Modal

Tabel Investasi Barang Modal

Jenis Barang Modal	Tujuan	2023 (Rp juta)
Bangunan	Penunjang pertumbuhan usaha Perseroan	2.460
Peralatan Kantor	Penunjang pertumbuhan usaha Perseroan	70.147
Renovasi Bangunan Sewa	Penunjang pertumbuhan usaha Perseroan	14.285
Aset Hak Guna	Penunjang pertumbuhan usaha Perseroan	45.080
Jumlah		131.972

Investasi barang modal tahun 2023 sebesar Rp131,97 miliar, lebih tinggi dari tahun 2022 sebesar Rp79,01 miliar, yang didominasi oleh pertumbuhan investasi pada peralatan kantor selama tahun 2023.

Dampak Nilai Tukar Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul

dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pada tanggal 31 Desember 2023, kurs nilai tukar yang digunakan kurs tengah Bank Indonesia sebesar Rp15.416 (nilai penuh) untuk 1 Dolar Amerika Serikat (Dolar AS), 31 Desember 2022 adalah Rp15.731 (nilai penuh).

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Periode 1 Januari 2024 sampai dengan terbitnya laporan tahunan ini terdapat informasi dan fakta material yang terjadi. Adapun informasi dan fakta material tersebut sebagai berikut:

1. Pada tanggal 4 Januari 2024, MTF melakukan pelunasan obligasi PUB IV Tahap I Seri B Tahun 2019 sebesar Rp200.000.000.000,- dengan tingkat suku bunga sebesar 9,75%.
2. Pada tanggal 11 Januari 2024, MTF menandatangani perpanjangan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dengan PT Bank CTBC Indonesia sebesar Rp200.000.000.000,- untuk jangka waktu ketersediaan sampai dengan 7 Desember 2024.
3. *Signing* Perjanjian Kerjasama JF Reguler antara PT Mandiri Tunas Finance dan *Commercial Banking* Bank Mandiri dalam Rangka Penambahan Plafon Fasilitas Pembiayaan menjadi Rp6 Triliun pada tanggal 29 Januari 2024.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi, serta Proyeksi Satu Tahun ke Depan

Perbandingan Target dan Realisasi

Pada awal tahun buku 2023, Perseroan telah menetapkan sejumlah target yang hendak dicapai yang dituangkan dalam RKAP 2023. Perbandingan pencapaian beberapa target yang ditetapkan dengan realisasi tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

Pencapaian Target Operasional dan Pemasaran

Uraian	Target 2023	Realisasi 2023	Pencapaian (%)
Penyaluran Pembiayaan Baru (Rp-juta)	31.500.000	32.697.903	103,80
Saldo Piutang Pembiayaan (Rp-juta)	25,931.337	28.162.340	108,60
Pendapatan (Rp-juta)	4.417.520	4.752.900	107,59
Laba Tahun Berjalan (Rp-juta)	1.001.357	1.161.101	115,95
Struktur Modal/ <i>Gearing Ratio</i> (kali)	5,64	5,90	104,61
NPF Gross (%)	1,00	0,70	0,70
NPF Netto (%)	0,74	0,48	64,86
<i>Net Interest Margin</i> (kali)	4,26	4,42	103,76
Biaya Pendidikan dan Pelatihan (Rp-juta)	10.682	7.300	68,34

Pencapaian kinerja tahun 2023 telah dilalui dengan baik, hal ini dapat dilihat pada target dan hasil yang dicapai. Penyaluran pembiayaan baru tahun 2023 mencapai Rp32,69 triliun atau senilai 103,80% dari target Rp31,50 triliun. Pencapaian yang cukup baik ini terutama disebabkan pembiayaan investasi dan pembiayaan multiguna mencatat pencapaian di atas target. Pencapaian penyaluran pembiayaan baru ini berimbang pada saldo piutang pembiayaan yang mencatat pencapaian 108,60% terhadap target tahun 2023. Pencapaian pembiayaan yang baik tersebut berdampak terhadap pencapaian kinerja laba. Realisasi pendapatan Perseroan tahun 2023 tercatat mencapai 107,59%, sedangkan realisasi laba bersih tahun berjalan mencapai 115,95% terhadap target.

Proyeksi Satu Tahun ke Depan

Memasuki tahun 2024, Perseroan telah menetapkan sejumlah target yang dituangkan dalam RKAP 2024, antara lain :

Uraian	Realisasi 2023	Proyeksi 2024
Penyaluran Pembiayaan Baru (Rp-juta)	32.697.903	36.000.000
Saldo Piutang Pembiayaan (Rp-juta)	28.162.340	31.909.214
Pendapatan (Rp-juta)	4.752.900	6.329.378
Laba Tahun Berjalan (Rp-juta)	1.161.101	1.332.516
Pembayaran Dividen (Rp-juta)	225.064	116.110
Struktur Modal/ <i>Gearing Ratio</i> (kali)	5,90	5,02
NPF Gross (%)	0,70	0,80
NPF Netto (%)	0,48	0,58
<i>Net Interest Margin</i> (kali)	4,42	4,48
Biaya Pendidikan dan Pelatihan (Rp-juta)	7.300	10.981

Prospek Usaha dan Proyeksi Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2023, Perseroan tetap mempertahankan posisinya sebagai Top 3 Perusahaan Pembiayaan dengan pembiayaan mobil terbesar di Indonesia. Perseroan telah berhasil memasuki level baru dengan total aset kelolaan Rp53,06 triliun dan membukukan profit sebesar Rp1,16 triliun atau tumbuh sebesar 54,77% (YoY).

Di tengah kondisi geopolitik global yang masih belum stabil serta masih adanya ketidakpastian dari faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia memiliki optimisme yang tinggi dan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap kuat pada tahun 2024, yaitu pada kisaran 4,7%-5,5% serta laju inflasi yang akan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% yang didukung dengan konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Pada tahun 2023, Bank Indonesia meningkatkan suku bunga acuan (BI rate) pada level 6,00% untuk penguatan stabilitas nilai tukar rupiah serta memastikan inflasi tetap terkendali. Pada tahun 2024, Bank Indonesia membuka opsi penurunan suku bunga acuan atau BI rate pada Semester II-2024, seiring dengan inflasi yang terkendali pada level 2,5±1% dan nilai tukar rupiah yang stabil. Proyeksi turunnya BI rate akan berpengaruh terhadap turunnya suku bunga pembiayaan di Indonesia dan merupakan suatu peluang bagi Perusahaan Pembiayaan di Indonesia.

Pada tahun 2024, GAIKINDO kembali menargetkan total penjualan mobil di pasar domestik sebanyak 1.100.000 unit, di mana segmen kendaraan kelompok *multipurpose*

vehicle (MPV), khususnya *low MPV* dan *low cost green car* (LCGC) masih mendominasi penjualan di Indonesia. Target Gaikindo pada tahun 2024 membuka peluang bagi Perusahaan Pembiayaan, khususnya yang segmen utamanya adalah kendaraan roda 4 untuk menyalurkan pembiayaan mobil baru serta meningkatkan *market share* pada tahun 2024.

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) memproyeksikan pertumbuhan piutang pembiayaan Industri Multifinance sebesar 12%-13% pada tahun 2024. Ada dua faktor yang menjadi katalis Industri Multifinance masih dapat tumbuh *double digit*, yaitu perekonomian Indonesia yang masih bertumbuh sebesar 5,00% serta daya konsumsi masyarakat yang ikut bertumbuh.

Perseroan memiliki aspirasi untuk menjadi '*Market Leader*' pada tahun 2024, untuk mencapainya, Perseroan perlu memperkuat posisinya melalui optimalisasi penetrasi pasar dari semua segmen dan sumber bisnis yang dimiliki, baik segmen *Retail*, *Wholesales*, maupun *Multiguna*. Sejalan dengan pertumbuhan bisnis, Perseroan akan terus memperkuat pondasi serta kesiapan internal di segala sisi untuk tumbuh lebih besar, sehat dan berkesinambungan. Pada Tahun 2024 Perseroan menargetkan pembiayaan baru di atas Rp36 triliun dengan pertumbuhan *profit* sebesar 33,00% dibandingkan target tahun 2023.

Perseroan mengusung tema '*Energizing the New Foundation: be the Market Leader*' untuk Tahun 2024,

yang berarti bahwa Perseroan akan mengoptimalkan fondasi baru yang telah dibangun di tahun sebelumnya dengan lebih berenergi dan penuh antusiasme, sehingga Perseroan dapat menjadi pemimpin di Industri Pembiayaan.

Kebijakan dan Pembagian Dividen

Kebijakan Dividen

Sebelum berakhirnya tahun keuangan, Perseroan wajib menyetor jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan dan penyisihan tersebut dilakukan sampai cadangan mencapai sekurangnya 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS dan dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba

bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen.

Dasar Kebijakan Pembagian Dividen

- Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat 1:
Laba Bersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
- Akta Perjanjian Pemegang Saham No. 5 Tanggal 6 Februari 2009 Pasal 14 ayat 1:
Pembagian dividen dapat dilakukan jika terdapat saldo laba positif dan sepanjang kondisi keuangan TFS telah memperhitungkan nilai pencadangan sesuai kebijakan pemegang saham dan telah mencapai target profit tahunan, dengan besarnya dividen berkisar antara 35%-40% dari jumlah laba bersih TFS kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Kronologis Pembagian Dividen

Kronologis pembagian dividen Perseroan pada 2 tahun buku terakhir adalah sebagai berikut:

Uraian	Pembayaran Dividen di Tahun 2023 (Dividen Saham Tahun Buku 2022)	Pembayaran Dividen di Tahun 2022 (Dividen Saham Tahun Buku 2021)
Laba Bersih (Rp-juta)	750.213	245.880
Jumlah Dividen (Rp-juta)	225.064	49.175
Dividen per Saham (Rp)	90,03	19,67
Payout Ratio (%)	30	20
Tanggal Pengumuman	28 Juni 2023	17 Juni 2022
Tanggal Pembayaran	6 Juli 2023	24 Juni 2022 dan 12 Juli 2022

Kepatuhan Pembayaran Pajak

Perseroan memiliki kontribusi kepada negara yang diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak dan sebagai pemotong/pemungut pajak. Sebagai wajib pajak, kontribusi terbesar Perseroan adalah memenuhi kewajiban PPh Badan. PPh Badan yang disetorkan untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp319,11 miliar, atau meningkat sebesar Rp171,37 miliar dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp147,74 miliar.

Pemenuhan Kewajiban Pajak

dalam jutaan Rupiah

Kantor	Peraturan Pajak	2023	2022	Pertumbuhan (Penurunan)	
				Rp	%
Pusat	PPh Badan	319.107	147.737	171.370	115,99
	PPN	109.628	78.875	30.753	38,99
Daerah	PPh dengan Entitas Induk	131.021	98.653	32.368	32,81
	PBB	127	163	(36)	(22,09)
Jumlah		559.883	325.428	234.455	72,05

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen

Hingga akhir tahun 2023, Perseroan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (ESOP) dan/atau Manajemen (MSOP). Perseroan juga belum pernah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebagai aksi korporasi yang memungkinkan kepemilikan saham oleh publik maupun manajemen dan/atau karyawan. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait ESOP/MSOP yang dilakukan Perseroan.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal

Tidak terdapat informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan usaha, akuisisi, dan/atau restrukturisasi utang/modal di tahun 2023.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Berikut disampaikan laporan realisasi penggunaan dana penawaran umum obligasi yang dilakukan Perseroan di tahun 2023.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Tahun 2023

Uraian	Realisasi 2023
Jenis Penawaran Umum	Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI MTF Tahap I Tahun 2023
Tanggal Efektif	27 Juni 2023
Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum	
Jumlah Hasil Penawaran Umum	691.735.000.000
Biaya Penawaran Umum	4.186.431.788
Hasil Bersih	687.548.568.212
Rencana Penggunaan Dana	
Modal Kerja	687.548.568.212
Jumlah	687.548.568.212
Realisasi Penggunaan Dana	
Modal Kerja	687.548.568.212
Jumlah	687.548.568.212
Sisa Hasil Penawaran Umum	-

Uraian	Realisasi 2023
Jenis Penawaran Umum	Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI MTF Tahap II Tahun 2023
Tanggal Efektif	27 Juni 2023
Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum	
Jumlah Hasil Penawaran Umum	1.131.110.000.000
Biaya Penawaran Umum	2.847.350.397
Hasil Bersih	1.128.262.649.603

Uraian	Realisasi 2023
Rencana Penggunaan Dana	
Modal Kerja	1.128.262.649.603
Jumlah	1.128.262.649.603
Realisasi Penggunaan Dana	
Modal Kerja	1.128.262.649.603
Jumlah	1.128.262.649.603
Sisa Hasil Penawaran Umum	-

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan perusahaan dimaksud.

Transaksi Afiliasi adalah Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan. Tahun 2023 Perseroan tidak memiliki transaksi benturan kepentingan.

Kebijakan Tentang Pihak Berelasi

Perseroan mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi suatu pihak dianggap berelasi dengan Perseroan jika:

- Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan Perseroan jika orang tersebut:
 - memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perseroan;
 - memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan; atau
 - merupakan personil manajemen kunci Perseroan atau entitas induk dari Perseroan.
- Suatu entitas berelasi dengan Perseroan jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - Entitas dan Perseroan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Perseroan atau entitas yang terkait dengan Perseroan. Jika Perseroan adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perseroan.
 - Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan di catatan atas laporan keuangan.

Kewajaran dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Dalam kegiatan normal usaha, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Transaksi dengan pihak berelasi tersebut dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak tidak berelasi. Perseroan mendapatkan suku bunga yang serupa untuk fasilitas pinjaman bank dengan pihak berelasi dan pihak ketiga. Perseroan juga menggunakan suku bunga yang serupa antara pihak berelasi dan pihak ketiga dalam rangka pemberian piutang pembiayaan konsumen.

Alasan Dilakukannya Transaksi

Seluruh transaksi yang dilakukan Perseroan, termasuk transaksi dengan pihak berelasi, dilakukan dengan tujuan pengembangan usaha.

Nama dan Sifat Hubungan Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah perusahaan dan perorangan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Perseroan beserta sifat dari transaksi tersebut.

Nama Pihak Berelasi	Sifat Hubungan Pihak Berelasi	Jenis/sifat Transaksi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pemegang saham mayoritas	Penempatan dana, kerjasama pembiayaan (pencairan <i>joint financing</i>), kerjasama pembiayaan (angsuran <i>joint financing</i>), pinjaman bank, bunga yang masih harus dibayar, jasa giro, piutang lain-lain, utang lain-lain, beban keuangan.
PT Tunas Ridean	Pemegang saham minoritas	Piutang lain-lain
PT Bumi Daya Plaza	Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri	Aset lain-lain, utang lain-lain, beban keuangan, beban umum dan administrasi
PT Bank Mandiri Taspen	Dikendalikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penempatan dana giro deposito, jasa giro dan bunga deposito, aset lain-lain.
PT AXA Insurance Indonesia (dahulu/ <i>formerly</i> PT Mandiri AXA General Insurance)	Entitas asosiasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Akseptasi klaim
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Dikendalikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pendapatan lain-lain
Dana Pensiun Bank Mandiri	Bank Mandiri sebagai pendiri	Pemegang obligasi
PT Surya Sudeco	Dikendalikan oleh PT Tunas Ridean	Utang lain-lain, beban keuangan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Badan usaha milik negara	Pemegang obligasi, penempatan dana giro, jasa giro
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Badan usaha milik negara	Piutang akseptasi klaim, pendapatan akseptasi klaim
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Badan usaha milik negara	Beban yang masih harus dibayar, pinjaman, beban keuangan
Perum Jaminan Kredit Indonesia	Badan usaha milik negara	Klaim asuransi piutang, Obligasi
PT Balai Pustaka (Persero)	Badan usaha milik negara	Piutang pembiayaan, pendapatan pembiayaan
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Badan usaha milik negara	Penempatan dana, beban yang masih harus dibayar, pinjaman bank, beban keuangan
PT Kimia Farma Apotek	Entitas anak dari badan usaha milik negara	Piutang pembiayaan, pendapatan pembiayaan
PT Kimia Farma Diagnostika	Entitas anak dari badan usaha milik negara	Piutang pembiayaan, pendapatan pembiayaan
PT Kimia Farma Trading & Distribution	Entitas anak dari badan usaha milik negara	Piutang pembiayaan, pendapatan pembiayaan
DPLK Bank Rakyat Indonesia	Bank Rakyat Indonesia sebagai pendiri	Obligasi
Personil manajemen kunci grup	Personil manajemen kunci Group Bank Mandiri	Piutang pembiayaan, pendapatan pembiayaan
Karyawan kunci	Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Imbalan kerja

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Dalam jutaan rupiah

Saldo Pihak Berelasi	2023		2022		Pertumbuhan (Penurunan)	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Aset						
Kas dan Setara Kas-kas pada Bank	782.451	2,63	761.281	3,2	21.170	2,78
Deposito Berjangka	50.000	0,17	50.000	0,2	0	0,00
Piutang Pembiayaan Konsumen	11.542	0,04	7.846	0	3.696	47,11
Piutang Lain-lain	547.483	1,84	499.942	2,1	47.741	9,55
Sewa Dibayar di muka	902	0,00	251	0	651	259,36
Jumlah Aset dari Pihak-pihak Berelasi	1.392.378	4,68	1.319.320	5,56	73.058	5,54
Jumlah Aset	29.727.392		23.728.966		5.998.426	25,28
Liabilitas						
Utang Lain-lain	56.805	0,22	100.736	0,5	(43.931)	(43,61)
Beban yang Masih Harus Dibayar	4.472	0,02	3.535	0	937	26,51
Pinjaman	2.891.252	11,25	1.944.839	9,4	946.413	48,66
Surat Berharga yang Diterbitkan	693.000	2,70	468.500	2,3	224.500	47,92
Jumlah Liabilitas dari Pihak-pihak Berelasi	3.645.529	14,19	2.517.610	12,20	1.127.919	44,80
Jumlah Liabilitas	25.697.732		20.636.141		5.061.591	24,53
Pendapatan						
Pembiayaan Konsumen	807	0,02	767	0	40	5,22
Simpanan Bank	16.191	0,34	14.530	0,4	1.661	11,43
Lain-lain	8	0,00	564	0	(556)	(98,58)
Jumlah Pendapatan dari Pihak-pihak Berelasi	17.006	0,36	15.861	0,4	1.145	7,22
Jumlah Pendapatan	4.752.900		3.931.508		821.392	20,89
Beban						
Beban Gaji dan Tunjangan - Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi	29.006	0,89	22.237	0,8	6.769	30,44
Beban Keuangan	159.003	4,87	101.366	3,42	57.637	56,86
Beban Umum dan Administrasi	7.224	0,22	5.727	0,2	1.497	26,14
Jumlah Beban dari Pihak-pihak Berelasi	195.233	5,99	129.330	4,36	65.903	50,96
Jumlah Beban	3.261.674		2.967.514		294.160	9,91

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Transaksi afiliasi/berelasi di atas merupakan kegiatan usaha yang dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Melalui mekanisme kajian transaksi yang wajar dan pemenuhan ketentuan yang berlaku. Di tahun 2023 tidak terdapat transaksi afiliasi/berelasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang wajib disetujui pemegang saham independen.

Pernyataan Direksi bahwa Transaksi telah Memenuhi Prosedur Memadai dan Sesuai Praktik Bisnis yang Berlaku Umum

Direksi menyatakan bahwa seluruh transaksi afiliasi/berelasi Perseroan telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*).

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk Memastikan Transaksi Dilakukan sesuai Praktik Bisnis yang Berlaku Umum, yang Antara Lain Dilakukan dengan Memenuhi Prinsip Transaksi yang Wajar (*arms-length principle*)

Dewan Komisaris dan Komite Audit telah menelaah dan menyetujui seluruh transaksi afiliasi/berelasi yang dilakukan Perseroan, dan telah memastikan bahwa transaksi afiliasi/berelasi di atas telah melalui prosedur yang memadai, dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, dan telah memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*).

Saldo dan Realisasi Transaksi Pihak Berelasi Tahun 2023

Dalam jutaan rupiah

Saldo Pihak Berelasi	2023		2022		Pertumbuhan (Penurunan)	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Aset						
Kas dan Setara Kas-kas Pada Bank	782.451	2,63	761.281	3,21	21.170	2,78
Deposito Berjangka	50.000	0,17	50.000	0,21	0	0,00
Piutang Pembiayaan Konsumen	11.542	0,04	7.846	0,03	3.696	47,11
Piutang Lain-lain	547.683	1,84	499.942	2,11	47.741	9,55
Aset Lain-lain	902	0,00	251	0	651	259,36
Jumlah Aset dari Pihak-pihak Berelasi	1.392.378	4,68	1.319.320	5,56	73.058	5,54
Jumlah Aset	29.727.392		23.728.966		5.998.426	25,28
Liabilitas						
Utang Lain-lain	56.805	0,22	100.736	0,49	(43.931)	(43,61)
Beban yang Masih Harus Dibayar	4.472	0,02	3.535	0,02	937	26,51
Pinjaman	2.891.252	11,25	1.944.839	9,42	946.413	48,66
Surat Berharga yang Diterbitkan	693.000	2,70	468.500	2,27	224.500	47,92
Jumlah Liabilitas dari Pihak-pihak Berelasi	3.645.529	14,19	2.517.610	12,20	1.127.919	44,80
Jumlah Liabilitas	25.697.732		20.636.141		5.061.591	24,53
Pendapatan						
Pembiayaan Konsumen	807	0,02	767	0,02	40	5,22
Simpanan Bank	16.191	0,34	14.530	0,4	1.661	11,43
Lain-lain	8	0,00	564	0	(556)	(98,58)
Jumlah Pendapatan dari Pihak-pihak Berelasi	17.006	0,36	15.861	0,4	1.145	7,22
Jumlah Pendapatan	4.752.900		3.931.508		821.392	20,89
Beban						
Beban Gaji dan Tunjangan - Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi	29.006	0,89	22.237	0,8	6.769	30,44
Beban Keuangan	159.003	4,87	101.366	3,42	57.637	56,86
Beban Umum dan Administrasi	7.224	0,22	5.727	0,2	1.497	26,14
Jumlah Beban dari Pihak-pihak Berelasi	195.233	5,99	129.330	4,36	65.903	50,96
Jumlah Beban	3.261.674		2.967.514		294.160	9,91

Rujukan Informasi Transaksi dengan Pihak Berelasi pada Laporan Keuangan

Transaksi dengan pihak berelasi tersedia pada laporan keuangan audited tahun 2023 yang menjadi bagian dalam Laporan tahunan ini.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Tahun 2023 tidak ada kejadian atau transaksi yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi.

Transaksi Spot dan Derivatif

Tahun 2023 tidak ada transaksi spot dan terdapat transaksi derivatif.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan terhadap Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir

No	Peraturan	Penjelasan	Pengaruh Terhadap Perusahaan
1	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	Peraturan yang mengatur ketentuan terhadap Perlindungan Data Pribadi (PDP)	Sebagai Pengendali Data Pribadi, Perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan penerapan terhadap Undang-undang PDP.
2	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023	Pengaturan yang mengatur pengembangan dan penguatan sektor keuangan	Perusahaan akan memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan juga akan memperhatikan ketentuan yang terdapat didalam Undang-undang ini.
3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023	Peraturan yang mengatur Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan	Perseroan wajib untuk dapat melakukan menerapkan Program Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dengan menyesuaikan terhadap ketentuan internal Perseroan.
4	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023	Peraturan yang mengatur Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat	Perseroan wajib untuk dapat melakukan menerapkan terkait dengan pelaksanaan Literasi dan Inklusi Keuangan sesuai dengan POJK tersebut.
5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023	Peraturan yang mengatur Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan	Perseroan wajib untuk dapat melakukan penerapan terhadap pelindungan konsumen dengan menyesuaikan terhadap ketentuan internal.
6	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023	Peraturan yang mengatur Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan	Perseroan wajib untuk melakukan penerapan terkait dengan penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan POJK yang berlaku.
7	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.03/2023	Peraturan yang mengatur tata cara penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan	Perseroan wajib untuk melakukan penerapan terkait dengan penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan POJK yang berlaku.
8	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.06/2023	Pengaturan yang mengatur permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik bagi perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah	Perusahaan wajib menerapkan ketentuan berdasarkan SEOJK tersebut seperti melakukan permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur.

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir

Pada tahun 2023, Perseroan telah menerapkan standar akuntansi yang dianggap relevan namun tidak mempengaruhi pendapatan dan profitabilitas secara signifikan sebagai berikut:

1. Amandemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
2. Amandemen PSAK 16: Aset Tetap – Hasil sebelum penggunaan yang di intensikan
3. Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi
4. Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal

Informasi Kelangsungan Usaha

Sepanjang tahun 2023, terdapat beberapa hal yang berpotensi signifikan terhadap kelangsungan usaha Industri Multifinance di Indonesia, antara lain kenaikan BI rate dan penurunan pertumbuhan penjualan mobil baru. Pada Q4 2023, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan (BI rate) sebesar 25 bps dari 5,75% menjadi 6% sebagai langkah Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi. Namun, kenaikan BI rate memiliki dampak signifikan terhadap kenaikan suku bunga pasar yang mengarah pada peningkatan biaya pinjaman bagi Industri Pembiayaan, hal tersebut berdampak pada penyesuaian suku bunga yang dibebankan kepada customer. Di sisi lain, pencapaian penjualan mobil baru pada tahun 2023 mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 1,53%, dimana total penjualannya sebesar 998 ribu unit atau lebih rendah dibandingkan pencapaian tahun 2022 yang sebesar 1.014 ribu unit.

Meskipun kedua faktor tersebut mempengaruhi Industri Pembiayaan secara umum, namun kelangsungan usaha Perseroan tetap dalam kondisi yang baik. Hal ini tercermin dari total penyaluran pembiayaan baru yang bertumbuh 17,75% serta penyaluran pembiayaan baru untuk mobil yang bertumbuh 22,63%. Dari sisi market otomotif, jumlah unit mobil baru yang dibiayai Perseroan juga bertumbuh sebesar 7,13% dibandingkan tahun 2022.

Prospek Usaha

Pada akhir tahun 2023, bisnis Multifinance mengalami pertumbuhan *double digit*. Berdasarkan data APPI per Desember 2023, Industri Pembiayaan mencatatkan total pembiayaan baru sebesar Rp530,82 triliun atau bertumbuh sebesar 16,45% (YoY) dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp455,83 triliun. Pertumbuhan ini didukung oleh pertumbuhan pembiayaan mobil sebesar 12,23%, pembiayaan mesin/alat berat sebesar 10,83%

serta pembiayaan jenis aset lainnya (motor, elektronik dan portofolio lainnya) sebesar 24,15%.

International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap konstan, yaitu sebesar 5% hingga tahun 2027 yang diikuti dengan penurunan inflasi hingga 2,3% pada tahun 2027. Proyeksi ini sejalan dengan proyeksi dari Bank Indonesia, dimana pertumbuhan ekonomi dapat mencapai kisaran 4,7-5,5% pada tahun 2024 dan akan meningkat menjadi 4,8-5,6% pada tahun 2025. Inflasi akan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% pada tahun 2024 dan tahun 2025.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan laju pertumbuhan Industri Pembiayaan dapat mencapai minimal rata-rata 8% di periode 2024-2027 dengan catatan bahwa real GDP *growth* Indonesia sebesar 5,5% dan laju inflasi 1,5-3,5%, pengaruh COVID-19 tidak ada, serta pembiayaan otomotif dan alat berat bertumbuh pada kisaran 5% per tahun dan laju pertumbuhan jenis usaha lainnya akan mencapai rata-rata 17% per tahun di 5 tahun mendatang.

Dalam memanfaatkan peluang dan prospek usaha dalam 5 tahun mendatang, Perseroan telah menyusun rencana strategi jangka panjang periode 2023-2027 dengan mengusung tema '*Strengthening Leading Position through Synergy & Sustainable Business Growth*'. Selain tetap berfokus pada penyaluran pembiayaan baru untuk mobil, alat berat dan multiguna, Perseroan juga mendukung inisiatif OJK terkait *Green Financing* dengan cara menyalurkan pembiayaan baru untuk mobil listrik, UMKM, dan pembiayaan lain berbasis *Green Financing*.

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Hasil penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) MTF pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Faktor Penilaian	Peringkat
1	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	1
2	Profit Risiko	1
3	Rentabilitas	2
4	Permodalan	1
Peringkat Tingkat Kesehatan Perusahaan		PK-1
Tingkat Kesehatan Perusahaan		Sangat Sehat

Kriteria Tingkat Kesehatan (TKS) Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.05/2020.

Peringkat Komposit	Penjelasan
PK-1	"Sangat Sehat"
PK-2	"Sehat"
PK-3	"Cukup Sehat"
PK-4	"Kurang Sehat"
PK-5	"Tidak Sehat"

Halaman ini sengaja dikosongkan

05

Tata Kelola Perusahaan





Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

PT Mandiri Tunas Finance (“MTF”, “Perseroan”) menyadari pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) pada setiap kegiatan usaha, sebagai dasar dalam mencapai visi dan misi perusahaan secara berkelanjutan. Dengan demikian, Perseroan senantiasa meningkatkan kualitas penerapan struktur dan proses GCG pada setiap tingkatan organisasi guna menjaga kelangsungan usaha serta memastikan *outcome* GCG yang lebih baik dalam memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaannya, penerapan prinsip GCG, antara lain dilakukan melalui Budaya Perusahaan yang melekat bagi seluruh organ Perseroan dalam menjalankan aktivitas. Perseroan juga mewujudkannya melalui layanan yang berintegritas dan profesional. Selain itu, Perseroan juga senantiasa mengkinikan standar penerapannya sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kegiatan usaha MTF.

Dalam kerangka penerapan GCG tersebut, Perseroan telah memetakan pemangku kepentingan yang relevan dengan MTF sebagaimana disampaikan melalui skema di bawah ini:

Hubungan Mandiri Tunas Finance Dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan



Dasar dan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Perseroan menekankan praktik terbaik (*best practices*) penerapan GCG yang berlaku di industri beserta perkembangannya yang terkini, dengan senantiasa menetapkan standar kualitas Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkup perusahaan, antara lain: pedoman umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) serta *road map* tata kelola perusahaan Indonesia yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik juga diterapkan berdasarkan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (“POJK Tata Kelola”) serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (“SEOJK Tata Kelola”).

Salah satu bentuk komitmen Perusahaan dalam penerapan prinsip GCG antara lain dengan senantiasa menyegarkan pemahaman para karyawan terhadap penerapan prinsip GCG dalam kegiatan usaha sehari-hari dengan melakukan sosialisasi secara berkala.

Tujuan Penerapan GCG

Tujuan penerapan prinsip GCG di lingkup Perseroan mengacu kepada POJK Tata Kelola, yaitu:

1. Mengoptimalkan nilai Perseroan bagi Pemangku Kepentingan, khususnya Debitur, Kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya;
2. Meningkatkan pengelolaan Perseroan secara profesional, efektif, dan efisien;
3. Meningkatkan kepatuhan Organ Perseroan serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Perseroan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
4. Mewujudkan Perseroan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, kompetitif, dan memenuhi prinsip perlindungan konsumen; dan
5. Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional.

Prinsip-prinsip GCG

Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, Perseroan bertekad kuat untuk menerapkan lima prinsip dasar GCG yang diatur dalam POJK Tata Kelola, yakni:

1. Transparansi (*transparency*)
2. Akuntabilitas (*accountability*)
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)
4. Independensi (*independency*)
5. Kewajaran (*fairness*)

Penjelasan prinsip-prinsip dasar di atas dan penerapannya secara umum di lingkup Perusahaan adalah sebagai berikut:

Prinsip Dasar	Penjelasan Sesuai POJK No. 29/POJK.05/2020	Penerapan di Lingkup Perseroan
Keterbukaan (<i>Transparency</i>)	Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.	Perseroan menilai prinsip transparansi sebagai keterbukaan dalam mengungkap informasi material yang relevan secara akurat dan tepat waktu. Perusahaan mengungkapkan informasi material tersebut tidak hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan. Sehingga diharapkan pemegang saham dan pemangku kepentingan dapat lebih dini mengetahui perkembangan usaha Perseroan. Penerapan prinsip ini diwujudkan Perusahaan dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan penerbitan Laporan Tahunan yang tersedia di halaman website Perusahaan. • Penyusunan dan penjelasan rencana bisnis Perseroan • Laporan keuangan berkala yang meliputi laporan keuangan triwulan dan tahunan. • Tersedianya laporan keterbukaan informasi terkait kegiatan usaha Perseroan. • Segala informasi dan data terkait perusahaan yang telah di sediakan pada situs web Perseroan untuk pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.
Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)	Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.	Penerapan prinsip akuntabilitas diimplementasikan oleh Perusahaan dengan menetapkan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban masing-masing organ dalam Perseroan sehingga terdapat kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab antara Karyawan, Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham maupun di setiap bagian dalam Perseroan.

Prinsip Dasar	Penjelasan Sesuai POJK No. 29/POJK.05/2020	Penerapan di Lingkup Perseroan
Pertanggungjawaban (<i>Responsibility</i>)	Kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.	Perseroan mendefinisikan prinsip pertanggungjawaban sebagai dipatuhinya baik prosedur operasional maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap aktivitas bisnis yang dilaksanakan. Pertanggungjawaban juga diikuti dengan komitmen untuk menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan standar etika yang baik. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris lebih ditingkatkan terhadap pengelolaan Perseroan oleh Direksi sehingga dapat berjalan efektif, disertai adanya tuntutan pencapaian target terhadap Direksi. Prinsip ini diterapkan Perseroan melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan terhadap ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu. • Pelaksanaan program dan kegiatan CSR. • Pelaksanaan kewajiban keterbukaan informasi sesuai peraturan.
Kemandirian (<i>Independency</i>)	Kedaaan perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.	Perseroan mengartikan independensi sebagai dijalankannya tugas, kewajiban serta wewenang masing-masing organ Perusahaan tanpa campur tangan dari organ-organ Perusahaan yang lain maupun pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Independensi diwujudkan antara lain dengan saling menghargai peran dan fungsi masing-masing Organ Perseroan serta keputusan pengurusan Perseroan melalui keputusan Direksi Perusahaan. Prinsip independensi sangat diperlukan terutama dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan manajemen yang harus dilakukan secara objektif dan menempatkan kepentingan Perseroan sebagai prioritas utama. Penerapan prinsip ini diterapkan Perseroan antara lain dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab di antara organ-organ Perusahaan. • Pemegang saham dan Dewan Komisaris tidak melakukan intervensi terhadap pengurusan Perusahaan. • Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan senantiasa menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan. • Kegiatan Perusahaan yang memiliki benturan kepentingan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen atau wakilnya yang diberi wewenang dalam RUPS sebagaimana diatur, serta mematuhi peraturan tentang benturan kepentingan.
Kesetaraan dan Kewajaran (<i>Fairness</i>)	Kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.	Perusahaan mengartikan kewajaran atau keadilan sebagai perlakuan yang setara terhadap setiap pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penerapannya, antara lain Perusahaan selalu menjaga hubungan baik dengan karyawan dan menghindari praktek diskriminasi serta menghormati hak-hak karyawan, termasuk menghindari diskriminasi karyawan terkait latar belakang suku, agama, ras, maupun gender. Prinsip ini diterapkan Perusahaan antara lain dengan kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> • Pemegang saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Perusahaan melaporkan informasi terkait rekanan kepada pemangku kepentingan secara adil dan transparan. • Perusahaan menghadirkan kondisi kerja yang baik dan aman bagi seluruh karyawan sesuai dengan kemampuan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta adanya penilaian kinerja secara periodik serta kesempatan promosi yang sama bagi seluruh karyawan.

Struktur dan Proses/Mekanisme Tata Kelola



Struktur dan Mekanisme Corporate Governance

GCG merupakan sistem sekaligus struktur dalam rangka memberi keyakinan kepada seluruh *stakeholders* bahwa perusahaan dikelola dan dikendalikan untuk melindungi kepentingan *stakeholders* sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsipnya.

Struktur Tata Kelola

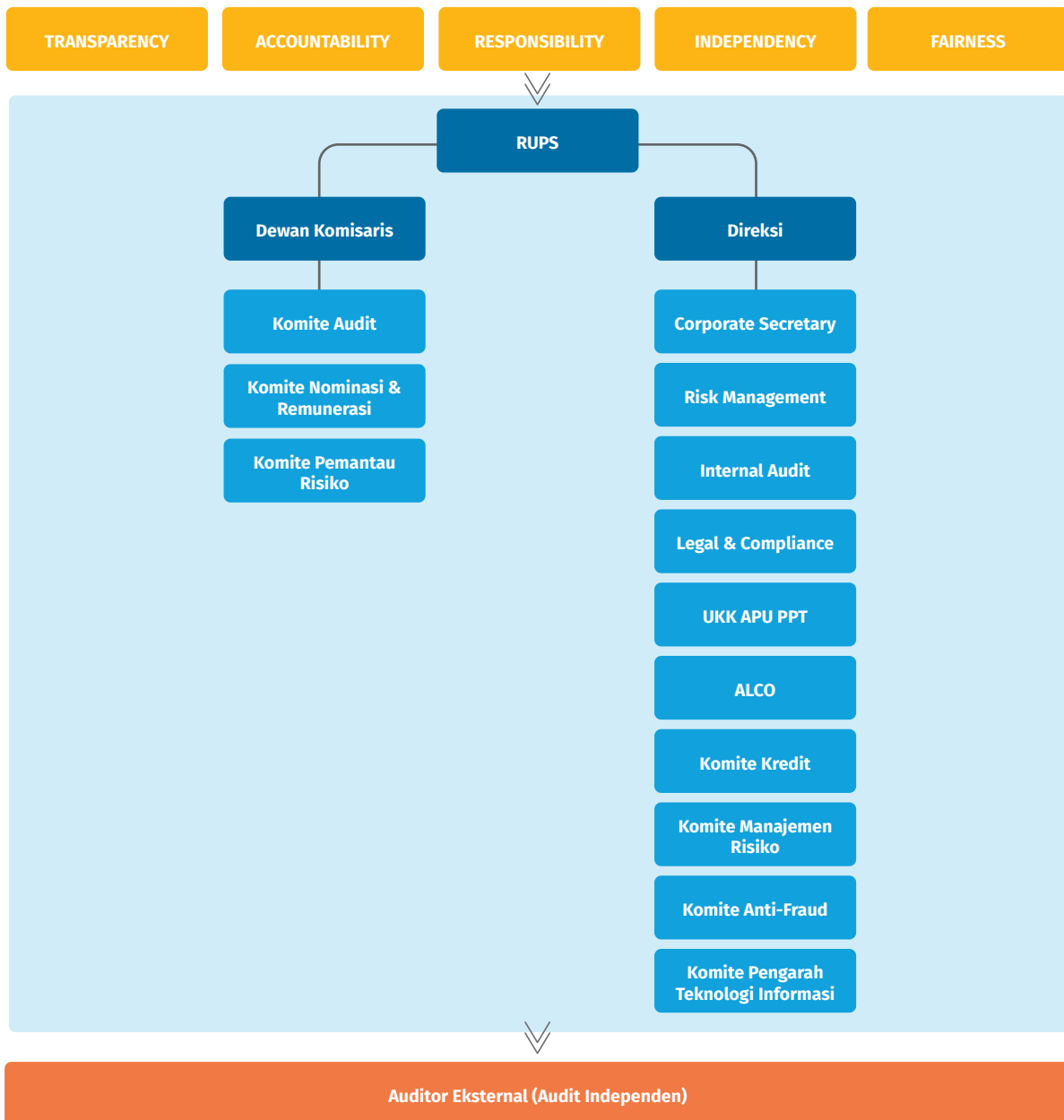
Struktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007, tergambar pada Organ Utama Perseroan, yaitu:

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar.
- Dewan Komisaris
Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.

- **Direksi**
Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Selain organ utama Perusahaan, MTF juga memiliki organ-organ pendukung yang membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengawasi dan menjalankan kegiatan operasional Perusahaan untuk mencapai visi dan misi. Adapun secara struktur organ tersebut tergabung dalam struktur tata kelola Perusahaan yang Baik di Mandiri Tunas Finance sebagai berikut:

Struktur Tata Kelola Perusahaan Mandiri Tunas Finance



Keberhasilan dalam menerapkan GCG di dalam Perusahaan sangat bergantung kepada hubungan antar organ Perusahaan di mana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tegas telah memisahkan tugas dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Ketiga organ Perusahaan tersebut

selalu berhubungan atas dasar prinsip-prinsip kebersamaan dan rasa saling menghargai, menghormati fungsi dan peranan masing-masing dibantu oleh organ-organ pendukung dan bertindak demi kepentingan Perusahaan. Setiap keputusan dan tindakan yang dijalankan dilandasi oleh itikad baik, nilai moral dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dimiliki oleh Perusahaan dengan kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Mekanisme GCG terdiri dari berbagai peraturan dan kebijakan yang mengatur lingkup tanggung jawab organ GCG, dan hubungan kerja antar organ GCG; termasuk dengan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Perusahaan telah memiliki mekanisme GCG meliputi Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* yang telah disahkan. Perusahaan terus melakukan penyempurnaan kebijakan GCG (*soft-structure* GCG) yang dimiliki agar sejalan dengan kebutuhan proses bisnis maupun ketentuan pelaksanaan GCG bagi Perusahaan. Selain pedoman GCG, Perusahaan telah menyusun *Code of Conduct*, *Board Manual*, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), Piagam Komite Audit, Piagam Audit Internal dan berbagai kebijakan dan prosedur dalam mendukung terlaksananya tata kelola yang baik. Seluruh kebijakan dan prosedur tersebut bertujuan untuk mendorong Perusahaan mampu melakukan *check and balance* pada setiap aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip GCG yang berlaku.

Kebijakan dan Prosedur	Penetapan
Anggaran Dasar	Akta No. 38 tanggal 23 Desember 2022 yang dibuat Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Ditetapkan melalui Surat Keputusan No. 03, efektif berlaku sejak 1 April 2016 dan telah disetujui oleh Direksi.
<i>Board Manual</i> (Buku Panduan Dewan Komisaris dan Direksi)	Ditetapkan tanggal 27 Agustus 2015 yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
Kode Etik (<i>Code of Conduct/ CoC</i>)	Ditetapkan tanggal 11 Maret 2013.
Piagam Komite Audit	Telah dilakukan pembaharuan dan disahkan pada tanggal 30 Juli 2020 yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Komite Audit.
Piagam Komite Nominasi & Remunerasi	Ditetapkan tanggal 4 Agustus 2015 yang telah ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris.
Piagam Komite Pemantau Risiko	Ditetapkan tanggal 24 November 2016 yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko dan Dewan Komisaris.
Piagam Audit Internal	Telah dilakukan pembaharuan dan disahkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris tanggal 30 November 2020.
Piagam Sekretaris Perusahaan	Ditetapkan melalui SOP No.03/PGN/06/2016 yang telah diterbitkan tanggal 23 Desember 2016 dan telah melalui perbaikan/revisi pada tanggal 14 Desember 2018, yang telah disetujui oleh Direksi.
Pedoman Sistem Pengendalian Internal	Ditetapkan melalui SOP No. 03/PGN/01/2016, efektif berlaku tanggal 28 Desember 2016 yang telah disetujui oleh Direksi.
Pedoman Manajemen Risiko	Ditetapkan melalui SOP No. 03/PGN/07/2016 yang telah diterbitkan tanggal 27 Desember 2016 dan telah melalui perbaikan/revisi pada 11 November 2019 yang telah disetujui oleh Direksi.
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa	Ditetapkan melalui SOP No. 02/PGA/01/2017 efektif berlaku sejak 1 Juni 2017 dan telah disetujui oleh Direksi dan telah melalui perbaikan/revisi pada 11 November 2019 yang telah disetujui oleh Direksi.
Pedoman Pengendalian Gratifikasi	Ditetapkan melalui SOP No. 03/PGN/10/2018 efektif berlaku sejak 17 September 2018 dan telah melalui perbaikan/revisi pada 15 November 2019 dan 1 September 2020 yang telah disetujui oleh Direksi.

Sosialisasi dan Internalisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Sebagai bentuk komitmen Perusahaan untuk selalu menerapkan kegiatan usaha dan pelaksanaan operasional Perusahaan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka Perusahaan selalu memberikan bekal kepada setiap pegawai baru dan pegawai yang ada untuk dilakukan sosialisasi penerapan GCG. Selama tahun 2023, Perusahaan telah melakukan sosialisasi penerapan GCG sebanyak 5 (lima) kali, dengan detail sebagai berikut:

No	Tanggal	Materi Pelatihan	Divisi/Regional/Program HC	Cabang/Nama Program HC
1	6 Maret 2023	Good Corporate Governance	Pengembangan Karyawan	Managemenet Trainee (MT) Batch 15
2	10-14 April 2023	Good Corporate Governance	Pengembangan Karyawan	Supervisor Development Program (SDP) Batch 17
3	3-9 Agustus 2023	Good Corporate Governance	Pengembangan Karyawan	Supervisor Development Program (SDP) Batch 18
4	3-9 Agustus 2023	Good Corporate Governance	Pengembangan Karyawan	Supervisor Development Program (SDP) Batch 19
5	11 Agustus 2023	Good Corporate Governance	Pengembangan Karyawan	Managemenet Trainee (MT) Batch 16

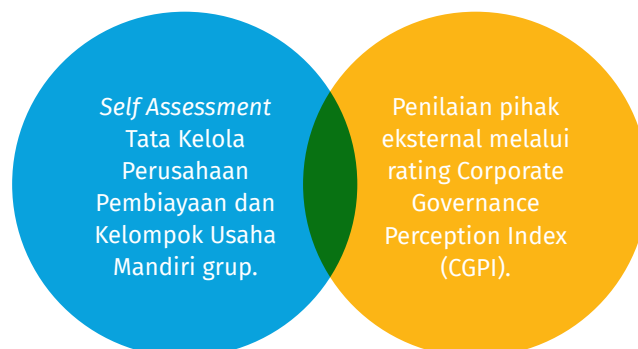
Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Apresiasi di Tahun 2023

Pada tahun 2023, Perseroaan mendapatkan penghargaan sebagai Trusted Companies 2023 pada gelaran Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award tahun 2023. CGPI adalah program riset dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan melalui survei terhadap praktik GCG yang menghasilkan skor Corporate Governance Perception Index (CGPI). CGPI Awards diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bekerjasama dengan Majalah SWA dan kepesertaannya meliputi perusahaan dari Emiten, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perbankan, Perbankan Syariah dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).

Penilaian: Evaluasi, Pemantauan, dan Peningkatan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Secara berkala Perusahaan melaksanakan penilaian penerapan GCG (Penilaian GCG) untuk mengukur tingkat kepatuhan penerapan GCG di Perusahaan dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Evaluasi penerapan prinsip GCG bertujuan untuk mengukur efektivitas dari implementasi GCG yang telah dilaksanakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan terhadap seluruh kebijakan penerapan GCG di lingkup Perusahaan. Penilaian dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu *Self Assessment* Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan dan Kelompok Usaha Mandiri grup, serta penilaian pihak eksternal melalui *rating* Corporate Governance Perception Index (CGPI).

Metode Penilaian Penerapan GCG di Lingkup MTF terdiri dari 2 yaitu:



Self Assessment Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan dan Kelompok Usaha Mandiri Grup

Penilaian penerapan GCG yang utama dilakukan oleh Perusahaan adalah penilaian berkala dengan menggunakan pendekatan *Self Assessment* yang mengacu kepada 2 (dua) sifat entitas Perusahaan, yaitu sebagai perusahaan pembiayaan yang memiliki kepatuhan terhadap ketentuan OJK, serta sebagai bagian dari Mandiri grup yang terikat dengan Konglomerasi Keuangan.

Dasar dan Metode Penilaian

Penilaian GCG melalui *Self Assessment* ini mengacu kepada 2 (dua) ketentuan, yaitu:

1. POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/ POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan SEOJK No. 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

Dengan rincian pembahasan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;
- c. Penanganan Benturan Kepentingan;
- d. Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
- e. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal;
- f. Penerapan kebijakan remunerasi;
- g. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan;
- h. Rencana bisnis sebagai rencana kerja dan anggaran tahunan serta rencana jangka Panjang;
- i. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 50% atau lebih;
- j. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga Direksi;
- k. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga Dewan Komisaris;
- l. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada OJK

2. POJK No. 18/POJK.03/2014 serta SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Dengan rincian pembahasan sebagai berikut:

- a. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
- b. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah;
- c. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris;
- d. Struktur Dewan Pengawas Syariah;
- e. Independensi tindakan Dewan Komisaris;
- f. Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi;
- g. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;
- h. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah;
- i. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern;
- j. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko;
- k. Kebijakan remunerasi; dan
- l. Pengelolaan benturan kepentingan.

Penilaian atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan oleh internal Perusahaan, yang tentunya untuk melakukan penilaian tersebut, dilakukan secara independensi agar hasil dari penilaian tersebut mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Penilaian Penerapan GCG Tahun Buku 2022 dan 2023

Kriteria	2023	2022
Jenis Penilaian	<i>Self Assessment</i>	<i>Self Assessment</i>
Assessor/Penilai	Internal Perusahaan	Internal Perusahaan
Periode Penerapan	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022
Tahun Ukur	Tahun Buku 2023	Tahun Buku 2022

Rincian Hasil Self Assessment Penerapan GCG Perseroan Untuk Tahun Buku 2022 dan 2023

No.	Aspek	2023		2022	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Direksi	1,33	1,33	1,44	1,22
2	Dewan Komisaris	1,70	1,40	1,50	1,30
3	Dewan Pengawas Syariah	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Komite Tata KeLoLa Terintegrasi	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Satuan Kerja Kepatuhan (T)	1,50	1,50	1,75	1,50
6	Satuan Kerja Audit Internal (T)	1,00	1,00	1,33	1,33
7	Penerapan Manajemen Risiko (T)	1,40	1,40	1,40	1,40
8	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi (T)	1,33	1,33	1,33	1,33
9	Benturan Kepentingan	1,00	1,00	1,00	1,00
10	Kebijakan Remunerasi	1,00	1,00	1,00	1,00
Nilai Akhir		1,25	1,22	1,31	1,23

Hasil Penilaian Self Assessment Tata Kelola Terintegrasi Tahun Buku 2022 dan 2023

Tahun	Peringkat/ Skor	Definisi Peringkat
2023	1	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
2022	1	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Tindak Lanjut Hasil Penilaian Penerapan GCG Tahun Buku 2022

Komitmen Perseroan dalam menyempurnakan implementasi GCG di antaranya dilakukan dengan menindaklanjuti rekomendasi dalam penilaian GCG. Berikut beberapa tindak lanjut dari hasil penilaian penerapan GCG tahun 2022:

1. Penyempurnaan dan pembaharuan SOP Procurement, SOP Pembiayaan Fleet, SOP HC – Training, SOP HC - Pejabat Pengganti, Kebijakan Pengendalian, SOP Compliance, SOP APU PPT & PPPSPM, SOP Asuransi Kendaraan, SOP Pembiayaan Retail, SOP Finance, SOP Kas & Bank, SP Treasury, SOP Pengaturan Kebijakan, Prosedur & Korespondensi, SOP Information & Technology dan SOP Coporate Communication.
2. Untuk mendukung proses bisnis serta meningkatkan integritas perusahaan, pada tahun 2023 telah dilakukan perencanaan untuk implementasi anti penyuapan melalui sertifikasi SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
3. Perusahaan juga melakukan pemenuhan sistem SMART Anti Money Laundry (AML) untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisa transaksi serta profil debitur sebagai pemenuhan pelaporan kepada regulator serta sebagai bentuk implementasi atas POJK No. 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

Penilaian Pihak Eksternal oleh Corporate Governance Perception Index (CGPI)

Perusahaan secara berkala mengikuti survei Corporate Governance Perception Index (CGPI) setiap tahun yang diadakan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) yang menghasilkan rating dan berbagai rekomendasi bagi penerapan GCG di lingkup Perusahaan.

Dasar dan Metode Penilaian

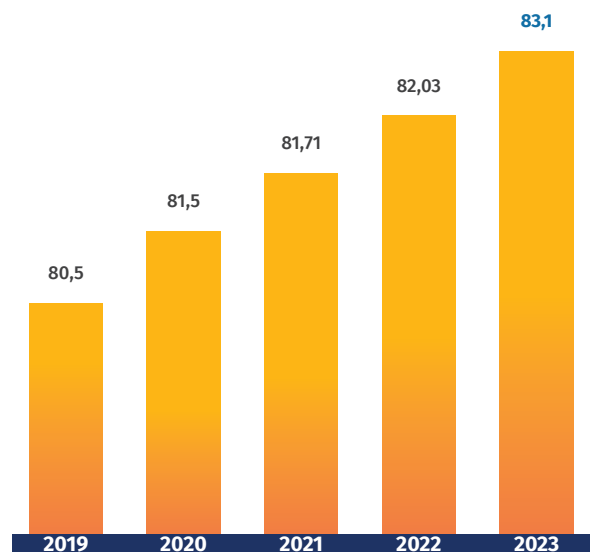
CGPI mengembangkan metode penilaian dan aspek penilaian yang terdiri dari 2 (dua) tahapan, yaitu tahapan analisis dan observasi. Tahapan analisis dilakukan melalui metode pengisian kuesioner (*self assessment*) dan penilaian dokumen perusahaan peserta, dilanjutkan dengan tahapan observasi melalui paparan eksekutif dan diskusi dengan organ perusahaan peserta. Aspek penilaian CGPI mencakup struktur governansi (*governance structure*), proses governansi (*governance process*), dan hasil governansi (*governance outcome*).

Penilaian CGPI menggunakan acuan penerapan GCG yang bersifat wajib (*mandatory*) dan praktik terbaik yang berlaku umum (*best practices*) serta pendekatan dengan perspektif stakeholder di mana hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) semakin penting dalam menjaga kesinambungan bisnis perusahaan dalam jangka panjang.

Skor Penilaian

Setiap tahunnya, skor penilaian Perusahaan terus mengalami peningkatan, sebagai hasil dari pembenahan secara berkesinambungan yang dilakukan Perusahaan terhadap penerapan GCG. Adapun perkembangan skor penilaian CGPI Perusahaan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Skor Penilaian CGPI 5 Tahun



Hasil Penilaian Penerapan GCG Berdasarkan Aspek dan Indikator Tahun 2022 dan 2023

No.	Aspek & Indikator Penilaian	2023		2022	
		Bobot	Nilai Akhir	Bobot	Nilai Akhir
1	Aspek Struktur Governansi	33,10	27,70	23,33	22,98
2	Aspek Proses Governansi	32,81	27,28	31,79	31,41
3	Aspek Hasil Governansi	34,09	28,12	28,12	27,64
4	Total Skor CGPI & Rating	100,00	83,10	100,00	82,03 (Tepercaya)

Tindak Lanjut Penerapan GCG Tahun 2022

Skor penilaian CGPI Perseroan pada tahun 2022 sebesar 82,03 dengan pengelompokan Perusahaan ke dalam kelompok perusahaan “Tepercaya”. Hasil CGPI tersebut menunjukkan prestasi sehingga dapat menggambarkan bahwa Organ Perusahaan dan segenap anggota Perusahaan telah berkomitmen dan melakukan upaya yang sungguh-sungguh dan konsisten dalam mengimplementasikan GCG dan mengelola transformasi model bisnis perusahaan berdasarkan prinsip GCG sehingga bergerak berubah menuju kondisi yang menciptakan nilai bagi *stakeholders*.

Berdasarkan hasil *assessment* GCG tersebut, Perseroan memperoleh sejumlah rekomendasi yang menjadi Area of Improvement (AoI) dalam proses peningkatan kualitas penerapan GCG di lingkungan Perusahaan antara lain:

1. Rekomendasi Konseptual
 - a. Perusahaan diharapkan secara terus menerus mampu mengembangkan program pembangunan ketangkasn secara konsisten dan berkelanjutan.
 - b. Perusahaan diharapkan mampu mengembangkan konsep ketangkasn berdasarkan prinsip GCG melalui perencanaan bisnis perusahaan, melalui penetapan sasaran strategis yang komprehensif dan terintegrasi dengan kebijakan, program, dan kegiatan strategisnya.
2. Rekomendasi Teknikal
 - a. Perusahaan diharapkan mampu merancang inisiatif pembangunan ketangkasn bisnis yang berkelanjutan.
 - b. Perusahaan diharapkan mampu melaksanakan secara disiplin program membangun ketangkasn yang telah menjadi inisiatif dan melakukan evaluasi secara berkala.
 - c. Perusahaan diharapkan mampu menyesuaikan penerapan konsep tata kelola perusahaan yang telah berkembang dalam kesepakatan sistem dunia, yaitu berbasis standar sistem mutu (seperti ISO).

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Struktur organ Tata Kelola Perusahaan yang Baik terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Perusahaan menganut sistem (dua) badan atau *two tier system*, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam peraturan dan perundang-undangan serta anggaran dasar. Perusahaan juga mengikutsertakan beberapa aspek penting yang berperan untuk mendukung penguatan kontrol dan pengelolaan terhadap Perseroan, terdiri dari organ pendukung yang meliputi Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, Manajemen Risiko, dan beberapa komite serta satuan kerja lainnya yang berada di bawah Direksi hingga Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Pemantau Risiko yang berada di bawah Dewan Komisaris. Selain itu, terdapat proses audit independen atas laporan keuangan dan laporan lainnya yang dilakukan oleh akuntan eksternal dalam memperkuat kontrol khususnya terkait laporan kinerja Perseroan. Struktur tersebut telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") adalah organ Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis RUPS

Berdasarkan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perusahaan, RUPS terdiri dari:

1. RUPS Tahunan, yaitu RUPS yang bersifat rutin diselenggarakan tiap tahun, yang terdiri dari RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan, serta RUPS Tahunan tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB), yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang terdapat hal-hal tertentu yang memerlukan pembahasan dan pengambilan keputusan yang sifatnya mendesak dan signifikan.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 91 UUPT, Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan di luar RUPS ("Keputusan RUPS Sirkuler") yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan RUPS secara fisik. Keputusan RUPS Sirkuler berkekuatan hukum setara keputusan RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan tersebut.

Wewenang RUPS

Wewenang RUPS di antaranya adalah mengangkat dan memberhentikan Direktur dan Komisaris, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direktur, meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi atas pengelolaan Perusahaan, merubah permodalan, mengubah Anggaran Dasar, merencanakan penggunaan laba, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perusahaan, serta pembentukan anak perusahaan.

Pemegang Saham MTF

Pemegang Saham sebagai pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan. Pemegang Saham Perusahaan terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 51% dan PT Tunas Ridean sebanyak 49%.

Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Perusahaan senantiasa memenuhi serta memperhatikan hak-hak Pemegang Saham secara setara tanpa membedakan antara pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Kesetaraan pemenuhan hak kepada seluruh pemegang saham dapat dilihat dari pemberitahuan informasi pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan RUPS sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan yang berlaku. Sebelum RUPS dilaksanakan, Perusahaan akan melakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak penetapan tanggal pelaksanaan RUPS.

Hak-hak pemegang saham meliputi:

1. Mengusulkan, menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Menyetujui perubahan anggaran dasar termasuk perubahan modal.
3. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perusahaan, pengajuan permohonan agar Perusahaan dinyatakan pailit, dan pembubaran.
4. Meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
5. Setiap satu saham memberikan 1 (satu) hak suara.
6. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.
7. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
8. Menjalankan hak lainnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme Penyelenggaraan RUPS Perseroan

Dalam hal tata cara penyelenggaraan RUPS, Perusahaan mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan, serta aturan lain yang terkait.

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, RUPS tidak diselenggarakan secara fisik atau tatap muka. Adapun Perseroan telah melaksanakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- a. 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan secara sirkuler yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Mandiri Tunas Finance nomor 137 tanggal 28 Juni 2023, adapun agenda dan keputusannya sebagai berikut:

Agenda	Keputusan dan Realisasi
<p>Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volleedig acquit et de charge</i>) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam laporan tahunan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja (<i>a member firm of Ernest & Young Global Limited</i>), dengan opini "Menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Nomor 00031/2.1032/AU.1/09/0242-3/1/1/2023 tertanggal 23 Januari 2023. 2. Atas disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka keputusan Sirkuler ini Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volleedig acquit et de charge</i>) terhadap seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan, selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 3. Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volleedig acquit et de charge</i>) juga diberikan kepada Bapak Anton Zulkarnain yang menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022. <p>Realisasi: Laporan Tahunan periode tahun 2022 telah disetujui pada tanggal 06 April 2023 oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama Perseroan dan Laporan Keuangan periode 31 Desember 2022 telah disahkan oleh Direktur Perseroan pada tanggal 23 Januari 2023. Kedua Laporan tersebut telah dilaporkan kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Status: Terealisasi</p>

Agenda	Keputusan dan Realisasi
<p>Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 sebesar Rp. 750.213.273.330 (tujuh ratus lima puluh miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah). Dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Sejumlah 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan ditetapkan sebagai dividen atau sejumlah Rp.225.063.981.999 (dua ratus dua puluh lima miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Sejumlah 70% (tujuh puluh persen) dari laba bersih Perseroan ditetapkan sebagai laba ditahan sebesar Rp.525.149.291.331 (lima ratus dua puluh lima miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah). Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara alokasi laba bersih Perseroan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>Realisasi: Perseroan telah membagikan dividen sesuai dengan keputusan RUPS kepada pemegang saham Perseroan.</p> <p>Status: Terealisasi</p>
<p>Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan penetapan biaya/honorariumnya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (<i>a member firm of Ernest & Young Global Limited</i>) dan Akuntan Publik Danil Setiadi Handaja, CPA, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (<i>a member firm of Ernest & Young Global Limited</i>) dan atau Akuntan Publik Danil Setiadi Handaja, CPA, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. <p>Apabila terdapat pergantian kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, Dewan Komisaris memberikan laporan kepada Pemegang Saham.</p> <p>Realisasi: Laporan keuangan audited periode 31 Desember 2023 telah selesai dilakukan dan disahkan pada tanggal 22 Januari 2024 dengan menggunakan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (<i>a member firm of Ernest & Young Global Limited</i>) dan Akuntan Publik Danil Setiadi Handaja, CPA.</p> <p>Status: Terealisasi</p>
<p>Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 serta penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2023.</p>	<p>Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan pemegang saham mayoritas dan diketahui oleh pemegang saham pengendali lainnya untuk menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan Gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit, dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2023. <p>Realisasi: Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah ditetapkan dan diberikan sesuai dengan hasil keputusan yang ditetapkan.</p> <p>Status: Terealisasi</p>

Agenda	Keputusan dan Realisasi																											
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2022.	<p>Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2022.</p> <p>Realisasi: Penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2022 telah dilakukan sesuai rencana penggunaan dan telah dilaporkan ke OJK.</p> <p>Status: Terealisasi</p>																											
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui pengangkatan kembali Tuan Rico Adisurja Setiawan sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak Tanggal Efektif Keputusan Sirkuler ini dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan. Menyetujui untuk tidak memperpanjang masa jabatan Tuan Ravik Karsidi sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak Tanggal Efektif Keputusan Sirkuler ini serta mengucapkan terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh yang bersangkutan kepada Perseroan. Menyetujui pengangkatan Tuan Fendy Eventius Mugni sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal efektif Keputusan Sirkuler ini dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan. <p>Adapun penetapan pengangkatan Tuan Fendy Eventius Mugni tersebut di atas berlaku efektif setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui pengangkatan kembali Tuan Pinohadi Gautama Sumardi sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak Tanggal Efektif Keputusan Sirkuler ini dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktunya memberhentikan. <p>Berdasarkan keputusan di atas, sejak Tanggal Efektif Keputusan Sirkuler ini susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="background-color: #fff9c4;">Dewan Komisaris</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Rico Adisurja Setiawan</td> <td>Komisaris Utama</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Fendy Eventius Mugni*</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Totok Priyambodo</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="background-color: #fff9c4;">Direksi</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pinohadi Gautama Sumardi</td> <td>Direksi Utama</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>R. Eryawan Nurhariadi</td> <td>Direksi</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>William Francis Indra</td> <td>Direksi</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatuhan (<i>fit and proper test</i>).</p> <p>Realisasi: Bapak Fendy Eventius Mugni selaku Anggota Dewan Komisaris Independen telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga Yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>Status: Terealisasi</p>	No	Nama	Jabatan	Dewan Komisaris			1	Rico Adisurja Setiawan	Komisaris Utama	2	Fendy Eventius Mugni*	Komisaris Independen	3	Totok Priyambodo	Komisaris	Direksi			1	Pinohadi Gautama Sumardi	Direksi Utama	2	R. Eryawan Nurhariadi	Direksi	3	William Francis Indra	Direksi
No	Nama	Jabatan																										
Dewan Komisaris																												
1	Rico Adisurja Setiawan	Komisaris Utama																										
2	Fendy Eventius Mugni*	Komisaris Independen																										
3	Totok Priyambodo	Komisaris																										
Direksi																												
1	Pinohadi Gautama Sumardi	Direksi Utama																										
2	R. Eryawan Nurhariadi	Direksi																										
3	William Francis Indra	Direksi																										

Agenda	Keputusan dan Realisasi
Agenda Lain-lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan seluruh Keputusan Sirkuler ini dalam suatu akta notaris tersendiri dan untuk selanjutnya memberitahukannya kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, apabila diperlukan dan untuk itu menghadap di mana perlu, membuat, suruh membuat dan menandatangani akta dan surat-surat diperlukan, singkatnya melakukan apapun juga untuk mencapai maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan. 2. Tanggal Keputusan Sirkuler adalah tanggal tanda tangan terakhir dari perwakilan Pemegang Saham yang dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler ini, dalam hal tanda tangan dari perwakilan Pemegang Saham tidak diberikan pada tanggal yang sama. 3. Keputusan Sirkuler ini dapat dibuat dalam beberapa rangkap yang secara bersama-sama merupakan satu kesatuan dari Keputusan Sirkuler ini. <p>Status: Terealisasi</p>

- b. 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan secara sirkuler yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mandiri Tunas Finance di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 26 tanggal 12 April 2023 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mandiri Tunas Finance di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 27 tanggal 12 April 2023, adapun agenda dan keputusannya sebagai berikut:

Agenda	Keputusan
Persetujuan Penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Perseroan Tahun 2023	Menyetujui atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Perseroan tahun 2023-2025 dengan total plafond sebesar Rp 5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah).
Mengalihkan Kekayaan Perseroan (Piutang) dan Menjadikan Jaminan Utang Kekayaan Perseroan (Piutang) Tahun 2024	<p>Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk dan atas nama Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, sejak penandatanganan Keputusan Sirkuler ini untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengalihkan kekayaan Perseroan (Piutang); 2. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan (Piutang), <p>yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan guna mendapatkan pendanaan baru yang berasal dari sumber perbankan dan/atau Instansi Keuangan Non Perbankan dan/atau penerbitan obligasi atau surat berharga, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, sebesar-besarnya Rp8.700.000.000.000 (delapan triliun tujuh ratus miliar rupiah) untuk poin (a) sebagaimana maksud di atas dan sebesar-besarnya Rp13.000.000.000.000 (tiga belas triliun rupiah) untuk poin (b) sebagaimana maksud di atas di tahun 2024. Di mana untuk setiap pengalihan dan/atau penjaminan kekayaan bersih Perseroan dengan kelipatan sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah), Direksi diwajibkan membuat laporan tertulis kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan tersebut.</p>
Agenda Lain-lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan seluruh Keputusan Sirkuler ini dalam suatu akta notaris tersendiri, dan untuk selanjutnya memberitahukannya kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, apabila diperlukan dan untuk itu menghadap di mana perlu, membuat, suruh membuat dan menandatangani akta dan surat-surat diperlukan, singkatnya melakukan apapun juga untuk mencapai maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan. 2. Tanggal Keputusan Sirkuler ini adalah tanggal tanda tangan terakhir dari perwakilan Pemegang Saham yang dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler ini, dalam hal tanda tangan dari perwakilan Pemegang Saham tidak diberikan pada tanggal yang sama. 3. Keputusan Sirkuler ini dapat dibuat dalam beberapa rangkap yang secara bersama-sama merupakan satu kesatuan dari Keputusan Sirkuler ini.

Keterlibatan Pihak Independen dalam Penghitungan Suara

Sepanjang tahun 2023 RUPS Perseroan tidak diselenggarakan secara fisik atau tatap muka sehingga keterlibatan pihak independen dalam penghitungan suara tidak ada.

RUPS Tahun 2022 dan Tindak Lanjutnya

Sepanjang tahun 2022, RUPS tidak diselenggarakan secara fisik atau tatap muka. Perseroan telah melaksanakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- a. 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan secara sirkuler yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2021 PT Mandiri Tunas Finance nomor 22 tanggal 17 Juni 2022, adapun agenda dan keputusan dari RUPS Tahun Buku 2022 sebagai berikut:

Agenda	Keputusan
<p>Persetujuan laporan tahunan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam laporan tahunan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (<i>a member firm of Ernst & Young</i>), dengan opini "Menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00026/2.1032/AU.1/09/0242-2/1/1/2022 tertanggal 20 Januari 2022. 2. Atas disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka Keputusan Sirkuler ini memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) terhadap seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan, selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 3. Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) juga diberikan kepada: <ol style="list-style-type: none"> a. Bapak Armendra yang menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021. b. Bapak Harjanto Tjitohardjojo yang menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021. <p>Realisasi: Laporan keuangan dan laporan tahunan telah disampaikan kepada OJK dengan informasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian laporan dimaksud juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK. • Laporan Tahunan telah disampaikan kepada OJK dengan nomor surat 109/MTF-CLC.CCS/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 • Laporan keuangan tahunan telah disampaikan kepada OJK dengan nomor surat 064/MTF-CLC.CCS/III/2022 tanggal 23 Maret 2022. • Laporan tersebut juga telah tersedia pada halaman website Perseroan. <p>Status: Terealisasi</p>

Agenda	Keputusan
<p>Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp245.879.874.134 (dua ratus empat puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh empat Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Sejumlah 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan ditetapkan sebagai dividen atau sejumlah Rp49.175.974.827 (empat puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh Rupiah). b. Sejumlah 80% (delapan puluh persen) dari laba bersih Perseroan ditetapkan sebagai laba ditahan sebesar Rp196.703.899.307 (seratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh Rupiah). 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara alokasi laba bersih Perseroan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>Realisasi: Perseroan telah membagikan dividen sesuai dengan keputusan RUPS kepada pemegang saham Perseroan.</p> <p>Status: Terealisasi</p>
<p>Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan Penetapan Biaya/Honorariumnya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (<i>a member firm of Ernst & Young Global Limited</i>) dan Akuntan Publik Yovita, CPA, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (<i>a member firm of Ernst & Young Global Limited</i>) dan/atau Akuntan Publik Yovita, CPA, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Apabila terdapat pergantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, Dewan Komisaris memberikan laporan kepada Pemegang Saham. <p>Realisasi: Laporan keuangan audited periode 31 Desember 2021 telah selesai dilakukan dan disahkan pada tanggal 20 Januari 2022 dengan menggunakan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan Akuntan Publik Yovita, CPA</p> <p>Status: Terealisasi</p>
<p>Penetapan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada 31 Desember 2021 serta Penetapan Gaji Anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris dan Pemberian Fasilitas, Benefit dan/atau Tunjangan Lainnya untuk Tahun Buku 2022.</p>	<p>Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan pemegang saham mayoritas dan diketahui oleh pemegang saham pengendali lainnya untuk menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan 2. Gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2022. <p>Realisasi: Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah ditetapkan dan diberikan sesuai dengan hasil keputusan yang ditetapkan.</p> <p>Status: Terealisasi</p>

Agenda	Keputusan																											
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2021.	<p>Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2021.</p> <p>Realisasi: Penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2021 telah dilakukan sesuai rencana penggunaan.</p> <p>Status: Terealisasi</p>																											
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Anton Zulkarnain dari Jabatannya selaku Komisaris Perseroan berlaku efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler tersebut serta mengucapkan terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh yang bersangkutan selama menjawab sebagai Komisaris Perseroan Menyetujui pengangkatan Tuan Totok Priyambodo selaku Komisaris Perseroan berlaku efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler tersebut dan akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif setelah yang bersangkutan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>). <p>Menyatakan bahwa sejak Tanggal keputusan Sirkuler tersebut, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Dewan Komisaris</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Rico Adisurja Setiawan</td> <td>Komisaris Utama</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pref. Dr Ravik Karsidi</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Totok Priyambodo*</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Direksi</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pinohadi Gautama Sumardi</td> <td>Direksi Utama</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>R. Eryawan Nurhariadi</td> <td>Direksi</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>William Francis Indra</td> <td>Direksi</td> </tr> </tbody> </table> <p>Adapun penetapan pengangkatan Tuan Totok Priyambodo tersebut di atas berlaku efektif setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>).</p> <p>Realisasi: Bapak Totok Priyambodo selaku Anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga Ybs dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Anggota Dewan Komisaris Perseroan</p> <p>Status: Terealisasi</p>	No	Nama	Jabatan	Dewan Komisaris			1	Rico Adisurja Setiawan	Komisaris Utama	2	Pref. Dr Ravik Karsidi	Komisaris Independen	3	Totok Priyambodo*	Komisaris	Direksi			1	Pinohadi Gautama Sumardi	Direksi Utama	2	R. Eryawan Nurhariadi	Direksi	3	William Francis Indra	Direksi
No	Nama	Jabatan																										
Dewan Komisaris																												
1	Rico Adisurja Setiawan	Komisaris Utama																										
2	Pref. Dr Ravik Karsidi	Komisaris Independen																										
3	Totok Priyambodo*	Komisaris																										
Direksi																												
1	Pinohadi Gautama Sumardi	Direksi Utama																										
2	R. Eryawan Nurhariadi	Direksi																										
3	William Francis Indra	Direksi																										

Agenda	Keputusan
Agenda Lain-lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan seluruh Keputusan Sirkuler ini dalam suatu akta notaris tersendiri, dan untuk selanjutnya memberitahukannya kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, apabila diperlukan dan untuk itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat dan menandatangani akta dan surat-surat diperlukan, singkatnya melakukan apapun juga untuk mencapai maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan. 2. Tanggal Keputusan Sirkuler ini adalah tanggal tanda tangan terakhir dari perwakilan Pemegang Saham yang dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler ini, dalam hal tanda tangan dari perwakilan Pemegang Saham tidak diberikan pada tanggal yang sama. 3. Keputusan Sirkuler ini dapat dibuat dalam beberapa rangkap yang secara bersama-sama merupakan satu kesatuan dari Keputusan Sirkuler ini. <p>Status: Terealisasi</p>

- d. 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan secara sirkuler yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mandiri Tunas Finance di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 38 tanggal 23 Desember 2022, adapun agenda dan keputusan dari RUPS di Luar Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut:

Agenda	Keputusan
Persetujuan Perubahan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Direksi.	<p>Menyetujui Perubahan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Direksi yang semula berbunyi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 12 ayat (1): Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; • Harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris. <p>Diubah menjadi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 12 ayat (1): <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris. b. Direksi wajib meminta persetujuan dari seluruh pemegang saham dalam RUPS setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; - Melepaskan penyertaan modal (divestasi) pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan lainnya. <p>Status: Terealisasi</p>

Agenda	Keputusan
Agenda Lain-lain	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan seluruh Keputusan Sirkuler ini dalam suatu akta notaris tersendiri, dan untuk selanjutnya memberitahukannya kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, apabila diperlukan dan untuk itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat dan menandatangani akta dan surat-surat diperlukan, singkatnya melakukan apapun juga untuk mencapai maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan. Tanggal Keputusan Sirkuler ini adalah tanggal tanda tangan terakhir dari perwakilan Pemegang Saham yang dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler ini, dalam hal tanda tangan dari perwakilan Pemegang Saham tidak diberikan pada tanggal yang sama. Keputusan Sirkuler ini dapat dibuat dalam beberapa rangkap yang secara bersama-sama merupakan satu kesatuan dari Keputusan Sirkuler ini.
Status: Terealisasi	

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara independen terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola perusahaan serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan GCG.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa Jabatan Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar perusahaan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023, susunan dan komposisi anggota Dewan Komisaris mengalami perubahan dengan tidak memperpanjang masa jabatan Tuan Ravik Karsidi sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak RUPS Tahunan tanggal 27 Juni 2023.

Komposisi Dewan Komisaris Periode 1 Januari - 27 Juni 2023

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Jabatan
Rico Adisurja Setiawan	Komisaris Utama	Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 No. 28 Tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., notaris di Jakarta.	RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022.	Ke-2
Totok Priyambodo	Komisaris	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.22 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat oleh Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta Selatan	RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024.	Ke-1
Ravik Karsidi	Komisaris Independen	Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 No. 28 Tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., notaris di Jakarta.	RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022.	Ke-2

Komposisi Dewan Komisaris Periode 27 Juni - 31 Desember 2023

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Jabatan
Rico Adisurja Setiawan	Komisaris Utama	Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 No. 138 Tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat di hadapan M. Kholid Artha, SH., notaris di Jakarta.	RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2025.	Ke-3
Totok Priyambodo*	Komisaris	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 22 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat oleh Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta Selatan	RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024.	Ke-1
Fendy Eventius Mugni	Komisaris Independen	Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 No. 138 Tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat di hadapan M. Kholid Artha, SH., notaris di Jakarta.	RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2025.	Ke-1

*) Mengundurkan diri pada tanggal 7 Maret 2024

Profil seluruh anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kepatutan dan Kelayakan Dewan Komisaris

Sesuai peraturan yang diberlakukan OJK kepada industri keuangan, pihak yang mengurus lembaga keuangan diwajibkan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh OJK sebagai prasyarat berlakunya jabatan kepengurusan secara formal. Seluruh Dewan Komisaris Perusahaan telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan oleh OJK.

Penunjukkan Dewan Komisaris Perusahaan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Berikut keterangan terkait penilaian kelayakan dan kepatuhan (*fit and proper test*) Dewan Komisaris Perusahaan.

Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Persetujuan dari OJK
Rico Adisurja Setiawan	Komisaris Utama	Lulus dengan Surat Keputusan OJK No. KEP-471/NB.11/2017 tanggal 21 Agustus 2017.
Totok Priyambodo	Komisaris	Lulus dengan Surat Keputusan OJK No. KEP-06/KDK.05/2022 tanggal 26 Desember 2022.
Fendy Eventius Mugni	Komisaris Independen	Lulus dengan Surat Keputusan OJK No. KEP-13/KDK.06/2023 tanggal 8 Desember 2023.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Pedoman Kerja Dewan Komisaris berisikan tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris yang disusun berdasarkan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. *Board Charter* menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten sehingga dapat menjadi acuan dalam menjalankan tugas masing-masing Dewan Komisaris untuk mencapai visi dan misi Perusahaan.

Hal-hal yang diatur dalam pedoman tersebut diantaranya:

- Acuan Kebijakan
- Ruang Lingkup
- Dasar Hukum
- Prinsip Hubungan Kerja Dewan Komisaris Dengan Direksi
- Komposisi, Masa Jabatan, dan Rangkap Jabatan
- Tugas, Tanggung jawab, dan Kewajiban Dewan Komisaris
- Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
- Budaya dan Etika Perilaku Dewan Komisaris
- Kerahasiaan Informasi dan Benturan Kepentingan
- Rapat Dewan Komisaris
- Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- Komite Penunjang Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris
- Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas, Tanggung Jawab, Kewajiban, dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dengan berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
2. Memberi nasihat kepada Direksi atas jalannya pengurusan Perseroan;
3. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Internal Audit, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain;
4. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan, termasuk perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan;
5. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
6. Memberikan pendapat dan saran atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang diusulkan oleh Direksi dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tersebut sesuai ketentuan dengan anggaran dasar;
7. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.

Kewajiban Dewan Komisaris

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta bertindak profesional;
2. Melakukan kajian, mengesahkan, serta mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan yang telah disiapkan Direksi sesuai regulasi yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan;
3. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak/golongan tertentu;
4. Menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
5. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan melaporkan kegiatan pengawasannya kepada RUPS;

6. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan yang bersangkutan dan Perseroan lain, termasuk setiap perubahannya;
7. Memberikan rekomendasi kepada RUPS atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Perseroan;
8. Melakukan tindak lanjut atas hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada RUPS dalam hal terjadi penyimpangan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar;
9. Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;
10. Dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang signifikan, segera mengadakan RUPS untuk melaporkan kepada Pemegang Saham, dengan disertai saran mengenai langkah-langkah perbaikan yang harus ditempuh;
11. Memantau efektivitas implementasi *Good Corporate Governance*.

Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan tertulis atas keputusan Direksi untuk tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
2. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
3. Memperoleh akses yang cukup atas informasi Perseroan dalam hal ini melihat buku-buku, surat berharga serta memeriksa kekayaan Perseroan;
4. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan/kebijakan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat unit kerja lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu dan memberhentikannya;
7. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
8. Membentuk komite lain selain komite audit, dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan;
9. Jika dianggap perlu dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris dapat menggunakan bantuan tenaga ahli untuk jangka waktu terbatas dengan beban Perseroan;

10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
11. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan/atau keputusan RUPS.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Agar lebih efektif dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris telah membagi tugas pengawasan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara namun Komisaris Utama yang bertindak sebagai primus inter pares memiliki tugas untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan Dewan Komisaris.

Program Orientasi bagi Komisaris Baru

Program Pengenalan kepada Dewan Komisaris yang baru diangkat bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai Perseroan, agar dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris dan proses bisnis Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi, sehingga dapat bekerja selaras dengan Organ Perseroan lainnya.

Penanggung jawab program ini berada pada Sekretaris Perusahaan dan materi program pengenalan mencakup:

- Anggaran Dasar Mandiri Tunas Finance
- Peraturan perundang-undangan terkait bisnis Mandiri Tunas Finance
- Laporan Tahunan Mandiri Tunas Finance
- Rencana Jangka Panjang
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
- Program Kerja Dewan Komisaris
- *Key Performance Indicator* Dewan Komisaris

Pada tahun 2023, RUPS telah mengangkat Fendy Eventius Mugni sebagai anggota Dewan Komisaris. Pelaksanaan program pengenalan kepada beliau dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2023.

Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Perseroan memiliki kebijakan terkait pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia mulai dari level teratas hingga bawah sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing.

Kebijakan mengenai program peningkatan kapabilitas bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris.
2. Rencana untuk melakukan program peningkatan kapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
3. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program peningkatan kapabilitas diwajibkan menyajikan presentasi kepada Anggota Dewan Komisaris lain dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan.
4. Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan bertanggung jawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Rincian pelaksanaan program peningkatan kompetensi Dewan Komisaris disampaikan pada bab Profil Perusahaan yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2023

Keputusan, rekomendasi, dan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Keputusan, Rekomendasi, dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris di Tahun 2023

Kuartal I Tahun 2023	Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada management MTF atas pencapaian yang telah diraih di tahun 2023.
	Dewan Komisaris memberikan dukungan penuh kepada MTF agar dapat mencapai target lending sebesar Rp1 triliun di Tahun 2023.
	Dewan Komisaris memberikan arahan agar MTF melakukan pengkajian lebih lanjut terkait perkembangan MTF dalam pembiayaan mobil listrik.
	Dewan Komisaris memberikan arahan terkait kebijakan larangan buka puasa bersama yang ditujukan kepada pejabat negara, termasuk BUMN.

Keputusan, Rekomendasi, dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris di Tahun 2023

Kuartal II Tahun 2023	Dewan Komisaris mengarahkan agar Jamkrindo bisa membayar klaim asuransi yang lebih tinggi.
	Dewan Komisaris menghimbau agar MTF meningkatkan kinerja di bulan Juni agar MTF dapat mencapai target yang diharapkan.
	Dewan Komisaris memberikan arahan untuk dibuatkan informasi perihal kalkulasi <i>minimum pricing</i> JF yang masuk kedalam NJF.
	Dewan Komisaris menghimbau agar MTF membuat strategi pencapaian profit yang terstruktur untuk mencapai target profit dan tidak terburu-buru mencapai profit Rp1,2 T yang dapat menyebabkan NPL meningkat.
	Dewan Komisaris memberikan arahan untuk dibuatkan penjelasan perihal adanya NPL pada debitur JF yang seharusnya memiliki kualitas bagus.
Kuartal III Tahun 2023	Dewan Komisaris memberikan apresiasi terkait kinerja manajemen MTF hingga saat ini.
	Dewan Komisaris memberikan arahan agar MTF dapat mempertahankan kinerja saat ini.
Kuartal IV Tahun 2023	Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada MTF terkait <i>performance</i> yang sangat baik di mana pencapaian profit YTD per September Tahun 2023 sudah melampaui <i>actual profit</i> YTD 2022.
	Dewan Komisaris memberikan arahan agar MTF tetap menjaga angka CKPN tidak di bawah 200%.
	Dewan Komisaris memberikan arahan agar MTF fokus mengakuisisi brand-brand yang baik dan tetap menjaga kualitas NPL.
	Dewan Komisaris memberikan arahan untuk menjaga <i>performance captive consumer</i> .
	Dewan Komisaris memberikan arahan agar MTF mempersiapkan langkah antisipasi terhadap peningkatan perputaran keuangan yang akan meningkat pada saat memasuki Tahun politik.

Penilaian Kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dewan Komisaris memiliki komite-komite penunjang yang telah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung kinerja Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut telah memiliki pedoman kerja yang jelas, sehingga pelaksanaan tugasnya bisa terarah dan efektif. Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2023 komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif dilihat dari pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) masing-masing komite.

Berikut penilaian kinerja komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris adalah:

1. Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas sistem dan proses Pelaporan Keuangan, proses audit atas laporan keuangan Perseroan, evaluasi atas pelaksanaan pengawasan internal Perseroan, evaluasi atas kinerja audit internal, dan pengawasan kinerja teknis dan operasional serta pemenuhan ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 7 kali dan menjalankan tugasnya antara lain:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain seperti laporan keuangan proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perseroan.
- Melakukan penelaahan atas pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perseroan.
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjang akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*.
- Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal perusahaan, serta pelaksanaannya.
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan risiko dibawah Dewan Komisaris.

- h. Melakukan penelaahan pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perseroan.
 - i. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perseroan.
 - j. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi
- Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris yang bertujuan melakukan pemantauan, pengawasan, dan penilaian atas efektifitas nominasi dan remunerasi di lingkup Perseroan.

Sepanjang tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 3 kali dan menjalankan tugasnya antara lain:

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan ke RUPS.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Perseroan, meliputi gaji, honorarium, THR, benefit, bonus, dan tantiem.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, nama calon anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, dan melakukan penilaian berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai evaluasi kinerja dan pengembangan kemampuan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
3. Komite Pemantau Risiko
- Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris guna memantau pelaksanaan manajemen risiko Perseroan yang telah disusun dan dilaksanakan oleh Direksi.

Sepanjang tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 4 kali dan menjalankan tugasnya antara lain:

- a. Mengarahkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance*.

- b. Melakukan *review* atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan.
- c. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas satuan kerja manajemen risiko.
- d. Melakukan *review* atas laporan profil risiko dan/ atau tingkat risiko.
- e. Melakukan *review* atas laporan tingkat kesehatan keuangan Perseroan.
- f. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko.

Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Komisaris Independen bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan juga mewakili kepentingan pemegang saham minoritas. Pengangkatan Komisaris Independen diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Kriteria Independensi Komisaris Independen

Keberadaan Komisaris Independen yang ada di Perseroan senantiasa menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kriteria penentuan Komisaris Independen Perseroan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04.2014 yaitu:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.
2. Tidak mempunyai saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Komisaris, Direksi dan Pemegang saham Utama Perseroan.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek Independensi	Fendy Eventius Mugni
Sebagai orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.	x
Memiliki saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung	x
Memiliki hubungan Afiliasi dengan Komisaris, Direksi dan Pemegang saham Utama Perseroan	x
Memiliki hubungan usaha dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung	x

Komposisi dan Keanggotaan Komisaris Independen dalam Susunan Dewan Komisaris Perseroan

Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 menyatakan bahwa komposisi Dewan Komisaris Independen haruslah minimal 30% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Per 31 Desember 2023, Perseroan memiliki 1 (satu) Komisaris Independen yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dan telah menandatangani surat pernyataan independen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu dokumen persyaratan pengajuan persetujuan dari OJK.

Komisaris Independen Mandiri Tunas Finance per 31 Desember 2023

Komisaris Independen	Periode Jabatan dan Masa Jabatan
Fendy Eventius Mugni	Periode ke-1, untuk masa jabatan sejak RUPS Tahunan Tahun Buku 2025

Komposisi Komisaris Independen Perseroan terhadap jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebesar 33,33%, dan telah memenuhi peraturan terkait.

Surat Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Surat Pernyataan Independensi Komisaris Independen telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi sebagai Komisaris Independen yang menyatakan bahwa:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau pemegang saham LKKNB yang sama; dan
2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada LKKNB yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan LKKNB tersebut dalam kurun waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Komisaris Independen pada tanggal 20 September 2023.

Direksi

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Selain itu Direksi juga wajib menjalankan kegiatan operasional Perseroan berlandaskan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Masa Jabatan Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang ditentukan lamanya yaitu 3 (tiga) tahun.

Komposisi dan Susunan Direksi Tahun 2023

Per 31 Desember 2023, komposisi dan susunan keanggotaan Direksi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Jabatan
Pinohadi G. Sumardi	Direktur Utama	Akta Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS untuk Menyelenggarakan RUPS Tahunan (Keputusan Sirkuler) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 138 tanggal 28 Juni 2023 yang dibuat di hadapan M. Kholid Artha, SH., notaris di Jakarta.	RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 s.d penutupan RUPST Tahun Buku 2025	Ke-2
William Francis Indra	Direktur	Akta Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS untuk Menyelenggarakan RUPS Tahunan (Keputusan Sirkuler) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 15 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., notaris di Jakarta.	RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 s.d penutupan RUPST Tahun Buku 2023	Ke-1
R. Eryawan Nurhariadi	Direktur	Akta Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS untuk Menyelenggarakan RUPS Tahunan (Keputusan Sirkuler) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 15 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., notaris di Jakarta.	RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 s.d penutupan RUPST Tahun Buku 2023	Ke-1

Penilaian Kepatutan dan Kelayakan Direksi

Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menjabarkan mengenai pertimbangan pengelola/pengurus lembaga keuangan harus memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan tindakan, tugas dan fungsinya. Berikut keterangan terkait penilaian kelayakan dan kepatuhan (*fit and proper test*) Direksi Perseroan.

Nama	Jabatan	Persetujuan dari OJK
Pinohadi G. Sumardi	Direktur Utama	Lulus dengan Surat Keputusan OJK No. KEP- 368/NB.11/2020 tanggal 10 November 2020.
William Francis Indra	Direktur	Lulus dengan Surat Keputusan OJK No. KEP-26/KDK.05/2021 tanggal 6 Juli 2021.
R. Eryawan Nurhariadi	Direktur	Lulus dengan Surat Keputusan OJK No. KEP-44/KDK.05/2021 tanggal 31 Agustus 2021.

Pedoman Kerja Direksi

Perseroan telah memiliki *Board Manual* atau Pedoman Tata Kerja Direksi yang telah disahkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 021/SK-DIR/MTF/X/2011 yang berisi petunjuk tata laksana kerja Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, untuk dijadikan acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan.

Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Kewajiban Direksi

Direksi bertugas secara penuh menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud serta tujuan Perseroan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.

Berdasarkan Pedoman Kerja, tugas pokok Direksi secara umum dan berdasarkan jabatannya adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok Direksi

1. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
2. Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
3. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan.

Tugas Pokok Kolegial Direksi

1. Menetapkan visi, misi, dan strategi Perusahaan;
2. Menetapkan kebijakan Perusahaan yang berlaku secara Korporat;
3. Menetapkan usulan dan perubahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Menetapkan sasaran kinerja serta evaluasi kinerja Perseroan termasuk kebijakan dividen melalui mekanisme organisasi Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Mengupayakan tercapainya sasaran kinerja yang digunakan sebagai dasar penilaian tingkat kesehatan sesuai dengan kesepakatan kinerja yang telah ditetapkan dalam "RUPS Persetujuan RKAP";
6. Menetapkan persetujuan proyek investasi non rutin yang melebihi kewenangan Direktur dan memantau pelaksanaannya;
7. Menetapkan struktur organisasi dan penetapan pejabat Perusahaan sampai jenjang tertentu yang diatur melalui ketetapan Direksi.

Tanggung Jawab Direksi

1. Memenuhi ukuran Kinerja terpilih yang jelas, lengkap, dan berimbang, baik dari aspek keuangan maupun non keuangan untuk menentukan pencapaian misi dan tujuan Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mewujudkan pelaksanaan RJPP dan RKAP, termasuk pencapaian target keuangan dan non keuangan.
3. Melaksanakan manajemen risiko.
4. Membangun dan memanfaatkan teknologi informasi.
5. Menindaklanjuti temuan-temuan audit satuan SPI dan Auditor Eksternal serta melaporkannya kepada Dewan Komisaris.

6. Melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Dewan Komisaris, antara lain mengenai suksesi/mutasi/promosi manajer kunci (senior), program pengembangan SDM, pertanggungjawaban manajemen risiko, dan kinerja pemanfaatan teknologi informasi.
7. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membuat risalah RUPS.
8. Memperhatikan kepentingan *stakeholders* sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain diberikan tugas dan tanggung jawab, Direksi juga diberikan hak dan berwenang untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dengan pengelolaan Perusahaan, termasuk kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Kebijakan-kebijakan terkait ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan aturan internal Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Direksi juga memiliki kuasa untuk mengatur masalah pendelegasian wewenang/pemberian kuasa Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.

Kewajiban Direksi

1. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, menandatangani bersama dengan Komisaris, dan menyampaikannya kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.
2. Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dan menyampaikannya kepada Komisaris untuk dan RUPS untuk memperoleh pengesahan.
3. Menyusun dan mengimplementasikan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan termasuk pembukuan dan administrasi yang didasarkan atas pengendalian internal yang handal.
4. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan dalam laporan lainnya jika diminta oleh RUPS.
5. Menetapkan secara jelas tugas, tanggung jawab, dan wewenang manajemen pada setiap tingkatan/level.
6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditandatangani bersama Komisaris kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
7. Mencantumkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain dalam Laporan Tahunan.

Ruang Lingkup Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pembagian ruang lingkup tugas Direksi mengacu kepada Surat Keputusan Direksi No. 021/SK-DIR/ MTF/X/2011 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang serta Tata Tertib Direksi, dan Surat Keputusan Direksi No. 003/SK-DIR/ MTF/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Struktur Organisasi PT Mandiri Tunas Finance.

Direksi	Tanggung Jawab
Pinohadi G. Sumardi	<p>Direktorat Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab terhadap Profit and Loss dari Perusahaan. Mengelola Perusahaan dan memastikan pencapaian <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Perusahaan. Menentukan strategi dan kebijakan bisnis Perusahaan untuk jangka waktu menengah maupun panjang dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi Perusahaan. Memastikan aktivitas bisnis Perusahaan berjalan sesuai dengan strategi dan rencana Perusahaan. Mengambil keputusan strategis untuk mendukung Perusahaan tetap bertumbuh secara berkelanjutan. Mengkordinasikan, mengarahkan dan melakukan supervisi atas unit kerja di Perusahaan agar tetap berjalan sesuai dengan rencana dan strategi Perusahaan. Mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta mengarahkan pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan. Mengarahkan aktivitas pengembangan organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan dan berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu sebagaimana diatur dalam Surat Kuasa. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari Direksi lainnya.
William Francis Indra	<p>Direktorat Sales & IT</p> <ol style="list-style-type: none"> Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bisnis unit dalam mengembangkan dan memasarkan produk dan aliansi sehingga mencapai <i>marketable</i> dan <i>profitable</i>. Menentukan strategi dan kebijakan serta melakukan kontrol atas fungsi <i>Information Technology</i> dalam mendukung operasional, pengembangan serta keamanan sistem dan teknologi. Mengkoordinasikan seluruh aspek manajemen operasional sesuai dengan strategi Perusahaan. Memastikan fungsi marketing di Perusahaan berjalan sesuai dengan strategi dan tercapainya target penjualan. Mengarahkan dan mensupervisi Regional Division Head dan mengkoordinasikan fungsi kerja di seluruh regional. Memimpin dan mengarahkan kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan kegiatan bisnis dan pemasaran untuk jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Memimpin dan mengarahkan berjalannya aktivitas operasional dan transaksional, serta mendukung pengembangan kebijakan, ketentuan, dan sistem <i>Operation</i>, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis. Membantu Direktur Utama dalam mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tantangan persaingan bisnis dengan mendorong bisnis unit membuat produk dengan lebih dinamis dan kompetitif.
R. Eryawan Nurhariadi	<p>Direktorat Corporate Finance & Business Strategic</p> <ol style="list-style-type: none"> Memimpin dan mengarahkan strategi bisnis, tujuan dan target financial jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek Perusahaan secara komprehensif. Mengkoordinasikan seluruh aspek manajemen keuangan, akuntansi, strategi bisnis dan sesuai dengan strategi Perusahaan. Menentukan strategi dan melakukan kontrol atas fungsi keuangan dan akuntansi agar tetap berjalan sesuai rencana Perusahaan. Memastikan laporan-laporan terkait keuangan, akuntansi dan operasional kepada lembaga terkait terkirim sesuai dengan waktu yang ditentukan. Melakukan <i>monitoring</i> atas penggunaan seluruh biaya Perusahaan terhadap anggaran yang telah ditentukan. Menentukan strategi dan kebijakan serta melakukan kontrol dalam mendukung pencapaian target Perusahaan melalui strategi perusahaan dan pengembangan bisnis yang mendukung performa Perusahaan. Bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi supervisi dan memastikan performa unit kerja berjalan sesuai dengan strategi untuk mencapai target Perusahaan. Menjaga hubungan baik dengan stakeholder untuk memastikan tercapainya target Perusahaan. Mengarahkan dan mensupervisi divisi-divisi yang berada di bawahnya.

Program Orientasi Bagi Direksi

Program Pengenalan kepada Direktur yang baru diangkat bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai Perseroan, agar dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur, proses bisnis Perseroan, serta dapat bekerja selaras dengan Organ Perseroan lainnya.

Program pengenalan perusahaan kepada Direksi yang baru diangkat dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan. Materi yang diperkenalkan kepada Direksi baru sekurang-kurangnya mencakup informasi berikut:

1. Situasi industri keuangan Indonesia, khususnya non perbankan.
2. Profil Perseroan.
3. Operasi serta kinerja keuangan Perseroan.
4. Keorganisasian dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pada tahun 2023 tidak ada perubahan komposisi Direksi, sehingga Perseroan tidak melakukan kegiatan atau program orientasi bagi Direksi.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi

Kebijakan Perseroan juga merancang program untuk memberikan wawasan baru bagi Direksi untuk meningkatkan kapasitas Perseroan dalam lingkungan usaha yang kompetitif, serta memberikan kesempatan untuk membangun jaringan dalam rangka memberdayakan sumber daya yang ada dalam organisasi sehingga menjadikan Perseroan sebagai organisasi berkinerja tinggi. Peningkatan

kapasitas dan kapabilitas penting agar Direksi dapat selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang industri di mana Perseroan beroperasi dan selalu siap mengantisipasinya bagi keberlangsungan dan kemajuan Perseroan. Kebijakan tentang program peningkatan kapabilitas bagi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Direksi.
2. Rencana program harus dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran Direksi.
3. Direksi yang mengikuti program wajib mempresentasikan kepada Direksi lain dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan.
4. Direksi yang bersangkutan membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan Kapabilitas dan disampaikan kepada Direksi lainnya.

Informasi lengkap tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Direksi di sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2023

Selama tahun 2023 Direksi telah mengeluarkan berbagai keputusan baik di bidang operasional, keuangan, maupun beberapa penunjang usaha melalui perangkat kebijakan yang dimiliki Direksi. Adapun keputusan dan pelaksanaan tugas Direksi di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Keputusan, Rekomendasi, dan Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2023

Kuartal I Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan MPI MTF Tahun 2023 • Persiapan pelaksanaan Internal Trip MTF Tahun 2023 • <i>Concern</i> terhadap cabang-cabang yang memiliki <i>performance</i> EPD dan <i>Recovery</i> terendah • Memonitor <i>event</i> Rapat Kerja Nasional MTF • Reviu dan Penyesuaian Struktur Organisasi MTF • Memonitor Hasil Audit atas Temuan Audit Bank Mandiri • Penentuan Strategi dan Inisiasi Tim BPR MTF • <i>Concern</i> pada Pengkinian Data Customer MTF
Kuartal II Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Concern</i> pada Sistem Accounting MTF • Melakukan reviu terhadap proses scoring MTF • Melakukan Kajian dan Analisa atas Target Profit Rp 1 Triliun • <i>Concern</i> pada Strategi <i>Anti Fraud</i> • Persiapan dan Pelaksanaan RUPST MTF • Pembentukan Inisiasi Direct Impact Project terkait Efisiensi • Memonitor atas penandatanganan Pakta Integritas Karyawan MTF • Memonitor renovasi gedung MTF Lantai 21 • Memonitor Hasil Audit Cabang Matraman, Padang, dan Bandung I

Kuartal III Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian atas Perubahan <i>Grading Customer MTF</i> • Persiapan atas Penerapan ESG di Mandiri Group • Memonitor <i>event</i> Board Forum (MTF sebagai Tuan Rumah) • Melakukan reviu komposisi sektor batu bara • <i>Concern</i> pada Laporan Rutin kepada Regulator • <i>Concern</i> pada Rencana Kerja Tim Anti Fraud MTF • Memonitor Pelaksanaan Program MDP (Manager Development Program) MTF – jalur prestasi • Penentuan Strategi Bisnis dan dan <i>Financial Projection</i> Tahun 2023 dan 2024 • Memonitor Hasil Audit Cabang Kelapa Gading, Kebon Jeruk, Bintaro, Divisi Operation Support Management, Divisi Legal, dan SLIK.
Kuartal IV Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan dan Pelaksanaan CGPI – Corporate Governance Perception Index • Memonitor Hasil Audit Regional 2 – Cabang Palembang Multiguna dan Cabang Padang, Cabang Denpasar, Regional 6, dan Regional 8. • Penyusunan SOP Pembiayaan Corporate Fleet • <i>Concern</i> pada <i>Profitability by Holding</i> • Pengkinian Ketentuan SOP APU PPT dan PPPSPM • <i>Concern</i> pada Penerapan Organ Manajemen Risiko sesuai Permen BUMN

Penilaian Kinerja Komite dan Organ Pendukung di bawah Direksi

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi membentuk komite-komite di bawah Direksi sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan dan ketentuan regulasi, yang diharapkan dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi operasional. Satuan kerja yang dimaksud adalah Komite Aset dan Liabilitas/Asset Liabilities Committee (ALCO), Komite Kredit, dan Komite Anti Fraud. Direksi menilai bahwa baik Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal maupun satuan kerja yang terdiri dari Komite Aset dan Liabilitas/Asset Liabilities Committee (ALCO), Komite Kredit, serta Komite Anti Fraud. Direksi menilai bahwa pada tahun 2023 komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif dan memberikan dukungan terhadap Direksi dalam hal pengelolaan bisnis Perseroan yang sesuai dengan prinsip GCG.

Transparansi Informasi Tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan komposisi Dewan Komisaris Perseroan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas perusahaan termasuk memperhatikan unsur keberagaman atas pengetahuan, keahlian, pengalaman profesional serta pendidikan guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dalam menjawab segala tantangan usaha yang semakin dinamis. Berikut keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Nama dan Jabatan	Kewarganegaraan	Usia	Gender	Latar Belakang Pendidikan	Keahlian
Dewan Komisaris					
Rico Adisurja Setiawan (Komisaris Utama)	Indonesia	52	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> • Master (S2) of Business Administration untuk bidang Finance • Sarjana (S1) Bachelor of Science 	Administrasi untuk bidang Finance
Totok Priyambodo (Komisaris)	Indonesia	49	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana (S1) Teknik Sipil 	Perbankan dan Keuangan
Fendy Eventius Mugni (Komisaris Independen)	Indonesia	51	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> • Magister (S2) Prodi Energi Keberlanjutan • Sarjana (S1) Teknik Telekomunikasi 	Telekomunikasi dan Lingkungan

Nama dan Jabatan	Kewarganegaraan	Usia	Gender	Latar Belakang Pendidikan	Keahlian
Direksi					
Pinohadi G. Sumardi (Direktur Utama)	Indonesia	53	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Pascasarjana Bisnis - International Finance (S2) Sarjana (S1) Ekonomi-Finance Management 	Keuangan
William Francis Indra (Direktur)	Indonesia	41	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Magister (S2) Manajemen Sarjana (S1) Matematika 	Manajemen
R. Eryawan Nurhariadi (Direktur)	Indonesia	52	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Magister (S2) Manajemen Sarjana (S1) Ekonomi Manajemen 	Ekonomi Manajemen

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *self assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan dalam RUPS.

Prosedur Pelaksanaan Assessment Kinerja Dewan Komisaris



Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris itu sendiri dengan melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2023 secara mandiri (*self assessment*). Secara rinci penilaian kinerja Dewan Komisaris sebagai berikut:

No	Indikator	Bobot Penilaian	Pencapaian
1	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala minimal 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.	12,5%	100%
2	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Bersama Direksi secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	12,5%	100%
3	Dewan Komisaris melaksanakan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan melalui keikutsertaan dalam seminar/pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	12,5%	100%
4	Dewan Komisaris menyusun dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan kepada Regulator secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	12,5%	100%

No	Indikator	Bobot Penilaian	Pencapaian
5	Dewan Komisaris mereviu, mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.	12,5%	100%
6	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Internal Audit, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	12,5%	100%
7	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya prinsip dan praktik <i>Good Corporate Governance</i> pada seluruh jenjang organisasi.	12,5%	100%
8	Dewan Komisaris memastikan Komite-Komite di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun beberapa indikator yang diukur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Rapat Komite dan Rencana Kerja Komite • Tingkat kehadiran dan partisipasi dalam Rapat Komite • Penyampaian hasil reviu terhadap Dewan Komisaris 	12,5%	100%

Secara keseluruhan hasil penilaian Dewan Komisaris tahun 2023 sangat baik, dengan seluruh aspek penilaian memiliki pencapaian sampai 100%, sehingga kinerja Dewan Komisaris selama tahun tersebut dapat dikategorikan sangat baik.

Penilaian Kinerja Direksi

Proses pelaksanaan penilaian terhadap kinerja Direksi dapat dilihat dari pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara Individu serta KPI Direksi secara kolegal yang dinilai oleh Pemegang Saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Evaluasi atas kinerja Direksi berdasarkan atas pencapaian (KPI) telah disepakati sebelumnya melalui mekanisme RUPS oleh pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Kriteria penilaian atau evaluasi kinerja Direksi berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI), yaitu:

1. Perspektif *Financial* (Keuangan)
2. Perspektif *Customer*
3. Perspektif Internal Bisnis Proses
4. Inisiatif Pengembangan

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dan RUPS. Dalam melakukan penilaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada indikator KPI. Kemudian Dewan Komisaris dan Direksi akan mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja mereka selama periode 2023, termasuk di dalamnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS. Hasil penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Perspektif	KPI	Bobot	Ukuran	Nilai
			30.0%		34.1
1	Keuangan	<i>Net Income</i> (Rp M)	10.0%	Sesuai RKAP	12.0
		<i>PPOP (Pre Provison Operating Profit)</i> (Rp. M)	10.0%	Sesuai RKAP	12.0
		<i>Return on Equity (ROE)</i> (%)	5.0%	Sesuai RKAP	5.3
		<i>Gearing Ratio</i> (x)	5.0%	Sesuai RKAP	4.8
			30.0%		30.2
2	Pelanggan	<i>Bade Joint Finance (JF)</i>	20.0%	Sesuai RKAP	19.5
		<i>Marketshare - Bade OJK</i> (%)	5.0%	Sesuai Target	5.4
		<i>Pembiayaan Porsi Captive</i> (%)	5.0%	Sesuai Target	5.4

No.	Perspektif	KPI	Bobot	Ukuran	Nilai
			25.0%		28.105
3	Internal Proses Bisnis	Finance at Risk (%)	5.0%	Sesuai Target	6.5
		CKPN to Finance at Risk (FAR Coverage) (%)	5.0%	Sesuai Target	6.5
		Cost of Credit (CoC) (%)	5.0%	Sesuai RKAP	3.865
		Cost to Income Ratio (%) - CER	5.0%	Sesuai RKAP	6.24
		Persentase Pemenuhan minimum IT Requirement (%)	2.5%	Sesuai Target	2.5
		Persentase Pemenuhan minimum Mandiri Subsidiary Management Principles Guideline (MSMPG) (%)	2.5%	Sesuai Target	2.5
			15.0%		15.0
4	Pengembangan	Implementasi Project Sydney	10.0%	Sesuai Target	10.0
		Kajian ecosystem bisnis automotif B2B & B2B2C (%)	5.0%	Sesuai Target	5.0
TOTAL			100.0%		107.4

Secara keseluruhan hasil penilaian Direksi ditahun 2023 tercapai baik, dengan seluruh aspek penilaian memiliki pencapaian sampai 107.44%, sehingga kinerja Direksi selama tahun 2023 dapat dikategorikan sangat baik.

Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengikuti kebijakan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Utama/ Pengendali Perseroan.

Kriteria dan Persyaratan Dewan Komisaris

Kriteria Dewan Komisaris Perusahaan adalah:

- Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- Cakap melakukan perbuatan hukum;
- Lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Memiliki domisili sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bagi warga negara asing wajib memiliki perizinan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menetapkan dan bekerja di Indonesia dan memiliki pengetahuan terutama mengenai kondisi perekonomian, budaya dan bahasa Indonesia;
- Dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Perusahaan lain. Tidak termasuk dalam rangkap jabatan yaitu:
 - Anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya;

- b. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba. Sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan.
- 10. Memiliki sertifikasi keahlian di bidang pembiayaan dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi;
- 11. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- 12. Memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh regulator dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 13. Tidak pernah menjadi anggota Direksi pada Perusahaan yang sama dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.

Kriteria dan Persyaratan Direksi

Kriteria Direksi Perusahaan adalah:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.

Seluruh anggota Direksi dan Komisaris telah memenuhi persyaratan formal dan material yang berlaku, persyaratan formal bersifat umum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan persyaratan material bersifat khusus, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perseroan.

Proses Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Mekanisme nominasi, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui keputusan pemegang saham yang kemudian berlaku efektif melalui Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) sesuai dengan peraturan dari OJK selaku regulator di sektor keuangan. Mekanisme pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan persetujuan pemegang saham dan dinyatakan tidak memenuhi kriteria dengan alasan sebagai berikut:

1. Terbukti tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam Kontrak Manajemen.
2. Terbukti tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.
3. Terbukti tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
4. Terbukti terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara.
5. Terbukti melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang menjadi kewajiban seluruh anggota Direksi.
6. Terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.
7. Mengundurkan diri.

Calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi melalui beberapa rangkaian proses seleksi sebelum diusulkan oleh Pemegang Saham yang memiliki wewenang untuk mengusulkan dalam RUPS. Sebagai bagian dari Mandiri grup, pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Prosedur dan mekanisme seleksi calon Direksi berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG, yaitu Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, dan Kewajaran.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur penetapan remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dilakukan oleh pemegang saham melalui RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Perseroan.

Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan basis formula yang ditetapkan oleh pemegang saham melalui RUPS dan telah melalui kajian oleh Dewan Komisaris dan Komite Nominasi & Remunerasi melalui pendalaman yang dilakukan oleh pemegang saham. Keputusan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS.

Skema Prosedur Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi



Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Komponen penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas, serta Tantiem/Insentif Kinerja sebagai bonus kerja. Berikut struktur remunerasi dan komponennya bagi Dewan Komisaris dan Direksi dapat disampaikan:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris	Struktur Remunerasi Direksi
<p>Honorarium Dewan Komisaris Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perhitungan gaji Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama; Perhitungan gaji Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama. 	<p>Gaji Direksi Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Direksi Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal pemegang saham. Gaji anggota Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan sebesar 90% dari Gaji Direktur Utama. RUPS dapat menetapkan Faktor Besaran Jabatan yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud apabila dipandang lebih dapat merefleksikan keadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi serta kemampuan Perseroan.
<p>Tunjangan Dewan Komisaris Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Dewan Komisaris selain Honorarium.</p>	<p>Tunjangan Direksi Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi selain Gaji.</p>

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris	Struktur Remunerasi Direksi
<p>Fasilitas Dewan Komisaris Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas/Asuransi Kesehatan • Fasilitas Bantuan Hukum 	<p>Fasilitas Direksi Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas/Asuransi Kesehatan • Fasilitas Bantuan Hukum
<p>Tantiem/Insentif Kinerja Dewan Komisaris Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris. 	<p>Tantiem Direksi Tantiem diberikan sebagai tambahan berupa Penghargaan Jangka Panjang (<i>Long Term/Incentive/LII</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tantiem, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Direksi apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. • Insentif Kinerja, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.

Kebijakan Dasar Terkait Indikator dan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Perusahaan. Hasil kajian tersebut sebagai bahan usulan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Pemegang Saham. Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Berdasarkan Pasal 96 ayat (2) kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Berikut adalah aspek kajian penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.



Dewan Komisaris menentukan dasar penetapan remunerasi bagi Direksi berbasis metode *balance scorecard* dengan menggunakan parameter yang telah ditentukan.

Penilaian kinerja Direksi selama tahun 2023 dilakukan berdasarkan metode *balance scorecard* dengan menggunakan parameter sebagai berikut:

1. Pencapaian kinerja sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yaitu meliputi pencapaian target angka-angka keuangan seperti volume pembiayaan, profitabilitas, pembiayaan *joint financing*, *cost efficiency ratio*, *cost of credit* dan piutang pembiayaan bermasalah.
2. Penyempurnaan dan pengembangan proses bisnis pembiayaan, meliputi antara lain proses kredit, proses operasional, proses pemasaran, dan proses *collection*.
3. Perluasan jaringan usaha dan peningkatan kerja sama aliansi.
4. Strategis dengan grup serta pengembangan kerja sama dengan *dealer* dan *showroom*.
5. Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan *corporate branding*.

Transparansi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023

Selama tahun 2023, Perseroan telah memperhitungkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

Komponen Remunerasi	Jabatan	
	Dewan Komisaris (3 Posisi/Jabatan) (Rp)	Direksi (3 Posisi/Jabatan) (Rp)
Gaji/Honorarium	2.511.490.000	5.673.600.000
Tunjangan	2.465.299.335	7.737.573.464
Asuransi Kesehatan	128.947.739	163.115.200
Jamsostek	-	239.507.450
Bonus/Tantiem	2.603.250.000	6.750.000.000
Tunjangan Hari Raya	229.236.400	504.574.443

Berdasarkan data komponen remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi, berikut perhitungan nominal remunerasi berdasarkan jabatan sebagai berikut :

Perihal	Jumlah (Rp)
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris	7.938.223.474
Jumlah Remunerasi Direksi	21.068.370.557
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023	29.006.594.031

Informasi Tentang Rasio Gaji

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan. Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
2. Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;
3. Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
4. Rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

Informasi mengenai rasio gaji Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perseroan adalah sebagai berikut:

Perbandingan	2023	2022
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1:1,18	1:1,18
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1:1,36	1:1,36
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan dan pegawai tertinggi	1:1,27	1:1,27
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1:64,37	1:64,75

Keterangan: Yang dimaksud karyawan tertinggi pada tabel di atas adalah Direksi, sementara karyawan terendah adalah Staf.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Dewan Komisaris

Pedoman kerja Dewan Komisaris mengatur rapat paling sedikit setiap 2 (dua) bulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Di tahun 2023, Dewan Komisaris mengadakan Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 6 kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat-rapat tersebut.

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris Pada Rapat Internal Dewan Komisaris

Dewan Komisaris	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	Kehadiran (%)
Rico Adisurja Setiawan (Komisaris Utama)	6	6	100%
Totok Priyambodo (Komisaris)	6	6	100%
Fendy Eventius Mugni (Komisaris Independen)**	3	3	100%
Ravik Karsidi (Komisaris Independen)*	3	3	100%
Rata-rata			100%

*) diberhentikan pada RUPS tanggal 27 Juni 2023

***) aktif pada Tanggal 8 Desember 2023 setelah keputusan hasil *fit and proper test* oleh OJK

Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris dan Kehadiran Dewan Komisaris

Tempat & Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Alasan Ketidakhadiran Dewan Komisaris yang Tidak Hadir
Jakarta, 24 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Komite Audit Pembahasan Laporan Komite Pemantau Risiko 	Dewan Komisaris	-
Jakarta, 24 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Komite Audit Pembahasan Laporan Komite Pemantau Risiko Pembahasan Penambahan Pinjaman Fasilitas Bank dan Paparan Penerbitan Obligasi 	Dewan Komisaris	-
Jakarta, 27 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Komite Audit Pembahasan Laporan Komite Pemantau Risiko Pembahasan Penambahan Pinjaman Fasilitas Bank of India, Bank Maspion, Bank Danamon, Bank Panin, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) 	Dewan Komisaris	-
Jakarta, 21 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Komite Audit Pembahasan Laporan Komite Pemantau Risiko 	Dewan Komisaris	-
Jakarta, 20 Oktober 2023	Pembahasan Persiapan Penilaian <i>Corporate Governance Perception Index</i> (CGPI)	Dewan Komisaris	-
Jakarta, 2 November 2023	Pembahasan Lanjutan Terkait Usulan RKAP 2024	Dewan Komisaris	-

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris Pada RUPS

Dewan Komisaris	Jumlah RUPS	Jumlah Kehadiran	Kehadiran (%)
Rico Adisurja Setiawan (Komisaris Utama)	2	2	100%
Totok Priyambodo (Komisaris)	2	2	100%
Fendy Eventius Mugni (Komisaris Independen)**	1	1	100%
Ravik Karsidi (Komisaris Independen)*	1	1	100%

*) diberhentikan pada RUPS tanggal 27 Juni 2023

***) aktif pada Tanggal 8 Desember 2023 setelah keputusan hasil *fit and proper test* oleh OJK

Rapat Direksi

Direksi mengadakan rapat secara internal minimal 1 (satu) bulan sekali dengan agenda bulanan disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

Mekanisme pengambilan keputusan rapat yang dilaksanakan Direksi mengacu pada Pedoman Kerja. Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak. Rapat Direksi terdiri dari rapat internal dan rapat dengan mengundang Direksi untuk membahas berbagai aspek operasional dan pengelolaan finansial Perseroan.

Di sepanjang Tahun 2023, Direksi melaksanakan rapat sebanyak 51 kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

Rekapitulasi Kehadiran Direksi Pada Rapat Direksi

Direksi	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	Kehadiran (%)
Pinohadi G. Sumardi (Direktur Utama)	51	51	100%
William Francis Indra (Direktur)	51	50	98%
R. Eryawan Nurhariadi (Direktur)	51	48	94%
Rata-rata	51	49.67	97.39%

Risalah Rapat dan Kehadiran Direksi

Tempat & Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Alasan Tidak Hadir
Jakarta, 2 Januari 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 9 Januari 2023	Diskusi Umum BOD Pembahasan Finalisasi MPI 2023	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 16 Januari 2023	Diskusi Umum BOD Pembahasan <i>Collection</i> Reviu <i>Update Final Internal Trip</i> Pembahasan HUT dan Rakernas MTF 2023 Pembahasan Kebijakan WO dan Repo Sold	Seluruh Direksi	-

Risalah Rapat dan Kehadiran Direksi

Tempat & Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Alasan Tidak Hadir
Jakarta, 30 Januari 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
	Update Rapat kerja Sales & Credit (Billionaire Stars) & Event Best Employee (Star of The Year)		
	Pembahasan Profil Risiko Q4-2022		
	Pembahasan Performance Cabang EPD Terburuk (Cab. Kelapa Gading, Pecenongan, Bandung 2, Surabaya 2)		
Jakarta, 6 Februari 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 13 Februari 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
	Pembahasan Kick off Meeting AR dan SR 2022		
Jakarta, 20 Februari 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
	Pembahasan OS Klaim Jamkrindo		
	Pembahasan Materi Board Forum Q4-2022		
	Pembahasan Struktur Organisasi MTF		
Jakarta, 27 Februari 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
	Pembahasan Hasil Konfirmasi & Pemutusan Sanksi Karyawan atas Temuan Audit BMRI		
Jakarta, 6 Maret 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
	Pemaparan EPD Nasional		
Jakarta, 13 Maret 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 14 Maret 2023	Update Hasil Investigasi Cabang Matraman	Seluruh Direksi	-
	Pembahasan Management Letter		
Jakarta, 20 Maret 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
	Presentasi Cabang Performance EPD Terburuk (Cab. Palembang 2, Bukittinggi)		
Jakarta, 27 Maret 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
	Update Materi Tingkat Kesehatan Perusahaan - OJK		
	Update Management Aspiration BPR Retail 2023		
Jakarta, 3 April 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
	Pembahasan Sistem Accounting		
	Pembahasan Analisa Profit Rp 1 Triliun		
	Update Business Process Re-Engineering BPR Fleet 2023		
Jakarta, 10 April 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
	Pembahasan WMP Credit Retail		
	Pembahasan VIP Trip		
Jakarta, 17 April 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
	Pembahasan Event Periklindo Electric Vehicles Show 2023		
	Pembahasan Itinerary Trip		
	Pembahasan Channeling Fintech		
	Pembahasan Profit Rp 1.2 T		

Risalah Rapat dan Kehadiran Direksi

Tempat & Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Alasan Tidak Hadir
Jakarta, 2 Mei 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
	Update Investor Gathering MTF 2023		
	Pembahasan Kebutuhan Sewa Ruangan MTF HO		
Jakarta, 8 Mei 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 16 Mei 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
	Update Investor Gathering MTF 2023		
Jakarta, 22 Mei 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
	Pembahasan MTF Golf Tournament 2023		
	Pembahasan Usulan Inisiatif <i>Direct Impact Project</i> terkait Efisiensi		
Jakarta, 29 Mei 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 5 Juni 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
	Pembahasan Raker <i>Best Employee All SPV & Trip Best Employee</i>		
Jakarta, 19 Juni 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
	Pembahasan GIIAS Semarang 2023		
Jakarta, 26 Juni 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
	Update Hasil Keputusan Sanksi atas Hasil Investigasi Cabang Padang, Matraman, dan Bandung I		
Jakarta, 3 Juli 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 10 Juli 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
	Update Perubahan Grading Customer MTF		
Jakarta, 17 Juli 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
	Update Golf Tournament 3.0		
	Pembahasan GIIAS 2023		
	Pembahasan <i>Shared Service Mandiri Group (Project Orion)</i>		
	Update Penerapan ESG di Mandiri Group		
Jakarta, 24 Juli 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
	Update Board Forum Q2-2023 (MTF & MUF sebagai Host)		
Jakarta, 31 Juli 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
	Pembahasan Reviu Komposisi Sektor Batubara		
Jakarta, 7 Agustus 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
	Update Pelaksanaan Board Forum Q2 2023		
Jakarta, 8 Agustus 2023	Pembahasan Laporan Rutin kepada Regulator	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 14 Agustus 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
	Pembahasan Rencana Kerja <i>Anti Fraud</i> & Perubahan Struktur Komite <i>Fraud</i> & Komite Disiplin		
Jakarta, 21 Agustus 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 28 Agustus 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
	Update Komite Project - Project Digital		
	Restrukturisasi dan Alokasi Penjualan Lelang		

Risalah Rapat dan Kehadiran Direksi

Tempat & Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Alasan Tidak Hadir
Jakarta, 4 September 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 11 September 2023	Diskusi Umum BOD Pembahasan Hasil Keputusan Sanksi atas Hasil Audit Cabang Kelapa Gading, Kebon Jeruk, dan Bintaro	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 18 September 2023	Diskusi Umum BOD Final <i>Update</i> Spectravel - <i>Reward Trip</i> untuk Dealer Nasional Pembahasan Penyelesaian Klaim Jamkrindo	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 25 September 2023	Diskusi Umum BOD Pembahasan <i>Low DP NC Passenger</i> & Penerapan <i>NC Commercial Truck</i> <i>Update</i> Strategi Bisnis dan <i>Financial Projection</i> 2023 dan 2024 Pembahasan Hasil Audit Umum <i>Operation</i> , Legal, & SLIK serta Hasil Investigasi Cabang Bandung I	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 2 Oktober 2023	Diskusi Umum BOD <i>Update</i> Strategi Bisnis 2024	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 9 Oktober 2023	Diskusi Umum BOD Pembahasan Strategi <i>Corporate Secretary</i>	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 16 Oktober 2023	Diskusi Umum BOD Pembahasan Program <i>Whitelist</i> Bank Mandiri & <i>Event</i> MTF Autofiesta	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 23 Oktober 2023	Diskusi Umum BOD <i>Update</i> Hasil Keputusan Sanksi atas Hasil Investigasi: Reg. 5,6,7,8, Padang, Multiguna Palembang	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 30 Oktober 2023	Diskusi Umum BOD <i>Update</i> BPR <i>Fleet</i> & <i>Retail</i>	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 6 November 2023	Diskusi Umum BOD Pembahasan Permintaan Tanggapan MTF atas Surat dari BMRI terkait Kasus Kualitas Cabang Palembang	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 13 November 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 20 November 2023	Diskusi Umum BOD Pembahasan Hasil Temuan <i>Fraud</i> pada Bisnis Proses MTF (Cab. Matraman, Kebon Jeruk, Bintaro, & Denpasar) Pembahasan Pelaksanaan <i>Reviu Metodologi Penilaian</i> Tingkat Kesehatan MTF periode Semester 2 - 2023 Pembahasan Penyelesaian Klaim Jamkrindo	Seluruh Direksi	-
Jakarta, 27 November 2023	Diskusi Umum BOD Pembahasan <i>Sponsorship</i> PEVS 2024 Pembahasan Lanjutan Materi <i>Fraud Case</i> (<i>Update</i> Direktur Bank Mandiri) Pembahasan Ketentuan Kewenangan Pejabat Pemutus Pembiayaan <i>Corp. Fleet</i>	Seluruh Direksi	-

Risalah Rapat dan Kehadiran Direksi

Tempat & Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Alasan Tidak Hadir
Jakarta, 4 Desember 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
	Pembahasan Struktur Organisasi Fungsi <i>Credit & AR</i>		
	Pembahasan <i>Profitability by Holding</i>		
	Pembahasan Rancangan <i>Annual Report (AR) & Sustainability Report (SR)</i>		
Jakarta, 11 Desember 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
	<i>Update Performance</i> Implementasi MTF 1Access		
	Pembahasan <i>Support Data Closing</i> Laporan Keuangan		
Jakarta, 18 Desember 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-
	Pembahasan Kondisi Likuiditas & <i>Pricing MTF - ALCO</i>		
	Pembahasan Asuransi Kesehatan		
	Pembahasan Penerapan Organ Manajemen Risiko sesuai Permen BUMN		
Jakarta, 27 Desember 2023	Diskusi Umum BOD	Seluruh Direksi	-

Rekapitulasi Kehadiran Direksi Pada RUPS

Direksi	Jumlah RUPS	Jumlah Kehadiran	Kehadiran (%)
Pinohadi G. Sumardi (Direktur Utama)	2	2	100
William Francis Indra (Direktur)	2	2	100
R. Eryawan Nurhariadi (Direktur)	2	2	100

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat gabungan merupakan bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam risalah rapat. Keputusan rapat dibuat berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat atau diambil berdasarkan suara terbanyak serta mengikat untuk dilaksanakan tindak lanjutnya. Rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Risalah rapat akan disiapkan Sekretaris Perusahaan setelah rapat dengan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menghadiri rapat.

Sepanjang tahun 2023, rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan 5 (lima) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan

Jabatan	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	Kehadiran (%)
Rico Adisurja Setiawan (Komisaris Utama)	5	5	100%
Totok Priyambodo (Komisaris)	5	5	100%
Fendy Eventius Mugni (Komisaris Independen)**	2	2	100%

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan

Jabatan	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	Kehadiran (%)
Ravik Karsidi (Komisaris Independen)*	3	3	100%
Pinohadi G. Sumardi (Direktur Utama)	5	5	100%
William Francis Indra (Direktur)	5	5	100%
R. Eryawan Nurhariadi (Direktur)	5	4	80%
Rata-rata			98%

*) diberhentikan pada RUPS tanggal 27 Juni 2023

**) aktif pada Tanggal 8 Desember 2023 setelah keputusan hasil *fit and proper test* oleh OJK

Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Tempat & Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Alasan Ketidakhadiran Dewan Komisaris yang Tidak Hadir
Jakarta, 24 Januari 2023	Update Kondisi COVID-19 di Lingkungan MTF dan Update Performance MTF	Dewan Komisaris dan Direksi	-
Jakarta, 24 Maret 2023	Update Performance MTF	Dewan Komisaris dan Direksi	-
Jakarta, 27 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update Performance MTF Penyampaian Revisi RKAP 2023 	Dewan Komisaris dan Direksi	-
Jakarta, 21 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Penambahan Pinjaman Fasilitas Bank CCB Indonesia, Bank DBS, Bank BRI & CBC Mandiri Update Performance MTF 	Dewan Komisaris dan Direksi	-
Jakarta, 20 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update Performance MTF Usulan RKAP 2024 	Dewan Komisaris dan Direksi	-

Pengungkapan Hubungan Afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/ atau Pengendali

Pemegang Saham adalah badan hukum yang secara sah memiliki saham Perseroan. Pemegang saham mayoritas Perseroan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang memiliki saham Perseroan sebanyak 51,00%. Sedangkan PT Tunas Ridean memiliki 49,00% saham Perseroan. Kedua Pemegang Saham ini bertindak sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali Pemegang Saham Utama/ Pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi saling menghormati pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan antara lain tanggung jawab, kewajiban, wewenang, dan hak masing-masing.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, antar anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda. Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Utama/Pengendali dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama & Jabatan	Hubungan Afiliasi		
	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham
Dewan Komisaris			
Rico Adisurja Setiawan (Komisaris Utama)	X	X	V
Totok Priyambodo (Komisaris)	X	X	V
Fendy Eventius Mugni (Komisaris Independen)	X	X	X
Direksi			
Pinohadi G. Sumardi (Direktur Utama)	X	X	X
William Francis Indra (Direktur)	X	X	X
R. Eryawan Nurhariadi (Direktur)	X	X	X

Keterangan: V= terdapat adanya hubungan | X = tidak terdapat adanya hubungan

Pengungkapan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, berkaitan dengan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

- Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 Perusahaan Pembiayaan lain;
- Tidak termasuk rangkap jabatan apabila:
 - anggota Dewan Komisaris nonindependen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham perusahaan pembiayaan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau
 - anggota Dewan Komisaris menduduki jabatannya pada organisasi atau lembaga nirlaba. Sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan.

Selain itu sebagai perusahaan emiten, anggota Dewan Komisaris juga berlaku ketentuan mengenai rangkap jabatan yang diatur pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang antara lain mengatur sebagai berikut:

- Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain; dan
 - anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain.
- Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) emiten atau perusahaan publik lain;
- Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;

4. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lain yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan OJK ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

Demikian juga halnya dengan anggota Direksi, Mengenai rangkap jabatan anggota Direksi Perseroan antara lain diatur dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan anggota Direksi Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan rangkap jabatan kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan pembiayaan lain. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila anggota Direksi bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan yang memiliki usaha di bidang pembiayaan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Perusahaan.

Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, ketentuan rangkap jabatan anggota Direksi diatur sebagai berikut:

1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu)

- emiten atau perusahaan publik lain;
- b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lain; dan/atau
- c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

2. Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
3. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan Peraturan OJK ini, berlaku ketentuan yang lebih ketat.

Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan OJK ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

Berdasarkan data yang kami miliki sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Tahunan ini, seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi masih memenuhi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014, POJK No. 29/POJK.05/2020 maupun Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.

Berikut disampaikan transparansi rangkap jabatan yang dimiliki Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan per 31 Desember 2023.

Nama & Jabatan	Kepengurusan pada Perusahaan Lain		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris	Sebagai Anggota Direksi	Jabatan Lainnya
Dewan Komisaris			
Rico Adisurja Setiawan (Komisaris Utama)	V	V	V
Totok Priyambodo (Komisaris)	X	X	V
Fendy Eventius Mugni (Komisaris Independen)	V	X	V
Direksi			
Pinohadi G. Sumardi (Direktur Utama)	X	X	X
William Francis Indra (Direktur)	X	X	X
R. Eryawan Nurhariadi (Direktur)	X	X	X

Komisaris Utama, Rico Adisurja Setiawan, memiliki rangkap jabatan sebagai berikut:

- Tahun 1997 – Sekarang: Direktur Utama PT Tunas Mobilindo Parama
- Tahun 2005 – Sekarang: Direktur Utama PT Tunas Asset Sarana
- Tahun 2005 – Sekarang: Direktur Utama PT Surya Mobil Megahtama
- Tahun 2005 – Sekarang: Direktur PT Surya Sudeco
- Tahun 2010 – Sekarang: Direktur Utama PT Tunas Ridean
- Tahun 2010 – Sekarang: Komisaris PT Rahardja Ekalancar
- Tahun 2013 – Sekarang: Komisaris Utama PT Tunas Dwipa Matra
- Tahun 2015 – Sekarang: Komisaris Utama PT Asia Surya Perkasa
- Tahun 2017 – Sekarang: Komisaris Utama PT Mobilindo Perkasa

- Tahun 2017 – Sekarang: Komisaris Utama PT Mandiri Tunas Finance

Komisaris Independen, Fendy Eventius Mugni, memiliki rangkap jabatan sebagai berikut:

- Tahun 2015 – Sekarang: Komisaris Independen PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
- Tahun 2023 – Sekarang: Komisaris Independen PT Mandiri Tunas Finance

Komisaris, Totok Priyambodo, memiliki rangkap jabatan sebagai berikut:

- Tahun 2020 – Sekarang: Senior Executive Vice President Commercial Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Tahun 2022 – Sekarang: Komisaris PT Mandiri Tunas Finance

Pengungkapan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan perusahaan lainnya senantiasa diungkapkan secara berkala melalui daftar kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyampaikan keterbukaan transaksi pembelian dan penjualan surat berharga kepada OJK paling lambat 10 hari sejak terjadinya transaksi. Berikut disampaikan transparansi kepemilikan saham Perseroan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, dan kepemilikan saham perusahaan lain di atas 5% oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Per 31 Desember 2023

Nama & Jabatan	Kepemilikan Saham	
	Mandiri Tunas Finance	Perusahaan Lain >5%
Dewan Komisaris		
Rico Adisurja Setiawan (Komisaris Utama)	X	X
Totok Priyambodo (Komisaris)	X	X
Ravik Karsidi (Komisaris Independen)	X	X
Direksi		
Pinohadi G. Sumardi (Direktur Utama)	X	X
William Francis Indra (Direktur)	X	X
R. Eryawan Nurhariadi (Direktur)	X	X

Perseroan tidak memiliki program maupun kebijakan kepemilikan saham baik oleh manajemen maupun karyawan. Perseroan juga tidak memperdagangkan sahamnya di bursa saham manapun. Dengan demikian, tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh manajemen atau karyawan.

Organ Pendukung Dewan Komisaris



Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite, yakni Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko.

Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu dalam pelaksanaan pengawasan atas fungsi Direksi dalam mengelola Perseroan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komite Audit dapat memberikan pendapat dan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya termasuk pengawasan terhadap sistem dan proses pelaporan keuangan, proses audit atas laporan keuangan Perseroan, evaluasi atas pelaksanaan pengawasan internal (*internal control*). Termasuk juga, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal, melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan perseroan undang-undang di bidang Pembiayaan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Seluruh anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada pemegang saham. Komite Audit dibentuk dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Secara umum, Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha Perseroan dalam melaksanakan fungsi *oversight*, terutama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal atas pengelolaan perseroan, dan ketaatan terhadap undang-undang serta peraturan yang berlaku, terutama dalam hal:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perseroan.
3. Mengawasi kualifikasi dan kemandirian fungsi internal dan eksternal audit untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, termasuk kepatuhan perseroan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Kriteria Anggota Komite Audit

Anggota Komite Audit harus memahami kegiatan usaha Perseroan dan memiliki integritas yang tinggi, memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Anggota Komite Audit juga wajib memahami laporan keuangan, proses audit, manajemen risiko, dan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai

peraturan perundang-undangan pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Kriteria menjadi anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik
2. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
4. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan perusahaan pembiayaan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau Kantor Jasa Penilai Publik yang memberikan jasa audit dan atau jasa konsultasi lainnya kepada perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat sebagai Komite Audit.
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan usaha perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
8. Tidak memiliki saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.

9. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.

Masa Tugas

Keanggotaan Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, dengan masa jabatan yang tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan calon pengganti, honorarium, dan tunjangan anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, penggantian bertahap/tidak bersamaan, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

Komposisi dan Susunan Anggota Komite Audit Tahun 2023

Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang komisaris independen dan 2 (dua) orang anggota. Ketua Komite Audit adalah salah seorang anggota komite audit yang merupakan Komisaris Independen Perseroan. Anggota Komite Audit adalah tenaga ahli yang bukan merupakan pegawai Perseroan dan tidak mempunyai keterkaitan finansial dengan Perseroan. Pembentukan Komite Audit Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pada tahun 2023, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Ke-
Fendy Eventius Mugni	Ketua Komite Audit/ Komisaris Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/008/2023 Tentang Penetapan Anggota Komite Audit	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen	Ke-1
Indra Riyawan	Anggota/Pihak Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/010/2020 Tentang Perubahan Anggota Komite Audit	9 Oktober 2020 – 9 Oktober 2023	Ke-2
Marlan Marthias Achmad	Anggota/Pihak Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/007/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit	12 Desember 2023 – 12 Desember 2026	Ke-1

Profil Komite Audit

Profil Ketua Komite Audit, Fendy Eventius Mugni, dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Sedangkan profil dari anggota Komite Audit non Komisaris dari pihak independen adalah sebagai berikut:



Nama	Indra Riyawan
Jabatan	Anggota Komite Audit
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/008/2023 Tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Audit.
Masa Jabatan	15 September 2023 – 15 September 2026
Periode ke-	Ke-2
Usia	48 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Riwayat Pendidikan	Sarjana (S1) Mechanical Engineering dari Institut Sains & Teknologi Nasional (2003)
Riwayat Pekerjaan	Pernah menjabat sebagai Administration Control General Manager di PT Tunas Ridean (2017 – 2020), Administration General Manager di PT Asia Surya Prakasa (2015 - 2017), Business Process, Administration & GA Manager di PT Tunas Dwipa Matra (2009 - 2014) dan Logistic Planning & Development Officer di PT Toyota Astra Motor (2000 - 2009). IT Consultant (2020-Saat ini).
Rangkap Jabatan	Di Dalam Perusahaan: Tidak ada Di Luar Perusahaan: Tidak ada



Nama	Marlan Marthias Achmad
Jabatan	Anggota Komite Audit
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/007/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit
Masa Jabatan	15 September 2023 – 15 September 2026
Periode ke-	Ke-1
Usia	56 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Magister Manajemen, Management Keuangan, Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta, 2005 Sarjana Ekonomi, S1 Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI, Jakarta, 1995

Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Vice President Wholesale Risk Solution, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta 2022 sd Maret 2023. • Vice President Risk Management, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta, 2017 sd 2022 • Regional Chief Executive Officer (CEO), Regional II PT Bank Syariah Mandiri, Palembang, 2015 sd 2017. • Pemegang Kewenangan pemutus pembiayaan ,credit risk taking unit level RCEO, PT Bank Syariah Mandiri, Palembang, 2015 sd 2017. • Vice President Consumer Loan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta, 2014 sd 2015 • Vice President Audit Manager Retail, Product dan Distribution IV Audit, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Surabaya, 2012 sd 2014 • Vice President Department Head Operation, Personnel & Counterpart Relation Audit Group, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta, 2011 sd 2012
Rangkap Jabatan	Di Dalam Perusahaan: Tidak ada Di Luar Perusahaan: Tidak ada

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit merupakan pribadi yang profesional dan tidak memiliki hubungan dengan Perseroan guna menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas, dan tanggung jawabnya. Komite Audit yang dibentuk Perseroan telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman, dan integritas. Transparansi independensi Komite Audit terlihat dalam tabel berikut:

Aspek Independensi	Fendy Eventius Mugni	Indra Riyawan	Marlan Marthias Achmad
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	X	X	X
Memiliki hubungan kepengurusan di Perseroan ataupun di perusahaan afiliasi	X	X	X
Memiliki saham Perseroan	X	X	X
Memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan sesama anggota komite	X	X	X
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	X	X	X

Keterangan: V = ada | X = tidak ada

Piagam Komite Audit

Piagam Komite Audit disusun berdasarkan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Perusahaan telah menyusun Piagam Komite Audit sebagai pedoman kerja yang telah disahkan pada tanggal 30 Juli 2020 dan telah di perbaharui pada tanggal 1 Desember 2023. Piagam Komite Audit menjabarkan kedudukan, keanggotaan, tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Audit serta mengatur tata hubungan kerja antara Komite Audit dengan Dewan Komisaris, Direksi, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal.

Konflik dan Kode Etik

Komite Audit berkomitmen pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik yakni, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran untuk menghindari timbulnya konflik kepentingan. Sementara, dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit berpegang

teguh pada kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota Komite Audit maupun kode etik profesi Komite Audit.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit Perseroan berpegang teguh pada kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota Komite Audit, maupun kode etik profesi Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit tertuang dalam Piagam Komite Audit yang merupakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

2. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh internal maupun eksternal audit.
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
4. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan publik atas jasa yang diberikannya.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*.
6. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal perusahaan serta pelaksanaannya.
7. Melakukan penelaahan pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perseroan.
8. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perseroan, dan;
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas.

Sementara dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh internal maupun eksternal audit.
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perseroan.
4. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan

sistem pengendalian intern perusahaan serta pelaksanaannya.

5. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
6. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang dalam lingkup tugas dan kewajiban Komite Audit.
7. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas.

Wewenang Komite audit

Selain tugas dan tanggung jawab, Komite Audit juga diberikan wewenang khusus untuk mendukung pelaksanaan kerja yang sesuai dengan Piagam Komite Audit. Wewenang tersebut meliputi:

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di PT Mandiri Tunas Finance, serta Kantor Akuntan Publik yang memeriksa Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi, serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
2. Meminta laporan hasil pemeriksaan auditor internal dan auditor eksternal, serta institusi pengawas/pemeriksa lainnya.
3. Meminta audit Internal dan/atau auditor eksternal untuk melakukan pemeriksaan/investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi kecurangan pelanggaran hukum dan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
4. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Lingkup tugas masing-masing anggota Komite Audit sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Uraian Tugas
Fendy Eventius Mugni	Ketua Komite Audit/ Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan. • Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
Indra Riyawan	Anggota Komite Audit	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya. • Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh internal maupun eksternal audit.
Marlan Marthias Achmad	Anggota Komite Audit	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas. • Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern perusahaan serta pelaksanaannya.

Hubungan Kerja Komite Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berkomunikasi dengan auditor eksternal, auditor internal dan manajemen Perseroan. Peran Komite Audit dalam hubungannya dengan eksternal auditor adalah:

1. Melakukan reviu atas pekerjaan eksternal auditor.
2. Membahas hasil audit dengan eksternal auditor.
3. Apabila diperlukan, Komite Audit dapat melakukan pembahasan atas hasil audit dengan manajemen, eksternal auditor dan internal auditor.
4. Melakukan reviu kinerja eksternal auditor untuk memastikan kepatuhan eksternal auditor terhadap standar profesional yang berlaku, termasuk independensi eksternal auditor.

Peran Komite Audit dalam hubungan dengan Internal Audit adalah:

1. Menerima dan reviu laporan auditor internal.
2. Memonitor tindak lanjut hasil internal audit.
3. Meminta internal audit untuk melakukan pemeriksaan khusus/tertentu dengan izin dari Dewan Komisaris.
4. Memberi masukan mengenai isi Internal Audit Charter/Piagam Internal Audit.
5. Berkoordinasi dengan internal audit dan eksternal audit sehingga dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.
6. Mengkaji laporan internal audit yang berkaitan dengan benturan kepentingan, dan atau perbuatan melanggar hukum.

Sementara peran Komite Audit dalam hubungannya dengan Manajemen Perseroan adalah:

1. Mengevaluasi kecukupan pengungkapan hal-hal yang bersifat material dalam Laporan Keuangan perseroan.
2. Menilai kecukupan pengendalian intern dan kebijakan manajemen risiko perseroan.
3. Menilai kebijakan perseroan berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan internal maupun

eksternal perseroan yang berlaku, kode etik (*code of conduct*) dan benturan kepentingan (*conflict of interest*).

4. Memastikan bahwa manajemen perseroan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi dari internal audit dan eksternal audit.
5. Mengidentifikasi dan memantau permasalahan yang memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris.
6. Mengundang manajemen perseroan untuk hadir dalam rapat komite audit apabila diperlukan.

Laporan Komite Audit

Komite Audit berkewajiban membuat laporan secara tertulis dalam pelaksanaan kerjanya terhadap Dewan Komisaris terkait temuan dan kendala yang dihadapi oleh Perseroan. Adapun laporan yang dimaksud dalam hal:

1. Komite Audit membuat laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
2. Apabila Komite Audit menemukan hal-hal yang diperkirakan akan mengganggu kegiatan perseroan dan bersifat material Komite Audit akan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Audit membuat Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi Komite Audit mengikuti kebijakan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas/Pengendali Perseroan.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Perusahaan menyertakan anggota Komite Audit untuk mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi masing-masing anggota sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja.

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit Perusahaan telah mengikuti program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Peserta	Jenis/Materi Pelatihan	Penyelenggara	Waktu & Tempat
Fendy Eventius Mugni	Pembekalan Internal Komisaris	MTF	Jakarta, 24 Agustus 2023
	Sertifikasi Dasar Pembiayaan untuk Komisaris	SPPI	Jakarta 20 Agustus 2023
Indra Riyawan	-	-	-
Marlan Marthias Achmad	Konferensi Nasional Komite Audit 2023 "Mengawal Keberlanjutan dan Pertumbuhan Perseroan Melalui Pengawasan dan Pengendalian Risiko"	IKAI	Jakarta, 10 Oktober 2023

Rapat Komite Audit

Kebijakan Komite Audit melaksanakan rapat secara berkala baik dengan internal anggota maupun dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Rapat yang dilaksanakan oleh Komite Audit yakni:

1. Rapat Komite Audit Triwulanan dilaksanakan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan jadwal yang ditentukan, dan fokus pada pembahasan Laporan Keuangan (Neraca dan Laba Rugi) dan Kinerja Perseroan Triwulan.
2. Rapat Bulanan Komite Audit dilakukan sekali pada setiap bulan apabila diperlukan, dengan agenda rapat yang telah disepakati sebelumnya. Rapat bulanan tidak diadakan di bulan dimana diadakan rapat triwulanan. Fokus rapat bulanan adalah pada pembahasan hasil General Audit Internal.
3. Ketua Komite Audit dapat mengundang Dewan Komisaris, Direksi, Internal Auditor, Eksternal Auditor, Wakil Pemegang Saham dan pihak lain yang diperlukan untuk hadir dalam rapat.
4. Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan Risalah Rapat didistribusikan kepada seluruh peserta rapat untuk mendapat perhatian dan tindak lanjut.
5. Komite Audit dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diperlukan.

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah melangsungkan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan daftar kehadiran dan agenda sebagai berikut:

Frekuensi Kehadiran

Nama	Jabatan	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Fendy Eventius Mugni	Ketua	1	1	100%
Ravik Karsidi*	Ketua	3	3	100%
Indra Riyawan	Anggota	4	4	100%
Allen Situngkir**	Anggota	3	3	100%
Marlan Marthias Achmad	Anggota	1	1	100%

*) diberhentikan pada RUPS tanggal 27 Juni 2023

***) diberhentikan berdasarkan KEP.KOM/006/2023 Tentang Berakhir Masa Tugas Anggota Komite Audit Tanggal 15 September 2023

Risalah Rapat dan Kehadiran Komite Audit

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Keterangan
1	24 Januari 2023	Pembahasan Annual Audit Plan SKAIT MTF tahun 2023, Laporan Hasil Audit Khusus Cabang Sukabumi & Cabang Palu	Ravik Karsidi, Indra Riyawan, Allen Situngkir	-
2	24 Maret 2023	Tindak Lanjut Hasil Investigasi tim join Audit Bank Mandiri & MTF	Ravik Karsidi, Indra Riyawan, Allen Situngkir	-
3	27 Juni 2023	Laporan Hasil Audit Umum <i>Human Capital</i> Pengelolaan SPRINT Pengelolaan Pembiayaan <i>Channeling Financial Technology</i>	Ravik Karsidi, Indra Riyawan, Allen Situngkir	-
4	21 September 2023	Pembahasan Piagam Komite Audit & Audit Charter MTF Laporan Hasil Audit Khusus Cabang Bandung 1	Fendy E. Mugni Indra Riyawan, Marlan M. Achmad	Pergantian 2 anggota Komite Audit

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Audit pada Tahun 2023

Untuk memenuhi ketentuan penerapan GCG di lingkup Perseroan, program kerja yang menjadi tugas dan kewajiban Komite Audit di tahun 2023 adalah:

1. Melakukan reviu terhadap sistem pengendalian internal
Melakukan reviu terhadap rancangan dan implementasi dari sistem pengendalian internal Perseroan dengan memperhatikan kecukupan

kontrol dan ketersediaan ketentuan Internal yang salah satunya melalui Laporan Hasil Audit Internal. Hasil review tersebut sebagai masukan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan pengarahannya kepada manajemen dalam menyusun dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal maupun melaksanakan operasional Perseroan secara efektif dan efisien serta memperhatikan ketentuan regulator.

2. Melakukan reviu terhadap fungsi Internal Audit

Komite Audit telah melakukan reviu dan proses penilaian terhadap peran dan pelaksanaan fungsi Audit Internal dalam mengevaluasi rancangan dan implementasi sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola Perseroan. Proses reviu terhadap pelaksanaan fungsi internal audit diawali dengan penyusunan rencana kerja (*Annual Audit Plan - AAP*) internal audit tahun 2023 yang disampaikan pada rapat Komite Audit.

Rencana kerja Internal audit tersebut disusun berdasarkan 9 *Key Input* dan mempertimbangkan rekomendasi dari pihak Regulator, Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen untuk area-area yang ingin dilakukan audit. Pada rencana kerja tahun 2023 terdapat 29 (dua puluh sembilan) subyek audit umum, *mandatory* dan *consulting* yang harus dilakukan pemeriksaan di mana aktivitasnya melekat kepada proses kerja unit bisnis dan implementasi sistem/aplikasi.

Selain proses penyusunan rencana kerja, Komite Audit juga melakukan reviu terhadap pelaksanaan audit. Komite Audit telah melaksanakan seluruh aktivitas yang telah terlaksana pada tahun 2023, yaitu:

- Pemberian rekomendasi dan Persetujuan Audit Plan 2023 kepada Dewan Komisaris Tahun 2023.
- Kelemahan yang dijumpai dari hasil audit agar segera disampaikan kepada pihak manajemen untuk segera dilakukan tindak lanjutnya.
- Tindak lanjut hasil audit agar selalu dimonitor pelaksanaannya sehingga memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan perseroan.
- Pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap proses Penunjukan KAP untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2023.
- Pemberian evaluasi atas kinerja KAP audit Laporan Keuangan 2022 kepada Dewan Komisaris.

3. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Eksternal Audit

Komite Audit melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Audit Eksternal, melalui evaluasi terhadap proses pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan di tugaskan untuk melakukan audit

laporan keuangan tahunan, mengawasi dan mereviu pelaksanaan audit serta mereviu hasil audit laporan keuangan. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota perusahaan EY Global Limited).

4. Reviu penyajian Laporan Keuangan Publik

Komite Audit secara periodik melakukan reviu terhadap laporan keuangan sebelum dilakukan publikasi. Pelaksanaan reviu tersebut dimaksudkan untuk menilai kewajaran figur yang disajikan.

5. Realisasi Rapat Komite Audit selama tahun 2023

Pelaksanaan Rapat Komite Audit selama tahun 2023 adalah sebanyak 4 (empat) kali dengan materi pembahasan yang dapat dilihat pada bagian Risalah Rapat dan Kehadiran Komite Audit diatas.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Mengacu pada regulasi atau ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi & Remunerasi yang bertugas membantu pengawasan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi serta melakukan pengawasan dan penilaian atas efektivitas nominasi dan remunerasi.

Melalui Komite Nominasi & Remunerasi, proses nominasi dan remunerasi pengurus Perseroan dan organ pelaksana Perseroan lainnya dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan perkembangan usaha Perseroan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya terhadap pengelolaan Perseroan.

Keberadaan Komite Nominasi & Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Kriteria Anggota Komite Nominasi & Remunerasi

Anggota Komite Nominasi & Remunerasi wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan pengalaman serta persyaratan independensi, yaitu:

1. Memiliki integritas, obyektifitas dan etika yang tinggi.
2. Mempunyai pengetahuan yang memadai termasuk ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.
3. Paling sedikit salah satu dari anggota komite harus memiliki latar belakang pendidikan dan atau pengalaman kerja dibidang nominasi, remunerasi karyawan, atau *Human Resource Development*.
4. Mampu bersikap independen yaitu mampu melaksanakan tugas secara profesional tanpa

benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Konsultan Hukum, Kantor Konsultan Sumber Daya Manusia, Kantor Konsultan *Business Development*, atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa non *assurance*, dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat sebagai anggota komite oleh Dewan Komisaris.

Masa Jabatan

Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite sama dengan masa kerja penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan atau Rapat Umum Pemegang Saham. Masa jabatan anggota Komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris tidak boleh lebih lama daripada masa jabatan Dewan Komisaris. Dewan

Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite yang bukan anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan pertimbangan Ketua Komite yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Tahun 2023

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP.KOM/01/2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Mandiri Tunas Finance tertanggal 26 November 2014 yang telah di ubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP.KOM/02/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang perubahan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi. Di sepanjang tahun 2023, terdapat perubahan komposisi dan susunan Komite Nominasi & Remunerasi.

Komposisi dan susunan Komite Nominasi & Remunerasi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Ke-
Fendy Eventius Mugni	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/006/2023 tanggal 11 Desember 2023	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen	Ke-1
Totok Priyambodo	Anggota/Komisaris	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/006/2023 tanggal 11 Desember 2023	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris	Ke-2
Makah Indra Purnomo	Anggota/Kepala Divisi	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/006/2023 tanggal 11 Desember 2023	12 Desember 2023 – 12 Desember 2026	Ke-2

Profil Anggota Komite Nominasi & Remunerasi

Profil Fendy Eventius Mugni dan Totok Priyambodo sebagai ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Berikut disampaikan profil dari anggota Komite non Komisaris dari pihak independen.



Nama	Makah Indra Purnomo
Jabatan	Anggota Komite Nominasi & Remunerasi
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/006/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Penetapan Anggota Komite Nominasi & Remunerasi.
Masa Jabatan	12 Desember 2023 – 12 Desember 2026.

Periode ke-	Ke-2
Usia	43
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Tegal
Riwayat Pendidikan	Sarjana (S1) Teknik Elektro, Universitas Sultan Agung (2004)
Riwayat Pekerjaan	Kepala Cabang PT.NSS + NSS Finance periode 2004 sd 2010
Rangkap Jabatan	Di Dalam Perusahaan: Tidak ada
	Di Luar Perusahaan: Tidak ada

Independensi Komite Nominasi & Remunerasi

Seluruh anggota Komite Nominasi & Remunerasi merupakan pribadi yang profesional dan tidak memiliki hubungan dengan Perseroan guna menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas, dan tanggung jawabnya. Komite Nominasi & Remunerasi yang dibentuk Perseroan telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman, dan integritas. Komite Nominasi & Remunerasi juga tidak terkait dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun pemegang saham. Komite Nominasi & Remunerasi dalam melaksanakan tugasnya tunduk pada ketentuan/hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Perseroan.

Agar dapat bertindak independen, Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan khususnya dari pihak independen diwajibkan memenuhi kriteria independensi berikut:

1. Tidak memiliki saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal Anggota Komite memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/ Pengendali Perseroan.
3. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perseroan termasuk di dalamnya tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan entitas anak selain imbalan jasa yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas sebagai Anggota Komite.
4. Bukan pegawai Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

5. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan Perseroan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tidak memiliki anggota independen yang berasal dari luar Perusahaan, kecuali Fendi Eventius Mugni yang diangkat oleh Pemegang Saham sebagai Komisaris Independen dan bertindak sebagai Ketua Komite Nominasi & Remunerasi. Seluruh anggota Komite Nominasi & Remunerasi adalah profesional yang dipilih berdasarkan Peraturan OJK.

Piagam Komite Nominasi & Remunerasi

Perseroan telah menyusun piagam Komite Nominasi & Remunerasi yang ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2022 sebagai pendukung pelaksanaan fungsi dan perannya. Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi, mengatur beberapa hal terkait dengan:

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite
2. Kewenangan Komite
3. Rapat Komite
4. Organisasi Komite

Piagam *Charter* Komite Nominasi & Remunerasi ditinjau ulang (reviu) secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan pedoman tersebut selalu sejalan dengan kebutuhan, dan regulasi lain terkait dengan bisnis Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Tugas dan Tanggung Jawab yang Terkait dengan Fungsi Remunerasi

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Perseroan yang meliputi Gaji, Honorarium, Tunjangan

Hari Raya (THR), *Benefit* (medical, health, loan facility, dan lainnya), Bonus/Insentif (untuk karyawan), dan Tantiem (untuk Dewan Komisaris dan Direksi)

2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan ke RUPS serta kebijaksanaan remunerasi pejabat Eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi Perseroan telah sesuai dengan kinerja keuangan Perseroan dan pemenuhan cadangan sesuai peraturan/regulasi yang berlaku, evaluasi prestasi kerja individual, kewajaran peer group di dalam maupun luar Perseroan, dan strategi pengembangan Perseroan jangka panjang.

Tugas dan Tanggung Jawab yang Terkait dengan Fungsi Nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan, dan kriteria yang dibutuhkan dalam nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai nama calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Menelaah, dan mengusulkan perencanaan suksesi (*succession plan*) anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
5. Melakukan penilaian berdasarkan tolok ukur (*benchmark*) yang telah disusun sebagai bahan evaluasi kinerja dan pengembangan kemampuan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
7. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite penunjang Dewan Komisaris.
8. Merekomendasikan persetujuan perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi.

Fungsi dan Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam pelaksanaan kerjanya, Komite Nominasi & Remunerasi melekat fungsi dan wewenangnya yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

Fungsi Komite Nominasi & Remunerasi

Fungsi Komite Nominasi & Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Menyusun, melaksanakan dan menganalisa kriteria dan prosedur nominasi bagi calon Direksi dan Dewan Komisaris dan juga prosedur pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Mengidentifikasi calon Direksi dan Dewan Komisaris baik dari dalam maupun dari luar yang memenuhi syarat untuk diajukan/diangkat menjadi Direktur atau Dewan Komisaris.
3. Menyusun kriteria penilaian kinerja Direksi.
4. Mengusulkan suatu sistem remunerasi yang sesuai bagi Direksi dan Dewan Komisaris berupa sistem penggajian, pemberian fasilitas dan tunjangan, opsi yang diberikan serta sistem pensiun.
5. Memastikan pelaksanaan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan atau regulasi OJK, Kementerian Ketenagakerjaan, dan regulasi terkait lainnya termasuk hal-hal yang menjadi keputusan RUPS Perseroan.
6. Mendukung aktifitas pengembangan sumber daya manusia yang profesional.

Wewenang Komite Nominasi & Remunerasi

Wewenang Komite Nominasi & Remunerasi adalah:

1. Komite dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite.
2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana diatur dalam poin 1 di atas, Komite bekerja sama dengan mitra kerja di antaranya Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Penunjang Dewan Komisaris, tim terkait di level manajemen khususnya *Human Resources Development Division*, dan unit-unit kerja Perseroan terkait lainnya (jika diperlukan).
3. Komite mempunyai wewenang berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas Komite.
4. Apabila diperlukan Komite dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen di luar Komite atau membentuk *ad hoc team* yang perlu untuk membantu pelaksanaan tugasnya atas biaya Perseroan.
5. Komite melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Nominasi & Remunerasi

Lingkup tugas masing-masing Anggota Komite Nominasi & Remunerasi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Uraian Tugas
Fendy Eventius Mugni	Ketua Komite Nominasi & Remunerasi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Perseroan yang meliputi Gaji, Honorarium, Tunjangan Hari Raya (THR), <i>Benefit (medical, health, loan facility, dan lainnya)</i>, Bonus/Insentif (untuk karyawan), dan Tantiem (untuk Dewan Komisaris dan Direksi). Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan, dan kriteria yang dibutuhkan dalam nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
Totok Priyambodo	Anggota Komite Nominasi & Remunerasi	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa kebijakan remunerasi Perseroan telah sesuai dengan kinerja keuangan Perseroan dan pemenuhan cadangan sesuai peraturan/regulasi yang berlaku, evaluasi prestasi kerja individual, kewajaran peer grup di dalam maupun di luar Perseroan, dan strategi pengembangan Perseroan jangka panjang. Menelaah, dan mengusulkan perencanaan suksesi (<i>succession plan</i>) anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite penunjang Dewan Komisaris.
Makah Indra Purnomo	Anggota Komite Nominasi & Remunerasi	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan ke RUPS serta kebijaksanaan remunerasi pejabat Eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Merekomendasikan persetujuan perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi.

Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi & Remunerasi

Perseroan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite Nominasi & Remunerasi dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Nominasi & Remunerasi. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Komite Nominasi & Remunerasi.

Informasi kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Anggota Komite Nominasi & Remunerasi di sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Rapat Komite Nominasi & Remunerasi

Komite Nominasi & Remunerasi menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun sesuai dengan Pedoman Kerja Komite Nominasi & Remunerasi. Dalam pengambilan keputusan dalam rapat yang diselenggarakan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan secara musyawarah dan mufakat, serta pengambilan suara terbanyak bila tidak mendapatkan mufakat. Sementara, hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir dan didokumentasikan secara baik oleh Sekretaris Komite. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) dalam pengambilan keputusan yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Sepanjang tahun 2023, Komite Nominasi & Remunerasi melakukan sebanyak 3 (tiga) kali rapat, dengan risalah dan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut:

Rekapitulasi Kehadiran Rapat Komite Nominasi & Remunerasi

Nama	Jabatan	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Fendy Eventius Mugni	Ketua	2	2	100%
Totok Priyambodo	Anggota	3	3	100%
Makah Indra Purnomo	Anggota	3	3	100%

Agenda Rapat

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Keterangan
1	24 Maret 2023	<p>Proposal Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2023</p> <p>Proposal Tantiem atas pencapaian kinerja tahun 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris MTF</p>	<p>1. Totok Priyambodo</p> <p>2. Makah Indra Purnomo</p>	-
2	3 Agustus 2023	Tindak lanjut perpindahan tugas dari Komisaris independen sebelumnya kepada Komisaris yang baru.	<p>1. Totok Priyambodo</p> <p>2. Fendy Eventius Mugni</p> <p>3. Makah Indra Purnomo</p>	-
3	18 Oktober 2023	Pembahasan perihal Asuransi Kesehatan dan Benefit Karyawan.	<p>1. Totok Priyambodo</p> <p>2. Fendy Eventius Mugni</p> <p>3. Makah Indra Purnomo</p>	-

Kebijakan Remunerasi

Kebijakan Remunerasi Komite Nominasi & Remunerasi mengikuti kebijakan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas/Pengendali Perseroan.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Nominasi & Remunerasi pada Tahun 2023

Di tahun 2023 Komite remunerasi melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali untuk membahas evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Perseroan yang meliputi Gaji, Honorarium, *Benefit* (*medical, health, loan facility*, dan lainnya), Tantiem (untuk Dewan Komisaris dan Direksi) dan juga diskusi terkait remunerasi terbaru Direksi, komisaris, asuransi kesehatan karyawan dan benefit lainnya.

Komite Pemantau Risiko

Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko guna memantau pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan yang telah disusun oleh Direksi. Dasar hukum pembentukan Komite Pemantau Risiko dilandasi pada beberapa peraturan yang berlaku antara lain:

1. Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
2. Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Pembiayaan.
3. Surat Edaran OJK No. 1/SEOJK.05/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan.
4. Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
5. Peraturan OJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
6. Peraturan OJK No. 28/PJOK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Kriteria Anggota Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko, anggota Komite harus memenuhi berbagai kriteria dan persyaratan. Selain memiliki independensi, anggota Komite Pemantau Risiko diharuskan memiliki di antaranya integritas serta pengetahuan tentang bisnis yang dijalankan oleh Perseroan. Persyaratan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

1. Anggota Komite wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan dan pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko harus memiliki latar belakang manajemen risiko.
3. Memahami bisnis Perseroan khususnya manajemen risiko dan peraturan perundangundangan terkait dengan usaha pembiayaan.
4. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan dan laporan terkait pemantauan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko perusahaan pembiayaan.
5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terusmenerus melalui pendidikan dan pelatihan.
6. Bukan merupakan anggota Direksi serta memiliki integritas serta pengetahuan tentang bisnis yang dijalankan oleh Perseroan.

Masa Jabatan

Merujuk pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/008/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Pemantau Risiko, ditetapkan bahwa masa tugas anggota komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu waktu.

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko Tahun 2023

Pada tahun 2023, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Ke-
Fendy Eventius Mugni	Ketua Komite Pemantau Risiko/ Komisaris Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/007/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Komite Pemantau Risiko	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen	Ke-1
Totok Priyambodo	Anggota/Komisaris	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/002/2023 tentang Penetapan Anggota Komite Pemantau Risiko tanggal 02 Januari 2023	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris	Ke-1
Irwan Tri Nugroho	Anggota/Pihak Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/007/2024 tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Anggota Komite Pemantau Risiko	12 Desember 2023 – 12 Desember 2026	Ke-2
Indra Riyawan	Anggota/Pihak Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/008/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Perubahan Anggota Komite Pemantau Risiko	31 Agustus 2020 – 31 Agustus 2023	Ke-2

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Fendy Eventius Mugni dan Totok Priyambodo sebagai ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko, dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Untuk Profil Indra Riyawan sebagai anggota Komite juga dapat dilihat pada sub bab Profil Komite Audit. Berikut untuk profil dari anggota Komite Pemantau Risiko non Komisaris dari pihak independen.



Nama	Irwan Tri Nugroho
Jabatan	Anggota Komite Pemantau Risiko
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. OM/007/2024 tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Anggota Komite Pemantau Risiko.
Masa Jabatan	12 Desember 2023 – 12 Desember 2026
Periode ke-	Ke-2
Usia	39 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Bantul
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Doktor di bidang Banking and Finance dari University of Limoges, Perancis (2014). Magister di bidang Manajemen bidang Keuangan dari Universitas Gadjah Mada (2009). Sarjana di bidang Manajemen dari UNS (2006).
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> Staf pengajar bidang manajemen keuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret (UNS). Dosen dan peneliti tamu di berbagai perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri, Wakil presiden bidang program dan kerjasama internasional di Indonesian Finance Association (IFA).
Rangkap Jabatan	Di Dalam Perusahaan: Tidak ada Di Luar Perusahaan: Tidak ada

Independensi Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pribadi yang profesional dan tidak memiliki hubungan dengan Perseroan guna menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas, dan tanggung jawabnya. Komite Pemantau Risiko yang dibentuk Perseroan telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman, dan integritas.

Agar dapat bertindak independen, Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan khususnya dari pihak independen diwajibkan memenuhi kriteria independensi berikut:

1. Tidak memiliki saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal Anggota Komite memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua,

baik horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan.

3. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perseroan termasuk di dalamnya tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan entitas anak selain imbalan jasa yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas sebagai Anggota Komite.
4. Bukan pegawai Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
5. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan Perseroan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris.

Transparansi independensi Komite Pemantau Risiko terlihat dalam tabel berikut:

Aspek Independensi	Fendi Eventius Mugni	Totok Priyambodo	Irwan Tri Nugroho	Indra Riyawan
Memiliki saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.	X	X	X	X
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali.	X	X	X	X
Memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perseroan.	X	X	X	X
Merupakan orang yang memberikan jasa audit, non audit, atau jasa konsultan lainnya kepada Perseroan dalam waktu enam bulan terakhir.	X	X	X	X
Merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan.	X	X	X	X

Piagam Komite Pemantau Risiko

Piagam Komite Pemantau Risiko disusun dan disahkan oleh Dewan Komisaris di Jakarta pada 23 Agustus 2022. Piagam mengatur mengenai kedudukan, keanggotaan, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko serta memberikan batasan dan mengatur tata hubungan kerja antara Komite Pemantau Risiko dengan Komite lain di bawah Dewan Komisaris.

Wewenang serta Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang untuk dapat mengakses dokumen, data dan informasi perseroan, berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal dan manajemen risiko, melibatkan pihak independen yang diperlukan dan melakukan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris sehingga mampu dan

bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas komite pemantau risiko yang antara lain meliputi:

1. Mengarahkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance*.
2. Melakukan reviu atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas satuan kerja Manajemen Risiko.
4. Melakukan reviu atas laporan profil risiko dan/atau tingkat risiko.
5. Melakukan reviu atas laporan tingkat kesehatan keuangan Perseroan.
6. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Lingkup tugas masing-masing Anggota Komite Pemantau Risiko disusun atas dasar Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Peraturan OJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Komite Pemantau Risiko Jasa Keuangan Non-Bank dan Piagam Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan tanggal 23 Agustus 2022, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Uraian Tugas
Fendy Eventius Mugni	Ketua Komite Pemantau Risiko	Mengarahkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko sesuai dengan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> .
Totok Priyambodo	Anggota Komite Pemantau Risiko	Melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas satuan kerja Manajemen Risiko.
Irwan Tri Nugroho	Anggota Komite Pemantau Risiko	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan reviu atas laporan tingkat kesehatan keuangan Perseroan. Melakukan reviu atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
Indra Riyawan	Anggota Komite Pemantau Risiko	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan reviu atas laporan profil risiko dan/atau tingkat risiko. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Perseroan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite Pemantau Risiko dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Pemantau Risiko. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Komite Pemantau Risiko. Informasi lengkap tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Anggota Komite Pemantau Risiko di sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat triwulanan yang dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun. Komite juga dapat melakukan rapat bulanan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, Ketua Komite mengundang seluruh anggota komite dan seluruh anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat yang dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota yang ditunjuk secara tertulis apabila ketua berhalangan hadir.

Rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota termasuk seorang Komisaris dan pihak independen. Sepanjang tahun 2023, Komite Pemantau Risiko melakukan 4 (empat) kali rapat, dengan risalah dan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut Rekapitulasi Kehadiran sebagai berikut:

Frekuensi Kehadiran

Nama	Jabatan	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Fendy Eventius Mugni	Ketua	1	1	100%
Totok Priyambodo	Anggota	4	4	100%
Irwan Tri Nugroho	Anggota	4	4	100%
Indra Riyawan	Anggota	4	4	100%
Ravik Karsidi*	Ketua	3	3	100%

*Sdr Fendy Eventius Mugni diangkat menjadi Komisaris Independen dengan menggantikan Sdr Ravik Karsidi berdasarkan akta keputusan Pemegang Saham di luar RUPS untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan (Keputusan Sirkuler) berdasarkan akta No. 137 tanggal 28 Juni 2023.

Agenda Rapat

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Keterangan
1	Jakarta, 24 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Risk Appetite Statement (RAS) Periode Desember 2022</i> • <i>Performance Review Pembiayaan Periode Desember 2022</i> 	Komite Pemantau Risiko	-
2	Jakarta, 24 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Risk Appetite Statement (RAS) Periode Februari 2023</i> • <i>Performance Review Pembiayaan Periode Februari 2023</i> 	Komite Pemantau Risiko	-
3	Jakarta, 27 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Risk Appetite Statement (RAS) Periode Mei 2023</i> • <i>Performance Review Pembiayaan Periode Mei 2023</i> • <i>Operational Risk</i> 	Komite Pemantau Risiko	-
4	Jakarta, 21 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Risk Appetite Statement (RAS) Periode Agustus 2023</i> • <i>Performance Review Pembiayaan Periode Agustus 2023</i> 	Komite Pemantau Risiko	-

Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi Komite Pemantau Risiko mengikuti kebijakan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas/Pengendali Perseroan.

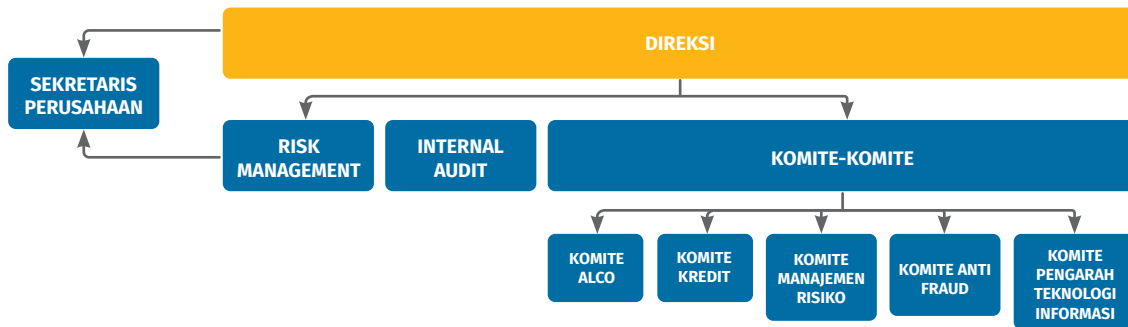
Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Pemantau Risiko pada Tahun 2023

Untuk memperkuat pengelolaan risiko di lingkup Perseroan, program kerja yang menjadi tugas dan kewajiban Komite Pemantau Risiko di tahun 2023 adalah:

1. Mengarahkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance*.
2. Melakukan reviu atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan.
3. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas satuan kerja manajemen risiko.
4. Melakukan reviu atas laporan profil risiko dan/atau tingkat risiko.
5. Melakukan reviu atas laporan tingkat kesehatan keuangan Perseroan.
6. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko.
7. Melakukan pembahasan *Risk Appetite Statement (RAS)*.
8. Profil Risiko Terintegrasi.

Organ Pendukung Direksi

Dalam menerapkan prinsip GCG, Direksi memiliki beberapa organ pendukung, baik organ yang dibentuk sesuai kepatuhan maupun yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan antara lain:



Komite-komite di bawah Direksi

Komite Aset dan Liabilitas/Asset Liabilities Committee (ALCO)

Komite Aset dan Liabilitas/Asset Liabilities Committee (ALCO) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penetapan strategi pengelolaan *asset & liability*, penetapan suku bunga dan likuiditas serta hal-hal lain yang terkait pengelolaan *asset & liability* Perusahaan.

Keanggotaan ALCO Tahun 2023

Jabatan	Dijabat Oleh
Ketua	President Director
Anggota Tetap dengan Hak Suara (Permanent Voting Member)	1. President Director 2. Corporate Finance & Business Strategic Director 3. Sales & IT Director
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara (Permanent Non-Voting Member)	1. Chief Risk Management 2. Chief Strategic Marketing 3. Chief AR Management & Digital 4. Retail Risk Management Division Head 5. Treasury & Finance Division Head 6. Corporate Planning & Performance Management Division Head 7. Corporate Risk Management Division Head 8. Strategic Marketing & Communication Division Head 9. Accounting, Tax, & Financial Planning Division Head
Sekretaris	Retail Risk Management Division Head
Sekretaris Alternatif 1	Treasury & Finance Division Head
Sekretaris Alternatif 2	Corporate Planning & Performance Management Division Head
Undangan Tidak Tetap Tanpa Hak Suara (Invitee)	Division Head dan/atau Department Head terkait materi yang hadir sebagai undangan

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

- Menetapkan, mengembangkan, dan mengkaji strategi Asset & Liability Management (ALM).
- Mengevaluasi dan memonitor *pricing* sehingga bisnis dapat dijalankan dengan tujuan menguntungkan Perusahaan.
- Memonitor limit likuiditas yang harus tersedia sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
- Mengelola aset maupun liabilitas yang sensitif terhadap perubahan suku bunga serta mengelola dampak perubahan tersebut untuk mendapatkan pendapatan bunga yang maksimal.
- Mengelola risiko pasar dan likuiditas sebagai pertimbangan bagi manajemen untuk mengetahui tingkat paparan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas.
- Menjadi penghubung terhadap Satuan Kerja lain dalam hal perencanaan keuangan dan anggaran, pengembangan produk baru, pengelolaan portfolio, kecukupan modal dan pertumbuhan yang stabil.

7. Melakukan pengambilan keputusan strategis di bidang pengelolaan aset dan liabilitas, namun tidak melampaui wewenang Direksi seperti menetapkan limit yang berkaitan dengan Risiko Likuiditas dan Risiko Pasar sesuai kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan.

Rapat ALCO

Rapat ALCO adalah forum anggota Komite untuk membahas setiap kebijakan dan keputusan strategis yang menyangkut pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan. Rapat ini diadakan dengan frekuensi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.

Rapat dipimpin oleh Ketua ALCO, apabila Ketua berhalangan hadir maka rapat dapat dipimpin oleh Anggota Tetap dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*) yang ditunjuk. ALCO dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 50% jumlah Anggota Tetap dengan Hak Suara yang ditunjuk (*Permanent Voting Member*). Pengambilan keputusan rapat ALCO adalah berdasarkan musyawarah mufakat yang dicantumkan dalam risalah rapat.

Sepanjang tahun 2023, rapat ALCO telah dilaksanakan sebanyak 12 kali, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di Perseroan. Beberapa pembahasan yang dilakukan dalam rapat ALCO terkait:

No.	Tempat & Tanggal	Agenda	Persentase Kehadiran Peserta (%)
1	Jakarta, 31 Januari 2023	Economic Outlook & Macroeconomic Forecast periode Desember 2022	100
		Perkembangan Pricing periode Desember 2022	
		Proyeksi Likuiditas Januari 2023	
		Usulan Cadangan Likuiditas Tahun 2023	
2	Jakarta, 23 Februari 2023	Economic Outlook & Macroeconomic Forecast periode Januari 2023	83.33
		Perkembangan Pricing periode Januari 2023	
		Proyeksi Likuiditas Februari 2023	
3	Jakarta, 29 Maret 2023	Economic Outlook & Macroeconomic Forecast periode Februari 2023	83.33
		Perkembangan Pricing periode Februari 2023	
		Proyeksi Likuiditas Maret 2023	
4	Jakarta, 26 April 2023	Economic Outlook & Macroeconomic Forecast periode Maret 2023	100
		Perkembangan Pricing periode Maret 2023	
		Proyeksi Likuiditas April 2023	
5	Jakarta, 30 Mei 2023	Economic Outlook & Macroeconomic Forecast periode April 2023	100
		Perkembangan Pricing periode April 2023	
		Proyeksi Likuiditas Mei 2023	
6	Jakarta, 27 Juni 2023	Economic Outlook & Macroeconomic Forecast periode Mei 2023	66.67
		Perkembangan Pricing periode Mei 2023	
		Proyeksi Likuiditas Juni 2023	
7	Jakarta, 20 Juli 2023	Economic Outlook & Macroeconomic Forecast periode Juni 2023	100
		Perkembangan Pricing periode Juni 2023	
		Proyeksi Likuiditas Juli 2023	
8	Jakarta, 24 Agustus 2023	Economic Outlook & Macroeconomic Forecast periode Juli 2023	100
		Perkembangan Pricing periode Juli 2023	
		Proyeksi Likuiditas Agustus 2023	

No.	Tempat & Tanggal	Agenda	Persentase Kehadiran Peserta (%)
9	Jakarta, 21 September 2023	Economic Outlook & Macroeconomic Forecast periode Agustus 2023	66.67
		Perkembangan Pricing periode Agustus 2023	
		Proyeksi Likuiditas September 2023	
10	Jakarta, 18 Oktober 2023	Economic Outlook & Macroeconomic Forecast periode September 2023	100
		Perkembangan Pricing periode September 2023	
		Proyeksi Likuiditas Oktober 2023	
11	Jakarta, 21 November 2023	Economic Outlook & Macroeconomic Forecast periode Oktober 2023	100
		Perkembangan Pricing periode Oktober 2023	
		Proyeksi Likuiditas November 2023	
		Usulan Perubahan Struktur ALCO	
12	Jakarta, 18 Desember 2023	Economic Outlook & Macroeconomic Forecast periode November 2023	100
		Perkembangan Pricing periode November 2023	
		Proyeksi Likuiditas Desember 2023	

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Komite ALCO Tahun 2023

Di sepanjang tahun 2023, ALCO telah melaksanakan fungsinya, dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan analisis dan menyampaikan hasil analisis kondisi ekonomi nasional maupun global untuk penetapan strategi perusahaan.
2. Melakukan analisis likuiditas, terutama analisis sumber dan proyeksi penggunaan dana.
3. Melakukan analisis kondisi *pricing* MTF meliputi realisasi *pricing* setiap produk dan penentuan *Base Lending Rate* untuk penetapan *rate* produk pembiayaan.
4. Menetapkan strategi pembiayaan untuk meningkatkan penetrasi pasar.

Komite Kredit

Komite kredit adalah suatu kelompok pejabat MTF yang dapat memberikan keputusan persetujuan kredit sesuai dengan limit kewenangan masing-masing yang diperoleh melalui Surat Keputusan WMP/ Wewenang Memutus Pembiayaan.

Keanggotaan Komite Kredit

Komite Kredit terdiri dari Komite Kredit Kantor Pusat dan Komite Kredit Kantor Cabang/Unit yang sebagian besar ditunjuk Direksi untuk memiliki limit WMP.

Komite Kredit Cabang untuk persetujuan kredit baru terdiri atas *Credit Head*, *Sales Head*, dan *Branch Manager*. *Credit Head* memberikan rekomendasi hasil analisa dan keputusan dalam sistem E-Star melalui *Request for Credit Approval* (RCA) yang terdapat dalam menu Credit "Credit Process". *Sales Head* memberikan *review* atas hasil

keputusan *reject* oleh *Credit Head* sesuai Prinsip "Four Eye Principle". *Branch Manager* memiliki limit kewenangan untuk memberikan keputusan persetujuan kredit.

Komite kredit Kantor Pusat untuk persetujuan kredit baru terdiri atas fungsi sales retail (*Regional Manager*), fungsi *credit* (*Area Credit Manager* dan *Credit Management Division Head*), dan Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit

Komite Kredit dalam setiap memberikan keputusan persetujuan kredit wajib menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendalian risiko dan sarana pengendalian manajemen kredit.

Komite Kredit sebagai sarana pengendalian manajemen risiko mengandung arti bahwa:

- Setiap persetujuan pembiayaan yang dilakukan Komite Kredit dapat diartikan sebagai pernyataan bahwa Customer yang disetujui permohonan pembiayaannya adalah customer yang layak (*feasible*).
- Setiap persetujuan pembiayaan adalah keputusan dari Komite Kredit untuk menempatkan dana pada suatu pembiayaan yang memiliki risiko yang sudah termitigasi.

Komite Kredit sebagai sarana proses pengendalian manajemen kredit mengandung arti bahwa:

- Setiap persetujuan Komite Kredit merupakan bagian dalam pengendalian seluruh proses perkreditan.
- Menentukan dan memastikan bahwa tata cara dalam pemberian kredit dapat diberikan secara benar sesuai dengan prosedur yang ada.

Komite Manajemen Risiko

Dengan meningkatnya kegiatan Perseroan, potensi risiko yang dihadapi akan semakin kompleks, sehingga Perseroan membentuk Komite Manajemen Risiko untuk mendukung Direksi dalam pengawasan dan pengelolaan seluruh potensi risiko secara efektif. Adapun Potensi Risiko yang dihadapi oleh perseroan meliputi Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko yaitu memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait Penerapan Manajemen Risiko, yang meliputi:

1. Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
2. Perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko;
3. Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal;
4. Membuat summary rekomendasi, tindak lanjut dan/atau hasil penerapan Manajemen Risiko.

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Ketua: Direktur Bidang Risk Management

Anggota Tetap:

1. Direktur Bidang Finance & CPM
2. Direktur Bidang Sales & Distribution
3. Chief Bidang Risk Management
4. Retail Risk Management Division Head
5. Corporate Risk Management Division Head
6. Corporate Secretary Division Head
7. Legal Division Head

Anggota Tidak Tetap:

Pejabat senior yang akan diundang sesuai dengan relevansi pembahasan

Rapat Komite Manajemen Risiko

1. Rapat Komite Manajemen Risiko dilaksanakan secara periodik (minimal 4 kali dalam setahun).
2. Rapat Komite Manajemen Risiko dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota termasuk Ketua Komite Manajemen Risiko.
3. Rapat dipimpin oleh Ketua Manajemen Risiko, apabila Ketua berhalangan hadir maka rapat dapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk.
4. Hasil Rapat Komite Manajemen Risiko dituangkan dalam risalah/notula rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Manajemen Risiko yang hadir.

Sepanjang tahun 2023, perseroan telah menyelenggarakan Rapat Komite Manajemen Risiko sebanyak 4 (empat) kali dengan ringkasan agenda sebagai berikut:

No.	Tempat & Tanggal	Agenda	Persentase Kehadiran Peserta (%)
1	30 Maret 2023	Hasil stress Test Semester 1 2023	100
		Update Penerapan Ketentuan Restrukturisasi COVID – 19	
		Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan	
		Trendline Portofolio & Industry Limit Corporate Fleet	
		Review & Monitoring Operational Risk	
		Program Kerja unit Pelindungan Konsumen	
		Performa Layanan Pengaduan Pelanggan	
2	Jakarta, 4 Juli 2023	Perubahan Parameter & Rule Rating	100
		Hasil Back Testing dan Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan	
		Portofolio Corporate Fleet	
		Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan	
		Profil Risiko Operasional Cabang	
		Risiko Kepatuhan	
Performance Layanan Pengaduan Pelanggan			

No.	Tempat & Tanggal	Agenda	Persentase Kehadiran Peserta (%)
3	Jakarta, 27 September 2023	Stress Test Terintegrasi	100
		Proses Perbaikan yang Telah Dilakukan Corporate Fleet	
		Performance Corporate Fleet	
		Usulan Masa Berlaku Purchase Order & Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan	
		Framework, Scope dan Metodologi Review Operational Risk	
		Penyampaian Hasil Control Testing dan Monitoring Segmen Retail	
		Issue & Action Manajemen (IAM) Segmen Fleet	
		Risiko Kepatuhan	
4	27 Desember 2023	Performa Layanan Pengaduan Pelanggan	100
		Perubahan Metodologi Risk Based Bank Rating (RBBR)	
		Portofolio Corporate Fleet	
		Portofolio dan Kualitas by Top 10 Economy Sector	
		Portofolio Restrukturisasi Corporate Fleet	
		Penyampaian Hasil Control & Monitoring Segment Retail	
		Review Limit Pembiayaan	
		Risiko Kepatuhan	
4	27 Desember 2023	Performa Layanan Pengaduan Pelanggan	100
		Update Penerapan Pelindungan Konsumen	

Komite Anti Fraud

Pembentukan Komite *Anti Fraud* didasarkan untuk membantu Direksi yang secara khusus menangani pencegahan (*Anti Fraud*) di internal Perseroan. Hal ini sebagai salah satu bentuk komitmen manajemen dalam menjalankan *Good Corporate Governance* (GCG) dan menjalankan budaya kerja perusahaan.

Keanggotaan Komite Anti Fraud

Komposisi keanggotaan Komite *Anti Fraud* terdiri dari:

1. Ketua Komite *Anti Fraud*: Corporate Secretary Division Head
2. Wakil Ketua Komite *Anti Fraud*: Corporate Audit Division Head
3. Anggota Komite *Anti Fraud*:
 - a. Corporate Risk Management Division Head
 - b. Retail & Operation Risk Management Division Head
 - c. Human Capital Division Head
 - d. Recovery Management Division Head
 - e. Legal Division Head
 - f. HC Learning Division Head

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Anti Fraud

1. Komite *Anti Fraud* adalah perwakilan dari unit kerja/divisi kantor pusat yang melaksanakan fungsi

pengendalian pengawasan dan penanganan atas kejadian risiko perusahaan termasuk *fraud*.

2. Komite *Anti Fraud* bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
3. Komite *Anti Fraud* membuat *summary* hasil temuan fraud dan melakukan pelaporan secara langsung kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Membahas kejadian *fraud* dengan memperhatikan beberapa faktor seperti bukti kronologis kejadian, penyebab utamanya, dampak financial, potensi pencegahan baik itu *fraud* yang kemungkinan kejadiannya berulang maupun yang akan datang.
5. Memantau kepatuhan terhadap pelaksanaan etika kerja secara periodik.
6. Melakukan evaluasi dan berkesinambungan terhadap kejadian *fraud*.
7. Menetapkan langkah-langkah perbaikan, kontrol dan proses bisnis agar kejadian *fraud* tidak terulang.

Rapat Komite Anti Fraud

Rapat Komite *Anti Fraud* adalah diskusi dengan semua anggota komite dan departemen yang berkaitan dengan adanya indikasi *fraud* di perusahaan, yang membahas pelaporan indikasi *fraud* dari *whistleblower* baik melalui *email*, *website*, dan *call center Anti Fraud* ataupun kontak langsung dengan komite. Di dalam

rapat tersebut akan dibahas analisa, bukti-bukti dari pelapor, dan akan di putuskan juga tindak lanjut dan investigasi *fraud*, serta rekomendasi sanksi terhadap pelaku *fraud*, untuk nantinya rekomendasi tersebut di sampaikan kepada direktur utama untuk diputuskan.

Sepanjang tahun 2023, rapat Komite *Anti Fraud* telah dilaksanakan sebanyak 4 kali, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di Perseroan. Beberapa pembahasan yang dilakukan dalam rapat Komite *Anti Fraud* terkait:

- Pembahasan indikasi *fraud* atas laporan WBS
- Pembahasan pengembangan EDS dan evaluasi penerapan WBS

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Komite Anti Fraud Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Komite Anti Fraud telah menjalankan fungsinya dengan melakukan 4 (empat) pilar strategi Anti Fraud sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada, yaitu:

- **Pencegahan (*Preventif*)**
Telah melakukan kegiatan ataupun strategi pencegahan seperti sosialisasi ke cabang-cabang ataupun kantor pusat terkait dengan anti fraud awareness, kemudian mengisi kelas training secara berkala dan juga mengirimkan poster *anti fraud awareness* setiap minggu kesuluruh karyawan melalui email maupun *desktop wallpaper* pada laptop/komputer karyawan.
- **Deteksi (*Detection*)**
Segala bentuk pelaporan dari whistleblower baik internal maupun eksternal, komite sudah deteksi dan Analisa terkait penyelesaian, akar masalah dan tindak lanjut kasus, agar hal tersebut dapat terselesaikan dengan baik.
- **Investigasi, Pelaporan dan Sanksi**
Investigasi dilakukan apabila adanya indikasi *fraud* di internal baik di kantor pusat maupun di kantor cabang perusahaan. Selain itu komite juga melakukan pelaporan secara berkala kepada management, regulator dan induk perusahaan. Dan komite juga memberikan rekomendasi sanksi dan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada management untuk diputuskan dalam rapat direksi,
- **Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut**
Komite selalu memantau dan berkoordinasi dengan divisi lain terkait arahan dan tindak lanjut serta pemberian sanksi dari management, agar sanksi yang sudah diputuskan untuk pelaku *fraud* dapat segera ditindaklanjuti oleh divisi terkait atau kepala wilayah.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi maka Perseroan membentuk komite yang bertugas membantu Direksi dalam memberikan arahan dan memantau kegiatan pelaksanaan kerangka kerja, kebijakan dan penerapan manajemen resiko dalam penggunaan Teknologi Informasi sesuai dengan POJK No. 4/POJK.05/2021 guna mendukung pengembangan usaha serta bisnis termasuk kelangsungan pelayanan terhadap debitur.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah merekomendasikan kepada Direksi terkait penerapan teknologi informasi yang meliputi:

1. Rencana pengembangan Teknologi informasi yang sejalan dengan kegiatan usaha.
2. Perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi.
3. Kesesuaian pelaksanaan proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana pengembangan Teknologi Informasi.
4. Kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan bisnis.
5. Efektifitas mitigasi risiko atas investasi pada sektor teknologi informasi agar investasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis.
6. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja teknologi Informasi.
7. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh unit kerja terkait secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
8. Kecukupan dan alokasi sumber daya Teknologi Informasi.

Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

1. Ketua: Direktur Bidang Teknologi Informasi
2. Anggota Tetap:
 - a. Chief Bidang Risk Management
 - b. Information Technology Division Head
 - c. Retail Risk Management Division Head
 - d. Corporate Risk Management Division Head
 - e. Corporate Secretary Division Head
 - f. Strategic Marketing & Communication Division Head
3. Anggota Tidak Tetap:
Pejabat senior yang akan diundang sesuai dengan relevansi pembahasan

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

1. Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dilaksanakan secara periodik (minimal 4 kali dalam setahun).
2. Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota termasuk Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi.
3. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi, apabila Ketua berhalangan hadir maka rapat dapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk.
4. Hasil Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dituangkan dalam risalah/notula rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi yang hadir.

Sepanjang tahun 2023, perseroan telah menyelenggarakan Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi sebanyak 4 (empat) kali dengan ringkasan agenda sebagai berikut:

No.	Tempat & Tanggal	Agenda	Peserta
1	Online, 17 Maret 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Progress Sertifikasi ISO27001 MTF1Access 2. Update Assessment IT CISO Mandiri 3. Update Pengembangan Aplikasi MTF Mobile dan Implementasi MTF1Access di Kantor Cabang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BOD: <ul style="list-style-type: none"> • Pinohadi G Sumardi • Perana Citra • Johannes Barus 2. Kanda Octaviano (IT & Strategic Digital) 3. Vitriati Hartika (Corporate Risk) 4. Citra Judith (CPM) 5. Camar Sativa (SMC)
2	Online, 6 Juli 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Rekomendasi CISO Mandiri 2. Review Laporan terkait IT Security 3. Update Project System Canalis 4. Update Pengembangan Aplikasi MTF Mobile 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BOD: <ul style="list-style-type: none"> • Pinohadi G Sumardi • Perana Citra • Johannes Barus 2. Kanda Octaviano (IT & Strategic Digital) 3. Vitriati Hartika (Corporate Risk)
3	Graha Mandiri, 27 September 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review Penanganan LockBit 3.0 MTF 2. Review Laporan terkait IT Security 3. Update Progress Pengembangan Internal 4. Update Penggunaan Enhancement Aplikasi MTF Mobile, Host to Host dengan Dealer Hyundai, Aplikasi MTF1Access 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BOD: <ul style="list-style-type: none"> • Perana Citra • Johannes Barus 2. Kanda Octaviano (IT & Strategic Digital) 3. Vitriati Hartika (Corporate Risk)
4	Graha Mandiri, 27 Desember 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Pemenuhan IT Security Requirement dari CISO Bank Mandiri 2. Review Laporan terkait IT Security 3. Update Progress Pengembangan Internal 4. Update Penyusunan IT Strategic Plan 2024 5. Update Penggunaan MTF1Access di Kantor Cabang, Rencana Pengembangan MTF1Access dan MTF Mobile di Tahun 2024 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BOD: <ul style="list-style-type: none"> • Pinohadi G Sumardi • Perana Citra • Johannes Barus 2. Kanda Octaviano (IT & Strategic Digital) 3. Vitriati Hartika (Corporate Risk) 4. Indra Budi Laksana (Retail Risk)

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Komite Pengarah Teknologi Informasi Tahun 2023

Selama tahun 2023, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan 4 kali rapat dengan pembahasan strategi teknologi informasi yang diperlukan keputusan dari manajemen. Untuk pembahasan rapat dapat dilihat pada data agenda rapat sebagaimana informasi di atas.

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG; memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta; menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan; serta menjadi penghubung atau *liaison*

officer Perseroan untuk berhubungan dengan pihak di luar Perseroan.

Keberadaan Sekretaris Perusahaan diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya langsung kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apa pun pada emiten lain atau perusahaan publik.

Kualifikasi Pejabat Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra Perseroan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan. Persyaratan sebagai Sekretaris Perusahaan, paling kurang:

1. Cakap melakukan perbuatan hukum;
2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan dan tata kelola perusahaan;
3. Memahami kegiatan usaha Perusahaan;
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik;
5. Berdomisili di Indonesia.

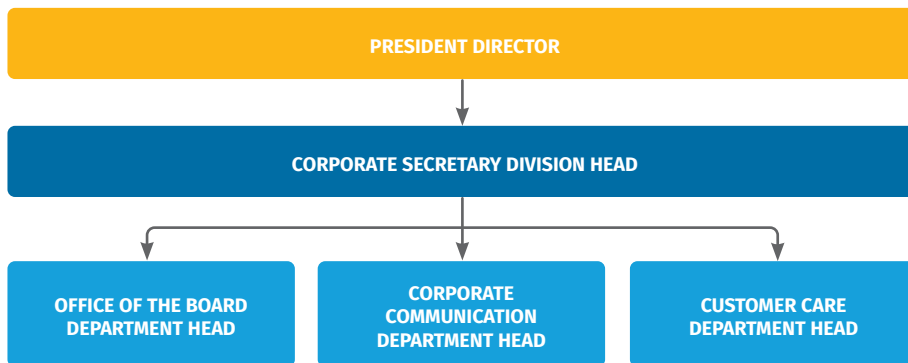
Pejabat Sekretaris Perusahaan



Nama	Arif Reza Fahlepi
Jabatan	Sekretaris Perusahaan
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 01324/SKHCP.SVC/HC/11/2018 tanggal 26 November 2018
Masa Jabatan	Sejak 26 November 2018
Periode ke-	1
Usia	46 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta Selatan
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Magister (S2) jurusan Corporate Communication di London School of Public Relations (2017) • Sarjana di bidang Sastra Indonesia dari Universitas Padjajaran (2001)
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Bidang Kerjasama Strategis di Public Affair Forum Indonesia (2020 - Sekarang) • Head of Corporate Communication PT Federal International Finance (2016-2018) • Corporate Communication Analyst PT Federal International Finance (2007-2016) • Human Capital PT Federal International Finance (2005-2007) • Surveyor PT Federal International Finance (2004-2005) • Redaktur di PT Cahaya Rakyat Merdeka (2001-2004) • Marketing Officer di PT Purbaya Pancasakti (1997-2001) • Aktif sebagai Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Humas Indonesia (PERHUMAS) bidang Kerjasama Strategis untuk periode (2017-2020)
Rangkap Jabatan	Di Dalam Perusahaan: Tidak ada Di Luar Perusahaan: Tidak ada
Keahlian/Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Anti Fraud Awareness untuk Perusahaan Pembiayaan (LPPI) • Sertifikasi Dasar Pembiayaan – Manajerial (LSPPPI) • Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI). • Sertifikasi Kompetensi Executive Public Relation dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Secara struktural, Sekretaris Perusahaan berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan sendiri membawahi *Corporate Communication Department Head*, *Office of the Board Department Head* dan *Customer Care Department Head*. Dengan adanya Sekretaris Perusahaan, diharapkan dapat membantu Direksi dalam menjalankan pengelolaan informasi Perusahaan dan memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.



Hingga akhir tahun 2023, jumlah karyawan Corporate Secretary Division adalah sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Karyawan (orang)
Kepala Divisi	1
Kepala Departemen	3
Supervisor	17
Staf	6
Jumlah	27

Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan

Dalam mendukung kerja Sekretaris Perusahaan, telah diterbitkan Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan No. 03/PGN/06/2016 yang telah diterbitkan tanggal 23 Desember 2016 dan telah melalui perbaikan/revisi pada tanggal 14 Desember 2018, telah disetujui oleh Direksi Perseroan.

Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan

Fungsi, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Fungsi

Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh aspek kegiatan Perseroan yang meliputi *corporate communication*, *corporate social responsibility*, penanganan keluhan konsumen, *corporate action*, kepatuhan terhadap regulasi, pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik termasuk sebagai penghubung kepada *shareholders*, *stakeholders*, dan regulator untuk meningkatkan tata kelola dan kepatuhan Perseroan terhadap regulasi.

Tugas dan Tanggung Jawab

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pemangku Kepentingan lainnya.
 - Merencanakan, mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Corporate Action seperti RUPS, *Public Expose*, CSR, pembagian dividen, dan Penerbitan Obligasi/MTN agar terlaksana dengan baik dan lancar.
 - Memastikan anggaran dasar, perijinan-perijinan, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Mengawasi dan mengkoordinasikan *whistleblowing system* untuk mengefektifkan pengendalian internal.
 - Memastikan fungsi People Management di divisi Corporate Secretary, berjalan lancar.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Perseroan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Sekretaris Perusahaan dalam rangka meningkatkan kompetensi. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Sekretaris Perusahaan.

Kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Corporate Secretary Division Head pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Peserta	Jenis / Materi Pelatihan	Penyelenggara	Waktu & Tempat
Arif Reza Fahlepi (Corporate Secretary Division Head)	Webinar “Leadership in Changing Atmosphere”	OJK Institute	Online, 8 Agustus 2023
Arif Reza Fahlepi (Corporate Secretary Division Head)	Implementasi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi	OJK	11 November 2023
Arif Reza Fahlepi (Corporate Secretary Division Head)	Anti Fraud & Gratifikasi	Hari Iman Wahyudi, S. psi, Psikolog, Cht	12 Desember 2023
Arif Reza Fahlepi (Corporate Secretary Division Head)	Leadership for General Manager	MTF	12 Desember 2023

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan 2023

Secara umum, kegiatan yang telah dilakukan Sekretaris Perusahaan di sepanjang tahun 2023, di antaranya adalah:

1. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Tahun 2023;
2. Menyelenggarakan kegiatan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris secara rutin;
3. Melakukan pelaporan yang menjadi kewajiban Perseroan terhadap Regulator;
4. Menjalin relasi dengan pihak eksternal, khususnya pemangku kepentingan;
5. Melaksanakan event Perseroan, baik event internal dan eksternal;
6. Melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility*, Literasi dan Inklusi keuangan;
7. Membina hubungan dengan media massa dan monitoring pemberitaan;
8. Mengelola dan memperbarui konten situs web Perseroan;
9. Melakukan dalam kegiatan penghargaan publik dan partisipasi sponsor;

10. Melakukan reviu dan merekomendasikan pengkinian serta penyempurnaan kebijakan, ketentuan maupun system prosedur yang dimiliki oleh Perseroan agar sesuai dengan ketentuan/regulasi dan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
11. Menangani keluhan pelanggan dan membuat pelaporan wajib secara rutin.

Publikasi Informasi Perusahaan

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menjalankan prinsip keterbukaan informasi Perseroan dengan mempublikasikan berbagai kegiatan atau informasi mengenai Perseroan sepanjang tahun buku 2023. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. X.K.1 (Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-86/PM/1996 tertanggal 24 Januari 1996) dan Peraturan Bursa Efek Jakarta No. I-E.IV (Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004). Pengungkapan informasi material dilakukan Perseroan melalui laporan ataupun siaran pers.

Laporan Keuangan Bulanan Perusahaan Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dan Surat Edaran OJK No. 26/SEOJK.05/2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan wajib mengirimkan Laporan Bulanan kepada OJK paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Selama tahun 2023, Perseroan telah melaporkan kepada OJK Laporan Keuangan Bulanan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

Periode Bulan Laporan Tahun 2023	Tanggal Pengiriman Laporan
Januari	10 Februari 2023
Februari	10 Maret 2023
Maret	10 April 2023
April	10 Mei 2023

Periode Bulan Laporan Tahun 2023	Tanggal Pengiriman Laporan
Mei	11 Juni 2023
Juni	7 Juli 2023
Juli	8 Agustus 2023
Agustus	8 September 2023
September	11 Oktober 2023
Oktober	8 November 2023
November	11 Desember 2023
Desember	9 Januari 2024

Kewajiban Penyampaian Data Utang Valuta Asing

Berdasarkan Surat OJK No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan No. S-124/PM.23/2013 tanggal 27 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/Kewajiban Dalam Valuta Asing, Emiten atau Perusahaan Publik diminta untuk menyampaikan:

1. Laporan mengenai jumlah hutang/kewajiban dalam valuta asing
2. Proyeksi pembayaran hutang/kewajiban dalam valuta asing per bulan
3. Informasi jatuh tempo hutang/kewajiban dalam valuta asing Dalam hal emiten tidak mempunyai atau memiliki hutang/kewajiban dalam valuta asing, emiten diminta untuk tetap melaporkan kepada OJK dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Laporan tersebut di atas wajib disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 10 setiap bulannya dengan menggunakan formula sebagaimana terlampir dalam surat OJK No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 tersebut.

Sepanjang tahun 2023, Perseroan telah melaporkan kepada OJK Laporan hutang/kewajiban dalam valuta asing secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

Periode Bulan Laporan Tahun 2023	Tanggal Pengiriman Laporan
Januari	8 Februari 2023
Februari	7 Maret 2023
Maret	6 April 2023
April	5 Mei 2023
Mei	9 Juni 2023
Juni	6 Juli 2023
Juli	7 Agustus 2023
Agustus	6 September 2023
September	3 Oktober 2023
Oktober	7 November 2023
November	6 Desember 2023
Desember	4 Januari 2024

Kegiatan Membina Hubungan dengan Media Massa

Perseroan senantiasa membina hubungan baik dengan Media Massa sebagai mitra dalam penyebaran informasi tentang kondisi perusahaan. Perseroan secara berkala menggelar kegiatan bersama media massa guna meningkatkan komunikasi dengan melakukan berbagai kegiatan.

Pengelolaan Akses Informasi dan Data Perusahaan

Perseroan senantiasa memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk mengakses informasi dan data perusahaan melalui situs web www.mtf.co.id. Selain sebagai sarana penyebaran informasi kepada publik, situs web ini juga merupakan upaya Perseroan dalam menerapkan praktik GCG dan transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan.

Pengelolaan Situs Web

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten dan Perusahaan Publik, Perseroan telah memiliki situs web resmi yang mencerminkan identitas Perseroan dan dapat diakses melalui www.mtf.co.id. Situs web Perseroan terbagi ke dalam 2 (dua) platform, yaitu situs web produk dan jasa dengan alamat www.mtf.co.id yang dikelola oleh marketing, dan situs web korporasi dengan alamat www.mtf.co.id/korporat yang dikelola oleh Sekretaris Perusahaan.

Perseroan secara berkala memperbarui situs web untuk senantiasa memberikan informasi terbaru terkait

Perseroan kepada para pemangku kepentingan serta dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Situs web Perseroan juga menyediakan nomor kontak serta alamat email dan pos yang dapat dihubungi untuk komunikasi selanjutnya dengan para pemangku kepentingan. Perseroan telah berupaya melakukan penyesuaian terhadap situs web Perseroan berdasarkan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015.

Di bawah ini tersaji kesesuaian konten situs web korporasi Perseroan www.mtf.co.id/korporat dengan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

No.	POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik	Kesesuaian dengan Situs Web MTF			Keterangan
		Ya	Tidak	N/A	
Ketentuan Umum					
1	Emiten atau Perusahaan Publik telah memiliki Situs Web.	√			Akses web melalui: www.mtf.co.id dan www.mtf.co.id/korporat/id
2	a. Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik telah dibuat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.	√			<ul style="list-style-type: none"> • POJK No 8/ POJK.04/2015 • POJK No 31/ POJK.04/2015 • POJK No 29/POJK.04/2016
	b. Situs Web telah memiliki alamat Situs Web yang mencerminkan identitas Emiten atau Perusahaan Publik.	√			Ya
3	a. Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik telah menyajikan informasi dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.	√			Ya
	b. Informasi yang disajikan dalam bahasa asing telah memuat informasi yang sama dengan informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia.	√			Ya
Informasi yang Dimuat dalam Situs Web					
4	a. Situs Web telah memuat informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik yang terbuka untuk umum, aktual, dan terkini.	√			-
	b. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:				
	1. Disajikan dengan benar dan tidak menyesatkan mengenai keadaan Emiten atau Perusahaan Publik;	√			-
	2. Disajikan secara jelas sehingga mudah dipahami; dan	√			-
	3. Dapat diakses setiap saat oleh semua pihak.	√			-

No.	POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik	Kesesuaian dengan Situs Web MTF			Keterangan
		Ya	Tidak	N/A	
	Informasi umum Emiten atau Perusahaan Publik Hal-hal yang wajib diungkapkan antara lain:				
	a. Nama, alamat dan kontak kantor pusat dan/atau kantor perwakilan Emiten atau Perusahaan Publik, dan alamat pabrik (jika ada) yang paling kurang meliputi nomor telepon, nomor faksimile, dan alamat surat elektronik yang dapat dihubungi;	√			Alamat kantor pusat dan kantor cabang telah tersedia.
	b. Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	√			Sudah ada.
	c. Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik;	√			Diperbarui tanggal 5 Maret 2023
	d. Struktur kepemilikan Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:				
	1. Uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya setiap akhir bulan;	√			MTF merupakan Perusahaan non terbuka, sehingga informasi kepemilikan saham tidak berubah.
5	2. Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau diagram; dan	√			Sudah tersedia
	3. Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut (jika ada);			√	Tidak ada karena Perusahaan tidak memiliki anak usaha.
	e. Struktur grup Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan yang paling kurang meliputi perusahaan dalam grup Emiten atau Perusahaan Publik yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;	√			Terinfo struktur grup Bank Mandiri dan Tunas Ridean.
	f. Profil Direksi, Dewan Komisaris, komite, dan Sekretaris Perusahaan paling kurang meliputi:				
	1. foto;	√			-
	2. nama;	√			-
	3. riwayat jabatan, termasuk rangkap jabatan;	√			-
	4. riwayat pendidikan; dan	√			-
	5. hubungan Afiliasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya, serta pemegang saham (jika ada);	√			-
	g. Nama dan alamat:				
	1. Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik dalam tahun berjalan;	√			-
	2. Pemeringkat Efek (jika ada);	√			-
	3. Wali Amanat (jika ada); dan/atau	√			-
	4. Biro Administrasi Efek (jika ada); dan	√			-
	h. Dokumen Anggaran Dasar.	√			Sudah tersedia.

No.	POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik	Kesesuaian dengan Situs Web MTF			Keterangan
		Ya	Tidak	N/A	
	Informasi bagi pemodal atau investor hal-hal yang wajib diungkapkan antara lain:				
	a. Prospektus Penawaran Umum;	√			Sudah tersedia.
	b. Laporan tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir; dan	√			Sudah tersedia.
	c. Informasi keuangan, paling kurang meliputi:				
	1. Laporan keuangan tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir;	√			Sudah tersedia.
	2. Laporan keuangan tengah tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir; dan	√			Sudah tersedia.
	3. Ikhtisar data keuangan penting, dalam bentuk perbandingan untuk 5 (lima) tahun buku terakhir yang paling kurang memuat:	√			Sudah tersedia
	a) pendapatan;	√			-
	b) laba bruto;	√			-
6	c) laba (rugi);	√			-
	d) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	√			-
	e) total laba (rugi) komprehensif;	√			-
	f) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	√			-
	g) laba (rugi) per saham;	√			-
	h) jumlah aset;	√			-
	i) jumlah liabilitas;	√			-
	j) jumlah ekuitas;	√			-
	k) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	√			-
	l) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	√			-
	m) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan;	√			-

No.	POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik	Kesesuaian dengan Situs Web MTF			Keterangan
		Ya	Tidak	N/A	
	n) rasio lancar;	√			-
	o) rasio liabilitas terhadap ekuitas;	√			-
	p) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	√			-
	q) informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan perusahaan dan jenis industrinya;	√			-
	d. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham, paling kurang meliputi:				
	1. Pengumuman dan pemanggilan;	√			-
	2. Bahan mata acara yang dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham;	√			Sudah tersedia.
	3. Riwayat hidup calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris apabila terdapat mata acara pengangkatan atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan	√			Terdapat pergantian Dewan Komisaris dalam RUPS di tahun 2023
	4. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham;	√			Sudah tersedia.
	e. Informasi saham, paling kurang meliputi:				
	1. Jumlah saham beredar;	√			Data berupa informasi komposisi saham
	2. Pemecahan saham (jika ada);		√		-
	3. Penggabungan saham (jika ada);		√		-
	4. Saham bonus (jika ada); dan		√		-
	5. Perubahan nilai nominal saham (jika ada);		√		-
	f. Informasi obligasi dan/atau Sukuk, paling kurang meliputi:				
	a. Nilai obligasi yang belum lunas/terhutang (outstanding bond) dan/atau Sukuk;	√			Sudah tersedia
	b. Hasil pemeringkatan obligasi dan/atau Sukuk;	√			-
	c. Tanggal jatuh tempo; dan	√			-
	d. Tingkat bunga obligasi dan/atau imbal hasil Sukuk;	√			-
	g. Informasi dividen;	√			Sudah tersedia.
	h. Informasi untuk pemodal atau investor, media, publik, dan/atau analis (jika ada);	√			-
	i. Informasi terkait aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan tindakan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), meliputi:				
	1. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;	√			-

No.	POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik	Kesesuaian dengan Situs Web MTF			Keterangan
		Ya	Tidak	N/A	
	2. Transaksi Material dan perubahan Kegiatan Usaha Utama;		√	-	
	3. Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;		√	-	
	4. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;		√	-	
	5. Kuasi Reorganisasi;		√	-	
	6. Pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;		√	-	
	7. Pembagian Saham Bonus;		√	-	
	8. Pernyataan Penawaran Tender;		√	-	
	9. Pembelian kembali saham oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam kondisi pasar yang berpotensi krisis; dan		√	-	
	10. Program kepemilikan saham oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan dari Emiten atau Perusahaan Publik atau pihak terkendali; dan		√	-	
	j. Informasi atau Fakta Material selain yang telah diungkapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	√		-	
	Informasi tata kelola perusahaan Hal-hal yang wajib diungkapkan antara lain:				
	a. Pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris;	√			Sudah dilengkapi di bagian keterbukaan informasi
	b. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau kekosongan Sekretaris Perusahaan, termasuk Sekretaris Perusahaan sementara, serta informasi pendukungnya;	√			Sudah tersedia.
	c. Piagam Unit Audit Internal;	√			Sudah dilengkapi di bagian keterbukaan informasi
	d. Kode etik;	√			Sudah tersedia.
	e. Pedoman kerja komite;	√			Sudah tersedia.
7	f. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit;	√			Sudah tersedia.
	g. Uraian prosedur Nominasi dan Remunerasi, apabila tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi;	√			Sudah tersedia.
	h. Kebijakan manajemen risiko;	√			Sudah tersedia.
	i. Kebijakan mekanisme sistem pelaporan pelanggaran (jika ada);	√			Sudah tersedia.
	j. Kebijakan anti korupsi (jika ada);			√	-
	k. Kebijakan terkait seleksi pemasok dan hak kreditur (jika ada); dan			√	-
	l. Kebijakan dalam peningkatan kemampuan vendor (jika ada).			√	-

No.	POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik	Kesesuaian dengan Situs Web MTF			Keterangan
		Ya	Tidak	N/A	
	Informasi tanggung jawab sosial perusahaan				
	a. Informasi tanggung jawab sosial perusahaan telah memuat kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√		-	
	b. Kebijakan, jenis program, dan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a terkait aspek:				
8	1. Lingkungan hidup;	√			Sudah tersedia.
	2. Praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja;	√			Sudah tersedia.
	3. Pengembangan sosial dan kemasyarakatan; dan	√			Sudah tersedia.
	4. Tanggung jawab produk dan/atau layanan, dengan disertai informasi pendukungnya.	√			Sudah tersedia.
9	Informasi yang dimuat dalam Situs Web telah memuat informasi yang sama dengan informasi yang diwajibkan dalam masing-masing peraturan terkait	√			Sudah tersedia.

Layanan Pelanggan

Perseroan memberikan saluran layanan pelanggan yang dapat digunakan oleh pelanggan untuk mengajukan pertanyaan, permintaan kebutuhan data, maupun pengaduan.

Email : customer.service@mtf.co.id
(Senin sd Jumat, pk 08.30-17.30 WIB)
Care center : 15000 59
(Senin sd Jumat, pk 08.00-17.00 WIB)

- MTF Mobile Apps
 - Mobile Survey
 - Mobile Collection
 - Mobile License Plate
 - MTF Report
 - MTF OSR
- HC EAZY
- MTF Mobile
- MTF1Access

Jejaring Sosial Perusahaan

Perseroan juga memperhatikan perkembangan media sosial sebagai fasilitas komunikasi interaksi dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Perseroan membuka kanal komunikasi daring melalui beragam media sosial.

Facebook Fanpage : Mandiri Tunas Finance
Instagram : @mandiritunasfinance
LinkedIn : Mandiri Tunas Finance
Twitter : @mandiritunasfn
Chatbot MARSHA : 62 811-1455-740
Youtube : Mandiri Tunas Finance
Website : mtf.co.id

Mobile Application

Perseroan memiliki beberapa *mobile application* berbasis sistem operasi Android dan IOS yang dapat digunakan oleh pelanggan maupun publik untuk mendapatkan layanan pembiayaan kendaraan bermotor dari Perseroan.

Hubungan Media

Perseroan memanfaatkan media massa sebagai mitra untuk menyebarkan informasi tentang Perseroan kepada khalayak. Tentang kegiatan hubungan media telah diulas pada bagian Sekretaris Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Laporan Tahunan

Perseroan juga menerbitkan buku Laporan Tahunan yang dibagikan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Penerbitan dan penyampaian Laporan Tahunan juga merupakan bentuk pemenuhan Perseroan terhadap ketentuan peraturan dan informasi Perseroan serta salah satu syarat pelaksanaan RUPS.

Tata Kelola Informasi dan Akses Data Perusahaan untuk Internal

Perseroan menyediakan akses informasi dan data perusahaan untuk karyawan guna memberikan kemudahan dalam menjalankan tugas maupun mengakses berbagai fasilitas dengan saluran dan media berikut:

No.	Nama Aplikasi	Fungsi
1	Estar	Core App System yang digunakan MTF untuk semua proses mulai dari akuisisi hingga kelola account yang terintegrasi.
2	Mobile Collection	Aplikasi Mobile yang di gunakan oleh Team Collection untuk mendukung proses penagihan kepada Pelanggan.
3	Mobile Survey	Aplikasi Mobile yang membantu tim sales untuk melakukan prospek dan survey kepada Pelanggan.
4	HC Eazy	HC Eazy merupakan aplikasi Human Resource Information System (HRIS) yang di gunakan oleh internal karyawan MTF untuk mengakses data karyawan, benefit-benefit karyawan seperti cuti, melakukan absensi, dan lainnya.
5	KMS	Knowledge Management System yang digunakan internal perusahaan untuk pusat informasi, panduan pemakaian hingga Q&A terkait aplikasi yang ada di perusahaan.
6	Eprocurement	Aplikasi eprocurement digunakan oleh Departemen Procurement dan vendor sebagai sarana mengajukan harga pada saat melakukan pengadaan.
7	Helpdesk System	Helpdesk System adalah web application yang digunakan oleh karyawan internal MTF untuk mendapatkan bantuan dari personil IT untuk menyelesaikan masalah terkait IT yang dialami oleh karyawan di Head Office maupun di Kantor Cabang.
8	I-Care	i-Care adalah aplikasi web yang digunakan oleh Customer Care untuk memproses keluhan, kritik, dan saran yang disampaikan oleh Pelanggan MTF.
9	Queuing System	Queuing System adalah aplikasi web yang digunakan di Customer Lounge dan di Kantor Cabang sebagai sistem antrian untuk Pelanggan yang datang ke Customer Lounge dan Kantor Cabang.
10	Email System Office 365	Email Office 365 sudah menggantikan system Email karyawan MTF yang sebelumnya memakai Microsoft Exchange, yang di mana Office 365 sudah menggunakan cloud untuk system Email nya sehingga tidak menjadi beban di server MTF.
11	SunGL Accounting System	SunGL Accounting System merupakan aplikasi yang digunakan oleh team accounting untuk menyimpan summary dari masing-masing account yang ada.

Fungsi Manajemen Risiko

Perseroan memiliki Divisi Risk Management yang terdiri atas Retail Risk Management dan Corporate Risk Management yang bertugas melakukan pengelolaan risiko untuk menghindari dampak kerugian bagi Perseroan yang diakibatkan dari risiko yang dihadapi.

Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko di MTF

Perseroan telah menerapkan manajemen risiko dengan mengacu pada POJK No. 44/POJK.05/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan *NonBank*. Fungsi manajemen risiko dirancang independen dari satuan kerja fungsi bisnis dan operasional yang diberikan akses untuk memberikan informasi kepada Direksi dan Komisaris terkait penilaian atas risiko, perubahan profil risiko, penilaian limit risiko serta kejadian yang mungkin dapat berdampak material pada kelangsungan bisnis dan operasional perseroan.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Manajemen Risiko

Kepala Manajemen Risiko merupakan pejabat Perseroan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan.

Profil Kepala Manajemen Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 00093/SK-HCP.SVC/HC/VII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 dan Surat Keputusan Direksi No. 00017/SK-HCP.SVC/HC/IV/2023 tanggal 30 April 2023, Direktur Utama mengangkat Indra Budi Laksana sebagai Kepala Divisi Retail Risk Management dan Vitriati Hartika Tapiheroe sebagai Kepala Divisi Corporate Risk Management Perseroan.

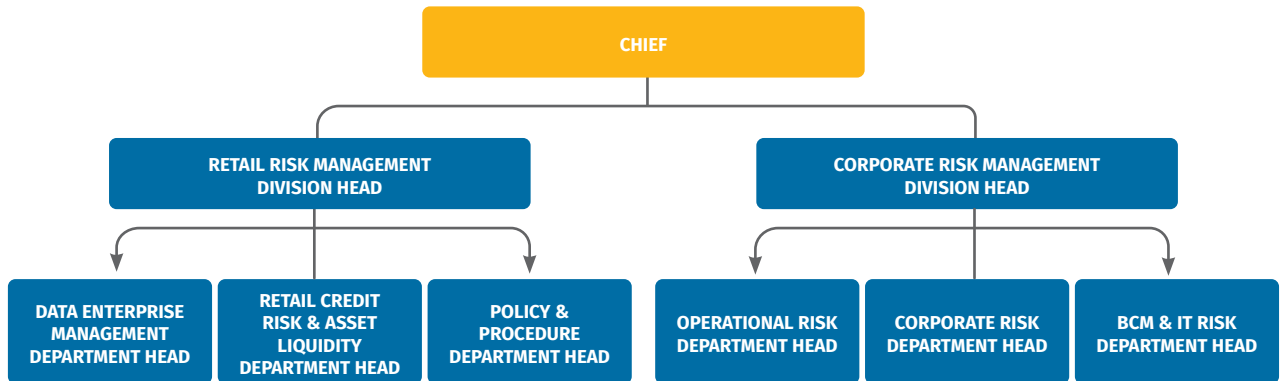


Nama & Jabatan	Indra Budi Laksana Kepala Divisi Retail Risk Management
Data Pribadi	Warga negara Indonesia Usia 47 tahun. Kelahiran Sleman, 3 September 1976 Domisili: Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Bachelor of International Relations, Universitas Gadjah Mada (1995-1999) • Sertifikasi Dasar Pembiayaan - Managerial dari PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) (2023) • Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan – Level 3 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2019)
Bergabung di MTF	1 Agustus 2023 sebagai Kepala Divisi Retail Risk Management
Pengalaman Kerja	<p>Sebelum bergabung di Perseroan, beliau berkarir di Bank Mandiri. Beberapa jabatan yang pernah diemban adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Department Head Micro Productive Collection & Recovery, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (2019-2023) • Consumer Collection & Recovery Head, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (2017-2019) • Retail Credit Collection Head, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (2015-2017) • Retail Risk & Collection Center Manager, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (2013-2015) • Team Leader Collection & Recovery Analytics, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (2011-2013) • SPS RC Collection & Recovery Analytics, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (2010-2011)



Nama & Jabatan	Vitriati Hartika Tapiheroe Kepala Divisi Corporate Risk Management
Data Pribadi	Warga negara Indonesia Usia 46 tahun. Kelahiran Bandung, 7 September 1977 Domisili: Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Bachelor of Ocean Engineering, Institut Teknologi Bandung (1997 – 2002). • Qualified Chief Risk Officer (QRCO), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (2018). • Sertifikasi Manajemen Risiko Satu Tingkat Dibawah Direksi – Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (2023).
Bergabung di MTF	30 Januari 2023 sebagai Kepala Divisi Corporate Risk Management
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Corporate Risk Management Division Head PT Mandiri Tunas Finance (2023 – Present) • Head of Risk – Indonesia Allianz Trade ASEAN, PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (2016 – 2023) • Corporate Credit Manager PT Chandra Sakti Utama Leasing (2014 – 2016) • Senior Credit Analyst PT Chandra Sakti Utama Leasing (2012 – 2014) • Senior Credit & Risk Analyst PT ORIX Indonesia Finance (2010 – 2011) • Senior Staff General Affairs, PT ORIX Indonesia Finance (2007 - 2009) • Leasing Account Manager, PT ORIX Indonesia Finance (2003 - 2007)

Struktur Organisasi dan Kedudukan Fungsi Manajemen Risiko



Pada tahun 2023, Divisi Retail Risk Management dan Divisi Corporate Risk Management memiliki total 28 karyawan dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan/Fungsi	Jumlah Karyawan Divisi Retail Risk Management	Jumlah Karyawan Divisi Corporate Risk Management	Total Jumlah Karyawan
Kepala Divisi	1 orang	1 orang	2 orang
Kepala Departemen	2 orang	3 orang	5 orang
Analyst dan Section Head	7 orang	7 orang	14 orang
Officer	2 orang	6 orang	8 orang
Admin	1 orang	0	1 orang
Jumlah	13 orang	17 orang	30 orang

Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko

Sertifikasi profesi sangat penting bagi *risk managers* untuk memahami perkembangan pengelolaan risiko. Berikut adalah daftar sertifikasi profesi yang dimiliki Divisi Retail Risk Management dan Divisi Corporate Risk Management:

Divisi	Retail Risk Management		Corporate Risk Management	
	Jumlah Karyawan yang Memiliki (orang)	Rasio Terhadap Jumlah Karyawan Divisi (%)	Jumlah Karyawan yang Memiliki (orang)	Rasio Terhadap Jumlah Karyawan Divisi (%)
Sertifikat profesi manajemen risiko dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	10	77	9	52
Sertifikasi Dasar Managerial	3	100	2	50

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab Fungsi Management Risiko adalah:

1. Mengidentifikasi risiko yang melekat pada kegiatan usaha perseroan.
2. Menyusun metode pengukuran risiko.
3. Memantau pelaksanaan strategi manajemen risiko serta posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko serta melakukan pengujian menggunakan skenario kondisi abnormal dengan menggunakan data historis.
4. Memberikan rekomendasi ke unit bisnis dan operasional.
5. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direksi.
6. Mengkaji ulang secara berkala proses manajemen risiko dan usulan atas pengembangan atau perluasan usaha.

Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko

Perseroan berkomitmen dalam meningkatkan kompetensi pegawai, termasuk bagi karyawan pada fungsi manajemen risiko, khususnya kompetensi pada bidang manajemen risiko. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja pengelolaan risiko Perseroan.

Kegiatan peningkatan kompetensi yang telah diikuti Retail Risk Management Division Head dan Corporate Risk Management Division Head pada tahun 2023 sebagai berikut:

Peserta	Jenis /Materi Pelatihan	Penyelenggara	Waktu & Tempat
Indra Budi Laksana (Retail Risk Management Division Head)	Sertifikasi Risk Management Satu Tingkat di bawah Direksi	APPI	Jakarta, Juli 2023
Indra Budi Laksana (Retail Risk Management Division Head)	Pelatihan Omega Credit Skills Accreditation	Moodys Analytics	Jakarta, Agustus 2023
Vitriati Hartika Tapiheroe (Corporate Risk Management Division Head)	Sertifikasi Risk Management Satu Tingkat di bawah Direksi	APPI	Jakarta, Juli 2023

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Manajemen Risiko Tahun 2023

Selama tahun 2023 fungsi manajemen risiko telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

- Memantau profil risiko dan mengelola seluruh profil risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite*, limit risiko dan strategi pengelolaan risiko yang tertuang dalam *Risk Appetite Statement (RAS)*.
- Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio secara menyeluruh.
- Menjaga tingkat Kesehatan perusahaan agar selalu dalam kondisi minimal sehat serta menyusun dan membuat laporan tingkat Kesehatan ke Direksi, Komisaris serta regulator.
- Secara berkala melakukan *stress testing* untuk mengukur dampak perubahan faktor makroekonomi terhadap kondisi permodalan, likuiditas, kualitas aset, dan laba perusahaan berdasarkan skenario yang ditetapkan.
- Menyusun dan/atau mengevaluasi serta menyempurnakan kebijakan, prosedur perseoran.
- Menyusun *Portfolio Guideline & Industri Limit* yang digunakan khususnya pada segmen Corporate Fleet, serta melakukan penyesuaian *risk acceptance criteria* pembiayaan.
- Memonitor penanganan debitur yang menunggak melalui *overdue meeting* dan *tools watchlist* sebagai bagian dari *Early Warning System* pada segmen Corporate Fleet.
- Penjagaan Risiko Operasional perusahaan serta melaksanakan Business Continuity Management (BCM) antara lain:
 - Post check* audit melalui *Quality Assurance (QA)* atas parameter sesuai ketentuan.
 - Optimalisasi fungsi Regional Control Officer (RCO) yaitu memaksimalkan tugas RCO dalam melakukan kontrol & monitoring kegiatan operasional cabang.

Penilaian Kinerja Manajemen Risiko Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023 fungsi *risk management* telah melaksanakan seluruh target yang telah ditetapkan dan seluruh inisiatif yang dilaksanakan berhasil menjaga kualitas portofolio pembiayaan, dimana tingkat *Non Performing Financing (NPF)* terjaga dengan baik di level 0,70% di tahun 2023.

Audit Internal

Fungsi Audit Internal merupakan salah satu persyaratan dalam implementasi Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan wajib diterapkan dalam pengelolaan Perusahaan Pembiayaan. Fungsi Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bertujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, dengan cara mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian internal (*internal control*), penerapan manajemen risiko (*risk management*), dan proses tata kelola perusahaan (*corporate governance*).

Kedudukan Audit Internal dalam organisasi berada langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama, dan dapat berkomunikasi langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan aktivitas audit.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Audit Internal

Kepala Unit Audit Internal merupakan pejabat Perseroan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Regulator.

Kewenangan dan Pertanggungjawaban

Untuk dapat menjalankan tugas dengan efektif Audit Internal diberikan kewenangan maupun tanggung jawab dengan memperhatikan prinsip-prinsip independensi, objektivitas dan profesionalisme. Kewenangan Audit Internal mencakup: melakukan aktivitas audit internal terhadap kegiatan semua unit kerja kantor pusat maupun kantor cabang, melakukan akses terhadap seluruh informasi, catatan karyawan dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu, melakukan aktivitas investigasi terhadap kegiatan yang terindikasi

fraud dan pelanggaran *code of conduct*, serta mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

Sedangkan tanggung jawab Audit Internal adalah mencakup: menyusun Rencana Audit Tahunan (*Annual Audit Plan*) dengan persetujuan Direktur Utama, melaksanakan aktivitas internal audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang berisiko tinggi serta mengevaluasi kecukupan internal kontrol, memonitor tindak lanjut hasil aktivitas audit internal, mengembangkan program untuk meningkatkan kualitas Audit Internal, serta sebagai *counterpart* eksternal audit.

Profil Kepala Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 00078/SK-HCP.SVC/HC/06/2022 tanggal 22 Juni 2022, Direktur Utama mengangkat Bayu Mario sebagai Kepala Audit Internal Perseroan, dan telah dilaporkan kepada OJK melalui surat No. 128/MTF-CLC.CCS/VI/2022 pada tanggal 24 Juni 2022.

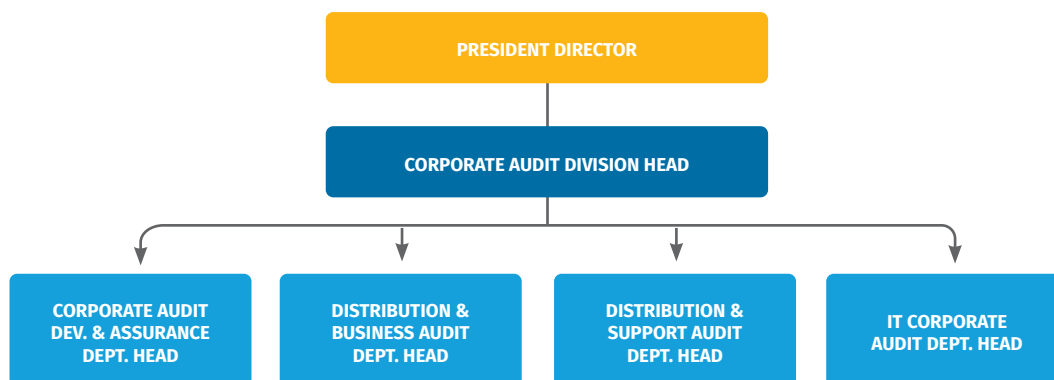


Nama	Bayu Mario
Jabatan	Kepala Audit Internal
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 00078/SK-HCP.SVC/HC/06/2022 tanggal 22 Juni 2022
Masa Jabatan	1,5 tahun
Periode ke-	Ke-1
Usia	52 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Tangerang
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Sriwijaya (1996) • Master Program Magister Manajemen dari Universitas Trisakti (2003)
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • PT Bank Dagang Negara (1996) sebagai Officer Development Program • PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999-2022) sebagai Auditor, Quality Assurance & Control, Credit Operation, Mandiri University.
Rangkap Jabatan	Di Dalam Perusahaan: Tidak ada Di Luar Perusahaan: Tidak ada
Keahlian/Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) - 1998 • Certified Fraud Examiner (CFE) oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) - 2011 • Certified Chartered Accountant (CA) oleh Ikatan Akuntan Indonesia - 2021 • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) - 2018 • Sertifikasi Audit Internal - Supervisor oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) - 2015

Struktur Organisasi dan Kedudukan Audit Internal

Secara struktural, Audit Internal berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi. Kepala Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Berikut struktur organisasi dan kedudukan Audit Internal yang menggambarkan lingkup tugas dan fungsi serta koordinasinya dalam organisasi Perseroan.

Struktur Organisasi Audit Internal Mandiri Tunas Finance



Hingga akhir tahun 2023, Unit Audit Internal memiliki 26 (dua puluh enam) karyawan dengan rincian penempatan dan pelaksanaan tugas sebagai berikut:

Jabatan/Fungsi	Jumlah Karyawan
Kepala Divisi	1 orang
Kepala Departemen	4 orang
Lead Auditor	11 orang
IT Audit Analyst	2 orang
Audit Development Section Head	1 orang
MIS Audit Analyst	1 orang
Quality Assurance Analyst	2 orang
Auditor	3 orang
Audit Admin	1 orang
Jumlah	26 orang

Jumlah pegawai tersebut merupakan hasil dari identifikasi dan kajian atas pengelolaan sistem pengendalian internal dan efektivitas pengawasannya yang dilakukan oleh Manajemen Perseroan.

Unit Audit Internal selalu berupaya untuk memberikan pendidikan berkelanjutan bagi seluruh personilnya untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang memadai termasuk sertifikasi profesi bidang Internal Audit. Adapun sertifikasi profesi yang telah dimiliki oleh Personil Audit Internal hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Jenis Sertifikat	Jumlah Karyawan yang Memiliki (orang)
Sertifikasi Dasar Pembiayaan - Managerial	4
Certified Fraud Examiner (CFE)	1
Certified Chartered Accountant (CA)	1
Qualified Internal Audit (QIA)	2

Jenis Sertifikat	Jumlah Karyawan yang Memiliki (orang)
Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Level 2	1
Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Level 3	1
Certified Public Accountant (CPA)	1
Certified Lead Auditor ISO 27001	1

Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan level sertifikasi profesi bagi karyawan Audit Internal, baik bagi karyawan yang telah memiliki sertifikasi profesi maupun yang belum memiliki.

Pedoman dan Tata Tertib Audit Internal

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah mempunyai Piagam Audit Internal yang telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya.

Dalam Piagam Audit Internal disebutkan bahwa:

1. Divisi Audit Internal dipimpin oleh Kepala Divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
2. Kepala Divisi Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan melaporkan kepada Komite Audit.
3. Pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal dilaporkan kepada otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi kegiatan usaha Perseroan.
4. Seluruh Internal Auditor di Divisi Audit Internal bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Audit Internal.

Independensi Audit Internal

Auditor Internal memiliki independensi dalam melakukan aktivitas Audit Internal, mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesi dan standar yang berlaku, mengungkapkan pandangan tanpa pengaruh ataupun tekanan pihak lain, kebebasan dalam menerapkan metode/ruang lingkup teknik audit yang akan dilakukan, tidak melakukan kegiatan yang bersifat operasional dan tidak melakukan perangkapan tugas dan jabatan.

Kode Etik Audit Internal

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Auditor Internal dituntut untuk bersikap profesional dan taat pada kode etik yang telah ditetapkan. Kode Etik merupakan prinsip-prinsip profesional internal auditor dalam pelaksanaan audit yaitu: Integritas, Objektivitas,

Kerahasiaan, Kompetensi. Auditor Internal diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip kode etik, sebagai berikut:

Integritas

Internal Auditor memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar untuk penilaian (*judgement*) yang handal.

Objektivitas

- Internal Auditor menjunjung tinggi ketidakterpilihan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa.
- Internal Auditor melakukan penilaian (*judgement*) secara seimbang (*balanced*) dengan memperhatikan semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain.

Kerahasiaan

Internal Auditor menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa otorisasi yang berwenang, kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi tersebut.

Kompetensi

- Internal Auditor menggunakan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan tugas yang diberikan.
- Aktivitas internal audit harus dilaksanakan dengan keahlian dan kemahiran profesional yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Fungsi Audit Internal

Secara umum, fungsi dari Audit Internal dibagi menjadi 2 (dua), yaitu fungsi *assurance* dan *consulting*.

Fungsi Assurance

Pelaksanaan fungsi *assurance* bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola telah dilakukan oleh seluruh unit kerja sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis di

Perseroan maupun peraturan eksternal. Pelaksanaan fungsi *assurance* bertujuan untuk memberikan penilaian secara independen bahwa pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola telah dilakukan oleh seluruh unit kerja sesuai dengan kebijakan dan prosedur di Perseroan maupun peraturan eksternal. Dalam melaksanakan fungsi *assurance*, Audit Internal mempergunakan metode audit berbasis risiko atau *Risk Based Audit* (RBA). Dalam metode tersebut, penentuan unit kerja dan aktifitas yang akan diaudit serta ruang lingkup audit dilakukan berdasarkan evaluasi risiko yang dilakukan secara periodik dengan fokus risiko-risiko utama di semua lini perusahaan baik di jaringan kantor Cabang/Region maupun *Head Office* berdasarkan *concern management*, input dari unit kerja, data *analytic* maupun yang bersifat *mandatory* (regulasi).

Fungsi Consulting

Selain fungsi *assurance*, Audit Internal juga melaksanakan fungsi *consulting* sebagai *strategic partner* dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses dan aktifitas Perseroan melalui penelaahan dan evaluasi risiko dan kontrol dengan memberikan saran dan masukan perbaikan proses dan aktifitas. Dalam melaksanakan fungsi analisa sendiri yang merupakan inisiatif Audit Internal maupun bekerja sama dengan unit kerja lainnya berdasarkan permintaan dari manajemen dan unit kerja.

Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Audit Internal

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal

1. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas Internal Audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/*control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran perusahaan dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.
2. Melaksanakan investigasi, melaporkan, dan menyampaikan rekomendasi/kesimpulan atas fraud kepada Manajemen.
3. Mengembangkan dan menjalankan program untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas Internal Audit.
4. Memberikan rekomendasi atas hasil audit dan memonitor tindak lanjut hasil aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi.
5. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
6. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan

eksternal audit dan unit/fungsi penyedia *assurance* lainnya, agar dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.

7. Dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit.
8. Membuat analisis dan penilaian di bidang operasional dan kegiatan lain melalui audit.
9. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
10. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
11. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Anggota Direksi lainnya serta Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
12. Memonitor, menganalisis dan melaporkan tindak lanjut hasil Aktivitas Internal Audit dan Aktivitas Investigasi.

Kewenangan Audit Internal

1. Melakukan aktivitas internal audit terhadap kegiatan semua unit kerja kantor pusat maupun kantor cabang dalam organisasi perseroan.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
4. Melakukan komunikasi dengan auditor eksternal termasuk regulator.
5. Melakukan akses terhadap seluruh informasi, catatan, karyawan, dan termasuk didalamnya namun tidak terbatas pada rekening/catatan karyawan dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct* yang dilaporkan kepada Direksi.
7. Mendapatkan persetujuan dan/atau meminta surat kuasa dengan hak substitusi kepada karyawan pada saat melakukan pemeriksaan atas indikasi pelanggaran atau ketidaksesuaian, berupa:
 - Data/informasi Rekening di Bank Mandiri dan/atau Bank Lain.
 - Data/informasi baik elektronik maupun non elektronik.
8. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

Pengembangan Kompetensi Audit Internal

Perseroan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Auditor Internal dalam rangka

meningkatkan kompetensi karyawan. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Audit Internal. Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala Divisi Audit Internal di sepanjang tahun

2023 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini. Berikut disampaikan kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala Divisi, Kepala Departement, Lead Auditor, IT Audit Specialist, dan Auditor.

Training Type	Nama Pelatihan	Tempat Pelaksanaan	Start	PIC/Vendor
Inhouse Training	Digital Transformation & Implications on Accounting & Finance	Universitas Indonesia	21-Jun-23	Universitas Indonesia
Inhouse Training	NEOP Training	Online	2-Mar-23	MTF
Inhouse Training	NEOP Training	Online	21-Sep-23	MTF
Inhouse Training	Training Microsoft Excel	Online	7-Aug-23	MTF
Public Training	2023 IIA Indonesia National Conference	Batam	30-Aug-23	IIA
Public Training	Awareness Training of Information Security Management System based on ISO 27001:2022	Online	20-Jan-23	MTF
Public Training	Forum Penguatan Governansi dan Integritas Pelaporan Keuangan & Practical Implementation of Risk Management and Internal Audit in State Owned Enterprises	Yogyakarta	26-Sep-23	BUMN & FKSPI
Public Training	Mastering ITIL v4 Fundamental	Intiland Tower Jakarta	16-Nov-23	PT Andalan Teknologi Inovasi
Public Training	Sertifikasi Dasar Pembiayaan - Managerial	Jakarta	17-Mar-23	SPPI
Public Training	Training Bank Mandiri Audit Course Tahun 2023	Mandiri University	30-Jan-23	Bank Mandiri
Public Training	Training of Internal Audit ISO 27001:2022 based on ISO 19011:2018	Online	22-Feb-23	Crowe Indonesia
Public Training	Workshop Pengamanan Malware	Online	10-Mar-23	Bank Mandiri
Internal Training	Penyusunan Laporan Hasil Audit yang efektif	Graha Mandiri	Nov 2023	MTF

Rapat Audit Internal

Audit Internal dalam menjalankan fungsinya baik assurance maupun *consulting* secara periodik telah mengikuti rapat-rapat terkait dengan hasil Audit dan investigasi, baik dengan Divisi terkait di Kantor Pusat maupun rapat-rapat Komite internal Perseroan, antara lain Komite *Anti Fraud* dan Komite Disiplin pegawai. Pada rapat tersebut akan dibahas terkait dengan tindak lanjut dan korektif *action* berdasarkan hasil audit dan investigasi, utamanya untuk melakukan tindakan korektif dan pencegahan agar internal kontrol perseroan dapat berjalan dengan baik serta mencegah terulangnya kembali penyimpangan/kelalaian di masa yang akan datang. Selain itu Audit internal secara periodik juga menyampaikan hasil audit dan investigasi pada Rapat Direksi, Komite Audit dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan arahan dan dukungan Perseroan.

Kebijakan

Audit Internal telah mempunyai kebijakan/pedoman untuk mendukung dan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, yaitu:

1. Piagam Internal Audit (Internal Audit *Charter*)
2. *Standard Operasional Prosedur* (SOP) Internal Audit
3. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Internal Audit
4. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Audit Information *Technology* (IT)

Frekuensi Rapat

	Direksi	Dewan Komisaris	Komite Audit
Jumlah Rapat	6	4	4

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Audit Internal Tahun 2023

No.	Jenis Audit	Subjek Audit	Objek Audit
1	Audit Umum	Regional 1-9	Kantor Regional 1 - 9
		New Branch Multiguna	Cabang Multiguna: Palembang, Bekasi, Yogyakarta dan Solo
		Human Capital	Divisi Human Capital & Divisi HC Learning
		Sales & Marketing	Divisi Marketing, Divisi Strategi Marketing dan Regional/Cabang
		Pembiayaan Channeling Fintech	Divisi Corporate Planning & Performance Management
		Fungsi Credit Operation	Divisi Operation Support Management
		Project Credit SPRINT	Kantor Vendor Sprint di Malang
		Pengelolaan Collection dan Biaya Tarik AR Management	Divisi AR Management Divisi Recovery & Litigation
		Pembiayaan Fleet	Divisi Corporate Fleet
		Pembiayaan Commercial Car – MTF Palembang	MTF Cabang Palembang 1 & 2
		Pengadaan Event Divisi Mandiri Liaison (KKB)	Divisi Mandiri Liaison
2	Audit Mandatory	Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	Divisi Credit Management Cabang Sampling
		Layanan Pengaduan Nasabah	Department Customer Care Cabang Sampling
		Risk Management – Legal Risk	Divisi Legal (New Division)
		Information Technology - Infrastructure	Department Operation and Network (Divisi IT) DC & DRC Cabang Sampling
		Information Technology - Application	Divisi Digital HO
		Information Technology - Security	Department Planning and Security (Divisi IT) Cabang Sampling
3	Audit Kajian	Vendor Management	Divisi Operation & Support
		Biaya Litigation/Legal	Divisi Legal Divisi Recovery & Litigation
		Pengelolaan Dana Refund Dealer	Divisi Sales and Marketing Divisi Accounting, Tax dan Financial Planning
		Fraud Management	Unit Kerja Anti-fraud

Sistem Manajemen Risiko

Komitmen Pengelolaan Risiko yang Handal

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, Perseroan sangat menyadari berbagai potensi risiko yang dihadapi dalam industri pembiayaan. Untuk itulah, Perseroan secara proaktif mengelola risiko guna mencapai pertumbuhan pembiayaan dan operasional yang sehat serta mendorong keberlanjutan bisnis sesuai dengan *risk appetite* yang ditetapkan. Manajemen risiko korporat semakin menjadi tuntutan, karena keberhasilannya merupakan faktor kunci sukses pencapaian tujuan dan kemenangan persaingan. Dalam aktivitas bisnis, Perseroan menghadapi beberapa risiko yang melekat (*inherent risk*) yaitu:

1. Risiko Strategis, merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
2. Risiko Operasional, merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perseroan.
3. Risiko Kredit, merupakan risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perseroan.
4. Risiko Pasar, merupakan risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
5. Risiko Likuiditas, merupakan risiko akibat ketidakmampuan perseroan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan perseroan.
6. Risiko Hukum, merupakan risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
7. Risiko Kepatuhan, merupakan risiko akibat perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi perseroan.
8. Risiko Reputasi, merupakan risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perseroan.

Pembentukan Divisi Manajemen Risiko sebagai Pengelola Risiko Perseroan

Perseroan membentuk Divisi Retail Risk Management dan Divisi Corporate Risk Management untuk memastikan bahwa pengelolaan manajemen risiko dilakukan terukur dan sistematis. Uraian lengkap tentang profil fungsi Manajemen Risiko dan berbagai upaya pengelolaan risiko yang telah dilakukan dapat dilihat pada bagian "Fungsi Manajemen Risiko" dalam bab ini.

Penerapan Sistem Manajemen Risiko

Mandiri Tunas Finance Sesuai dengan POJK NO. 44/POJK.05/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, penerapan manajemen risiko Perseroan ditopang oleh 4 (empat) pilar penting sebagai berikut:



PILAR 1**PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara aktif melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Pengawasan aktif Direksi melalui Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit, *Asset and Liabilities Committee* (ALCO), Komite *Project*, dan Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam kegiatan Manajemen Risiko antara lain meliputi:

1. Memahami risiko yang melekat pada aktivitas fungsional Perseroan;
2. Mengevaluasi dan menyetujui kebijakan Manajemen Risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun dan setiap saat dalam hal terdapat faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan;
3. Melakukan evaluasi terhadap Direksi terkait penerapan Manajemen Risiko agar sesuai dengan kebijakan, strategi dan prosedur Perseroan yang telah ditetapkan;
4. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi terkait dengan pengawasan aktif dalam kegiatan Manajemen Risiko antara lain meliputi:

1. Memahami risiko yang melekat pada aktivitas fungsional Perseroan;
2. Melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif;
3. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif serta mengevaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat dalam hal terdapat faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan;
4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Perseroan secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh fungsi Manajemen Risiko dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala;
5. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Direksi;
6. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
7. Memastikan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko, antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses Manajemen Risiko;

8. Memastikan dan menetapkan tugas serta tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja, dimana fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen, tercermin dengan adanya pemisahan fungsi antara unit kerja Manajemen Risiko dengan unit kerja operasional;
9. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian Risiko, kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko, ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.

PILAR 2**KECUKUPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO SERTA PENETAPAN LIMIT RISIKO**

Perseroan menyusun kebijakan-kebijakan terkait manajemen risiko yang direviu secara berkala dan selalu disesuaikan dengan keadaan usaha terkini. Kebijakan-kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam *Standard Operational Procedure* (SOP) dan Pedoman Teknis Operasional (PTO) yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Perseroan juga telah menetapkan limit risiko yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*) dan strategi Perseroan secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal Perseroan untuk menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul. Dalam rangka pengendalian risiko, limit digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi risiko yang dilakukan manajemen. Perseroan juga memiliki kebijakan-kebijakan mengenai batasan persetujuan/otorisasi untuk transaksi pembiayaan maupun yang bukan transaksi pembiayaan. Kebijakan pencadangan kerugian piutang Perseroan juga sejalan dengan kebijakan pencadangan pada Perseroan Induk yang sesuai dengan ketentuan regulator.

PILAR 3**KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO**

Perseroan memiliki perangkat untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko secara berkala. Perangkat tersebut digunakan fungsi Manajemen Risiko untuk memberikan masukan serta rekomendasi kepada Direksi untuk memastikan kegiatan usaha dapat mencapai target yang ditetapkan.

Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Perusahaan dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Hasil identifikasi risiko diterjemahkan menjadi parameter-parameter risiko yang akan diukur secara berkala. Selanjutnya, Perusahaan melakukan pengukuran risiko atas parameter-parameter risiko

yang telah ditetapkan, di mana pemantauan tersebut dilakukan oleh satuan kerja yang independen dari satuan kerja pemilik risiko. Atas hasil pemantauan tersebut, fungsi Manajemen Risiko bersama unit kerja terkait memberikan rekomendasi kepada Direksi.

Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, Perseroan telah mengembangkan sistem manajemen informasi yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten. Sistem dikembangkan untuk mendukung pengelolaan risiko yang lebih efisien agar pengambilan keputusan dapat lebih cepat namun tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian. Sistem informasi manajemen risiko dapat mencakup informasi, seperti: eksposur risiko, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibanding target yang ditetapkan, dan selanjutnya informasi-informasi tersebut disampaikan secara rutin kepada Direksi.

PILAR 4

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL YANG MENYELURUH

Perseroan menjalankan praktik pengelolaan risiko yang efektif di seluruh unit kerja dengan menerapkan kebijakan *three line of defense models* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Unit bisnis sebagai pertahanan lapis pertama bertanggungjawab atas efektivitas pengelolaan risiko, konsistensi pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan pengendalian internal yang efektif.
2. Unit Manajemen Risiko dan Kepatuhan sebagai pertahanan lapis kedua bertanggungjawab atas pengembangan dan pemantauan manajemen risiko secara keseluruhan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang dijalankan oleh fungsi bisnis, dan memantau risiko perusahaan secara keseluruhan.
3. Unit Audit Internal sebagai pertahanan lapis ketiga bertanggungjawab untuk melakukan review dan evaluasi rancang bangun dan implementasi manajemen risiko serta melakukan penilaian kecukupan dan efektifitas implementasi manajemen risiko secara keseluruhan, guna memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua telah berjalan efektif.

Sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko antara lain mencakup kesesuaian sistem pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko termasuk kecukupan kebijakan, prosedur dan sistem informasi manajemen senantiasa dikaji dan direviu secara berkala.

Pengelolaan Risiko Terintegrasi dengan Entitas Induk

Selain itu, sebagai entitas anak dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Perseroan juga melakukan Konsolidasi Risiko dengan entitas induk di mana aktivitas ini merupakan bukti kepatuhan kepada Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006 dan Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tertanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Melalui kepatuhan tersebut, penerapan manajemen risiko Perseroan merupakan pendekatan terpadu dan konsisten dalam melakukan penelaahan, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan risiko terhadap seluruh komponen kelompok Perseroan. Perkembangan konsolidasi ini secara berkala telah dikomunikasikan Bank Mandiri kepada regulator.

1. *First Line*, yang berkaitan dengan pemenuhan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak.
2. *Second Line*, merupakan pendekatan kebutuhan internal Perusahaan secara keseluruhan yang mencakup perangkat (*tools*), kesadaran risiko (*awareness*), tata kelola perusahaan (*governance*), dan sistem informasi manajemen risiko (*system*).

Berbagai bentuk aktivitas yang dilakukan dalam rangka konsolidasi risiko antara lain:

- *Annual Integrated Risk Conference (AIRC)* antara Perusahaan Induk dan seluruh Perusahaan Anak;
- *Forum Integrated Risk Committee (FIRC)* yang dilakukan bersama Bank Mandiri setiap triwulan untuk membahas perkembangan Profil Risiko *Inherent* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) di MTF.
- Penerapan *Risk Appetite Statement (RAS)* bersama dengan Bank Mandiri sebagai salah satu *tools Risk Management* untuk mengukur tingkat risiko yang masih dapat diterima Perusahaan dalam mendukung strategi bisnis.
- Pelaksanaan *stress testing* terintegrasi Bank Mandiri dengan perusahaan anak setiap triwulan, menggunakan beberapa asumsi/skenario sebagai bentuk antisipasi aksi perusahaan pada kondisi lingkungan bisnis yang buruk.
- Penerapan model skoring yang dikembangkan oleh MTF dan direviu secara berkala oleh Bank Mandiri.
- Monitoring kondisi likuidas perusahaan secara berkala yang dilaporkan kepada Perusahaan Induk.
- *Risk Awareness Survey (RAWS)* dilakukan setiap tahun untuk mengukur perkembangan *risk awareness*.
- *Risk Based Bank Rating* dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan tata kelola perusahaan, profil risiko, kemampuan permodalan, dan tingkat rentabilitas perseroan.

Jenis-jenis Risiko yang Dihadapi dan Pengelolaan Serta Mitigasinya

Dari 8 jenis risiko yang melekat, terdapat 4 (empat) risiko utama yang dihadapi Perseroan, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko strategi, dan risiko likuiditas.

Berikut adalah penjabaran risiko-risiko yang melekat serta pengelolaan atas risiko tersebut:

Risiko Kredit

Risiko kredit berasal dari aktivitas pemberian pembiayaan. Pengelolaan risiko kredit bertujuan untuk mengukur, mengantisipasi, dan meminimalisir kerugian akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan dituangkan dalam *Standard Operation Procedures (SOP)*. Kebijakan pembiayaan perusahaan mengatur bahwa proses pembiayaan kepada debitur dilakukan oleh pihak-pihak yang independen untuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian.

Persetujuan Pembiayaan

Dalam menilai aplikasi kredit, Perseroan senantiasa mengacu pada regulasi dan prinsip kehati-hatian diantaranya berdasarkan faktor penilaian kemampuan membayar, prospek usaha dan kinerja debitur. Perseroan telah menerapkan *mobile survey* dalam rangka meningkatkan kualitas pencairan kredit. Proses kredit dan pengelolaan risiko kredit segmen retail dilakukan melalui proses *end-to-end* yang terintegrasi dalam sistem e-Star. Proses pengambilan keputusan pada segmen *retail* dilakukan melalui sistem *credit scoring*. *Model credit scoring* secara berkala dilakukan validasi untuk memastikan keakuratannya. Untuk mempercepat proses pengambilan keputusan kredit, Perseroan telah memberikan kewenangan memutus kredit kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan kualifikasi tertentu. Proses pengambilan keputusan pada segmen *corporate fleet* dilakukan melalui sirkuler Nota Analisa Pembiayaan, dan Rapat Komite Pembiayaan sesuai dengan jumlah fasilitas pembiayaan yang diajukan.

Perusahaan juga telah menyusun *portfolio guideline* dan telah menetapkan industri limit sebagai dasar arah pertumbuhan bisnis segmen Corporate Fleet di tahun 2024. Penyusunan *Portfolio Guideline* dan Industri Limit disesuaikan dengan kondisi makro ekonomi saat ini dan prospek industri dalam setahun ke depan, sehingga perusahaan secara tepat memilih pengembangan industri yang sehat dengan tingkat risiko rendah serta mampu membatasi pertumbuhan

industri yang sedang tidak sehat dengan tingkat risiko tinggi.

Monitoring Pembiayaan

Monitoring pembiayaan pada segmen *corporate fleet* dilakukan dengan metode *Watchlist* yang merupakan suatu metode standar, terstruktur dan komprehensif dalam memantau kinerja debitur korporasi. Monitoring dilakukan secara berkala bersama dengan unit kerja *marketing* sebagai pengelola *account*, unit kerja kredit dan unit kerja *collection*. Selain itu, dilakukan juga *Monthly Performance Review* antara unit kerja bisnis, unit kerja kredit, unit kerja *collection* dan unit kerja *risk* dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi *performance portfolio* segmen Corporate Fleet setiap bulannya.

Monitoring kredit ritel dilakukan pada level *portfolio*. Analisa *portfolio* dilakukan secara berkala dan dituangkan dalam laporan bulanan yang disampaikan kepada Direksi. Fungsi Manajemen Risiko juga melakukan monitoring secara berkala terhadap kualitas pemutusan dari pejabat pemegang kewenangan memutus kredit dan memberikan rekomendasi kepada Direksi atas hasil monitoring tersebut.

Sebagai langkah antisipatif (*early warning signal*), dilakukan proses simulasi dan *stress testing* terhadap *portofolio* secara berkala untuk mengetahui perubahan kualitas *portofolio* terhadap perubahan makro ekonomi. Hasil *stress testing* memberikan panduan bagi Direksi untuk mengantisipasi kondisi makro yang mungkin terjadi.

Credit Collection dan Recovery

Perusahaan telah menyusun kebijakan penanganan *collection* dan *recovery* berdasarkan jenis produk dan berdasarkan hari tunggakan debitur. Kegiatan penagihan atas debitur bermasalah didukung oleh *Automatic Collection System* yang bersifat *end-to-end* dalam membantu memastikan proses penagihan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam menjalankan kegiatan *collection*, pegawai yang menangani fungsi penagihan dan eksekusi agunan telah memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan. Selain itu pegawai dibekali dengan *mobile collection device* yang dilengkapi dengan mesin EDC (*electronic data capture*) untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan proses penagihan kepada debitur.

Risiko Operasional

Risiko operasional disebabkan karena tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan. Untuk mengelola dan

memitigasi risiko operasional, Perseroan melakukan penyesuaian metodologi *Risk based Audit* melalui pemeliharaan *risk library*, menyediakan fasilitas *Whistle Blowing System*, dan mengimplementasikan perangkat *Operational Risk Management Tools* (ORM Tools). ORM Tools yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

Quality Assurance (QA)

QA merupakan *tools* yang berfungsi sebagai *Early Detection System* (EDS) atau pendeteksi dini *fraud event* atas kejadian yang berpotensi merugikan perusahaan. QA juga merupakan sebagai *post check audit* yang dilakukan secara berkala melalui pengecekan *account* secara *sampling* dan konfirmasi kepada debitur melalui telepon serta PIC unit kerja kantor cabang (apabila diperlukan) dalam rangka menemukan adanya ketidaksesuaian prosedur kerja yang dijalankan.

Risk Control & Self Assessment (RCSA)

RCSA dipergunakan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang melekat pada aktivitas di setiap unit kerja, serta menilai kualitas kontrol atas risiko yang telah dilakukan unit kerja pemilik risiko melalui parameter *Top Risk* dari risiko operasional yang terjadi. Parameter risiko-risiko tersebut dapat berubah sejalan dengan pertumbuhan bisnis yang terjadi di MTF.

MTF Loss Events Database (MLED)

MLED *database* berisi data historis kejadian (pencatatan berdasarkan tanggal kejadian, deskripsi kejadian dan faktor penyebab kejadian risiko) yang dapat menimbulkan kerugian maupun potensi kerugian operasional (*fraud* maupun *non-fraud*). Pencatatan kejadian tersebut dilakukan oleh setiap unit kerja pemilik risiko secara berkala.

Control Testing (CT)

Control Testing merupakan pengujian efektivitas kontrol atas risiko yang dilakukan oleh unit kerja pemilik risiko, secara *on-desk* maupun *on-site*. *Control testing* merupakan salah satu proses penting yang menguji kecukupan kontrol secara periodik dan mengidentifikasi potensi kelemahan termasuk mitigasi risiko serta menetapkan tindakan perbaikan.

Issue and Action Management (IAM)

Merupakan pencatatan atas tindak lanjut perbaikan dari isu/kondisi/ketidaksesuaian prosedur yang ditemukan dari berbagai sumber (seperti: indikasi temuan dari pelaksanaan QA, hasil *control testing*, insiden maupun *Self Identified Issue*).

Business Continuity Management

Untuk menjamin kelangsungan operasional perusahaan

dalam kondisi darurat, Perseroan telah menyiapkan kebijakan yang berisi langkah-langkah yang harus diambil sebelum, selama dan setelah terjadinya suatu keadaan darurat. Kebijakan tersebut diatur dalam *Business Continuity Management* (BCM) yang meliputi *Business Continuity Plan* (BCP), *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan *Emergency Response Procedure* (ERP), sebagai berikut:

- *Disaster Recovery Plan* (DRP) DRP adalah suatu perencanaan menyeluruh mengenai tindakan yang harus diambil sebelum, selama dan setelah suatu peristiwa yang mengganggu dan menyebabkan suatu kerugian sistem informasi. Tujuan DRP yaitu memastikan proses kegiatan operasional Perseroan tetap berjalan dengan baik ketika terjadi permasalahan pada sistem informasi, dengan menggunakan sistem cadangan (*backup*) yang telah dipersiapkan.
- *Emergency Response Plan* (ERP) ERP adalah suatu strategi perencanaan untuk mengantisipasi dan menanggulangi keadaan darurat yang wajib dijalankan oleh tim khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan penyelamatan pada saat terjadi keadaan darurat.
- *Business Continuity Plan* (BCP) BCP adalah suatu perencanaan yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan operasional Perseroan saat terjadi gangguan yang disebabkan oleh bencana alam atau manusia, yang berpotensi menyebabkan kerugian. BCP disusun untuk meminimalisasi akibat dari gangguan dan memastikan operasional Perseroan dapat berjalan.

Dalam hal pengelolaan risiko operasional, setiap unit kerja bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko operasional yang melekat dan memiliki fungsi dalam pengelolaan risiko. Unit bisnis sebagai *risk owner* merupakan *first line of defense*, unit kerja Manajemen Risiko sebagai *supporting* unit berperan sebagai *second line of defense* dan Internal Audit berperan sebagai *third line of defense*.

Risiko Strategi

Pengelolaan risiko strategi bertujuan untuk mengantisipasi potensi kegagalan dalam mencapai tujuan Perusahaan akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan, pelaksanaan strategi, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan bisnis. Dalam mengelola risiko strategi, Perseroan melakukan *review* kinerja dan melakukan evaluasi penyusunan target bisnis, serta melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai *risk appetite* dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal. Selain itu, dilakukan pemantauan pencapaian target

pembiayaan, realisasi anggaran terhadap rencana anggaran, realisasi pengembangan cabang, dan realisasi pemenuhan SDM oleh unit-unit kerja terkait secara periodik.

Risiko Likuiditas

Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama unit kerja terkait melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko likuiditas dengan tujuan meminimalisir risiko yang timbul akibat kegagalan Perseroan dalam menyediakan pendanaan pada jangka waktu tertentu. Dalam mengelola risiko likuiditas, Satuan Kerja Manajemen Risiko menetapkan nilai limit untuk parameter risiko likuiditas serta melakukan stress testing risiko likuiditas secara berkala. Pengelolaan risiko likuiditas didukung oleh *Asset & Liability Committee* (ALCO) dengan tujuan memonitor dan membuat proyeksi terhadap seluruh kewajiban yang jatuh tempo, aset, dan pertumbuhan pembiayaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan sumber pendanaan, Perseroan menjaga relasi dengan Perbankan, menjaga kualitas pembiayaan dan reputasi perusahaan

Risiko Kepatuhan, Pasar, Hukum, dan Reputasi

Selain risiko kredit, operasional, strategis, dan likuiditas, Perseroan juga memastikan pengelolaan risiko kepatuhan, pasar, hukum, dan reputasi dilaksanakan dengan baik. Seluruh parameter risiko telah dimasukkan kedalam *Risk Appetite Statement* (RAS) perseroan dan dimonitor secara berkala. Dalam mengelola risiko kepatuhan, Divisi Retail Risk Management dan Divisi *Corporate Risk Management* telah menetapkan parameterparameter yang dimonitor secara berkala.

Pengelolaan risiko kepatuhan juga didukung oleh *Compliance Management System* (CMS) untuk menghindari ketidakpatuhan perusahaan atas ketentuan internal maupun eksternal. Dalam mengelola risiko pasar, Perseroan melakukan mitigasi berupa penetapan limit aktivitas transaksi dalam mata uang asing dan suku bunga mengambang yang tertuang dalam *Risk Appetite Statement*, melakukan *full hedge* pendanaan dalam mata uang asing dan suku bunga mengambang, melakukan

stress testing untuk mengetahui dampak kondisi pasar yang ekstrim terhadap eksposur perusahaan.

Dalam mengelola risiko hukum, Perseroan secara berkala melakukan internalisasi budaya risiko hukum melalui sosialisasi kepada seluruh pegawai yang dilaksanakan oleh unit litigasi serta Manajemen Risiko.

Dalam mengelola risiko reputasi, khususnya untuk mitigasi timbulnya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perusahaan yang bersifat negatif, serta mitigasi atas strategi komunikasi Perusahaan yang kurang efektif, maka perusahaan telah memiliki unit kerja *Corporate Communication* dan juga unit kerja *Customer Care*.

Review terhadap Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko telah efektif dan terus dikembangkan sebagai upaya agar tersedia informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu dan dapat diandalkan sehingga dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan Manajemen Risiko untuk menilai, memantau dan memitigasi risiko yang dihadapi. Penilaian Profil Risiko Perseroan sepanjang tahun 2023 mencerminkan bahwa risiko-risiko yang dihadapi dapat dikelola dengan baik sehingga dapat mendukung pengembangan bisnis lebih lanjut. Dengan kata lain, Manajemen Risiko telah diterapkan oleh MTF dengan baik dan efektif.

Pernyataan Manajemen atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Sistem Manajemen Risiko Perseroan dinilai sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen risiko, ketersediaan informasi yang memadai dan tepat waktu mencakup eksposur risiko, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, serta informasi mengenai hasil realisasi penerapan manajemen risiko terhadap target yang ditetapkan. Sistem informasi manajemen risiko Perseroan juga didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Auditor Eksternal/Akuntan Publik

Akuntan publik merupakan organ eksternal Perseroan yang berfungsi memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Perseroan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Keberadaan akuntan publik diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Kepatuhan terhadap Akuntansi Keuangan Indonesia

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan Perseroan dan patuh terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Baepam-LK) No. VIII.G.7, Lampiran Surat Keputusan No. KEP-347/BL/2012, tanggal 25 Juni 2012 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Prosedur Audit Eksternal dan Standar Audit

1. Audit atas laporan keuangan Perseroan dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.
2. Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI.
3. Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan.
4. Audit mengandung risiko inherent bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen.
5. Manajemen, dalam hal ini Direksi, memberikan tanggung jawabnya terhadap laporan keuangan yang telah di audit oleh KAP, sesuai Peraturan OJK No. 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.
6. Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Perseroan untuk di-review oleh badan atau otoritas terkait.
7. Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

Kriteria Akuntan Publik

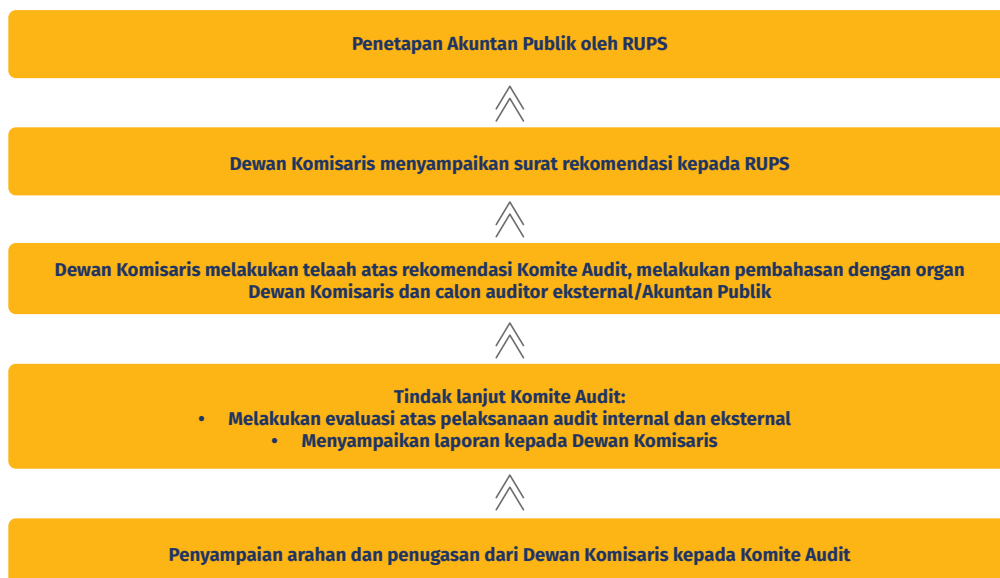
Perseroan menetapkan 4 (empat) syarat atau kriteria yang harus dimiliki KAP dalam prosedur penunjukannya, yaitu sebagai berikut:

- Terdaftar di OJK;
- KAP yang termasuk dalam kelompok 4 (empat) besar di Indonesia;
- Memiliki afiliasi internasional;
- Memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan berstatus emiten atau perusahaan terbuka.

Mekanisme Penunjukan Akuntan Publik

Tahapan mekanisme penunjukan KAP:

1. Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon Auditor eksternal dengan meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa.
2. Dewan Komisaris dapat melakukan penunjukan kembali auditor eksternal dengan berdasarkan pada hasil evaluasi atas kinerja auditor eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan.
3. Dewan Komisaris menyampaikan alasan pencalonan tersebut kepada RUPS dan besarnya honorarium/ imbalan jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut.
4. Usulan kepada RUPS tersebut dapat disampaikan melalui surat tersendiri yang merupakan bagian dari surat tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja tahunan Perseroan.
5. Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja auditor eksternal melalui Komite Audit sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.
6. Untuk proses penunjukan calon auditor eksternal dan atau penunjukan kembali auditor eksternal yang dilakukan oleh RUPS, Dewan Komisaris cukup memberikan kuasa kepada RUPS untuk menetapkan auditor tersebut.



Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Tahun 2023

Pada tahun 2023 Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) untuk melaksanakan audit laporan keuangan PT Mandiri Tunas Finance sebagaimana ditetapkan dalam RUPS Tahunan tanggal 28 Juni 2023.

Kantor Akuntan Publik	Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
Tanda Terdaftar	STTD.KAP-03/PM.22/2018
Akuntan Publik	Danil Setiadi Handaja, CPA
Nomor Registrasi	AP1008
Tahun Audit	2023
Periode Penugasan	2023
Jasa Audit	Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
Jasa Non Audit/Lainnya	Surat Pernyataan Akuntan (<i>Comfort Letter</i>) Penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI
Biaya	Rp 2.097.900.000,-

Kantor Akuntan Publik 2020-2022

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan	Izin KAP	Biaya (Rp)	Opini
2022	Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja	Yovita	STTD.KAP-03/PM.22/2018	1.048.950.000	“Wajar dalam semua hal yang material”
2021	Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja	Yovita	STTD.KAP-03/PM.22/2018	998.000.000	“Wajar dalam semua hal yang material”
2020	Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja	Yovita	STTD.KAP-03/PM.22/2018	950.000.000	“Wajar dalam semua hal yang material”

Jasa Lain yang Diberikan KAP

Pada tahun 2023 perseroan menunjuk KAP Purwantono, Sungkoro & Surja untuk penerbitan Surat Pernyataan Akuntan (*Comfort Letter*) Penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI. Jasa ini disepakati dengan fee sebesar Rp965.700.000 (setelah pajak) dengan Nomor SPK: 083/SPK-PROC/MTF/III/2023.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai guna memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan Perusahaan. Sistem pengendalian internal pelaksanaannya diawali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban secara tertib, terkendali, efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan Perusahaan telah dilakukan secara efisien dan efektif.

Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Internal di lingkup Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Perseroan
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
4. Mengurangi dampak kerugian dari adanya penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi sumber daya

Penerapan Sistem Pengendalian Internal di Lingkup Perseroan

Sistem Pengendalian Internal diterapkan mulai dari penetapan sasaran dan strategi di seluruh organisasi, identifikasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi sasaran dan strategi dimaksud, dan pengelolaan risiko agar tetap berada dalam batas toleransi (*risk appetite*), untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam rangka pencapaian tujuan Perseroan. Kerangka kerja sistem pengendalian internal yang menjadi acuan Perseroan adalah kerangka kerja terbaik (*best practices*) yang telah dipraktikkan oleh perusahaan-perusahaan di dunia, yaitu COSO *Internal Control Framework*, yang antara lain mencakup komponen-komponen:

1. Lingkungan pengendalian internal dalam Perseroan, yang terdiri dari integritas, nilai etika dan kompetensi dari Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai Perseroan, filosofi dan gaya kepemimpinan manajemen termasuk cara yang ditempuh dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya, pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia serta perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Manajemen risiko, yang mencakup proses identifikasi, analisa, penilaian dan mitigasi atau respon atas risiko yang relevan dengan bidang usaha Perseroan.
3. Aktivitas kontrol, mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan agar seluruh proses di Perseroan terkendali sesuai sasaran yang telah ditetapkan,

antara lain aktivitas yang terkait dengan struktur organisasi mencakup kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan pengamanan aset perusahaan.

4. Sistem informasi dan komunikasi, mencakup aktivitas yang terkait dengan penyajian laporan kegiatan Perseroan dan penyampaiannya kepada pihak terkait, yang antara lain mencakup informasi dan komunikasi kegiatan operasional, kegiatan finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku.
5. Monitoring, mencakup aktivitas atau proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk kualitas fungsi Audit Internal dan kualitas unit kerja di dalam struktur organisasi Perseroan, sehingga sistem pengendalian internal dapat dilaksanakan secara optimal, dan penyimpangan yang terjadi segera dilaporkan kepada Direksi dan Komisaris melalui Komite Audit.

Pengendalian Keuangan dan Operasional

Perseroan memiliki komitmen untuk mengungkapkan laporan tersebut kepada semua pihak yang berkepentingan secara adil dan transparan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa memelihara sistem pengendalian internal yang menjamin keandalan dan kecukupan setiap transaksi.

Penyajian laporan keuangan (neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas) pada setiap tahun buku dilakukan untuk memenuhi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Perseroan. Untuk memenuhi semua prinsip di atas, Perseroan telah memiliki kebijakan yang menjamin bahwa transaksi dicatat dengan segera, akurat dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai.

Transaksi yang tercatat dalam sistem akuntansi sekurang-kurangnya telah mendapatkan persetujuan Manajemen yang memiliki kewenangan untuk keperluan tersebut dan dicatat dengan benar. Setiap laporan keuangan perusahaan secara wajar dan akurat menggambarkan transaksi yang sebenarnya tanpa sedikit pun adanya upaya menyembunyikan fakta kepada pembaca laporan. Semua pihak, baik Direksi, Komisaris dan Karyawan yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi tersebut, wajib memahami dan menjalankan kebijakan sistem pengendalian internal dan prosedur pencatatan akuntansi keuangan perseroan.

Dalam mendukung pengendalian risiko operasional secara menyeluruh, Perseroan telah menerapkan hal-hal berikut:

1. Kegiatan pengendalian secara umum melibatkan seluruh karyawan dan Manajemen MTF di semua jenjang organisasi yang tertuang dalam seluruh kebijakan dan prosedur seperti:
 - Penerapan *Segregation of Duties* berupa pemisahan fungsi dalam menjalankan tugas sehingga tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya.
 - Penerapan *Four Eyes Principles* dalam proses kredit seluruh segmen; pemisahan fungsi pemrakarsa kredit dengan pemutus.
 - Penerapan *Line of Defenses* untuk aktivitas pertahanan berlapis.
2. Kegiatan pengendalian sesuai fungsi organisasi meliputi:
 - Pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen (*Top Management Reviews*) secara berkala Direksi meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional dari Kepala Unit Kerja dalam rangka melakukan kaji ulang terhadap hasil realisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
 - Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Review*) ini dilaksanakan oleh Audit Internal terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal, pengelolaan risiko dan *corporate governance*. Kegiatan audit dilakukan untuk setiap level Unit Kerja Perseroan dan dilaporkan kepada Direktur Utama dan Komite Audit.

Terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, MTF memiliki komitmen untuk selalu mematuhi peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dengan:

1. Membentuk Unit Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan seluruh unit kerja di MTF.
2. Melakukan pemantauan Kepatuhan Pelaporan kepada BI/OJK/regulator lainnya.
3. Strategi Manajemen Risiko Kepatuhan adalah mempunyai kebijakan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku secara proaktif melakukan pencegahan (*ex-ante*) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.

Tinjauan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggungjawab memastikan penerapan sistem pengendalian internal yang handal dan efektif untuk mencapai tujuan Perseroan. Dewan Komisaris dibantu Komite Audit juga bertanggungjawab melakukan pengawasan atas penyelenggaraan sistem pengendalian internal di Perseroan. Untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal tersebut, sepanjang tahun 2023 telah dilakukan kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan antara lain:

1. Perseroan melakukan evaluasi dan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, termasuk jika terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam mencapai sasarnya.
2. Pemantauan diprioritaskan terhadap risiko utama termasuk evaluasi secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah munculnya risiko baru, baik oleh unit kerja operasional, unit kerja pemantau risiko, maupun oleh audit internal.
3. Unit Audit Internal melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal secara independen melalui pelaksanaan kegiatan audit. Hasil evaluasi dan tindak lanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi. Hasil evaluasi selama tahun 2023 menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal di MTF telah berjalan secara memadai.

Pernyataan Manajemen atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil penelaahan dan berdasarkan diskusi bersama Manajemen, Komite Audit, Auditor Independen, Audit Internal, dan Divisi terkait lainnya bahwa Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa Sistem Pengendalian Internal perusahaan telah memadai dalam mengidentifikasi risiko sehingga Perseroan dapat mengelola risiko tersebut. MTF senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan dalam rangka menyempurnakan sistem pengendalian internal.

Perkara Penting

Permasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi Perseroan serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi di sepanjang tahun 2023 dan perbandingannya dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	2023		2022	
	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
Dewan Komisaris dan Direksi	-	-	-	-
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-
MTF				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap	56	-	47	-
Dalam proses penyelesaian	26	-	10	-
Jumlah	82	-	57	-

Berikut penjelasan terkait perkara-perkara hukum yang dihadapi Perseroan di sepanjang tahun 2023:

No.	Pihak yang berperkara	Pokok Perkara		Status Perkara	Risiko yang dihadapi MTF dan pengaruhnya terhadap MTF
		Materiil (Rp)	Immateriil (Rp)		
1	Achmad Fadilah	876.000.000	1.000.000.000	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
2	Lukman Hasan	262.804.000	100.000.000	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
3	Hasni Nurhamidin	149.814.000	-	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
4	Kasmiatun	184.500.000	1.300.000.000	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
5	Wahyu Widiatoro (Debitur Saibatul Islamiati)	197.956.000	-	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
6	Aten K. Mangopa	1.000.000	100.000.000	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
7	Muhammad Rizky Syahreza	88.739.920	-	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
8	Edi Partomo Pandiangan	124.407.000	-	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
9	Santun Willfried	494.487.000	-	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
10	Stefanus Lu	1.158.894.000	-	Perkara dalam proses persidangan dengan agenda saksi dari penggugat.	Tidak ada
11	PT Mulyo Joyo Bersama Marc	614.925.000	-	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
12	Masrul	93.244.000	100.000.000	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
13	Hasni Nurhamidin	149.814.000	-	Perkara sudah diputus tahun 2024 dan MTF menang.	Tidak ada
14	Ngadino	259.500.000	-	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada

No.	Pihak yang berperkara	Pokok Perkara		Status Perkara	Risiko yang dihadapi MTF dan pengaruhnya terhadap MTF
		Materiil (Rp)	Immateriil (Rp)		
15	Lukman Hasan	262.804.000	100.000.000	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
16	Khoirul Maulana	89.500.000	200.000.000	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
17	Ismail Amin	22.760.000	100.000.000	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
18	Yustina Sugiyanti (Debitur Yohanes Dwi Pramudya)	176.985.000	50.000.000	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
19	Hijrawati, DKK (Debitur Moh. Jufri)	55.302.000	-	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
20	Lisyanti (Debitur Alexander)	551.640.000	200.000.000	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
21	Ismail Amin	22.760.000	100.000.000	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
22	Ricky Lesmana	99.407.400	-	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
23	Sulastrī Simanjuntak	-	-	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
24	PT Cahaya Fitri Abadi	500.000.000	-	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
25	Muttaqim Akbar (Debitur Erena Ramadhani)	481.950.000	-	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
26	Kartika Adiwīnangun	204.600.000	-	Perkara dalam proses persidangan dengan agenda Duplik.	Tidak ada
27	Enong Fatimahtu Zuhro	25.000.000	-	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
28	Tambari	100.000.000	-	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
29	Wildan	609.052.000	-	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
30	Yustina Sugiyanti (Debitur Yohanes Dwi Pramudya)	176.985.000	50.000.000	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
31	H. Daeng Masoa	873.840.000	500.000.000.000	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
32	Bagus Santa Wardana	424.152.000	-	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
33	PT Mitra Bersama Realty	899.500.000	-	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
34	Dewi Susanti	150.000.000	500.000.000	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
35	Redi	-	-	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
36	Aten K. Mangopa	1.000.000	-	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada

No.	Pihak yang berperkara	Pokok Perkara		Status Perkara	Risiko yang dihadapi MTF dan pengaruhnya terhadap MTF
		Materiil (Rp)	Immateriil (Rp)		
37	Barokah	212.000.000	500.000.000	Perkara sudah diputus tahun 2024 dan MTF menang.	Tidak ada
38	Bagus Santa Wardana	424.152.000	-	MTF dinyatakan menang dalam putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding. Saat ini dalam proses menunggu putusan kasasi.	Tidak ada
39	Saprudin	93.000.000	2.000.000.000	Perkara sudah diputus tahun 2024 dan MTF menang.	Tidak ada
40	Hasmia Husmain	4.000.000	100.000.000	Perkara sudah diputus tahun 2024 dan MTF menang.	Tidak ada
41	PT Cahaya Fitri Abadi	500.000.000	-	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
42	Doni Susilo	509.600.000	-	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
43	Kukuh Heri Jatmiko	71.036.000	500.000.000	Perkara dalam proses persidangan dengan agenda pembacaan putusan.	Tidak ada
44	PT Mitra Bersama Realty	899.500.000	-	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
45	Muttaqim Akbar (Debitur Erena Ramadhani)	481.950.000	-	MTF dinyatakan menang dalam putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding. Saat ini dalam proses menunggu putusan kasasi.	Tidak ada
46	Randy Sweetly Walangare	5.000.000	100.000.000	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
47	Nasir	1.000.000.000	25.000.000	Perkara dalam proses persidangan dengan agenda pembacaan putusan.	Tidak ada
48	PT Sumatera Jaya Mandiri	327.000.000	-	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
49	Ade Ojoh Nurjanah (Debitur Maman Budiman)	82.261.719	38.896.000	Perkara dalam proses persidangan dengan agenda putusan sela.	Tidak ada
50	Nurhasanah	154.236.240	-	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
51	Daffa Zalza Noor Shidqi	158.150.000	2.000.000.000	Perkara dalam proses persidangan dengan agenda pembacaan putusan.	Tidak ada
52	Martin Hasiholan	113.848.000	-	Perkara dalam proses persidangan dengan agenda kesimpulan.	Tidak ada
53	Aten K. Mangopa	10.000.000	100.000.000	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
54	Vina Chovan Epifanis (Debitur Alvonsius Iskandar)	67.500.000	-	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada

No.	Pihak yang berperkara	Pokok Perkara		Status Perkara	Risiko yang dihadapi MTF dan pengaruhnya terhadap MTF
		Materiil (Rp)	Immateriil (Rp)		
55	Wildan	609.052.000	-	MTF dinyatakan menang dalam putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding. Saat ini dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat Kasasi.	Tidak ada
56	Rasidah	-	-	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
57	Subaeda Bin Mata (Debitur Muh Amzar)	128.160.000	70.000.000	Perkara dalam proses persidangan dengan agenda saksi dari penggugat.	Tidak ada
58	Doni Susilo & Meylinda Rahayu	509.600.000	-	Perkara dalam proses persidangan dengan agenda jawaban.	Tidak ada
59	Muhammad Yusuf	362.600.000	2.000.000.000	Perkara dalam proses persidangan dengan agenda pembacaan gugatan.	Tidak ada
60	Renaldo Aridka	97.200.000	2.000.000.000	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
61	Lisyanti (Debitur Alexander)	551.640.000	2.000.000.000	Perkara dalam proses persidangan dengan agenda replik.	Tidak ada
62	Rasidah	142.600.000	-	MTF dinyatakan menang dalam putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding. Saat ini dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat Kasasi.	Tidak ada
63	Samtua Sihite (Debitur Dermawati SPD)	1.033.436.000	-	Perkara dalam proses menunggu relas panggilan dari Pengadilan untuk agenda pembacaan gugatan.	Tidak ada
64	Mulyo Joyo Bersama Marc	750.000.000	-	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF menang.	Tidak ada
65	PT Indonesia Energi Dinamika	12.535.801.873	-	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF Menang.	Tidak ada
66	PT Polowijo Gosari	2.919.532.000	-	Perkara sudah diputus tahun 2023 dan MTF Menang.	Tidak ada
67	PT Sumber Pangan Slamet	1.902.042.003	3.743.220.200	Perkara telah diputus tahun 2023, tidak terdapat putusan yang merugikan MTF.	Tidak ada
68	PT Phos Tekno Indonesia	848.402.100	-	Debitur diputus Pailit dalam perkara PKPU, dan saat ini dalam Perkara Kepailitan.	Tidak ada
69	PT Visi Eka Mulia	966.819.600	-	Telah dilakukan agenda Verifikasi Tagihan, saat ini perkara dalam proses pemberesan harta boedel pailit.	Tidak ada
70	PT Polowijo Gosari	915.059.000	-	Proposal Perdamaian telah disetujui pada tahun 2023 dan debitur telah melakukan pelunasan kepada MTF.	Tidak ada
71	PT Labuan Mandiri Jaya	121.754.000	-	Telah dilakukan agenda Verifikasi Tagihan, saat ini perkara dalam proses pemberesan harta boedel pailit.	Tidak ada

No.	Pihak yang berperkara	Pokok Perkara		Status Perkara	Risiko yang dihadapi MTF dan pengaruhnya terhadap MTF
		Materiil (Rp)	Immateriil (Rp)		
72	PT Sumber Pangan Slamet	1.902.042.002	3.743.220.200	Perkara telah diputus tahun 2023, tidak terdapat putusan yang merugikan MTF.	Tidak ada
73	PT Sakti Mait Jaya Langit	825.480.000	179.772.200	Telah dilakukan agenda Verifikasi Tagihan, saat ini dalam proses pemberesan harta boedel pailit.	Tidak ada
74	Bowo Heli Sartanto	144.879.800	-	Proposal Perdamaian telah disetujui pada tahun 2023 dan Debitur menyatakan akan tetap berkomitmen melakukan pembayaran kepada MTF.	Tidak ada
75	Mario Soebono	1.563.836.500	-	Perkara telah selesai pada tahun 2023, dan Debitur tetap wajib melaksanakan kewajiban sesuai Perjanjian Pembiayaan.	Tidak ada
76	PT Sarana Cipta Unggul	2.525.395.944	2.301.598.800	Perkara telah diputus tahun 2023, tidak terdapat putusan yang merugikan MTF.	Tidak ada
77	PT Bias Nusatama	2.013.738.800	-	Telah dilakukan agenda Rapat Permusyawaratan Majelis dengan ditetapkan masa PKPU tetap selama 90 hari.	Tidak ada
78	PT Bias Nusatama	7.445.155.456	369.186.834	Perkara dalam proses PKPU dengan putusan perpanjangan masa PKPU tetap 90 hari sampai dengan agenda Permusyawaratan Majelis selanjutnya pada tanggal 3 April 2024.	Tidak ada
79	PT Saeti Centricon Wahana	4.712.600	-	Telah dilakukan agenda Rapat Permusyawaratan Majelis dengan ditetapkan masa PKPU tetap selama 60 hari.	Tidak ada
80	Bowo Heli Sartanto	144.879.800	-	Telah dilakukan agenda Verifikasi Tagihan, saat ini perkara dalam proses pemberesan harta boedel pailit.	Tidak ada
81	PT Phos Tekno Indonesia	769.269.000	79.133.100	Telah dilakukan Verifikasi Tagihan Pailit, saat ini perkara dalam proses pemberesan harta boedel pailit.	Tidak ada
82	PT Vision Land Semarang (Debitur Lee Don Hee)	863.414.000	-	Telah dilakukan Verifikasi Tagihan.	Tidak ada

Sanksi Administrasi

Pada tahun 2023 Perusahaan mendapatkan sanksi administratif dari regulator, terhadap sanksi tersebut Perusahaan telah menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan sanksi dari regulator dan perusahaan juga telah melakukan mitigasi risiko agar pelanggaran tidak terulang kembali.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Keberadaan teknologi informasi yang andal sangat penting untuk mendukung proses bisnis dan layanan yang prima. Teknologi merupakan kunci utama yang memungkinkan Perseroan menyediakan produk dan jasa kepada pelanggan, mengukur dan menelusuri kinerja bisnis, serta mengambil keputusan-keputusan Manajemen yang tepat untuk kelangsungan usahanya. Pengelolaan Teknologi Informasi di Perseroan dilakukan oleh Divisi Teknologi Informasi (TI), sehingga kebijakan terkait TI lebih terarah dan berjalan sesuai dengan visi misi Perseroan.

Dasar Pengelolaan TI

Di masa mendatang diharapkan tata kelola TI Perseroan sudah dapat mencapai maturity level rata-rata industri Pembiayaan dalam skala pengukuran *maturity level* berdasarkan COBIT5. Untuk mencapai kondisi tersebut, secara umum IT harus melakukan langkah-langkah perbaikan yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penambahan dan perbaikan fungsi/tugas.
2. Pengembangan kebijakan dan prosedur.
3. Pengembangan ukuran-ukuran kinerja.
4. Pengadaan sistem aplikasi pendukung yang relevan.
5. Melakukan evaluasi Tata Kelola IT.

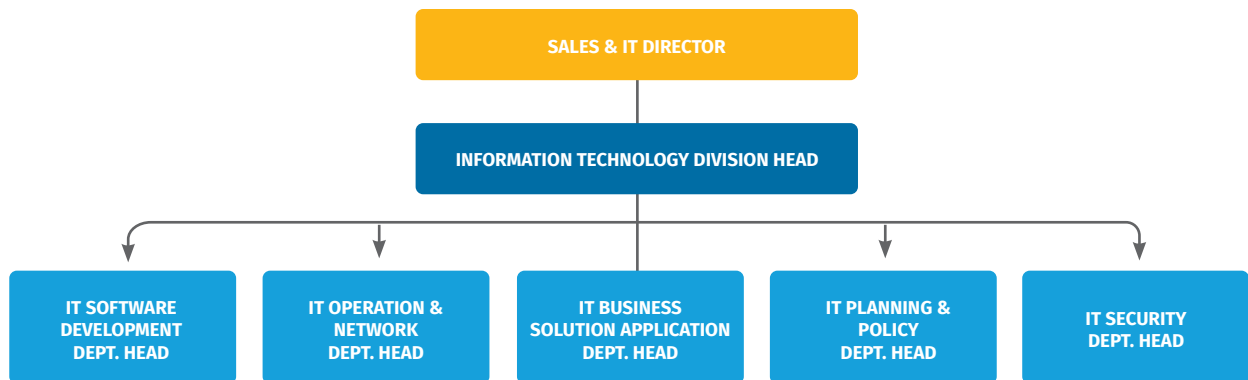
Peta Jalan Pengembangan Teknologi Informasi

2021 <i>Maintain Continuous Digital Growth</i>	2022 <i>Strengthen Digital Foundations</i>	2023 <i>Integrate Digital Ecosystem</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan prinsip <i>paperless</i> dengan mengurangi penggunaan kertas atau dokumentasi manual melalui digitalisasi dokumentasi proses bisnis/<i>workflow</i>. • Peningkatan proses <i>collection</i> dengan kerja sama bersama pihak eksternal yang menyediakan lahan dan fasilitas parkir. • Aspek keamanan informasi untuk meningkatkan optimalisasi dan kecepatan pemulihan bencana dan gangguan keamanan informasi di lingkungan TI perusahaan. • Implementasi kontrol untuk perlindungan data berdasarkan <i>framework</i> dari tahun sebelumnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan <i>Business Process ReEngineering</i> • <i>Development & Implementasi Credit Acquisition System</i> • Melakukan <i>Assessment</i> dan Implementasi <i>Data Governance</i> • Pengembangan Aplikasi yang <i>existing</i> untuk menunjang proses digitalisasi. • Peningkatan <i>Security</i> teknologi dan <i>Services</i> • Optimalisasi penggunaan <i>Cloud</i> untuk mempercepat proses Digitalisasi. • <i>Assessment</i> keamanan informasi untuk persiapan Sertifikasi ISO 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan aplikasi <i>mobile</i> seperti MTF Mobile dan MTF1ACCESS. • Optimalisasi penggunaan <i>cloud</i> pada HCEazy, MTF1ACCESS dan MTF Mobile. • Sertifikasi ISO

Pembentukan Divisi Teknologi Informasi sebagai Divisi Pengelola IT

MTF berperan sebagai *business enabler* dalam memberikan layanan pada *user* untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, serta mendukung perkembangan bisnis Perseroan. Divisi ini juga terus mengembangkan sarana yang dapat memudahkan pelanggan untuk berhubungan dengan pihak MTF. Sebagai pendukung bisnis Perseroan dalam memberikan layanannya, Divisi TI MTF dibagi menjadi beberapa departemen sebagaimana struktur organisasi berikut:

Struktur Pengelolaan IT Mandiri Tunas Finance



Divisi IT Perseroan dipimpin oleh seorang Kepala Divisi. Berdasarkan Surat Keputusan No. 1234/SK-HCP.SVC/ HC/ VII/2016, Direksi menunjuk Kanda Octaviano untuk menjabat Kepala Divisi IT.



Nama	Kanda Octaviano
Jabatan	Kepala Divisi IT
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan No. 1234/SK-HCP.SVC/ HC/ VII/2016
Usia	42 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta Timur
Riwayat Pendidikan	Sarjana (S1) Ekonomi Akuntansi dari STIE Indonesia (2006)
Riwayat Pekerjaan	Plt. Kepala Divisi IT (2016-2017), IT Software Development Departement (2016), IT Software Development Dept Head (2013-2016), IT Software Development Departement (2010-2012), IT Supervisor (2007-2009), SOP & Control SPV (2005-2007)
Rangkap Jabatan	Di Dalam Perusahaan: Tidak ada Di Luar Perusahaan: Tidak ada

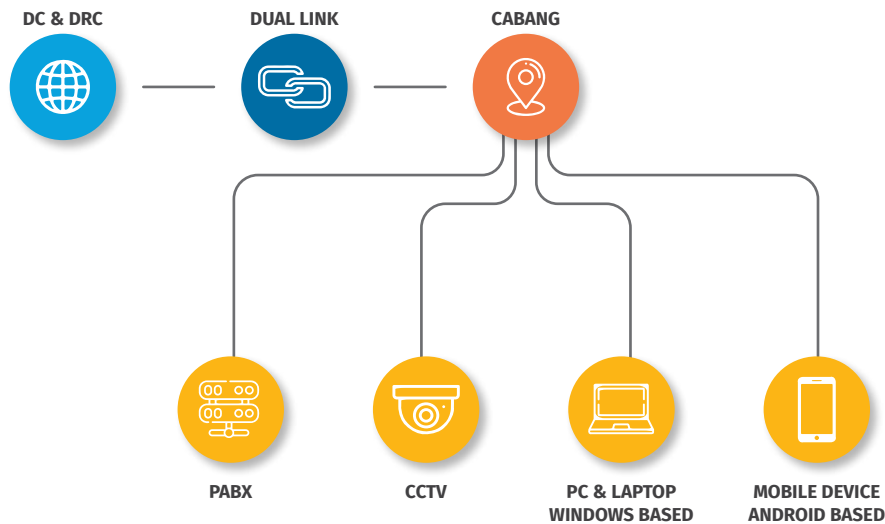
Tugas dan Tanggung Jawab Divisi IT

1. Mengkoordinasikan, merencanakan dan mengendalikan proyek-proyek IT dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional perusahaan berbasis komputer.
2. Merencanakan dan mengkoordinasikan pemeliharaan sumber daya IT dalam rangka penyediaan dukungan perangkat dan system IT.
3. Merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan dan menyetujui rencana kerja ditingkat departemen, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan serta mengkoordinasikan pelaporan.
4. Mengarahkan, mengkoordinasikan keamanan dari semua perangkat IT termasuk kode semua program dari aplikasi yang ada di perusahaan.
5. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan operasional IT sesuai dengan *service level agreement*.
6. Monitoring dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur di cabang & HO.

Pengembangan Teknologi Informasi

Untuk meningkatkan pelayanan, Perseroan senantiasa melakukan pengembangan TI yang terintegrasi untuk menunjang kinerja Perseroan, sebagaimana terlampir sebagai berikut.

Topologi Infrastruktur Saat Ini



Perseroan memiliki sistem yang terintegrasi antara lain dan didukung aplikasi mobile untuk proses digitalisasi sehingga dapat mempercepat proses kredit Pelanggan.



Perkembangan Pengelolaan Teknologi Informasi

Sepanjang tahun 2023, Perseroan telah melakukan beberapa program pengelolaan Teknologi Informasi sebagai berikut:

1. Peningkatan Keamanan Sistem

Perusahaan melakukan peningkatan keamanan sistem dengan melakukan beberapa inisiatif implementasi *Tools Security* sebagai berikut:

- Implementasi *Firewall Layer*

Perusahaan melakukan implementasi *Firewall* pada kedua *Data Center* untuk meningkatkan keamanan Server pada DC dan DRC.

- Peremajaan *Email Security Gateway*
Divisi IT melakukan peningkatan keamanan *email system*. Hal ini dilakukan pergantian *Email Security Gateway* pada perangkat yang sudah *End Of Support* dengan *Email Security Gateway* yang memiliki teknologi pengamanan yang lebih baik.
- Peremajaan *Access Internet Management*
Divisi IT melakukan pergantian *Access Internet Management* pada perangkat yang sudah *End Of Support*.
- Penambahan *License WAF (Web Application Firewall)*

Pada tahun ini Perseroan melakukan penambahan *license* WAF sesuai dengan penambahan aplikasi yang diakses melalui jaringan internet. *Web Application Firewall* ini berfungsi untuk melindungi aplikasi-aplikasi berbasis web yang dimiliki Perseroan dari serangan-serangan eksternal.

- Penambahan *License Network Access Control* (NAC) Pada tahun ini Perseroan melakukan penambahan *license* NAC sesuai dengan penambahan pada perangkat *Endpoint* Perseroan. *Tools* ini berfungsi untuk mengawasi dan melakukan kontrol terhadap jaringan Perseroan, dengan menyediakan lapisan keamanan agar tidak mudah diakses oleh semua perangkat yang tidak dikenal.
- Penambahan *License Data Loss Prevention* (DLP) Pada tahun ini Perseroan melakukan penambahan *license* DLP sesuai dengan penambahan pada perangkat *Endpoint* Perseroan. *Tools* ini berfungsi untuk memonitoring, mendeteksi dan menghentikan aliran data *sensitive* yang tidak normal dan berpotensi terjadinya kebocoran data-data perusahaan.

Dengan adanya sistem ini perusahaan dapat mencegah dan menghindari terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan data-data perusahaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. *Maintenance* Kapasitas *System* dan *Storage*

Pada sisi infrastruktur, perusahaan juga melakukan peningkatan kapasitas *Server* dan *Storage* untuk menunjang perkembangan bisnis perusahaan. Peningkatan kapasitas *Lending* dan akun kelola tentu membutuhkan dukungan kapasitas sistem dan jaringan yang handal. Untuk itu pada tahun 2023 Divisi IT melakukan *maintenance* dan peningkatan kapasitas Sistem dan Jaringan sebagai berikut:

- Penambahan Kapasitas *Server* dan *Storage* Divisi IT melakukan penambahan kapasitas *Storage* untuk menunjang penambahan bisnis perusahaan. Divisi IT juga melakukan peremajaan terhadap *server* yang sudah *end of support*.
- Peremajaan perangkat NAS Divisi IT melakukan pergantian pada NAS cabang yang sudah *end of support*.

3. Optimalisasi *Cloud*

- MTF melakukan optimalisasi penggunaan *cloud* pada aplikasi sebagai berikut:
 - ◊ HCEazy;
 - ◊ MTF1ACCESS; dan
 - ◊ MTF Mobile.

4. Peningkatan Tata Kelola IT

- Melakukan reuiu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Pedoman Teknis Operasional (PTO) Divisi IT 2023.
- Di tahun ini, Perseroan telah melakukan audit berdasarkan standar ISO untuk meningkatkan tata kelola IT yang semakin baik.
- Dalam peningkatan kapasitas sumber data manusia, Divisi IT melakukan pelatihan dan *sharing knowledge* secara rutin pada masing-masing departemen. Hal ini dilakukan agar setiap personil Divisi IT memiliki kemampuan yang baik dan dapat menunjang operasional dengan optimal.

Biaya Pengembangan Teknologi Informasi

Penentuan besarnya biaya untuk Opex dan Capex IT berdasarkan kebutuhan operasional dan kebutuhan untuk pengadaan infrastruktur TI yang sesuai rekomendasi dan melalui proses reuiu manajemen Perseroan. Berikut perbandingan biaya investasi IT yang dilakukan Perseroan di tahun 2023.

Investasi TI Tahun 2023

Perihal	Jumlah (Rp)
Server	6.775.998.101
Network	5.133.825.965
Security	18.619.169.212
Software/License	4.275.743.199
Certification	80.089.451

Perbandingan Jumlah Investasi TI 2022-2023

	Realisasi (Rp-juta)		Anggaran 2023	Perbandingan Realisasi 2023 & 2022	Penyerapan Anggaran 2023
	2023	2022			
Jumlah Investasi TI	39,679	36.340	41,577	9%	95,4%

Kode Etik

Kode Etik merupakan perangkat yang bersifat artikulatif serta memiliki mekanisme *reward & punishment*, yang tujuannya untuk mendukung penerapan visi, misi dan nilai inti serta budaya perusahaan. Penerapan disiplin Perseroan telah tertuang di dalam Peraturan Perusahaan yang menjelaskan tentang kewajiban dan hak karyawan, tindakan pelanggaran beserta sanksi yang diberikan dan pejabat yang memiliki wewenang dalam memberikan sanksi. Kode Etik ini berfungsi sebagai pedoman standar perilaku bagi seluruh insan MTF dalam berinteraksi dengan pihak dalam dan pihak luar.

Perseroan secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas Kode Etik, dan mengadakan program sosialisasi untuk mengingatkan dan menekankan penerapan kode etik bagi para karyawan.

Hubungan yang Harmonis dengan Pemangku Kepentingan

Salah satu tujuan besar dari penerapan prinsip GCG adalah pengembangan hubungan entitas usaha dengan pemangku kepentingan. Perusahaan merumuskan Kode Etik yang dimilikinya untuk dapat membangun hubungan yang harmonis antara kepentingan operasi dan bisnis yang dilakukan Perusahaan dengan kepentingan dari setiap pemangku kepentingan yang berada di dalam lingkaran operasi dan bisnis Perusahaan maupun yang terkena dampak kegiatan operasi dan bisnis Perusahaan.

Pemangku Kepentingan Mandiri Tunas Finance



Visi, Misi, serta Nilai dan Budaya Perusahaan sebagai Panglima

Perseroan telah merumuskan dan menetapkan visi dan misi sebagai panglima utama dalam arahan bagi pengembangan Perseroan ke depan. Visi dan misi tersebut kemudian diturunkan ke dalam Nilai-nilai dan Budaya Perusahaan yang diharapkan dapat dipahami sebagai kebijakan mendasar Perseroan untuk mengembangkan keorganisasian yang sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.



Penetapan dan Isi Kode Etik

Perseroan telah memiliki Kode Etik atau *Code of Conduct* (CoC) yang telah ditetapkan tanggal 11 Maret 2013, dengan berisikan pokok-pokok inti dari Kode Etik Perseroan sebagai berikut:

BAB I – Pendahuluan

- Latar Belakang
- Maksud dan Tujuan
- Manfaat

BAB II – Etika Bisnis

- Ruang Lingkup
- Etika Bisnis dan Komitmen Perusahaan kepada Stakeholders

BAB III – Etika Kerja

- Ruang Lingkup
- Sikap Dasar Individu – Perilaku Utama PERWIRA
- Perilaku Individu di dalam dan di luar Perusahaan
- Perilaku sebagai Atasan
- Perilaku sebagai Bawahan
- Komitmen atas Hal-hal Khusus

BAB IV – Penegakan dan Penerapan Standar Etika Perilaku

- Pemantauan Pelaksanaan Standar Etika Perilaku
- Pelaporan Pelanggaran Standar Etika Perilaku
- Sanksi atas pelanggaran *Code of Conduct*

BAB V – Penutup

Manfaat dan Tujuan Penerapan Standar Etika Perilaku

Perseroan secara konsisten menerapkan Kode Etik sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi, pemegang saham, perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai, Nasabah, Mitra Usaha dan masyarakat. Adapun tujuan penerapan Standar Etika Perilaku ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi secara profesional dan beretika dengan memperhatikan kepentingan dari pemangku kepentingan, sehingga pada akhirnya akan terwujud standar kerja yang maksimal bagi seluruh individu dan tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku bagi Perseroan.
2. Meminimalisir segala risiko yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan maupun tuntutan hukum atau proses litigasi akibat kelalaian yang dilakukan oleh individu di dalam Perseroan.
3. Sebagai sarana untuk terciptanya hubungan yang harmonis, sinergis dan saling menguntungkan antar pemangku kepentingan Perseroan.

4. Dalam jangka panjang mendorong perbaikan kualitas pelayanan pelanggan, pengelolaan Perseroan, pengembangan nilai Perseroan dan pada akhirnya menuju pada peningkatan reputasi Perseroan.

Pemberlakuan Kode Etik bagi Seluruh Level Organisasi

Penerapan Pedoman Standar Etika Perilaku Perseroan merupakan tanggung jawab seluruh insan Perseroan, yang mencakup seluruh karyawan untuk berperilaku sesuai dengan budaya Perseroan sehingga terwujud perilaku yang profesional, bertanggungjawab, wajar, patut dan dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan rekan sekerja maupun para mitra kerja.

Sosialisasi dan Internalisasi Kode Etik

Kode Etik Perseroan diperkenalkan ke seluruh tingkatan di dalam Perseroan dan tertulis dalam dokumen tambahan dari kontrak kerja saat proses perekrutan karyawan baru maupun bagi karyawan yang telah bergabung di Perseroan, dimana Kode Etik tersebut harus dipahami dan ditandatangani oleh seluruh karyawan. Kemudian, seluruh karyawan diharapkan untuk berperilaku sesuai nilai-nilai Perseroan dan menerapkan Kode Etik dalam kegiatan sehari-hari. Sosialisasi dan internalisasi merupakan tahapan penting dari penerapan Kode Etik Karyawan. Perseroan berkomitmen melaksanakan sosialisasi dan pembaharuan Kode Etik secara efektif dan menyeluruh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi Kode Etik kepada seluruh jajaran Perseroan dan melakukan penyegaran secara berkelanjutan melalui:
 - a. *Website* perusahaan;
 - b. Email administrator yang disampaikan kepada seluruh karyawan;
 - c. Pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja (PKWT & PKWTT);
 - d. Serta media lainnya yang tersedia di perusahaan.
2. Melakukan evaluasi atas pemahaman jajaran Perseroan, pada masa orientasi maupun masa bekerja.
3. Pengkajian dan pembaharuan secara berkala di setiap tahun pada butir-butir yang tercantum dalam Kode Etik dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan lebih lanjut. Jika diperlukan aturan pelaksanaan lebih rinci maka akan dibuat dalam kebijakan dan peraturan Perseroan.

Sanksi atas Pelanggaran

Pelanggaran peraturan perusahaan dan kode etik yang dilakukan oleh karyawan, dapat diberikan sanksi:

Sanksi	Masa Berlaku Sanksi	Jumlah Sanksi 2023	Jumlah Sanksi 2022
Surat Teguran	3 (tiga) bulan	13	10
Surat Peringatan Pertama	6 (enam) bulan	185	81
Surat Peringatan Kedua	6 (enam) bulan	23	47
Surat Peringatan Ketiga	6 (enam) bulan	16	29
Surat Peringatan Pertama dan Terakhir	6 (enam) bulan	28	-
Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK)	-	29	46

Jenis pelanggaran yang diduga merupakan tindak pidana maka akan diproses secara hukum melalui pihak yang berwenang.

Pengendalian Gratifikasi

Perseroan berupaya menghindari praktik gratifikasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Gratifikasi sendiri berpotensi bisa mempengaruhi independensi kinerja organ perusahaan sehingga berdampak buruk terhadap Perseroan. Oleh karena itu, guna menjaga hubungan bisnis dengan para pemangku kepentingan, Perseroan mengatur hal-hal terkait dengan gratifikasi dan tata cara atau mekanisme pelaporannya yang telah disusun.

Di tahun 2020, Perseroan secara konsisten terus melakukan perbaikan dalam hal pengendalian, salah satunya untuk pengendalian gratifikasi, dengan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi beserta telah terbitnya standar operasional prosedur pengendalian gratifikasi dan strategi *anti fraud* yang termaktub dalam Pedoman Gratifikasi No. Pengendalian Gratifikasi 03/PGN/10/2018 dan efektif berlaku sejak 17 September 2018 dan telah melalui perbaikan/ revisi pada 15 November 2019 dan 1 September 2020 yang telah disetujui oleh Direksi Perseroan. Dalam standar operasional prosedur tersebut mengatur tentang definisi gratifikasi, sifat gratifikasi, kriteria gratifikasi, prinsip-prinsip pengendalian gratifikasi, pemberian dan penerimaan gratifikasi didalam internal perusahaan, pelaporan penolakan gratifikasi, pelaporan penerimaan gratifikasi, dan penanganan laporan gratifikasi.

Di tahun 2023, Perseroan pun terus-menerus melakukan sosialisasi Kebijakan Anti Gratifikasi kepada segenap insan MTF, yang rutin dilakukan di kantor pusat Perseroan.

Kebijakan Antikorupsi

Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh pegawai senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang *fair*, nilai sportifitas dan profesionalisme, serta prinsip-prinsip GCG. Perseroan juga berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan. Perseroan juga senantiasa memperhatikan kebijakan tentang anti korupsi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perseroan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha dengan semangat anti korupsi yakni menjauhkan diri dari perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang tertanam dalam benak seluruh insan MTF. Oleh karenanya, MTF senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang *fair*, nilai sportivitas dan profesionalisme, serta prinsip-prinsip GCG sehingga mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat.

Komitmen tersebut merupakan cerminan dari implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti:

1. Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kebijakan Gratifikasi

MTF berupaya menghindari praktik gratifikasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Gratifikasi sendiri berpotensi bisa mempengaruhi independensi kinerja organ perusahaan sehingga berdampak buruk terhadap Perseroan. Oleh karena itu, guna menjaga hubungan bisnis dengan para pemangku kepentingan, Perseroan mengatur hal-hal terkait dengan gratifikasi dan tata cara atau mekanisme pelaporannya yang telah disusun.

Pelatihan/Sosialisasi AntiKorupsi kepada Karyawan

Dalam mengatasi praktik korupsi, MTF telah melakukan program sosialisasi terkait *awareness* terhadap Tindakan *Fraud*, korupsi dan gratifikasi ke seluruh karyawan secara rutin sepanjang tahun 2023.

No.	Waktu	Lokasi	Peserta	Keterangan
1	23 Februari 2023	Kantor Pusat MTF	Supervisor Development Program Batch 16	Sosialisasi Anti-Fraud Awareness & Gratifikasi
2	6 Maret 2023	Kantor Pusat MTF	Management Trainee MTF Batch 15	Sosialisasi Anti-Fraud Awareness & Gratifikasi
3	9 Maret 2023	Kantor Pusat MTF	Manager Development Program Batch 15	Sosialisasi Anti-Fraud Awareness & Gratifikasi
4	27 Maret 2023	Virtual - Regional 7	Karyawan Cabang MTF Surabaya 1, Surabaya 2, Mojokerto & Tuban	Sosialisasi Anti-Fraud Awareness & Gratifikasi
5	17 Mei 2023	Virtual - Regional 2	Karyawan Cabang MTF Padang & Pangkal Pinang	Sosialisasi Anti-Fraud Awareness & Gratifikasi
6	24 Mei 2023	Virtual - Regional 7	Karyawan Cabang MTF Malang	Sosialisasi Anti-Fraud Awareness & Gratifikasi
7	5 Juni 2023	Virtual - Regional 7	Karyawan Cabang MTF Kupang & Madiun	Sosialisasi Anti-Fraud Awareness & Gratifikasi
8	6 Juni 2023	Virtual - Regional 7	Karyawan Cabang MTF Mataram	Sosialisasi Anti-Fraud Awareness & Gratifikasi
9	20 Juni 2023	Kantor - Regional 3	Karyawan Cabang MTF Kebon Jeruk	Sosialisasi Anti-Fraud Awareness & Gratifikasi
10	21 Juni 2023	Kantor - Regional 3	Karyawan Cabang MTF Kelapa Gading	Sosialisasi Anti-Fraud Awareness & Gratifikasi
11	20 Juli 2023	Kantor - Duren Tiga 4	Karyawan Cabang MTF Duren Tiga 2	Sosialisasi Anti-Fraud Awareness & Gratifikasi
12	4 Agustus 2023	Kantor Pusat MTF	Management Trainee MTF Batch 16	Sosialisasi Anti-Fraud Awareness & Gratifikasi
13	23 Agustus 2023	Virtual - Regional 4	Karyawan Cabang MTF Cibubur & Depok	Sosialisasi Anti-Fraud Awareness & Gratifikasi
14	7 September 2023	Virtual - Regional 3 dan 7	Karyawan Cabang MTF Kemayoran Multiguna, Tanjung Duren & Banyuwangi	Sosialisasi Anti-Fraud Awareness & Gratifikasi
15	8 September 2023	Kantor MTF Bogor	Karyawan Cabang MTF Bogor	Sosialisasi Anti-Fraud Awareness & Gratifikasi
16	3 Oktober 2023	Virtual Regional 1,2,3, HC, Legal, Corporate Audit, Corporate Secretary, Risk Management & Credit	Kepala Cabang, Kepala Wilayah, Dept Head & Division Head	Sosialisasi Culture Summit for Leaders Batch 1 (Sosialisasi Anti-Fraud Awareness & Gratifikasi)

No.	Waktu	Lokasi	Peserta	Keterangan
17	5 Oktober 2023	Virtual Regional 4,5,6, Finance, CPM dan Mandiri Liaison, IT, Digital, AR & Recovery, Corporate Fleet, dan Fleet AR	Kepala Cabang, Kepala Wilayah, Dept Head & Division Head	Sosialisasi Culture Summit for Leaders Batch 2 (Sosialisasi Anti-Fraud Awareness & Gratifikasi)
18	11 Oktober 2023	Virtual - Regional 6&7	Karyawan Cabang MTF Yogyakarta, Purwokerto & Gianyar	Sosialisasi Anti-Fraud Awareness & Gratifikasi
19	17 Oktober 2023	Virtual Regional 7,8,9, Operation, Sales & Distribution, Marketing	Kepala Cabang, Kepala Wilayah, Dept Head & Division Head	Sosialisasi Culture Summit for Leaders Batch 3 (Sosialisasi Anti-Fraud Awareness & Gratifikasi)
20	7 Desember 2023	Virtual - Regional 4&5	Karyawan Cabang MTF Kemayoran Multiguna, Lebak Bulus & Karawang	Sosialisasi Anti-Fraud Awareness & Gratifikasi

Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) merupakan upaya Perseroan untuk mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam mencegah terjadinya tindak kecurangan dengan melaporkan kejadian perilaku pelanggaran serta mendorong budaya kejujuran dan keterbukaan. Penerapan WBS bermanfaat untuk pengembangan sistem pelaporan pelanggaran yang terkelola dengan baik, yang dapat menjadi fondasi bagi Perseroan untuk merancang evaluasi dan tindak lanjut yang diperlukan. WBS juga menjadi bagian dari mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat sebuah pelanggaran. Bagi pelapor, WBS memberikan jaminan perlindungan dan kerahasiaan identitas.

Whistleblowing System tidak terpisah dari Mekanisme Anti Korupsi PT Mandiri Tunas Finance. Dalam menegakkan peraturan, etika kerja dan bisnis, nilai-nilai Perseroan, umpan balik bagi Manajemen dan pelapor, maka masyarakat atau pelapor dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta nilai-nilai etika yang berlaku berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan Perseroan. Identitas pelapor bersifat rahasia dan laporan dapat disampaikan oleh pelapor tanpa mencantumkan identitasnya (anonim).

Penetapan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran Mandiri Tunas Finance

Sistem pelaporan pelanggaran perusahaan diatur berdasarkan surat Direktur Utama dengan NO. 063/MTF-DIR/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011. Dalam surat tersebut,

Direktur Perseroan menghimbau kepada seluruh karyawan dengan rasa memiliki sesuai dengan Budaya PERWIRA agar untuk berperan secara aktif dengan bersama-sama untuk mencegah, mendeteksi dan mengantisipasi serta meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya kecurangan atau pelanggaran dalam Perseroan.

Ruang Lingkup Pengaduan Pelanggaran Melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran MTF

Pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui mekanisme WBS Perseroan adalah:

1. Adanya dugaan atau indikasi pelanggaran prosedur
2. Kecurangan (*fraud*)
3. Perbuatan melanggar hukum atau perbuatan tidak etis lainnya yang merugikan keuangan Perseroan atau nama baik Perseroan.

Saluran Pengaduan

Pelaporan disampaikan melalui media komunikasi kepada unit kerja yang telah ditunjuk untuk kemudahan dilakukan tindak lanjut oleh komite yang merupakan bagian dari beberapa unit kerja yang ditunjuk untuk menentukan tindak lanjut pelaporan hingga umpan balik kepada pelapor.

Pelaporan dapat disampaikan melalui:

- situs web www.mtf.co.id/id/whistle-blower
- email halo.perwira@mtf.co.id
- Call Center Anti Fraud 081110678057
- surat menyurat dengan ditujukan ke Corporate Secretary dengan alamat:
Graha Mandiri Lt.3A, Jl. Imam Bonjol 61, Jakarta Pusat

Pihak Pengelola Pengaduan

Pelaporan yang masuk dalam *whistleblower* akan dikelola secara langsung oleh Sekretaris Perusahaan. Setiap laporan akan diproses secara independen dan akan dilakukan penelusuran kebenaran informasi yang diberikan.

Mekanisme Penyampaian Pengaduan dan Penanganan Pengaduan yang Masuk Melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran

Peran Dewan Komisaris dalam sistem WBS Perseroan:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dengan berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Internal Audit, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
3. Memastikan bagian terkait melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 10 hari kalender sejak ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan, termasuk perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.

Perlindungan bagi Pelapor

Perseroan menjamin kerahasiaan dan perlindungan kepada pelapor dalam melakukan proses setiap pelaporan pengaduan dengan senantiasa mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak

bersalah dengan cara yang profesional. Perseroan menjamin kerahasiaan identitas Pelapor, serta memberikan perlindungan kepada Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun, sepanjang Pelapor dapat menjaga kerahasiaan kasus yang diadukan/dilaporkan.

Perlindungan ini juga berlaku bagi pihak yang ditunjuk Perseroan dalam melaksanakan investigasi, verifikasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan fakta penyimpangan.

Penghargaan dan Sanksi

Bentuk sanksi terhadap terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perseroan. Perseroan juga memberikan sanksi bagi pelaporan pelanggaran yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan ini, misalnya fitnah atau pelaporan palsu.

Selain itu, penghargaan diberikan kepada pelapor apabila kasus yang dilaporkan mengandung kebenaran dan Perseroan mendapat dampak positif dari adanya laporan tersebut. Jenis dan besarnya penghargaan yang diberikan diatur dengan kebijakan Direksi yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari kebijakan WBS.

Hasil Penanganan Pengaduan Tahun 2023

Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun 2023 serta tindak lanjut dari pengaduan sebagai berikut:

Status Laporan <i>Whistleblowing</i>	Jumlah pada Tahun 2023
Laporan Diterima	19
Indikasi <i>Fraud</i>	9
Tidak Terindikasi <i>Fraud</i>	10

Informasi Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik

Perseroan memiliki kebijakan untuk melarang keterlibatan individu atas nama Perseroan dalam kegiatan politik, termasuk memberikan donasi untuk kepentingan politik. Perseroan memiliki kebijakan untuk melarang keterlibatan individu atas nama Perseroan dalam kegiatan politik, termasuk memberikan donasi untuk kepentingan politik.

Secara tegas, Perseroan tidak mengizinkan insan MTF menggunakan fasilitas atau sumber daya apapun untuk tujuan kampanye politik, penggalangan dana politik maupun untuk tujuan partisipasi politik. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman Standar Etika Perilaku Perseroan. Sebaliknya, kepedulian yang tinggi terhadap masalah sosial dan kemasyarakatan merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, yang diwujudkan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penjelasan lebih rinci tentang program dan kegiatan CSR yang telah dilakukan Perseroan di sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan Perseroan.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Prinsip Dasar dan Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkup Perseroan

Dalam melakukan pengadaan barang dan jasa Perseroan menerapkan efisien, akuntabel serta transparansi. Dasar hukum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini mengacu pada aturan Standar Operasional Perusahaan tentang pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa dilakukan secara hati-hati mulai dari perencanaan, pengadaan, pemilihan/seleksi penyedia Barang dan Jasa, serta pengawasan pelaksanaan pengadaan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Terbuka dan Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
5. Adil/Tidak Diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apa pun.
6. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Jenis-jenis Pelelangan

1. Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas
Pelaksanaan metode ini dilaksanakan apabila nilai tender diperkirakan lebih dari 5 miliar Rupiah dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:
 - Pengumuman prakualifikasi
 - Pemasukan dokumen prakualifikasi
 - Evaluasi dokumen prakualifikasi
 - Penetapan pengumuman prakualifikasi
 - Undangan pengambilan dokumen pengadaan
 - Penjelasan lelang - Pemasukan dan pembukaan penawaran
 - Evaluasi penawaran - Pembuatan berita acara hasil pelelangan
 - Penetapan pemenang lelang
 - Pengumuman pemenang lelang
 - Sanggahan peserta lelang
2. Pemilihan Langsung
Tata cara pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung dilaksanakan dengan proses sebagai berikut:
 - Penandatanganan kontrak
 - Pembayaran uang muka
 - Undangan kepada penyedia barang dan jasa
 - Pemberian penjelasan dokumen pengadaan
 - Penyampaian penawaran - Pembukaan penawaran
 - Evaluasi penawaran
 - Klarifikasi teknis dan negosiasi
 - Penetapan penyedia barang dan jasa terpilih
 - Penunjukkan penyedia barang dan jasa
 - Penandatanganan

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkup Perseroan

Prinsip Dasar Procurement

Dalam pelaksanaan proses *Procurement* harus memperhatikan Prinsip Dasar *Procurement*, yaitu:

1. Efektif, berarti kegiatan *Procurement* harus sesuai dengan kebutuhan/rencana yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan.
2. Efisien, berarti kegiatan *Procurement* dilaksanakan untuk mencapai kualitas sesuai dengan yang ditetapkan, dengan waktu yang telah disepakati pada tingkat harga yang terbaik.
3. Terbuka dan Bersaing, berarti pelaksanaan *Procurement* harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang telah memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia Barang dan Jasa serta memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pelaksanaan *Procurement*, termasuk syarat teknis dan administrasi, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa bersifat terbuka.
5. Adil dan tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa, tidak mengarahkan untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apapun.
6. Akuntabel, berarti proses, hasil dan pembayaran pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan.
7. Tanggung jawab (*responsibility*), proses *procurement* dilaksanakan secara hati-hati dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.
8. Independen, berarti keputusan *procurement* diambil secara obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun.
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.
4. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya *conflict of interest* diantara para pihak.
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dalam pelaksanaan kegiatan *Procurement*.
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan bank.
8. Menghindari dan mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses *Procurement*.
9. Tidak menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sarana atau Media Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Untuk menunjang terlaksananya proses pengadaan barang dan/atau jasa, perusahaan menyediakan media serta fasilitas melalui *E-Procurement* Perusahaan melalui website <https://procurement.co.id:7348>.

Sistem *E-Procurement* digunakan agar pengadaan dapat dilakukan secara transparan dan dapat dimonitor oleh semua panitia pengadaan.

Pedoman Pembebanan Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi *Procurement* harus sesuai RKAP tahun berjalan baik atas beban pos anggaran investasi (belanja modal) maupun pos anggaran eksploitasi (biaya umum dan administrasi)

1. *Capital Expenditure*
Pengadaan *Fixed Asset* bergerak dan tidak bergerak yang dikategorikan kepada pengeluaran investasi dibebankan kepada belanja modal (*Capital Expenditure*), klasifikasi barang *Capital Expenditure* memiliki kriteria sebagai berikut:
 - Tidak habis dipakai dalam waktu 1 (satu) tahun
 - Tidak mudah rusak/hilang
 - Apabila rusak pada umumnya dapat diperbaiki
 - Satuannya mudah diawasi, dihitung dan dapat diberi kode
 - Nilai perolehannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. *Beban Eksploitasi/Operasional Expenditure (OPEX)*
Semua pengeluaran/biaya untuk memperoleh Barang dan Jasa yang dibebankan kepada Biaya Umum dan

Etika Procurement

Dalam pelaksanaan *Procurement*, semua pihak yang terkait dalam proses tersebut antara lain unit Pelaksanaan Pengadaan, *User* serta Penyedia Barang dan Jasa harus memenuhi etika sebagai berikut:

1. Melaksanakan kewajiban masing-masing secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan *Procurement*.
2. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan dokumen yang seharusnya dirahasiakan, seperti Harga Perkiraan Sendiri (HPS), untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan *Procurement*.

Administrasi, biaya tenaga kerja, biaya *training*, biaya hadiah undian, biaya hadiah non-undian dan biaya promosi dengan kriteria sebagai berikut:

- Tidak memenuhi kriteria barang investasi.
 - Mempunyai sifat sewa (murni) walaupun memiliki umur teknis selama 5 (lima) tahun atau lebih.
 - Untuk *enhancement* aplikasi, yaitu khusus untuk Solusi Teknologi Informasi terkait *enhancement* atau penyempurnaan aplikasi yang menggunakan *Change Request*, dapat dibebankan kepada BUA sepanjang tidak menambah nilai manfaat.
3. Penganggaran Kembali dan Pencadangan Apabila kewajiban atas tagihan Penyedia Barang dan Jasa melewati tahun anggaran (misalnya akibat adanya termin pembayaran atau retensi), maka:
 - Untuk beban investasi, harus dianggarkan kembali pada periode tahun anggaran berikutnya sebesar sisa termin yang belum dibayar untuk pengadaan yang bersangkutan oleh *User*.
 - Untuk beban eksploitasi, harus dicadangkan pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang manfaatnya sudah diterima oleh MTF (BAST/BAKP sudah ditandatangani) dan dianggarkan kembali untuk pekerjaan yang belum diterima oleh *User*.
 4. Pembukuan Pencatatan transaksi atas Pengadaan agar mengacu pada Kebijakan Akuntansi yang berlaku di MTF dan ketentuan dalam Standard Pedoman Akuntansi.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah analisa perhitungan perkiraan biaya pengadaan barang/jasa yang dihitung atas dasar lingkup dan spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan, dengan memanfaatkan sumber data yang dapat digunakan serta menggunakan metode analisa teknis yang sesuai. Setiap proses pengadaan, kecuali pembelian langsung dan pembelian secara *online*, wajib memiliki HPS sebagai acuan dalam pelaksanaan proses klarifikasi/negosiasi harga terhadap suatu penawaran serta untuk menetapkan pejabat pemutus pengadaan.

HPS harus mencerminkan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, Penyusunan HPS harus sudah memperhitungkan biaya pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, beban biaya umum (*overhead cost*) dan keuntungan (*margin/profit*) yang wajar bagi penyedia jasa. Revisi HPS dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut

1. Terdapat komponen biaya yang di dalam HPS awal belum diperhitungkan
2. Proses Negosiasi telah final dengan kondisi harga hasil negosiasi masih diatas HPS, namun tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pengadaan ulang karena jumlah rekanan yang mampu melaksanakan

pekerjaan terbatas atau tidak menjamin pencapaian sasaran.

Pengajuan Permintaan Pengadaan

1. *User* menyampaikan permintaan pengadaan yang dituangkan dalam Nota kepada Unit Pelaksana Pengadaan dengan mencantumkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam proses pengadaan, serta melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
2. Permintaan pengadaan harus disetujui oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan matriks *approval* Pengajuan Barang dan Jasa.
3. Dipastikan adanya ketersediaan anggaran atas setiap pengadaan.
4. Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa Teknologi Informasi untuk proyek IT strategis diajukan kepada Unit Pelaksana Pengadaan berdasarkan keputusan inisiatif IT strategis yang ditetapkan oleh Komite yang berwenang atau Rapat Direksi pada penyusunan RKAP awal tahun dan perubahan-perubahannya pada tahun berjalan.
5. Proses Procurement baru dapat dilaksanakan apabila seluruh persyaratan yang terkait dengan proses Procurement tersebut telah diperoleh dari unit kerja terkait.
6. Unit Procurement melakukan evaluasi atas setiap permintaan pengadaan yang disampaikan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap.
7. Ketepatan waktu proses pengadaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Proses Pengadaan Melalui Metode Proses Tender

1. Memberikan undangan kepada penyedia barang dan jasa.
2. Tahapan proses *aanwijzing*.
3. Penyampaian penawaran:
 - a. Penyampaian dokumen penawaran secara e-tendering melalui website pengadaan Perusahaan <https://procurement.co.id:7348>;
 - b. Penawar menyampaikan dokumen penawaran (administrasi, teknis, harga) secara online dengan cara mengunggah (*upload*) dokumen penawaran melalui <https://procurement.co.id:7348>.
4. Tahapan proses klarifikasi dan negosiasi.
5. Tahapan untuk memperoleh harga yang sesuai dan meyakinkan kejelasan teknis dan biaya yang dapat dipertanggung jawabkan.
6. Tahapan proses klarifikasi dan negosiasi lanjutan (Jika diperlukan), dilaksanakan jika dari segi teknis dan biaya masih belum sesuai dengan TOR yang diajukan.

7. Penetapan penyedia barang dan jasa terpilih.
8. Tim pengadaan/unit pelaksana pengadaan mengusulkan calon penyedia barang dan jasa terpilih kepada tim pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang dan jasa dengan melampirkan berita acara evaluasi dan negosiasi dan keterangan lainnya untuk ditetapkan.
9. Penunjukan penyedia barang dan jasa.
10. Panitia mengeluarkan surat keputusan penunjukan penyedia barang/jasa kepada penyedia barang dan jasa terpilih serta menerbitkan surat pemberitahuan kepada peserta yang kalah.
11. Penandatanganan kontrak.

Penetapan Sistem Pengadaan

Penetapan Metode & Jenis Pengadaan

Dengan mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta kondisi lokasi dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada, unit kerja pengadaan barang dan jasa/panitia pengadaan dan/atau bersama-sama pengguna barang/jasa terlebih dahulu harus menetapkan metode/sistem pengadaan yang paling tepat atau cocok dengan barang/jasa yang bersangkutan, antar lain meliputi: metode pengadaan, sistem penyampaian penawaran, metode evaluasi penawaran dan sistem kontrak pengadaan yang akan digunakan.

Metode pengadaan dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- Pelelangan umum
- Pemilihan terbatas
- Penunjukan langsung
- Pengadaan/pembelian langsung
- Sayembara/kontes

Metode pengadaan lainnya yang akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi meliputi jenis pekerjaan pengadaan:

- Barang adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud.
- Jasa pemborongan adalah layanan pekerjaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaan diawasi oleh pengguna barang/jasa atau pengawas yang ditugasi.
- Jasa konsultasi, adalah layanan jasa keahlian profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan.
- Jasa lainnya, adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, Pemborongan dan Barang.

Sistem Penyampulan dan Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampulan Dokumen Penawaran

Metode penyampulan Dokumen Penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa/Panitia Pengadaan pada waktu acara pemberian penjelasan (*aanwijzing*) bahwa yang dipakai adalah salah satu dari 3 (tiga) metode berikut ini:

1. Metode Satu Sampul

Metode Satu Sampul yaitu penyampaian Dokumen Penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan penawaran harga yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa/Panitia Pengadaan.

2. Metode Dua Sampul

Metode Dua Sampul yaitu penyampaian Dokumen Penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul penutup.

3. Metode Dua Tahap

Metode Dua Tahap yaitu penyampaian Dokumen Penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I (tahap I), sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup (tahap II), yang penyampaiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda. Metode Dua Tahap dipergunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa berteknologi tinggi, kompleks dan berisiko tinggi atau mengutamakan tercapainya/pemenuhan kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem.

Pemilihan sistem penyampulan dilakukan berdasarkan pertimbangan derajat kerumitan pekerjaan yang akan dilelangkan.

Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode penyampaian dan pembukaan Dokumen Penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan. Syarat mendaftar, memenuhi syarat pendaftaran dan mengambil Dokumen Lelang dengan syarat pasca kualifikasi dan tata cara penyampaian Dokumen Penawaran adalah sebagai berikut:

1. Penawar yang berhak menyampaikan Dokumen Penawaran adalah Penyedia Barang/Jasa yang telah lulus prakualifikasi dan masuk dalam daftar peserta yang diundang. Penyampaian Dokumen Penawaran dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Secara Langsung
 - Peserta secara langsung menyampaikan dokumen penawarannya ke dalam tempat pemasukan penawaran yang telah disediakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa/Panitia Pengadaan.
 - Batas waktu paling lambat untuk pemasukan dokumen penawaran ke dalam tempat pemasukan dokumen penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan yaitu sebelum batas waktu penutupan pemasukan Dokumen Penawaran/ Proposal.
 - Pada batas waktu penyampaian dokumen berakhir, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa/Panitia Pengadaan menyatakan penyampaian Dokumen Penawaran/Proposal ditutup, menolak Dokumen Penawaran/ Proposal yang terlambat dan menolak penambahan Dokumen Penawaran/Proposal.
 - Penawar harus memasukkan Dokumen Penawaran/Proposal dalam sampul dengan kondisi tertutup dan direkat.
 - Pada sampul hanya ditulis: alamat pengguna jasa dan nama paket pekerjaan yang akan dikerjakan di sudut kiri atas sampul.
 - Apabila sampul tidak direkat sesuai dengan petunjuk, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa/Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab atas isi sampul penawaran. Penawaran yang tidak direkat atau terdapat kesalahan penulisan pada sampul Dokumen Penawaran tidak menggugurkan penawaran.
 - Apabila penawar akan menarik/mengubah/mengganti/menambah dokumen penawaran yang sudah dimasukkan ke dalam tempat pemasukan Dokumen Penawaran, harus dilakukan sebelum waktu penutupan pemasukan Dokumen Penawaran.
 - b. Penginputan dokumen penawaran secara e-tendering melalui *website* pengadaan Perusahaan <https://procurement.co.id:7348>.
 - Penawar menyampaikan dokumen penawaran (administrasi, teknis, harga) secara *online* dengan cara mengunggah (*upload*) dokumen penawaran melalui <https://procurement.co.id:7348>.
 - Penawar menyampaikan dokumen penawaran (administrasi, teknis, harga) secara *online* dengan cara mengunggah (*upload*) dokumen penawaran melalui <https://procurement.co.id:7348>.
 - Dokumen penawaran yang telah diunggah (*upload*) dalam bentuk format pdf akan dienkripsi (*password*) oleh sistem e-procurement dan *password* tersebut (*file certificate*) akan dikirim ke penawar.
 - Penawar dilarang memberikan kode enkripsi (*password/certificate*) sebelum batas akhir unggah dokumen penawaran.
 - Dokumen penawaran yang tidak dapat dibuka saat pembukaan penawaran, baik karena kesalahan *password* atau kerusakan *file softcopy* yang dikirim oleh Penawar, menjadi risiko Penawar.
 - Sebelum batas waktu unggah berakhir, peserta dapat mengganti dokumen penawaran (per item yang dipersyaratkan) dan file yang berlaku adalah file yang terakhir diunggah.
 - Setelah batas waktu unggah berakhir, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa/Panitia Pengadaan meminta kode enkripsi (*password/ file certificate*) tersebut. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa/Panitia Pengadaan dapat memberikan batasan waktu tertentu untuk menyerahkan kode enkripsi (*password*), apabila sampai batas waktu yang ditentukan peserta tidak memberikan kode enkripsi (*password*) atau kode yang diberikan tidak valid sehingga penawaran tidak dapat dibuka atau dievaluasi, maka penawaran dinyatakan gugur.
2. Sistem Evaluasi Penawaran Sistem evaluasi penawaran dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:
 - a. Sistem evaluasi penawaran untuk pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari sistem gugur, sistem nilai, sistem penilaian biaya selama umur ekonomis;
 - b. Sistem evaluasi penawaran untuk pengadaan jasa konsultasi yang dibagi menjadi Sistem evaluasi kualitas, sistem evaluasi kualitas dan biaya, sistem evaluasi biaya terendah.

Bentuk dan jenis ikatan kerja

Bentuk ikatan kerja terdiri dari bukti pembelian barang, SPK, Kontrak kerja:

1. Jenis Ikatan kerja terdiri dari ikatan lumpsum, ikatan harga satuan dengan volume, ikatan gabungan lumpsum dan harga satuan, ikatan terima jadi, ikatan harga satuan tanpa volume pemesanan pasti, ikatan penyerahan bertahap dengan batas volume maksimal, ikatan *cost plus fee*, ikatan presentase.
2. Jaminan pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus disadari adanya risiko-risiko yang mungkin Timbul, diantaranya pengunduran diri dari penyedia barang dan jasa, wan prestasi, risiko penarikan uang muka, dan risiko lainnya.

Jenis-jenis Pelelangan

Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas

Pelaksanaan metode ini dilaksanakan apabila nilai tender diperkirakan lebih dari 10 miliar Rupiah dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pengumuman prakualifikasi
2. Pemasukan dokumen prakualifikasi
3. Evaluasi dokumen prakualifikasi
4. Penetapan pengumuman prakualifikasi
5. Undangan pengambilan dokumen pengadaan
6. Penjelasan lelang - pemasukan dan pembukaan penawaran
7. Evaluasi penawaran - pembuatan berita acara hasil pelelangan
8. Penetapan pemenang lelang
9. Pengumuman pemenang lelang
10. Sanggahan peserta lelang
11. Penandatanganan kontrak
12. Pembayaran uang muka

Pemilihan Langsung

Tata cara pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung dilaksanakan dengan proses sebagai berikut:

1. Undangan kepada penyedia barang dan jasa
2. Pemberian penjelasan dokumen pengadaan
3. Penyampaian penawaran - Pembukaan penawaran
4. Evaluasi penawaran
5. Klarifikasi teknis dan negosiasi
6. Penetapan penyedia barang dan jasa terpilih
7. Penunjukkan penyedia barang dan jasa
8. Penandatanganan kontrak
9. Pembayaran uang muka

Kepatuhan terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan: Kesesuaian terhadap Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan

Secara umum, Perusahaan sebagai perusahaan pembiayaan telah melaksanakan seluruh peraturan yang dikeluarkan OJK, dan akan terus berupaya melakukan perbaikan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dalam hal pedoman penerapan GCG yang diatur berdasarkan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan berupaya untuk mengembangkan prinsip GCG sesuai dengan peraturan tersebut. Adapun uraian penerapannya dapat dilihat di bawah ini.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup Mandiri Tunas Finance dengan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan	Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi: keterbukaan (<i>transparency</i>), akuntabilitas (<i>accountability</i>), pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>), kemandirian (<i>independency</i>), dan kesetaraan dan kewajaran (<i>fairness</i>).	√	Informasi penting Perusahaan, seperti Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dll, telah tersedia di halaman situs web Perusahaan.
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bertujuan untuk: 1. mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi Pemangku Kepentingan, khususnya Debitur, kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya; 2. meningkatkan pengelolaan Perusahaan secara profesional, efektif, dan efisien; 3. meningkatkan kepatuhan Organ Perusahaan dan DPS serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan; 4. mewujudkan Perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, kompetitif, dan memenuhi prinsip perlindungan konsumen; dan 5. meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.	√	Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu menerapkan tata kelola yang baik sesuai dengan 5 prinsip tersebut, sehingga tujuan Perusahaan atas penerapan tata kelola yang baik tersebut dapat tercapai.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup Mandiri Tunas Finance dengan Peraturan OJK No. 29/ POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan	Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
<p>Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik paling sedikit diwujudkan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; 2. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal; 3. penanganan Benturan Kepentingan; 4. penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal; 5. penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal; 6. penerapan kebijakan remunerasi; 7. transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan; dan 8. rencana bisnis. 	√	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan telah memiliki pedoman tata tertib Dewan Komisaris dan Direksi; 2. Perusahaan telah memiliki Piagam/ Pedoman Komite pendukung Dewan Komisaris; 3. Perusahaan telah memiliki kebijakan tata kelola yang baik dan didalamnya terdapat pengaturan mengenai benturan kepentingan; 4. Perusahaan telah memiliki fungsi kepatuhan dan audit internal beserta kebijakan dan prosedurnya 5. Perusahaan telah memiliki fungsi manajemen risiko beserta kebijakan dan pengendalian internal; 6. Kebijakan remunerasi dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunderasi Perusahaan; 7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan telah diterapkan oleh Perusahaan, hal tersebut terbukti dalam halaman website perusahaan tersedia informasi keuangan dan non keuangan; dan 8. Perusahaan telah memiliki rencana jangka panjang dan jangka pendek, jangka pendek disusun untuk 1 tahun dalam bentuk rencana bisnis dengan isi sesuai dengan ketentuan OJK.
	√	<p>Dalam melakukan kegiatan usaha, Perusahaan wajib menyelenggarakan kegiatan usahanya secara sehat dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan industri jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK.</p>
	√	<p>Perusahaan wajib memiliki standar operasi dan prosedur yang memadai untuk seluruh aktivitas bisnis Perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi.</p>
<p>Rapat Umum Pemegang Saham</p>	√	<p>RUPS Perusahaan wajib diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>
	√	<p>Dalam mengambil keputusan, RUPS harus menjaga kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, kreditur, dan kepentingan pemegang saham minoritas.</p>

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup Mandiri Tunas Finance dengan Peraturan OJK No. 29/ POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan

	Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan	Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
Pemegang Saham	Setiap pihak yang menjadi pemegang saham pengendali Perusahaan wajib memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan. Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.	√	Pemegang saham Perusahaan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai pemegang saham pengendali.
	Pemegang saham Perusahaan melalui RUPS harus memastikan Perusahaan dijalankan berdasarkan praktik usaha pembiayaan yang sehat.	√	Perusahaan menjalankan RUPS sebagaimana yang diatur dalam POJK.
	Pemegang saham harus memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Perusahaan.	√	Komitmen pemegang saham selalu diberikan untuk pengembangan operasional Perusahaan.
	Pemegang saham Perusahaan dilarang mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban selaku RUPS.	√	Pemegang Saham Perusahaan tidak mencampuri kegiatan Operasional Perusahaan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Perusahaan Terbatas.
	Pemegang saham Perusahaan yang menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada Perusahaan yang sama harus mendahulukan kepentingan Perusahaan.	√	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan selalu mendahulukan kepentingan Perusahaan dan mempraktekan fungsi pelaksanaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Direksi	Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 wajib memiliki paling sedikit 3 (dua) orang anggota Direksi.	√	Perusahaan memiliki 3 (tiga) Direksi.
	Seluruh anggota Direksi dari Perusahaan yang seluruh pemegang sahamnya: <ul style="list-style-type: none"> • warga negara Indonesia; dan/atau • badan hukum Indonesia yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara Indonesia, • wajib berkewarganegaraan Indonesia. 	√	Pemegang saham Perusahaan merupakan badan hukum Indonesia yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh WNI, sehingga seluruh anggota Direksi Perusahaan berkewarganegaraan Indonesia.
	Perusahaan yang di dalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung wajib memiliki paling sedikit 50% anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.	X	Tidak ada kepemilikan asing dalam Perusahaan.
	Anggota Direksi Perusahaan wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.	√	Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
	Bagi anggota Direksi berkewarganegaraan asing wajib memiliki surat izin menetap dan surat izin bekerja dari instansi berwenang.	X	Tidak ada anggota Direksi berkewarganegaraan asing.
	Seluruh anggota Direksi Perusahaan harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.	√	Seluruh anggota Direksi Perusahaan memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya dan seluruh anggota Direksi Perusahaan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan OJK.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup Mandiri Tunas Finance dengan Peraturan OJK No. 29/ POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan	Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
<p>Anggota Direksi Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perusahaan lain. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan yang memiliki usaha di bidang pembiayaan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Perusahaan.</p>	√	Anggota Direksi Perusahaan tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain.
<p>Setiap anggota Direksi Perusahaan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.</p>	√	Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur POJK.
<p>Anggota Direksi Perusahaan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional; • mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya; • mendahulukan kepentingan Perusahaan dan/ atau Pemangku Kepentingan lainnya dari pada kepentingan pribadi; • mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan dan Debitur, kreditur, dan/ atau Pemangku Kepentingan lainnya; dan • mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan. 	√	Anggota Direksi telah memenuhi kriteria yang ditentukan OJK.
<p>Direksi Perusahaan wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya; • mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya; • mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS; • memastikan agar Perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya; • memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris dan DPS secara tepat waktu dan lengkap; dan • membantu dan menyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Organ Perusahaan dan DPS 	√	Direksi Perusahaan menjalani tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang dan Anggaran Dasar.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup Mandiri Tunas Finance dengan Peraturan OJK No. 29/ POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan	Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
<p>Perusahaan wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perusahaan kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.</p>	√	Fungsi kepatuhan dalam Perusahaan dipimpin langsung oleh Direktur Utama.
<p>Perusahaan wajib memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Satuan kerja atau pegawai bertugas membantu Direksi dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Satuan kerja atau pegawai yang dimaksud bertanggungjawab kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	√	Perusahaan memiliki satuan kerja yang menjalani fungsi kepatuhan, yaitu Legal Division.
<p>Anggota Direksi Perusahaan dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan, dengan kegiatan Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat; • memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat; • mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan • memenuhi permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS. 	√	Direksi Perusahaan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan.
<p>Direksi Perusahaan wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Direksi Perusahaan wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.</p>	√	Sepanjang tahun 2023 Direksi melakukan rapat sebanyak 51 kali.
<p>Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (dissenting opinions) tersebut. Anggota Direksi Perusahaan yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi.</p>	√	Seluruh rapat Direksi tahun 2023 telah didokumentasikan dalam risalah rapat Direksi dengan mencantumkan perbedaan pendapat jika ada.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup Mandiri Tunas Finance dengan Peraturan OJK No. 29/ POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan	Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi Perusahaan harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	√	Rapat Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
Direksi Perusahaan harus menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.	√	Direksi Perusahaan dalam mengambil keputusan mempertimbangkan segala aspek.
Dewan Komisaris	√	Perusahaan memiliki 3 anggota Dewan Komisaris dan salah satunya adalah Komisaris Independen. Seluruh Komisaris Perusahaan berdomisili di Indonesia.
Bagi anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia wajib memiliki: surat izin menetap; dan surat izin bekerja, dari instansi berwenang.	0	Perusahaan tidak memiliki Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing.
<p>Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Perusahaan lain. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau • anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, • sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan. 	√	Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris di perusahaan lain.
Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan tidak pernah menjadi anggota Direksi pada Perusahaan yang sama dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.	√	Seluruh anggota Komisaris merupakan pihak eksternal Perusahaan dan sebelumnya bukan sebagai anggota Direksi Perusahaan.
Setiap anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.	√	Setiap anggota Dewan Komisaris telah uji kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan OJK.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup Mandiri Tunas Finance dengan Peraturan OJK No. 29/ POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan	Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
<p>Dewan Komisaris Perusahaan wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> • melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi; • mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak; • menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; • memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; • memberikan persetujuan dalam hal Dewan Pengawas Syariah memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris; dan • memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 	√	Dewan Komisaris menjalankan kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang dan anggaran Dasar Perusahaan.
<p>Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat; • memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat; • mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan • mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi. 	√	Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.
<p>Anggota Dewan Komisaris Perusahaan berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu.</p>	√	Direksi selalu memberikan informasi kepada Dewan Komisaris dengan lengkap dan tepat waktu.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup Mandiri Tunas Finance dengan Peraturan OJK No. 29/ POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan	Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
<p>Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen. Komisaris Independen Perusahaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Perusahaan, dalam Perusahaan yang sama; • tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir; • memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; • memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat; • memiliki kewarganegaraan Indonesia; dan • berdomisili di Indonesia. 	√	Perusahaan memiliki seorang Komisaris Independen dan memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh OJK.
<p>Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Debitur, kreditur, dan Pemangku Kepentingan lainnya.</p>	√	Tugas dan fungsi Komisaris Independen tercantum dalam Tata Tertib Dewan Komisaris.
<p>Komisaris Independen wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 10 hari kalender sejak ditemukannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan; dan/ atau • keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan. 	√	Sepanjang tahun 2023 Komisaris Independen tidak menemukan pelanggaran dan hal-hal lain yang membahayakan Perusahaan.
<p>Perusahaan dilarang memberhentikan Komisaris Independen karena tindakan Komisaris Independen dalam melaksanakan tugasnya.</p>	√	Pada tahun 2023 Perusahaan memberhentikan Ravik Karsidi dari posisi Komisaris Independen dan mengangkat Fendy Eventius Mugni .
<p>Perusahaan yang memiliki total aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi. Selain komite diatas, Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.</p>	√	Dewan Komisaris Perusahaan telah memiliki komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi dalam menjalankan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup Mandiri Tunas Finance dengan Peraturan OJK No. 29/ POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan	Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
<p>Komite audit Perusahaan wajib beranggotakan paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua; • 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang: <ul style="list-style-type: none"> - Audite; - Keuangan; - Akuntansi bagi Perusahaan Pembiayaan atau akuntansi syariah bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS. Yang berkedudukan sebagai anggota. 	√	Struktur komite audit Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan OJK.
<p>Komite audit wajib melaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit; dan • Pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan proses pelaporan keuangan. 	√	Komite audit Perusahaan telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit; dan Pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan proses pelaporan keuangan.
<p>Pelaksanaan yang wajib dilakukan komite audit sebagaimana diatas, paling sedikit terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan tugas satuan kerja audit internal; • Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit; • Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan • Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan OJK, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. 	√	Komite audit telah melaksanakan pemantauan kepada seluruh tugas satuan kerja audit internal, kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik dan audit eksternal lainnya.
<p>Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS</p>	√	Komite audit telah memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris.
<p>Komite Pemantau Risiko wajib beranggotakan paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua; dan • 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan/atau manajemen risiko yang berkedudukan sebagai anggota. 	√	Struktur komite pemantau risiko Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan OJK.
<p>Komite pemantau risiko wajib melakukan paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perusahaan; dan • Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko. 	√	<p>Komite pemantau risiko Perusahaan telah melaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perusahaan; • Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup Mandiri Tunas Finance dengan Peraturan OJK No. 29/ POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan	Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
Komite remunerasi & nominasi wajib beranggotakan paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua; • 1 (satu) orang Komisaris; • 1 (satu) orang pejabat dengan level jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia 	√	Struktur komite remunerasi & nominasi Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan OJK.
Komite remunerasi dan nominasi wajib: <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi; dan • Menyusun dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan nominasi. 	√	Komite remunerasi dan nominasi Perusahaan telah melaksanakan: Melakukan evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi; Menyusun dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan nominasi.
Perusahaan yang memiliki total aset sampai dengan Rp200.000.000.000,00 wajib memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.	√	Komite Audit bernaung dibawah pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan.
Dewan Komisaris Perusahaan wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.	√	Sepanjang tahun 2023 Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat sebanyak 6 kali.
Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris.	√	Agenda rapat Dewan Komisaris tercantum dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris.
Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	√	Jumlah rapat telah tercantum dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
Dewan Komisaris Perusahaan wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.	√	Keputusan Dewan Komisaris bersifat independen dan profesional.
Dewan Pengawas Syariah	-	N/a Perusahaan tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup Mandiri Tunas Finance dengan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan	Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
<p>Transparansi Kepemilikan Saham</p> <p>Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perusahaan tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan • hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan atau grup usaha tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, kepada Perusahaan tempat anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. 	√	Kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam daftar pemegang saham.
<p>Auditor Eksternal</p> <p>Auditor eksternal Perusahaan wajib ditunjuk oleh RUPS dari calon auditor eksternal yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usutan komite audit (jika ada). Pencatatan auditor eksternal wajib disertai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atasan pencatatan dan besarnya honorarium atau imbat jasa yang diusutkan untuk auditor eksternal tersebut; dan • pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh auditor eksternal, untuk bebas dari pengaruh Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan dan kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil auditnya kepada OJK. 	√	Penunjukkan Auditor Eksternal sesuai dengan rekomendasi dari komite audit.
	√	Perusahaan terbuka dalam memberikan informasi dan data penunjang auditor eksternal.
<p>Praktik dan Kebijakan Remunerasi</p> <p>Perusahaan wajib menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai yang mendorong peritaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent behaviour) yang sejatan dengan kepentingan jangka panjang Perusahaan dan pertakuan adit terhadap Debitur, kreditur, dan/ atau Pemangku Kepentingan tainnya. Kebijakan remunerasi harus memperhatikan pating sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bertaku; • prestasi kerja individuat; • kewajaran dengan Perusahaan dan/atau tevet jabatan yang setara (peer grup); dan • pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan. 	√	Kebijakan remunerasi telah diatur oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup Mandiri Tunas Finance dengan Peraturan OJK No. 29/ POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan	Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
Tata Kelola Pembiayaan	<p>Perusahaan wajib menyusun kebijakan dan rencana pembiayaan yang dituangkan dalam rencana bisnis tahunan Perusahaan. Kebijakan dan rencana pembiayaan wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ditetapkan oleh Direksi; dan • disosialisasikan kepada manajemen dan unit kerja terkait 	<p>√</p> <p>Rencana Bisnis Perusahaan telah memuat rencana pembiayaan yang telah ditetapkan oleh Direksi Perusahaan dan disosialisasikan kepada fungsi kerja terkait.</p>
	<p>Direksi wajib mengambil keputusan pembiayaan secara profesional dan mengoptimalkan nilai tambah kekayaan Perusahaan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Debitur dan kepentingan bagi Pemangku Kepentingan lainnya.</p>	<p>√</p> <p>Perusahaan telah membuat rencana bisnis setiap tahunnya.</p>
	<p>Perusahaan wajib memiliki satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menyelenggarakan fungsi pemasaran, penerapan prinsip mengenai nasabah, analisis pembiayaan, pemantauan kualitas piutang pembiayaan, penagihan, penanganan pengaduan Debitur; • menyusun dan menerapkan standar dan prosedur kualitas pembiayaan; dan • menyusun dan menerapkan sistem dan prosedur pengendalian internal untuk memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan strategi pembiayaan, serta tidak melanggar peraturan perundangan. Untuk melakukan fungsi-fungsi tersebut, Perusahaan wajib memiliki pegawai yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang pembiayaan. 	<p>√</p> <p>Dalam mengambil keputusan Direksi memperhatikan segala aspek.</p>
	<p>Perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur. Perusahaan harus menuangkan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai. Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pihak lain tersebut berbentuk badan hukum; • pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan • pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi profesi di bidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi perusahaan pembiayaan Indonesia. Perusahaan bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain. Perusahaan wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerjasama dengan pihak. 	<p>√</p> <p>Kerjasama dengan pihak ketiga selalu dituangkan dalam perjanjian tertulis dan bermaterai.</p>
Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal	<p>Perusahaan wajib menerapkan manajemen risiko dengan mengidentifikasi, menilai, dan Manajemen risiko harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Perusahaan. memantau risiko usaha secara efektif.</p>	<p>√</p> <p>Manajemen Risiko dikelola dalam satu Divisi tersendiri.</p>

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup Mandiri Tunas Finance dengan Peraturan OJK No. 29/ POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan	Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
<p>Direksi Perusahaan wajib menetapkan pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan sasaran dan strategi bisnis serta anggaran dasar dan aturan internal lain Perusahaan, dan peraturan perundang-undangan</p>	√	Pengendalian Internal dilakukan oleh Divisi Manajemen Resiko dan Audit Internal.
<p>Pengendalian internal paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang disiplin dan terstruktur; • pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengelola risiko usaha; • aktivitas pengendalian, yaitu tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset perusahaan; • sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas peraturan perundang-undangan di bidang usaha pembiayaan; • tata cara monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal; dan • mekanisme pelaporan kepada Direksi dengan tembusan kepada komite audit, dalam hal terjadi penyimpangan kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perusahaan. 	√	Pengendalian internal Perusahaan telah mencakup hal-hal sebagaimana yang diatur pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup Mandiri Tunas Finance dengan Peraturan OJK No. 29/ POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan	Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
<p>Rencana Bisnis Tahunan</p> <p>Perusahaan wajib menyusun rencana bisnis tahunan. Rencana bisnis tahunan paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ringkasan eksekutif; • evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya; • visi, misi, dan strategi bisnis; • Kebijakan dan rencana manajemen, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> – Rencana kegiatan usaha; – Rencana pengembangan atau perluasan usaha; – Rencana permodalan; – Rencana pendanaan; – Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi; – Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; dan – Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi perusahaan perusahaan pembiayaan. • proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan; • proyeksi rasio dan pos tertentu; • informasi lainnya. 	√	Perusahaan telah menyusun rencana bisnis tahunan.
<p>Perusahaan wajib menyampaikan rencana bisnis tahunan kepada OJK paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.</p>	√	Rencana Bisnis Tahunan telah dilaporkan sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.
<p>Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara semesteran kepada OJK. Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara semesteran meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis; • penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis; • tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis; • rasio keuangan dan pos tertentu; dan • informasi lainnya. 	√	Laporan realisasi rencana bisnis telah disusun sesuai dengan ketentuan dan disampaikan ke OJK sesuai batas waktu yang ditentukan.
<p>Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara semesteran kepada OJK wajib disampaikan paling lambat 1 bulan setelah semester yang bersangkutan berakhir.</p>	√	Laporan realisasi rencana bisnis disampaikan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.
<p>Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan pengawasan rencana bisnis paling sedikit memuat penilaian Dewan Komisaris mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realisasi rencana bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif; • Faktor yang mempengaruhi kinerja LJKNB; dan • Upaya perbaikan kinerja LJKNB. 	√	Laporan pengawasan rencana bisnis telah disusun sesuai dengan ketentuan dan disampaikan ke OJK sesuai batas waktu yang ditentukan.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup Mandiri Tunas Finance dengan Peraturan OJK No. 29/ POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan	Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
	Laporan Realisasi pengawasan rencana bisnis kepada OJK wajib disampaikan paling lambat 1 bulan setelah semester yang bersangkutan berakhir.	√ Laporan realisasi rencana bisnis disampaikan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.
Keterbukaan Informasi	Kebijakan dan strategi komunikasi Perusahaan harus memungkinkan informasi yang dibutuhkan diberikan kepada OJK secara lengkap, tepat waktu, dan dengan cara yang efisien.	√ Komunikasi Perusahaan dengan OJK melalui Sekretaris Perusahaan.
	Perusahaan wajib memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan Pemangku Kepentingan lain.	√ Pelaporan keuangan telah dilakukan melalui sistem yg diatur OJK dan BEI.
	Perusahaan wajib mengungkapkan kepada OJK mengenai hal-hal penting, paling sedikit meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal; • transaksi material dengan pihak terkait; • Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi; dan • informasi material lain mengenai Perusahaan. 	√ Perusahaan melakukan keterbukaan informasi.
	Pengungkapan hal-hal penting dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	√ Telah termuat dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
Etika Bisnis	Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan karyawan Perusahaan dilarang menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	√ Tersedia dalam Peraturan Perusahaan.
	Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan karyawan Perusahaan dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan.	√ Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan karyawan Perusahaan telah berkomitmen untuk tidak menerima sesuatu untuk kepentingan pribadi, sesuai tertuang pada Pakta Integritas Karyawan.
	Perusahaan wajib membuat pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha, sebagai panduan bagi Organ Perusahaan dan seluruh karyawan Perusahaan.	√ Tercantum dalam Peraturan Perusahaan.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup Mandiri Tunas Finance dengan Peraturan OJK No. 29/ POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan	Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
<p>Pelaporan</p> <p>Perusahaan wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada setiap akhir tahun buku. Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang mengungkapkan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sesuai dengan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik; dan • rencana tindak yang meliputi tindakan korektif yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik wajib disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. 	√	Perusahaan telah menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk OJK.
<p>Sanksi</p> <p>Perusahaan yang melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis. Dalam hal perusahaan melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. Dalam hal perusahaan telah memenuhi ketentuan POJK tersebut, OJK mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis.</p>	√	Perusahaan tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam POJK.
<p>Dalam hal OJK telah mengenakan sanksi administratif dan perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakan sanksi administratif, OJK dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menurunkan hasil penilaian tingkat risiko atau tingkat kesehatan Perusahaan; dan • melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan. 	√	Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat sanksi yang dikenakan ke Perusahaan.

06

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan





Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan



Perusahaan senantiasa menjalankan komitmen untuk menciptakan bisnis yang mampu memberikan dampak positif kepada para pemangku kepentingan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, melalui komitmen dan prinsip-prinsip penerapan keuangan berkelanjutan serta didukung oleh budaya keberlanjutan yang tinggi yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan bisnis dengan performa yang konsisten dan stabil melalui implementasi nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan (*Economy Social Governance/ESG*) sebagai strategi bisnis.

Informasi dan pembahasan terkait pelaksanaan, penyusunan berbagai strategi, pendekatan, desain program, serta monitoring dan evaluasi kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan yang dibuat dalam buku yang terpisah namun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

Dasar Penerapan TJSL

Komitmen Perusahaan dalam menjalankan program TJSL dan Aksi Keuangan Berkelanjutan berlandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perseroan Publik. Selain itu program dan kegiatan TJSL juga mengacu pada Misi Perusahaan yang selaras dengan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) atau *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Program TJSL juga dijalankan dengan berpedoman pada beragam regulasi, mencakup:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Ruang Lingkup TJSL

Perseroan telah merumuskan subjek maupun isu prioritas untuk kemudian dirancang sebagai program yang dapat memastikan keberlanjutan dari berbagai aspek, yakni aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial agar Perseroan dapat tumbuh berkelanjutan, bersih dari praktik korupsi, serta memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan.

Prinsip TJSL

Secara berkesinambungan, Perusahaan menjalankan berbagai aktivitas ESG yang bertumpu pada delapan prinsip keuangan berkelanjutan yaitu :

1. Prinsip Investasi
2. Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan
3. Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup

4. Prinsip Tata Kelola
5. Prinsip Komunikasi yang Informatif
6. Prinsip Inklusif
7. Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas
8. Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi

Pilar TJSL

MTF memiliki 3 pilar strategi yaitu:

1. Menumbuhkan segmen bisnis *captive* yang berasal dari Bank Mandiri.
2. Menjaga segmen bisnis yang berasal dari *dealer* dan *partner*.
3. Mengoptimalkan *database* untuk memberikan nilai tambah pada pelanggan.

Strategi Program TJSL

Rencana dan Langkah-Langkah Strategi Jangka Panjang Periode 5 (Lima) Tahun. Rencana strategi jangka panjang perusahaan akan tetap berpegang pada 3 pilar strategi yaitu menumbuhkan segmen bisnis *captive* yang berasal dari Bank Mandiri, menjaga segmen bisnis yang berasal dari *dealer* dan *partner*, serta mengoptimalkan *database* untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan.

Strategi tersebut diimplementasikan ke dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Membangun fondasi baru melalui:
 - a. Meningkatkan kompetensi SDM untuk menggarap segmen bisnis baru;
 - b. Melakukan BPR untuk setiap segmen bisnis;
 - c. Membangun kapabilitas sistem dan digital;
 - d. Membangun kemampuan *data management* & *data analytic* untuk mendukung bisnis.
2. Penguatan fokus bisnis utama melalui:
 - a. Menjalankan bisnis dengan *new foundation*;
 - b. Melakukan evaluasi atas kompetensi yang sudah dibangun;
 - c. Mengembangkan kapabilitas digital untuk segmen SME – *Wholesales*.
3. Percepatan pertumbuhan bisnis melalui:
 - a. Melakukan review atas ekspansi bisnis yang telah dijalankan;
 - b. Meningkatkan perluasan cakupan bisnis;
 - c. Menyusun strategi & Corporate Planning 2028-2032.

Struktur Pengelola TJSL

Perseroan saat ini belum memiliki struktur organisasi yang secara khusus bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerapan keuangan berkelanjutan. Pengelolaan penerapan keuangan berkelanjutan saat ini masih menjadi tanggung jawab Direksi secara kolektif.

Pencapaian TJSL 2023

Sebagai wujud keberhasilan PT Mandiri Tunas Finance dalam menjalankan berbagai program Tanggung Jawab Sosial, MTF meraih penghargaan dalam ajang TOP CSR Award 2023. Dalam ajang tersebut, MTF mendapat 2 penghargaan sekaligus dimana Perseroan dinobatkan sebagai TOP CSR Award 2023 #Stars 4 serta Direktur Utama MTF Pinohadi G. Sumardi dinobatkan sebagai TOP Leader on CSR Commitment 2023.

Highlight CSR 2023

Pada tahun 2023, Perseroan melaksanakan berbagai kegiatan CSR yang memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat.

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Keterangan
Februari 2023	CSR Peduli Tempat Ibadah di Masjid Endah Andansih di Purwakarta CSR	Mandiri Tunas Finance memberikan bantuan dengan pemberian karpet guna pembaharuan atau renovasi untuk Masjid Andansih yang berlokasi di Purwakarta.
Maret 2023	CSR Tanam Pohon Bersama Infobank	MTF melaksanakan kegiatan tanam Pohon bekerja sama dengan Infobank. Sebanyak 10.000 pohon Mangrove berhasil ditanam di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Jakarta.
27 Maret 2023	CSR MTF Santunan Yatim dan Yayasan Yatim Piatu Bulan Ramadhan (Mandiri Amal Insani)	Pada bulan suci Ramadhan, MTF bekerja sama dengan Mandiri Amal Insani mengadakan kegiatan MTF Berbagi Dengan Anak Yatim yaitu berupa pemberian santunan uang tunai sebesar 25 Juta Rupiah.
29 Maret 2023	MTF Berbagi Takjil Ramadhan	Dalam rangka semarak Ramadhan tahun 2023, MTF melaksanakan kegiatan berbagi takjil bagi Masyarakat di sekitar Kantor Pusat. Dengan tema "Mari Sebarkan Kebaikan di Bulan yang Penuh Berkah Ini" MTF berhasil membagikan total 1000 pax takjil untuk Masyarakat yang berpuasa.
April 2023	CSR Ramadhan Berbagi dengan Anak yatim	Pada bulan suci Ramadhan, MTF mengadakan kegiatan MTF Berbagi Dengan Anak Yatim yaitu berupa pemberian santunan uang tunai sebesar 25 Juta Rupiah kepada Yayasan Al Kahfi Jakarta Pusat.
28 April 2023	CSR Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) FEB UI	MTF bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia mengadakan rangkaian acara Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) FEB UI. Rangkaian acara terdiri dari Webinar, Sekolah Pasar Modal, Indonesia Stock Trading Competition dan Investment Outlook.
29 Juni 2023	MTF Berqurban Hari Raya Idul Adha	Pada program Kurban 1444 Hijriah, MTF berqurban 1 ekor sapi seberat 900 kg yang berlokasi di Masjid Mandiri Amal Insani. Daging hewan kurban tersebut kemudian didistribusikan ke penerima daging kurban yang berhak menerima di wilayah Jabodetabek.
11 Agustus 2023	CSR Konservasi & Restorasi Hutan Mandiri Group	Bertepatan pada acara Board Forum, Mandiri Tunas Finance Bersama dengan Mandiri Group mengadakan kegiatan Konservasi dan Restorasi Hutan yaitu penanaman bibit kayu merah Bersama seluruh Perusahaan anak Bank Mandiri. Penanaman pohon secara simbolis dilakukan oleh jajaran Direksi MTF Bersama seluruh Direktur Bank Mandiri dan seluruh Perusahaan Anak Bank Mandiri. Kegiatan berlangsung di Panbil Nature Reserve, Kepulauan Riau, Batam.

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Keterangan
7 - 8 Oktober 2023	ESG Pemberian Pohon Bersama Mandiri Group	Pada acara Mandiri Karnaval, MTF bersama seluruh Perusahaan Anak Bank Mandiri melakukan program pembagian pohon kepada masyarakat dengan kontribusi MTF sebanyak 250 pohon. Acara ini berlokasi di lapangan parkir timur Senayan.
21 Oktober 2023	ESG Kepedulian Lingkungan melalui Penanaman Pohon MTF	Mandiri Tunas Finance Bersama dengan Mandiri Group mengadakan kegiatan Konservasi dan Restorasi Hutan yaitu penanaman bibit kayu merah, dimana MTF berkontribusi menanam sebanyak 230 pohon. Kegiatan berlangsung di Panbil Nature Reserve, Kepulauan Riau, Batam.
22 Oktober 2023	CSR Peduli Tempat Ibadah di Masjid As-Salam Batam	Mandiri Tunas Finance memberikan bantuan dengan pemberian karpet untuk Masjid As-Salam yang berlokasi di Batam.
23 November 2023	Donor Darah MTF 2023	MTF melaksanakan kegiatan Donor Darah MTF 2023 dengan menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat. Berlokasi di Kantor Pusat MTF, sebanyak 100 kantong darah berhasil dikumpulkan.
28 November 2023	Beasiswa Prestasi Program Peduli Pendidikan APPI	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) memberikan beasiswa prestasi kepada karyawan Mandiri Tunas Finance yang duduk di bangku SMA dan perkuliahan.
20 Desember 2023	Direksi Mengajar 2023	MTF melaksanakan kegiatan Direksi Mengajar secara online di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Mahasiswa diberikan ilmu secara langsung oleh William Francis Indra selaku Direktur Mandiri Tunas Finance dengan materi yang diberikan terkait Penerapan Manajemen Keuangan di Perusahaan Pembiayaan.

Informasi Penyampaian Laporan Berkelanjutan Secara Terpisah

Laporan Berkelanjutan Perseroan disusun dengan mengacu kepada Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Meskipun menjadi buku terpisah, Laporan Berkelanjutan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini, sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Perseroan menyajikan Laporan Berkelanjutan secara terpisah sebagai bagian yang terintegrasi dengan Laporan Tahunan ini, yang dirilis bersamaan dengan Laporan Tahunan.

07

Laporan Keuangan





PT Mandiri Tunas Finance

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
*Financial statements as of 31 December 2023 and
for the year then ended
with independent auditor's report*

**SURAT PERNYATAAN DEWAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
PT MANDIRI TUNAS FINANCE**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF 31 DECEMBER 2023 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
PT MANDIRI TUNAS FINANCE**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned below:

1. Nama	Pinohadi G Sumardi	Name
Alamat kantor	Gedung Graha Mandiri Lt. 3A Jl. Imam Bonjol No. 61 Menteng Jakarta Pusat 10310	Office address
Alamat domisili atau sesuai KTP	Jl. Salak L-8 Kalibata Indah RT 008/RW 006 Kel. Rawajati Kec. Pancoran, Jakarta Selatan	Domicile address or address according to ID
Nomor telepon	(021) 2305608	Telephone number
Jabatan	Direktur Utama/President Director	Title
2. Nama	R Eryawan Nurhariadi	Name
Alamat kantor	Gedung Graha Mandiri Lt. 3A Jl. Imam Bonjol No. 61 Menteng Jakarta Pusat 10310	Office address
Alamat domisili atau sesuai KTP	Jl. Tebet Timur Dalam VIII L/27, RT/RW:002/009, Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet	Domicile address or address according to ID
Nomor telepon	(021) 2305608	Telephone number
Jabatan	Direktur Keuangan/Finance Director	Title

menyatakan bahwa:

declare that:

- | | |
|--|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Mandiri Tunas Finance; | 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Mandiri Tunas Finance;</i> |
| 2. Laporan keuangan PT Mandiri Tunas Finance telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. <i>The financial statements of PT Mandiri Tunas Finance have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Mandiri Tunas Finance telah dimuat secara lengkap dan benar; dan | 3. a. <i>All information in the financial statements of PT Mandiri Tunas Finance have been fully disclosed in a complete and truthful manner; and</i> |
| b. Laporan keuangan PT Mandiri Tunas Finance tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. <i>The financial statements of PT Mandiri Tunas Finance do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit any information or material fact;</i> |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Mandiri Tunas Finance. | 4. <i>We are responsible for the internal control system of PT Mandiri Tunas Finance.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 22 Januari 2024/ Jakarta, 22 January 2024

		
Pinohadi G Sumardi Direktur Utama/President Director	097ALX001984315	R Eryawan Nurhariadi Direktur Keuangan/Finance Director

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF 31 DECEMBER 2023
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan.....	1-2	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.....	3	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas.....	4	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas.....	5-6	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan.....	7-129	<i>Notes to the Financial Statements</i>



Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel: +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00026/2.1032/AU.1/09/1008-1/1/I/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PT Mandiri Tunas Finance

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Mandiri Tunas Finance (“Perusahaan”) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditor’s Report

Report No. 00026/2.1032/AU.1/09/1008-1/1/I/2024

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors

PT Mandiri Tunas Finance

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Mandiri Tunas Finance (the “Company”), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2023, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of 31 December 2023 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00026/2.1032/AU.1/09/1008-1/1/I/2024 (lanjutan)

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal-hal paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan dan dalam merumuskan opini audit kami terhadapnya, dan kami tidak menyatakan suatu opini audit terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang dijelaskan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang dirancang untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, memberikan dasar bagi opini kami atas laporan keuangan terlampir.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00026/2.1032/AU.1/09/1008-1/1/I/2024 (continued)

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole and in forming our audit opinion thereon, and we do not provide a separate audit opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00026/2.1032/AU.1/09/1008-1/1/I/2024 (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan dan anjak piutang (piutang pembiayaan)

Penjelasan atas hal audit utama:

Seperti tercantum dalam Catatan 5, 6, dan 7 atas laporan keuangan, nilai tercatat atas piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan, anjak piutang dan cadangan kerugian penurunan nilai terkaitnya adalah signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan terlampir. Pada tanggal 31 Desember 2023, nilai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan dan anjak piutang adalah masing-masing sebesar Rp347,8 miliar, Rp69,2 miliar, dan Rp436 juta. Informasi kebijakan akuntansi material atas cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan diungkapkan dalam Catatan 2 dalam laporan keuangan terlampir.

Penentuan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan tersebut di atas, memerlukan pertimbangan dan memiliki ketidakpastian estimasi mencakup penentuan model untuk menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, identifikasi eksposur kredit yang mengalami penurunan kualitas kredit yang signifikan, dan penentuan asumsi yang digunakan dalam model perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai, termasuk faktor ekonomi makro berorientasi masa depan.

Karena penentuan cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan dan tagihan anjak piutang melibatkan pertimbangan dan estimasi signifikan dari manajemen dan nilai tercatat yang signifikan, maka hal ini adalah hal audit utama bagi kami.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00026/2.1032/AU.1/09/1008-1/1/I/2024 (continued)

Allowance for impairment losses on consumer financing receivables, finance lease receivables and factoring receivables (financing receivables)

Description of key audit matter:

As stated in Notes 5, 6, and 7 to the accompanying financial statements, the carrying value of consumer financing receivables, finance lease receivables, factoring receivables and the related allowances are significant to the Company's accompanying financial statements. As of December 31, 2023, the amounts of allowance for impairment losses for consumer financing receivables, finance lease receivables and factoring receivables are Rp347.8 billion, Rp69.2 billion, and Rp436 million, respectively. The material accounting policy information of allowance for impairment losses of financial assets are disclosed in Note 2 to the accompanying financial statements.

Determination of allowance for impairment losses of the above-mentioned financial assets requires judgement and subject to estimation uncertainty which includes determining the model to calculate allowance for impairment losses, identification of credit exposures with significant deterioration in credit quality, and determining assumptions used in the allowance for impairment losses calculation models, including forward-looking macroeconomics factors.

Because the determination for allowance for impairment losses on consumer financing receivables, finance lease receivables and factoring receivables involves significant judgments and estimates from the management and the carrying amounts are significant, it is a key audit matter for us.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00026/2.1032/AU.1/09/1008-1/1/I/2024 (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan dan anjak piutang (piutang pembiayaan) (lanjutan)

Respon audit:

Kami menguji kontrol utama atas proses pemberian, pencatatan, dan pengawasan piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan dan anjak piutang. Kami memperoleh pemahaman, menilai metodologi pengukuran penurunan nilai, dan melakukan validasi model pencadangan kerugian penurunan nilai, serta data masukan, dasar dan menilai kewajaran atas asumsi yang digunakan oleh Perusahaan dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai. Kami menguji tiga tahapan kualitas kredit portofolio sesuai dengan kriteria tingkatan (staging) yang disusun oleh Perusahaan untuk piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan dan anjak piutang. Kami membandingkan pengalaman historis dengan keadaan saat ini dan kerugian terkini yang terjadi dalam portofolio, serta menilai kewajaran atas penyesuaian berorientasi masa depan, analisis faktor ekonomi makro, dan beberapa skenario probabilitas tertimbang untuk piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan dan anjak piutang.

Kami menilai apakah pengungkapan di laporan keuangan cukup dan secara memadai mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit. Kami melibatkan pakar auditor internal kami untuk membantu kami dalam melakukan prosedur-prosedur di atas ketika keahlian spesifik mereka diperlukan

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2023 ("Laporan Tahunan") selain laporan keuangan terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00026/2.1032/AU.1/09/1008-1/1/I/2024 (continued)

Allowance for impairment losses on consumer financing receivables, finance lease receivables and factoring receivables (financing receivables) (continued)

Audit response:

We tested the key controls over the process of origination, recording, and monitoring of the consumer financing receivables, finance lease receivables and factoring receivables. We obtained understanding and assessed impairment measurement methodologies, and validated allowance for impairment losses' models, inputs, bases and assessed reasonableness of assumptions used by the Company in calculating the allowance for impairment losses. We tested the classification into three stage credit quality of loans portfolio in accordance with staging criteria developed by the Company for consumer financing receivables, finance lease receivables and factoring receivables. We compared the historical experience with the current circumstances and the recent losses incurred in the portfolios, and assessed reasonableness of forward-looking adjustments, macroeconomic factor analysis, and probability-weighted multiple scenarios for consumer financing receivables, finance lease receivables and factoring receivables.

We assessed whether the financial statements disclosures are adequately and appropriately reflecting the Company's exposures to credit risk. We involved our auditor's internal expert to assist us in the performance of the above procedures when their specific skills are needed.

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the Annual Report 2023 (the "Annual Report") other than the accompanying financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditors' report.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00026/2.1032/AU.1/09/1008-1/1/I/2024 (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan dan anjak piutang (piutang pembiayaan) (lanjutan)

Informasi lain (lanjutan)

Opini audit kami atas laporan keuangan terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00026/2.1032/AU.1/09/1008-1/1/I/2024 (continued)

Allowance for impairment losses on consumer financing receivables, finance lease receivables and factoring receivables (financing receivables) (continued)

Other information (continued)

Our opinion on the accompanying financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00026/2.1032/AU.1/09/1008-1/1/I/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasinya atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00026/2.1032/AU.1/09/1008-1/1/I/2024 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements (continued)

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Company or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00026/2.1032/AU.1/09/1008-1/1/I/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00026/2.1032/AU.1/09/1008-1/1/I/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00026/2.1032/AU.1/09/1008-1/1/I/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00026/2.1032/AU.1/09/1008-1/1/I/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00026/2.1032/AU.1/09/1008-1/1/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00026/2.1032/AU.1/09/1008-1/1/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja



Danil Setiadi Handaja, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1008/Public Accountant Registration No. AP.1008

22 Januari 2024/January 22, 2024



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of 31 December 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	2c,2f 4,27			Cash and cash equivalents
Kas		18.194	13.602	Cash on hand
Kas pada bank				Cash in banks
Pihak ketiga		1.495	15.553	Third parties
Pihak berelasi	2s,4,26a	832.451	811.281	Related parties
		852.140	840.436	
Piutang pembiayaan konsumen	2c,2d,2g,5, 27,28,29			Consumer financing receivables
Pihak ketiga		22.698.175	16.666.569	Third parties
Pihak berelasi	2s,5,26a	11.542	7.846	Related parties
		22.709.717	16.674.415	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	2j,5	(347.894)	(333.578)	Less: allowance for impairment losses
		22.361.823	16.340.837	
Piutang sewa pembiayaan	2c,2d,2h,6, 27,28,29			Finance lease receivables
Pihak ketiga		5.416.865	5.782.025	Third parties
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	2j,6	(69.293)	(138.679)	Less: allowance for impairment losses
		5.347.572	5.643.346	
Anjak piutang	2c,2d,2i,7, 27,28			Factoring receivables
Pihak ketiga		35.758	42.469	Third parties
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	2j,7	(436)	(9.493)	Less: allowance for impairment losses
		35.322	32.976	
Piutang lain-lain	2c,8,27			Other receivables
Pihak ketiga		119.669	89.923	Third parties
Pihak berelasi	2s,8,26a	547.483	499.942	Related parties
		667.152	589.865	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	2j,8	(44.298)	(140.425)	Less: allowance for impairment losses
		622.854	449.440	
Aset pajak tangguhan	2m,9c	100.789	116.452	Deferred tax assets
Piutang derivatif	2c,2t,16,27,28	28.933	24.534	Derivative receivables
Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp410.060 dan Rp347.030 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)	2l,10	283.625	219.763	Fixed assets (net of accumulated depreciation of Rp410,060 and Rp347,030 as of 31 December 2023 and 2022, respectively)
Aset lain-lain	2c,2k,11, 27,28			Other assets
Pihak ketiga		93.432	60.931	Third parties
Pihak berelasi	25,11,26a	902	251	Related parties
TOTAL ASET		29.727.392	23.728.966	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of 31 December 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang usaha	2c,12,27,29	1.017.137	702.291	Trade payables
Utang lain-lain	2c,13,27			Other payables
Pihak ketiga		190.916	199.930	Third parties
Pihak berelasi	2s,13,26b	56.805	100.736	Related parties
Utang pajak kini	2m,9a	112.000	125.498	Current tax liabilities
Beban yang masih harus dibayar	2c,14,27			Accrued expenses
Pihak ketiga		257.626	308.087	Third parties
Pihak berelasi	2s,14,26b	4.472	3.535	Related parties
Pinjaman yang diterima	2c,2d,2e,15,27,28			Borrowings
Pihak ketiga		15.242.400	12.748.612	Third parties
Pihak berelasi	2s,15,26b	2.891.252	1.944.839	Related parties
		18.133.652	14.693.451	
Biaya provisi yang belum diamortisasi	15	(36.937)	(31.564)	Unamortized provision cost
		18.096.715	14.661.887	
Surat berharga yang diterbitkan	2c,2d,2r,17,27,28			Securities issued
Pihak ketiga		5.002.750	3.876.405	Third parties
Pihak berelasi	2s,17,26b	693.000	468.500	Related parties
		5.695.750	4.344.905	
Beban emisi yang belum diamortisasi	17	(8.235)	(5.668)	Unamortized issuance cost
		5.687.515	4.339.237	
Liabilitas imbalan kerja karyawan	2n,18	274.546	194.940	Employee benefits obligation
TOTAL LIABILITAS		25.697.732	20.636.141	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham				Share capital
Modal dasar - 10.000.000.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham				Authorized capital - 10,000,000,000 ordinary shares with a par value of Rp100 (full amount) per share
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.500.000.000 lembar saham	2o,19	250.000	250.000	Issued and fully paid up capital - 2,500,000,000 ordinary shares
Penghasilan komprehensif lain: Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan - neto	2n,18	(38.390)	(30.198)	Other comprehensive income: Remeasurement of employee benefits obligation - net
Keuntungan (kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto	2t,16	2.802	(6.188)	Cumulative gain (loss) on derivative instrument for cash flow hedges - net
Saldo laba				Retained earnings
Sudah ditentukan penggunaannya	20	50.000	50.000	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		3.765.248	2.829.211	Unappropriated
TOTAL EKUITAS		4.029.660	3.092.825	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		29.727.392	23.728.966	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
31 December 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
		2023	2022	
PENDAPATAN				REVENUE
Pembiayaan konsumen	21a,26c	3.000.350	2.437.004	Consumer financing
Sewa pembiayaan	21b	652.751	565.529	Financial lease
Anjak piutang	21c	909	9.715	Factoring
Simpanan bank	21d,26c	17.134	15.163	Deposit in bank
Lain-lain - neto	21e,26c	1.081.756	904.097	Others - net
Total pendapatan		4.752.900	3.931.508	Total revenue
BEBAN				EXPENSES
Beban keuangan	2r,2s,22,26d	(1.510.165)	(1.249.572)	Financial charges
Gaji dan tunjangan	2s,23,26d	(802.194)	(823.406)	Salaries and benefits
Umum dan administrasi	24,26d	(349.836)	(327.436)	General and administration
Penyisihan kerugian penurunan nilai:				Provision for impairment losses:
Pembiayaan konsumen	2c,2g,5	(697.613)	(487.604)	Consumer financing
Sewa pembiayaan	2c,2h,6	(7.050)	(49.556)	Financial leases
Anjak piutang	2c,2i,7	9.057	(11.063)	Factoring
Piutang lain-lain	2c,8	96.127	(18.877)	Other receivables
Total beban		(3.261.674)	(2.967.514)	Total expenses
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN		1.491.226	963.994	INCOME BEFORE FINAL TAX AND INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK FINAL	2m	(3.427)	(3.033)	FINAL TAX EXPENSE
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		1.487.799	960.961	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2m,9b	(326.698)	(210.748)	INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN		1.161.101	750.213	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Item that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan		(10.502)	3.070	Remeasurement of employee benefit obligation
Pajak penghasilan terkait		2.310	(675)	Income tax effect
		(8.192)	2.395	
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Item that will be reclassified to profit or loss:
Bagian efektif dari keuntungan (kerugian) instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	2t	11.525	(7.002)	Effective portion of gain (loss) on hedging instruments in a cash flow hedge
Pajak penghasilan terkait		(2.535)	1.540	Income tax effect
		8.990	(5.462)	
Laba/(Rugi) penghasilan komprehensif lain- setelah pajak		798	(3.067)	Other comprehensive income/(loss) net of tax
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1.161.899	747.146	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR (Nilai penuh)	2q,25	464	300	BASIC EARNINGS PER SHARE (Full amount)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended
31 December 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan- neto/ Remeasurement of employee benefits obligation- net	Keuntungan(kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas- neto/ Cumulative gain(loss) on derivative instrument for cash flow hedges- net	Saldo laba sudah ditentukan penggunaannya/ Appropriated retained earnings	Saldo laba belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated retained earnings	Ekuitas/ Equity
Saldo 31 Desember 2021	250.000	(32.593)	(726)	50.000	2.128.173	2.394.854
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan - setelah pajak Kerugian bersih	-	2.395	-	-	-	2.395
atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas	-	-	(5.462)	-	-	(5.462)
Laba tahun berjalan 2022	-	-	-	750.213	750.213	750.213
Dividen yang dibayarkan	20	-	-	(49.175)	(49.175)	(49.175)
Saldo 31 Desember 2022	250.000	(30.198)	(6.188)	50.000	2.829.211	3.092.825
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan - setelah pajak Keuntungan bersih	-	(8.192)	-	-	-	(8.192)
atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas	-	-	8.990	-	-	8.990
Laba tahun berjalan 2023	-	-	-	1.161.101	1.161.101	1.161.101
Dividen yang dibayarkan	20	-	-	(225.064)	(225.064)	(225.064)
Saldo 31 Desember 2023	250.000	(38.390)	2.802	50.000	3.765.248	4.029.660

Balance 31 December 2021
Remeasurement of employee benefit obligation - net of tax
Net loss
on derivative instrument for cash flow hedging
Income for the year 2022
Dividends paid

Balance 31 December 2022
Remeasurement of employee benefit obligation - net of tax
Net gain
on derivative instrument for cash flow hedging
Income for the year 2023
Dividends paid

Balance 31 December 2023

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
31 December 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
		2023	2022	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari konsumen:				Cash receipts from customers:
Pembiayaan konsumen		24.720.154	21.507.345	Consumer financing
Sewa pembiayaan		4.099.252	3.845.288	Finance lease
Anjak piutang		7.000	401.193	Factoring
Pembiayaan bersama		12.782.010	11.436.484	Joint Financing
Pendapatan bunga				Interest income from
simpanan bank		13.688	15.144	deposit in bank
Pendapatan penalti	21e	148.794	134.027	Late payment penalties
Penerimaan dari piutang				Recovery from
yang telah dihapusbukukan	21e	179.645	152.667	written-off receivables
Premi asuransi		1.651.382	1.408.879	Insurance premiums
Penerimaan tagihan kelebihan pajak	9d	-	20.697	Receipts of excess tax bill
Pengeluaran kas untuk:				Cash disbursements for:
Pembayaran fasilitas				Repayments of joint
pembiayaan bersama		(10.632.638)	(10.458.484)	financing facilities
Pembayaran kepada				Payments to car dealers
penyalur kendaraan		(33.458.424)	(28.489.839)	Payments for finance charges
Pembayaran beban keuangan		(1.492.506)	(1.268.963)	Payments for income tax
Pembayaran pajak penghasilan		(324.758)	(133.626)	Payments for
Pembayaran gaji dan				salaries and allowances
tunjangan		(772.663)	(649.104)	Payments for general and
Pembayaran beban				administrative expenses
umum dan administrasi		(340.005)	(264.328)	Payments to insurance
Pembayaran kepada perusahaan				companies
asuransi		(1.001.429)	(847.557)	
Kas neto yang digunakan untuk				Net cash used in
aktivitas operasi		(4.420.498)	(3.190.177)	operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS				CASH FLOWS FROM
INVESTASI				INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	10	(86.892)	(49.896)	Acquisition of fixed assets
Perolehan aset hak guna		(32.191)	(15.731)	Acquisition of right-of-use assets
Penjualan aset tetap	10	129	355	Sales of fixed assets
Kas neto yang digunakan				Net cash used in
untuk aktivitas investasi		(118.954)	(65.272)	investing activities

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended
31 December 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
		2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman	32	17.276.376	20.402.395	<i>Proceeds from borrowings</i>
Penerimaan surat berharga yang diterbitkan	32	1.822.845	1.228.055	<i>Proceeds from securities issued</i>
Pembayaran pinjaman	32	(13.829.050)	(15.330.618)	<i>Repayment of borrowings</i>
Pembayaran surat berharga yang diterbitkan	17,32	(472.000)	(2.382.000)	<i>Repayment of securities issued</i>
Pembayaran beban emisi surat berharga	17	(6.283)	(3.118)	<i>Repayment of securities issuance costs</i>
Pembayaran dividen kas	20	(225.064)	(49.175)	<i>Payment of cash dividends</i>
Pembayaran utang sewa	32	(15.668)	(10.036)	<i>Payment of lease liabilities</i>
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan		4.551.156	3.855.503	Net cash provided by financing activities
Kenaikan neto kas dan setara kas		11.704	600.054	Net increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	4	840.436	240.382	Cash and cash equivalents at beginning of year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	4	852.140	840.436	Cash and cash equivalents at end of year

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM

PT Mandiri Tunas Finance (“Perseroan”) didirikan dengan nama PT Tunas Financindo Corporation pada tanggal 17 Mei 1989 berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, No. 262. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-4868.HT.01.01.TH’89 tanggal 1 Juni 1989 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 57, Tambahan No. 1369 tanggal 18 Juli 1989. Pada tanggal 18 Agustus 2000, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Tunas Financindo Sarana berdasarkan Akta Notaris Adam Kasdarmadji S.H., M.H., Notaris di Jakarta No. 49. Akta perubahan ini disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan melalui Surat Keputusan No. C-21195HT.01.04.TH2000 tanggal 22 September 2000. Pada tanggal 30 November 2007, Perseroan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Notaris No. 94, Herawati, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-06708.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008.

Pada tanggal 26 Juni 2009, Perseroan mengubah nama Perseroan menjadi PT Mandiri Tunas Finance berdasarkan perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Akta Notaris No. 181 Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dengan Akta, No. 160 tanggal 29 September 2023 yang dibuat dihadapan Muhammad Kholid Artha, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0060383.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 5 Oktober 2023.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah bergerak dalam bidang pembiayaan, yang meliputi:

- a. Pembiayaan Investasi
- b. Pembiayaan Modal Kerja
- c. Pembiayaan Multiguna
- d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
- e. Sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

1. GENERAL INFORMATION

PT Mandiri Tunas Finance (the “Company”) was incorporated with the name of PT Tunas Financindo Corporation on 17 May 1989 based on Notarial Deed of Misahardi Wilamarta, S.H., Notary in Jakarta, No. 262. The Company’s Articles of Association was approved by the Ministry of Justice in its Decision Letter No. C2-4868.HT.01.01.TH’89 dated 1 June 1989 and were published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 57, Supplement No. 1369 dated 18 July 1989. On 18 August 2000, the Company changed its name to PT Tunas Financindo Sarana based on Notarial Deed of Adam Kasdarmadji S.H., M.H., Notary in Jakarta No. 49. This deed was approved by the Minister of Law and Regulation in its Decision Letter No. C-21195HT.01.04.TH2000 dated 22 September 2000. On 30 November 2007, the Company complied its Articles of Association to The Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company based on Notarial Deed No. 94 of Herawati, S.H., Notary in Jakarta. This deed was approved by Minister of Law And Human Rights in its Decision Letter No. AHU-06708.AH.01.02.Tahun 2008 dated 12 February 2008.

On 26 June 2009, the Company changed its name to PT Mandiri Tunas Finance based on the amendment of the Articles of Association by the Notarial Deed No. 181 of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi., Notary in Jakarta. The Articles of Association has been amended from time to time, where in the latest amendment by Deed No. 160 dated 29 September 2023 made before Muhammad Kholid Artha, S.H., Notary in Jakarta. has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in Decree No. AHU-0060383.AH.01.02.TAHUN 2023, dated 5 October 2023.

Based on Article 3 of the Company’s Articles of Association, the scope of activities of the Company comprises of finance activities under:

- a. Investment financing*
- b. Working capital financing*
- c. Multi purposes financing*
- d. Other financing activities based on the approval of Financial Services Authority.*
- e. Operating lease and/or fee based activities as long as not contradictory with the regulation in financial services sector.*

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Kegiatan komersial Perseroan dimulai pada tahun 1989. Perseroan memperoleh ijin usaha sebagai Perseroan pembiayaan dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen dari Menteri Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. 1021/KMK.013/1989 tanggal 7 September 1989, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan No. 54/KMK.013/1992 tanggal 15 Januari 1992 dan No. 19/KMK.017/2001 tanggal 19 Januari 2001. Amandemen terakhir diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-352/KM.10/2009 tanggal 29 September 2009. Saat ini, Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna, anjak piutang dan kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Perseroan berdomisili di Jakarta Pusat dan mempunyai 124 kantor cabang dan 9 kantor selain kantor cabang yang berlokasi di beberapa tempat di Indonesia.

Pada tanggal 6 Februari 2009, PT Tunas Ridean Tbk. dan PT Tunas Mobilindo Parama mengalihkan kepemilikan sahamnya di Perseroan sejumlah masing-masing 650.000.000 lembar saham dan 625.000.000 lembar saham atau sebesar 51% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan akta notaris No. 8, Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., tanggal 6 Februari 2009.

Perseroan menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Mandiri Tunas Finance ke Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:

Obligasi/Bonds
I
II
III
IV
V
VI
Berkelanjutan I tahap I/ Continuing Bonds I Phase I
Berkelanjutan I tahap II/ Continuing Bonds I Phase II
Berkelanjutan I tahap III/ Continuing Bonds I Phase III
Berkelanjutan II tahap I/ Continuing Bonds II Phase I
Berkelanjutan II tahap II/ Continuing Bonds II Phase II
Berkelanjutan III tahap I/ Continuing Bonds III Phase I
Berkelanjutan III tahap II/ Continuing Bonds III Phase II
Berkelanjutan IV tahap I/ Continuing Bonds IV Phase I
Berkelanjutan IV tahap II/ Continuing Bonds IV Phase II
Berkelanjutan V tahap I/ Continuing Bonds V Phase I
Berkelanjutan V tahap II/ Continuing Bonds V Phase II
Berkelanjutan V tahap III/ Continuing Bonds V Phase III
Berkelanjutan VI tahap I/ Continuing Bonds VI Phase I
Berkelanjutan VI tahap II/ Continuing Bonds VI Phase II

1. GENERAL INFORMATION (continued)

The Company commenced commercial activities in 1989. The Company obtained a business license to operate in leasing, factoring and consumer financing from the Ministry of Finance in its Decision Letter No. 1021/KMK.013/1989 dated 7 September 1989, as amended by the Decision Letter No. 54/KMK.013/1992 dated 15 January 1992 and No. 19/KMK.017/2001 dated 19 January 2001. The latest amendment was by the Ministry of Finance Decision Letter No. KEP-352/KM.10/2009 dated 29 September 2009. Currently, the Company is engaged in investing, working capital, multipurpose, factoring and other financing activities based on the approval of Financial Services Authority.

The Company is domiciled in Central Jakarta and has 124 branches and 9 other branches that are located through other parts of Indonesia.

On 6 February 2009, PT Tunas Ridean Tbk. and PT Tunas Mobilindo Parama have transferred their ownership in the Company amounting to 650,000,000 shares and 625,000,000 shares, respectively, representing 51% of total issued and fully paid-up shares, to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. by the Notarial Deed No. 8 of Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., dated 6 February 2009.

The Company issued and registered the following Mandiri Tunas Finance Bonds in the Indonesia Stock Exchange

Tanggal terbit/Issue date	Nilai nominal/Nominal value
29 Mei/May 2003	500.000
22 Juni/June 2004	350.000
8 Juli/July 2005	350.000
22 Februari/February 2007	600.000
20 Februari/February 2008	600.000
6 Mei/May 2011	600.000
5 Juni/June 2013	500.000
23 Mei/May 2014	600.000
9 Juni/June 2015	150.000
18 Desember/December 2015	600.000
1 Juni/June 2016	1.400.000
7 Oktober/October 2016	500.000
8 Mei/May 2017	850.000
8 Januari/January 2019	1.000.000
26 Juli/July 2019	2.000.000
13 Agustus/August 2020	858.000
20 Mei/May 2021	1.400.850
23 Februari/February 2022	1.228.055
27 Juni/June 2023	691.735
27 September/September 2023	1.131.110

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Pada tanggal 8 Januari 2019, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019 ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I") ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 18 tanggal 9 Oktober 2018 dan perubahan pernyataan kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2018 No.18 tanggal 19 November 2018 serta perubahan I Perjanjian Penjaminan Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2019 No.17 tanggal 14 Desember 2018 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I.

Pada tanggal 26 Juli 2019, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2019 ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II") ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 12 tanggal 8 Juli 2019 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II.

Pada tanggal 13 Agustus 2020, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2020 ("Obligasi Berkelanjutan V Tahap I") ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 12 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.

Pada tanggal 20 Mei 2021, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2021 ("Obligasi Berkelanjutan V Tahap II") ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 25 tanggal 23 April 2021 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap II.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

On 8 January 2019, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds IV Phase I Year 2019 ("Continuing Bonds IV Phase I") in the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds IV Phase I and appointment of Trustee based on Trusteeship Agreements No. 18 dated 9 October 2018 and amendment to restatement of Trusteeship Agreements Continuing Bonds IV Phase I Year 2018 No.18 dated 19 November 2018 and then amendment I of Trusteeship Agreements Continuing Bonds IV Phase I Year 2019 No.17 dated 14 December 2018 were signed by the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, as the Trustee for the Continuing Bonds IV Phase I.

On 26 July 2019, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds IV Phase II Year 2019 ("Continuing Bonds IV Phase II") in the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds IV Phase II and appointment of Trustee based on Trusteeship Agreements No. 12 dated 8 July 2019 were signed by the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, as the Trustee for the Continuing Bonds IV Phase II.

On 13 August 2020, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds V Phase I Year 2020 ("Continuing Bonds V Phase I") in the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds V Phase I and appointment of Trustee based on Trusteeship Agreements No. 12 dated 11 May 2020 were signed by the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, as the Trustee for the Continuing Bonds V Phase I.

On 20 May 2021, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds V Phase II Year 2021 ("Continuing Bonds V Phase II") in the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds V Phase II and appointment of Trustee based on Trusteeship Agreements No. 25 dated 23 April 2021 were signed by the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, as the Trustee for the Continuing Bonds V Phase II.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Pada tanggal 23 Februari 2022, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2022 ("Obligasi Berkelanjutan V Tahap III") ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 1 tanggal 2 Februari 2022 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap III.

Pada tanggal 27 Juni 2023, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Tahun 2023 ("Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I") ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 29 tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I.

Pada tanggal 27 September 2023, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II Tahun 2023 ("Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II") ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 02 tanggal 6 September 2023 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II.

Perubahan susunan Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang terakhir dilakukan pada tanggal 28 Juni 2023, sebagaimana ternyata dalam Akta No. 138 yang dibuat oleh Muhammad Kholid Artha, S.H., Notaris di Jakarta. Penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database sistem administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0133677 tanggal 3 Juli 2023.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

On 23 February 2022, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds V Phase III Year 2022 ("Continuing Bonds V Phase III") in the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds V Phase III and appointment of Trustee based on Trusteeship Agreements No. 1 dated 2 February 2022 were signed by the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, as the Trustee for the Continuing Bonds V Phase III.

On 27 June 2023, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds VI Phase I Year 2023 ("Continuing Bonds VI Phase I") in the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds VI Phase I and appointment of Trustee based on Trusteeship Agreements No. 29 dated 17 March 2023 were signed by the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, as the Trustee for the Continuing Bonds VI Phase I.

On 27 September 2023, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds VI Phase II Year 2023 ("Continuing Bonds VI Phase II") in the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds VI Phase II and appointment of Trustee based on Trusteeship Agreements No. 02 dated 6 September 2023 were signed by the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, as the Trustee for the Continuing Bonds VI Phase II.

The latest change in the composition of Directors and the composition of the Board of Commissioner was conducted on 28 June 2023 as stated in the Notary Deed No. 138 of Muhammad Kholid Artha, S.H., Notary in Jakarta. The notification receipt of the change in the corporate data has been received and recorded in the database administration system of legal entity in the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09-0133677 dated 3 July 2023.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Dewan Komisaris			Board of Commissioners
Komisaris Utama	Rico Adisurja Setiawan	Rico Adisurja Setiawan	President Commissioner
Komisaris	Totok Priyambodo	Totok Priyambodo	Commissioner
Komisaris Independen	Fendy Eventius Mugni ^{b)}	Ravik Karsidi ^{a)}	Independent Commissioner
Direksi			Directors
Direktur Utama	Pinohadi Gautama Sumardi	Pinohadi Gautama Sumardi	President Director
Direktur	R. Eryawan Nurhariadi	R. Eryawan Nurhariadi	Director
Direktur	William Francis Indra	William Francis Indra	Director
Komite Audit			Audit Committee
Ketua	Fendy Eventius Mugni ^{b)}	Ravik Karsidi ^{a)}	Chairman
Anggota	Marlan Marthias		
Anggota	Achmad ^{d)}	Allen Situngkir ^{c)}	Member
Anggota	Indra Riyawan	Indra Riyawan	Member
Komite Pemantau Resiko			Risk Monitoring Committee
Ketua	Fendy Eventius Mugni ^{b)}	Ravik Karsidi ^{a)}	Chairman
Anggota	Totok Priyambodo	Totok Priyambodo	Member
Anggota	Indra Riyawan	Indra Riyawan	Member
Anggota	Irwan Tri Nugroho	Irwan Tri Nugroho	Member
Komite Nominasi dan Remunerasi			Nomination and Remuneration Committee
Ketua	Fendy Eventius Mugni ^{b)}	Ravik Karsidi ^{a)}	Chairman
Anggota	Totok Priyambodo	Totok Priyambodo	Member
Anggota	Makah Indra Purnomo ^{f)}	Vivid Zulprimiandanni ^{e)}	Member

^{a)} Telah diberhentikan oleh Para Pemegang Saham Perseroan berdasarkan keputusan Pemegang Saham No. 138 tanggal 28 Juni 2023.

^{b)} Telah diangkat berdasarkan keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 138 tanggal 28 Juni 2023 dan efektif tanggal 8 Desember 2023 sesuai persetujuan dari OJK.

^{c)} Telah diberhentikan berdasarkan Surat keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/006/2023 tanggal 15 September 2023.

^{d)} Telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/008/2023 tanggal 15 September 2023.

^{e)} Telah diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/003/2023 tanggal 28 Juli 2023.

^{f)} Telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/003/2023 tanggal 28 Juli 2023.

Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015.

Pembentukan Komite Pemantau Resiko Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2015 tanggal 23 Maret 2015.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

The members of the Company's Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee are as follows:

^{a)} Has been dismissed by the Company Shareholders based on the decision of General Meeting of Shareholders No. 138 on 28 June 2023.

^{b)} Has been appointed based on the decision of General Meeting of Shareholders No. 138 on 28 June 2023 and effective on 8 December 2023 according to approval of the OJK.

^{c)} Has been dismissed based on the Board of Commissioner decision letter No. KEP.KOM/006/2023 on 15 September 2023.

^{d)} Has been appointed based on the Board of Commissioner decision letter No. KEP.KOM/008/2023 on 15 September 2023.

^{e)} Has been dismissed based on the Board of Commissioner decision letter No. KEP.KOM/003/2023 on 28 July 2023.

^{f)} Has been appointed based on the Board of Commissioner decision letter No. KEP.KOM/003/2023 on 28 July 2023.

The appointment of the Company's Audit Committee is in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015.

The appointment of the Company's Risk Monitoring Committee is in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 10/POJK.05/2014 dated 27 August 2014 and Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.05/2015 dated 23 March 2015.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014.

Sekretaris Perusahaan Perseroan dan Kepala Divisi Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2023
Sekretaris Perusahaan Kepala Divisi Audit Internal	Arif Reza Fahlepi Bayu Mario

Pembentukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014.

Pembentukan Divisi Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan memiliki 3.328 karyawan (31 Desember 2022: 3.306 karyawan) (tidak diaudit).

Entitas induk langsung dan entitas induk terakhir Perseroan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kebijakan akuntansi yang signifikan, yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Pedoman atas Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

1. GENERAL INFORMATION (continued)

The appointment of the Company's Nomination and Remuneration Committee is in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated 8 December 2014.

The Company's Corporate Secretary and the Head of Internal Audit Division are as follows:

	31 Desember/ December 2022
	Arif Reza Fahlepi Bayu Mario
	Corporate Secretary Head of Internal Audit Division

The establishment of the Company's Corporate Secretary is in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 dated 8 December 2014.

The establishment of the Company's Internal Audit Division is in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 dated 23 December 2015.

As of 31 December 2023, the Company has 3,328 employees (31 December 2022: 3,306 employees, respectively) (unaudited).

The direct and ultimate holding entity of the Company is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, state-owned company, owned by the Government of the Republic of Indonesia.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

The significant accounting policies, applied in the preparation of the Company's financial statements were as follows:

a. Statement of compliance

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which include the Statements and Interpretations issued by the Indonesian Accounting Standards Board (DSAK-IAI) and Indonesian Capital Market Supervisory Agency (Bapepam-LK) Regulation No. VIII.G.7 appendix of the Decision of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012 regarding the "Guidelines on Financial Statements Presentations and Disclosures for Issuers or Public Companies".

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

b. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas, dan menggunakan konsep biaya historis kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, kas pada bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman atau dibatasi penggunaannya.

Pos-pos dalam Penghasilan Komprehensif Lainnya disajikan terpisah antara akun - akun yang akan direklasifikasikan ke laba rugi dan akun - akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- nilai aset dan liabilitas dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, dan
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Mata uang penyajian yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

b. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the statement of cash flows, and using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant notes herein.

The statement of cash flows are prepared based on direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purposes of the statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with original maturity of three months or less, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted.

The items under Other Comprehensive Income (OCI) are presented separately between items to be reclassified to profit or loss and those items not to be reclassified to profit or loss.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of estimates and assumptions that affects:

- the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements, and
- the reported amounts of revenues and expenses during the reported period.

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

The presentation currency used in the financial statements is Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Company.

The amounts in the financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah unless otherwise stated.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan

Perseroan menggunakan 2 (dua) dasar untuk mengklasifikasikan aset keuangan yaitu penilaian model bisnis dan penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Perseroan;
- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh);
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Perseroan mempertimbangkan:

- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

c. Financial assets and liabilities

Financial assets

The Company uses 2 (two) bases for classifying financial assets, namely evaluation of the business model and evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest.

Valuation of the business model

The business model is determined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve certain business objectives.

The evaluation of the business model is carried out by considering, but not limited to, the following:

- How the performance of the business model and financial assets held in the business model are evaluated and reported to the Company's key management personnel;
- What risks affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how the financial assets are managed; and
- How to evaluate the performance of managers of financial assets (for example, whether performance appraisals are based on the fair value of the assets being managed or the contractual cash flows obtained);
- Expected frequency, value, and timing of sales.

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest

An assessment of contractual cash flows obtained solely from principal and interest payments is made by considering contractual terms, including whether financial assets contain contractual terms that can change the timing or amount of contractual cash flows. In assessing, the Company considers:

- Contingency events that will change the timing or amount of contractual cash flows;
- Leverage feature;
- Terms of advance payment and contractual extension;
- Requirements regarding limited claims for cash flows from specific assets; and
- Features that can change the time value of the money element.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (lanjutan)

Perseroan mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Selama tahun berjalan dan pada tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan hanya memiliki aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi serta derivatif lindung nilai sehingga kebijakan akuntansi selain klasifikasi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi serta derivatif lindung nilai tidak diungkapkan.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan pendapatan administrasi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi kas dan setara kas, piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan, anjak piutang, piutang lain-lain dan aset lain-lain (piutang karyawan, piutang bunga, setoran dalam perjalanan dan uang jaminan).

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest (continued)

The Company classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition:

- Financial assets measured at amortized cost;
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;
- Financial assets measured at fair value through profit or loss.

During the year and at the date of statement of financial position, the Company only has financial assets measured at amortized cost and hedging derivatives. Therefore, the accounting policies other than the classifications of financial assets measured at amortized cost and hedging derivatives are not disclosed.

Financial assets measured at amortized cost

Financial assets are measured at amortized cost if they meet the following conditions:

- financial assets are managed in a business model that aims to have financial assets in order to obtain contractual cash flows; and
- the contractual terms of the financial asset provide rights on a certain date for cash flows obtained solely from payment of principal and interest (SPPI) on the principal amount owed.

Financial assets carried at amortized cost are initially recognized at fair value plus transaction costs and administration income and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Financial assets carried at amortized cost consist of cash and cash equivalents, consumer financing receivables, finance lease receivables, factoring receivables, other receivables and other assets (employee receivables, interest receivables, deposit in transit and security deposit).

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Pendapatan dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan diakui sebagai "Pendapatan pembiayaan konsumen", "Pendapatan sewa pembiayaan" dan "Pendapatan anjak piutang".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, cadangan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset derivatif diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Pengakuan

Perseroan menggunakan akuntansi tanggal transaksi untuk kontrak reguler ketika mencatat transaksi aset keuangan.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan mengukur penyisihan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan sejumlah kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

c. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

Financial assets measured at amortized cost (continued)

Income from financial assets measured at amortized cost is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income and is reported as "Consumer financing income", "Finance lease income" and "Factoring income".

In the case of impairment, allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets measured at amortized cost and recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "Provision for impairment losses".

Financial assets measured at fair value through profit or loss

Financial assets measured at fair value through profit or loss include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

Derivative assets are classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets at fair value through profit or loss are carried in the statement of financial position at fair value with gains or losses recognized in the profit or loss.

Recognition

The Company uses trade date accounting for regular way contracts when recording financial assets transactions.

Impairment of financial assets

At each reporting date, the Company measures the Allowance of impairment losses on financial instruments over their lifetime expectancy, if the credit risk of the financial instrument has increased significantly since initial recognition.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

Jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, entitas mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian ekspektasian 12 bulan. Kerugian dimaksud merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Selanjutnya, Perseroan mengelompokkan aset keuangan berdasarkan hasil evaluasi tersebut yang mencerminkan tingkat risiko kredit aset keuangan.

a) *Stage 1*

Pada tanggal evaluasi penurunan nilai, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal yang dapat dibuktikan dengan tidak terdapat tunggakan lebih dari 30 hari. Atas hal tersebut, Perseroan akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

b) *Stage 2*

Pada tanggal evaluasi penurunan nilai, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal yang dapat dibuktikan dengan terdapat tunggakan antara 31 hari sampai dengan 90 hari. Atas hal tersebut, Perseroan akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

If at the reporting date, the credit risk of the financial instrument has not increased significantly since initial recognition, the entity measures the allowance of impairment losses for the financial instrument in the amount of the expected 12-month loss. The aforementioned losses represent expected loan losses arising from financial instrument defaults that may occur 12 months after the reporting date.

Furthermore, the Company classifies financial assets based on the evaluation results which reflects the level of the credit risk of financial assets.

a) *Stage 1*

At the evaluation date for impairment, the credit risk for financial instruments is not increased significantly since initial recognition as evidenced by no overdue of more than 30 days. For this reason, the Company will measure the allowance for losses for the financial instrument in the amount of 12-month expected credit losses.

The 12-month expected credit loss is part of the expected credit loss throughout its lifetime that represents an expected credit loss arising from a default on financial instruments that might occur 12 months after reporting date.

b) *Stage 2*

At the evaluation date of impairment, credit risk on financial instruments has increased significantly since initial recognition, which can be proven by the overdue between 31 days and 90 days. For this reason, the Company will measure the allowance for losses for these financial instruments at the amount of expected credit losses over their lifetime.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

c) *Stage 3*

Pada tanggal evaluasi penurunan nilai, terdapat bukti objektif bahwa instrumen keuangan mengalami penurunan nilai yang dapat dibuktikan dengan terdapat tunggakan lebih dari 90 hari atau telah diserahkannya jaminan kendaraan milik konsumen untuk pelunasan piutang pembiayaan. Atas hal tersebut, Perseroan akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.

Tujuan dari persyaratan penurunan nilai adalah untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya atas semua instrumen keuangan yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal - baik dinilai secara individu atau kolektif - dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*).

Perseroan menerapkan persyaratan penurunan nilai untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Dalam beberapa keadaan Perseroan tidak memiliki informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya pada instrumen secara individual. Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya diakui secara kolektif dengan mempertimbangkan informasi risiko kredit komprehensif. Informasi risiko kredit komprehensif tersebut harus memasukan tidak hanya informasi tunggakan tetapi juga seluruh informasi kredit relevan, termasuk informasi makroekonomi *forward-looking*, untuk mendekati hasil dari pengakuan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya ketika terdapat kenaikan signifikan pada risiko kredit sejak pengakuan awal pada level instrumen individu.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

c) *Stage 3*

At the evaluation date of impairment, there is objective evidence that the financial instruments are impaired, which can be proven by being in overdue of more than 90 days or motor vehicle collaterals owned by customers have been submitted for settlement of their financing receivables. For this reason, the Company will measure the allowance for losses for these financial instruments at the amount of expected credit losses over their lifetime.

The purpose of the impairment requirements is to recognize expected credit losses over the life of all financial instruments that have experienced a significant increase in credit risk since initial recognition - whether assessed individually or collectively - taking into account all reasonable and supportable information, including estimated future information (forward-looking).

The Company applies an impairment requirement for financial assets measured at amortized cost and financial assets measured at fair value through other comprehensive income.

In some circumstances the Company does not have reasonable and supportable information available without fees or excessive efforts to measure expected credit losses throughout its life on individual instruments. Expected credit losses for the entire lifetime are recognized collectively by considering comprehensive credit risk information. The comprehensive credit risk information must include not only arrears information but also all relevant credit information, including forward-looking macroeconomic information, to approach the outcome of recognizing expected credit losses over the life when there is a significant increase in credit risk since initial recognition at the level of individual instruments.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dihitung dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flows*). Sedangkan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif dihitung dengan menggunakan metode statistik dari data historis berupa *probability of default* di masa lalu, waktu pengembalian dan jumlah kerugian yang terjadi (*Loss Given Default*) yang selanjutnya disesuaikan lagi dengan pertimbangan manajemen terkait kondisi ekonomi dan kredit saat ini.

Ketika suatu piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan pinjaman yang diberikan dan piutang diklasifikasikan ke dalam "Cadangan kerugian penurunan nilai".

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat piutang debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain pada saat diterima.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

Allowance for impairment losses on impaired financial assets that was assessed individually is computed using discounted cash flows method. For allowance for impairment losses on impaired financial assets that was assessed collectively, the Company uses statistical method of the historical data such as the probability of default, timing of recoveries, the amount of loss incurred (*Loss Given Default*), considering management's judgment of current economic and credit conditions.

When a receivable is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses. Such receivables are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined. Impairment charges relating to loans and receivables are classified into "Allowance for impairment losses".

If in the subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized (such as an improvement in the debtor's receivable rating), the previously recognized impairment loss is reversed by adjusting the allowance for impairment losses. The amount of the impairment reversal is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Subsequent recoveries of receivable written off are recognized as other income upon receipt.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan

Perseroan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Selama tahun berjalan dan pada tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Perseroan juga memiliki utang derivatif yang diakui sebagai lindung nilai yang efektif.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi.

Setelah pengakuan awal, Perseroan mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman yang diterima, dan surat berharga yang diterbitkan.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi mencakup liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awalnya, telah ditetapkan, diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki untuk tujuan dijual dalam waktu dekat. Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Laba atau rugi atas liabilitas keuangan dalam kelompok diperdagangkan harus diakui dalam laba rugi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

Financial liabilities

The Company classifies its financial liabilities in the category of (i) financial liabilities measured at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

During the year and at the date of statement of financial position, the Company does not have financial liabilities that are measured at fair value through profit or loss. The Company has derivative payables that are accounted for as an effective hedge.

Financial liabilities measured at amortized cost

Financial liabilities at amortized cost are initially recognized at fair value less transaction costs.

After initial recognition, the Company measures all financial liabilities at amortized cost using effective interest rate method.

Financial liabilities measured at amortized cost include trade payables, other payables, accrued expenses, borrowings, and securities issued.

Financial liabilities measured at fair value through profit or loss

Financial liabilities measured at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

Financial liabilities are classified as held for trading if these are incurred for the purpose of selling in the near term. Derivative liabilities are also classified as held for trading unless these are designated as effective hedging instruments.

Gains or losses on financial liabilities held for trading are recognized in profit or loss.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Perseroan melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Penghentian pengakuan piutang pembiayaan konsumen yang mengalami penurunan nilai, akan dilakukan ketika piutang telah dihapusbukukan. Piutang ragu-ragu akan dihapusbukukan setelah menunggak lebih dari 180 hari atau pada saat piutang tersebut diputuskan tidak dapat tertagih. Penghapusbukuan piutang ragu-ragu ini bukan merupakan hapus tagih, sehingga upaya penagihan tetap dilakukan. Piutang pembiayaan konsumen dapat diselesaikan dengan menjual kendaraan yang dibiayai Perseroan.

Perseroan menerima kendaraan dari konsumen dan membantu untuk menjual kendaraan tersebut sehingga konsumen dapat melunasi utang pembiayaan konsumennya.

Konsumen memberi kuasa kepada Perseroan untuk menjual kendaraan ataupun melakukan tindakan lainnya dalam upaya penyelesaian piutang pembiayaan konsumen bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan. Konsumen berhak atas selisih lebih antara nilai penjualan dengan saldo piutang pembiayaan konsumen. Jika terjadi selisih kurang, kerugian yang terjadi dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Jaminan kendaraan milik konsumen untuk pelunasan piutang pembiayaan konsumen yang belum dihapus buku, dinyatakan sebesar nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen terkait setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

Derecognition

Financial assets are derecognized when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risk and rewards were not transferred, the Company tests control to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognized when they have been redeemed or otherwise extinguished.

Consumer financing receivables are derecognized when the receivables have been written off. Doubtful receivables are written off when they have been overdue for more than 180 days or determined to be not collectible. The write-off of doubtful accounts do not eliminate the right to collect and hence are still to be pursued for collection continuously. Consumer financing receivables could be settled by selling the motor vehicles that are financed by the Company.

The Company receives motor vehicles from customers and assist them in selling their motor vehicles so that the customers are able to settle their consumer financing payables.

The customers give the right to the Company to sell the motor vehicles or take any other actions to settle the outstanding consumer financing receivables in the events of default. Customers are entitled to the positive difference between the proceeds from sale of the motor vehicles and the outstanding consumer financing receivables. If difference is negative, the resulting loss is charged to the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

Motor vehicle collaterals owned by customers for settlement of their consumer financing receivables that have not been written off are presented at the carrying value of the related consumer financing receivables, less allowance for impairment losses.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Modifikasi atas Arus Kas Aset Keuangan

Penilaian apakah suatu aset keuangan telah dimodifikasi baik secara substansial maupun tidak substansial dilakukan oleh unit bisnis yang berwenang melakukan modifikasi atau restrukturisasi aset keuangan pada saat unit bisnis tersebut melakukan tindakan modifikasi atau restrukturisasi atas suatu aset keuangan.

Modifikasi aset keuangan dianggap substansial dan Perseroan akan berhenti mengakui aset keuangan awal ketika:

- (a) aset keuangan (atau bagiannya) berakhir, yaitu jika debitur secara hukum dibebaskan dari tanggung jawab utama atas aset tersebut (atau bagiannya), baik melalui proses hukum maupun oleh kreditor pembuatan kontrak kredit baru (sebagai contoh, opsi *equity conversion*); atau
- (b) terdapat konversi mata uang.

Perseroan kemudian akan mengukur aset keuangan yang telah dimodifikasi baik secara substansial maupun tidak substansial dengan cara berikut:

(a) Modifikasi Aset Keuangan yang Substansial

1. Saat arus kas kontraktual atas aset keuangan direnegosiasi atau dimodifikasi (antara lain ketika kredit direstrukturisasi) dimana renegosiasi atau modifikasi tersebut menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan, Perseroan akan mencatat aset keuangan tersebut sebagai aset keuangan baru/modifikasian pada tanggal modifikasi/negosiasi.
2. Selisih jumlah tercatat bruto aset keuangan awal dengan nilai wajar aset modifikasian diakui di laba rugi.
3. Pendapatan atau biaya transaksi yang terjadi sehubungan dengan kejadian modifikasi diakui sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian atas modifikasi tersebut.
4. Selanjutnya, Perseroan melakukan penilaian apakah aset keuangan baru/modifikasian merupakan aset yang berasal dari aset keuangan memburuk.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

Modification of Cash Flows of Financial Assets

An assessment of whether a financial asset has been modified substantially or not is carried out by a business unit who authorized to modify or restructure the financial assets when the business unit carries out modification or restructuring of the financial assets.

Modifications to financial assets are considered substantial and the Company will derecognize the original financial assets when:

- (a) the financial asset (or a portion) expires, that is, if the debtor is legally released from primary responsibility for the asset (or any portion), either by legal process or by the creditor entering into a new credit contract (for example, the equity conversion option); or
- (b) there is a currency conversion.

The Company will then measure the modified financial assets either substantially or not in the following manner:

(a) Substantial Modification of Financial Assets

1. When the contractual cash flows on financial assets are renegotiated or modified (for example, when credit is restructured) where the renegotiation or modification results in derecognition of the financial asset, the Company will record the financial asset as a new/modified financial asset on the modification/negotiation date.
2. The difference between the gross carrying amount of the original financial asset and the fair value of the modified asset is recognized in profit or loss.
3. Transaction income or costs incurred in connection with a modification event are recognized as part of the gain or loss on the modification.
4. Next, the Company will assess whether new/modified financial assets are assets that arise from deteriorating financial assets.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Modifikasi atas Arus Kas Aset Keuangan
(lanjutan)

(a) Modifikasi Aset Keuangan yang Substansial
(lanjutan)

5. Pengakuan pendapatan bunga atas aset yang berasal dari aset keuangan memburuk ditentukan berdasarkan suku bunga efektif yang telah disesuaikan dengan risiko kredit (*risk-adjusted effective interest rate*) untuk mendiskontokan arus kas aset keuangan yang telah dimodifikasi.

(b) Modifikasi Aset Keuangan yang Tidak Substansial

1. Saat Perseroan melakukan renegotiasi atau modifikasi arus kas kontraktual atas aset keuangan (antara lain ketika kredit direstrukturisasi) yang tidak memenuhi kriteria modifikasi aset keuangan yang substansial di atas, maka renegotiasi atau modifikasi tersebut tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan.
2. Jumlah tercatat bruto aset keuangan dihitung sebesar nilai kini (net present value) dari arus kas kontraktual yang telah dimodifikasi atau direnegosiasi yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal.
3. Perseroan kemudian mengakui keuntungan atau kerugian dari modifikasi (yaitu sebesar perubahan jumlah tercatat bruto aset keuangan) dalam laporan laba rugi.
4. Pendapatan atau biaya transaksi yang terjadi sehubungan dengan kejadian modifikasi diakui sebagai penyesuaian terhadap jumlah tercatat aset keuangan yang telah dimodifikasi dan diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan modifikasian tersebut.

Saling hapus

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak yang berkekuatan hukum berarti:

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

Modification of Cash Flows of Financial
Assets (continued)

(a) *Substantial Modification of Financial*
Assets (continued)

5. *The recognition of interest income on assets originating from deteriorating financial assets is determined based on the risk-adjusted effective interest rate to discount the cash flows of modified financial assets.*

(b) *Non-Substantial Modification of Financial*
Assets

1. *When the Company renegotiates or modifies contractual cash flows for financial assets (among others, when loans are restructured) that do not meet the criteria for substantial modification of financial assets above, the renegotiation or modification does not result in derecognition of financial assets.*
2. *The gross carrying amount of the financial asset is computed at the net present value of modified or renegotiated contractual cash flows discounted at the original effective interest rate.*
3. *The Company then recognizes the gain or loss from the modification (namely the change in the gross carrying amount of the financial asset) in the income statement.*
4. *Transaction income or costs incurred in connection with a modification event are recognized as an adjustment to the carrying amount of the modified financial asset and amortized over the remaining term of the modified financial asset.*

Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously. This means that the right to set off:

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
 yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of 31 December 2023
 and for the Year Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
 (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Saling hapus (lanjutan)

- a. tidak terdapat kontinjensi di masa yang akan datang, dan
- b. hak yang berkekuatan hukum pada kondisi-kondisi berikut ini:
 - i. kegiatan bisnis normal;
 - ii. kondisi kegagalan usaha; dan
 - iii. kondisi gagal bayar atau bangkrut.

Klasifikasi instrumen keuangan

Perseroan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

Offsetting (continued)

- a. must not be contingent on a future event, and
- b. must be legally enforceable in all of the following circumstances:
 - i. the normal course of business;
 - ii. the event of default; and
 - iii. the event of insolvency or bankruptcy.

Classification of financial instruments

The Company classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristics of those financial instruments. The classifications are shown in the table below:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK No.71/ Category as defined by SFAS No.71		Golongan (ditentukan oleh Perseroan)/ Class (as determined by the Company)	Subgolongan/ Subclasses
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ Financial assets at amortized cost	Kas dan setara kas/ Cash and cash equivalents	
		- Kas pada bank/ Cash in banks	
		- Deposito berjangka/ Time deposit	
		Piutang pembiayaan konsumen/ Consumer financing receivables	
		Piutang sewa pembiayaan/ Finance lease receivables	
		Anjak piutang/ Factoring receivables	
		Piutang lain-lain/ Other receivables	
		Aset lain-lain/ Other assets	
		- Piutang karyawan/ Employee receivables	
		- Piutang bunga/ Interest receivables	
		- Setoran dalam perjalanan/ Deposit in transit	
		- Uang jaminan/ Security deposit	
	Derivatif lindung nilai/ Hedging derivatives	Lindung nilai atas nilai arus kas/ Hedging instruments in cash flow hedges	
		- Piutang derivatif/ Derivative receivables	
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortized cost	Utang usaha/ Trade payables	
		- Utang kendaraan/ Vehicle payables	
		- Utang asuransi/ Insurance payables	
		Utang lain-lain/ Other payables	
		- Kantor pendaftaran fidusia/ Fiduciary register office	
		- Premi asuransi/ Insurance premium	
- Pembiayaan bersama/ Joint financing			
		Lain-lain/ Others	
		Beban yang masih harus dibayar/ Accrued expenses	
		Pinjaman yang diterima/ Borrowings	
		Surat berharga yang diterbitkan/ Securities issued	

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

d. Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar berdasarkan asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi di:

- pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- jika terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Perseroan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut.

Nilai wajar aset dan liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Perseroan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, berdasarkan tingkatan level input yang terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Level 2 - teknik penilaian di mana tingkat level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 - teknik penilaian di mana tingkat level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

d. Determination of fair value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- *in the principal market for the asset or liability, or*
- *in the absence of the principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The principal or the most advantageous market must be accessible by the Company.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- *Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.*
- *Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly unobservable.*

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

d. Penentuan nilai wajar (lanjutan)

Untuk aset dan liabilitas yang diukur secara berulang dalam laporan keuangan, Perseroan menentukan apakah perpindahan antar level hirarki telah terjadi dengan melakukan evaluasi pengelompokan (berdasarkan level input yang terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara menyeluruh) pada setiap akhir periode pelaporan.

e. Penjabaran mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2023
<u>Mata uang</u>	
Dolar Amerika Serikat (AS\$)	15.416

f. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak dari tanggal penempatannya, yang tidak dibatasi penggunaannya, tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dan dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang sangat signifikan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

d. Determination of fair value (continued)

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in hierarchy by reassessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

e. Foreign currency translation

Transactions denominated in a foreign currency are translated into Rupiah at the exchange rate prevailing at the date of the transaction. At the date of statement of financial position, monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated at the exchange rates prevailing at that date as published by Bank Indonesia.

Exchange gains and losses arising on transactions in foreign currency and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

The exchange rates used to translate the monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as of 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember/ December 2022	
		<u>Currency</u>
	15.731	United States Dollar (US\$)

f. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with original maturity of three months or less from the date of placement, which are not restricted and are not pledged as collateral for any borrowing and that are readily convertible to known amounts of cash which are subject to insignificant risk of changes in value.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

g. Piutang pembiayaan konsumen

Piutang pembiayaan konsumen diakui pada awalnya dengan nilai wajar ditambah biaya-biaya transaksi dan dikurangi *yield enhancing income* yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat bunga efektif. Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan laba atau rugi yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan pada tanggal terjadinya transaksi.

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dan jumlah pokok pembiayaan yang akan diakui sebagai penghasilan sesuai dengan jangka waktu kontrak dengan menggunakan metode tingkat suku bunga efektif.

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan cara pengalihan kredit, merubah jatuh tempo, merubah tenor dan/atau menambah *down payment*.

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit hanya diakui bila nilai kini penerimaan kas masa depan yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi di laporan keuangan.

Pembiayaan bersama

Piutang pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan piutang pembiayaan bersama, pendapatan pembiayaan yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

g. Consumer financing receivables

Consumer financing receivables are recognized initially at fair value, added with directly attributable transactions costs and deducted by yield enhancing income, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Consumer financing receivables are classified as financial assets measured at amortized cost. Refer to Note 2c for the accounting policy for financial assets measured at amortized cost.

Early termination is treated as a cancellation of an existing contract and the resulting gain or loss is credited or charged to the current year statement of profit or loss and other comprehensive income at the transaction date.

Unearned consumer financing income is the difference between total installments to be received from customers and the total financing which is recognized as income over the term of the contract using the effective interest rate.

Credit restructuring can be done by over contract, change in due date, change in tenor and/or increase in down payment.

Losses on loan restructuring in respect of modification of the terms of the loans are recognized only if the present value of total future cash receipts specified in the new terms of the loans, including both receipt designated as interest, and those designated as loan principal, are less than the recorded amounts of loans before restructuring in the financial statements.

Joint financing

Consumer financing receivables are stated at net of joint financing receivables, unearned consumer financing income and allowance for impairment losses.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

g. Piutang pembiayaan konsumen (lanjutan)

Pembiayaan Bersama (lanjutan)

Piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai bersama pihak-pihak lain dimana masing-masing pihak mendapatkan imbalan (*rewards*) dan menanggung risiko kredit sesuai dengan porsi yang disajikan di laporan posisi keuangan secara bersih. Pendapatan administrasi atas pengelolaan pembiayaan bersama disajikan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

h. Piutang sewa pembiayaan

Piutang sewa pembiayaan merupakan jumlah piutang sewa pembiayaan ditambah nilai sisa yang akan diterima pada akhir masa sewa pembiayaan dikurangi dengan pendapatan sewa pembiayaan tangguhan, simpanan jaminan dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara nilai piutang usaha bruto dan nilai tunai piutang diakui sebagai pendapatan sewa pembiayaan tangguhan. Pendapatan sewa pembiayaan tangguhan dialokasikan sebagai pendapatan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian konstan atas investasi bersih dengan menggunakan suku bunga efektif.

Penyewa pembiayaan memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa-pembiayakannya pada akhir masa sewa pembiayaan dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa pembiayaan.

Penyelesaian kontrak sebelum masa sewa pembiayaan berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak sewa dan laba atau rugi yang timbul diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Piutang sewa pembiayaan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

g. Consumer financing receivables
(continued)

Joint financing (continued)

Joint financing receivables where the Company and joint financing providers bear credit risk in accordance with their portion are presented on a net basis in the statement of financial position. Administration income for managing joint financing are presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

h. Finance lease receivables

Finance lease receivables represent lease receivables plus the residual value at the end of the lease period and stated at net of unearned lease income, security deposits and allowances for impairment losses. The difference between the gross lease receivable and the present value of the lease receivable is recognized as unearned lease income. Unearned lease income is allocated to current year statement of profit or loss and other comprehensive income based on a constant rate of return on the net investment using effective interest rates.

The lessee has the option to purchase the leased asset at the end of the lease period at a price mutually agreed upon at the commencement of the agreement.

Early termination is treated as a cancellation of an existing contract and the resulting gain or loss is credited or charged to the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

Finance lease receivables are classified as financial assets measured at amortized cost. Refer to Note 2c for the accounting policy for financial assets measured at amortized cost.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

i. Tagihan anjak piutang

Tagihan anjak piutang dicatat berdasarkan jumlah yang dibayar oleh Perseroan yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai piutang. Perbedaan antara jumlah yang dibayar dan jumlah neto piutang dialihkan merupakan pendapatan belum diakui dan diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu perjanjian dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif (Catatan 2c).

j. Cadangan kerugian penurunan nilai

Perseroan melakukan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai dengan menggunakan metode kerugian kredit ekspektasian. Lihat Catatan 2c.

k. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

l. Aset tetap, aset hak guna dan liabilitas sewa

Aset tetap

Aset tetap diakui sebesar biaya perolehan dan selanjutnya dipertanggungjawabkan dengan menggunakan model biaya (*cost method*) dan dinyatakan sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

i. Factoring receivables

Factoring receivables are recorded at the amount paid by the Company which are calculated based on certain percentages of the receivable value. The difference in value between the amounts paid by the Company and the net factoring receivable is recognized as unearned income and realized over the period of the contract using the effective interest method (Note 2c).

j. Allowance for impairment losses

The Company calculates the allowance for impairment losses using the "expected credit losses" methodology. Refer to Note 2c.

k. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.

l. Fixed assets, right-of-use assets and lease liabilities

Fixed assets

Fixed assets are stated at cost and subsequently accounted using the cost method and stated at cost less accumulated depreciation.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

1. Aset tetap, aset hak guna dan liabilitas sewa
(lanjutan)

Aset tetap (lanjutan)

Harga perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan ("HGB") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi.

Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGB diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomi tanah.

Hak atas tanah tidak diamortisasi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Penyusutan aset tetap selain tanah dan bangunan dalam pengerjaan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

Golongan	Masa manfaat (tahun)/ Useful life (years)	Persentase/ Percentage	Classification
Bangunan	20	5,00%	Buildings
Perabotan dan peralatan kantor	5	20,00%	Furniture and office equipment
Kendaraan	5	20,00%	Vehicles
Renovasi bangunan sewa	3 - 5	20,00% - 33,33%	Leasehold improvement

Aset tetap kecuali tanah dan bangunan dalam pengerjaan disusutkan sampai dengan nilai sisanya.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal aset diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana seharusnya, hanya apabila kemungkinan besar Perseroan akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai yang terkait dengan penggantian komponen tidak diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

1. Fixed assets, right-of-use assets and lease liabilities (continued)

Fixed assets (continued)

Acquisition cost covers all expenditures that are directly attributable to the acquisition of the items.

The legal cost of land rights in the form of Building Usage Right (Hak Guna Bangunan or "HGB") when the land was acquired initially is recognized as part of the cost of the land under the "Fixed Assets" account and not amortized.

Meanwhile, the extension or the legal renewal costs of land rights in the form of HGB is recognized as intangible asset and amortized over the shorter of the rights' legal life and land's economic life.

Land rights is not amortized.

Construction in progress is stated at cost and transferred to the respective fixed asset account when completed and ready for use.

Depreciation on fixed assets other than land and construction in progress are calculated using the straight-line method over their estimated useful lives as follows:

Fixed assets except land and construction in progress are depreciated to their residual value.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. Amounts in respect of replaced parts are derecognized. All other repairs and maintenance are charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income during the period in which they are incurred.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

I. Aset tetap, aset hak guna dan liabilitas sewa
(lanjutan)

Aset tetap (lanjutan)

Nilai residu dan umur manfaat aset ditelaah dan disesuaikan, setiap tanggal laporan posisi keuangan jika diperlukan.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi yang dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya.

Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur masa manfaatnya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

I. Fixed assets, right-of-use assets and lease liabilities (continued)

Fixed assets (continued)

The assets' residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at each date of statement of financial position.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements and the resulting gain or loss on the disposal of fixed assets is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount.

An assessment is made at each reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated.

A previously recognized impairment losses is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

Reversal of an impairment loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

I. Aset tetap, aset hak guna dan liabilitas sewa
(lanjutan)

Aset hak guna dan liabilitas sewa

PSAK No. 73 memperkenalkan model akuntansi penyewa tunggal dan mensyaratkan penyewa untuk mengakui aset dan liabilitas untuk semua sewa dengan pengecualian sewa jangka pendek dan aset dengan nilai rendah. Penyewa diharuskan untuk mengakui aset hak-guna yang mewakili haknya untuk menggunakan aset sewaan dan liabilitas sewa yang mewakili kewajibannya untuk melakukan pembayaran sewa. PSAK No. 73 secara substansial masih menggunakan persyaratan akuntansi atas pesewa (*lessor*) sesuai PSAK No. 30 Sewa. Oleh karena itu, pesewa masih akan menggunakan klasifikasi sewa dalam sewa operasi atau pembiayaan, dan memperlakukan transaksi sewa atas kedua tipe sewa tersebut secara berbeda.

Perseroan mengakui liabilitas sewa, sebagai pembayaran sewa yang tersisa termasuk atas opsi perpanjangan dimana perpanjangan hampir dapat dipastikan, didiskontokan menggunakan tingkat bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Aset hak-guna yang diakui adalah jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, yang disesuaikan dengan jumlah pembayaran sewa dibayar dimuka atau terutang terkait sewa tersebut.

Beban keuangan dicatat dalam laporan laba rugi. Aset sewa (disajikan sebagai bagian aset tetap) disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewa dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perseroan akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Pada saat penerapan adopsi PSAK No. 73, Perseroan menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua aset sewa kecuali sewa jangka pendek dan sewa aset yang bernilai rendah.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

I. Fixed assets, right-of-use assets and lease
liabilities (continued)

Right-of-use assets and lease liabilities

SFAS No. 73 introduces a single lessee accounting model and requires a lessee to recognize assets and liabilities for all leases with the exemptions of short-term leases and the underlying asset is of low value. A lessee is required to recognize a right-of-use asset representing its right to use the underlying leased asset and a lease liability representing its obligation to make lease payments. SFAS No. 73 substantially carries forward the lessor accounting requirements in SFAS No. 30 Leases. Accordingly, a lessor continues to classify its leases as operating leases or finance leases, and to account for those two types of leases differently.

The Company recognized a lease liability, being the remaining lease payments including extension options where renewal is reasonably certain, discounted using the incremental borrowing rate at the date of initial application. The corresponding right-of-use asset recognized was an amount equal to the lease liability, adjusted by the amount of prepaid or accrued lease payments relating to those leases.

Finance expense is recorded in the statement of income. Leased assets (presented under fixed assets) are depreciated using straight-line method over the shorter of the estimated useful life of the assets and the lease term, if there is no reasonable certainty that the Company will obtain ownership by the end of the lease term.

Upon adoption of SFAS No. 73, the Company applied a single recognition and measurement approach for all leases except for short-term leases and leases of low-value assets.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

m. Perpajakan

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan", pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46. Oleh karena itu, Perseroan memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan pendapatan bunga sebagai pos tersendiri.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Penghasilan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perseroan juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Penghasilan".

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode posisi keuangan atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

m. Taxation

Final Tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subject to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction are recognizing losses.

Referring to SFAS No. 46, "Income Tax", final tax is no longer governed by SFAS No. 46. Therefore, the Company has decided to present all of the final tax arising from interest income as separate line item.

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current year are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of "Income Tax Expense" in the statement of profit or loss and other comprehensive income. The Company also presented interest/penalty, if any, as part of "Income Tax Expense".

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.

Deferred tax assets and liabilities are recognized using the financial position method for the future tax consequences attributable to the differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

m. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Perseroan menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Perseroan mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

n. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca-kerja

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca-kerja, seperti pensiun, uang pisah, uang penghargaan, dan imbalan lainnya, ditentukan sesuai dengan Peraturan Perseroan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

Karena Undang-Undang Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti. Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

m. Taxation (continued)

Deferred Tax

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Company reassesses unrecognized deferred tax assets. The Company recognizes a previously unrecognized deferred tax assets to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current year operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the statement of financial position, except if they are for different legal entities, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.

n. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognized when it is payable to the employees based on accrual method.

Long-term employee benefits and post-employment benefits

Long-term employee benefits and post-employment employee benefits, such as pensions, severance pay, service pay, and other benefits are provided in accordance with the Company's Regulations and applicable Labor Law.

Since Labor Law sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Labor Law represent defined benefit plans. A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually as a function of one or more factors such as age, years of service or compensation.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

n. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan
pasca-kerja (lanjutan)

Liabilitas program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan, serta disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat obligasi pemerintah jangka panjang dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya, biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

Bunga neto atas imbalan pasti neto merupakan komponen pendapatan bunga dari aset program, biaya bunga atas liabilitas imbalan pasti dan bunga atas dampak batas atas dari aset.

Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto terdiri atas:

- keuntungan dan kerugian aktuarial
- imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto
- setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

n. Employee benefits (continued)

Long-term employee benefits and post-
employment benefits (continued)

The liability recognized in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the date of statement of financial position, together with adjustments for unrecognized actuarial gains or losses and past service cost. The present value of defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using yields on Indonesian Government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

All past service costs are recognized at the earlier of when the amendment/curtailment occurs and when the related restructuring or termination costs are recognized. As a result, unvested past service costs can no longer be deferred and recognized over the future vesting period.

Net interest on the net defined benefit liabilities is the interest income component of plan assets, interest expense of defined benefit obligation and interest on the effect of asset ceiling.

Remeasurements of the net defined benefit obligation consists of:

- *actuarial gains and losses*
- *return on plan assets, excluding amount included in net interest on the net defined benefit obligation*
- *any change in effect of the asset ceiling, excluding amount included in net interest on the net defined benefit obligation.*

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

n. Imbalan kerja (lanjutan)

Pesangon pemutusan hubungan kerja

Pesangon pemutusan hubungan kerja terutang ketika karyawan dihentikan kontrak kerjanya sebelum usia pensiun normal. Perseroan mengakui pesangon pemutusan hubungan kerja ketika Perseroan menunjukkan komitmennya untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawan berdasarkan suatu rencana formal terperinci yang kecil kemungkinannya untuk dibatalkan. Pesangon yang akan dibayarkan dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan didiskontokan untuk mencerminkan nilai kini.

o. Saham

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas.

p. Dividen

Pembagian dividen final diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan pada tanggal dividen tersebut disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

q. Laba per saham

Laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

r. Surat berharga yang diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan meliputi *Medium-Term Notes* dan utang obligasi. Surat berharga yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan surat berharga dikurangkan dari jumlah surat berharga yang diterbitkan dan diamortisasi selama jangka waktu surat berharga yang diterbitkan tersebut dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

n. Employee benefits (continued)

Termination benefits

Termination benefits are payable whenever an employee's employment is terminated before the normal retirement date. The Company recognizes termination benefits when it is demonstrably committed to terminate the employment of current employees according to a detailed formal plan and the possibility to withdraw the plan is low. Benefits falling due more than 12 months after statement of financial position date are discounted to reflect its present value.

o. Share capital

Ordinary shares are classified as equity.

p. Dividends

Final dividend distributions are recognized as a liability in the financial statements at the date when the dividends are approved in the Company's General Meeting of Shareholders.

q. Earnings per share

Earnings per share is calculated by dividing income for the year by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

r. Securities issued

Securities issued consist of Medium-Term Notes and bonds payable. Securities issued are classified as financial liabilities at amortized cost. Incremental costs directly attributable to the issuance of securities are deducted from the amount of securities issued and amortized over the period of the securities issued using the effective interest rate method. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial liabilities at amortized cost.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

s. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perseroan mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang dipakai adalah sebagai berikut:

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perseroan jika:

- a. orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan di catatan atas laporan keuangan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

s. Transactions with related parties

The Company has transactions with related parties. The definition of related parties used is as follows:

The Company considers the following as its related parties:

- a. a person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - (i) has control or joint control of the reporting entity;
 - (ii) has significant influence over the reporting entity; or
 - (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. an entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
 - (i) the entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - (ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - (iii) both entities are joint ventures of the same third party.
 - (iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - (v) the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
 - (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
 - (vii) a person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

All material transactions with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

t. Instrumen keuangan derivatif

Instrumen derivatif diakui pertama-tama pada nilai wajar pada saat kontrak tersebut dilakukan, dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya. Derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Metode pengakuan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar tergantung pada apakah derivatif tersebut adalah instrumen lindung nilai, dan sifat dari unsur yang dilindungi nilainya.

Perseroan menggunakan instrumen keuangan derivatif, pertukaran (*swap*) mata uang asing dan tingkat suku bunga, sebagai bagian dari aktivitas manajemen untuk melindungi dampak risiko mata uang asing dan tingkat suku bunga atas pinjaman Perseroan. Perseroan menerapkan akuntansi lindung nilai arus kas pada saat transaksi tersebut memenuhi kriteria perlakuan akuntansi lindung nilai.

Pada saat terjadinya transaksi, Perseroan membuat dokumentasi mengenai hubungan antara instrumen lindung nilai dan unsur yang dilindungi nilainya, juga tujuan manajemen risiko dan strategi yang diterapkan dalam melakukan transaksi lindung nilai. Proses dokumentasi ini menghubungkan derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai dengan aset dan liabilitas tertentu atau dengan komitmen penuh tertentu atau transaksi yang diperkirakan.

Pada saat terjadinya transaksi lindung nilai dan pada periode berikutnya, Perseroan juga membuat dokumentasi atas penilaian apakah derivatif yang digunakan sebagai transaksi lindung nilai memiliki efektivitas yang tinggi dalam menandingi (*offsetting*) perubahan nilai wajar atau arus kas dari unsur yang dilindungi nilainya.

Hubungan lindung nilai memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai jika memenuhi semua persyaratan efektivitas berikut:

- Ada 'hubungan ekonomik' antara item lindung nilai dan instrumen lindung nilai.
- Pengaruh risiko kredit tidak 'mendominasi perubahan nilai' yang dihasilkan dari hubungan ekonomik tersebut.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

t. Derivative financial instruments

Derivative instruments are initially recognized at fair value on the date the contracts are entered into and are subsequently re-measured at their fair values. Derivatives are carried as assets when the fair value is positive and as liabilities when the fair value is negative.

The method of recognizing the fair value gain or loss depends on whether the derivative is designated as a hedging instrument and, if so, the nature of the item being hedged.

The Company uses derivative instruments, cross currency and interest rate swaps as part of its management activities to manage risks of foreign currency and interest rate on the Company's bank loan. The Company applies cash flow hedge accounting when transactions meet the specified criteria for hedge accounting treatment.

The Company documents, at the inception of the transaction, the relationship between hedging instruments and hedged items, as well as its risk management objective and strategy for undertaking hedge transactions. This process includes linking all derivatives designated as hedges to specific assets and liabilities or to specific firm commitments or forecast transactions.

The Company also documents its assessment, both at the hedge inception and on an ongoing basis, as to whether the derivatives that are used in hedging transactions are highly effective in offsetting changes in fair values or cash flows of hedged items.

A hedging relationship qualifies for hedge accounting if it meets all of the following effectiveness requirements:

- *There is 'an economic relationship' between the hedged item and the hedging instrument.*
- *The effect of credit risk does not 'dominate the value changes' that result from that economic relationship.*

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

t. Instrumen keuangan derivatif (lanjutan)

Hubungan lindung nilai memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai jika memenuhi semua persyaratan efektivitas berikut: (lanjutan)

- Rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai adalah rasio yang sama yang dihasilkan dari kuantitas item lindung nilai yang aktual digunakan oleh Perseroan melindungi nilai sejumlah kuantitas instrumen lindung nilai yang secara aktual digunakan oleh Perseroan untuk melindungi sejumlah kuantitas item lindung nilai.

Bagian yang efektif atas perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas, diakui sebagai "penghasilan komprehensif lain" pada bagian ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas bagian yang tidak efektif diakui langsung sebagai laba atau rugi. Jumlah akumulasi keuntungan atau kerugian dalam ekuitas dibebankan sebagai laba atau rugi komprehensif ketika unsur yang dilindungi nilainya mempengaruhi laba neto.

Ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual, dihentikan, dilaksanakan, atau tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang ditangguhkan di ekuitas tetap diakui pada "penghasilan komprehensif lain" dan direklasifikasi ke laba rugi ketika *item* yang dilindungi nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

u. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, komisi asuransi dan biaya jasa perantara asuransi serta beban bunga untuk semua instrumen keuangan dengan *interest bearing* diakui sesuai dengan jangka waktu kontrak berdasarkan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

t. Derivative financial instruments
(continued)

A hedging relationship qualifies for hedge accounting if it meets all of the following effectiveness requirements: (continued)

- *The hedge ratio of the hedging relationship is the same as that resulting from the quantity of the hedged item that the Company actually hedges and the quantity of the hedging instrument that the Company actually uses to hedge that quantity of hedged item.*

The effective portion of changes in the fair value of derivatives that are designated and qualified as cash flow hedges are recognized in "other comprehensive income" and reported to equity. The gain or loss relating to the ineffective portion is recognized immediately in profit or loss. Amounts accumulated in equity are recycled to profit or loss in the periods in which the hedged item will affect net profit.

When the hedging instrument expires or is sold, terminated, exercised or no longer qualifies for hedge accounting, the cumulative amount deferred in equity remains in the "other comprehensive income" and is subsequently transferred to profit or loss when the hedged item is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

u. Income and expense recognition

Income from consumer financing and finance lease, insurance commission and insurance brokerage fee and expense for all interest bearing financial instruments are recognized over the term of the respective contracts using the effective interest rate method.

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

u. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perseroan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup biaya transaksi dan pendapatan administrasi.

Pendapatan bunga bank dan denda keterlambatan pembayaran diakui pada saat terjadinya. Pendapatan bunga bank disajikan secara bruto pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pendapatan dan beban lain diakui pada saat terjadinya, menggunakan dasar akrual.

v. Segmen Operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- i. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- ii. yang hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan,
- iii. yang tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Perseroan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang disiapkan secara internal untuk pengambil keputusan operasional. Pengambil keputusan operasional Perseroan adalah Direksi.

Segmen operasi Perseroan disajikan berdasarkan segmen usaha yang terdiri dari Fleet dan ritel (lihat Catatan 30).

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

u. Income and expense recognition
(continued)

When calculating the effective interest rate, the Company estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instruments but does not consider future credit losses. These calculations include transaction costs and administration income.

The bank's interest income and late payment penalties are recognized upon receipt. Interest income is presented on a gross basis in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Other Income and expense are recognized as incurred on an accrual basis.

v. Operating Segment

An operating segment is a component of an entity:

- i. that engages with business activities to generate income and expenses (including income and expenses relating to the transactions with other components with the same entity);*
- ii. whose operating results are observed regularly by the chief decision maker to make decisions regarding the allocation of resources and to evaluate the works; and,*
- iii. for which separate financial information is available.*

The Company presents operating segments based on the information that is internally provided to the chief operating decision maker. The Company's chief operating decision makers are the Directors.

The Company discloses the operating segment and presents based on business segment which consists of Fleet and Retail (refer to Note 30).

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

w. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

Perseroan telah menerapkan standar akuntansi berikut pada tanggal 1 Januari 2023 yang dianggap relevan:

- Amandemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Amandemen ini memberikan panduan dan contoh untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas dengan persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

- Amandemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan

Amandemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan item yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan item-item tersebut, dan biaya untuk memproduksi item-item tersebut, dalam laba rugi.

- Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi

Amandemen tersebut memperkenalkan definisi 'estimasi akuntansi' dan mengklarifikasi perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amandemen tersebut juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

w. Changes in accounting policies and disclosures

The Company adopted the following accounting standards, which are considered relevant, starting on 1 January 2023:

- Amendment of PSAK 1: Presentation of financial statements - Disclosure of accounting policies

This amendments provides guidance and examples to help entities apply materiality judgements to accounting policy disclosures. The amendment aims to help entities provide accounting policy disclosures that are more useful by replacing the requirement for entities to disclose their 'significant' accounting policies with a requirement to disclose their 'material' accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in making decisions about accounting policy disclosures.

- Amendments to PSAK 16: Fixed Assets - Proceeds before Intended Use.

The amendments prohibit entities to deduct from the cost of an item of fixed assets, any proceeds from selling items produced while bringing that asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Instead, an entity recognizes the proceeds from selling such items, and the costs of producing those items, in the profit or loss.

- Amendment of PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors – Definition of Accounting Estimates

The amendments introduce a definition of 'accounting estimates' and clarify the distinction between changes in accounting estimates and changes in accounting policies and the correction of errors. Also, they clarify how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

w. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal

Amendemen ini mengusulkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awalnya sebagai contoh dari transaksi sewa, untuk mengeliminasi perbedaan praktik saat ini atas transaksi tersebut dan transaksi lain yang serupa.

Perseroan telah menganalisa penerapan standar akuntansi di atas dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan Perseroan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perseroan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti yang diungkapkan pada Catatan 2c.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

w. Changes in accounting policies and disclosures (continued)

- Amendment of PSAK 46: Income Taxes – Deferred Tax relating to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction

This amendment proposes that entities recognize deferred tax assets and liabilities at the time of initial recognition, for example from a lease transaction, to eliminate differences in current practice for such transactions and similar transactions.

The Company has assessed that the adoption of the above mentioned accounting standards does not have significant impact to the financial statements.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgements

The following judgements are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Classification of financial assets and financial liabilities

Financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the accounting policies as disclosed in Note 2c.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Perseroan telah melakukan penilaian atas kemampuan Perseroan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perseroan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Estimasi dan Asumsi

a. Cadangan kerugian penurunan nilai

PSAK 71 mensyaratkan penyertaan informasi tentang kejadian masa lalu, kondisi saat ini dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Perkiraan perubahan dalam kerugian kredit yang diharapkan harus mencerminkan, dan secara langsung konsisten dengan, perubahan dalam data terkait yang diobservasi dari periode ke periode. Perhitungan kerugian kredit ekspektasian secara kolektif atas aset keuangan membutuhkan estimasi *forward looking* dari *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD) dan *Exposure at Default* (EAD) (lihat Catatan 2c).

b. Imbalan kerja

Perhitungan aktuarial menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan kerja (lihat Catatan 2n).

c. Penyusutan dan estimasi umur manfaat aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap seperti diungkapkan pada Catatan 2l. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perseroan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgements (continued)

Going Concern

The Company's management has made an assessment of the Company's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Company has the resources to continue its business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Company's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis.

Estimates and Assumptions

a. Allowance for impairment losses

SFAS 71 requires inclusion of information about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions. The estimates of changes in expected credit losses should reflect, and be directionally consistent with, changes in related observable data from period to period. The calculation of collective expected credit losses of financial assets requires estimation of forward looking *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD) and *Exposure at Default* (EAD) (refer to Note 2c).

b. Post-employment benefits

The actuarial valuation involves making assumptions about discount rate, expected rate of return, on investments, future salary increases, mortality rate, resignation rate and others. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefits obligations (refer to Note 2n).

c. Depreciation and estimated useful lives of fixed assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these fixed assets as disclosed in Note 2l. These are common life expectancies applied in the industries where the Company conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

d. Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perseroan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

e. Pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan.

Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan (Catatan 2m).

f. Nilai wajar instrumen keuangan

Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas yang tidak mempunyai harga pasar, Perseroan menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2c. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajar menjadi kurang objektif dan membutuhkan berbagai tingkat penilaian tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya.

Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, manajemen mempertimbangkan masukan dan asumsi diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup *feedback* model atas likuiditas volatilitas untuk transaksi derivatif dan tingkat diskonto yang berjangka waktu panjang, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

d. Income tax

Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transaction and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

e. Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference.

Management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing or level of future taxable profits together with future strategic planning (Note 2m).

f. Fair values of financial instruments

In determining the fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Company uses the valuation techniques as described in Note 2c. For financial instruments that are traded infrequently and a lack of price transparency, fair value is less objective and requires varying degrees of judgement depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

The input for this model comes from observable market data. When observable market data is not available, management considers necessary inputs and assumptions to determine the fair value. The above considerations include liquidity and volatility feedback model for derivative transactions and long term discount rate, the level of early payment and the level of default assumption.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

g. Penetapan masa sewa untuk kontrak sewa dengan opsi pembaruan dan penghentian (Perseroan sebagai penyewa)

Perseroan menentukan masa sewa sebagai periode sewa yang tidak dapat dibatalkan, serta periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa, jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, dan periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika penyewa cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut.

Perseroan memiliki beberapa kontrak sewa dengan opsi perpanjangan dan opsi penghentian. Perseroan menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi pembaruan atau penghentian sewa tersebut. Perseroan mempertimbangkan semua faktor-faktor relevan yang menciptakan insentif ekonomi jika Perseroan mengeksekusi opsi pembaruan atau penghentian tersebut. Setelah dimulainya masa sewa, Perseroan menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan pada lingkungan dalam kendalinya yang mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mengeksekusi atau tidak mengeksekusi opsi pembaruan atau penghentian sewa (misalnya, konstruksi dari pengembangan prasarana yang signifikan atau penyesuaian signifikan dari aset sewa).

4. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Kas	18.194	13.602	Cash on hand
Kas pada bank			Cash in banks
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk	1.138	1.023	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk	56	16	PT Bank Permata Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	31	31	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	22	20	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT China Construction Bank Indonesia Tbk	19	10	PT China Construction Bank Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	18	14.270	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank CTBC Indonesia	18	18	PT Bank CTBC Indonesia
PT Bank DKI	18	17	PT Bank DKI
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	18	15	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk
PT Bank BTPN Tbk	17	21	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank UOB Indonesia	17	16	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk	16	17	PT Bank CIMB Niaga Tbk

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

g. Determination of the lease term for lease contracts with renewal and termination options (The Company as a lessee)

The Company determines the lease term as the noncancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

The Company has several lease contracts that include extension and termination options. The Company applies judgement in evaluating whether it is reasonably certain whether or not to exercise the option to renew or terminate the lease. That is, it considers all relevant factors that create an economic incentive for it to exercise either the renewal or termination. After the commencement date, the Company reassesses the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control that affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate (e.g., construction of significant leasehold improvements or significant customisation of the leased asset).

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	<u>31 Desember/ December 2023</u>	<u>31 Desember/ December 2022</u>	
Kas pada bank (lanjutan)			Cash in banks (continued)
Pihak ketiga (lanjutan)			Third parties (continued)
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			<u>Rupiah (continued)</u>
PT Bank KEB Hana Indonesia	16	16	PT Bank KEB Hana Indonesia
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta	15	15	MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch
PT Bank Oke Indonesia Tbk	15	8	PT Bank Oke Indonesia Tbk
PT Bank QNB Indonesia Tbk	14	15	PT Bank QNB Indonesia Tbk
PT Bank Mizuho Indonesia	14	11	PT Bank Mizuho Indonesia
PT Bank HSBC Indonesia	11	3	PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank ANZ Indonesia	10	11	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	5	-	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank of India Indonesia Tbk	5	-	PT Bank of India Indonesia Tbk
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	2	-	PT Bank Maspion Indonesia Tbk
	<u>1.495</u>	<u>15.553</u>	
Pihak berelasi			Related parties
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	781.632	761.003	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	798	264	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	15	7	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri Taspen	6	7	PT Bank Mandiri Taspen
	<u>782.451</u>	<u>761.281</u>	
Deposito berjangka			Time deposits
Pihak Berelasi			Related Parties
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank Mandiri Taspen	50.000	50.000	PT Bank Mandiri Taspen
	<u>852.140</u>	<u>840.436</u>	

Jangka waktu deposito berjangka yang dimiliki oleh Perseroan adalah satu bulan.

The period of time deposits held by the Company is one month.

Tingkat suku bunga deposito berjangka dan giro dalam mata uang Rupiah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, berkisar sebagai berikut:

The interest rates for time deposits and current accounts for the year ended 31 December 2023 and 2022, are as follows:

	<u>31 Desember/ December 2023</u>	<u>31 Desember/ December 2022</u>	
Deposito	5,50%	4,75% - 5,25%	Time deposits
Giro	0,00% - 3,00%	0,00% - 3,00%	Current accounts

Penempatan deposito pada PT Bank Mandiri Taspen sebesar Rp50.000 adalah penempatan atas dana hasil usaha yang berasal dari laba neto Perseroan seperti yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang No. 40 pasal 70 tentang "Perseroan Terbatas" yaitu kewajiban Perseroan untuk melakukan pencadangan hingga mencapai paling sedikit 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Placement of time deposit at PT Bank Mandiri Taspen amounting to Rp50,000 represents the placement of the funds derived from the Company's net income as required by Law No. 40 article 70 concerning "Limited Liability Companies" whereby the Company shall make a reserve up to a least 20% of the issued and fully paid up capital.

Lihat Catatan 26a untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 26a for details of balances and transaction with related parties.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Piutang pembiayaan konsumen - bruto	56.405.366	46.507.804	Consumer financing receivables - gross
Dikurangi:			Less:
Pembiayaan bersama - bruto:			Joint financing - gross:
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Pihak berelasi	(28.507.211)	(25.720.307)	Related parties
Piutang pembiayaan konsumen - bruto:			Consumer financing receivables - gross:
Pembiayaan sendiri	27.898.155	20.787.497	Direct financing
Dikurangi:			Less:
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui			Unearned income on consumer financing
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Pihak ketiga	(8.824.691)	(7.307.297)	Third parties
Dikurangi:			Less:
Pendapatan yang belum diakui dari pembiayaan bersama – bruto :			Unearned joint financing - gross:
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Pihak berelasi	3.636.253	3.194.215	Related parties
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui:			Unearned income on consumer financing:
Pembiayaan sendiri	(5.188.438)	(4.113.082)	Direct financing
Piutang pembiayaan konsumen	22.709.717	16.674.415	Consumer finance receivables
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(347.894)	(333.578)	Allowance for impairment losses
Neto	22.361.823	16.340.837	Net

Perubahan nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen dengan klasifikasi diamortisasi berdasarkan *stage* untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

The changes in the carrying value of consumer financing receivables classified as amortized by *stage* for the year ended 31 December 2023 and 2022, are as follows:

	31 Desember/December 2023				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total	
Biaya perolehan diamortisasi					Amortized cost
Saldo awal	16.281.263	258.696	134.456	16.674.415	Beginning balance
Pengalihan ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (<i>stage 1</i>)	193.259	(179.414)	(13.845)	-	Transfer to the 12-month expected credit loss (<i>stage 1</i>)
Pengalihan ke piutang yang tidak mengalami penurunan nilai (<i>stage 2</i>)	(1.020.750)	1.042.845	(22.095)	-	Transfer to receivables which are not impaired (<i>stage 2</i>)
Pengalihan ke piutang yang mengalami penurunan nilai (<i>stage 3</i>)	(205.779)	(404.511)	610.290	-	Transfer to receivables which are impaired (<i>stage 3</i>)
Total saldo awal setelah pengalihan	15.247.993	717.616	708.806	16.674.415	Total beginning balance after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	(2.333.566)	(34.702)	(22.403)	(2.390.671)	Net remeasurement of carrying value
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	11.186.822	56.859	651.388	11.895.069	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihapusbuku	(1.910.577)	(324.915)	(550.307)	(2.785.799)	Derecognized financial assets
Aset keuangan yang dihapusbuku	(12.052)	(61.217)	(610.028)	(683.297)	Financial assets written-off
Total penambahan (penurunan) tahun berjalan	6.930.627	(363.975)	(531.350)	6.035.302	Total addition (deduction) during the year
Saldo akhir	22.178.620	353.641	177.456	22.709.717	Ending balance

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

Perubahan nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen dengan klasifikasi diamortisasi berdasarkan *stage* untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut: (lanjutan)

5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES (continued)

The changes in the carrying value of consumer financing receivables classified as amortized by *stage* for the year ended 31 December 2023 and 2022, are as follows: (continued)

	31 Desember/December 2022				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total	
Biaya perolehan diamortisasi					Amortized cost
Saldo awal	12.717.367	319.996	179.191	13.216.554	Beginning balance
Pengalihan ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (<i>stage</i> 1)	250.858	(233.101)	(17.757)	-	Transfer to the 12-month expected credit loss (<i>stage</i> 1)
Pengalihan ke piutang yang tidak mengalami penurunan nilai (<i>stage</i> 2)	(764.633)	794.619	(29.986)	-	Transfer to receivables which are not impaired (<i>stage</i> 2)
Pengalihan ke piutang yang mengalami penurunan nilai (<i>stage</i> 3)	(153.565)	(360.132)	513.697	-	Transfer to receivables which are impaired (<i>stage</i> 3)
Total saldo awal setelah pengalihan	12.050.027	521.382	645.145	13.216.554	Total beginning balance after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	(2.861.586)	(57.680)	(23.567)	(2.942.833)	Net remeasurement of carrying value
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	8.578.771	22.742	714	8.602.227	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihapusbuku	(1.481.667)	(203.198)	(35.639)	(1.720.504)	Derecognized financial assets
Aset keuangan yang dihapusbuku	(4.282)	(24.550)	(452.197)	(481.029)	Financial assets written-off
Total penambahan (penurunan) tahun berjalan	4.231.236	(262.686)	(510.689)	3.457.861	Total addition (deduction) during the year
Saldo akhir	16.281.263	258.696	134.456	16.674.415	Ending balance

Seluruh kontrak pembiayaan yang disalurkan Perseroan adalah untuk kendaraan bermotor, multiguna, investasi, dan modal kerja.

All consumer financing contracts provided by Company are for motor vehicles, multipurpose, investment, and working capital.

Jangka waktu kontrak pembiayaan yang disalurkan oleh Perseroan atas kendaraan bermotor berkisar antara 12 - 96 bulan.

The period of consumer financing contracts for motor vehicles ranged between 12 - 96 months.

Angsuran dari saldo piutang pembiayaan konsumen - bruto per 31 Desember 2023 dan 2022 yang akan diterima dari konsumen berdasarkan tanggal jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Installments of consumer financing receivables - gross balance as of 31 December 2023 and 2022 which will be received from customers based on the maturity dates, are as follows:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
<u>Telah jatuh tempo</u>			<u>Overdue</u>
1 - 30 hari	1.200.143	979.753	1 - 30 days
31 - 60 hari	453.017	376.302	31 - 60 days
61 - 90 hari	376.890	270.030	61 - 90 days
> 90 hari	486.886	347.001	> 90 days
<u>Belum jatuh tempo</u>			<u>Not yet due</u>
2023	-	16.590.471	2023
2024	19.103.105	13.752.419	2024
2025	16.392.797	8.636.469	2025
2026	10.731.796	4.222.184	2026
2027 dan seterusnya	7.660.732	1.333.175	2027 and on forward
	56.405.366	46.507.804	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

Rata-rata suku bunga efektif yang dikenakan kepada konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 2023</u>	<u>31 Desember/ December 2022</u>	
Mobil	10,96%	12,91%	Car
Sepeda Motor	12,59%	13,93%	Motorcycle
Multiguna	18,03%	16,89%	Multipurpose
Modal Kerja	9,50%	9,67%	Working Capital

Analisa umur piutang pembiayaan konsumen - bruto adalah sebagai berikut:

Average effective interest rates charged to customers for the years ended 31 December 2023 and 2022, are as follows:

	<u>31 Desember/ December 2023</u>	<u>31 Desember/ December 2022</u>	
Belum jatuh tempo	53.888.430	44.534.718	Current
Lewat jatuh tempo:			Overdue:
1 - 90 hari	2.030.050	1.626.085	1 - 90 days
91 - 120 hari	227.964	158.343	91 - 120 days
121 - 180 hari	250.250	167.501	121 - 180 days
> 180 hari	8.672	21.157	> 180 days
	<u>56.405.366</u>	<u>46.507.804</u>	

The aging analysis of consumer financing receivables - gross, is as follows:

Piutang pembiayaan konsumen - bruto berdasarkan kolektabilitas sesuai peraturan OJK:

Consumer financing receivables - gross based on collectability in accordance with OJK regulations:

	<u>31 Desember/ December 2023</u>	<u>31 Desember/ December 2022</u>	
Lancar	53.906.649	44.615.253	Current
Dalam perhatian khusus	2.011.831	1.545.550	Special mention
Kurang lancar	227.964	158.343	Substandard
Diragukan	250.250	167.501	Doubtful
Macet	8.672	21.157	Loss
	<u>56.405.366</u>	<u>46.507.804</u>	

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses for years ended 31 December 2023 and 2022, are as follows:

	<u>31 Desember/ December 2023</u>	<u>31 Desember/ December 2022</u>	
Saldo awal	333.578	327.003	Beginning balance
Penyisihan untuk tahun berjalan	697.613	487.604	Provision for the year
Penghapusan piutang	(683.297)	(481.029)	Receivables written-off
Saldo akhir	<u>347.894</u>	<u>333.578</u>	Ending balance

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES (continued)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The movements in the allowance for impairment losses for years ended 31 December 2023 and 2022, are as follows: (continued)

		31 Desember/December 2023				
		Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total	
Saldo awal		223.868	62.559	47.151	333.578	Beginning balance
Pengalihan ke:						Transfer to:
Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (stage 1)	17.644	(15.153)	(2.491)	-	-	The 12-month expected credit loss (stage 1)
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	(25.402)	29.207	(3.805)	-	-	Lifetime expected credit losses - not credit-impairment (stage 2)
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - mengalami penurunan nilai (stage 3)	(7.426)	(41.206)	48.632	-	-	Lifetime expected credit losses - credit-impairment (stage 3)
Total saldo awal setelah pengalihan	208.684	35.407	89.487	333.578	333.578	Total beginning balance after transfer
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(30.185)	154.578	759.144	883.537	883.537	Net remeasurement of loss allowance
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	85.648	17.913	4.384	107.945	107.945	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(28.998)	(78.637)	(186.234)	(293.869)	(293.869)	Derecognized financial assets
Total pembentukan tahun berjalan	26.465	93.854	577.294	697.613	697.613	Total build-up during the year
Aset keuangan yang dihapusbuku	(12.052)	(61.217)	(610.028)	(683.297)	(683.297)	Financial assets written-off
Saldo akhir	223.097	68.044	56.753	347.894	347.894	Ending balance
		31 Desember/December 2022				
		Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total	
Saldo awal		228.154	45.516	53.333	327.003	Beginning balance
Pengalihan ke:						Transfer to:
Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (stage 1)	15.784	(13.796)	(1.988)	-	-	The 12-month expected credit loss (stage 1)
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	(15.495)	19.256	(3.761)	-	-	Lifetime expected credit losses - not credit-impairment (stage 2)
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - mengalami penurunan nilai (stage 3)	(4.569)	(29.109)	33.678	-	-	Lifetime expected credit losses - credit-impairment (stage 3)
Total saldo awal setelah pengalihan	223.874	21.867	81.262	327.003	327.003	Total beginning balance after transfer
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(78.806)	97.783	556.762	575.739	575.739	Net remeasurement of loss allowance
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	99.446	10.233	426	110.105	110.105	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(16.364)	(42.774)	(139.102)	(198.240)	(198.240)	Derecognized financial assets
Total pembentukan tahun berjalan	4.276	65.242	418.086	487.604	487.604	Total build-up during the year
Aset keuangan yang dihapusbuku	(4.282)	(24.550)	(452.197)	(481.029)	(481.029)	Financial assets written-off
Saldo akhir	223.868	62.559	47.151	333.578	333.578	Ending balance

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

Seluruh piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dievaluasi secara kolektif terhadap penurunan nilai.

Jumlah minimum cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan untuk piutang pembiayaan konsumen sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp317.568 dan Rp240.278 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Piutang pembiayaan konsumen yang direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 0,27% dari saldo piutang pembiayaan konsumen - bruto (31 Desember 2022: 0,22%).

Pada tanggal 31 Desember 2023, piutang pembiayaan konsumen yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima oleh Perseroan dan utang obligasi seperti yang masing-masing dijelaskan pada Catatan 15 dan 17 adalah sejumlah Rp12.473.360 (31 Desember 2022: Rp9.414.454).

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang pembiayaan konsumen.

**5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES
(continued)**

All consumer financing receivables as of 31 December 2023 and 2022 are collectively evaluated for impairment.

The minimum allowance for consumer financing receivables based on OJK Regulation No. 35/POJK.05/2018 dated 27 December 2018 amounted to Rp317,568 and Rp240,278 as of 31 December 2023 and 2022, respectively.

The percentage of restructured consumer financing receivables as of 31 December 2023 is 0.27% of the consumer financing receivables balance - gross (31 December 2022: 0.22%).

As of 31 December 2023, total consumer financing receivables pledged as collateral for borrowings and bonds payable as disclosed respectively in Notes 15 and 17 amounted to Rp12,473,360 (31 December 2022: Rp9,414,454).

Management believes that the allowance for impairment losses is sufficient to cover any possible losses from uncollectible consumer financing receivables.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022
Piutang sewa pembiayaan		
Piutang sewa pembiayaan - bruto	6.265.251	6.657.743
Dikurangi:		
Pembiayaan bersama - bruto:		
<u>Rupiah</u>		
Pihak berelasi	(28.620)	(102.811)
Nilai sisa yang terjamin	2.672.995	2.551.829
Piutang sewa pembiayaan - bruto:	8.909.626	9.106.761
Pembiayaan sendiri		
Dikurangi:		
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui:		
<u>Rupiah</u>		
Pihak ketiga	(820.377)	(777.977)
Simpanan jaminan	(2.672.995)	(2.551.829)
Dikurangi:		
Pendapatan yang belum diakui dari pembiayaan bersama – bruto :		
<u>Rupiah</u>		
Pihak berelasi	611	5.070
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui:		
Pembiayaan sendiri	(3.492.761)	(3.324.736)
Piutang sewa pembiayaan	5.416.865	5.782.025
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(69.293)	(138.679)
Neto	5.347.572	5.643.346

6. FINANCE LEASE RECEIVABLES

Finance lease receivables
Finance lease receivables - gross
Less:
Joint financing - gross:
<u>Rupiah</u>
Related parties
Guaranteed residual value
Finance lease receivables - gross:
Direct financing
Less:
Unearned income on finance lease receivables:
<u>Rupiah</u>
Third parties
Security deposit
Less:
Unearned joint financing - gross:
<u>Rupiah</u>
Related parties
Unearned lease income financing:
Direct financing
Finance lease receivables
Less:
Allowance for impairment losses
Net

Perubahan nilai tercatat piutang sewa pembiayaan dengan klasifikasi diamortisasi berdasarkan *stage* untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

The changes in the carrying value of finance lease receivables classified as amortized by stage for the year ended 31 December 2023 and 2022, are as follows:

	31 Desember/December 2023				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total	
Biaya perolehan diamortisasi					Amortized cost
Saldo awal	5.658.311	96.925	26.789	5.782.025	Beginning balance
Pengalihan ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (<i>stage 1</i>)	31.076	(29.625)	(1.451)	-	Transfer to the 12-month expected credit loss (<i>stage 1</i>)
Pengalihan ke piutang yang tidak mengalami penurunan nilai (<i>stage 2</i>)	(245.387)	248.808	(3.421)	-	Transfer to receivables which are not impaired (<i>stage 2</i>)
Pengalihan ke piutang yang mengalami penurunan nilai (<i>stage 3</i>)	(14.323)	(46.353)	60.676	-	Transfer to receivables which are impaired (<i>stage 3</i>)
Total saldo awal setelah pengalihan	5.429.677	269.755	82.593	5.782.025	Total beginning balance after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	(1.849.789)	(72.900)	(802)	(1.923.491)	Net remeasurement of carrying value New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(747.618)	(130.776)	(66.182)	(944.576)	Derecognized financial assets
Aset keuangan yang dihapusbuku	(69)	(1.252)	(75.115)	(76.436)	Financial assets written-off
Total penurunan tahun berjalan	(137.576)	(164.072)	(63.512)	(365.160)	Total deduction during the year
Saldo akhir	5.292.101	105.683	19.081	5.416.865	Ending balance

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

6. FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)

	31 Desember/December 2022				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total	
Biaya perolehan diamortisasi					Amortized cost
Saldo awal	4.649.557	111.218	24.070	4.784.845	Beginning balance
Pengalihan ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (stage 1)	65.550	(62.877)	(2.673)	-	Transfer to the 12-month expected credit loss (stage 1)
Pengalihan ke piutang yang tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	(200.947)	207.924	(6.977)	-	Transfer to receivables which are not impaired (stage 2)
Pengalihan ke piutang yang mengalami penurunan nilai (stage 3)	(9.077)	(61.745)	70.822	-	Transfer to receivables which are impaired (stage 3)
Total saldo awal setelah pengalihan	4.505.083	194.520	85.242	4.784.845	Total beginning balance after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	(1.068.792)	(22.745)	(1.621)	(1.093.158)	Net remeasurement of carrying value New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(675.233)	(99.820)	(22.344)	(797.397)	Derecognized financial assets
Aset keuangan yang dihapuskan	(69)	(101)	(40.496)	(40.666)	Financial assets written-off
Total penambahan (penurunan) tahun berjalan	1.153.228	(97.595)	(58.453)	997.180	Total addition (deduction) during the year
Saldo akhir	5.658.311	96.925	26.789	5.782.025	Ending balance

Jangka waktu kontrak pembiayaan yang disalurkan oleh Perseroan atas kendaraan bermotor dan alat berat berkisar antara 12 - 66 bulan.

The period of consumer financing contracts for motor vehicles and heavy equipment ranged between 12 - 66 months.

Piutang sewa pembiayaan - bruto sesuai dengan tanggal jatuh temponya sebagai berikut:

Finance lease receivables - gross based on maturity date, are as follows:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
<u>Telah jatuh tempo</u>			<u>Overdue</u>
1 - 30 hari	121.427	82.260	1 - 30 days
31 - 60 hari	49.498	26.020	31 - 60 days
61 - 90 hari	73.545	81.639	61 - 90 days
> 90 hari	22.073	29.803	> 90 days
<u>Belum jatuh tempo</u>			<u>Not yet due</u>
2023	-	3.256.233	2023
2024	3.152.308	2.282.796	2024
2025	1.887.193	805.659	2025
2026	780.060	85.755	2026
2027 dan seterusnya	179.147	7.578	2027 and on forward
	6.265.251	6.657.743	

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses for years ended 31 December 2023 and 2022, are as follows:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Saldo awal	138.679	129.789	Beginning balance
Penyisihan untuk tahun berjalan	7.050	49.556	Provision for the year
Penghapusan piutang	(76.436)	(40.666)	Receivables written-off
Saldo akhir	69.293	138.679	Ending balance

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

6. FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)

The movements in the allowance for impairment losses for years ended 31 December 2023 and 2022, are as follows:

		31 Desember/December 2023				
		Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total	
Saldo awal		93.751	35.189	9.739	138.679	Beginning balance
Pengalihan ke:						Transfer to:
Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (stage 1)	2.584	(2.447)	(137)	-	-	The 12-month expected credit loss (stage 1)
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	(4.088)	4.820	(732)	-	-	Lifetime expected credit losses - not credit-impaired (stage 2)
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - mengalami penurunan nilai (stage 3)	(375)	(4.549)	4.924	-	-	Lifetime expected credit losses - credit-impaired (stage 3)
Total saldo awal setelah pengalihan	91.872	33.013	13.794	138.679	138.679	Total beginning balance after transfer
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(36.288)	2.692	86.479	52.883	52.883	Net remeasurement of loss allowance
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	6.904	14.892	1.526	23.322	23.322	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(17.232)	(30.462)	(21.461)	(69.155)	(69.155)	Derecognized financial assets
Total pembentukan tahun berjalan	(46.616)	(12.878)	66.544	7.050	7.050	Total build-up during the year
Aset keuangan yang dihapusbuku	(69)	(1.252)	(75.115)	(76.436)	(76.436)	Financial assets written-off
Saldo akhir	45.187	18.883	5.223	69.293	69.293	Ending balance
		31 Desember/December 2022				
		Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total	
Saldo awal		103.914	19.059	6.816	129.789	Beginning balance
Pengalihan ke:						Transfer to:
Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (stage 1)	3.164	(2.910)	(254)	-	-	The 12-month expected credit loss (stage 1)
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	(2.399)	3.546	(1.147)	-	-	Lifetime expected credit losses - not credit-impaired (stage 2)
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - mengalami penurunan nilai (stage 3)	(67)	(4.579)	4.646	-	-	Lifetime expected credit losses - credit-impaired (stage 3)
Total saldo awal setelah pengalihan	104.612	15.116	10.061	129.789	129.789	Total beginning balance after transfer
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(20.832)	29.184	58.555	66.907	66.907	Net remeasurement of loss allowance
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	27.131	9.546	-	36.677	36.677	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(17.091)	(18.556)	(18.381)	(54.028)	(54.028)	Derecognized financial assets
Total pembentukan tahun berjalan	(10.792)	20.174	40.174	49.556	49.556	Total build-up during the year
Aset keuangan yang dihapusbuku	(69)	(101)	(40.496)	(40.666)	(40.666)	Financial assets written-off
Saldo akhir	93.751	35.189	9.739	138.679	138.679	Ending balance

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Seluruh piutang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dievaluasi secara kolektif terhadap penurunan nilai.

Jumlah minimum cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan untuk piutang sewa pembiayaan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp69.742 dan Rp74.543 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Piutang sewa pembiayaan yang direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 7,16% dari saldo piutang sewa pembiayaan - bruto (31 Desember 2022: 2,83%).

Rata-rata suku bunga efektif yang dikenakan kepada konsumen piutang sewa pembiayaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 2023</u>	<u>31 Desember/ December 2022</u>
Mobil	13,26%	10,28%
Alat berat	11,53%	11,85%
Mesin	11,89%	12,39%

Analisa umur piutang sewa pembiayaan - bruto adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 2023</u>	<u>31 Desember/ December 2022</u>
Belum jatuh tempo	5.998.708	6.438.020
Lewat jatuh tempo:		
1 - 90 hari	244.470	189.920
91 - 120 hari	6.605	9.150
121 - 180 hari	15.468	20.653
	<u>6.265.251</u>	<u>6.657.743</u>

Piutang sewa pembiayaan - bruto berdasarkan kolektabilitas sesuai peraturan OJK:

	<u>31 Desember/ December 2023</u>	<u>31 Desember/ December 2022</u>
Lancar	6.003.045	6.446.268
Dalam perhatian khusus	240.133	181.672
Kurang lancar	6.605	9.150
Diragukan	15.468	20.653
	<u>6.265.251</u>	<u>6.657.743</u>

6. FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)

All finance lease receivables as of 31 December 2023 and 2022 are collectively evaluated for impairment.

The minimum allowance for finance lease receivables based on OJK Regulation No. 35/POJK.05/2018 dated 27 December 2018 amounted Rp69,742 and Rp74,543 as of 31 December 2023 and 2022, respectively.

The percentage of restructured finance lease receivables as of 31 December 2023 is 7.16% of the finance lease receivables balance - gross (31 December 2022: 2.83%).

Average effective interest rates charged to customers for years ended 31 December 2023 and 2022, are as follows:

Car
Heavy equipment
Machine

The aging analysis of finance lease receivables - gross, are as follows:

Current
Overdue:
 1 - 90 days
 91 - 120 days
 121 - 180 days

Finance lease receivables - gross based on collectability in accordance with OJK regulations:

Current
Special mention
Substandard
Doubtful

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023, piutang sewa pembiayaan yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima oleh Perseroan dan utang obligasi seperti yang dijelaskan masing-masing pada Catatan 15 dan 17 adalah sejumlah Rp1.637.939 (31 Desember 2022: Rp2.063.963).

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang sewa pembiayaan.

7. ANJAK PIUTANG

Perseroan mengadakan perjanjian anjak piutang dengan jaminan. Anjak piutang adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 2023</u>	<u>31 Desember/ December 2022</u>
Anjak piutang - bruto:	50.954	42.561
Dikurangi:		
Pendapatan anjak piutang yang belum diakui:		
<u>Rupiah</u>		
Pihak ketiga	(15.196)	(92)
Anjak piutang	35.758	42.469
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(436)	(9.493)
Neto	<u>35.322</u>	<u>32.976</u>

6. FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)

As of 31 December 2023, total finance lease receivables pledged as collateral for borrowings and bonds payable as disclosed respectively in Note 15 and 17 amounted to Rp1,637,939 (31 December 2021: Rp2,063,963).

Management believes that the existing allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible finance lease receivables.

7. FACTORING RECEIVABLES

The Company has entered into factoring agreements with recourse. Factoring receivables are as follows:

Factoring receivables - gross:
Less:
Unearned income on factoring receivables:
<u>Rupiah</u>
Third parties
Factoring receivables
Less:
Allowance for impairments losses
Net

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. ANJAK PIUTANG (lanjutan)

Perubahan nilai tercatat anjak piutang dengan klasifikasi diamortisasi berdasarkan *stage* untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

		31 Desember/December 2023				
		Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total	
Biaya perolehan diamortisasi						Amortized cost
Saldo awal		42.469	-	-	42.469	Beginning balance
Pengalihan ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (<i>stage 1</i>)		-	-	-	-	Transfer to the 12-month expected credit loss (<i>stage 1</i>)
Pengalihan ke piutang yang tidak mengalami penurunan nilai (<i>stage 2</i>)		-	-	-	-	Transfer to receivables which are not impaired (<i>stage 2</i>)
Pengalihan ke piutang yang mengalami penurunan nilai (<i>stage 3</i>)		-	-	-	-	Transfer to receivables which are impaired (<i>stage 3</i>)
Total saldo awal setelah pengalihan		42.469	-	-	42.469	Total beginning balance after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	(345)	-	-	-	(345)	Net remeasurement of carrying value New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(60.587)	-	-	-	(60.587)	Derecognized financial assets
Total pengurangan tahun berjalan	(6.711)	-	-	-	(6.711)	Total deduction during the year
Saldo akhir		35.758	-	-	35.758	Ending balance
		31 Desember/December 2022				
		Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total	
Biaya perolehan diamortisasi						Amortized cost
Saldo awal		150.732	-	2.500	153.232	Beginning balance
Pengalihan ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (<i>stage 1</i>)		-	-	-	-	Transfer to the 12-month expected credit loss (<i>stage 1</i>)
Pengalihan ke piutang yang tidak mengalami penurunan nilai (<i>stage 2</i>)		-	-	-	-	Transfer to receivables which are not impaired (<i>stage 2</i>)
Pengalihan ke piutang yang mengalami penurunan nilai (<i>stage 3</i>)		-	-	-	-	Transfer to receivables which are impaired (<i>stage 3</i>)
Total saldo awal setelah pengalihan		150.732	-	2.500	153.232	Total beginning balance after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-	-	Net remeasurement of carrying value New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	304.762	-	-	-	304.762	Derecognized financial assets
Aset keuangan yang dihapus buku	(413.025)	-	-	(2.500)	(413.025)	Financial assets written-off
Total pengurangan tahun berjalan	(108.263)	-	-	(2.500)	(110.763)	Total deduction during the year
Saldo akhir		42.469	-	-	42.469	Ending balance

Anjak piutang - bruto sesuai dengan tanggal jatuh temponya sebagai berikut:

Factoring receivables - gross based on maturity date, are as follows:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Tahun			Year
2023	-	42.561	2023
2024	11.117	-	2024
2025	11.117	-	2025
2026	11.117	-	2026
2027 dan seterusnya	17.603	-	2027 and on forward
	50.954	42.561	

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. ANJAK PIUTANG (lanjutan)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022
Saldo awal	9.493	930
Penambahan(pembalikan) Untuk tahun berjalan	(9.057)	11.063
Penghapusan piutang	-	(2.500)
Saldo akhir	436	9.493

7. FACTORING RECEIVABLES (continued)

The movements in the allowance for impairment losses for years ended 31 December 2023 and 2022, are as follows:

	31 Desember/December 2023				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total	
Saldo awal	9.493	-	-	9.493	Beginning balance
Pengalihan ke:					<i>Transfer to:</i>
Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (stage1)	-	-	-	-	<i>The 12-month expected credit loss (stage 1)</i>
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	-	-	-	-	<i>Lifetime expected credit losses - not credit-impaired (stage 2)</i>
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - mengalami penurunan nilai (stage 3)	-	-	-	-	<i>Lifetime expected credit losses - credit-impaired (stage 3)</i>
Total saldo awal setelah pengalihan	9.493	-	-	9.493	<i>Total beginning balance after transfer</i>
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	12	-	-	12	<i>Net remeasurement of loss allowance</i>
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	484	-	-	484	<i>New financial assets originated or purchased</i>
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(9.553)	-	-	(9.553)	<i>Derecognized financial assets</i>
Total pembentukan tahun berjalan	(9.057)	-	-	(9.057)	<i>Total build-up during the year</i>
Saldo akhir	436	-	-	436	Ending balance
	31 Desember/December 2022				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total	
Saldo awal	165	-	765	930	Beginning balance
Pengalihan ke:					<i>Transfer to:</i>
Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (stage1)	-	-	-	-	<i>The 12-month expected credit loss (stage 1)</i>
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	-	-	-	-	<i>Lifetime expected credit losses - not credit-impaired (stage 2)</i>
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - mengalami penurunan nilai (stage 3)	-	-	-	-	<i>Lifetime expected credit losses - credit-impaired (stage 3)</i>
Total saldo awal setelah pengalihan	165	-	765	930	<i>Total beginning balance after transfer</i>
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	10.313	-	1.735	12.048	<i>Net remeasurement of loss allowance</i>
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	197	-	-	197	<i>New financial assets originated or purchased</i>
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.182)	-	-	(1.182)	<i>Derecognized financial assets</i>
Total pembentukan tahun berjalan	9.328	-	1.735	11.063	<i>Total build-up during the year</i>
Aset keuangan yang dihapus buku	-	-	(2.500)	(2.500)	<i>Financial assets written-off</i>
Saldo akhir	9.493	-	-	9.493	Ending balance

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. ANJAK PIUTANG (lanjutan)

Anjak piutang yang direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 100% dari saldo anjak piutang - bruto (31 Desember 2022: 85,46%).

Jumlah minimum cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan untuk anjak piutang sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp358 dan Rp425 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Rata-rata suku bunga efektif yang dikenakan kepada konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2023
Anjak piutang	14,48%

Analisa umur anjak piutang - bruto adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2023
Belum jatuh tempo	50.954
	50.954

Piutang sewa pembiayaan - bruto berdasarkan kolektabilitas sesuai peraturan OJK:

	31 Desember/ December 2023
Lancar	50.954
	50.954

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya anjak piutang.

7. FACTORING RECEIVABLES (continued)

The percentage of restructured factoring receivables as of 31 December 2023 is 100% of the factoring receivables balance - gross (31 December 2022: 85.46%).

The minimum allowance for factoring receivables based on OJK Regulation No. 35/POJK.05/2018 dated 27 December 2018 amounted Rp358 and Rp425 as of 31 December 2023 and 2022, respectively.

Average effective interest rates charged to customers for the years ended 31 December 2023 and 2022, are as follows:

	31 Desember/ December 2022	
	12,74%	Factoring receivables

The aging analysis of factoring receivables - gross, is as follows:

	31 Desember/ December 2022	
	42.561	Current
	42.561	

Finance lease receivables - gross based on collectability in accordance with OJK regulations:

	31 Desember/ December 2022	
	42.561	Current
	42.561	

Management believes that the existing allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible factoring receivables.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022
Pihak ketiga		
Piutang asuransi	43.862	30.469
Piutang administrasi akseptasi	43.613	30.621
Piutang penjualan kendaraan jaminan	20.183	7.733
Lain-lain	12.011	21.100
	119.669	89.923
Pihak berelasi		
Piutang pembiayaan bersama	473.710	385.343
Piutang klaim penjaminan kredit	70.667	111.312
Piutang administrasi akseptasi	2.486	2.667
Lain-lain	620	620
	547.483	499.942
Piutang lain-lain	667.152	589.865
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(44.298)	(140.425)
	622.854	449.440

Piutang pembiayaan bersama merupakan piutang yang telah dijanjikan secara bersama untuk dibiayai, namun belum ditagihkan ke pemberi pembiayaan bersama.

Lihat Catatan 26a untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022
Saldo awal	140.425	121.548
(Pembalikan) penambahan untuk tahun berjalan	(96.127)	18.877
Saldo akhir	44.298	140.425

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang.

9. PERPAJAKAN

a. Utang pajak kini

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022
Pasal 25	25.677	21.039
Pasal 29	86.323	104.459
Saldo akhir	112.000	125.498

8. OTHER RECEIVABLES

Third parties
Insurance receivables
Acceptance administration receivables
Receivables from sales of collateral vehicle
Others
Related parties
Joint financing receivables
Credit guarantee claims receivables
Acceptance administration receivables
Others
Other receivables
Less: Allowance for impairment losses

Joint financing receivables represent receivables that have been jointly promised to be financed, but have not been billed to the joint financing provider.

Refer to Note 26a for details of balances and transactions with related parties.

The movements in the allowance for impairment losses for years ended 31 December 2023 and 2022, are as follows:

Management believes that the allowance for impairment losses is sufficient to cover any possible losses from uncollectible receivables.

9. TAXATION

a. Current tax liabilities

Article 25
Article 29
Ending balance

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

9. TAXATION (continued)

b. Beban pajak

b. Tax expense

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2023	2022	
Kini	311.260	248.585	Current
Tangguhan (lihat Catatan 9c)	15.438	(37.837)	Deferred (refer to Note 9c)
	326.698	210.748	

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax expense and the theoretical tax amount on the Company's income before income tax and the applicable tax rate is as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2023	2022	
Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan	1.491.226	963.994	Income before final tax and income tax expense
Pajak dihitung pada tarif pajak	328.070	212.079	Tax calculated at tax rates
Penghasilan bunga dikenakan pajak final	(3.770)	(3.336)	Interest income subjected to final tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan	2.398	2.005	Non-deductible expenses
Beban pajak	326.698	210.748	Tax expense

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before income tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and estimated taxable income is as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2023	2022	
Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan	1.491.226	963.994	Income before final tax and income tax expense
Koreksi fiskal:			Fiscal corrections:
Beda temporer			Temporary differences
Penyisihan bonus	(34.531)	117.836	Provision for bonus
Penyisihan imbalan kerja karyawan	69.103	49.597	Provision for employee benefits
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain	(96.290)	18.877	Provision for impairment losses on other receivables
Selisih antara nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	710	1.777	Difference in net book value between commercial and fiscal
Penyisihan penghapusan customer deposit	495	906	Provision for write-off on customer deposit
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa pembiayaan dan anjak piutang	(7.296)	(18.332)	Provision for impairment losses on finance lease receivables and factoring receivables
Penyisihan biaya jasa profesional	(2.664)	-	Provision for professional service

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

9. TAXATION (continued)

b. Beban pajak (lanjutan)

b. Tax expense (continued)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Reconciliation between income before income tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and estimated taxable income is as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2023	2022	
Beda temporer			Temporary differences
Transaksi aset hak guna	300	1.324	Right-of-use asset transactions
	(70.173)	171.985	
Beda tetap			Permanent differences
Beban yang tidak dapat dikurangkan	10.899	9.114	Non-deductible expenses
Penghasilan bunga dikenakan pajak final	(17.134)	(15.163)	Interest income subjected to final tax
	(6.235)	(6.049)	
Penghasilan kena pajak	1.414.818	1.129.930	Taxable income
Beban pajak	311.260	248.585	Tax expense
Dikurangi:			Less:
Pasal 23	(10.091)	(3.483)	Article 23
Pasal 25	(214.846)	(140.643)	Article 25
Utang pajak penghasilan badan	86.323	104.459	Corporate income tax payable

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP"). Salah satu pasal dalam UU HPP ini adalah tarif pajak penghasilan badan yang berlaku di tahun 2022 dan seterusnya adalah 22%.

On 29 October 2021, the Government stipulated Law No. 7 Year 2021 on the Harmonization of Tax Regulations ("HPP Bill"). One of the article in this HPP Bill is that the corporate income tax rate applicable in 2022 and so forth is 22%.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 tersebut di atas akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") Pajak Penghasilan Badan.

The above calculation of corporate income tax for the year ended 31 December 2023 will be used as basis for filing the Annual Tax Return ("SPT") of Corporate Income Tax.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 sama dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan Perseroan ke Kantor Pelayanan Pajak.

The calculation of corporate income tax for the year ended 31 December 2022 is same as the Annual Tax Return filed by the Company to the Tax Office.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

9. TAXATION (continued)

c. Aset (liabilitas) pajak tangguhan – neto

c. Deferred tax assets (liabilities) – net

31 Desember/December 2023

	Saldo awal/ Beginning balance	Manfaat (beban) pajak tangguhan/ Deferred tax income (expenses)	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan dampak dari laporan laba rugi				Deferred tax asset (liabilities) effect from profit or loss
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain	30.894	(21.184)	9.710	Provision for impairment losses on other receivables
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa pembiayaan dan anjak piutang	1.605	(1.605)	-	Provision for impairment losses on finance lease and factoring receivables
Selisih antara nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	(1.548)	156	(1.392)	Difference in net book value of fixed assets between commercial and fiscal
Penyisihan imbalan kerja karyawan	34.371	15.203	49.574	Provision for employee benefits
Penyisihan bonus	38.317	(7.597)	30.720	Provision for bonus
Penyisihan penghapusan customer deposit	1.605	109	1.714	Provision for write-off on customer deposit
Penyisihan biaya jasa profesional	586	(586)	-	Provision for professional fee
Transaksi aset hak guna	361	66	427	Right-of-use asset transactions
Aset pajak tangguhan dampak dari penghasilan komprehensif lain				Deferred tax assets effect from other comprehensive income
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan	8.516	2.310	10.826	Remeasurement of employee benefits obligation
Kerugian bersih atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas	1.745	(2.535)	(790)	Net loss on derivative instrument for cash flow hedging
	116.452	(15.663)	100.789	

31 Desember/December 2022

	Saldo awal/ Beginning balance	Manfaat (beban) pajak tangguhan/ Deferred tax income (expenses)	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan dampak dari laporan laba rugi				Deferred tax asset (liabilities) effect from profit or loss
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain	26.741	4.153	30.894	Provision for impairment losses on other receivables
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa pembiayaan dan anjak piutang	5.638	(4.033)	1.605	Provision for impairment losses on finance lease and factoring receivables
Selisih antara nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	(1.939)	391	(1.548)	Difference in net book value of fixed assets between commercial and fiscal
Penyisihan imbalan kerja karyawan	23.460	10.911	34.371	Provision for employee benefits
Penyisihan bonus	12.393	25.924	38.317	Provision for bonus
Penyisihan penghapusan customer deposit	1.405	200	1.605	Provision for write-off on customer deposit
Penyisihan biaya jasa profesional	586	-	586	Provision for professional fee
Transaksi aset hak guna	70	291	361	Right-of-use asset transactions

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

9. TAXATION (continued)

31 Desember/December 2022

	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Manfaat (beban) pajak tanggunghan/ <i>Deferred tax income (expenses)</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Aset pajak tangguhan				<i>Deferred tax assets effect</i>
dampak dari penghasilan				<i>from other comprehensive</i>
komprensif lain				<i>income</i>
Pengukuran kembali atas				
liabilitas imbalan				<i>Remeasurement of employee</i>
kerja karyawan	9.191	(675)	8.516	<i>benefits obligation</i>
Kerugian bersih				
atas instrumen derivatif untuk				<i>Net loss on derivative</i>
lindung nilai arus kas	205	1.540	1.745	<i>instrument for cash flow hedging</i>
	77.750	38.702	116.452	

d. Surat ketetapan pajak

d. Tax assessment letter

Tahun pajak 2015 dan 2014

Fiscal year 2015 and 2014

Pada tanggal 12 September 2018, Perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dari Direktorat Jendral Pajak ("DJP") atas Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp60.999 dan Rp31.453. Untuk jumlah kurang bayar dari SKPKB tersebut, Perseroan mengajukan keberatan ke Kantor Pajak sebesar Rp90.879. Perseroan telah menyetujui keputusan dan telah membayar sejumlah Rp724 dan Rp849 masing-masing atas SKPKB atas Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2015 dan 2014 berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada tanggal 1 Oktober 2018.

On 12 September 2018, the Company received Tax Assessment Letter on Underpayment ("SKPKB") from Directorate General of Taxes ("DGT") on Corporate Income Tax for fiscal years 2015 and 2014 amounting to Rp60,999 and Rp31,453, respectively. For the amount of the underpayment of the SKPKB, the Company filed an objection to the Tax Office amounting to Rp90,879. The Company has approved the decision and has paid the amount of Rp724 and Rp849, respectively for the SKPKB on Corporate Income Tax for fiscal year 2015 and 2014 based on the Audit Result Final Discussion on 1 October 2018.

Pada tahun 2019, Kantor Pajak menolak semua keberatan untuk tahun fiskal 2014 dan 2015. Pada tahun yang sama, Perseroan mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Pengadilan Pajak.

In 2019, the Tax Office has rejected all objections for fiscal year 2014 and 2015. In the same year, the Company appealed the decision to the Tax Court.

Pada tanggal 14 Desember 2021, Pengadilan Pajak membacakan putusan terkait dengan banding yang diajukan Perseroan. Atas putusan tersebut, Perseroan menerima surat putusan dari Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Desember 2021. Berdasarkan hasil putusan tersebut, PPh Badan untuk tahun pajak 2015 dan 2014 telah dikabulkan sebagian, sebesar Rp90.862 dan tidak dikabulkan sebesar Rp17. Atas putusan tersebut, utang yang masih harus dibayar sebesar Rp17. Manajemen sepakat untuk menerima hasil putusan yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Pajak.

On 14 December 2021, the Tax Court read out the decision related to the appeal filed by the Company. Based on the decision, the Company received a decision letter from the Tax Court on 27 December 2021. Based on the results of the decision, the Corporate Income Tax for fiscal year 2015 and 2014 was partially granted in the amount of Rp90,862 and was not granted in the amount of Rp17. For the decisions that have been received, the total accrued payable amounted Rp17. Management agrees to accept the result of the decisions that have been determined by the Tax Court.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Tahun pajak 2015 dan 2014 (lanjutan)

Pada tanggal 4 April 2022, Kantor Pajak mengajukan banding atas keputusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 25 Mei 2023, hasil keputusan Mahkamah Agung menolak pengajuan banding dari Kantor Pajak.

Tahun pajak 2020

Pada tanggal 11 April 2022, Perseroan menerima Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk pajak badan tahun 2020. Berita Acara tersebut menyatakan Perseroan memiliki lebih bayar pajak terkait Pajak Badan untuk tahun 2020 sebesar Rp27.841, kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 21 Final, Pasal 23, Pasal 4 (2), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Surat Tagihan Pajak PPN dan PPN Pemanfaatan JKP dari Luar Pabean dengan jumlah total Rp7.144. Pada tanggal 18 Mei 2022, Perseroan menerima pengembalian pajak dari Kantor Pajak atas Hasil Pemeriksaan untuk pajak badan tahun 2020 sebesar Rp20.697. Manajemen sepakat untuk menerima hasil putusan yang sudah ditetapkan oleh Kantor Pajak.

e. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perseroan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

9. TAXATION (continued)

d. Tax assessment letter (continued)

Fiscal year 2015 and 2014 (continued)

On 4 April 2022, Tax Office appealed the decision of Tax Court to Supreme Court. On 25 May 2023, the decision from Supreme Court rejected the appealed from Tax Office.

Fiscal year 2020

On 11 April 2022, the Company received the Minutes of Final Discussion of Audit Results for the 2020 corporate tax. The Minutes stated that the Company had overpaid taxes related to Corporate Tax for 2020 of Rp27,841, underpaid Income Tax Article 21, Article 21 Final, Article 23, Article 4 (2), Value Added Tax (VAT), Letter of Invoice for VAT Tax and VAT for Utilization of JKP from Outside Customs with a total amount of Rp7,144. On 18 May 2022, the Company received a tax refund from the Tax Office on Audit Results for the 2020 corporate tax of Rp20,697. Management agrees to accept the result of the decisions that have been determined by the Tax Office.

e. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self-assessment. The Director General of Taxes may assess or amend taxes within a certain period. For the fiscal years of 2008 and onwards, the period is within five years from the time the tax becomes due.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET TETAP

10. FIXED ASSETS

31 Desember/December 2023						
	1 Januari / January 2023	Penambahan/ Additions	(Pengurangan)/ (Deductions)	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 2023	
Aset tetap						Fixed assets
Kepemilikan langsung						Direct ownership
Harga perolehan						Cost
Tanah	48.570	-	-	-	48.570	Land
Bangunan	50.536	2.460	-	-	52.996	Buildings
Kendaraan	28	-	-	-	28	Vehicles
Perabot dan peralatan kantor	269.378	70.147	(5.080)	-	334.445	Furniture and office equipment
Renovasi bangunan sewa	55.820	14.285	-	-	70.105	Leasehold improvement
	424.332	86.892	(5.080)	-	506.144	
Aset hak guna	142.461	45.080	-	-	187.541	Right-of-use assets
	566.793	131.972	(5.080)	-	693.685	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	(18.231)	(2.515)	-	-	(20.746)	Buildings
Kendaraan	(27)	-	-	-	(27)	Vehicles
Perabot dan peralatan kantor	(203.440)	(33.145)	5.075	-	(231.510)	Furniture and office equipment
Renovasi bangunan sewa	(44.898)	(5.723)	-	-	(50.621)	Leasehold improvement
	(266.596)	(41.383)	5.075	-	(302.904)	
Aset hak guna	(80.434)	(26.722)	-	-	(107.156)	Right-of-use assets
	(347.030)	(68.105)	5.075	-	(410.060)	
Nilai buku neto	219.763				283.625	Net book value
31 Desember/December 2022						
	1 Januari/ January 2022	Penambahan/ Additions	(Pengurangan)/ (Deductions)	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 2022	
Aset tetap						Fixed assets
Kepemilikan langsung						Direct ownership
Harga perolehan						Cost
Tanah	48.570	-	-	-	48.570	Land
Bangunan	49.388	1.148	-	-	50.536	Buildings
Kendaraan	28	-	-	-	28	Vehicles
Perabot dan peralatan kantor	244.325	40.521	(15.468)	-	269.378	Furniture and office equipment
Renovasi bangunan sewa	47.593	8.227	-	-	55.820	Leasehold improvement
	389.904	49.896	(15.468)	-	424.332	
Aset hak guna	113.344	29.117	-	-	142.461	Right-of-use assets
	503.248	79.013	(15.468)	-	566.793	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	(15.790)	(2.441)	-	-	(18.231)	Buildings
Kendaraan	(27)	-	-	-	(27)	Vehicles
Perabot dan peralatan kantor	(189.575)	(29.128)	15.263	-	(203.440)	Furniture and office equipment
Renovasi bangunan sewa	(41.885)	(3.013)	-	-	(44.898)	Leasehold improvement
	(247.277)	(34.582)	15.263	-	(266.596)	
Aset hak guna	(58.890)	(21.544)	-	-	(80.434)	Right-of-use assets
	(306.167)	(56.126)	15.263	-	(347.030)	
Nilai buku neto	197.081				219.763	Net book value

Seluruh aset tetap kepemilikan langsung kecuali tanah, telah diasuransikan dengan PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk dan PT AXA Insurance Indonesia (dahulu PT Mandiri AXA General Insurance) dengan jumlah pertanggungan asuransi sebesar Rp427.198 dan Rp372.503 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang menurut manajemen cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian karena kebakaran, banjir, huru-hara dan gempa bumi.

Directly owned fixed assets, except for land, are insured with PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk and PT AXA Insurance Indonesia (formerly PT Mandiri AXA General Insurance), for a sum insured of Rp427,198 and Rp372,503 as of 31 December 2023 and 2022, respectively, which according to the management, is sufficient to cover possible losses due to fire, flood, public disorder/riots and earthquake.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Tanah Perseroan berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (“HGB”) yang mempunyai masa manfaat selama 20 sampai dengan 30 tahun yang akan jatuh tempo antara 2 Februari 2023 sampai dengan 31 Maret 2046. Manajemen berpendapat bahwa HGB tersebut dapat diperbaharui atau diperpanjang pada saat jatuh tempo. Sampai tanggal laporan keuangan, Sertifikat Hak Guna Bangunan masih dalam masa perpanjangan.

Rincian keuntungan atas pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December	
	2023	2022
Hasil pelepasan aset tetap	129	355
Nilai buku aset tetap	(5)	(205)
Laba atas pelepasan aset tetap	124	150

Kerugian atau keuntungan atas pelepasan aset tetap diakui sebagai bagian dari “pendapatan lain-lain” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap yang dimiliki Perseroan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp264.392 dan Rp176.686.

Tidak ada aset tetap yang dijadikan jaminan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Aset hak guna per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 2023			
	1 Januari/ January 2023	Penambahan/ Additions	(Pengurangan)/ (Deductions)	31 Desember/ December 2023
Biaya perolehan				
Bangunan	131.935	36.099	-	168.034
Kendaraan	10.526	8.981	-	19.507
	142.461	45.080	-	187.541
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	(73.435)	(22.033)	-	(95.468)
Kendaraan	(6.999)	(4.689)	-	(11.688)
	(80.434)	(26.722)	-	(107.156)
Nilai buku neto	62.027			80.385

10. FIXED ASSETS (continued)

Land is held in the form of certificates of Hak Guna Bangunan (“HGB”) which have useful lives of 20 to 30 years and will be due between 2 February 2023 to 31 March 2046. Management believes that the HGB can be renewed or extended upon expiration. Until the date of financial statements, the certificates of Hak Guna Bangunan is still in progress.

Details of gain on disposal of fixed assets are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December	
	2023	2022
Hasil pelepasan aset tetap	129	355
Nilai buku aset tetap	(5)	(205)
Laba atas pelepasan aset tetap	124	150

Loss or gain on disposal of fixed assets is recognized as part of “other income” in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Management believes that there is no impairment on the Company’s fixed assets as of 31 December 2023 and 2022, respectively.

As of 31 December 2023 and 2022, the gross amount of fixed assets which have been fully depreciated and still being used amounted to Rp264,392 and Rp176,686, respectively.

There were no fixed assets pledged as collateral as of 31 December 2023 and 31 December 2022.

Right-of-use of assets as of 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	Cost
Buildings	168.034
Vehicles	19.507
Accumulated depreciation	(107.156)
Buildings	(95.468)
Vehicles	(11.688)
Net book value	80.385

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Aset hak guna per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

Right-of-use of assets as of 31 December 2023 and 2022 are as follows: (continued)

	31 Desember/December 2022				
	1 Januari/ January 2022	Penambahan/ Additions	(Pengurangan/ (Deductions)	31 Desember/ December 2022	
Biaya perolehan					Cost
Bangunan	105.867	26.068	-	131.935	Buildings
Kendaraan	7.477	3.049	-	10.526	Vehicles
	113.344	29.117	-	142.461	
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan	(53.662)	(19.773)	-	(73.435)	Buildings
Kendaraan	(5.228)	(1.771)	-	(6.999)	Vehicles
	(58.890)	(21.544)	-	(80.434)	
Nilai buku neto	54.454			62.027	Net book value

Perseroan menyewa beberapa aset termasuk bangunan dan kendaraan. Jangka waktu masa sewa berkisar 1 - 5 tahun.

The Company had rent a number of assets which include buildings and vehicles. The period of lease term ranged between 1 - 5 years.

11. ASET LAIN-LAIN

11. OTHER ASSETS

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Pihak ketiga			Third parties
Setoran dalam perjalanan	45.248	32.207	Deposit in transit
Uang muka	20.340	8.761	Advance payments
Setoran jaminan	2.537	2.355	Security deposits
Biaya provisi dibayar di muka	1.473	2.939	Prepaid provision cost
Biaya jasa penerbitan obligasi	445	434	Prepaid bonds issuance cost
Asuransi dibayar di muka	432	452	Prepaid insurance
Sewa dibayar di muka	83	112	Prepaid rent
Lain-lain	22.874	13.671	Other
	93.432	60.931	
Pihak berelasi			Related parties
Sewa dibayar di muka	765	132	Prepaid rent
Piutang bunga deposito	137	119	Interest receivables - time deposits
	902	251	
	94.334	61.182	

Lain-lain merupakan pemeliharaan dan perawatan sistem teknologi informasi, piutang karyawan, dan biaya dibayar dimuka.

Others mainly represent repairment and maintenance of information technology system, employee receivables, and prepaid expenses.

Lihat Catatan 26a untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 26a for details of balances and transactions with related parties.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. UTANG USAHA

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022
Pihak ketiga		
Utang kendaraan	861.602	568.676
Utang asuransi	155.535	133.615
	1.017.137	702.291

Utang usaha merupakan utang kepada pemasok atas pembiayaan kendaraan bermotor dan utang kepada perusahaan asuransi yang berkaitan dengan pembiayaan kendaraan bermotor dan alat berat.

12. TRADE PAYABLES

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
			Third parties
			Vehicle payables
			Insurance payables
	1.017.137	702.291	

Trade payables represent payables to suppliers for motor vehicle financing and payables to insurance companies in relation to motor vehicle financing and heavy equipment.

13. UTANG LAIN-LAIN

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022
Pihak ketiga		
Titipan konsumen	112.429	107.913
PPN keluaran	25.032	44.289
Liabilitas pajak		
Pasal 21	16.493	12.263
Pasal 23	979	856
PPH final	190	153
Liabilitas sewa	8.219	1.532
Jasa notaris	2.156	7.183
Barang dan jasa	830	500
Lain-lain	24.588	25.241
	190.916	199.930
Pihak berelasi		
Liabilitas sewa	31.974	38.511
Pembiayaan bersama	24.591	61.985
Lain-lain	240	240
	56.805	100.736
	247.721	300.666

Jumlah beban bunga atas liabilitas sewa masing-masing sebesar Rp2.928 dan Rp2.515 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.

The balances of interest expense from lease liabilities amounted to Rp2,928 and Rp2,515 for the years ended 31 December 2023 and 2022, respectively.

Analisis jatuh tempo utang lain-lain terkait sewa adalah sebagai berikut:

The maturity analysis of other payables related to lease is as follows:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
1 tahun	1.224	667	1 year
2 tahun	1.912	1.001	2 years
3 tahun	31.496	2.645	3 years
4 tahun	4.477	30.137	4 years
5 tahun	1.084	5.593	5 years
Total	40.193	40.043	Total

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Pembiayaan bersama sehubungan dengan porsi cicilan pembayaran piutang pembiayaan yang telah diterima dari konsumen namun belum dibayarkan kepada pemberi pembiayaan bersama.

Lain-lain terutama terdiri dari utang kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan utang asuransi dan biaya biro jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Lihat Catatan 26b untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

13. OTHER PAYABLES (continued)

Joint financing represents the portion of installment payments for financing receivables that have been received from customers but have not been paid to joint financing providers.

Others mainly consist of payables to third parties related to insurance payable and vehicle license service fee.

Refer to Note 26b for details of balances and transactions with related parties.

14. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022
Pihak ketiga		
Gaji dan tunjangan	148.356	198.083
Bunga yang masih harus dibayar	96.164	79.250
Telepon	1.659	1.546
Perbaikan dan pemeliharaan	1.037	2.425
Jasa profesional	934	3.376
Listrik dan air	454	448
Promosi	374	3.094
Lain-lain	8.648	19.865
	257.626	308.087
Pihak berelasi		
Bunga yang masih harus dibayar	4.472	3.535
	262.098	311.622

Lain-lain terutama terdiri dari beban yang masih harus dibayar terkait jamuan, materai, sewa PC, alat tulis kantor, cetakan, perjalanan dinas dan pelatihan.

Lihat Catatan 26b untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

14. ACCRUED EXPENSES

Third parties
Salaries and allowances
Accrued Interest
Telephone
Repairs and maintenance
Professional fee
Utilities
Promotion
Others
Related parties
Accrued interest

Others mainly consist of entertainment, stamps, PC rent, stationary, printing, travelling and training.

Refer to Note 26b for details of balances and transactions with related parties.

15. PINJAMAN YANG DITERIMA

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022
<i>Revolving</i>		
Pinjaman bank	1.792.150	410.000
<i>Non-revolving</i>		
Pinjaman bank	15.817.769	14.283.451
Pinjaman lembaga keuangan Non-bank	523.733	-
	18.133.652	14.693.451
Biaya provisi yang belum diamortisasi	(36.937)	(31.564)
	18.096.715	14.661.887

<i>Revolving</i>
Bank loans
<i>Non-revolving</i>
Bank loans
Financial institution non-bank loans
Unamortized provision cost

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

15. BORROWINGS (continued)

	Jumlah fasilitas/ Facility amount		Jumlah pinjaman/ Loan amount		Jatuh tempo fasilitas/ Maturity date of the facility	
	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022
Pinjaman bank/Bank loans						
Revolving						
Rupiah						
Pihak ketiga/Third parties						
PT Bank OCBC NISP Tbk	200.000	200.000	-	-	November/ November 2024	November/ November 2023
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	150.000	150.000	-	-	Agustus/ August 2024	Agustus/ August 2023
PT Bank HSBC Indonesia	250.000	250.000	-	-	Juli/ July 2024	Juli/ July 2023
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta/ MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	770.800	786.550	-	-	Februari/ February 2024	Februari/ February 2023
PT Bank UOB Indonesia	124.999	25.000	-	-	Mei/ May 2024	November/ November 2023
PT Bank ANZ Indonesia	231.240	235.965	-	-	Juni/ June 2024	Juni/ June 2023
	308.320	-	-	-	Juni/ June 2024	-
PT Bank CTBC Indonesia	200.000	200.000	-	-	Februari/ February 2024	Desember/ December 2023
PT Bank Central Asia Tbk	553.000	553.000	-	-	Maret/ March 2024	Maret/ March 2024
PT Bank BTPN Tbk	300.000	300.000	200.000	-	Januari/ January 2024	April/ April 2023
PT Bank Permata Tbk	100.000	100.000	-	-	Februari/ February 2024	November/ November 2022*)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	100.000	-	-	-	Oktober/ October 2024	-
	<u>3.288.359</u>	<u>2.800.515</u>	<u>200.000</u>	<u>-</u>		
Pihak berelasi/Related parties						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	400.000	400.000	320.000	400.000	Desember/ December 2027	Desember/ December 2027
	375.000	375.000	306.250	-	Januari/ January 2028	Desember/ December 2023
	-	50.000	-	-	-	Desember/ December 2023
	200.000	200.000	200.000	10.000	Desember/ December 2028	Desember/ December 2023
	97.000	-	92.150	-	September/ September 2028	-
	500.000	-	458.333	-	November/ November 2024	-
	550.000	-	-	-	September/ September 2024	-
	7.000	-	6.417	-	Juli/ July 2028	-
	9.000	-	9.000	-	Desember/ December 2028	-
	34.000	-	-	-	September/ September 2024	-
	200.000	-	200.000	-	September/ September 2024	-
	<u>2.372.000</u>	<u>1.025.000</u>	<u>1.592.150</u>	<u>410.000</u>		
Jumlah/Total revolving	5.660.359	3.825.515	1.792.150	410.000		

*) Diperpanjang secara otomatis sampai Bank membatalkan, menghentikan atau membebaskan Perseroan dari kewajibannya secara tertulis.

*) Automatically extended until the Bank cancel, cease or discharge in writing the Company from its obligations.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

15. BORROWINGS (continued)

	Jumlah fasilitas/ Facility amount		Jumlah pinjaman/ Loan amount		Jatuh tempo fasilitas/ Maturity date of the facility	
	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022
Pinjaman bank (lanjutan)/ Bank loans (continued)						
<u>Non-revolving</u>						
Rupiah						
Pihak ketiga/Third parties						
PT Bank Central Asia Tbk	-	500.000	-	166.667	-	Desember/ December 2023
	555.000	555.000	15.417	200.417	Januari/ January 2024	Januari/ January 2024
	700.000	700.000	58.333	291.667	Maret/ March 2024	Maret/ March 2024
	500.000	500.000	194.444	361.111	Februari/ February 2025	Februari/ February 2025
	1.000.000	1.000.000	250.000	583.333	September/ September 2024	September/ September 2024
	600.000	600.000	300.000	500.000	Junii/ June 2025	Junii/ June 2025
	400.000	400.000	244.444	377.778	Oktober/ October 2025	Oktober/ October 2025
	1.500.000	1.500.000	791.667	1.291.667	Julii/ July 2025	Julii/ July 2025
	1.000.000	1.000.000	638.889	972.222	November/ November 2025	November/ November 2025
	500.000	500.000	385.417	-	Januari/ January 2027	November/ November 2023
	500.000	500.000	375.000	-	Maret/ March 2026	November November 2023
	1.600.000	-	1.333.333	-	Junii/ June 2026	-
	500.000	-	458.333	-	September/ September 2026	-
	1.000.000	-	1.000.000	-	Desember/ December 2026	-
	400.000	-	400.000	-	Desember/ December 2026	-
	500.000	-	500.000	-	Desember/ December 2026	-
Kredit Sindikasi Lokal/ Local Syndication Loan	-	1.000.000	-	194.444	-	Julii/ July 2023
	-	1.500.000	-	416.667	-	Oktober/ October 2023
PT Bank UOB Indonesia	300.000	300.000	125.000	225.000	Maret/ March 2025	Maret/ March 2025
	300.000	300.000	175.000	275.000	September/ September 2025	September/ September 2025
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	500.000	-	55.556	-	April/ April 2023
	-	300.000	-	50.000	-	Junii/ June 2023
	-	500.000	-	166.667	-	Desember/ December 2023
	500.000	500.000	166.667	333.333	Desember/ December 2024	Desember/ December 2024
	500.000	500.000	180.556	347.222	Januari/ January 2025	Januari/ January 2025
	1.000.000	1.000.000	611.111	944.444	Oktober/ October 2025	Oktober/ October 2025
	1.500.000	-	-	-	November/ November 2024	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	500.000	-	13.889	-	Januari/ January 2023
	1.000.000	1.000.000	166.667	500.000	Junii/ June 2024	Junii/ June 2024
	1.000.000	1.000.000	472.222	805.556	Mei/ May 2025	Mei/ May 2025
	1.000.000	1.000.000	638.889	972.222	November/ November 2025	November/ November 2025
	500.000	1.000.000	375.000	-	Maret/ March 2026	Mei/ May 2023
	500.000	-	388.889	-	April/ April 2026	-
	1.000.000	-	944.444	-	Oktober/ October 2026	-
PT Bank KEB Hana Indonesia	300.000	300.000	106.295	206.165	Desember/ December 2024	Desember/ December 2024
PT Bank DKI	300.000	300.000	106.295	206.165	Desember/ December 2024	Desember/ December 2024
	200.000	200.000	87.716	153.315	Maret/ March 2025	Maret/ March 2025

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

15. BORROWINGS (continued)

	Jumlah fasilitas/ Facility amount		Jumlah pinjaman/ Loan amount		Jatuh tempo fasilitas/ Maturity date of the facility	
	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022
Pinjaman bank (lanjutan) Bank loans (continued)						
Non-revolving (lanjutan/continued) Rupiah (lanjutan/continued) Pihak ketiga (lanjutan)/Third parties (continued)						
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	300.000	-	16.667	-	Februari/ February 2023
	500.000	500.000	208.333	375.000	Maret/ March 2025	Maret/ March 2025
	400.000	400.000	300.000	-	Maret/ March 2026	Desember/ December 2023
PT Bank QNB Indonesia Tbk	-	500.000	-	41.667	-	Maret/ March 2023
	300.000	300.000	100.000	200.000	Desember/ December 2024	Desember/ December 2024
	300.000	-	266.667	-	Agustus/ August 2026	-
PT Bank Permata Tbk	400.000	400.000	200.000	333.333	Juni/ June 2025	Juni/ June 2025
	800.000	-	-	-	Januari/ January 2024	-
PT Bank Oke Indonesia Tbk	500.000	500.000	261.494	422.923	Juni/ June 2025	Juni/ June 2025
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	430.000	430.000	236.782	374.904	Juli/ July 2025	Juli/ July 2025
	300.000	-	292.430	-	November/ November 2026	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	500.000	-	444.444	-	Agustus/ August 2026	-
PT Bank of India Indonesia Tbk	500.000	-	444.444	-	Agustus/ August 2026	-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	750.000	-	-	-	September/ September 2024	-
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	300.000	-	-	-	September/ September 2024	-
	<u>27.135.000</u>	<u>22.785.000</u>	<u>14.244.622</u>	<u>12.375.001</u>		
Mata uang asing/Foreign currency Pihak ketiga/Third parties						
PT Bank Mizuho Indonesia	756.250	786.550	578.100	-	Februari/ February 2026	April/ April 2023
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta/ MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	409.459	409.460	219.678	373.611	April/ April 2025	April/ April 2025
	<u>1.165.709</u>	<u>1.196.010</u>	<u>797.778</u>	<u>373.611</u>		
Rupiah Pihak berelasi/Related parties						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	875.000	-	287.048	-	November/ November 2023
	200.000	200.000	24.346	94.074	April/ April 2024	April/ April 2024
	400.000	400.000	154.592	254.870	Mei/ May 2025	Mei/ May 2025
	450.000	450.000	225.000	337.500	Desember/ December 2025	Desember/ December 2025
	93.000	93.000	65.875	89.125	Oktober/ October 2026	Oktober/ October 2026
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	500.000	500.000	305.556	472.222	Oktober/ October 2025	Oktober/ October 2025
	<u>1.643.000</u>	<u>2.518.000</u>	<u>775.369</u>	<u>1.534.839</u>		
Pinjaman Lembaga keuangan non-bank/ Financial institution non-bank loans						
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	600.000	-	523.733	-	Juli/ July 2026	-
	<u>600.000</u>	<u>-</u>	<u>523.733</u>	<u>-</u>		
Jumlah/Total non-revolving	<u>30.543.709</u>	<u>26.499.010</u>	<u>16.341.502</u>	<u>14.283.451</u>		
Jumlah/Total	<u>36.204.068</u>	<u>30.324.525</u>	<u>18.133.652</u>	<u>14.693.451</u>		

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Kredit sindikasi lokal

Pada tanggal 18 Desember 2019, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari Anggota Sindikasi, dengan batas kredit maksimum Rp2.500.000.000.000 (nilai penuh). Penarikan pertama dilakukan pada tanggal 21 Juli 2020 dengan jumlah Rp1.000.000.000.000 (nilai penuh). Penarikan kedua tanggal 14 Oktober 2020 dengan jumlah Rp1.500.000.000.000 (nilai penuh). Rincian nilai pinjamannya sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022
PT Bank Central Asia Tbk	-	155.222
PT Bank BTPN Tbk	-	103.400
PT Bank Mizuho Indonesia	-	103.400
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	103.400
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	41.555
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	-	31.289
PT Bank Shinhan Indonesia	-	31.289
PT Bank SBI Indonesia	-	20.778
PT Bank Nationalnobu Tbk	-	20.778
	-	611.111

Perjanjian sindikasi mensyaratkan kondisi keuangan tertentu, yaitu:

- Perseroan akan memastikan rasio likuiditas tidak kurang dari 1 kali untuk setiap tahun buku dan semester tahun bukannya.
- Perseroan akan memastikan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali untuk setiap tahun buku dan semester tahun bukannya.
- Perseroan akan memastikan bahwa pinjaman-pinjaman macetnya tidak melebihi 3 persen dari keseluruhan piutang bersihnya untuk setiap tahun buku dan semester tahun bukannya.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perseroan telah memenuhi persyaratan dan kondisi yang tertuang di dalam perjanjian pinjaman bank.

Cicilan pinjaman bank, lembaga keuangan non bank, dan pinjaman sindikasi sesuai dengan tanggal jatuh temponya sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022
<u>Tahun</u>		
2023	-	7.261.863
2024	9.415.867	4.872.108
2025	6.011.977	2.380.105
2026 dan sesudahnya	2.705.808	179.375
	18.133.652	14.693.451

15. BORROWINGS (continued)

Local syndication credit

On 18 December 2019, the Company obtained a loan facility from a Syndicated Member with a maximum credit limit of Rp2,500,000,000,000 (full amount). The first drawdown was on 21 July 2020 with total of Rp1,000,000,000,000 (full amount). The second drawdown was on 14 October 2020 with total of Rp1,500,000,000,000 (full amount). Details are as follows:

PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank BTPN Tbk
PT Bank Mizuho Indonesia
PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Papua
PT Bank Shinhan Indonesia
PT Bank SBI Indonesia
PT Bank Nationalnobu Tbk

The syndication agreement has required financial covenants, namely:

- The Company shall ensure that the liquidity ratio is at a minimum of 1 time for each of its financial years and its financial half-years.
- The Company shall ensure that the gearing ratio does not exceed 10 times for each of its financial years and its financial half-years.
- The Company shall ensure that its Non-Performing Loans does not exceed 3 percent of its net receivables for each of its financial years and its financial half-years.

As of 31 December 2023 and 2022, the Company has complied with the terms and conditions set forth in the bank loan agreement.

Bank loans, non-bank financial institution, and syndicated loans' installment based on maturity date follows:

<u>Year</u>
2023
2024
2025
2026 and there after

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

15. BORROWINGS (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman yang belum ditarik dengan rincian sebagai berikut:

As of 31 December 2023 and 2022, the Company has undrawn loan facilities with details as follows:

31 Desember/December 2023

Nama bank/ Bank name	Jenis pinjaman/ Loan type	Nomor perjanjian/ Agreement number	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Jumlah fasilitas/ Facility amount	Jumlah fasilitas yang belum ditarik/ Undrawn facility amount	Jatuh tempo fasilitas/ Maturity date facility
Revolving:						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pinjaman Kredit Modal Kerja Revolving/ Working Capital Facility Revolving	154	27 September/ September 2023	550.000	550.000	27 September/ September 2024
	Pinjaman Kredit Modal Kerja Revolving/ Working Capital Facility Revolving	154	27 September/ September 2023	700.000	41.667	21 Desember/ December 2028
	Pinjaman Kredit Modal Kerja Auto Loan Pegawai/ Working Capital Facility Auto Loan Employee	154	27 September/ September 2023	50.000	34.583	27 September/ September 2024
	Pinjaman Kredit Modal Kerja Revolving/ Working Capital Facility Revolving	154	27 September/ September 2023	775.000	56.600	14 September/ September 2028
PT Bank ANZ Indonesia	Fasilitas Modal Kerja/ Working Capital Facility	110/FA/ANZ/NEW/ X/2018	11 Oktober/ October 2018	231.240	231.240	28 Juni/ June 2024
	Fasilitas Kredit Berulang Tanpa Komitmen Loan Facility Revolving Without Commitment	1138/FA/ANZ/NEW/IX/2023	22 September/ September 2023	308.320	308.320	22 Juni/ June 2024
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Fasilitas Modal Kerja/ Working Capital Facility	100	26 September/ September 2019	150.000	150.000	30 Agustus/ August 2024
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta/ MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	KMK Revolving/ Working Capital Facility Revolving	15-0581LN	11 Februari/ February 2016	770.800	770.800	28 Februari/ February 2024
PT Bank OCBC NISP Tbk	Fasilitas Demand Loan/ Demand Loan Facility	102/CBL/PPP/III/2019	29 Maret/ March 2019	200.000	200.000	10 November/ November 2024
PT Bank BTPN Tbk	Loan On Note (STL) Loan on Note	BTPN/NS/0095	24 Mei/ May 2021	300.000	100.000	10 Januari/ January 2024
PT Bank Central Asia Tbk	Pinjaman Berjangka Money Market/ Term Loan Money Market	17	6 April/ April 2022	553.000	553.000	11 Maret/ March 2024
PT Bank Permata Tbk	Money Market Loan/ Money Market Loan	46	27 April/ April 2022	100.000	100.000	15 Februari/ February 2024
PT Bank HSBC Indonesia	Pinjaman Berulang I/ Revolving Loan I	JAK/210416/U/00547045	17 Juni/ June 2021	250.000	250.000	31 Juli/ July 2024
PT Bank CTBC Indonesia	Pinjaman Jangka Pendek/ Short Term Loan	317/XI/2022	2 November/ November 2022	200.000	200.000	7 Februari/ February 2024
PT Bank UOB Indonesia	Revolving Credit Facility/ Loan Facility Revolving	1540	21 November/ November 2022	124.999	124.999	29 Mei/ May 2024
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kredit Jangka Pendek/ Short Term Loan	86	24 Oktober/ October 2023	100.000	100.000	24 Oktober/ October 2024
Non-revolving:						
PT Bank Permata Tbk	Term Loan 2/ Term Loan 2	25	12 April/ April 2023	800.000	800.000	12 Januari/ January 2024
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Pinjaman Berjangka/ Term Loan	9	7 September/ September 2023	750.000	750.000	7 September/ September 2024
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	Fixed Loan Sliding/ Fixed Loan Sliding	85	18 September/ September 2023	300.000	300.000	18 September/ September 2024
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Term Loan 6/ Term Loan 6	14	13 November/ November 2023	1.500.000	1.500.000	13 November/ November 2024

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman yang belum ditarik dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

15. BORROWINGS (continued)

As of 31 December 2023 and 2022, the Company has undrawn loan facilities with details as follows: (continued)

31 Desember/December 2022

Nama bank/ Bank name	Jenis pinjaman/ Loan type	Nomor perjanjian/ Agreement number	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Jumlah fasilitas/ Facility amount	Jumlah fasilitas yang belum ditarik/ Undrawn facility amount	Jatuh tempo fasilitas/ Maturity date facility
Revolving:						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	KMK Revolving	2	20 Desember/ December 2022	200.000	190.000	19 Desember/ December 2023
	Pinjaman Kredit Modal Kerja Auto Loan Pegawai	221	20 Desember/ December 2022	50.000	50.000	20 Desember/ December 2023
	Pinjaman Kredit Modal Kerja Revolving	222	20 Desember/ December 2022	375.000	375.000	20 Desember/ December 2023
PT Bank ANZ Indonesia	Fasilitas Modal Kerja/ Working Capital Facility	110/FA/ANZ/NEW/ X/2018	11 Oktober/ October 2018	235.965	235.965	30 Juni/ June 2023
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Fasilitas Modal Kerja/ Working Capital Facility	100	26 September/ September 2019	150.000	150.000	30 Agustus/ August 2023
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta/ MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	KMK Revolving	15-0581LN	11 Februari/ February 2016	786.550	786.550	11 Februari/ February 2023
PT Bank OCBC NISP Tbk	Fasilitas Demand Loan	102/CBL/PPP/III/2019	29 Maret/ March 2019	200.000	200.000	10 November/ November 2023
PT Bank BTPN Tbk	Loan On Note (STL)	BTPN/NS/0095	24 Mei/ May 2021	300.000	300.000	28 April/ April 2023
PT Bank Central Asia Tbk	Pinjaman Berjangka Money Market	17	6 April/ April 2022	553.000	553.000	11 Maret/ March 2024
PT Bank Permata Tbk	Money Market Loan	46	27 April/ April 2022	100.000	100.000	15 November/ November 2022*)
Non-revolving:						
PT Bank HSBC Indonesia	Pinjaman Berulang I	JAK/210416/U/00547045	17 Juni/ June 2021	250.000	250.000	31 Juli/ July 2023
PT Bank CTBC Indonesia	Pinjaman Jangka Pendek	317/XI/2022	2 November/ November 2022	200.000	200.000	7 Desember/ December 2023
PT Bank UOB Indonesia	Revolving Credit Facility	1540	21 November/ November 2022	25.000	25.000	21 November/ November 2023
Non-revolving:						
PT Bank Central Asia Tbk	Installment Loan – 16	17	06 April/ April 2022	1.000.000	1.000.000	15 November/ November 2023
PT Bank Mizuho Indonesia	Committed Loan on Deeds Facility	406/AMD/MZH/0422	08 April/ April 2022	786.550	786.550	08 April/ April 2023
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Pinjaman Tetap	58	15 November/ November 2022	1.000.000	1.000.000	15 Mei/ May 2023
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Pinjaman Transaksi Khusus	177	20 Desember/ December 2022	400.000	400.000	20 Desember/ December 2023

*) Diperpanjang secara otomatis sampai Bank membatalkan, menghentikan atau membebaskan Perseroan dari kewajibannya secara tertulis.

*) Automatically extended until the Bank cancel, cease or discharge in writing the Company from its obligations.

Pinjaman bank dalam rupiah di atas dikenakan bunga antara 6,00% - 7,60% dan 5,75% - 9,75% pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Pinjaman bank dalam mata uang asing dikenakan bunga USD-SOFR+1,08%-1,20% per tahun dan USD-SOFR+1,20% per tahun pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The bank loans denominated in Rupiah bear interest rates ranging between 6.00% - 7.60% and 5.75% - 9.75% for the year ended 31 December 2023 and 2022. The bank loans denominated in foreign currency bear interest of USD-SOFR+1.08%-1.20% per annum and USD-SOFR+1.20% per annum for the year ended 31 December 2023 and 2022, respectively.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perseroan telah melakukan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman sesuai jadwal yang ditetapkan.

During the years, ended 31 December 2023 and 2022, the Company has paid the loan principal and interest installments on schedule.

Pinjaman-pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen sejumlah Rp9.818.990 pada tanggal 31 Desember 2023 (31 Desember 2022: Rp7.696.335) dan piutang sewa pembiayaan sejumlah Rp874.859 pada tanggal 31 Desember 2023 (31 Desember 2022: Rp1.175.138).

These loans are secured by consumer financing receivables amounting to Rp9,818,990 as of 31 December 2023 (31 December 2022: Rp7,696,335) and finance lease receivables amounting to Rp874,859 as of 31 December 2023 (31 December 2022: Rp1,175,138).

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Fasilitas pinjaman dari beberapa bank dan bank sindikasi tersebut mensyaratkan Perseroan untuk memberikan pemberitahuan tertulis dalam hal pembagian dividen, perubahan modal dan pemegang saham, perubahan susunan direksi dan komisaris, perubahan bisnis utama, investasi dan perolehan pinjaman baru dari bank lain.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perseroan juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan seperti rasio jumlah utang bunga terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1 dan kewajiban penyampaian laporan lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perseroan telah memenuhi persyaratan dan kondisi yang tertuang di dalam perjanjian pinjaman bank.

Fasilitas-fasilitas pinjaman ini dipergunakan untuk modal kerja kegiatan usaha Perseroan.

Lihat Catatan 26b untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Lihat Catatan 29 untuk perjanjian kerjasama pembiayaan bersama dan penyaluran pemberian kredit.

15. BORROWINGS (continued)

The loan facilities from those banks and syndicated banks require the Company to provide a written notice in respect of dividend payments, changes of capital and shareholders, changes of directors and commissioners, changes of main business, investment and obtaining new loan facilities from other banks.

Under the loan agreements, the Company is also obliged to comply with financial covenants such as gearing ratio not exceeding 10:1 and other reporting obligations. As of 31 December 2023 and 2022, the Company has complied with the terms and conditions set forth in the bank loan agreement.

The loan facilities are used for the Company's working capital.

Refer to Note 26b for details of balances and transactions with related parties.

Refer to Note 29 for joint financing and credit channeling cooperation agreements.

16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF

16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS

30 Desember/December 2023				
Instrumen	Jumlah nosional mata uang asing (jumlah penuh)/ Notional amount in foreign currency (full amount)	Nilai wajar/Fair values		Instruments
		Piutang derivatif/ Derivative receivables	Utang derivatif/ Derivative payables	
Terkait nilai tukar dan suku bunga				Foreign exchange and interest rate related
Swap mata uang asing dan suku bunga				Cross currency swaps and interest rate
MUFG Bank,Ltd.,Cabang Jakarta	USD 28.500.000	12.374	-	MUFG Bank,Ltd.,Jakarta Branch
PT Bank Mizuho Indonesia	USD 50.000.000	16.559	-	PT Bank Mizuho Indonesia
		28.933	-	
		28.933	-	
31 Desember/December 2022				
Instrumen	Jumlah nosional mata uang asing (jumlah penuh)/ Notional amount in foreign currency (full amount)	Nilai wajar/Fair values		Instruments
		Piutang derivatif/ Derivative receivables	Utang derivatif/ Derivative payables	
Terkait nilai tukar dan suku bunga				Foreign exchange and interest rate related
Swap mata uang asing dan suku bunga				Cross currency swaps and interest rate
MUFG Bank,Ltd.,Cabang Jakarta	USD 28.500.000	24.534	-	MUFG Bank,Ltd.,Jakarta Branch
		24.534	-	
		24.534	-	

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF (lanjutan)

Perseroan menghadapi risiko pasar, terutama karena perubahan kurs mata uang asing dan tingkat bunga mengambang, dan menggunakan instrumen derivatif untuk lindung nilai atas risiko tersebut sebagai bagian dari manajemen risiko. Perseroan tidak memiliki atau menerbitkan instrumen derivatif untuk tujuan-tujuan diperdagangkan.

Selisih nilai wajar instrumen derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai arus kas dan laba (rugi) selisih kurs atas utang bank dalam mata uang asing neto setelah pajak dicatat pada penghasilan komprehensif lain sebesar Rp8.990 pada 31 Desember 2023 dan Rp(5.462) pada 31 Desember 2022. Saldo kerugian kumulatif yang timbul dari perubahan nilai wajar instrumen derivatif tersebut disajikan sebagai "Keuntungan (kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto" pada ekuitas masing-masing sebesar Rp2.802 dan Rp(6.188) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta

Perseroan melakukan kontrak swap mata uang dan suku bunga dengan MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

Dasar pinjaman/ Underlying loan	Nilai kontrak/ Contract value	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Jenis kontrak swap/ Type of swap contract
Bilateral Loan/Bilateral Loan	USD28.500.000	6 April/ April 2022	11 April/ April 2025	Swap mata uang dan suku bunga/ Cross currency interest rate swaps

Perseroan membayar angsuran pokok dan bunga setiap 3 (tiga) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 6,00% dan menerima dengan tingkat suku bunga SOFR Compound + 1,20% dalam USD untuk kontrak swap mata uang dan suku bunga.

PT Bank Mizuho Indonesia

Perseroan melakukan kontrak swap mata uang dan suku bunga dengan PT Bank Mizuho Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Dasar pinjaman/ Underlying loan	Nilai kontrak/ Contract value	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Jenis kontrak swap/ Type of swap contract
Bilateral loan/ Bilateral loan	USD50.000.000	8 April/ April 2022	13 Februari/ February 2026	Swap mata uang dan suku bunga/ Cross currency interest rate swaps

16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

The Company is exposed to market risks, primarily to changes in foreign currency exchange and floating interest rates, and uses derivative instruments to hedge these risks as part of its risk management activities. The Company does not hold or issue derivative instruments for trading purposes.

The fair value difference of derivative instruments designated as cash flow hedges and foreign exchange gain (loss) of bank loan denominated in foreign currency net of taxes were reported as other comprehensive income amounting to Rp8,990 in 31 December 2023 and Rp(5,462) in 31 December 2022. Cumulative losses from the changes in fair value of derivative instrument are presented as "Cumulative gain (loss) on derivative instrument for cash flow hedges - net" a in the equity amounted to Rp2,802 and Rp(6,188) as of 31 December 2023 and 2022, respectively.

MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch

The Company entered into cross currency swap contracts and interest rate swap contracts with MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch with details as follows:

The Company pays installments of principal and interest every 3 (three) months at annual fixed rate by 6.00% and receives a floating rate of SOFR Compound +1.20% in USD for cross-currency and interest rate swap.

PT Bank Mizuho Indonesia

The Company entered into cross currency swap contracts and interest rate swap contracts with PT Bank Mizuho Indonesia as follows:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF (lanjutan)

PT Bank Mizuho Indonesia

Perseroan membayar angsuran pokok dan bunga setiap 3 (tiga) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 6,98%, dan menerima dengan tingkat bunga mengambang SOFR Compound +1,08% dalam USD untuk kontrak swap mata uang dan suku bunga.

Kontrak swap mata uang dan suku bunga Perseroan telah memenuhi kriteria dan berlaku efektif sebagai lindung nilai arus kas. Oleh karenanya, nilai wajar instrumen lindung nilai disajikan pada penghasilan komprehensif lainnya di bagian ekuitas. Aset atau liabilitas terkait yang timbul dari transaksi swap tersebut disajikan pada piutang atau utang derivatif.

16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

PT Bank Mizuho Indonesia

The Company pays quarterly principal installments and interest with annual fixed rate of 6.98% and has received a floating rate of SOFR Compound +1,08% in USD for cross-currency and interest rate swap.

The Company's cross currency and interest rate swap contracts are designated as effective cash flow hedge. Therefore, the fair value of the hedging instrument is presented under other comprehensive income in the equity section. The related assets or liabilities arising from the swap transaction is presented under derivative receivables or payables.

17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

17. SECURITIES ISSUED

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I	200.000	200.000	<i>Continuing Bonds IV Phase I</i>
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II	658.000	658.000	<i>Continuing Bonds IV Phase II</i>
Obligasi Berkelanjutan V Tahap I	386.000	858.000	<i>Continuing Bonds V Phase I</i>
Obligasi Berkelanjutan V Tahap II	1.400.850	1.400.850	<i>Continuing Bonds V Phase II</i>
Obligasi Berkelanjutan V Tahap III	1.228.055	1.228.055	<i>Continuing Bonds V Phase III</i>
Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I	691.735	-	<i>Continuing Bonds VI Phase I</i>
Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II	1.131.110	-	<i>Continuing Bonds VI Phase II</i>
	5.695.750	4.344.905	
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Beban emisi yang belum diamortisasi:			<i>Unamortized issuance cost:</i>
Saldo awal	5.668	6.164	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	6.283	3.118	<i>Additions</i>
Amortisasi (lihat Catatan 22)	(3.716)	(3.614)	<i>Amortization (refer to Note 22)</i>
	8.235	5.668	
Total	5.687.515	4.339.237	Total

Surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan jatuh temponya sebagai berikut:

Securities issued based on maturity profile, are as follows:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
<u>Tahun</u>			<u>Year</u>
2023	-	472.000	2023
2024	1.773.150	1.773.150	2024
2025	1.237.440	1.237.440	2025
2026 dan sesudahnya	2.685.160	862.315	2026 and there after
	5.695.750	4.344.905	

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. SURAT BERTAHAGA YANG DITERBITKAN
(lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV

Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance
Tahap I Tahun 2019

Pada tanggal 8 Januari 2019 Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2019 ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I") dengan rincian sebagai berikut:

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap per tahun/ Fixed interest rate per annum
Seri/Series B	200.000	9,75%

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimum 60% untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, piutang pembiayaan konsumen yang dijamin adalah masing-masing sejumlah Rp101.379 dan Rp103.042, sedangkan piutang sewa pembiayaan yang dijamin adalah masing-masing sejumlah Rp18.621 dan Rp16.958 (lihat Catatan 5 dan 6). Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I.

Dalam perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perseroan kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut diatas.

PT Pefindo telah menetapkan peringkat idAA+ (Double A Plus) terhadap Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I sesuai dengan Suratnya No.RC-950/PEF-DIR/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 untuk periode 8 Oktober 2019 sampai dengan 1 Oktober 2020.

17. SECURITIES ISSUED (continued)

Continuing Bonds IV

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds IV
Phase I Year 2019

On 8 January 2019, the Company issued Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds IV Phase I Year 2019 ("Continuing Bonds IV Phase I") with details as follows:

Jatuh tempo/ Due date	Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal installment
8 Januari/ January 2024	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date

These bonds are secured by the Company's consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds IV Phase I. As of 31 December 2023 and 2022, the amount of consumer financing receivables that are pledged as security for bonds payable is Rp101,379 and Rp103,042, respectively, while finance lease receivables that are pledged is Rp18,621 and Rp16,958, respectively (refer to Note 5 and 6). If the amount of consumer financing receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Rakyat Indonesia Tbk as trustee for Continuing Bonds IV Phase I.

The trustee agreement provides several negative covenants to the Company, among others, collateral with fiduciary transfer of consumer financing receivables and debt to equity ratio not to exceed 10:1. Moreover, during the year that the bond principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, merge unless performed on the same business and to sell or assign more than 50% of the Company's asset, except for the Company's normal business transactions.

The Company has complied with the covenants as required by the trustee agreements.

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds IV Phase I based on its report No.RC-950/PEF-DIR/X/2019 dated 9 October 2019 for the period 8 October 2019 until 1 October 2020.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**17. SURAT BERTAHAP YANG DITERBITKAN
(lanjutan)**

Obligasi Berkelanjutan IV (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance
Tahap I Tahun 2019 (lanjutan)

PT Pefindo telah menetapkan kembali peringkat idAAA (Triple A) terhadap Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I terakhir sesuai dengan suratnya No. RC-236/PEF-DIR/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 untuk periode 16 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024.

Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance
Tahap II Tahun 2019

Pada tanggal 26 Juli 2019 Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019 ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II") dengan rincian sebagai berikut:

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap per tahun/ Fixed interest rate per annum
Seri/Series B	658.000	9,50%

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimum 60% untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, piutang pembiayaan konsumen yang dijamin adalah masing-masing sejumlah Rp325.965 dan Rp282.203, sedangkan piutang sewa pembiayaan yang dijamin adalah masing-masing sejumlah Rp68.835 dan Rp112.597 (lihat Catatan 5 dan 6). Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II.

Dalam perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perseroan kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

17. SECURITIES ISSUED (continued)

Continuing Bonds IV (continued)

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds IV
Phase I Year 2019 (continued)

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAAA (Triple A) of Continuing Bonds IV Phase I with the latest based on its report No. RC-236/PEF-DIR/III/2023 dated 16 March 2023 for the period 16 March 2023 until 1 March 2024.

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds IV
Phase II Year 2019

On 26 July 2019, the Company issued Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds IV Phase II Year 2019 ("Continuing Bonds IV Phase II") with details as follows:

Jatuh tempo/ Due date	Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal installment
26 Juli/ July 2024	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date

These bonds are secured by the Company's consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds IV Phase II. As of 31 December 2023 and 2022, the amount of consumer financing receivables that are pledged as security for bonds payable is Rp325,965 and Rp282,203, respectively, while the amount of finance lease receivables that are pledged is Rp68,835 and Rp112,597, respectively (refer to Note 5 and 6). If the amount of consumer financing receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as trustee for Continuing Bonds IV Phase II.

The trustee agreement provides several negative covenants to the Company, among others, collateral with fiduciary transfer of consumer financing receivables and debt to equity ratio not to exceed 10:1. Moreover, during the year that the bond principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, merge unless performed on the same business and to sell or assign more than 50% of the Company's asset, except for the Company's normal business transactions.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. SURAT BERTAHAP YANG DITERBITKAN
(lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance
Tahap II Tahun 2019 (lanjutan)

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut diatas.

PT Pefindo telah menetapkan peringkat idAA+ (Double A Plus) terhadap Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sesuai dengan Suratnya No.RC-950/PEF-DIR/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 untuk periode 8 Oktober 2019 sampai dengan 1 Oktober 2020.

PT Pefindo telah menetapkan kembali peringkat idAAA (Triple A) terhadap Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II terakhir sesuai dengan suratnya No. RC-236/PEF-DIR/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 untuk periode 16 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024.

Obligasi Berkelanjutan V

Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance
Tahap I Tahun 2020

Pada tanggal 13 Agustus 2020 Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 ("Obligasi Berkelanjutan V Tahap I") dengan rincian sebagai berikut:

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap per tahun/ Fixed interest rate per annum
Seri/Series A	472.000	8,00%
Seri/Series B	386.000	8,60%

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimum 60% untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, piutang pembiayaan konsumen yang dijamin masing-masing adalah sejumlah Rp231.600 dan Rp353.039, sedangkan piutang sewa pembiayaan yang dijamin masing-masing adalah sejumlah RpNihil dan Rp161.762 (lihat Catatan 5 dan 6)

Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.

17. SECURITIES ISSUED (continued)

Continuing Bonds IV (continued)

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds IV
Phase II Year 2019 (continued)

The Company has complied with the covenants as required by the above trustee agreements.

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds IV Phase II based on its report No.RC-950/PEF-DIR/X/2019 dated 9 October 2019 for the period 8 October 2019 until 1 October 2020.

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAAA (Triple A) of Continuing Bonds IV Phase II with the latest based on its report No. RC-236/PEF-DIR/III/2023 dated 16 March 2023 for the period 16 March 2023 until 1 March 2024.

Continuing Bonds V

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds V
Phase I Year 2020

On 13 August 2020, the Company issued Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds V Phase I Year 2020 ("Continuing Bonds V Phase I") with details as follows:

Jatuh tempo/ Due date	Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal installment
13 Agustus/ August 2023	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
13 Agustus/ August 2025	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date

These bonds are secured by the Company's consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds V Phase I. As of 31 December 2023 and 2022, the amount of consumer financing receivables that are pledged as security for bonds payable is Rp231,600 and Rp353,039, respectively, while finance lease receivables that are pledged is RpNil and Rp161,762, respectively (refer to Note 5 and 6).

If the amount of consumer financing receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as trustee for Continuing Bonds V Phase I.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. SURAT BERTAHAP YANG DITERBITKAN
(lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan V (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance
Tahap I Tahun 2020 (lanjutan)

Dalam perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perseroan kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut diatas.

PT Pefindo telah menetapkan peringkat idAA+ (Double A Plus) terhadap Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sesuai dengan suratnya No. RC-537/PEF-DIR/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 untuk periode 8 Mei 2020 sampai dengan 1 Mei 2021.

PT Pefindo telah menetapkan kembali peringkat idAAA (Triple A) terhadap Obligasi Berkelanjutan V Tahap I terakhir sesuai dengan suratnya No. RC-236/PEF-DIR/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 untuk periode 16 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024.

Perseroan telah melunasi utang obligasi Berkelanjutan V Tahap I seri A sebesar Rp472.000 pada tanggal 10 Agustus 2023.

Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance
Tahap II Tahun 2021

Pada tanggal 20 Mei 2021 Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2021 ("Obligasi Berkelanjutan V Tahap II") dengan rincian sebagai berikut:

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap per tahun/ Fixed interest rate per annum	Jatuh tempo/ Due date	Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal installment
Seri/Series A	915.150	7,00%	20 Mei/ May 2024	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
Seri/Series B	485.700	7,65%	20 Mei/ May 2026	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date

17. SECURITIES ISSUED (continued)

Continuing Bonds V (Continued)

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds V
Phase I Year 2020 (continued)

The trustee agreement provides several negative covenants to the Company, among others, collateral with fiduciary transfer of consumer financing receivables and debt to equity ratio not to exceed 10:1. Moreover, during the year that the bond principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, merge unless performed on the same business and to sell or assign more than 50% of the Company's asset, except for the Company's normal business transactions.

The Company has complied with the covenants on the trustee agreements

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds V Phase I based on its report No. RC-537/PEF-DIR/V/2020 dated 8 May 2020 for the period 8 May 2020 until 1 May 2021.

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAAA (Triple A) of Continuing Bonds V Phase I with the latest based on its report No. RC-236/PEF-DIR/III/2023 dated 16 March 2023 for the period 16 March 2023 until 1 March 2024.

The company has paid off continuing Bonds V Phase I serie A in the amount Rp472,000 on 10 August 2023.

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds V
Phase II Year 2021

On 20 May 2021, the Company issued Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds V Phase II Year 2021 ("Continuing Bonds V Phase II") with details as follows:

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**17. SURAT BERTAHAP YANG DITERBITKAN
(lanjutan)**

Obligasi Berkelanjutan V (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance
Tahap II Tahun 2021 (lanjutan)

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimum 60% untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap II dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan adalah masing-masing sejumlah Rp728.320 dan Rp596.304 sedangkan piutang sewa pembiayaan yang dijaminkan adalah masing-masing sejumlah Rp112.190 dan Rp244.206 (lihat Catatan 5 dan 6).

Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap II.

Dalam perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perseroan kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut diatas.

PT Pefindo telah menetapkan peringkat idAA+ (Double A Plus) terhadap Obligasi Berkelanjutan V Tahap II sesuai dengan suratnya No. RC-498/PEF-DIR/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 untuk periode 6 Mei 2021 sampai dengan 1 Mei 2022.

PT Pefindo telah menetapkan kembali peringkat idAAA (Triple A) terhadap Obligasi Berkelanjutan V Tahap II terakhir sesuai dengan suratnya No. RC-236/PEF-DIR/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 untuk periode 16 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024.

17. SECURITIES ISSUED (continued)

Continuing Bonds V (Continued)

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds V
Phase II Year 2021 (continued)

These bonds are secured by the Company's consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds V Phase II. As of 31 December 2023 and 2022, the amount of consumer financing receivables that are pledged as security for bonds payable is Rp728,320 and Rp596,304, respectively, while the amount of finance lease receivables that are pledged is Rp112,190 and Rp244,206, respectively (refer to Note 5 and 6).

If the amount of consumer financing receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as trustee for Continuing Bonds V Phase II.

The trustee agreement provides several negative covenants to the Company, among others, collateral with fiduciary transfer of consumer financing receivables and debt to equity ratio not to exceed 10:1. Moreover, during the year that the bond principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, merge unless performed on the same business and to sell or assign more than 50% of the Company's asset, except for the Company's normal business transactions.

The Company has complied with the covenants as required by the above trustee agreements..

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds V Phase II based on its report No. RC-498/PEF-DIR/V/2021 dated 6 May 2021 for the period 6 May 2021 until 1 May 2022.

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAAA (Triple A) of Continuing Bonds V Phase II with the latest based on its report No. RC-236/PEF-DIR/III/2023 dated 16 March 2023 for the period 16 March 2023 until 1 March 2024.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. SURAT BERTAHAP YANG DITERBITKAN
(lanjutan)

17. SECURITIES ISSUED (continued)

Obligasi Berkelanjutan V (lanjutan)

Continuing Bonds V (Continued)

Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance
Tahap III Tahun 2022

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds V
Phase III Year 2022

Pada tanggal 23 Februari 2022, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2022 ("Obligasi Berkelanjutan V Tahap III") dengan rincian sebagai berikut:

On 23 February 2022, the Company issued Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds V Phase III Year 2022 ("Continuing Bonds V Phase III") with details as follows:

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap per tahun/ Fixed interest rate per annum	Jatuh tempo/ Due date	Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal installment
Seri/Series A	851.440	5,90%	23 Februari/ February 2025	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
Seri/Series B	376.615	6,75%	23 Februari/ February 2027	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimum 60% untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap III dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, piutang pembiayaan konsumen yang dijamin adalah sejumlah Rp612.911 dan Rp383.531 sedangkan piutang sewa pembiayaan yang dijamin adalah sejumlah Rp123.922 dan Rp353.302 (lihat Catatan 5 dan 6).

These bonds are secured by the Company's consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds V Phase III. As of 31 December 2023 and 2022, the amount of consumer financing receivables that are pledged as security for bonds payable is Rp612,911 and Rp383,531 while the amount of finance lease receivables that are pledged is Rp123,922 and Rp353,302 (refer to Note 5 and 6).

Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap III.

If the amount of consumer financing receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as trustee for Continuing Bonds V Phase III.

Dalam perjanjian perwaliamentan juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perseroan kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

The trustee agreement provides several negative covenants to the Company, among others, collateral with fiduciary transfer of consumer financing receivables and debt to equity ratio not to exceed 10:1. Moreover, during the year that the bond principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, merge unless performed on the same business and to sell or assign more than 50% of the Company's asset, except for the Company's normal business transactions.

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut diatas.

The Company has complied with the covenants as required by the trustee agreements.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. SURAT BERTAHAP YANG DITERBITKAN
(lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan V (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance
Tahap III Tahun 2022 (lanjutan)

PT Pefindo telah menetapkan peringkat idAA+ (Double A Plus) terhadap Obligasi Berkelanjutan V Tahap III sesuai dengan suratnya No. RC-498/PEF-DIR/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 untuk periode 6 Mei 2021 sampai dengan 1 Mei 2022.

PT Pefindo telah menetapkan kembali peringkat idAAA (Triple A) terhadap Obligasi Berkelanjutan V Tahap III terakhir sesuai dengan suratnya No. RC-236/PEF-DIR/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 untuk periode 16 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024.

Obligasi Berkelanjutan VI

Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance
Tahap I Tahun 2023

Pada tanggal 11 Juli 2023, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2023 ("Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I") dengan rincian sebagai berikut:

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap per tahun/ Fixed interest rate per annum
Seri/Series A	439.660	6.00%
Seri/Series B	252.075	6.25%

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimum 60% untuk Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 31 Desember 2023, piutang pembiayaan konsumen yang dijamin adalah sejumlah Rp235.160 sedangkan piutang sewa pembiayaan yang dijamin adalah sejumlah Rp179.881 (lihat Catatan 5 dan 6).

Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I.

17. SECURITIES ISSUED (continued)

Continuing Bonds V (Continued)

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds V
Phase III Year 2022 (continued)

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A Plus) of Continuing Bonds V Phase III based on its report No. RC-498/PEF-DIR/V/2021 dated 6 May 2021 for the period 6 May 2021 until 1 May 2022.

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAAA (Triple A) of Continuing Bonds V Phase III with the latest based on its report No. RC-236/PEF-DIR/III/2023 dated 16 March 2023 for the period 16 March 2023 until 1 March 2024.

Continuing Bonds VI

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds VI
Phase I Year 2023

On 11 July 2023, the Company issued Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds VI Phase I Year 2023 ("Continuing Bonds V Phase I") with details as follows:

Jatuh tempo/ Due date	Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal installment
11 Juli/ July 2026	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
11 Juli/ July 2028	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date

These bonds are secured by the Company's consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds VI Phase I. As of 31 December 2023, the amount of consumer financing receivables that are pledged as security for bonds payable is Rp235,160 while the amount of finance lease receivables that are pledged is Rp179,881 (refer to Note 5 and 6).

If the amount of consumer financing receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as trustee for Continuing Bonds VI Phase I.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. SURAT BERTAHAP YANG DITERBITKAN
(lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan VI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance
Tahap I Tahun 2023 (lanjutan)

Dalam perjanjian perwalianan juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perseroan kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut diatas.

PT Pefindo telah menetapkan peringkat idAAA (Triple A) terhadap Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I sesuai dengan suratnya No. RC-235/PEF-DIR/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 untuk periode 16 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024.

Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance
Tahap II Tahun 2023

Pada tanggal 27 September 2023 Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2023 ("Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II") dengan rincian sebagai berikut:

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap per tahun/ Fixed interest rate per annum
Seri/Series A	804.175	6.50%
Seri/Series B	326.935	6.75%

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimum 60% untuk Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 31 Desember 2023, piutang pembiayaan konsumen yang dijamin adalah sejumlah Rp419.035 sedangkan piutang sewa pembiayaan yang dijamin adalah sejumlah Rp259.631 (lihat Catatan 5 dan 6).

17. SECURITIES ISSUED (continued)

Continuing Bonds VI (Continued)

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds VI
Phase I Year 2023 (continued)

The trustee agreement provides several negative covenants to the Company, among others, collateral with fiduciary transfer of consumer financing receivables and debt to equity ratio not to exceed 10:1. Moreover, during the year that the bond principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, merge unless performed on the same business and to sell or assign more than 50% of the Company's asset, except for the Company's normal business transactions.

The Company has complied with the covenants as required by the trustee agreements.

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAAA (Triple A) of Continuing Bonds VI Phase I based on its report No. RC-235/PEF-DIR/III/2023 dated 16 March 2023 for the period 16 March 2023 until 1 March 2024.

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds VI
Phase II Year 2023

On 27 September 2023, the Company issued Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds VI Phase II Year 2023 ("Continuing Bonds V Phase II") with details as follows:

Jatuh tempo/ Due date	Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal installment
27 September/ September 2026	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
27 September/ September 2028	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date

These bonds are secured by the Company's consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds VI Phase II As of 31 December 2023, the amount of consumer financing receivables that are pledged as security for bonds payable is Rp419,035 while the amount of finance lease receivables that are pledged is Rp259,631 (refer to Note 5 and 6).

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. SURAT BERTAHAP YANG DITERBITKAN
(lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan VI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance
Tahap II Tahun 2023 (lanjutan)

Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II.

Dalam perjanjian perwalianamanatan juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perseroan kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut diatas.

PT Pefindo telah menetapkan peringkat idAAA (Triple A) terhadap Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II sesuai dengan suratnya No. RC-235/PEF-DIR/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 untuk periode 16 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024.

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Liabilitas imbalan kerja terdiri dari:

	<u>31 Desember/ December 2023</u>	<u>31 Desember/ December 2022</u>
Liabilitas program imbalan pasti	217.954	150.091
Liabilitas jangka panjang lainnya	56.592	44.849
Total	<u>274.546</u>	<u>194.940</u>

17. SECURITIES ISSUED (continued)

Continuing Bonds VI (Continued)

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds VI
Phase II Year 2023 (continued)

If the amount of consumer financing receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as trustee for Continuing Bonds VI Phase II.

The trustee agreement provides several negative covenants to the Company, among others, collateral with fiduciary transfer of consumer financing receivables and debt to equity ratio not to exceed 10:1. Moreover, during the year that the bond principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, merge unless performed on the same business and to sell or assign more than 50% of the Company's asset, except for the Company's normal business transactions.

The Company has complied with the covenants as required by the trustee agreements.

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAAA (Triple A) of Continuing Bonds VI Phase II based on its report No. RC-235/PEF-DIR/III/2023 dated 16 March 2023 for the period 16 March 2023 until 1 March 2024.

18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

Employee benefits liabilities consist of:

Defined benefit plan liabilities
 Other long-term benefit liabilities

Total

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)

18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

a. Liabilitas program imbalan pasti

a. Defined benefit plan liabilities

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk program imbalan pasti adalah sebagai berikut:

The amounts recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income for defined benefit plan, are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2023	2022	
Biaya jasa kini	23.444	17.857	Current service costs
Biaya bunga	10.636	9.120	Interest costs
Biaya jasa lalu	26.549	(18.885)	Past service costs
	60.629	8.092	
Biaya pesangon pemutusan hubungan kerja	2.080	6.685	Termination expense
Total	62.709	14.777	Total

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan untuk program imbalan pasti adalah sebagai berikut:

The movements in employee benefits obligation in the statement of financial position for defined benefit plan, are as follows:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Saldo awal	150.091	148.413	Beginning balance
Penyisihan pada laba rugi	62.709	14.777	Provision in profit or loss
Penyisihan pada penghasilan komprehensif lain	10.502	(3.070)	Provision in other comprehensive income
Pembayaran tahun berjalan	(5.348)	(10.029)	Payment during the year
Saldo akhir	217.954	150.091	Ending balance

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk program imbalan pasti adalah sebagai berikut:

The movements of present value of employee benefit obligation presented in the statement of financial position for defined benefit plan, are as follows:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Saldo awal	150.091	148.413	Beginning balance
Biaya jasa kini	23.444	17.857	Current service costs
Biaya bunga	10.636	9.120	Interest costs
Biaya jasa lalu	26.549	(18.885)	Past service costs
Pembayaran tahun berjalan	(5.348)	(10.029)	Payments during the year
Biaya pesangon pemutusan hubungan kerja	2.080	6.685	Termination
Kerugian (keuntungan) pada kewajiban aktuarial:			Actuarial losses (gains) on obligation:
Perbedaan historis	2.302	695	Experience adjustment
Asumsi keuangan	8.200	(3.765)	Financial assumption
Saldo akhir	217.954	150.091	Ending balance

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**18. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)**

**18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(continued)**

a. Liabilitas program imbalan pasti (lanjutan)

a. Defined benefit plan liabilities (continued)

Mutasi kerugian aktuarial yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain untuk program imbalan pasti, bruto pajak tangguhan sebagai berikut:

The movements in the balance of actuarial loss charged to other comprehensive income for defined benefit plan, gross deferred tax, are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2023	2022	
Saldo awal	38.714	41.784	Beginning balance
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain	10.502	(3.070)	Actuarial losses (gains) charged to other comprehensive income
Saldo akhir	49.216	38.714	Ending balance

b. Liabilitas jangka panjang lainnya

b. Other long-term liabilities

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk liabilitas jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

The amounts recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income for other long-term liabilities, are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2023	2022	
Biaya jasa kini	6.521	5.668	Current service costs
Biaya bunga	4.688	-	Interest costs
Biaya jasa lalu	6.797	39.181	Past service costs
	18.006	44.849	
Biaya pesangon pemutusan hubungan kerja	(6.263)	-	Termination expense
Total	11.743	44.849	Total

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan untuk liabilitas jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

The movements in employee benefits obligation in the statement of financial position for other long-term liabilities, are as follows:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
	Saldo awal	44.849	
Penyisihan pada laba rugi	18.006	44.849	Provision in profit or loss
Pembayaran tahun berjalan	(6.263)	-	Payment during the year
Saldo akhir	56.592	44.849	Ending balance

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)

b. Liabilitas jangka panjang lainnya (lanjutan)

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk liabilitas jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Saldo awal	44.849	-	<i>Beginning balance</i>
Biaya jasa kini	6.521	5.668	<i>Current service costs</i>
Biaya bunga	4.688	-	<i>Interest costs</i>
Biaya jasa lalu	6.797	39.181	<i>Past service costs</i>
	62.855	44.849	
Biaya pesangon pemutusan hubungan kerja	(6.263)	-	<i>Termination expense</i>
Saldo akhir	56.592	44.849	<i>Ending balance</i>

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 didasarkan atas estimasi perhitungan aktuarial yang tercantum pada laporan Steven & Mourits dengan menggunakan metode *projected unit credit* dalam laporan aktuariannya tanggal 2 Januari 2024 dan 2 Januari 2023. Asumsi-asumsi dasar yang digunakan aktuaris independen adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Tingkat diskonto tetap - karyawan permanen	6,70% per tahun/ <i>per annum</i>	7,25% per tahun/ <i>per annum</i>	<i>Discount rate - permanent employees</i>
Tingkat diskonto tetap - karyawan kontrak	6,40% per tahun/ <i>per annum</i>	3,25% per tahun/ <i>per annum</i>	<i>Discount rate - contract employees</i>
Tingkat kenaikan gaji	7% per tahun/ <i>per annum</i>	7% per tahun/ <i>per annum</i>	<i>Salary increment rate</i>
Tingkat kematian	TMI 4	TMI 4	<i>Rate of mortality</i>
Tingkat cacat	10% dari/ <i>from</i> TMI 4	10% dari/ <i>from</i> TMI 4	<i>Rate of disability</i>
Tingkat pengunduran diri	7% per tahun pada usia sampai dengan 40 tahun dan berkurang hingga 0,00% pada usia 55 tahun/ <i>7% per annum up to 40 years old and decrease linearly up to 0.00% at 55 years old</i>	7% per tahun pada usia sampai dengan 40 tahun dan berkurang hingga 0,00% pada usia 55 tahun/ <i>7% per annum up to 40 years old and decrease linearly up to 0.00% at 55 years old</i>	<i>Rate of resignations</i>
Tingkat pensiun	Karyawan yang bergabung sejak 1 September 2021, usia pensiun 56 tahun atau 46 tahun berdasarkan level/ <i>Employee who join since 1 September 2021, normal retirement age 56 years or 46 years based on level.</i> Karyawan yang bergabung sebelum 1 September 2021, usia pensiun 55 tahun atau 56 tahun berdasarkan level/ <i>Employee who join before 1 September 2021, normal retirement age 55 years or 56 years based on level.</i>	Karyawan yang bergabung sejak 1 September 2021, usia pensiun 56 tahun atau 46 tahun berdasarkan level/ <i>Employee who join since 1 September 2021, normal retirement age 56 years or 46 years based on level.</i> Karyawan yang bergabung sebelum 1 September 2021, usia pensiun 55 tahun atau 56 tahun berdasarkan level/ <i>Employee who join before 1 September 2021, normal retirement age 55 years or 56 years based on level.</i>	<i>Rate of retirements</i>

b. Other long-term liabilities (continued)

The movements of present value of employee benefit obligation presented in the statement of financial position for other-long term liabilities, are as follows:

The employee benefits obligation as of 31 December 2023 and 2022 are based on the estimated actuarial calculation of Steven & Mourits using the projected unit credit method in its report dated 2 January 2024 and 2 January 2023, respectively. The principal actuarial assumptions used by the independent actuary were as follows:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)

18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(continued)

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji sebesar 1%, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap nilai kewajiban imbalan kerja karyawan: (tidak diaudit)

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in discount rates and salary increment rate of 1%, with all other variables held constant, of the present value of employee benefits obligation: (unaudited)

		31 Desember/December 2023				
		Tingkat diskonto/ Discount rate		Tingkat kenaikan gaji/ Salary increment rate		
		Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Dampak pada nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan		(20.847)	23.591	25.166	(22.490)	Effect on present value of employee benefit obligation
		31 Desember/December 2022				
		Tingkat diskonto/ Discount rate		Tingkat kenaikan gaji/ Salary increment rate		
		Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Dampak pada nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan		(14.714)	16.640	17.086	(15.373)	Effect on present value of employee benefit obligation

Analisa profil jatuh tempo pembayaran imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022: (tidak diaudit)

The maturity profile analysis of the employee benefits payments as of 31 December 2023 and 2022, is as follows: (unaudited)

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
1 tahun	20.939	13.162	1 years
2 - 5 tahun	89.957	70.544	2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	508.988	361.789	More than 5 years
Saldo akhir	619.884	445.495	Ending balance

Durasi rata-rata tertimbang dari nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan untuk karyawan permanen di akhir periode pelaporan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah 12,53 dan 12,48 tahun (tidak diaudit).

The weighted average duration of the present value of employee benefits obligation for permanent employees at the end of reporting period as of 31 December 2023 and 2022 is 12.53 and 12.48 years, respectively (unaudited).

Durasi rata-rata tertimbang dari nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan untuk karyawan kontrak di akhir periode pelaporan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah 0,67 dan 0,72 tahun (tidak diaudit).

The weighted average duration of the present value of employee benefits obligation for contract employees at the end of reporting period as of 31 December 2023 and 2022 is 0.67 and 0.72 years, respectively (unaudited).

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)

Pada bulan April 2022, DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia) menerbitkan materi penjelasan melalui siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 24: Imbalan Kerja yang diadopsi dari IAS 19 *Employee Benefits*. Materi penjelasan tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam IFRS *Intepretation Committee* ("IFRIC") *Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service* (IAS 19). Perseroan telah menerapkan materi penjelasan tersebut dan dengan demikian merubah kebijakan akuntansi menyangkut atribusi imbalan kerja pada periode jasa. Dampak dari penerapan perubahan kebijakan akuntansi tersebut terhadap laporan keuangan 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut tidak signifikan, oleh karena itu, Perseroan membukukan dampak dari perubahan kebijakan akuntansi di dalam laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

19. MODAL SAHAM

Komposisi pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai/ Value
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.275.000.000	127.500
PT Tunas Ridean ^{a)}	1.225.000.000	122.500
	2.500.000.000	250.000

^{a)} Telah *delisting* dari Bursa Efek Indonesia efektif 6 April 2023

20. PENGGUNAAN LABA

Cadangan wajib telah dibentuk sesuai dengan Undang-undang No. 40/2007 mengenai Perseroan Terbatas, yang mengharuskan perseroan Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan wajib untuk ditentukan penggunaannya sebesar sekurang-kurangnya 20,00% dari jumlah modal Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk mencapai cadangan wajib minimum tersebut. Saldo cadangan wajib pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp50.000.

18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(continued)

In April 2022, DSAK IAI (Institute of Indonesia Chartered Accountants' Accounting Standard Board) issued an explanatory material through a press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with PSAK 24: *Imbalan Kerja* which was adopted from IAS 19 *Employee Benefits*. The explanatory material conveyed the information that the fact pattern of the pension program based on the Labor Law currently enacted in Indonesia is similar to those responded and concluded in the IFRS *Intepretation Committee* (IFRIC) *Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service* (IAS 19). The Company has adopted the said explanatory material and accordingly changed its accounting policy regarding attribution of benefits to periods of service. The impact of the change of the accounting policy was insignificant to the financial statements as of 31 December 2021 and for the year then ended, therefore, the Company recognised the impact of the change in accounting policy to the financial statements as of 31 December 2022 and for the year then ended.

19. SHARE CAPITAL

The composition of the Company's shareholders as of 31 December 2023 and 2022, is as follows:

Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)	Shareholders
51,00	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
49,00	PT Tunas Ridean ^{a)}
100,00	

^{a)} Has been delisted from Indonesia Stock Exchange effective 6 April 2023

20. PROFIT DISTRIBUTIONS

A general reserve has been established in accordance with the Indonesian Limited Company Law No. 40/2007 which requires Indonesian companies to set up a general reserve amounting to at least 20.00% of the Company's issued and paid up share capital. There is no set period of time over which this amount should be accumulated. The balance of the general reserve as of 31 December 2023 and 2022 is Rp50,000.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. PENGGUNAAN LABA (lanjutan)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Juni 2023 memutuskan untuk menyetujui pembagian dividen final tahun 2022 sejumlah Rp225.064 dari laba neto tahun 2022.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 17 Juni 2022 memutuskan untuk menyetujui pembagian dividen final tahun 2021 sejumlah Rp49.175 dari laba neto tahun 2021.

21. PENDAPATAN

a. Pembiayaan konsumen

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December	
	2023	2022
Pihak ketiga		
Pendapatan		
pembiayaan konsumen	1.890.945	1.463.045
Pendapatan administrasi dari		
pembiayaan bersama	846.890	855.909
Amortisasi biaya transaksi dan		
<i>yield enhancing income</i>	251.448	110.832
Pendapatan dari piutang		
yang mengalami penurunan nilai	10.260	6.451
	<u>2.999.543</u>	<u>2.436.237</u>
Pihak berelasi		
Realisasi pendapatan		
pembiayaan konsumen	807	767
	<u>3.000.350</u>	<u>2.437.004</u>

Lihat Catatan 26c untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

b. Sewa pembiayaan

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December	
	2023	2022
Pihak ketiga		
Pendapatan		
sewa pembiayaan	656.861	604.570
Amortisasi biaya transaksi dan		
<i>yield enhancing income</i>	(7.129)	(49.080)
Pendapatan administrasi dari		
pembiayaan bersama	3.019	10.039
	<u>652.751</u>	<u>565.529</u>

20. PROFIT DISTRIBUTIONS (continued)

The Annual General Shareholder Meeting on 28 June 2023 resolved to approve the declaration of 2022 final dividends amounting to Rp225,064 from the 2022 net income.

The Annual General Shareholder Meeting on 17 June 2022 resolved to approve the declaration of 2021 final dividends amounting to Rp49,175 from the 2021 net income.

21. REVENUE

a. Consumer financing

Third parties
Consumer financing income
Administration income from joint income
Amortization of transaction cost and yield enhancing income
Income from impaired asset
Related parties
Realized consumer financing income

Refer to Note 26c for details of balances and transactions with related parties.

b. Finance lease

Third parties
Financial lease income
Amortization of transaction cost and yield enhancing income
Administration income from joint financing

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. PENDAPATAN (lanjutan)

c. Anjak piutang

21. REVENUE (continued)

c. Factoring

Tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember/
Year ended 31 December

	2023	2022	
Pihak ketiga			Third parties
Pendapatan anjak piutang	909	9.715	Financial factoring income

d. Simpanan bank

d. Deposit in bank

Tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember/
Year ended 31 December

	2023	2022	
Pihak ketiga			Third parties
Rekening koran	943	633	Current accounts
Pihak berelasi			Related parties
Deposito berjangka dan rekening koran	16.191	14.530	Time deposits and current accounts
	17.134	15.163	

Lihat Catatan 26c untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 26c for details of balances and transactions with related parties.

e. Lain-lain – neto

e. Others - net

Tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember/
Year ended 31 December

	2023	2022	
Pihak ketiga			Third parties
Pendapatan administrasi akseptasi	320.302	266.025	Acceptance administration income
Komisi asuransi	263.666	223.007	Insurance commissions
Penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan	179.645	152.667	Recovery from written off receivables
Pendapatan penalti	148.794	134.027	Penalty income
Pendapatan penagihan	40.134	49.206	Collection income
Lain-lain	129.207	78.601	Others
	1.081.748	903.533	
Pihak berelasi			Related parties
Pendapatan administrasi akseptasi	8	88	Acceptance administration income
Pendapatan jasa pengurusan pembiayaan	-	476	Financing management services income
	8	564	
	1.081.756	904.097	

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. PENDAPATAN (lanjutan)

e. Lain-lain – neto (lanjutan)

Komisi asuransi merupakan komisi yang diterima dari perusahaan asuransi terkait penutupan asuransi atas kegiatan pembiayaan konsumen. Pendapatan administrasi akseptasi merupakan pendapatan yang diterima Perseroan sehubungan dengan kepengurusan administrasi penerimaan asuransi. Utang kepada perusahaan asuransi dicatat sebagai utang usaha di laporan posisi keuangan (lihat Catatan 12).

Lain-lain merupakan pendapatan dari pengembalian premi asuransi atas kendaraan yang telah dilelang, administrasi dari pendaftaran lelang, dan administrasi dari pembayaran angsuran melalui loket pembayaran.

Lihat Catatan 26c untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

21. REVENUE (continued)

e. Others – net (continued)

Insurance commissions represent commissions from insurance companies in relation to insurance coverage for consumer financing activities. Acceptance administration income represents income received by the Company in relation to handling the administrative insurance acceptance. The related payables to insurance companies are recorded as trade payables in the statement of financial position (refer to Note 12).

Others represent income for refund of insurance premium for the auctioned vehicles, administration from auction registration, and administration from installment payment via payment point.

Refer to Note 26c for details of balances and transactions with related parties.

22. BEBAN KEUANGAN

22. FINANCE CHARGES

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December	
	2023	2022
Pihak ketiga		
Bunga pinjaman yang diterima	921.592	683.340
Bunga utang obligasi	354.777	397.921
Administrasi bank dan provisi bank	67.902	59.561
Amortisasi biaya emisi		
Utang obligasi (lihat Catatan 17)	3.716	3.614
Laba (rugi) selisih kurs	591	(166)
Lain-lain	2.584	3.936
	<u>1.351.162</u>	<u>1.148.206</u>
Pihak berelasi		
Bunga pinjaman yang diterima	156.527	98.974
Bunga liabilitas sewa	2.476	2.392
	<u>159.003</u>	<u>101.366</u>
	<u>1.510.165</u>	<u>1.249.572</u>

Third parties
Interest on borrowings
Interest on bonds payable
Bank administration and bank provision
Amortization of bonds payable
issuance cost (refer to Note 17)
Forex gain (loss)
Others

Related parties
Interest on borrowings
Interest on lease liabilities

Lihat Catatan 26d untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 26d for details of balances and transactions with related parties.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN

23. SALARIES AND BENEFITS EXPENSES

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2023	2022	
Pihak ketiga			Third parties
Gaji dan tunjangan	698.736	741.543	Salaries and allowances
Imbalan pasca kerja karyawan	62.841	49.597	Post employment benefits
Biaya pesangon	5.348	10.029	Termination expense
Biaya imbalan jangka panjang lainnya	6.263	-	Other long-term benefits
	<u>773.188</u>	<u>801.169</u>	
Pihak berelasi			Related parties
Gaji dan tunjangan	19.653	16.723	Salaries and allowances
Tantiem	9.353	5.514	Tantiem
	<u>29.006</u>	<u>22.237</u>	
	<u>802.194</u>	<u>823.406</u>	

Lihat Catatan 26d untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 26d for details of balances and transactions with related parties.

24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

24. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December		
	2023	2022	
Pihak ketiga			Third parties
Biaya penagihan	112.067	112.693	Collection fee
Penyusutan aset tetap (lihat Catatan 10)	41.383	34.582	Depreciation of fixed assets (refer to Note 10)
Perbaikan dan pemeliharaan	31.421	24.617	Repairs and maintenance
Penyusutan aset hak guna (lihat Catatan 10)	26.722	21.544	Depreciation of right-of-use assets (refer to Note 10)
Jasa pihak ketiga	20.954	23.595	Third parties service
Perjalanan dinas	19.334	13.224	Travelling
Komunikasi	15.192	14.267	Communications
Iuran OJK	10.710	10.731	OJK fees
Keamanan	9.317	9.013	Security
Rekrutmen dan pelatihan	7.826	11.918	Recruitment and training
Jamuan bisnis	7.804	5.190	Corporate entertainment
Listrik dan air	6.947	6.105	Utilities
Jasa profesional	5.973	7.512	Professional fees
Alat tulis dan cetakan	5.613	4.829	Stationaries and printings
Sewa	3.252	3.368	Rent
Lain-lain	18.097	18.521	Others
Total	<u>342.612</u>	<u>321.709</u>	Total
Pihak berelasi			Related parties
Sewa	7.224	5.727	Rent
Total	<u>349.836</u>	<u>327.436</u>	Total

Lain-lain merupakan beban perijinan, piknik perayaan, iklan, marketing, asuransi, sumbangan, publikasi, ekspedisi, koran dan majalah.

Others represent legal, corporate event, advertising, marketing, insurance expenses, donation, publication, expedition, newspaper and magazine.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. LABA PER SAHAM

25. EARNINGS PER SHARE

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2023	2022	
Laba tahun berjalan	1.161.101	750.213	<i>Income for the year</i>
Jumlah saham biasa yang beredar (dalam ribuan) (lihat Catatan 19)	2.500.000	2.500.000	<i>Number of ordinary shares outstanding (in thousands) (refer to Note 19)</i>
Laba per saham dasar (nilai penuh)	464	300	<i>Basic earnings per share (full amount)</i>

26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

26. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Sifat hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of relationships with related parties are as follows:

Pihak berelasi/Related parties

**Sifat hubungan dengan pihak berelasi/
Nature of relationship with the related parties**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Tunas Ridean
PT Bumi Daya Plaza

Pemegang saham mayoritas/*Controlling shareholder*
Pemegang saham minoritas/*Minority shareholder*
Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri/
Controlled by Dana Pensiun Bank Mandiri

PT Bank Mandiri Taspen

Dikendalikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/
Controlled by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT AXA Insurance Indonesia (dahulu/formerly
PT Mandiri AXA General Insurance)

Entitas asosiasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/
Associate entity of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Dikendalikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/
Controlled by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Dana Pensiun Bank Mandiri
PT Surya Sudeco

Bank Mandiri sebagai pendiri/*Bank Mandiri as founder*
Dikendalikan oleh PT Tunas Ridean/
Controlled by PT Tunas Ridean

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Perum Jaminan Kredit Indonesia
PT Balai Pustaka (Persero)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Kimia Farma Apotek

Badan usaha milik negara/*State-owned company*

Badan usaha milik negara/*State-owned company*

Badan usaha milik negara/*State-owned company*

Badan usaha milik negara/*State-owned company*

Badan usaha milik negara/*State-owned company*

Badan usaha milik negara/*State-owned company*

Entitas anak dari badan usaha milik negara/
Subsidiary of state-owned company

Entitas anak dari badan usaha milik negara/
Subsidiary of state-owned company

Entitas anak dari badan usaha milik negara/
Subsidiary of state-owned company

PT Kimia Farma Diagnostika

Bank Rakyat Indonesia sebagai pendiri/
Bank Rakyat Indonesia as founder

PT Kimia Farma Trading & Distribution

Personil manajemen kunci Group Bank Mandiri/
Key management personnel of Bank Mandiri Group

DPLK Bank Rakyat Indonesia

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi/
Members of Boards of Commissioners and Director

Personil manajemen kunci Grup

Karyawan kunci

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Pada tanggal 4 Oktober 2023, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengalihkan seluruh saham miliknya di PT AXA Insurance Indonesia.

Dalam kegiatan normal usaha, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan.

a. Aset

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022
Kas dan setara kas		
Kas pada bank (lihat Catatan 4)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	781.632	761.003
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	798	264
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	15	7
PT Bank Mandiri Taspen	6	7
	<u>782.451</u>	<u>761.281</u>
Deposito berjangka		
PT Bank Mandiri Taspen	50.000	50.000
Piutang pembiayaan konsumen		
Personel manajemen kunci Grup	7.109	5.463
PT Kimia Farma Apotek	4.327	2.207
PT Kimia Farma Diagnostika	106	173
PT Kimia Farma Trading & Distribution	-	3
	<u>11.542</u>	<u>7.846</u>
Piutang lain-lain (lihat Catatan 8)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	473.710	385.343
Perum Jaminan Kredit Indonesia	70.992	111.636
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	2.161	2.161
PT Tunas Ridean	620	620
PT AXA Insurance Indonesia (dahulu PT Mandiri AXA General Insurance)	-	182
	<u>547.483</u>	<u>499.942</u>
Aset lain-lain (lihat Catatan 11)		
PT Bumi Daya Plaza	765	132
PT Bank Mandiri Taspen	137	119
	<u>902</u>	<u>251</u>
Total aset kepada pihak berelasi	1.392.378	1.319.320
Persentase terhadap total aset	4,68%	5,56%

26. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

As of 4 October 2023, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk transferred all of its shares in PT AXA Insurance Indonesia.

In the normal course of business, the Company enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder.

a. Assets

Cash and cash equivalents
Cash in banks (refer to Note 4)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri Taspen
Time deposits
PT Bank Mandiri Taspen
Consumer financing receivable
Group's key management personnel
PT Kimia Farma Apotek
PT Kimia Farma Diagnostika
PT Kimia Farma Trading & Distribution
Other receivables (refer to Note 8)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Perum Jaminan Kredit Indonesia
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
PT Tunas Ridean
PT AXA Insurance Indonesia (formerly PT Mandiri AXA General Insurance)
Other assets (refer to Note 11)
PT Bumi Daya Plaza
PT Bank Mandiri Taspen
Total assets associated with related parties
Percentage to total assets

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Aset (lanjutan)

Piutang lain-lain pihak berelasi kepada PT Tunas Ridean, Perum Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), dan PT AXA Insurance Indonesia (dahulu PT Mandiri AXA General Insurance) terutama berhubungan dengan transaksi usaha.

Piutang lain-lain pihak berelasi kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan pembayaran ke dealer untuk porsi pembiayaan bersama yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Perseroan.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang pembiayaan konsumen dan piutang lain-lain - pihak berelasi adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

b. Liabilitas

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022
Utang lain-lain (lihat Catatan 13)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	24.591	61.985
PT Bumi Daya Plaza	23.865	30.137
PT Surya Sudeco	8.109	8.374
PT Tunas Ridean	240	240
	<u>56.805</u>	<u>100.736</u>
Beban yang masih harus dibayar (lihat Catatan 14)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.381	2.457
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	698	1.078
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	393	-
	<u>4.472</u>	<u>3.535</u>
Pinjaman (lihat Catatan 15)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.061.963	1.472.617
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	305.556	472.222
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	523.733	-
	<u>2.891.252</u>	<u>1.944.839</u>

26. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Assets (continued)

Other related party receivables from PT Tunas Ridean, Perum Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), and PT AXA Insurance Indonesia (formerly PT Mandiri AXA General Insurance) are in respect of trade activities.

Other related party receivables from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk represent payments to dealers for joint financing portion which was paid in advance by the Company.

Management believes that the allowance for impairment losses of consumer financing receivables and other receivables - related party is sufficient to cover any possible losses from uncollectible accounts.

b. Liabilities

Other payables (refer to Note 13)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bumi Daya Plaza
PT Surya Sudeco
PT Tunas Ridean

Accrued expenses (refer to Note 14)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Borrowings (refer to Note 15)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

26. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

b. Liabilitas (lanjutan)

b. Liabilities (continued)

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Surat berharga yang diterbitkan			Securities issued
DPLK Bank Rakyat Indonesia	250.000	200.000	DPLK Bank Rakyat Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	308.000	152.500	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Dana Pensiun Bank Mandiri	110.000	91.000	Dana Pensiun Bank Mandiri
Perum Jaminan Kredit Indonesia	25.000	25.000	Perum Jaminan Kredit Indonesia
	693.000	468.500	
Total liabilitas kepada pihak berelasi	3.645.529	2.517.610	Total liabilities associated with related parties
Persentase terhadap total liabilitas	14,19%	12,20%	Percentage to total liabilities

Utang lain-lain kepada pihak berelasi terutama berhubungan dengan utang angsuran pokok termasuk bunga kepada pemberi pembiayaan bersama.

Other payables to related parties are mainly in respect of payables related with installments including interest to joint financing principals providers.

c. Pendapatan

c. Revenue

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2023	2022	
Pembiayaan konsumen (lihat Catatan 21a)			Consumer financing (refer to Note 21a)
Personil manajemen kunci Grup	512	614	Group's key management personnel
PT Kimia Farma Apotek	267	-	PT Kimia Farma Apotek
PT Kimia Farma Diagnostika	28	-	PT Kimia Farma Diagnostika
PT Balai Pustaka (Persero)	-	153	PT Balai Pustaka (Persero)
	807	767	
Simpanan Bank (lihat Catatan 21d)			Deposit in bank (refer to Note 21d)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	13.544	12.564	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri Taspen	2.645	1.964	PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2	2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
	16.191	14.530	
Lain-lain (lihat Catatan 21e)			Others (refer to Note 21e)
PT AXA Insurance Indonesia (dahulu PT Mandiri AXA General Insurance)	8	88	PT AXA Insurance Indonesia (formerly PT Mandiri AXA General Insurance)
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-	476	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
	8	564	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

26. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

c. Pendapatan (lanjutan)

c. Revenue (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2023	2022	
Total pendapatan dari pihak berelasi	17.006	15.861	Total revenue associated with related parties
Persentase terhadap total pendapatan	0,36%	0,40%	Percentage to total revenue

Pendapatan bunga simpanan bank berkaitan dengan penempatan dana kepada pihak berelasi dengan tingkat bunga 0,00% - 5,50% pada tahun 2023 dan 2022.

Interest income from deposit in bank to related parties has interest rates ranging from 0.00% - 5.50% in 2023 and 2022.

d. Beban

d. Expenses

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2023	2022	
Beban keuangan (lihat Catatan 22)			Financial charges (refer to Note 22)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	112.682	92.172	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	27.104	6.802	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	16.741	-	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Bumi Daya Plaza	1.866	2.143	PT Bumi Daya Plaza
PT Surya Sudeco	610	249	PT Surya Sudeco
	159.003	101.366	
Beban gaji dan tunjangan (lihat Catatan 23)			Salaries and benefits (refer to Note 23)
Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi			Boards of Commissioners and Directors remuneration
Dewan Komisaris			Board of Commissioners
Imbalan kerja jangka pendek:			Short-term employee benefits:
Gaji dan tunjangan	5.335	4.593	Salaries and allowances
Tantiem	2.603	1.520	Tantiem
Direksi			Directors
Imbalan kerja jangka pendek:			Short-term employee benefits:
Gaji dan tunjangan	14.318	12.130	Salaries and allowances
Tantiem	6.750	3.994	Tantiem
	29.006	22.237	
Beban umum dan administrasi (lihat Catatan 24)			General and administrative expense (refer to Note 24)
PT Bumi Daya Plaza	7.224	5.727	PT Bumi Daya Plaza
Total beban kepada pihak berelasi	195.233	129.330	Total expenses associated with related parties
Persentase terhadap total beban	5,99%	4,36%	Percentage to total expenses

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO

Pendahuluan dan gambaran umum

Perseroan memiliki eksposur terhadap risiko-risiko sebagai berikut:

- Risiko pasar
- Risiko kredit
- Risiko likuiditas
- Risiko operasional

Kerangka manajemen risiko

Konsep manajemen risiko Perseroan adalah mengacu dari konsep *Enterprise Risk Management* (ERM) yang digunakan oleh induk entitas Perseroan yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan operasional Perseroan. ERM adalah sebuah proses pengelolaan risiko yang melekat dalam proses bisnis Perseroan, artinya pengelolaan risiko menjadi bagian yang menyatu dalam pengambilan keputusan bisnis Perseroan sehari-hari. Dengan ERM, Perseroan akan memiliki kerangka kerja pengelolaan risiko yang sistematis dan menyeluruh (risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional) dengan menghubungkan pengelolaan modal dan proses bisnis dengan risiko yang dihadapi secara utuh. Tahun ini merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya terkait dengan "Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Entitas Anak", yang dilaksanakan Perseroan dalam kapasitasnya sebagai Entitas Anak dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, pemegang saham pengendali Perseroan.

Kerangka pengelolaan risiko ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Kerangka ini tercantum dalam Kebijakan Manajemen Risiko Bank Mandiri (KMRBM) agar sejalan dengan rencana penerapan Basel II Accord secara bertahap di Indonesia. Dalam kerangka pengelolaan risiko tersebut diatur berbagai kebijakan agar manajemen risiko berfungsi sebagai *business enabler* sehingga bisnis dapat tetap tumbuh dalam koridor prinsip kehati-hatian dengan menerapkan proses manajemen risiko yang ideal (identifikasi - pengukuran - pemantauan - pengendalian risiko) pada semua level organisasi.

27. RISK MANAGEMENT

Introduction and overview

The Company has exposure to the following risks:

- Market risk
- Credit risk
- Liquidity risk
- Operational risk

Risk management framework

The concept of risk management of the Company refers to Enterprise Risk Management (ERM) implemented by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (parent company) which was adopted to the needs of the business and operations of the Company. ERM is an inherent business risk management process in the Company's business process, which means, risk management becomes part of daily business decision making. By using ERM, the Company will have systematic and comprehensive framework for risk management (credit risk, market risk and operational risk) by connecting capital management and business process with the encountered risk as whole. This year is a continuation from previous years in terms of "Implementation of Consolidated Risk Management For Bank's Controlling Subsidiary Companies", which is implemented by the Company in its capacity as the Subsidiary of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, the controlling shareholder of the Company.

This risk management framework refers to Bank Indonesia Regulation (PBI) No 5/8/PBI/2003 dated 19 May 2003 concerning the Application of Risk Management for Commercial Bank as amended by PBI No.11/25/PBI/2009 dated on 1 July 2009 concerning the Amendment on Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 concerning the Application of Risk Management for Commercial Bank.

This framework is included in the Risk Management Policy of Bank Mandiri (KMRBM) in line with the plan to apply Basel II Accord gradually in Indonesia. Within this risk management framework, the Company set up a range of policies in order for risk management to function as a business enabler so that business can still grow within the corridor of prudential principle by applying the ideal risk management process (risk identification - measurement - monitoring - management of risk) at all levels of the organization.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

27. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Lebih lanjut, kemitraan antara Perseroan dengan Entitas Induk merupakan hal yang sangat penting, mengingat keduanya menghadapi tantangan regional dan global yang sama dalam mengelola pertumbuhan bisnis yang cepat dan dalam suasana kompetisi yang ketat, namun pada saat yang bersamaan Perseroan harus tetap mampu menyelenggarakan praktik bisnis tersebut berdasarkan dan mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, manajemen Perseroan memiliki komitmen penuh untuk menerapkan manajemen risiko secara komprehensif yang secara esensi mencakup kecukupan kebijakan, prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Perseroan tetap dapat terarah dan terkendali pada batasan risiko yang dapat diterima, serta tetap menguntungkan Perseroan. Divisi Manajemen Risiko yang berperan secara aktif dalam mengkoordinasikan tindakan-tindakan pencegahan, proaktif dan responsif dengan seluruh karyawan dari berbagai tingkatan yang ada di dalam Perseroan untuk mendukung penerapan manajemen risiko ini, karena semua bagian di dalam Perseroan masing-masing akan memainkan peranan penting.

Dalam penerapan manajemen risiko, Perseroan menyadari pentingnya untuk memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan. Perseroan memiliki suatu mekanisme yang bertumpu pada 4 (empat) pilar manajemen risiko, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pilar 1: Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif tersebut tercermin sejak perencanaan bisnis tahunan, yang mencakup:

- Menyetujui dan melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala;
- Melakukan evaluasi dan menyetujui aktivitas yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris atau Direksi;
- Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk penetapan otoritas dalam pemberian batasan serta tinjauan atas kualitas portofolio secara berkala;
- Terdapatnya Komite Audit dan sebagai organ Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya; dan melalui Surat Edaran No. 030/SE/MTF/VI/2012 membentuk *Forum Enterprise Risk Management* dengan dikoordinir oleh Direktorat Risk Management PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai bentuk konsolidasi manajemen risiko.

27. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk management framework (continued)

Further, the partnership between the Company and the parent company is a very important thing considering both have to face the same regional and global challenge in managing fast business growth and strict competition, but at the same time the Company must implement such business practices based on prudential principle.

As a company engaging in financing activities, the Company's management is fully committed to implement risk management comprehensively, which essentially covers the adequacy of policies, procedures and risk management methodology, hence, the Company's business activities could remain to be directed and controlled at an acceptable risk limit, at the same time the Company can still be profitable. Risk Management Division is playing an active role in coordinating preventive, proactive and responsive actions with all employees from various levels within the Company in order to support the implementation of risk management, because all divisions of the Company will play their respective important roles.

In the implementation of risk management, the Company realizes the importance of having an adequate mechanism to accommodate the risks faced by the Company. The Company has a mechanism that is based upon 4 (four) risk management pillars, which could be described as follows:

Pillar 1: Active Supervision by Boards of Commissioners and Directors

Active supervision is reflected since annual business planning, which includes:

- *Approving and evaluating risk management policies on a regular basis;*
- *Evaluating and approving activities that require approval from the Board of Commissioners or Directors;*
- *Establishing risk management policies and strategies, which include determining the authorization in limits and reviewing the quality of portfolio on a regular basis;*
- *The presence of the Audit Committee as an organ of the Board of Commissioners in carrying out their supervisory functions; and through Circular Letter No. 030/SE/MTF/VI/2012 established Enterprise Risk Management Forum coordinated by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Risk Management Directorate in terms of implementation of consolidated risk management.*

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

27. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Dalam penerapan manajemen risiko, Perseroan menyadari pentingnya untuk memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan. Perseroan memiliki suatu mekanisme yang bertumpu pada 4 (empat) pilar manajemen risiko, yang dapat diuraikan sebagai berikut: (lanjutan)

Pilar 1: Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Kerangka konsolidasi manajemen risiko dengan Entitas Induk dibentuk dengan menempatkan wakil dari Entitas Induk sebagai Kepala Divisi yang membawahi fungsi manajemen risiko Perseroan. Kerangka tersebut juga dilaksanakan melalui pemeriksaan kinerja secara berkala oleh Entitas Induk terhadap Perseroan, menyangkut kinerja keuangan, pengawasan sistem informasi akuntansi, serta tingkat kesehatan dan profil risiko dari piutang pembiayaan konsumen.

Pilar 2: Kebijakan dan Penerapan Batasan

Perseroan menyusun kebijakan-kebijakan manajemen risiko yang diperiksa secara berkala dan selalu disesuaikan dengan keadaan usaha terkini. Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam Prosedur Operasi Standar dan Memo Internal yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Perseroan juga memiliki kebijakan-kebijakan mengenai batasan persetujuan/otorisasi untuk transaksi kredit maupun yang bukan transaksi kredit.

Salah satu contoh kemitraan dalam pengelolaan manajemen risiko antara Perseroan dan Entitas Induk adalah perjanjian kerjasama pemberian kredit dimana Perseroan bertindak sebagai agen untuk kegiatan seleksi konsumen, penagihan dan pengurusan dokumen administrasi berdasarkan batasan produk ataupun kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh Entitas Induk. Kebijakan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang Perseroan juga mengikuti kebijakan penyisihan pada Entitas Induk yang sejalan dan patuh terhadap Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

27. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk management framework (continued)

In the implementation of risk management, the Company realizes the importance of having an adequate mechanism to accommodate the risks faced by the Company. The Company has a mechanism that is based upon 4 (four) risk management pillars, which could be described as follows: (continued)

Pillar 1: Active Supervision by Boards of Commissioners and Directors (continued)

The consolidated risk management framework with Parent Company is established through assigning representatives from Parent Company as Division Head of Risk Management. The framework is also implemented through regular performance assessment by the Parent Company on the Company, concerning the financial performance, monitoring on accounting information system, as well as the level of soundness and risk profile of the Company's consumer financing receivables.

Pillar 2: Policy and Implementation of Limits

The Company develops policies related to risk management, which are assessed periodically and aligned constantly to fit the most recent business situation. The policy is translated into Standard Operating Procedures and Internal Memo, which are being socialized to all employees. The Company also has policies regarding limitation on approval/authorization for both credit and non-credit transactions.

An example of partnership between the Company and Parent Company in managing risk is joint financing agreement where the Company acts as an agent to underwrite, collect and administer consumer financing based on limitation of product or pre-determined criteria established by Parent Company. The Company's policy in relation with allowance for impairment losses on receivables also comply with the Parent Company's policy, which is in line and in compliance with Indonesian Financial Accounting Standards.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Dalam penerapan manajemen risiko, Perseroan menyadari pentingnya untuk memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan. Perseroan memiliki suatu mekanisme yang bertumpu pada 4 (empat) pilar manajemen risiko, yang dapat diuraikan sebagai berikut: (lanjutan)

Pilar 3: Identifikasi, Pengukuran, Pengawasan dan Sistem Informasi Manajemen

Perseroan memiliki perangkat untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengawasi risiko terutama risiko kredit dan risiko operasional melalui mekanisme pelaporan dan sistem informasi manajemen yang ada serta melalui pertemuan berkala Forum Enterprise Risk Management (FERMA) dengan Entitas induk. Selain itu, sistem teknologi informasi utama Perseroan mampu menyediakan data/informasi secara cepat dan akurat kepada pihak manajemen, Entitas Induk atau pihak ketiga yang terkait lainnya.

Kerangka konsolidasi manajemen risiko dengan Entitas Induk terlaksana melalui penyampaian paparan risiko Perseroan yang ada secara berkala kepada Komite Manajemen Risiko Entitas Induk, termasuk penyampaian laporan berkala terkait aspek kepatuhan, hukum dan lainnya kepada Entitas Induk.

Pilar 4: Pengendalian Internal

Perseroan memiliki Divisi Audit Internal yang secara independen melaporkan proses dan hasil pemeriksaannya kepada Direktur Utama dan melakukan koordinasi dengan Komite Audit secara rutin setiap bulan. Akuntabilitas dari Divisi Audit Internal mencakup:

- Menyediakan penilaian atas kecukupan dan efektivitas dari semua proses yang ada di dalam Perseroan;
- Melaporkan masalah-masalah penting yang terkait dengan proses pengendalian aktivitas-aktivitas didalam Perseroan, termasuk perbaikan yang potensial terhadap proses-proses tersebut; dan
- Koordinasi dengan fungsi pengendali dan pengawasan lainnya (manajemen risiko, kepatuhan, hukum dan audit eksternal).

Kerangka konsolidasi manajemen risiko dengan Entitas Induk juga dicerminkan dengan dilaksanakannya audit reguler/audit teknologi informasi/audit terintegrasi atas unit-unit di Perseroan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Entitas Induk.

27. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk management framework (continued)

In the implementation of risk management, the Company realizes the importance of having an adequate mechanism to accommodate the risks faced by the Company. The Company has a mechanism that is based upon 4 (four) risk management pillars, which could be described as follows: (continued)

Pillar 3: Identification, Measurement, Monitoring and Management Information System

The Company has a set of tools to identify, measure and monitor risks, especially credit risk and operational risk through the existing reporting and management information system mechanism, as well as through the regular meetings of the Company's Enterprise Risk Management Forum (FERMA) with Parent Company. In addition, the Company's major information technology system is capable of providing instant and accurate data/information to the management, Parent Company or other related third parties.

The consolidated risk management framework with Parent Company is conducted through the reporting of the Company's risk exposure periodically to Parent Company's Risk Management Committee, including the periodic reporting in relation to the compliance, legal and other aspects to the Parent Company.

Pillar 4: Internal Control

The Company has an Internal Audit Division which independently reports on the process and assessment result to the President Director and regularly coordinate with Audit Committee monthly. The accountability of the Internal Audit Division includes:

- *Providing assessment on the adequacy and effectiveness of all existing processes within the Company;*
- *Reporting on important issues related to the control process of activities within the Company, including potential improvements to these processes; and*
- *Coordinating with other controlling and supervisory functions (risk management, compliance, legal and external audit).*

The consolidated risk management framework with Parent Company is also reflected in the implementation of regular audit/information technology audit/integrated audit on the business units in the Company by Parent Company's Internal Audit Unit (SKAI).

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Dalam penerapan manajemen risiko, Perseroan menyadari pentingnya untuk memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan. Perseroan memiliki suatu mekanisme yang bertumpu pada 4 (empat) pilar manajemen risiko, yang dapat diuraikan sebagai berikut: (lanjutan)

Pilar 4: Pengendalian Internal (lanjutan)

Guna penguatan pengendalian internal dan proses konsolidasi antara Entitas Induk dengan Entitas Anak, Kepala Divisi Internal Audit perseroan diseleksi dan ditetapkan oleh Entitas Induk sebelum ditempatkan di Perseroan.

Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang Rupiah, harga komoditas dan harga modal atau pinjaman, yang dapat membawa risiko bagi Perseroan. Dalam perencanaan usaha Perseroan, risiko pasar yang memiliki dampak langsung kepada Perseroan adalah dalam hal pengelolaan tingkat bunga.

Perubahan tingkat bunga acuan akan menjadi risiko pada saat perubahannya, terutama ketika tingkat bunga dinaikkan, yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan sehingga dapat menyebabkan risiko kredit Perseroan meningkat. Untuk itu, Perseroan menerapkan pengelolaan tingkat bunga tetap secara konsisten dengan menyesuaikan tingkat bunga kredit terhadap tingkat bunga pinjaman dan beban dana.

Sumber pendanaan Perseroan yang terbesar berasal dari skema pembiayaan bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan tingkat bunga tetap dan jangka waktu yang sama dengan piutang pembiayaan konsumen.

Perseroan juga menerbitkan obligasi yang sebagian besar mempunyai jangka waktu yang panjang, yaitu 3 (tiga) - 5 (lima) tahun dengan tingkat bunga tetap serta sejumlah kecil pinjaman dari bank swasta nasional dan asing dengan tingkat bunga tetap dan mengambang.

Dengan pola aktivitas usaha yang dijalankan Perseroan saat ini, risiko pasar Perseroan adalah minimal. Perseroan tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan konsumen dalam mata uang asing.

27. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk management framework (continued)

In the implementation of risk management, the Company realizes the importance of having an adequate mechanism to accommodate the risks faced by the Company. The Company has a mechanism that is based upon 4 (four) risk management pillars, which could be described as follows: (continued)

Pillar 4: Internal Control (continued)

For the purpose of strengthening Internal Control and consolidation process between Parent Company and Subsidiary Company, the Head of Internal Audit Division is selected and determined by Parent Company before being assigned in the Company.

Market risk

Market risk is the risk which is primarily caused by the changes in interest rates, exchange rate of Rupiah currency, commodity prices and the price of capital or loans, in which the Company may be exposed to. In the Company's business planning, market risk with direct impact to the Company is in terms of interest rates management.

Changes in interest rates would become a risk at the point of change, especially when the interest rate increases, which would cause losses to the Company, hence resulting in increased Company's credit risk. Therefore, the Company consistently implements fixed interest rate management by making adjustments on lending interest rate and cost of funds.

The largest source of funding for the Company comes from a joint financing scheme with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with fixed interest rate and same period with the consumer financing receivables.

The Company's source of funding is also derived from the issuance of bonds mostly for long-term, i.e. for 3 (three) - 5 (five) years, with fixed interest rates and as well as a small number of loans from the national and foreign private banks with fixed and floating interest rates.

With the pattern of business activity currently operated by the Company, the market risk of the Company is minimal. The Company does not have consumer financing business in foreign currency.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)

Tabel berikut menggambarkan rincian aset dan liabilitas keuangan Perseroan yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal repricing atau tanggal jatuh tempo kontraktual untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga (bruto):

		31 Desember/December 2023							
		Tingkat bunga tetap/Fixed interest rate							
	Bunga mengambang <3 bulan/ Floating Rate < 3 months	Kurang dari 1 bulan/Less than 1 month	1 bulan sampai 3 bulan/ 1 month to 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai 1 tahun/Over 3 months to 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun/ Over 1 year to 2 years	Lebih dari 2 tahun/ Over 2 years	Tidak dikenakan bunga/No interest rate charges	Total	
Aset keuangan									Financial assets
Kas pada bank	833.946	-	-	-	-	-	-	833.946	Cash in banks
Piutang pembiayaan konsumen	-	887.083	1.645.160	6.683.175	6.635.844	6.858.455	-	22.709.717	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	-	298.722	581.208	2.153.439	1.617.585	765.911	-	5.416.865	Finance lease receivables
Anjak piutang	-	650	1.300	5.851	7.802	20.155	-	35.758	Factoring receivables
Piutang lain lain	-	-	-	-	-	-	667.152	667.152	Other receivables
Piutang derivatif	-	-	28.933	-	-	-	-	28.933	Derivative receivables
Aset lain-lain	-	-	-	-	-	-	49.049	49.049	Other assets
Jumlah aset keuangan	833.946	1.186.455	2.256.601	8.842.465	8.261.231	7.644.521	716.201	29.741.420	Total financial assets
Liabilitas keuangan									Financial liabilities
Utang usaha	-	-	-	-	-	-	1.017.137	1.017.137	Trade payables
Utang lain-lain	-	166.897	2.407	10.390	13.132	12.247	-	205.073	Other payables
Beban yang masih harus dibayar	-	2.113	259.985	-	-	-	-	262.098	Accrued expenses
Pinjaman yang diterima	-	1.206.954	1.576.225	6.614.262	5.999.465	2.699.809	-	18.096.715	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	200.000	1.572.611	1.236.226	2.678.678	-	5.687.515	Securities issued
Jumlah liabilitas keuangan	-	1.375.964	2.038.617	8.197.263	7.248.823	5.390.734	1.017.137	25.268.538	Total financial liabilities
Jumlah selisih penilaian bunga	833.946	(189.509)	217.984	645.202	1.012.408	2.253.787	(300.936)	4.472.882	Total interest repricing gap
		31 Desember/December 2022							
		Tingkat bunga tetap/Fixed interest rate							
	Bunga mengambang <3 bulan/ Floating Rate < 3 months	Kurang dari 1 bulan/Less than 1 month	1 bulan sampai 3 bulan/ 1 month to 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai 1 tahun/Over 3 months to 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun/ Over 1 year to 2 years	Lebih dari 2 tahun/ Over 2 years	Tidak dikenakan bunga/No interest rate charges	Total	
Aset keuangan									Financial assets
Kas pada bank	826.834	-	-	-	-	-	-	826.834	Cash in banks
Piutang pembiayaan konsumen	-	649.382	1.247.752	5.061.237	5.055.376	4.660.668	-	16.674.415	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	-	288.588	556.039	2.200.168	1.982.951	754.279	-	5.782.025	Finance lease receivables
Anjak piutang	-	38.369	4.100	-	-	-	-	42.469	Factoring receivables
Piutang lain lain	-	-	-	-	-	-	589.865	589.865	Other receivables
Piutang derivatif	-	-	24.534	-	-	-	-	24.534	Derivative receivables
Aset lain-lain	-	-	-	-	-	-	35.184	35.184	Other assets
Jumlah aset keuangan	826.834	976.339	1.832.425	7.261.405	7.038.327	5.414.947	625.049	23.975.326	Total financial assets
Liabilitas keuangan									Financial liabilities
Utang usaha	-	-	-	-	-	-	702.291	702.291	Trade payables
Utang lain-lain	-	211.292	1.913	8.064	10.100	18.920	-	250.289	Other payables
Beban yang masih harus dibayar	-	1.994	309.628	-	-	-	-	311.622	Accrued expenses
Pinjaman yang diterima	-	680.842	1.232.346	5.109.299	5.010.924	2.628.476	-	14.661.887	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	471.745	1.771.290	2.096.202	-	4.339.237	Securities issued
Jumlah liabilitas keuangan	-	894.128	1.543.887	5.589.108	6.792.314	4.743.598	702.291	20.265.326	Total financial liabilities
Jumlah selisih penilaian bunga	826.834	82.211	288.538	1.672.297	246.013	671.349	(77.242)	3.710.000	Total interest repricing gap

27. RISK MANAGEMENT (continued)

Market risk (continued)

The following tables summarize the Company's financial assets and liabilities categorized by the earlier of contractual repricing or maturity dates to see the impact of changes in interest rates (gross):

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

27. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit

Pengelolaan risiko kredit perseroan diarahkan untuk meningkatkan keseimbangan antara ekspansi kredit yang sehat dengan pengelolaan kredit secara *prudent* agar terhindar dari penurunan kualitas atau menjadi *Non Performing Loan (NPL)*, serta mengelola penggunaan modal untuk memperoleh return yang optimal. Dimulai dari proses awal penerimaan aplikasi kredit yang selektif dan ditangani dengan prinsip kehati-hatian, yang mana aplikasi kredit akan melalui proses survey dan analisa kredit sebelum disetujui oleh Komite Kredit. Perseroan juga menerapkan Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No.30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank dan Peraturan Ketua Bapepam-LK No.PER-05/BL/2011 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Perseroan Pembiayaan.

Tahun 2012, Perseroan juga telah menjalankan aturan uang muka kendaraan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan serta Surat Edaran BI No.14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor yang diberlakukan sejak 15 Juni 2012.

27. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk

The Company's credit risk management is directed to improve the balance between healthy credit expansion with a prudent credit management to avoid the decline in the quality or being Non Performing Loan (NPL), as well as, capital management to earn optimal return. It starts from the process of receiving credit applications selectively and handling them with prudence principle, where the credit application would go through survey and credit analysis process before being approved by the Credit Committee. The Company also implemented the Manual for Implementation of Know Your Customer Principles as regulated in the Ministry of Finance Regulation No.30/PMK.010/2010 regarding the Implementation of Know Your Customer Principles for Non-Banking Financial Institutions and the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board (Bapepam-LK) Regulation No.PER-05/BL/2011 regarding the Manual for Implementation of Know Your Customer Principles for Multifinance Companies.

In 2012, the Company also has implemented down payment regulation as regulated in the Ministry of Finance Regulation No.43/PMK.010/2012 concerning Down Payment for Consumer Financing, and Bank Indonesia Circular Letter No.14/10/DPNP dated 15 March 2012 concerning The Application of Bank's Risk Management on Mortgages and Motor Vehicle Credit effective 15 June 2012.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Untuk setiap kategori aset keuangan, Perseroan harus mengungkapkan eksposur maksimum terhadap risiko kredit dan analisa konsentrasi risiko kredit.

i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Nilai tercatat dari aset keuangan Perseroan selain piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen menggambarkan eksposur maksimum atas risiko tersebut. Dalam hal piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, Perseroan menggunakan agunan untuk meminimalkan risiko kredit. Perseroan menetapkan jenis dan nilai agunan yang diterima antara lain tanah, bangunan dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan yang dibiayai Perseroan. Apabila terjadi *default* (gagal bayar), Perseroan akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban *counterparty*.

Konsentrasi risiko kredit timbul ketika sejumlah pelanggan bergerak dalam aktivitas usaha yang sama atau aktivitas dalam wilayah geografis yang sama, atau ketika mereka memiliki karakteristik yang sejenis yang akan menyebabkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi atau yang lainnya.

Perseroan bergerak di bidang usaha pembiayaan konsumen yang pelanggannya kebanyakan adalah individu dan tidak terkonsentrasi pada wilayah geografis tertentu.

27. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

For each financial asset category, the Company should disclose maximum exposure to credit risk and concentration of credit risk analysis.

i. Maximum exposure to credit risk

The carrying amount of the Company's financial assets other than finance lease receivables and consumer financing receivables represent the maximum exposure of credit. In case of consumer financing and finance lease receivables, the Company uses the collateral to minimize the credit risk. The Company determined the type and value of collaterals accepted such as land, buildings, and Certificate of Ownership of the vehicles financed by the Company. In times of default, the Company will use the collateral as the last resort in recovering the obligation of the counterparty.

Concentrations of credit risk arise when a number of customers are engaged in similar business activities or activities within the same geographic region, or when they have similar characteristics that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic or other conditions.

The Company is currently engaged in consumer financing business in which the customers are mainly individuals and they are not concentrated in the specific geographic region.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

27. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

ii. Analisis konsentrasi risiko kredit

ii. Concentration of credit risk analysis

Tabel berikut menggambarkan jumlah risiko kredit dan konsentrasi risiko aset keuangan konsumen yang dimiliki Perseroan (bruto):

The following tables set out the total credit risk and risk concentration of financial assets of the Company (gross):

a. Sektor geografis

a. Geographical sector

31 Desember/December 2023							
	Jawa Bali	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Lainnya/ Others	Total	
Kas pada bank	832.887	337	377	300	45	833.946	Cash in banks
Piutang pembiayaan konsumen	13.211.028	3.419.462	3.440.187	2.302.492	336.548	22.709.717	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	4.765.045	256.861	246.374	123.483	25.102	5.416.865	Finance lease receivables
Anjak piutang	35.758	-	-	-	-	35.758	Factoring receivables
Piutang lain-lain	667.152	-	-	-	-	667.152	Other receivables
Piutang derivatif	28.933	-	-	-	-	28.933	Derivative receivables
Aset lain-lain	917	-	26	34	48.072	49.049	Other assets
	19.541.720	3.676.660	3.686.964	2.426.309	409.767	29.741.420	

31 Desember/December 2022							
	Jawa Bali	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Lainnya/ Others	Total	
Kas pada bank	826.021	318	205	245	45	826.834	Cash in banks
Piutang pembiayaan konsumen	9.974.420	2.817.338	2.175.095	1.488.157	219.405	16.674.415	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	5.439.440	144.535	136.227	36.838	24.985	5.782.025	Finance lease receivables
Anjak piutang	42.469	-	-	-	-	42.469	Factoring receivables
Piutang lain-lain	531.987	35.230	6.573	15.108	967	589.865	Other receivables
Piutang derivatif	24.534	-	-	-	-	24.534	Derivative receivables
Aset lain-lain	154	-	41	24	34.965	35.184	Other assets
	16.839.025	2.997.421	2.318.141	1.540.372	280.367	23.975.326	

b. Sektor industri

b. Industry sector

31 Desember/December 2023					
	Lembaga Keuangan/ Financial Institution	Konsumen/ Customers	Lain-lain/ Others	Total	
Kas pada bank	833.946	-	-	833.946	Cash in banks
Piutang pembiayaan konsumen	-	22.709.717	-	22.709.717	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	-	5.416.865	-	5.416.865	Finance lease receivables
Anjak piutang	-	35.758	-	35.758	Factoring receivables
Piutang lain-lain	-	-	667.152	667.152	Other receivables
Piutang derivatif	28.933	-	-	28.933	Derivative receivables
Aset lain-lain	-	-	49.049	49.049	Other assets
	862.879	28.162.340	716.201	29.741.420	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

ii. Analisis konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

b. Sektor industri (lanjutan)

27. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

ii. Concentration of credit risk analysis (continued)

b. Industry sector (continued)

31 Desember/December 2022

	Lembaga Keuangan/ Financial Institution	Konsumen/ Customers	Lain-lain/ Others	Total	
Kas pada bank	826.834	-	-	826.834	Cash in banks
Piutang pembiayaan konsumen	-	16.674.415	-	16.674.415	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	-	5.782.025	-	5.782.025	Finance lease receivables
Anjak piutang	-	42.469	-	42.469	Factoring receivables
Piutang lain-lain	-	-	589.865	589.865	Other receivables
Piutang derivatif	24.534	-	-	24.534	Derivative receivables
Aset lain-lain	-	-	35.184	35.184	Other assets
	851.368	22.498.909	625.049	23.975.326	

c. Berdasarkan kualitas kredit dari aset keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 eksposur risiko kredit atas aset keuangan terbagi atas:

c. Based on quality of financial assets

As of 31 December 2023 and 2022, credit risk exposure of financial assets is divided into:

31 Desember/December 2023

	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired		Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Total	
	High grade	Standard grade					
Kas pada bank	833.946	-	-	-	-	833.946	Cash in banks
Piutang pembiayaan konsumen	11.292.015	10.399.885	840.361	177.456	(347.894)	22.361.823	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	3.048.322	2.137.678	211.784	19.081	(69.293)	5.347.572	Finance lease receivables
Anjak piutang	-	35.758	-	-	(436)	35.322	Factoring receivables
Piutang lain-lain	667.152	-	-	-	(44.298)	622.854	Other receivables
Piutang derivatif	28.933	-	-	-	-	28.933	Derivative receivables
Aset lain-lain	49.049	-	-	-	-	49.049	Other assets
	15.919.417	12.573.321	1.052.145	196.537	(461.921)	29.279.499	

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

ii. Analisis konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

c. Berdasarkan kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 eksposur risiko kredit atas aset keuangan terbagi atas: (lanjutan)

31 Desember/December 2022

	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired		Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/Past due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Total	
	High grade	Standard grade					
Kas pada bank	826.834	-	-	-	-	826.834	Cash in banks
Piutang pembiayaan konsumen:	7.735.074	8.154.741	650.144	134.456	(333.578)	16.340.837	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	3.389.312	2.197.104	168.820	26.789	(138.679)	5.643.346	Finance lease receivables
Anjak piutang	42.469	-	-	-	(9.493)	32.976	Factoring receivables
Piutang lain-lain	589.865	-	-	-	(140.425)	449.440	Other receivables
Piutang derivatif	24.534	-	-	-	-	24.534	Derivative receivables
Aset lain-lain	35.184	-	-	-	-	35.184	Other assets
	12.643.272	10.351.845	818.964	161.245	(622.175)	23.353.151	

Penjelasan pembagian kualitas kredit yang diberikan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai:

- *High grade*, yaitu tidak pernah mengalami tunggakan sebelumnya.
- *Standard grade*, yaitu pernah mengalami tunggakan sebelumnya, namun sampai saat ini belum terdapat keterlambatan dalam pembayaran cicilan pokok dan bunga.

Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan yang pembayaran angsurannya menunggak lebih dari 90 hari diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang mengalami penurunan nilai.

Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan konsumen yang diberikan, Perseroan menerima jaminan dari konsumen berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") atas kendaraan bermotor yang dibiayai Perseroan, jaminan perusahaan dan jaminan pribadi.

27. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

ii. Concentration of credit risk analysis (continued)

c. Based on quality of financial assets (continued)

As of 31 December 2023 and 2022, credit risk exposure of financial assets is divided into: (continued)

The explanation of loan under quality "neither past due nor impaired" were as follows:

- *High grade*, which never have past due in the past.
- *Standard grade*, which have past due in the past but until now there has not been overdue in payment of principal and interest.

Consumer financing and finance lease receivables which installments are overdue for more than 90 days are classified as impaired financial assets.

As collateral to the consumer financing receivables, the Company receives the Certificates of Ownership ("BPKB") of the motor vehicles financed by the Company, corporate guarantee, and personal guarantee.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

ii. Analisis konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

c. Berdasarkan kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan *aging analysis* terhadap piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan dan anjak piutang yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai.

		31 Desember/December 2023				
		1-30 hari/days	31-60 hari/days	61-90 hari/days	Total	
Piutang pembiayaan konsumen		486.720	189.653	163.988	840.361	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan		106.102	42.875	62.807	211.784	Finance lease receivables
		592.822	232.528	226.795	1.052.145	

		31 Desember/December 2022				
		1-30 hari/days	31-60 hari/days	61-90 hari/days	Total	
Piutang pembiayaan konsumen		391.448	148.889	109.807	650.144	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan		71.895	22.893	74.032	168.820	Finance lease receivables
		463.343	171.782	183.839	818.964	

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko, bilamana Perseroan tidak memiliki sumber keuangan yang mencukupi untuk memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Mengingat Perseroan memperoleh dukungan keuangan yang kuat dari Entitas Induk melalui skema pembiayaan bersama dan fasilitas pinjaman yang diterima, maka risiko ini dapat dikelola dengan baik. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan atas arus kas masuk dan arus kas keluar untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo.

27. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

ii. Concentration of credit risk analysis (continued)

c. Based on quality of financial assets (continued)

The following table summarizes the aging analysis of consumer financing receivables, finance lease receivables and factoring receivables which are past due but not impaired.

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk when the Company does not have sufficient financial resources to discharge its matured liabilities. As the Company receives strong financial support from Parent Company through joint financing scheme and borrowings facility, this risk could be managed properly. The management evaluates and monitors cash-in flows and cash-out flows to ensure the availability of fund to settle the obligations that are due.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel berikut menggambarkan profil perbedaan jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

27. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk (continued)

The following table summarizes the maturity gap profile of the Company's financial assets and liabilities as of 31 December 2023 and 2022:

		31 Desember/December 2023					
	Kurang dari satu bulan/ Less than one month	1-6 bulan/ months	Lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun/ More than 6 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity	Total	
ASET							ASSETS
Kas pada bank	833.946	-	-	-	-	833.946	Cash in banks
Piutang pembiayaan konsumen	887.083	4.015.096	4.313.239	13.494.299	-	22.709.717	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	298.722	1.388.490	1.346.157	2.383.496	-	5.416.865	Finance lease receivables
Anjak piutang	650	3.250	3.901	27.957	-	35.758	Factoring receivables
Piutang lain-lain	596.485	70.667	-	-	-	667.152	Other receivables
Piutang derivatif	-	28.933	-	-	-	28.933	Derivative receivables
Aset lain-lain	49.049	-	-	-	-	49.049	Other assets
Total aset	2.665.935	5.506.436	5.663.297	15.905.752	-	29.741.420	Total assets
Utang usaha	1.017.137	-	-	-	-	1.017.137	Trade payables
Utang lain-lain	166.897	5.925	6.872	25.379	-	205.073	Other payables
Beban yang masih harus dibayar	2.113	259.985	-	-	-	262.098	Accrued expense
Pinjaman yang diterima	1.206.954	3.878.098	4.312.389	8.699.274	-	18.096.715	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	-	1.114.812	657.799	3.914.904	-	5.687.515	Securities issued
Total liabilitas	2.393.101	5.258.820	4.977.060	12.639.557	-	25.268.538	Total liabilities
Total perbedaan jatuh tempo	272.834	247.616	686.237	3.266.195	-	4.472.882	Total maturity gap
		31 Desember/December 2022					
	Kurang dari satu bulan/ Less than one month	1-6 bulan/ months	Lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun/ More than 6 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity	Total	
ASET							ASSETS
Kas pada bank	826.834	-	-	-	-	826.834	Cash in banks
Piutang pembiayaan konsumen	649.382	3.035.426	3.273.563	9.716.044	-	16.674.415	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	288.588	1.345.794	1.410.413	2.737.230	-	5.782.025	Finance lease receivables
Anjak piutang	38.369	4.100	-	-	-	42.469	Factoring receivables
Piutang lain-lain	589.865	-	-	-	-	589.865	Other receivables
Piutang derivatif	-	24.534	-	-	-	24.534	Derivative receivables
Aset lain-lain	35.184	-	-	-	-	35.184	Other assets
Total aset	2.428.222	4.409.854	4.683.976	12.453.274	-	23.975.326	Total assets
Utang usaha	702.291	-	-	-	-	702.291	Trade payables
Utang lain-lain	211.292	4.640	5.337	29.020	-	250.289	Other payables
Beban yang masih harus dibayar	1.994	309.628	-	-	-	311.622	Accrued expense
Pinjaman yang diterima	680.842	3.039.916	3.301.729	7.639.400	-	14.661.887	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	471.745	3.867.492	-	4.339.237	Securities issued
Total liabilitas	1.596.419	3.354.184	3.778.811	11.535.912	-	20.265.326	Total liabilities
Total perbedaan jatuh tempo	831.803	1.055.670	905.165	917.362	-	3.710.000	Total maturity gap

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada *undiscounted cash flows* pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

31 Desember/December 2023						
	Kurang dari satu bulan/ <i>Less than one month</i>	1-6 bulan/ <i>months</i>	Lebih dari 6 sampai 1 tahun/ <i>More than 6 months up to 1 year</i>	Lebih dari 1 tahun/ <i>More than 1 year</i>	Total	
LIABILITAS						LIABILITIES
Utang usaha	1.017.137	-	-	-	1.017.137	Trade payables
Utang lain-lain	166.897	5.925	6.872	25.379	205.073	Other payables
Beban yang masih harus dibayar	2.113	259.985	-	-	262.098	Accrued expenses
Pinjaman yang diterima	1.299.278	4.274.763	4.658.637	9.149.680	19.382.358	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	31.036	1.288.053	804.667	4.344.767	6.468.523	Securities issued
Total	2.516.461	5.828.726	5.470.176	13.519.826	27.335.189	Total
31 Desember/December 2022						
	Kurang dari satu bulan/ <i>Less than one month</i>	1-6 bulan/ <i>months</i>	Lebih dari 6 sampai 1 tahun/ <i>More than 6 months up to 1 year</i>	Lebih dari 1 tahun/ <i>More than 1 year</i>	Total	
LIABILITAS						LIABILITIES
Utang usaha	702.291	-	-	-	702.291	Trade payables
Utang lain-lain	211.292	4.640	5.337	29.020	250.289	Other payables
Beban yang masih harus dibayar	1.994	309.628	-	-	311.622	Accrued expenses
Pinjaman yang diterima	761.126	3.377.690	3.603.499	8.048.751	15.791.066	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	20.503	144.417	627.224	4.247.677	5.039.821	Securities issued
Total	1.697.206	3.836.375	4.236.060	12.325.448	22.095.089	Total

Risiko operasional

Perseroan juga sangat peduli terhadap risiko operasional, karena permasalahan yang timbul sehubungan dengan risiko ini dapat berdampak dan berpengaruh luas terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan. Secara umum, risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan karena kekurangan dan kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem ataupun permasalahan-permasalahan yang berdampak pada operasi Perseroan. Penanganan risiko operasional dalam Perseroan dilakukan dengan 3 (tiga) langkah, yaitu:

- Pengidentifikasian risiko
- Pengukuran risiko
- Manajemen, pengawasan dan pengendalian risiko

Ketiga langkah di atas merupakan satu kesatuan proses yang tidak terpisahkan. Langkah di atas telah diterjemahkan Perseroan dalam mekanisme manajemen risiko operasional sebagai berikut:

27. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk (continued)

The tables below show the remaining contractual maturities of financial liabilities based on *undiscounted cash flows* as of 31 December 2023 and 2022:

Operational risk

The Company is also very concerned about the operational risk, because the problems arising from this risk could bring significant impact and affect the Company's overall performance. In general, operational risk is the risk caused by shortcomings and failures of internal processes, human errors, system failures or problems that could bring impact to the Company's operations. The operational risks in the Company are handled through 3 (three) steps as follows:

- Risk identification
- Risk measurement
- Risk management, supervision and control

The three steps above are inseparable unified process. These have been converted to the Company's operational risk management mechanism as follows:

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

27. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko operasional (lanjutan)

Operational Risk Management System (ORMS)

ORMS merupakan implementasi dari kewajiban Perseroan sebagai Perseroan Anak dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk melakukan pengendalian risiko operasional dengan cara melakukan pencatatan kejadian berisiko pada saat terjadinya kejadian berisiko tersebut, seperti yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006 perihal "Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perseroan Anak".

ORMS adalah sebuah aplikasi intranet berbasis web yang digunakan sebagai alat bantu pengelola risiko operasional yang dirancang agar pencatatan kejadian berisiko dapat dilakukan pada saat terjadinya kejadian berisiko tersebut dan direkam ke dalam *database*. Laporan yang terekam melalui menu laporan tersebut kemudian akan dipindahkan ke dalam aplikasi ORMS Entitas Induk sebagai bentuk dari perwujudan konsolidasi Laporan Risiko Operasional Bank.

Manajemen permodalan

Tujuan Perseroan dalam mengelola permodalannya adalah menjaga kelangsungan usaha Perseroan untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya modal.

Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbalan hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi pinjaman.

Konsisten dengan pelaku industri lainnya, Perseroan memonitor permodalan berdasarkan *gearing ratio*. Rasio ini dihitung dari nilai bersih pinjaman (termasuk obligasi dan *medium-term notes*) dibagi dengan jumlah modal. Jumlah modal diambil dari ekuitas yang tercantum dalam laporan posisi keuangan.

Dalam mengelola permodalan, Perseroan melakukan analisa secara bulanan untuk memastikan bahwa Perseroan tetap mengikuti POJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang diantaranya mengatur ketentuan sebagai berikut:

27. RISK MANAGEMENT (continued)

Operational risk (continued)

Operational Risk Management System (ORMS)

ORMS is an implementation of the obligation of the Company as a Subsidiary of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to carry out operational risk control by recording risk event at the time this risk event occurred, as regulated in Bank Indonesia Regulation No. 8/6/PBI/2006 dated 30 January 2006 regarding "Implementation of Consolidated Risk Management for Banks Performing Control on Subsidiary Companies".

ORMS is a web-based intranet application that is used as an operational risk management tool and is designed for recording the operational risk event at the time of occurrence of this risk event and stored into database. The report stored through the reporting menu would then be transferred to Parent Company's ORMS application as the form of the consolidated Bank's Operational Risk Report.

Capital management

The Company's objectives when managing capital are to safeguard the Company's ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares to reduce debt.

Consistent with other players in the industry, the Company monitors capital on the basis of the *gearing ratio*. This ratio is calculated as net debt (including bonds payable and medium-term notes) divided by total capital. Total capital is calculated as equity shown in the statements of financial position.

In managing capital, the Company conducts monthly analysis to ensure that the Company complies with the POJK No. 35/POJK.05/2018 dated 27 December 2018 regarding Finance Companies which have some provisions as follows:

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen permodalan (lanjutan)

- Modal disetor Perseroan minimum sebesar Rp100.000;
- Ekuitas Perseroan minimum sebesar 50,00% dari modal disetor;
- Jumlah pinjaman yang dimiliki Perseroan dibandingkan modal sendiri dan utang subordinasi dikurangi penyertaan (*gearing ratio*) ditetapkan setinggi-tingginya 10 kali, baik untuk pinjaman luar negeri maupun dalam negeri.

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022
Pinjaman		
Pinjaman yang diterima - neto	18.096.715	14.661.887
Obligasi - neto	5.687.515	4.339.237
Total pinjaman	23.784.230	19.001.124
Jumlah modal	4.029.660	3.092.825
<i>Gearing ratio</i> (tidak diaudit)	5,90	6,14

Perseroan senantiasa menjaga jumlah maksimum *gearing ratio* lebih kecil dari ketentuan yang ditetapkan melalui analisa alternatif pembiayaan baik melalui pinjaman bank, penerbitan obligasi ataupun optimalisasi dana *joint financing*. Perseroan juga menghitung biaya dana dari alternatif pembiayaan yang dipilih untuk memastikan biaya dana tersebut dapat menghasilkan pendapatan maksimum bagi Perseroan.

Informasi lainnya

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang "Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan". Perseroan telah memenuhi jumlah minimal ekuitas dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan. Perseroan telah menghitung beberapa rasio antara lain: (tidak diaudit)

	Persyaratan/ Requirements	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
<i>Gearing ratio</i>	max. 10x	5,90x	6,14x
Rasio permodalan	min. 10%	16,21%	21,77%
Rasio ekuitas terhadap modal disetor	min.50%	1.611,86%	1.237,13%
Rasio <i>Non-Performing Finance</i> - neto	max. 5%	0,48%	0,46%
Rasio <i>Non-Performing Finance</i> - gross	-	0,70%	0,72%
Rasio piutang pembiayaan neto terhadap total aset	min. 40%	93,33%	92,79%
Rasio saldo piutang pembiayaan Neto terhadap total pendanaan	-	116,65%	115,87%
Rasio saldo piutang pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja terhadap total saldo piutang pembiayaan	min. 10%	19,77%	26,56%
Rasio penyertaan langsung	-	0,00%	0,00%

27. RISK MANAGEMENT (continued)

Capital management (continued)

- The Company's paid-up capital of minimum Rp100,000;
- The Company's equity amounting to minimum 50.00% of paid-up capital;
- The amount of the Company's loan to equity and subordinated loan deducted by investment (*gearing ratio*) is maximum 10 times, both for off-shore and on-shore domestic loans.

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	Debt
			Borrowings - net
			Bonds payable - net
Total pinjaman	23.784.230	19.001.124	Total debt
Jumlah modal	4.029.660	3.092.825	Total capital
<i>Gearing ratio</i> (unaudited)	5,90	6,14	Gearing ratio (unaudited)

The Company always maintains the maximum amount of *gearing ratio* at lower level than the applicable regulation by performing an analysis to determine financing alternative whether through the bank loans, bonds issuance or joint financing fund optimization. The Company also calculates the cost of fund of each financing alternative selected by the Company to ensure it could generate a maximum income for the Company.

Other information

Based on POJK No. 35/POJK.05/2018 dated 27 December 2018 regarding "The Business Operation of a Multifinance Company". The Company has complied the minimum amount of equity and Limits for Giving Financing. The Company has calculated ratio as follows: (unaudited)

6,14x	<i>Gearing ratio</i>
21,77%	<i>Capital ratio</i>
1.237,13%	<i>Equity to fully paid capital ratio</i>
0,46%	<i>Non-Performing Finance - net</i>
0,72%	<i>Non-Performing Finance - gross</i>
92,79%	<i>Net financing to asset ratio</i>
115,87%	<i>Net financing receivables to total funding ratio</i>
26,56%	<i>Balance of receivables for investment financing and working capital financing to total balance of the financing receivables</i>
0,00%	<i>Direct participation ratio</i>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan Perseroan memiliki nilai yang hampir sama dengan nilai wajarnya kecuali untuk instrumen berikut:

28. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

As of 31 December 2023 and 2022, the carrying value of the Company's financial assets and liabilities approximates their fair value except for the following financial instruments:

31 Desember/December 31, 2023					
	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial Liabilities at amortized cost</i>	Nilai tercatat/ <i>carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>fair value</i>	
ASET KEUANGAN					FINANCIAL ASSETS
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					Assets for which fair value are disclosed
Piutang pembiayaan konsumen	22.361.823	-	22.361.823	22.753.229	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	5.347.572	-	5.347.572	5.026.849	Finance lease receivables
Anjak piutang	35.322	-	35.322	39.992	Factoring receivables
Total aset keuangan	27.744.717	-	27.744.717	27.820.070	Total financial assets
LIABILITAS KEUANGAN					FINANCIAL LIABILITIES
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan					Liabilities for which fair value are disclosed
Pinjaman yang diterima	-	18.096.715	18.096.715	17.851.258	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	-	5.687.515	5.687.515	5.699.069	Securities issued
Total liabilitas keuangan	-	23.784.230	23.784.230	23.550.327	Total financial liabilities
31 Desember/December 31, 2022					
	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial Liabilities at amortized cost</i>	Nilai tercatat/ <i>carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>fair value</i>	
ASET KEUANGAN					FINANCIAL ASSETS
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					Assets for which fair value are disclosed
Piutang pembiayaan konsumen	16.340.837	-	16.340.837	16.936.440	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	5.643.346	-	5.643.346	5.480.139	Finance lease receivables
Anjak piutang	32.976	-	32.976	32.875	Factoring receivables
Total aset keuangan	22.017.159	-	22.017.159	22.449.454	Total financial assets
LIABILITAS KEUANGAN					FINANCIAL LIABILITIES
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan					Liabilities for which fair value are disclosed
Pinjaman yang diterima	-	14.661.887	14.661.887	14.461.528	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	-	4.339.237	4.339.237	4.406.897	Securities issued
Total liabilitas keuangan	-	19.001.124	19.001.124	18.868.425	Total financial liabilities

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan analisa atas instrumen keuangan tersebut sesuai dengan masing-masing tingkat dalam hirarki nilai wajar:

31 Desember/December 2023					
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Total
ASET KEUANGAN					
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					
Piutang pembiayaan konsumen	22.361.823	-	22.753.229	-	22.753.229
Piutang sewa pembiayaan	5.347.572	-	5.026.849	-	5.026.849
Anjak piutang	35.322	-	39.992	-	39.992
Total aset keuangan	27.744.717	-	27.820.070	-	27.820.070
LIABILITAS KEUANGAN					
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan					
Pinjaman yang diterima	18.096.715	-	17.851.258	-	17.851.258
Surat berharga yang diterbitkan	5.687.515	-	5.699.069	-	5.699.069
Total liabilitas keuangan	23.784.230	-	23.550.327	-	23.550.327

31 Desember/December 2022					
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Total
ASET KEUANGAN					
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					
Piutang pembiayaan konsumen	16.340.837	-	16.936.440	-	16.936.440
Piutang sewa pembiayaan	5.643.346	-	5.480.139	-	5.480.139
Anjak piutang	32.976	-	32.875	-	32.875
Total aset keuangan	22.017.159	-	22.449.454	-	22.449.454
LIABILITAS KEUANGAN					
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan					
Pinjaman yang diterima	14.661.887	-	14.461.528	-	14.461.528
Surat berharga yang diterbitkan	4.339.237	-	4.406.897	-	4.406.897
Total liabilitas keuangan	19.001.124	-	18.868.425	-	18.868.425

Metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar adalah sebagai berikut:

Nilai wajar kas dan setara kas, piutang lain-lain, aset lain-lain, utang usaha, beban bunga yang masih harus dibayar dan utang lain-lain termasuk utang lain-lain terkait sewa mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Nilai wajar piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan, anjak piutang, piutang derivatif, pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Perseroan tidak memiliki perpindahan di antara tingkat hirarki pada tahun 2023 dan 2022.

28. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The tables below present the analysis of the above financial instruments by the level in the fair value hierarchy:

31 Desember/December 2023	
	Total
FINANCIAL ASSETS	
Assets for which fair value are disclosed	
Consumer financing receivables	22.753.229
Finance lease receivables	5.026.849
Factoring receivables	39.992
Total financial assets	27.820.070
FINANCIAL LIABILITIES	
Liabilities for which fair value are disclosed	
Borrowings	17.851.258
Securities issued	5.699.069
Total financial liabilities	23.550.327

31 Desember/December 2022	
	Total
FINANCIAL ASSETS	
Assets for which fair value are disclosed	
Consumer financing receivables	16.936.440
Finance lease receivables	5.480.139
Factoring receivables	32.875
Total financial assets	22.449.454
FINANCIAL LIABILITIES	
Liabilities for which fair value are disclosed	
Borrowings	14.461.528
Securities issued	4.406.897
Total financial liabilities	18.868.425

The following methods and assumptions are used to estimate the fair values:

The fair value of cash and cash equivalents, other receivables, other assets, trade payables, accrued interest expenses and other payables including other payables related to lease approximate their carrying amounts largely due to short-term maturities of these instruments.

The fair value of consumer financing receivables, finance lease receivables, factoring receivables, derivative receivables, borrowings, and securities issued are determined by discounting cash flows using market interest rate as of 31 December 2023 and 2022.

The Company has no transfer between hierarchy level in 2023 and 2022.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. PERJANJIAN KERJASAMA

Pembiayaan Bersama

Perseroan mempunyai perjanjian kerjasama pembiayaan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Pengambilalihan Piutang Pembiayaan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Berdasarkan perjanjian, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk konsumen dari masing-masing pihak adalah minimal 1,00% dari Perseroan dan maksimal 99,00% dari pemberi pembiayaan bersama.

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir melalui amandemen Perjanjian Kerjasama Kendaraan Bermotor dan Perjanjian Kerjasama Pengambilalihan Piutang Pembiayaan antara PT Mandiri Tunas Finance dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tertanggal 31 Maret 2023, dengan fasilitas pembiayaan bersama menjadi sebesar Rp24.000.000 dengan porsi fasilitas pembiayaan bersama sebesar minimal 1,00% dari Perseroan dan maksimal 99,00% dari pemberi pembiayaan bersama. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2024.

Pada tanggal 21 Februari 2022, Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama dalam bentuk pembiayaan *Passenger Vehicle*, *Commercial Vehicle*, dan *Heavy Equipment* kepada debitur komersial Bank Mandiri, dengan fasilitas pembiayaan bersama sebesar Rp3.000.000 dengan porsi fasilitas pembiayaan bersama sebesar minimal 1,00% dari Perseroan dan maksimal 99,00% dari pemberi pembiayaan bersama, dimana Perseroan menanggung risiko kredit dan menerima pendapatan sesuai dengan porsi pembiayaannya. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 20 Februari 2024.

Pada tanggal 31 Mei 2018 dan 26 Juni 2018, Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengambilalihan Piutang Sewa Pembiayaan dengan total fasilitas pembiayaan bersama akan ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan keputusan pemegang kewenangan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dimana Perseroan menanggung risiko kredit dan menerima pendapatan sesuai dengan porsi pembiayaannya.

29. COOPERATION AGREEMENTS

Joint financing

The Company entered into a joint financing agreement and signed a Customer Asset Purchase Agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Based on the agreements, the amount of funds to be financed by each party is a minimum of 1.00% from the Company and a maximum of 99.00% from joint financing providers.

The agreement was amended several times. The latest of which is the amendment of the Joint Financing agreement and a Customer Asset Purchase Agreement between PT Mandiri Tunas Finance and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dated 31 March 2023, with the total joint financing facility to Rp24,000,000 with the portion of joint financing facility minimum of 1.00% from the Company and a maximum of 99.00% from joint financing providers. The agreement is valid up to 28 February 2024.

On 21 February 2022, the Company and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk signed Joint Financing agreement for financing Passenger Vehicle, Commercial Vehicle product, and Heavy equipment to commercial debtors of Bank Mandiri, with the total joint financing facility amounting to Rp3,000,000 with the portion of joint financing facility minimum of 1.00% from the Company and a maximum of 99.00% from joint financing providers, whereby the Company bears the credit risk and receives income from debtors in accordance with its financing portion. This agreement has been extended up to 20 February 2024.

On 31 May 2018 and 26 June 2018, the Company and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk entered into a Cooperation Agreement for Acquisition of Finance Lease Receivables, with the total joint financing facility to be determined from time to time based on the decision of the authority holder at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, whereby the Company bears the credit risk and receives income from debtors in accordance with its financing portion.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. PERJANJIAN KERJASAMA (lanjutan)

Pembiayaan Bersama (lanjutan)

Jumlah pembiayaan bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dikelola oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2023
Piutang pembiayaan konsumen	24.870.958
Piutang sewa pembiayaan	28.009
Rata - rata jangka pembiayaan (tahun)	3-4

Asuransi

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan bekerja sama dengan, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Central Asia, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT Asuransi Artarindo, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi, PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia, PT Asuransi Candi Utama, PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk, PT Multi Artha Guna Tbk (MAG), PT AXA Insurance Indonesia (dahulu PT Mandiri AXA General Insurance), PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Mega Pratama, PT MNC Asuransi Indonesia, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (MPM), PT Pan Pacific Insurance, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Staco Mandiri, PT Asuransi Total Bersama (TOB), PT AXA Mandiri Financial Services, PT Asuransi Ciputra Indonesia, PT Jamkrida Jakarta, PT Avrist General Insurance, PT Asuransi Jasaraharja Putera, PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.

29. COOPERATION AGREEMENTS (continued)

Joint financing (continued)

Total joint financing amount with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk managed by the Company as of 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember/ December 2022	
	22.526.092	Consumer financing receivables
	97.741	Finance lease receivables
	3-4	Average of financing period (years)

Insurance

In the course of business, the Company entered into insurance agreements with PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Central Asia, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT Asuransi Artarindo, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi, PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia, PT Asuransi Candi Utama, PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk, PT Multi Artha Guna Tbk (MAG), PT AXA Insurance Indonesia (formerly PT Mandiri AXA General Insurance), PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Mega Pratama, PT MNC Asuransi Indonesia, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (MPM), PT Pan Pacific Insurance, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Staco Mandiri, PT Asuransi Total Bersama (TOB), PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Asuransi Ciputra Indonesia, PT Jamkrida Jakarta, PT Avrist General Insurance, PT Asuransi Jasaraharja Putera, PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. PERJANJIAN KERJASAMA (lanjutan)

Sewa Gedung

Pada tanggal 31 Agustus 2009, Perseroan menandatangani perjanjian sewa ruangan kantor dengan PT Bumi Daya Plaza yang tidak dapat dibatalkan untuk periode lima tahun. Perjanjian tersebut akan berakhir pada tahun 2014 dengan ketentuan pembayaran di muka sebesar Rp507 untuk setiap jangka waktu 3 bulan dan akan ditinjau kembali setiap satu tahun sekali dengan kenaikan tarif maksimal sebesar 5,00% per tahun.

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada tanggal 15 Februari 2022, Perseroan memperpanjang perjanjian sewa ruangan kantor ini dengan masa sewa 5 tahun dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan pembayaran di muka sebesar Rp12.899 per tahun. Pada tanggal 1 November 2022, terdapat addendum perjanjian penambahan obyek sewa kantor ini dengan PT Bumi Daya Plaza yang tidak dapat dibatalkan. Perjanjian tersebut akan berakhir pada 31 Desember 2026 dengan ketentuan tambahan pembayaran di muka sebesar Rp1.793 per tahun.

Pada tanggal 27 Januari dan 22 Juni 2023, terdapat addendum perjanjian penambahan obyek sewa kantor ini dengan PT Bumi Daya Plaza yang tidak dapat dibatalkan. Perjanjian tersebut akan berakhir pada 31 Desember 2026 dan 31 Agustus 2026 dengan ketentuan tambahan pembayaran di muka sebesar masing-masing Rp240 dan Rp2.366 per tahun.

Program MTF Mantap Combo

Pada tanggal 17 Maret 2020, Perseroan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama untuk program pembiayaan kendaraan bagi calon debitur dengan pekerjaan aparatur sipil negara (ASN) yang akan memasuki masa pensiun (maksimal 5 tahun menjelang usia pensiun) dengan tenor maksimum 10 (sepuluh) tahun. Perseroan bertindak sebagai pemutus permohonan pembiayaan dan akan mengelola pembiayaan selama debitur ASN dalam masa aktif sebagai pegawai. Selanjutnya, ketika memasuki usia pensiun pembiayaan akan dialihkan untuk dikelola oleh PT Bank Mandiri Taspen. Perjanjian ini berlaku sampai tanggal 17 Maret 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo piutang pembiayaan konsumen dari program ini masing-masing adalah sejumlah Rpnil.

29. COOPERATION AGREEMENTS (continued)

Building rental

On 31 August 2009, the Company signed an office space rental agreement with PT Bumi Daya Plaza which is non-cancellable for the period of five years and will expire in 2014. The Company is required to pay in advance of Rp507 for each quarter. The tariff will be reviewed on annual basis with a maximum tariff increase of 5.00% per annum.

The agreement was amended several times. On 15 February 2022, the Company is renewing this office space rental agreement for the period of 5 years from 1 January 2022 until 31 December 2026 in which the Company is required to pay in advance an amount of Rp12,899 for each year. On 1 November 2022, there was an addendum agreement to addition rental office space with PT Bumi Daya Plaza which is non-cancellable until 31 December 2026 in which the Company is required to pay the addition in advance an amount of Rp1,793 for each year.

On 27 January and 22 June 2023, there was an addendum agreement to addition rental office space with PT Bumi Daya Plaza which is non-cancellable until 31 December 2026 and 31 August 2026 in which the Company is required to pay the addition in advance an amount of Rp240 and Rp2,366 for each year, respectively.

MTF Mantap Combo Program

On 17 March 2020, the Company signed a cooperation agreement for the vehicle financing program for prospective borrowers with the work of the state civil service (ASN) who will retire (maximum 5 years before retirement age) with a maximum tenor of 10 (ten) years. The Company acts as a decision maker for financing applications and will manage the financing for ASN debtors in the active period as employees. Then, when entering retirement age the financing will be transferred to be managed by PT Bank Mandiri Taspen. This agreement is valid until 17 March 2025.

On 31 December 2023 and 2022, total consumer financing receivables through this program amounted to Rpnil, respectively.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. SEGMENT OPERASI

Segmen operasi Perseroan dibagi berdasarkan kelompok nasabah utama dan produk yang disebut, Fleet dan ritel. Dalam menentukan hasil segmen, beberapa akun aset dan liabilitas serta pendapatan dan biaya yang terkait diatribusikan ke masing-masing segmen berdasarkan kebijakan pelaporan internal manajemen.

Ringkasan berikut menjelaskan operasi masing-masing segmen dalam pelaporan segmen Perseroan:

- **Fleet**
Termasuk dalam pelaporan segmen fleet adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan konsumen untuk nasabah dari pembiayaan untuk nasabah korporasi.
- **Ritel**
Termasuk dalam pelaporan segmen ritel adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan konsumen untuk nasabah individu di Regional I dan II (Sumatera), Regional III dan IV (Jabodetabek), Regional V (Jawa Barat), Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta), Regional VII (Jawa Timur, Bali, Kupang, Mataram), Regional VIII (Kalimantan) dan Regional IX (Sulawesi, Ambon, Papua, Sorong).
- **Lain-lain**
Termasuk dalam pelaporan segmen lain-lain adalah informasi pelaporan segmen operasi terkait dengan aktivitas kantor pusat.

Informasi mengenai hasil dari masing-masing bisnis segmen disajikan di bawah ini. Kinerja diukur berdasarkan laba segmen sebelum pajak penghasilan, sebagaimana dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang ditelaah oleh manajemen Perseroan. Keuntungan segmen digunakan untuk mengukur kinerja dimana manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi hasil segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

30. OPERATING SEGMENT

The Company's operating segments represent the Company's key customer and product groups namely, Fleet and Retail. In determining the segment results, certain assets and liabilities and related revenues and expenses are attributed to each segment based on internal management reporting policies.

The following summary describes the operations in each of the Company's reportable segments:

- **Fleet**
Included in the fleet segment reporting are operating segments assessment indicators that can actually be attributed as part of financing to corporate customers.
- **Retail**
Included in the retail segment reporting are operating segments assessment indicators that can actually be attributed as part of consumer financing to individual customers at Region I and II (Sumatera), Region III and IV (Jabodetabek), Region V (Jawa Barat), Region VI (Jawa Tengah, Yogyakarta), Region VII (Jawa Timur, Bali, Kupang, Mataram), Region VIII (Kalimantan), and Region IX (Sulawesi, Ambon Papua, Sorong).
- **Others**
Included in the other segment reporting is reporting segment information associated with head office activities.

Information regarding the results of each reportable segment is included below. Performance is measured based on segment profit before income tax, as included in the internal management reports that are reviewed by the Company's management. Segment profit is used to measure performance of that business segment as management believes that such information is the most relevant in evaluating the results of those segments relative to other entities that operate within these industries.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

30. OPERATING SEGMENT (continued)

31 Desember/December 2023							
Informasi segmen usaha	Ritel/Retail		Fleet/Fleet		Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	Information by business segments
	Mobil/ Car	Motor/ Motorcycle	Mobil/ Car	Motor/ Motorcycle			
Pendapatan							Revenue
Pembiayaan konsumen	2.715.052	106	285.142	50	-	3.000.350	Consumer financing
Sewa pembiayaan	206.950	-	445.801	-	-	652.751	Financial lease
Anjak piutang	-	-	909	-	-	909	Factoring
Simpanan bank	13.211	-	3.923	-	-	17.134	Deposit in bank
Lain-lain - neto	1.011.717	378	69.644	17	-	1.081.756	Others - net
Total pendapatan	3.946.930	484	805.419	67	-	4.752.900	Total revenue
Beban							Expenses
Beban keuangan	(1.167.286)	(2)	(342.866)	(11)	-	(1.510.165)	Financial charges
Beban gaji dan tunjangan	(747.809)	(1.017)	(53.368)	-	-	(802.194)	Salaries and benefits
Beban umum dan administrasi	(328.573)	273	(21.536)	-	-	(349.836)	General and administration
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(574.622)	3	(24.851)	(9)	-	(599.479)	Provision for impairment losses
Total beban	(2.818.290)	(743)	(442.621)	(20)	-	(3.261.674)	Total expenses
Laba (rugi) sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan	1.128.640	(259)	362.798	47	-	1.491.226	Income (loss) before final tax and income tax expense
Total aset	22.827.261	95	5.142.242	171	1.757.623	29.727.392	Total assets
Total liabilitas	1.358.244	1.866	299.780	247	24.037.595	25.697.732	Total liabilities

31 Desember/December 2022							
Informasi segmen usaha	Ritel/Retail		Fleet/Fleet		Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	Information by business segments
	Mobil/ Car	Motor/ Motorcycle	Mobil/ Car	Motor/ Motorcycle			
Pendapatan							Revenue
Pembiayaan konsumen	2.179.554	3	257.289	158	-	2.437.004	Consumer financing
Sewa pembiayaan	97.361	-	468.168	-	-	565.529	Financial lease
Anjak piutang	-	-	9.715	-	-	9.715	Factoring
Simpanan bank	10.369	-	4.793	1	-	15.163	Deposit in bank
Lain-lain - neto	858.085	503	45.483	26	-	904.097	Others - net
Total pendapatan	3.145.369	506	785.448	185	-	3.931.508	Total revenue
Beban							Expenses
Beban keuangan	(856.537)	(4)	(392.938)	(93)	-	(1.249.572)	Financial charges
Beban gaji dan tunjangan	(759.613)	(1.949)	(61.844)	-	-	(823.406)	Salaries and benefits
Beban umum dan administrasi	(303.271)	(524)	(23.639)	(2)	-	(327.436)	General and administration
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(443.390)	-	(123.716)	6	-	(567.100)	Provision for impairment losses
Total beban	(2.362.811)	(2.477)	(602.137)	(89)	-	(2.967.514)	Total expenses
Laba (rugi) sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan	782.558	(1.971)	183.311	96	-	963.994	Income (loss) before final tax and income tax expense
Total aset	15.789.086	157	6.505.706	859	1.433.158	23.728.966	Total assets
Total liabilitas	988.344	2.480	328.548	311	19.316.458	20.636.141	Total liabilities

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

30. OPERATING SEGMENT (continued)

Informasi wilayah geografis adalah sebagai berikut:

Geographical information is as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2023	2022	
Pendapatan			Revenue
Regional I (Sumatera)	313.900	248.816	<i>Region I (Sumatera)</i>
Regional II (Sumatera)	409.839	388.458	<i>Region II (Sumatera)</i>
Regional III (Jabodetabek)	454.742	366.113	<i>Region III (Jabodetabek)</i>
Regional IV (Jabodetabek)	467.826	344.485	<i>Region IV (Jabodetabek)</i>
Regional V (Jawa Barat)	312.041	255.174	<i>Region V (Jawa Barat)</i>
Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)	320.989	275.078	<i>Region VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)</i>
Regional VII (Jawa Timur, Bali, Kupang, Mataram)	487.843	380.880	<i>Region VII (Jawa Timur, Bali, Kupang, Mataram)</i>
Regional VIII (Kalimantan)	683.728	502.048	<i>Region VIII (Kalimantan)</i>
Regional IX (Sulawesi, Ambon, Papua, Sorong)	496.506	384.823	<i>Region IX (Sulawesi, Ambon, Papua, Sorong)</i>
Fleet	805.486	785.633	<i>Fleet</i>
Total pendapatan	4.752.900	3.931.508	Total revenue
Beban			Expenses
Regional I (Sumatera)	(216.657)	(175.805)	<i>Region I (Sumatera)</i>
Regional II (Sumatera)	(344.485)	(315.651)	<i>Region II (Sumatera)</i>
Regional III (Jabodetabek)	(359.248)	(300.883)	<i>Region III (Jabodetabek)</i>
Regional IV (Jabodetabek)	(352.327)	(273.763)	<i>Region IV (Jabodetabek)</i>
Regional V (Jawa Barat)	(248.482)	(210.096)	<i>Region V (Jawa Barat)</i>
Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)	(235.793)	(219.808)	<i>Region VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)</i>
Regional VII (Jawa Timur, Bali, Kupang, Mataram)	(336.991)	(301.041)	<i>Region VII (Jawa Timur, Bali, Kupang, Mataram)</i>
Regional VIII (Kalimantan)	(397.296)	(295.086)	<i>Region VIII (Kalimantan)</i>
Regional IX (Sulawesi, Ambon, Papua, Sorong)	(327.754)	(273.155)	<i>Region IX (Sulawesi, Ambon, Papua, Sorong)</i>
Fleet	(442.641)	(602.226)	<i>Fleet</i>
Total beban	(3.261.674)	(2.967.514)	Total expenses
Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan	1.491.226	963.994	Income before final tax and income tax expense

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Informasi wilayah geografis adalah sebagai berikut:
(lanjutan)

	<u>31 Desember/ December 2023</u>	<u>31 Desember/ December 2022</u>
Aset		
Regional I (Sumatera)	1.745.446	1.200.186
Regional II (Sumatera)	1.907.732	1.749.192
Regional III (Jabodetabek)	3.118.550	2.029.203
Regional IV (Jabodetabek)	3.345.820	2.178.293
Regional V (Jawa Barat)	1.706.071	1.244.413
Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)	1.743.026	1.369.361
Regional VII (Jawa Timur, Bali, Kupang, Mataram)	2.841.407	1.968.517
Regional VIII (Kalimantan)	3.650.156	2.291.273
Regional IX (Sulawesi, Ambon, Papua, Sorong)	2.769.148	1.758.805
Fleet	5.142.413	6.506.565
Lain-lain	1.757.623	1.433.158
Total aset	<u>29.727.392</u>	<u>23.728.966</u>

	<u>31 Desember/ December 2023</u>	<u>31 Desember/ December 2022</u>
Liabilitas		
Regional I (Sumatera)	142.209	91.668
Regional II (Sumatera)	140.667	113.875
Regional III (Jabodetabek)	155.489	110.322
Regional IV (Jabodetabek)	148.257	104.280
Regional V (Jawa Barat)	105.293	102.707
Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)	132.786	106.334
Regional VII (Jawa Timur, Bali, Kupang, Mataram)	161.395	125.431
Regional VIII (Kalimantan)	242.343	151.042
Regional IX (Sulawesi, Ambon, Papua, Sorong)	131.671	85.165
Fleet	300.027	328.859
Lain-lain	24.037.595	19.316.458
Total liabilitas	<u>25.697.732</u>	<u>20.636.141</u>

31. LIABILITAS KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 Perseroan tidak mempunyai liabilitas kontinjensi yang signifikan.

30. OPERATING SEGMENT (continued)

Geographical information is as follows: (continued)

	<u>31 Desember/ December 2023</u>	<u>31 Desember/ December 2022</u>
Assets		
Regional I (Sumatera)	1.745.446	1.200.186
Regional II (Sumatera)	1.907.732	1.749.192
Regional III (Jabodetabek)	3.118.550	2.029.203
Regional IV (Jabodetabek)	3.345.820	2.178.293
Regional V (Jawa Barat)	1.706.071	1.244.413
Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)	1.743.026	1.369.361
Regional VII (Jawa Timur, Bali, Kupang, Mataram)	2.841.407	1.968.517
Regional VIII (Kalimantan)	3.650.156	2.291.273
Regional IX (Sulawesi, Ambon, Papua, Sorong)	2.769.148	1.758.805
Fleet	5.142.413	6.506.565
Others	1.757.623	1.433.158
Total assets	<u>29.727.392</u>	<u>23.728.966</u>

	<u>31 Desember/ December 2023</u>	<u>31 Desember/ December 2022</u>
Liabilities		
Regional I (Sumatera)	142.209	91.668
Regional II (Sumatera)	140.667	113.875
Regional III (Jabodetabek)	155.489	110.322
Regional IV (Jabodetabek)	148.257	104.280
Regional V (Jawa Barat)	105.293	102.707
Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)	132.786	106.334
Regional VII (Jawa Timur, Bali, Kupang, Mataram)	161.395	125.431
Regional VIII (Kalimantan)	242.343	151.042
Regional IX (Sulawesi, Ambon, Papua, Sorong)	131.671	85.165
Fleet	300.027	328.859
Others	24.037.595	19.316.458
Total liabilities	<u>25.697.732</u>	<u>20.636.141</u>

31. CONTINGENT LIABILITIES

The Company does not have any significant contingent liabilities as of 31 December 2023 and 2022.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

	1 Januari/ January 2023	Arus Kas/ Cash Flows	Perubahan non kas/ Non-cash activities		31 Desember/ December 2023	
			Pergerakan valuta asing/ Movement of foreign currency	Lainnya/ Others		
Pinjaman yang diterima	14.693.451	3.447.326	(7.125)	-	18.133.652	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	4.344.905	1.350.845	-	-	5.695.750	Securities issued
Liabilitas sewa	40.043	(15.668)	-	15.818	40.193	Lease liabilities
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	19.078.399	4.782.503	(7.125)	15.818	23.869.595	Total liabilities from financing activities

32. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

The reconciliation of liabilities that arise from financing activities are as follows:

	1 Januari/ January 2022	Arus Kas/ Cash Flows	Perubahan nonkas/ Non-cash activities		31 Desember/ December 2022	
			Pergerakan valuta asing/ Movement of foreign currency	Lainnya/ Others		
Pinjaman yang diterima	9.590.410	5.071.777	31.264	-	14.693.451	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	5.498.850	(1.153.945)	-	-	4.344.905	Securities issued
Liabilitas sewa	34.177	(10.036)	-	15.902	40.043	Lease liabilities
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	15.123.437	3.907.796	31.264	15.902	19.078.399	Total liabilities from financing activities

33. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Berikut ini adalah beberapa Standar Akuntansi Keuangan, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan dan amandemen yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Perseroan namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun 2023:

- Amandemen PSAK 73: Liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik

Amandemen ini memberikan penegasan atas pengukuran selanjutnya untuk aset hak-guna dan liabilitas sewa dari transaksi jual dan sewa-balik. Penjual-penyewa mengukur liabilitas sewa dengan suatu cara sehingga penjual-penyewa tidak akan mengakui jumlah keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna atas aset yang masih dipertahankan.

Manajemen masih melakukan persiapan dalam penerapan standar baru tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Perseroan pada saat efektif, dan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan masih diestimasi sampai tanggal laporan keuangan.

33. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

The following are several Financial Accounting Standards, Interpretations of Financial Accounting Standards and amendment issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK) that are considered relevant to the financial reporting of the Company but are not yet effective for 2023 financial statements:

- Amendment of PSAK 73: Lease liabilities in a sale and Leaseback

This amendment provides affirmation of the subsequent measurement of lease rights and liabilities from sale and leaseback transactions. Lessor-lessee measures lease liability in such a way that the lessor-lessee will not recognize the amount of gain or loss associated with the right of use to the retained asset.

The management intends to adopt these new standards that are considered relevant to the Company when they become effective, and the impact to the financial position and performance of the Company is still being estimated until the report date.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. REKLASIFIKASI AKUN

Akun tertentu dalam laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian akun-akun pada laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

	Dilaporkan sebelumnya/ As previously reported	Reklasifikasi/ Reclassifications	Dilaporkan saat ini/ As currently reported	
				31 December 2022
				Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
				Revenue
Pendapatan				Others - net
Lain-lain - neto	751.430	152.667	904.097	
				Expenses
Beban				Provision for impairment losses
Penyisihan kerugian penurunan nilai				Consumer finance
Pembiayaan konsumen	(352.965)	(134.639)	(487.604)	Finance lease
Sewa pembiayaan	(31.528)	(18.028)	(49.556)	

34. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Certain accounts in the financial statements as of 31 December 2022 had been reclassified to conform with the presentation of accounts in the financial statements as of 31 December 2023 as follows:

35. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang diselesaikan dan disetujui oleh Direksi Perseroan untuk diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2024.

35. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Company is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which were completed and authorized for issuance by the Board of Directors on 22 January 2024.

Referensi Silang Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021

Keterangan Isi Laporan Tahunan		Lokasi Halaman
1. Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai:		
a.	ikhtisar data keuangan penting;	12
b.	informasi saham (jika ada);	N/A
c.	laporan Direksi;	36
d.	laporan Dewan Komisaris;	32
e.	profil Emiten atau Perusahaan Publik;	50
f.	analisis dan pembahasan manajemen;	100 - 141
g.	tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	142 - 283
h.	tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;	284 - 289
i.	laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	290 - 432
j.	surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.	44 - 45
2. Uraian Isi Laporan Tahunan		
a.	Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	
1)	pendapatan/penjualan;	12
2)	laba bruto;	12
3)	laba (rugi);	12
4)	jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan <i>non-controlling</i> ;	12
5)	total laba (rugi) komprehensif	12
6)	jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	12
7)	laba (rugi) per saham;	12
8)	jumlah aset;	14
9)	jumlah liabilitas;	15
10)	jumlah ekuitas;	15
11)	rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	17
12)	rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	17
13)	rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan;	17
14)	rasio lancar;	17
15)	rasio liabilitas terhadap ekuitas;	17
16)	rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	17
17)	informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya.	17
b.	Informasi Saham	
	Informasi Saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:	
1)	saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	

Keterangan Isi Laporan Tahunan		Lokasi Halaman
	(a) jumlah saham yang beredar;	18
	(b) kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	N/A
	(c) harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	N/A
	(d) volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	N/A
	Informasi pada huruf b), c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di Bursa Efek;	
2)	dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	
	(a) tanggal pelaksanaan aksi korporasi;	18
	(b) rasio pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham;	18
	(c) jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi;	18
	(d) jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan	18
	(e) harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	18
3)	dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>), dan/atau penghapusan pencatatan saham (<i>delisting</i>) dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau penghapusan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut; dan	N/A
4)	dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau penghapusan pencatatan saham (<i>delisting</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau penghapusan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut;	N/A
c.	Laporan Direksi	
	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	
1)	kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	
	(a) strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	38
	(b) peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	38
	(c) proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	38
	(d) perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan	38
	(e) kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	38
2)	gambaran tentang prospek usaha;	39
3)	penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	39
d.	laporan Dewan Komisaris	
	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	
1)	penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi;	33

Keterangan Isi Laporan Tahunan		Lokasi Halaman
2)	pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan	33
3)	pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	34
e.	Profil Emiten atau Perusahaan Publik	
	Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:	
1)	nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	50
2)	akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	
	(a) alamat;	
	(b) nomor telepon;	
	(c) alamat surat elektronik; dan	
	(d) alamat Situs Web;	50
3)	riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	51
4)	visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan;	56-57
5)	kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	58-59
6)	wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan;	92-99
7)	struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan;	60-61
8)	daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan;	59
9)	profil Direksi, paling sedikit memuat:	
	(a) nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;	66-69
	(b) foto terbaru;	66-69
	(c) usia;	66-69
	(d) kewarganegaraan;	66-69
	(e) riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;	66-69
	(f) riwayat jabatan, meliputi informasi:	
	(1) dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	66-69
	(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	66-69
	(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	66-69
	(g) hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan	66-69

Keterangan Isi Laporan Tahunan		Lokasi Halaman
	(h) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	66-69
10)	profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	
	(a) nama dan jabatan;	62-65
	(b) foto terbaru;	62-65
	(c) usia;	62-65
	(d) kewarganegaraan;	62-65
	(e) riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;	62-65
	(f) riwayat jabatan, meliputi informasi:	62-65
	(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris	62-65
	(2) dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	62-65
	(3) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	62-65
	(4) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	62-65
	(g) hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut;	62-65
	(h) pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan	65
	(i) perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	62-65
11)	dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	165
12)	jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku;	74-77
13)	nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari:	
	(a) pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;	81
	(b) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan"	81
	(c) kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.	81

Keterangan Isi Laporan Tahunan		Lokasi Halaman
14)	persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut."	81
15)	jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	
	(a) kepemilikan institusi lokal;	81
	(b) kepemilikan institusi asing;	81
	(c) kepemilikan individu lokal; dan	81
	(d) kepemilikan individu asing;	81
16)	informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	81
17)	nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut."	87
18)	kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada);	N/A
19)	informasi pencatatan Efek lainnya selain Efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama Efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbalance hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada);	85-86
20)	informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi:	
	(a) nama dan alamat;	87
	(b) periode penugasan;	87
	(c) informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan;	87
	(d) biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan	87
	(e) dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel.	87
21)	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	87
f.	Analisis dan Pembahasan Manajemen	
	Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	

Keterangan Isi Laporan Tahunan		Lokasi Halaman
1)	Tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	
	(a) produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	102-115
	(b) pendapatan/penjualan; dan	102-115
	(c) profitabilitas;	102-115
2)	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	
	(a) aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	116-117
	(b) liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;	116-117
	(c) ekuitas;	116-117
	(d) pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan	118-119
	(e) arus kas;	120-122
3)	Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	123
4)	Tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	125-127
5)	Struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure</i>) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	128-129
6)	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:	
	(a) tujuan dari ikatan tersebut;	129
	(b) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;	129
	(c) mata uang yang menjadi denominasi; dan	129
	(d) langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	129
7)	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	
	(a) jenis investasi barang modal;	129
	(b) tujuan investasi barang modal; dan	129
	(c) nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	129
8)	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	130
9)	Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	131
10)	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	
	(a) pendapatan/penjualan;	130-131
	(b) laba (rugi);	130-131
	(c) struktur modal (<i>capital structure</i>); atau	130-131
	(d) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	130-131
11)	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	

Keterangan Isi Laporan Tahunan		Lokasi Halaman
	(a) pendapatan/penjualan;	131
	(b) laba (rugi);	131
	(c) struktur modal (capital structure);	131
	(d) kebijakan dividen; atau	131
	(e) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	131
12)	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	103
13)	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	
	(a) kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih;	132
	(b) tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;	132
	(c) jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan	132
	(d) jumlah dividen per tahun yang dibayar; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	132
14)	Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:	
	(a) dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan	133-134
	(b) dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	134
15)	informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/ peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi Afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:	
	(a) tanggal, nilai, dan objek transaksi;	134-137
	(b) nama pihak yang melakukan transaksi;	134-137
	(c) sifat hubungan afiliasi (jika ada);	134-137
	(d) penjelasan mengenai kewajaran transaksi;	134-137
	(e) pemenuhan ketentuan terkait; dan	134-137
	(f) dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:	
	(1) pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>armslength principle</i>); dan	N/A
	(2) peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>armslength principle</i>);	N/A

Keterangan Isi Laporan Tahunan		Lokasi Halaman
	(g) untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.	N/A
	(h) untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut;	N/A
	(i) dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	N/A
16)	perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	138
17)	perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);	139
g.	Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik	
	Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	
1)	RUPS, paling sedikit memuat:	
	(a) Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:	
	(1) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan	156-159
	(2) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan;	160
	(b) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	N/A
2)	Direksi, paling sedikit memuat:	
	(a) tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel."	171-173
	(b) pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi;	171
	(c) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel."	184
	(d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:	174
	(1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan	174
	(2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada);	174
	(e) penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:	

Keterangan Isi Laporan Tahunan		Lokasi Halaman
	(1) prosedur penilaian kinerja; dan	177
	(2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	177
	(f) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	N/A
3)	Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	
	(a) tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	166-167
	(b) pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris;	165
	(c) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel."	183
	(d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	77
	(1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan	167
	(2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada);	77
	(e) penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	177
	(1) prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;	177-178
	(2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	177-178
	(3) pihak yang melakukan penilaian; dan	177-178
	(f) penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	177-178
	(1) prosedur penilaian kinerja; dan	177-178
	(2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;	177-178
4)	Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	
	(a) prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan	178
	(b) prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:	
	(1) prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;	180
	(2) struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/ bonus dan lainnya; dan	180
	(3) besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	182
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	
5)	Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	
	(a) nama;	N/A
	(b) dasar hukum pengangkatan Dewan Pengawas Syariah;	N/A
	(c) periode penugasan Dewan Pengawas Syariah;	N/A

Keterangan Isi Laporan Tahunan		Lokasi Halaman
	(d) tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; dan	N/A
	(e) frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	N/A
6)	Komite Audit, paling sedikit memuat:	
	(a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	194-196
	(b) usia;	194-196
	(c) kewarganegaraan;	194-196
	(d) riwayat pendidikan;	194-196
	(e) riwayat jabatan, meliputi informasi:	
	(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	194
	(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	194-196
	(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	194-196
	(f) periode dan masa jabatan anggota Komite Audit;	331
	(g) pernyataan independensi Komite Audit;	196
	(h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	198
	(i) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut; dan	199
	(j) pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Komite Audit;	199-201
7)	Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	
	(a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	201-202
	(b) usia;	201-202
	(c) kewarganegaraan;	201-202
	(d) riwayat pendidikan;	201-202
	(e) riwayat jabatan, meliputi informasi:	201-202
	(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	201-202
	(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	201-202
	(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	201-202
	(f) periode dan masa jabatan anggota komite;	201-202
	(g) pernyataan independensi komite;	202
	(h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	204
	(i) uraian tugas dan tanggung jawab;	203
	(j) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite;	202
	(k) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;	204
	(l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; dan	205

Keterangan Isi Laporan Tahunan		Lokasi Halaman
	(m) dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:	N/A
	(1) alasan tidak dibentuknya komite; dan	N/A
	(2) pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;	N/A
8)	Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	
	(a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	205
	(b) usia;	206
	(c) kewarganegaraan;	206
	(d) riwayat pendidikan;	206
	(e) riwayat jabatan, meliputi informasi:	206
	(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	206
	(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	206
	(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	206
	(f) periode dan masa jabatan anggota komite;	206
	(g) pernyataan independensi komite;	207
	(h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	208
	(i) uraian tugas dan tanggung jawab;	207-208
	(j) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite;	207
	(k) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan	208-209
	(l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;	209
9)	Sekretaris Perusahaan, paling sedikit memuat:	
	(a) nama;	217
	(b) domisili;	217
	(c) riwayat jabatan, meliputi informasi:	
	(1) dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan	217
	(2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	217
	(d) riwayat pendidikan;	217
	(e) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku; dan	219
	(f) uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku;	219
10)	Unit Audit Internal, paling sedikit memuat:	
	(a) nama kepala Unit Audit Internal;	213
	(b) riwayat jabatan, meliputi informasi:	213

Keterangan Isi Laporan Tahunan		Lokasi Halaman
	(1) dasar hukum penunjukan sebagai kepala Unit Audit Internal; dan	213
	(2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	213
	(c) kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	213
	(d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku;	234-235
	(e) struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;	232
	(f) uraian tugas dan tanggung jawab;	234
	(g) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Unit Audit Internal; dan	233
	(h) uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit;	236
11)	Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	
	(a) pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan lainnya; dan	245
	(b) tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal;	246
	(c) pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;	246
12)	Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	
	(a) gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	237-239
	(b) jenis risiko dan cara pengelolaannya;	240-242
	(c) tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan	242
	(d) pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;	242
13)	Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat:	
	(a) pokok perkara/gugatan;	247-251
	(b) status penyelesaian perkara/gugatan; dan	247-251
	(c) pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	247-251
14)	Informasi tentang sanksi administratif / yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	251
15)	Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	
	(a) pokok-pokok kode etik;	257
	(b) bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	257
	(c) pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	257

Keterangan Isi Laporan Tahunan		Lokasi Halaman
16)	Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/MSOP</i>) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock ownership program/ESOP</i>); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/MSOP</i>) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock ownership program/ESOP</i>), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat:	133
	(a) jumlah saham dan/atau opsi;	N/A
	(b) jangka waktu pelaksanaan;	N/A
	(c) persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	N/A
	(d) harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan	N/A
17)	Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai:	
	(a) kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan	192
	(b) pelaksanaan atas kebijakan dimaksud;	192
18)	Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	
	(a) cara penyampaian laporan pelanggaran;	260
	(b) perlindungan bagi pelapor;	261
	(c) penanganan pengaduan;	261
	(d) pihak yang mengelola pengaduan; dan	261
	(e) hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:	
	(1) jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan	261
	(2) tindak lanjut pengaduan;	261
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>), maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	N/A
19)	Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	
	(a) program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan	258
	(b) pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	259-260
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud.	N/A
20)	Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	
	(a) pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	152
	(b) penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada);	152
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	

Keterangan Isi Laporan Tahunan		Lokasi Halaman
h.	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik	
	Bagian Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik disajikan dalam bentuk Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Reporting</i>) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini.	
i	Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit	
	Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	290-432
	Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek.	293
j	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan	44-45
	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	44-45

Tumbuh Kuat dan Berkelanjutan



PT Mandiri Tunas Finance

Graha Mandiri Lt. 3A
Jl. Imam Bonjol No. 61
Jakarta 10310
Tel. (62-21) 2305608
Fax. (62-21) 2305618